

DAFTAR ISI

Halaman:

DAFTAR ISI	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAMBORA 2023	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	iii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
C. NERACA	
D. LAPORAN OPERASIONAL	
E. LAPORAN ARUS KAS	
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	



**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ALAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 terdiri dari dua laporan yaitu:

- i. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan balasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat; dan
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk sebagai komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat.
- ii. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Rangkuman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya.





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengendalian dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Alokasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian internal yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah satu material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta melaksanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektifitas pengendalian internal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta pertambahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.3.a atas Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjelaskan bahwa saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp496.522.396,09 merupakan saldo DAK, Saldo DAK seharusnya sebesar Rp6.137.299.276,00. Selain itu, saldo BKK yang seharusnya tersedia sebesar Rp8.000.000.000,00, sehingga terdapat selisih DAK sebesar Rp5.640.776.879,91 dan BKK sebesar Rp8.000.000.000,00. Selisih tersebut terjadi karena digunakannya DAK dan DKK oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membiayai kegiatan belanja yang tidak tersedia dananya.

Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 43.B/LHP/XV/ULPIDG/5/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 15 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSEA
Register Negara Akuntan No. 8037



BUPATI LIMA PULUH KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Laporan Arus Kas (LAK); (d) Neraca; (e) Laporan Operasional (LO); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan, perubahan saldo anggaran, arus kas, posisi keuangan, kegiatan operasional dan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, 15 Mei 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DHANDARO RAJO

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Lima Puluh Kota Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Keakuratan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepastian terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Lima Puluh Kota yang memiliki 43 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Lima Puluh Kota yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2022;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan SAL (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;

- c. Kesajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Penjualan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022.
- d. Kelengkapan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan L-KPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pengujian sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan L-KPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Lima Puluh Kota Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analisis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dan manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta ketidaklengkapan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentartanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kesajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. **Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan selama 51 hari mulai tanggal 1 sampai dengan 24 Februari 2023 dan 13 Maret sampai dengan 1 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 21/ST/XVIII.PDG/01/2023, Nomor 23/ST/XVIII.PDG/01/2023, dan Nomor 152/ST/XVIII.PDG/03/2023.

8. **Batasan Pemeriksaan**

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen. Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya pelanggaran-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan jika ada pelanggaran-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/simpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menjamin kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2022 dan 2021

(Satuan: Rp.ribu)

	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ALOI DAERAH					
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1	46.463.577.000,00	20.017.228.440,00	43,07	21.405.201.894,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.2	7.063.960.000,00	3.245.674.670,00	45,94	4.372.121.022,00
4.1.3	Pendapatan Insentif Pengabdian Masyarakat dan Hibah Nongovernmental	5.1.3	4.400.200.000,00	3.981.200.000,00	90,25	3.718.415.419,00
4.1.4	Pendapatan Asli Daerah lainnya	5.1.4	55.981.011.400,00	48.801.227.222,94	87,17	51.745.344.600,96
	JUMLAH PENDAPATAN ALOI DAERAH		113.907.748.400,00	62.965.327.499,94	55,36	71.269.762.936,96
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA					
4.2.1	Transfer Umum dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Lain					
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - PPh	5.1.5	3.579.324.000,00	12.287.540.489,00	343,70	16.487.086.122,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan - LRA	5.1.5	5.070.000.000,00	4.407.087.202,00	86,92	3.544.403.591,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum - LRA	5.1.7	888.888.000,00	582.796.100,00	65,56	655.782.071.000,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus - LRA	5.1.8	114.478.134,00	86.518.202.416,00	75,58	72.265.497.499,00
4.2.1.05	Dana Alokasi Khusus - Lainnya	5.1.9	217.704.000,00	181.481.151.865,00	83,36	153.431.028.000,00
	Sub Jumlah		1.024.394.242,00	699.529.262.892,00	68,34	612.371.888.242,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
4.2.2.01	Dana Insentif - LRA	5.1.10	74.850.448.000,00	74.850.448.000,00	100,00	155.040.051.200,00
	Sub Jumlah		74.850.448.000,00	74.850.448.000,00	100,00	155.040.051.200,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA					
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA	5.1.11	67.009.447.644,00	64.957.910.775,00	96,94	56.155.818.387,00
4.2.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Lain - LRA	5.1.12	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah		75.029.448.644,00	72.667.913.775,00	96,84	56.155.818.387,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.101.140.181.644,00	1.176.046.626.668,00	106,78	1.161.177.899.635,00
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
4.3.1	Pendapatan Hibah					
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Pemerintah LRA	5.1.13	15.370.228.917,00	14.499.513.770,00	94,33	18.762.501.744,00
4.3.1.02	Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.14	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	Sub Jumlah		15.410.228.917,00	14.539.513.770,00	94,33	18.762.501.744,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.250.158.158.961,00	1.225.539.498.834,94	97,98	1.281.792.298.925,96
5	BIAYA					
5.1	BIAYA OPERASI					
5.1.1	Gaji Pegawai	5.1.15	650.251.296.940,00	567.700.000,00	87,31	645.501.481.868,00
5.1.2	Biaya dan gaji honor	5.1.16	262.785.207.200,00	280.481.478.798,26	106,74	281.227.150.771,62
5.1.3	Biaya Bangun					
5.1.4	Biaya Hibah					
5.1.5	Biaya Hibah	5.1.17	28.270.297.500,00	21.410.712.000,00	75,77	34.087.600.887,50
5.1.6	Biaya Bantuan Sosial	5.1.18	2.727.000.000,00	8.521.013.940,00	312,54	0,00
	Sub Jumlah		948.033.801.640,00	978.113.204.538,26	103,17	959.809.193.527,12
5.2	BIAYA MODAL					
5.2.1	Biaya Modal	5.1.19	5.027.870.000,00	1.194.122.710,00	23,75	216.850.210,00
5.2.2	Dokong Pelaksanaan Modal	5.1.20	43.024.700.000,00	31.214.955.000,00	72,55	31.410.487.207,00
5.2.3	Biaya Hibah dan Bantuan	5.1.21	28.270.297.500,00	28.220.200.000,00	99,82	31.719.000.807,00
5.2.4	Biaya Lain-lain Modal	5.1.22	111.247.150.000,00	0,00	0,00	18.800.086.210,00
5.2.5	Biaya Ases dan Pengawasan	5.1.23	4.480.000.000,00	3.293.514.476,00	73,51	4.280.572.262,00
5.2.6	Biaya Ases Hibah	5.1.24				25.000.000,00
	Sub Jumlah		141.049.418.140,00	149.968.373.686,00	106,33	147.822.825.105,00
	Jumlah Biaya Modal		141.049.418.140,00	149.968.373.686,00	106,33	147.822.825.105,00

	URUTAN	Ref	AMGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
6.0	BELANJA TAK TERDUGA					
6.0.1	Belanja Tak Terduga	6.1.25.1	1.507.600.439,00	706.966.210,70	44,85	776.542.897,00
	Jumlah		1.507.600.439,00	706.966.210,70	44,85	776.542.897,00
	JUMLAH BELANJA		1.507.600.439,00	1.071.294.237.999,78	91,78	1.140.100.877.698,82
6	TRANSFER					
6	Transfer Bagi Hasil Pembagian					
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.1.20	1.152.204.771,00	859.400.716,01	23,92	1.447.678.247,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lain-lain	6.1.21	1.282.500.000,00	928.866.102,00	74,29	0,00
	Jumlah		2.434.704.771,00	1.788.266.818,01	38,71	1.447.678.247,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan					
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lain	6.2.24	0,00	0,00	-	0,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	6.2.25	161.120.000.000,00	100.778.184.449,01	87,20	150.621.762.819,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan ke Lembaga	6.2.26	0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah		161.120.000.000,00	100.778.184.449,01	97,50	150.621.762.819,00
	JUMLAH TRANSFER		2.595.824.771,00	1.889.044.962,01	85,30	1.598.299.060,00
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER		4.103.425.210,00	2.960.339.199,71	92,15	2.738.371.638.222,82
	SURPLUS/DEFISIT		(20.248.707.385,00)	(9.056.254.485,12)		(5.578.091.895,98)
7	PENBIAYAAN					
7.1	PENYERAHAN PENBIAYAAN					
7.1.1	Penggunaan Saluran Pembiayaan Anggaran (RUMAH) tahun sebelumnya	5.1.3	21.750.707.385,00	21.750.707.385,70	100,00	21.647.798.302,00
7.1.2	Pinjaman Dana Cadangan		0,00	0,00	-	0,00
7.1.3	Hati-hati Keuangan Daerah yang Dibekalkan		0,00	0,00	-	0,00
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	-	0,00
7.1.5	Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00	-	0,00
7.1.6	Penerimaan Kembali Pinjaman Non Pemerintah Lainnya		0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah Penyerahan		21.750.707.385,00	21.750.707.385,70	100,00	21.647.798.302,00
7.2	PENGELARAN LABA/RAH					
7.2.1	Pembelian Dana Cadangan		0,00	0,00	-	0,00
7.2.2	Pembelian Kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah	5.1.25	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
7.2.3	Pembelian Perekapitalisasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	-	0,00
7.2.4	Pembelian Peralatan Daerah		0,00	0,00	-	0,00
7.2.5	Pembelian Peralatan Non Pemerintah Lainnya		0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah Pengeluaran		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN ALIEN		20.250.707.385,00	20.250.707.385,70	100,00	21.147.798.302,00
	SISA LEHUR PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLP) 5.1.38		0,00	10.213.462.962,98		21.750.707.385,70

Disusun oleh Sistem Keuangan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan

BUPATI LUBA PELUH KOTA

SAFATUDDIN D. BANDARO RAJID

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

NO	URAIAN	Ref.	2022	2021
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	21.768.707.385,70	28.847.799.302,60
2.	Penggunaan SAL sebagai Perantara Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	21.768.707.385,70	28.847.799.302,60
3.	Sub Total (1 - 2)		-	-
4.	Nisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (NILPA/SEKPA)	5.2.3	15.189.602.902,58	21.768.707.385,70
5.	Sub Total (3 + 4)		15.189.602.902,58	21.768.707.385,70
6.	Koreksi Kesalahan Perhitungan Tahun Sebelumnya	5.2.4	23.850.000,00	-
7.	Lain-lain		-	-
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	15.213.452.902,58	21.768.707.385,70

Uraian atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DA BENDARO RAJO

C. NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Ribu)

NO AKUN	URAIAN	Ref	2022	2021
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas Daerah	5.1.1	496.522.796,00	7.031.584.618,19
1.1.1.02	Kas di Bendahara Pemerintah	5.1.2	23.850.000,00	
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pelaksanaan	5.1.3	18.646.167,00	46.182.820,00
1.1.1.04	Kas di BLUD RSUD	5.1.4	8.461.843.385,50	7.853.394.780,50
1.1.1.05	Kas di BLUD Puskesmas	5.1.5	6.032.834.378,95	5.872.145.249,71
1.1.1.06	Kas Dana BOS	5.1.6	181.813.475,00	1.410.742.016,00
1.1.1.07	Kas Lainnya	5.1.7	171.604,00	171.604,00
1.1.3	Piutang Pendapatan			
1.1.3.01	Piutang Pajak	5.1.9	11.093.167.387,00	9.179.323.034,00
1.1.3.02	Piutang Retribusi	5.1.10	7.670.000,00	8.613.000,00
1.1.3.03	Piutang Hasil Penyelenggaraan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.11	25.228.607,00	61.244.857,00
1.1.3.04	Piutang Layanan PAD Yang Sbb	5.1.12	4.294.090.175,18	3.899.640.211,76
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemindahan Pasar Dana Perimbangan	5.1.13		
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	5.1.14		
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemindahan Daerah Lainnya	5.1.15		
1.1.3.08	Piutang Pendukung Bagi Hasil Pajak	5.1.16	9.621.642.178,00	12.425.190.243,00
1.1.5	Penyisihan Piutang			
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	5.1.17	15.139.072.389,97	(1.337.154.838,52)
1.1.7	Penyisihan	5.1.18	12.716.886.188,62	14.976.038.828,53
	JUMLAH ASET LANCAR		48.485.243.952,37	60.285.854.424,47
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG			
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
1.2.1.01	Investasi Non Permanen Lainnya	5.1.19	760.196.328,00	760.196.328,00
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	5.1.20	(298.258.440,00)	(298.258.440,00)
	Jumlah Investasi Jk. Panjang Non Permanen Bersih		461.937.888,00	461.937.888,00
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen			
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemecatan Daerah	5.1.21	54.502.334.403,19	54.728.921.482,77
	Jumlah Investasi Jk. Panjang Permanen		54.502.334.403,19	54.728.921.482,77
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		54.964.272.291,19	55.190.859.370,77
1.3	ASET TETAP			
1.3.1	Tanah	5.1.22	117.757.455.000,00	116.523.701.510,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	5.1.23	174.368.387.681,04	487.330.188.404,94
1.3.3	Gedung dan Bangunan	5.1.24	876.770.198.369,18	846.413.997.415,18
1.3.4	Salair, Irigasi dan Teringan	5.1.25	1.743.165.352.262,82	1.683.658.003.965,82
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	5.1.26	111.535.066.685,41	107.547.339.014,41
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.1.27	7.288.381.381,00	9.620.852.956,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.1.28	(1.758.590.398.652,18)	(1.609.681.122.835,53)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(432.086.788.251,01)	(390.428.680.116,14)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(352.597.368.681,63)	(334.865.761.702,48)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JD		(968.433.373.255,54)	(885.055.640.977,11)
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(1.472.869.464,00)	(1.353.039.839,80)
	JUMLAH ASET TETAP		1.675.294.442.817,27	1.611.412.961.467,82

NO AKSES	URAIAN	Ref	2022	2021
1.4	DANA CADANGAN			
1.4.1	Dana Cadangan			
	Jumlah Dana Cadangan			
1.5	ASET LAINNYA			
1.5.2	Aset IPJGR	5.4.28	289.428.000,00	2.786.537.850,29
1.5.3	Keuntungan Dengan Pihak Ketiga	5.4.29	611.640.850,00	
1.5.4	Aset Tak Berwujud	5.4.30	3.970.576.095,00	2.511.267.095,00
1.5.5	Aset Lainnya	5.4.31	12.004.585.319,40	10.769.880.619,40
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.4.32	(4.157.648.249,29)	(3.020.897.359,29)
	JUMLAH ASET LAINNYA		11.790.582.015,11	13.077.068.205,40
	JUMLAH ASET		1.790.494.541.075,94	1.767.966.763.468,46
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.2.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.4.33	252.000,00	2.505.000,00
2.2.2	Utang Bunga	5.4.34	-	-
2.2.7	Perdagangan Dengan Utanaka	5.4.35	40.057.083,00	50.290.539,38
2.2.5	Utang Beban	5.4.36	40.196.216.166,10	7.632.407.095,87
2.2.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.4.37	0,00	5.006.139.760,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		40.546.425.249,10	12.691.342.595,45
2.3	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	Utang Dengan negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		40.546.425.249,10	12.691.342.595,45
3	EKUITAS			
3.1	Ekuitas			
3.1.1	Ekuitas	5.4.38	1.749.948.115.826,84	1.755.275.420.873,01
	JUMLAH EKUITAS		1.749.948.115.826,84	1.755.275.420.873,01
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.790.494.541.075,94	1.767.966.763.468,46

BUPATI LIMA PELITA KOTA

SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO

D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)



Laporan Operasional Pelaksanaan Kabupaten Limbopulo Kota Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No. Akun	URAIAN	Ref	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
JANGKARAN OPERASIONAL						
B.	PENDAPATAN	5.5.1				
B.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.5.1.1				
B.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.5.1.1.1	27.631.400.649,58	22.133.622.059,42	4.497.785.599,16	19,34
B.1.2	Pendapatan Sumbangan Daerah - LO	5.5.1.1.2	3.127.584.878,60	2.971.098.922,00	155.485.956,60	5,13
B.1.3	Pendapatan Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.5.1.1.3	4.403.265.811,00	3.777.591.279,00	625.674.538,00	16,56
B.1.4	Lain-lain PAD Yang Sama - LO	5.5.1.1.4	49.799.067.073,64	52.722.207.831,64	(2.923.140.758,00)	(5,54)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		84.957.338.215,22	82.624.520.090,08	2.332.818.125,14	2,82
B.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.5.1.2				
B.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERMUDAHAN	5.5.1.2.1				
B.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak		34.796.946.081,42	14.603.851.364,00	199.088.917,42	1,34
B.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumbangan Dana Alokasi		5.246.365.468,00	3.093.563.951,00	2.152.801.517,00	69,58
B.2.1.03	Dana Alokasi Umum		682.759.583.074,00	686.668.871.000,00	(3.909.287.926,00)	(0,57)
B.2.1.04	Dana Alokasi Khusus - Fisik		94.3.029.418,00	71.238.497.494,00	23.061.931.924,00	24,34
B.2.1.05	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		187.051.158.966,60	163.433.828.595,00	23.617.330.371,60	12,78
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Permudahan		982.368.479.947,42	940.053.709.184,00	42.314.770.763,42	4,50
B.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.5.1.2.2				
B.2.2.01	Dana Otonomi Khusus					
B.2.2.02	Dana Penyesuaian			83.917.739.300,00	(83.917.739.300,00)	(100,00)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya			83.917.739.300,00	(83.917.739.300,00)	(100,00)
B.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.5.1.2.3				
B.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi					
B.2.3.01.01	BH Pajak Kendaraan Bermotor		16.367.074.358,00	11.775.742.528,00	4.591.331.830,00	18,81
B.2.3.01.02	BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		6.992.116.764,00	7.127.043.363,00	(134.926.599,00)	(1,89)
B.2.3.01.03	BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		21.774.113.931,00	19.583.607.836,00	2.190.506.095,00	12,35
B.2.3.01.04	BH Pajak Air Permukiman		129.855.739,00	96.080.546,00	33.775.193,00	35,15
B.2.3.01.05	BH Pajak Rokok		16.601.004.919,00	18.564.830.974,00	(1.963.826.055,00)	(10,58)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi		61.864.365.711,00	58.947.305.267,00	2.917.060.444,00	4,95

No. Akun	URAIAN	Ref	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
8.2.4	Bantuan Kerugian	5.5.1.2.4				
8.2.4.01	Bantuan Kerugian dari Pemerintah Daerah Prinsipal Lainnya					
	Jumlah Bantuan Keuangan					
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.044.232.945.659,42	1.082.918.753.751,00	(38.685.808.092,58)	(3,57)
8.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	5.5.1.3				
8.3.1	Pendapatan Hibah		16.245.605.866,80	42.286.829.374,00	(26.041.223.507,20)	(61,58)
8.3.2	Pendapatan Tidak Diruntut					
8.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Kebijakan Pastoral Parokial yang Undang-Undang		4.926.966.963,00	5.670.887.728,00	(743.920.765,00)	(13,10)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		21.172.572.830,80	47.957.717.102,00	(26.785.144.271,20)	(53,33)
	JUMLAH PENDAPATAN		1.160.363.056.705,44	1.211.500.950.953,39	(51.137.894.227,94)	(5,05)
9	BEBAN	5.5.2				
9.1	Beban Operasi	5.5.2.1	1.075.035.553.968,59	1.105.799.758.330,76	(32.864.196.362,17)	(3,06)
9.1.1	Beban Pegawai		545.280.826.698,53	656.371.309.639,76	(111.090.482.940,83)	(1,69)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa		235.540.450.929,07	259.627.697.888,91	(24.087.246.957,87)	(9,28)
	Beban Perawatan		55.015.783.397,61	56.163.846.815,92	(11.178.063.418,31)	(11,53)
	Beban Jasa		121.661.811.722,46	39.470.886.831,02	(17.769.075.131,56)	(12,74)
	Beban Pendidikan		12.341.398.781,00	12.952.659.307,00	(611.260.526,00)	(7,03)
	Beban Perjalanan Dinas		43.911.487.028,00	41.640.334.910,00	4.271.152.118,00	31,87
9.1.3	Beban Bunga					
9.1.4	Beban Subsidi					
9.1.5	Beban Kiboh		33.976.149.687,00	37.489.614.097,00	(4.513.464.410,00)	(13,28)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial		6.531.613.940,00	8.665.697.963,00	(2.034.084.023,00)	(24,10)
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi		147.908.607.028,97	144.816.317.705,49	3.092.289.722,48	2,14
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang		1.151.717.351,44	1.237.065.311,92	(85.347.760,49)	(6,90)
9.1.9	Beban Lain-lain		5.546.688.133,58	4.651.171.526,24	895.516.607,34	19,20
9.2	Beban Transfer	5.5.2.2	77.397.666.036,00	80.806.985.142,00	(3.409.319.106,00)	(4,22)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		77.397.666.036,00	80.806.985.142,00	(3.409.319.106,00)	(4,22)
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	-	-
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya					
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00	-	-
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya					
9.4	Beban Tidak Terduga	5.5.2.3				
9.4.1	Beban Tidak Terduga					
9.4.1.01	Beban Tidak Terduga					

No. Akun	URATAN	Ref	2022	2021	Kemungkinan Penurunan	%
	JUMLAH BEBAN		1.151.333.220.004,59	1.189.606.735.472,76	(36.273.515.468,17)	(3,05)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.5.3	(2.970.163.299,15)	21.894.255.460,62	(24.864.418.759,77)	(113,57)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		-	-	-	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		-	-	-	-
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		-	-	-	-
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		-	-	-	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		-	-	-	-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		-	-	-	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.5.4	(2.970.163.299,15)	21.894.255.460,62	(24.864.418.759,77)	(113,57)
	POS LUAR BIASA	5.5.5				
	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
	Beban Luar Biasa	5.5.5.1	708.965.000,00	776.542.837,00	(67.577.837,00)	(8,70)
	POS LUAR BIASA		708.965.000,00	776.542.837,00	(67.577.837,00)	(8,70)
	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.5.6	(3.679.128.299,15)	21.117.712.623,62	(24.796.040.922,77)	(117,42)

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAKARUBDINTA HENDARO RAJO

E. LAPORAN ARIS KAS (LAN)

Laporan Aris Kas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN ARIS KAS

Untuk Periode Tahun Berakhir Tahun 2021 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Kod	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasional	5.3.1		
Arus Kas Masuk	5.3.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		76.017.229.440,00	21.409.261.694,00
Penerimaan Retribusi Daerah		3.100.597.678,00	2.972.121.922,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.965.253.016,00	3.718.416.419,00
Penerimaan Lain-lain Penghasilan Asli Daerah yang Sah		49.841.127.221,64	50.923.392.837,96
Penerimaan Daur Ulang Hasil Pajak		13.387.540.432,00	16.468.188.122,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumbah Daya Alam		4.807.887.900,00	5.544.403.531,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		682.756.183.071,00	686.668.871.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		98.518.202.418,00	72.258.497.494,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		31.051.158.956,00	163.431.928.595,00
Penerimaan Dana Pengawasan		74.850.449.000,00	165.640.041.300,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		64.867.913.776,00	36.165.919.591,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		3.000.000.000,00	-
Penerimaan Hibah		14.474.515.770,00	13.091.614.016,00
Penerimaan Dana Donasi		-	-
Penerimaan Lain-lain Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		40.000.000,00	3.670.837.728,00
Penerimaan dari Pendanaan Luar Negeri		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		1.225.475.426.713,64	1.289.966.597.241,96
Arus Kas Keluar	5.3.1.2		
Pembayaran Pegawai		645.786.695.090,40	648.800.431.683,00
Pembayaran Daerah		239.194.478.258,36	765.227.158.771,92
Pembayaran Hibah		31.416.712.030,80	34.067.620.697,00
Pembayaran Bantuan Sosial		6.531.033.940,00	3.605.037.963,00
Pembayaran Tidak Terencana		708.965.000,00	776.547.837,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Lainnya		-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Belanja Hasil Hasil Cukai Provinsi Kabupaten/Pemerintah Desa		1.930.308.368,00	1.147.678.217,00
Belanja Bagi Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota/Kepada Kecamatan Desa		-	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/Desa		176.773.184.449,00	159.523.282.819,00
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		1.080.630.357.636,76	1.118.749.013.117,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	5.3.1.3	144.845.069.076,88	171.217.584.124,04
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.3.2		
Arus Kas Masuk	5.3.2.1		
Penerimaan Dana Cadangan		-	-
Penjualan aset Tetap		-	-
Penjualan aset Perbaikan dan Mesin		-	-
Penjualan aset Cedung dan Hewan		36.907.000,00	51.108.000,00
Penjualan aset Jalan, Tanggul dan Jembatan		-	-
Penjualan aset Aset Tetap Lainnya		-	-
Penjualan aset Aset Lainnya		21.293.000,00	771.811.056,00
Hasil Perjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Keuangan		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		58.200.000,00	523.919.056,00
Arus Kas Keluar	5.3.2.2		
Penyusutan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		1.161.122.510,00	215.885.319,00
Perolehan Perbaikan dan Mesin		28.314.925.063,00	31.510.467.807,00
Perolehan Cedung dan Hewan		23.220.870.924,00	31.719.900.607,00
Perolehan Jalan, Tanggul dan Jembatan		83.965.835.510,00	79.886.699.210,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.260.619.419,00	4.269.672.262,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	20.000.000,00
Perolehan Modal Pemusnahan Daerah		1.836.000.000,00	1.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		151.456.373.662,00	149.122.625.195,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.3.2.3	(151.416.173.662,00)	(148.203.676.039,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.3.3		
Arus Kas Masuk	5.3.3.1		
Pinjaman Utang Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Utang Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Utang Negeri-Lembaga Keuangan Bank		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-

URAIAN	Rf	2022	2021
Arus Kas Keluar	5.3.2		
Pembayaran Pajak Pinjaman dalam Negara - Pemerintah Pusat			
Pembayaran Pajak Pinjaman dalam Negara - Pemerintah Daerah			
Pembayaran Pajak Pinjaman dalam Negara - Lembaga Keuangan Bank			
Jumlah ARAKAS Keluar			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.3.3		
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.3.1		
Arus Kas Masuk	2.1.4.1		
Penerimaan Berjangka Bank Kenaikan (PFK)		85.247.264.540,00	87.026.820.098,00
Jumlah Arus Kas Masuk		85.247.264.540,00	87.026.820.098,00
Arus Kas Keluar	5.3.1.2		
Pencetakan/Pelaksanaan Pihak Ketiga (PFK)		85.249.517.540,00	87.054.388.609,00
Jumlah Arus Kas Keluar		85.249.517.540,00	87.054.388.609,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.3.4.3	(2.253.000,00)	(27.568.511,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas		(6.581.387.483,12)	(7.106.660.427,96)
Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran		21.773.189.858,70	28.880.519.286,66
Koreksi Kas di BUD		-	(2.329.721,00)
Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran		15.191.802.375,58	21.753.837.854,70
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		23.850.000,00	-
Saldo Akhir Kas Lainnya		171.664,81	171.664,00
Saldo Akhir TDF			
SALDO AKHIR KAS		15.215.681.696,34	21.773.189.858,70

Saldo awal Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BURAH LIMA PUTIH KOTA

SAFARUDIN DEWANDARO RAJO

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Berakhir s.d. 31 Desember 2022 dan 2021

NO/NOB	Uraian	Ref	2022	2021
1	Ekuitas Awal	5.1.1	1.755.275.420.873,01	1.742.150.940.965,49
2	Surgisididiter - T.O	5.3.2	(3.679.129.299,15)	21.117.712.623,62
	Kemungkinan perubahan Saldo Dana BOS			
5	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kegiatan mendasar	5.5.1	(1.648.156.747,02)	(7.093.232.716,10)
	a. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan		(4.712.895.976,31)	5.731.734.721,28
	b. Dampak Kumulatif Kebijakan Mendasar		3.064.739.229,30	(13.724.567.437,58)
4	Ekuitas Akhir	5.1.1	1.749.948.115.826,84	1.755.275.420.873,01

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUBDILLAH BAYDARO RATO



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ungkapan rasa syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang dipimpinnya. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan disusun dan disampaikan kepada kelompok utama pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa beserta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan juga pemerintah. Diharapkan melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sarilamak, 15 Mei 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN D. BANDARO RAJO

DAFTAR ISI

BAB I	1
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	3
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	4
BAB II	7
2.1. EKONOMI MAKRO.....	7
2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN.....	12
BAB III	21
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....	21
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DICAPAIKAN.....	36
BAB IV	40
4.1. ENTI TAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH.....	40
4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	41
4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	42
4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.....	46
BAB V	63
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	63
5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL).....	118
5.3. NERACA.....	121
5.4. LAPORAN OPERASIONAL.....	190
5.5. LAPORAN ARUS KAS.....	190
5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	190
BAB VI	239
6.1. KOMITMEN DAN KONTJENSI.....	239
6.2. GAMBARAN UMUM DAERAH.....	243
BAB VII	247

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1	DISTRIBUSI DAN PERSENTAS PDRB KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022.....	8
TABEL 2. 2	PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 - 2022.....	9
TABEL 2. 3	PDRB PERKAPITA (ADHH) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 S/D 2022.....	9
TABEL 2. 4	PDRB PERKAPITA (ADHK) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 S/D 2022.....	10
TABEL 2. 5	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT... ..	10
TABEL 2. 6	Jumlah Penerima Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi (Riau Jawa).....	11
TABEL 2. 7	KRONOLOGI PERGESERAN DAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2022.....	18
TABEL 3. 1	ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022.....	22
TABEL 3. 2	ANGGARAN DAN REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2022.....	23
TABEL 3. 3	ANGGARAN DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2022.....	24
TABEL 3. 4	ANGGAJIAN DAN REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN 2022.....	26
TABEL 3. 5	ANGGARAN DAN REALISASI LAJAK LAIN PADU YANG SAH TAHUN 2022.....	27
TABEL 3. 6	ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA OPD.....	33
TABEL 3. 7	KEGIATAN YANG PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KURANG DARI 80% PADA INSPEKTORAT.....	37
TABEL 3. 8	KEGIATAN YANG PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KURANG DARI 80% PADA DPMDN.....	37
TABEL 3. 9	KEGIATAN YANG PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KURANG DARI 80% PADA BAPELITDANG.....	38
TABEL 3. 10	KEGIATAN YANG PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KURANG DARI 80% PADA KESKANGKON.....	38
TABEL 5. 1	ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2022 DAN 2021.....	63
TABEL 5. 2	REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2022 PER OPD.....	63
TABEL 5. 3	ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2022.....	64
TABEL 5. 4	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PER-OPD TAHUN 2022.....	65
TABEL 5. 5	ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH TAHUN 2022.....	65
TABEL 5. 6	ANGGAJIAN DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2022.....	67
TABEL 5. 7	REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH PER-OPD TAHUN 2022.....	69
TABEL 5. 8	BAGIAN LADA ATAS PENYERTAAN MODAL.....	69
TABEL 5. 9	ANGGARAN DAN REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BAIK.....	71
TABEL 5. 10	PENDAPATAN LAIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2022.....	72
TABEL 5. 11	ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TRANSFER TAHUN 2022.....	74
TABEL 5. 12	RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERUBAHAN.....	75
TABEL 5. 13	RINCIAN PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK.....	75
TABEL 5. 14	RINCIAN DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SUMBER DAYA ALAM.....	76
TABEL 5. 15	RINCIAN DANA ALOKASI UMUM.....	77
TABEL 5. 16	RINCIAN PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS.....	77
TABEL 5. 17	RINCIAN PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONPESIK.....	78
TABEL 5. 18	RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA.....	79
TABEL 5. 19	RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI DANA PENYUSUAIAN TAHUN 2022.....	79
TABEL 5. 20	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LRA.....	80
TABEL 5. 21	RINCIAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK-LRA.....	80
TABEL 5. 22	RINCIAN PENDAPATAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK PROVINSI TAHUN 2022.....	80

TABEL 5. 23 ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022	81
TABEL 5. 24 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAMA LAGI NYA – LRA	82
TABEL 5. 25 PENDAPATAN HIDUP – LRA	82
TABEL 5. 26 PENERIMAAN DANA HIBAH IPTDMIP TAHUN 2022	83
TABEL 5. 27 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA	84
TABEL 5. 28 RINCIAN REALISASI BELANJA PER OPD TAHUN 2022	84
TABEL 5. 29 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA OPERASIONAL	87
TABEL 5. 30 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEKERJA PEGAWAI 2022	87
TABEL 5. 31 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA	92
TABEL 5. 32 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA HIBAH TAHUN 2022	101
TABEL 5. 33 RINCIAN BELANJA HIBAH PER OPD TAHUN 2022	102
TABEL 5. 34 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI TRANSFER DAN ULANG KEMUNDURAN KE PARTAI POLITIK	103
TABEL 5. 35 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN 2022	103
TABEL 5. 36 RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PER OPD TAHUN 2022	104
TABEL 5. 37 RINCIAN REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL	104
TABEL 5. 38 RINCIAN REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, DAN PERMUKIMAN	109
TABEL 5. 39 RINCIAN REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS PERIKANAN	109
TABEL 5. 40 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL	110
TABEL 5. 41 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAKAH	110
TABEL 5. 42 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	111
TABEL 5. 43 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	113
TABEL 5. 44 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	113
TABEL 5. 45 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL ASET YETAP LAINNYA	114
TABEL 5. 46 RINCIAN SP2D BELANJA TAK YETAP TAHUN 2022	115
TABEL 5. 47 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TRANSFER	116
TABEL 5. 48 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BAGI HASIL	116
TABEL 5. 49 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BANTUAN KEHIDUPAN	117
TABEL 5. 50 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2022	117
TABEL 5. 51 RINCIAN ASET LANCAR	121
TABEL 5. 52 RINCIAN KAS	121
TABEL 5. 53 RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	123
TABEL 5. 54 RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	123
TABEL 5. 55 RINCIAN KAS DANA IRAS	125
TABEL 5. 56 SEKOLAH PENERDEAN DANA BOS KEMERJA TAHUN 2022	125
TABEL 5. 57 REALISASI DANA BOS SEKOLAH NEGERI TAHUN 2022	127
TABEL 5. 58 REALISASI SPH SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN 2022	127
TABEL 5. 59 REALISASI SPH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN 2022	127
TABEL 5. 60 BELANJA BOS SWASTA	128
TABEL 5. 61 PIUTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAMA	131
TABEL 5. 62 RINCIAN PIUTANG KENDARAAN RODA DUA KEPALA DESA	131
TABEL 5. 63 PIUTANG BIAYA DAN DENDA DANA BERGULIR	132
TABEL 5. 64 KLAIM JASA LAYANAN BLUD-RSUD DR. ACHMAD DARWIS	132
TABEL 5. 65 RINCIAN PIUTANG KLAIM JASA LAYANAN BLUD-RSUD DR. ACHMAD DARWIS YANG TELAH DIUKURAN DI SPT BPTS	133

TABEL 5. 66 RINCIAN PIUTANG NON KAPITAS BIJUD TAHUN 2022.....	134
TABEL 5. 67 RINCIAN PIUTANG BAGI UASU PAJAK.....	135
TABEL 5. 68 SALDO PERSIDIAAN PER 31 DESEMBER 2022.....	136
TABEL 5. 69 RINCIAN ORBAT KADALARSAS RSUD DR. ACIDMAD DARWIS TAHUN 2022.....	138
TABEL 5. 70 RINCIAN NEAL OBAT KEDALARSAS DINAS KESIHATAN TAHUN 2022.....	139
TABEL 5. 71 NILAI BERSIH INVESTASI NON PERMANEN DANA BERGULIR.....	141
TABEL 5. 72 RINCIAN SALDO DANA PADA REKUNING PENGEMHALIAN POKOK BUNGA DAN DENDA TAHUN 2022.....	142
TABEL 5. 73 PENERIMA DANA BERGULIR TAHUN 2005.....	144
TABEL 5. 74 PENERIMA DANA BERGULIR TAHUN 2006.....	144
TABEL 5. 75 PENERIMA DANA BERGULIR TAHUN 2006.....	144
TABEL 5. 76 RINCIAN INVESTASI PERMANEN.....	145
TABEL 5. 77 RINCIAN KEPENILIKAN MODAL PIDAM SORUJIM RUGI/LABA.....	145
TABEL 5. 78 NILAI PENYERTAAAN MODAL BANK NAGARI.....	146
TABEL 5. 79 RINCIAN ASET TETAP.....	149
TABEL 5. 80 REKAP HIBAH/MUTASI MASUK ASET TETAP TANAH ANTAR OPD.....	150
TABEL 5. 81 REKAP KOREKSI/TAMBAH ASET TETAP TANAH.....	151
TABEL 5. 82 REKAP HIBAH/MUTASI KELUAR ASET TETAP TANAH.....	151
TABEL 5. 83 REKAP ASET TETAP TANAH YANG DIELANAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.....	151
TABEL 5. 84 REKAP KAPITALISASI BELANJA BARANG DAN JASA KE PERALATAN DAN MESIN.....	153
TABEL 5. 85 REKAP HIBAH/MUTASI MASUK ANTAR OPD PADA ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN.....	153
TABEL 5. 86 REKLASIFIKASI MASUK KE ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN.....	154
TABEL 5. 87 ASET DARI UTANG KONTRAKTUAL ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN.....	155
TABEL 5. 88 REKAP BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN YANG TIDAK DIKAPITALISIR.....	156
TABEL 5. 89 REKAP REKLASIFIKASI KELUAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN.....	156
TABEL 5. 90 REKAP HIBAH/MUTASI KELUAR ANTAR OPD ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN.....	158
TABEL 5. 91 REKAP ASET EKSTRAKOMPTABLE ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN.....	158
TABEL 5. 92 REKAP KAPITALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PER OPD.....	159
TABEL 5. 93 REKAP HIBAH/MUTASI MASUK ANTAR OPD ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN.....	160
TABEL 5. 94 REKAP REKLASIFIKASI MASUK ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN.....	160
TABEL 5. 95 REKAP ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DARI UTANG KONTRAKTUAL.....	161
TABEL 5. 96 REKAP PENYERTAAAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN.....	162
TABEL 5. 97 REKAP REKLASIFIKASI KELUAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN.....	163
TABEL 5. 98 REKAP KAPITALISASI BELANJA BARANG DAN JASA.....	164
TABEL 5. 99 REKAP HIBAH/MUTASI MASUK ANTAR OPD ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	164
TABEL 5. 100 REKAP REKLASIFIKASI MASUK ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN.....	165
TABEL 5. 101 REKAP ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DARI UTANG KONTRAKTUAL.....	165
TABEL 5. 102 REKAP HIBAH/MUTASI KELUAR ANTAR OPD ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	166
TABEL 5. 103 REKAP HIBAH/MUTASI KELUAR ANTAR OPD ASET TETAP LAINNYA.....	167
TABEL 5. 104 REKAP REKLASIFIKASI MASUK ASET TETAP LAINNYA.....	167
TABEL 5. 105 REKAP ASET TETAP LAINNYA DARI UTANG KONTRAKTUAL.....	168
TABEL 5. 106 REKAP BELANJA MODAL TIDAK DIKAPITALISIR ASET TETAP LAINNYA.....	168
TABEL 5. 107 REKAP KAPITALISASI BARANG DAN JASA ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGEMHALIAN	169

TABEL 5. 108 REKAP REKLASIFIKASI MASUK KE ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGURANGAN.....	169
TABEL 5. 109 ASET KONSTRUKSI DALAM PENGURANGAN DARI UTANG KONTRAKTUAL.....	170
TABEL 5. 110 REKAP REKLASIFIKASI KELUAR ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGURANGAN.....	170
TABEL 5. 111 REKAP REKLASIFIKASI MASUK ASET LAINNYA.....	172
TABEL 5. 112 DANA BAGI HASIL YANG DITINDA PENYALURANNYA DAN DISIMPAN DI REKENING LAIN DALAM BENTUK TUD (TREASURY DEPOSITE FACILITY) PADA BANK INDONESIA TAHUN 2022.....	174
TABEL 5. 113 REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN PER OPD.....	176
TABEL 5. 114 REKAP AKUMULASI MORTISASI ASET TAK BERWALID PER OPD.....	177
TABEL 5. 115 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK.....	177
TABEL 5. 116 UTANG BELANJA.....	178
TABEL 5. 117 UTANG BELANJA BPJS KESIHATAN.....	179
TABEL 5. 118 RINCIAN UTANG BELANJA JASA.....	180
TABEL 5. 119 RINCIAN UTANG BELANJA PEMELIHARAAN.....	181
TABEL 5. 120 RINCIAN UTANG BELANJA JUBAH.....	182
TABEL 5. 121 RINCIAN UTANG BELANJA MODAL ALAT ANGKUTAN.....	183
TABEL 5. 122 RINCIAN UTANG BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG.....	184
TABEL 5. 123 RINCIAN UTANG BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATAN.....	184
TABEL 5. 124 RINCIAN UTANG BELANJA MODAL DAMPAK AIR.....	185
TABEL 5. 125 DAFTAR UTANG KONTRAKTUAL TAHUN 2022.....	186
TABEL 5. 126 PELAMPAPAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2022.....	188
TABEL 5. 127 PEMITONJAN TRANSFER KELANGKAN KE DAERAH TAHUN 2022.....	188
TABEL 5. 128 KAS YANG SEHARUSNYA TIDAK DIMANFAATKAN.....	189
TABEL 5. 129 RINCIAN PENDAPATAN-LO.....	190
TABEL 5. 130 RINCIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO.....	191
TABEL 5. 131 RINCIAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LO.....	191
TABEL 5. 132 PERBEDAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LRA DENGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO.....	192
TABEL 5. 133 RINCIAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH-LO.....	192
TABEL 5. 134 PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH –LRA DENGAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH – LO TAHUN 2022.....	193
TABEL 5. 135 REKAPITULASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH-LO PER OPD.....	194
TABEL 5. 136 RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH –LO.....	194
TABEL 5. 137 RINCIAN PERBEDAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LRA DENGAN PERBEDAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH –LO TAHUN 2022.....	195
TABEL 5. 138 RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER – LO.....	196
TABEL 5. 139 RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH POSAT- LO.....	196
TABEL 5. 140 RINCIAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI – LO.....	197
TABEL 5. 141 RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO.....	197
TABEL 5. 142 REKAPITULASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-HIBAH –LO PER OPD.....	197
TABEL 5. 143 PERBANDINGAN PENDAPATAN HIBAH-LRA DENGAN PENDAPATAN HIBAH LO.....	198
TABEL 5. 144 RINCIAN BEBAN OPERAS.....	199
TABEL 5. 145 RINCIAN BEBAN PEGAWAI-LO.....	200
TABEL 5. 146 RINCIAN PERBANDINGAN BELANJA PEGAWAI – LRA DENGAN BEBAN PEGAWAI-LO.....	201
TABEL 5. 147 PENYESUAIAN BEBAN PEGAWAI –LO.....	201
TABEL 5. 148 RINCIAN BEBAN BARANG DAN JASA.....	202
TABEL 5. 149 RINCIAN BEBAN PERSIDIAAN PER OPD.....	202
TABEL 5. 150 RINCIAN PENYESUAIAN BEBAN PERSIDIAAN PER OPD.....	203

TAHIL 5. 151 RINCIAN BEBAN JASA PER OPD.....	204
TABEL 5. 152 PERBANDINGAN BELANJA JASA-LRA DENGAN BEBAN JASA-LO PER OPD.....	205
TABEL 5. 153 RINCIAN PENYESUAIAN BEBAN JASA PER OPD.....	207
TABEL 5. 154 RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN PER OPD.....	211
TABEL 5. 155 PERBANDINGAN BELANJA PEMELIHARAAN-LRA DENGAN BEBAN PEMELIHARAAN-LO PER OPD.....	212
TAHIL 5. 156 RINCIAN PENY-SALAH BEBAN PEMELIHARAAN PER OPD.....	213
TABEL 5. 157 PERBANDINGAN BELANJA HIRAH-LRA DENGAN BEBAN HIRAH-LO TAHUN 2022.....	215
TABEL 5. 158 RINCIAN PENYESUAIAN BEBAN HIRAH -LO.....	220
TABEL 5. 159 BEBAN BANTUAN SOSIAL PER OPD.....	220
TABEL 5. 160 RINCIAN BEBAN PENYELUJUKAN PER OPD.....	221
TABEL 5. 161 RINCIAN BEBAN PENYIBIHAN PERANG PER OPD.....	223
TAHIL 5. 162 RINCIAN BEBAN LAIN-LAIN PER OPD.....	224
TABEL 5. 163 RINCIAN BEBAN LAIN-LAIN PER REKONING.....	225
TABEL 5. 164 RINCIAN BEBAN TRANSFER.....	225
TABEL 5. 165 RINCIAN SP2D BELANJA TAK TERDUGA TAHUN 2022.....	226
TAHIL 5. 166 DAFTAR KAN BERSTU PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TA 2022 DAN 2021.....	227
TAHIL 5. 167 RINCIAN MUTASI TAMBAH ASSET TETAP.....	235
TAHIL 5. 168 RINCIAN MUTASI KURANG ASSET TETAP.....	235
TABEL 5. 169 RINCIAN KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022 MUTASI KURANG ASSET TETAP	236
TAHIL 5. 170 RINCIAN MUTASI TAMBAH ASSET LAINNYA.....	236
TAHIL 5. 171 PENGHAPUSAN ASSET TAHUN 2022.....	237
TADEL 6 1 DAFTAR KECAMATAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.....	237

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 S/D 2022.....	7
GAMBAR 2. 2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.....	11
GAMBAR 3. 1 PROPORSI SUMBER PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 DAN 2022 (DALAM PERSEN).....	21
GAMBAR 3. 2 ANGGARAN DAN REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2022.....	23
GAMBAR 3. 3 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2021 DAN 2022.....	27
GAMBAR 3. 4 PROPORSI BELANJA DAERAH TAHUN 2021 DAN 2022.....	30
GAMBAR 3. 5 REALISASI BELANJA OPERASI.....	31
GAMBAR 3. 6 REALISASI BELANJA MODAL.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Pencapaian dan Belanja Tahun 2022
Lampiran 2	Rekap PFK Januari s/d Desember Tahun 2022
Lampiran 3	Berita Acara Rekonsiliasi Bank antara BLUD dengan Bank Nagari Cabang Payakumbuh dan Berita acara Penyelesaian Transaksi Kas Umum Daerah
Lampiran 4	Rekap Penyeteroran UYHD Tahun 2022
Lampiran 5	Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pajak OPD TA 2022
Lampiran 6	Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran serta Sisa Dana BOS tahun 2022
Lampiran 7	-Laporan Keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Darwis -Laporan Keuangan BLUD Puskesmas
Lampiran 8	Perhitungan Penyisihan Piutang Tahun 2022
Lampiran 9	Rekapitulasi Persediaan Tahun 2022
Lampiran 10	Rincian Persediaan Obat-obatan Tahun 2022
Lampiran 11	Rincian Persediaan Lain-lain Tahun 2022
Lampiran 12	Dana Bergilir Tahun 2022
Lampiran 13	Laporan Keuangan PDAM
Lampiran 14	Rekapitulasi Aset Tetap 2022
Lampiran 15	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2022
Lampiran 16	Rincian Utang PFK Tahun 2022
Lampiran 17	Rincian Utang Jangka Pendek Tahun Anggaran 2022
Lampiran 18	Rincian Beban Persediaan Per SKPD Tahun 2022
Lampiran 19	Rincian Beban Jasa per SKPD Tahun 2022
Lampiran 20	Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2022
Lampiran 21	Rincian Beban Perjalanan Dinas 2022
Lampiran 22	Rincian Beban Hibah 2022
Lampiran 23	Rekapitulasi Penyaluran DD dan ADD APB Nagari Tahun Anggaran 2022
Lampiran 24	Laporan Realisasi Penyaluran Hibah Tahun 2022
Lampiran 25	Rekap Pendapatan diterima dimuka (Pajak Reklame) Tahun 2022
Lampiran 26	Rincian Utang Kontraktual per SKPD Tahun 2022
Lampiran 27	Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (terpisah)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari muka entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Penyelenggaraan akuntansi oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, utang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengotompakan transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah selubung dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan-undang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah dari hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara periodik.

- b. **Manajemen**
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. **Transparansi**
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. **Keseimbangan Antar-generasi**
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasusikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. **Evaluasi Kinerja**
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah pelaksanaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disamping itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah. Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 juga berlandaskan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat adanya perbedaan dalam pengklasifikasian Pendapatan maupun Belanja dari kedua ketentuan tersebut diatas maka dilakukan konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- p. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- r. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- s. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- t. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- u. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- v. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- w. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- x. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

- | | |
|--------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| | 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan |
| BAB II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD |
| | 2.1. Ekonomi Makro |

		2.2.	Kebijakan Keuangan
		2.3.	Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB	III		Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
		3.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
		3.2.	Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB	IV		Kebijakan Akuntansi
		4.1.	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
		4.2.	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
		4.3.	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
		4.4.	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
BAB	V		Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
		5.1	LRA
		5.1.1	Pendapatan –LRA
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Transfer
		5.1.4	Surplus/defisit
		5.1.5	Penerimaan Pembiayaan
		5.1.6	Pengeluaran Pembiayaan
		5.1.7	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran
		5.2	LPSAL
		5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal
		5.2.2	Penggunaan Saldo Awal Lebih
		5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
		5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya
		5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir
		5.3	Neraca
		5.3.1	Aset Lancar
		5.3.2	Investasi Jangka Panjang
		5.3.3	Aset Tetap
		5.3.4	Aset Lainnya
		5.3.5	Kewajiban
		5.3.6	Ekuitas Dana
		5.4	Laporan Operasional
		5.4.1	Pendapatan-LO
		5.4.2	Heban
		5.4.3	Surplus/defisit-LO
		5.4.4	Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa

	5.4.5	Pos Luar Biasa
	5.4.6	Surplus/defisit-LO
5.5		Laporan Arus Kas
	5.5.1	Arus Kas dari Aktifitas Operasi
	5.5.2	Arus Kas dari Aktifitas Investasi
	5.5.3	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
	5.5.4	Arus Kas dari Aktifitas Transitoris
5.6		Laporan Perubahan Ekuitas
	5.6.1	Ekuitas awal
	5.6.2	Surplus/Defisit-LO
	5.6.3	Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar
	5.6.4	Ekuitas Akhir
BAB	VI	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
BAB	VII	Penutup

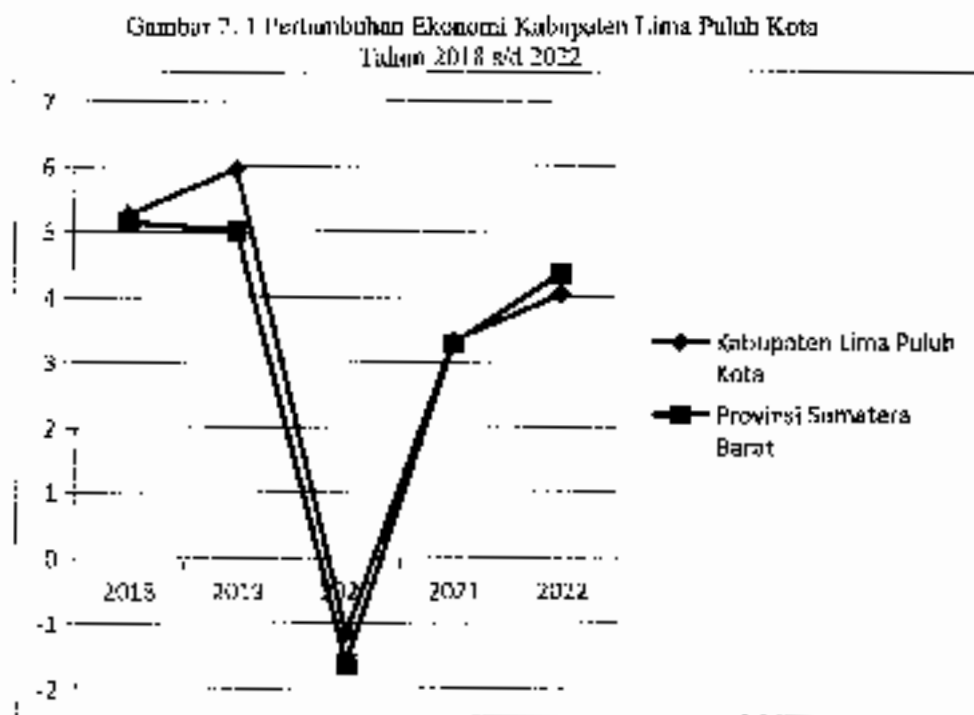


BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen. Pertumbuhan ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan tahun 2020 sebesar -1,16 persen. Dari sisi produksi, hampir seluruh lapangan usaha mengalami kenaikan. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 13,09 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 8,71 persen dan diikuti selanjutnya oleh lapangan usaha jasa lainnya dengan pertumbuhan sebesar 12,94 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 8,64 persen.



Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Angka Tahun 2023

Sementara itu, struktur perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota dari sisi produksi tahun 2022 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda; dan

transportasi dan pergudangan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Distribusi dan Persentase PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022
(Dalam juta rupiah)

NO	Lapangan Usaha	Harga Konstan		Harga berlaku	
		Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.879.681,03	3,09	5.828.848,21	31,44
B	Penambangan dan Penggalian	914.843,09	6,14	1.447.519,73	8,09
C	Industri Pengolahan	837.452,61	2,24	1.168.920,29	6,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.859,05	4,36	2.629,07	0,02
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4.028,76	6,49	5.478,11	0,03
F	Konstruksi	579.915,84	2,51	867.250,43	5,40
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1.903.889,47	5,89	2.758.102,31	15,40
H	Transportasi dan pergudangan	1.100.846,38	3,69	1.833.569,97	10,24
I	Penyediaan akomodasi dan minuman	77.810,40	13,03	143.590,09	0,80
J	Informasi dan komunikasi	853.140,82	6,45	1.103.199,86	6,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	199.573,63	4,03	328.594,30	1,84
L	Real Estate	129.006,09	5,59	206.542,74	1,19
M,N	Jasa Persewaan	3.499,63	7,29	5.249,89	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	636.448,89	-1,01	1.110.560,93	6,20
P	Jasa Pendidikan	372.416,53	5,83	624.008,71	3,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201.226,34	4,52	308.803,33	1,73
R,S	Jasa Lainnya	157.052,01	12,94	268.934,84	1,51
T,U					
	J U M L A H	11.892.291,56	4,04	17.900.761,78	100,00

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Tahun 2022 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terlihat sebesar 17.900 milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terlihat sebesar 11.892 milyar rupiah. Nilai PDRB ADHB tahun 2022 menunjukkan kenaikan sebesar 1,7 milyar rupiah dibandingkan dengan nilai PDRB ADHB tahun 2021 yang berjumlah 16.193 milyar rupiah. Nilai PDRB ADHK tahun 2022 juga menunjukkan kenaikan sebesar 461 juta rupiah dibandingkan nilai PDRB ADHK tahun 2021 yang berjumlah sebesar 11.430 milyar rupiah.

Dilihat dari segi sektoral, sektor yang paling tinggi kontribusinya dalam hal pembentukan PDRB sampai dengan tahun 2022 masih didominasi oleh sektor pertanian, dimana tahun 2022 peranan sektor pertanian tercatat sebesar 31,44 persen dari total PDRB. Kemudian sektor yang paling kecil perannya dalam hal pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh kota adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,02 persen atas dasar harga berlaku.

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan indikator-indikator lain yang terkait sebagai mana yang tergambar pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018 - 2022

Nº	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1.	PDRB:					
	a. Atas dasar harga berlaku (juta Rupiah)	14.525.485,21	15.613.495,46	15.533.057,18	16.193.413,96	17.900.761,78
	b. Atas dasar harga konstan 2010 (juta Rupiah)	10.653.761,47	11.192.425,95	11.052.311,08	11.430.547,76	11.892.281,59
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,23	5,06	-1,16	3,33	4,04

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

2.1.2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi terhadap jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Untuk menghitung PDRB per kapita ini digunakan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terhadap jumlah penduduk, yang artinya menggambarkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3 PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018 s/d 2022
(dalam juta rupiah)

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Lima Puluh Kota	38,27	40,60	40,55	41,99	46,09
Provinsi Sumatera Barat	42,80	44,48	43,84	45,29	50,59

Sumber : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Tren nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita (ADHB) tercatat sebesar 38,27 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 46,09 juta rupiah. Namun jika di bandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat, PDRB per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya terhadap PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan selama kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4 PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018 s/d 2022
(dalam juta rupiah)

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Lima Puluh Kota	28,07	29,08	28,88	29,64	30,62
Prov. Sumatera Barat	30,47	31,42	30,59	31,35	32,37

Sumber : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Dari tabel diatas, nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita (ADHK) tercatat sebesar 28,07 juta rupiah dan naik pada tahun 2019 menjadi sebesar 29,08 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 730 ribu rupiah, kemudian mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 menjadi 30,62 juta rupiah. PDRB per kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat.

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 adalah sebesar 3,72 persen, menurun sebesar 1,47 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah sebesar 2,25 persen. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan yang terkecil di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

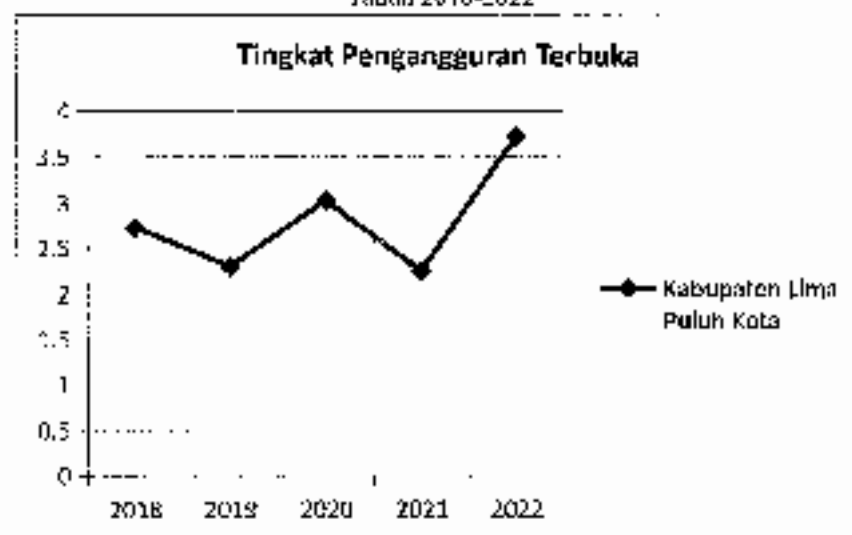
Tabel 2. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/kota	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kep. Mentawai	2,31	2,92	3,68	2,79	1,38
2.	Pesisir Selatan	6,02	6,02	7,00	5,97	4,61
3.	Solok	6,12	4,72	4,65	4,67	5,88
4.	Sijunjung	3,22	3,84	5,30	3,57	4,87
5.	Tanah Datar	4,01	3,20	4,79	4,83	5,91
6.	Padang Pariaman	7,03	6,08	8,13	8,41	6,60
7.	Agam	4,65	4,78	4,61	5,08	4,93
8.	Lima Puluh Kota	2,73	2,30	3,03	2,25	3,72
9.	Pasaman	6,04	5,28	5,34	4,82	5,38
10.	Solok Selatan	5,84	4,91	5,62	4,84	3,71
11.	Dharmasraya	4,02	5,05	5,31	5,00	6,23
12.	Pasaman Barat	3,38	4,74	4,68	5,02	6,33
13.	Padang	8,25	8,74	13,84	13,37	11,68
14.	Solok	8,33	7,08	8,35	5,15	3,90
15.	Sawahlunto	5,92	6,84	8,20	6,38	5,00
16.	Padang Panjang	5,36	4,38	7,22	4,90	4,84
17.	Bukittinggi	7,24	6,20	7,51	6,09	4,90
18.	Payakumbuh	3,95	4,13	5,68	8,47	5,18

No	Kabupaten/kota	2018	2019	2020	2021	2022
19.	Padang	5,82	5,40	5,73	6,09	5,19

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022



Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

2.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yaitu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita pertahun dibawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi (ribu jiwa) Tahun 2018 – 2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Lima Puluh Kota	28,47	26,64	26,43	28,51	26,00
Prov. Sumatera Barat	364,51	357,12	348,22	344,23	335,21

Sumber : BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota dari

tahun 2018-2022 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 26,47 ribu jiwa dan pada tahun 2022 telah mengalami penurunan hingga menjadi 26 ribu jiwa. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan garis kemiskinan serta perubahan mekanisme penelapan data kemiskinan dari Kementerian sosial.

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun awal dari pelaksanaan RPJMD. Dengan berpedoman kepada RPJMD tahun 2021-2026 serta sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 antara lain:

1. Pembangunan dan rehabilitasi serta pengembangan sarana prasarana pertanian dan perikanan
2. Peningkatan kapasitas SDM pertanian dan perikanan
3. Pengembangan komoditi baru dalam mendukung ketahanan pangan, produksi, ketersediaan dan cadangan pangan yang memiliki daya saing
4. Peningkatan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
5. Peningkatan penerapan teknologi dan nilai tambah, pengelolaan dan pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan
6. Peningkatan daya tarik dan pengembangan kawasan berbasis produk unggulan
7. Pengembangan destinasi pariwisata daerah
8. Penciptaan iklim usaha kerakyatan melalui pengembangan kewirausahaan, daya saing UMK dan industri kecil, peningkatan IPTEK sistem produksi, perwilayahan, digital ekonomi dan reformasi kelembagaan
9. Pembangunan dan pemberdayaan koperasi melalui permodalan, kelembagaan, SDM, teknologi, kerjasama, dan kesempatan usaha

Berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 139/28/HLK/2021, 7/NPB/ DPRD/LK/IX/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, maka kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola APBD tahun 2022 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2022 direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Adapun Dana Perimbangan bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus. Sedangkan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2021 dihitung dengan asumsi :

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan serta perkiraan masing-masing potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak pada tahun 2022 diproyeksi sama dengan anggaran tahun 2021, sementara untuk DAU di akses 2,5% dan DAK diproyeksi sama dengan yang diusulkan pada Pemerintah.

Pada tahun 2022, pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diperkirakan sebesar Rp1.285.580.309.962,00 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp109.191.854.714,00 meliputi Pajak Daerah sebesar Rp39.552.047.714,00, Retribusi Daerah sebesar Rp12.028.995.860,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.600.000.000,00 Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp54.040.811.140,00,
- b. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.166.425.410.000,00 yang terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.107.149.410.000,00 dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp59.276.000.000,00,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp9.963.045.248,00 yang terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp9.963.045.248,00.

Untuk mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2022, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kebijakan pendapatan daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
2. Menerapkan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah
3. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah
4. Melakukan pengawasan dan penertiban wajib pajak dan wajib retribusi

Strategi yang disusun untuk mencapai target pendapatan daerah meliputi :

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah
2. Meminimalisir kebocoran retribusi daerah
3. Penyesuaian dasar pengenaan pajak
4. Peningkatan basis data perpajakan
5. Memperluas basis penerimaan retribusi daerah
6. Melakukan efisiensi perungutan
7. Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan
8. Meningkatkan pengawasan.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 yang berbunyi, "Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah". Oleh karena proses perencanaan telah dimulai, maka struktur belanja untuk penganggaran tahun 2022 memaknai dan mempedomani Perundang-undang Nomor 90 Tahun 2019 yang pengelompokan belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modul, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Penyusunan belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama yang menjadi program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai indikator dan target yang jelas untuk peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk pencapaian target indikator kinerja daerah maka disusunlah arah kebijakan belanja untuk tahun 2022 sebagai berikut :

1. Optimalisasi belanja barang dan jasa dan meningkatkan belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan proporsi belanja modal sesuai ketentuan terkait yang dapat memberikan dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
3. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di ibukota kabupaten Sarilamak
4. Peningkatan fasilitas penunjang disektor pariwisata, pelernukan, dan perikanan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan infrastruktur yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.
6. Meningkatkan daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan hndung, mitigasi bencana, peneudalian alih fungsi lahan, dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
8. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan pendapatan daerah.
9. Memenuhi mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK di luar Bantuan Keuangan bersifat Khusus dengan menambahkan kebutuhan alokasi untuk menunjang prioritas daerah.
 - b. Anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan focus pada penuntasan WAJAR DIKNAS 9 tahun dan menciptakan pendidikan yang berkkuualitas dan terjangkau.
 - c. Belanja pada urusan kesehatan 10% dari total belanja setelah dikurangi belanja pegawai.
10. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dielupakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Tambahan pengalokasian ASN direncanakan satuannya sama dengan tahun 2021.

11. Mengalokasikan belanja bantuan social yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menyandang masalah sosial dikawatirkan akan menyandang masalah sosial.
12. Mengalokasikan belanja hibah dan diutamakan untuk organisasi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan. Peruntukan belanja hibah ini diproses melalui mekanisme yang ketat dan selektif, terutama diprioritaskan untuk usulan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
13. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintahan nagari sebesar 10% yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil diutamakan secara proporsional guna memperkuat kapasitas fiscal pemerintahan nagari dalam melaksanakan otonomi daerah dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan nagari sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten kepada pemerintah nagari diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
15. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diantisipasi berulang seperti penanggulangan darurat bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
16. Penyediaan anggaran untuk penyempurnaan E-Gov.
17. Penyediaan anggaran untuk penanganan dan pemulihan Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota.
18. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG).

Penganggaran belanja daerah untuk tahun 2022 terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan belanja operasi yang digunakan untuk pembayaran kompensasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan ASN yang dianggarkan pada belanja OPD terkait serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran untuk gaji dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan accres sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD 2022 dengan mempedomani UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan PP Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD diutamakan dengan yang berlaku bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepala ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 58 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Sebagai implementasi pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN

- rahun anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- j. Penganggaran honorarium bagi ASN dan non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperulukan pemberian tambahan penghasilan kepada ASN sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pemberian insentif pomungatau pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan PP Nomor 69 Tahun 2010.
 - k. Pemerintah dilarang menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja operasi, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau non ASN.
2. **Belanja Modul**
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota meningkatkan proporsi belanja modul yang dapat memberikan dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerdayaan masyarakat.
 3. **Belanja Transfer**
Penganggaran belanja transfer disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 4. **Belanja Tidak Terduga**
Penganggaran belanja tidak terduga digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran ulas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**
Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan mencakup beberapa kebijakan, antara lain : kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sesuai dengan sifatnya, penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi deficit anggaran pemerintah daerah atau merupakan suatu penerimaan yang akan dibayar kembali dimana sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.
2. **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**
Untuk kepentingan penyusunan RKPD tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mennggambarkan perencanaan pengeluaran pembiayaan pada tahun

2022 untuk penyertaan modal sebesar Rp. 1.500.000,00. Hal ini dilakukan untuk menunjang program air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

2.2.4. Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian target kinerja APBD, sehingga Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2022. Penetapan target kinerja APBD tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berikut kronologi pengeseran dan perubahan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 :

Tabel 2. 7 Kronologi Pengeseran dan Perubahan APBD Tahun 2022

Struktur APBD	Perpup 93 Tahun 2021 (APBD Murni)	Perpup 47 Tahun 2022	Perpup 36 Tahun 2022	Perpup 18 Tahun 2022	Perpup 18 Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	1.296.948.288.846	1.304.949.288.946	1.305.306.664.946	1.315.171.383.961	1.316.171.383.961
PENDAPATAN ASLI DAERAH	111.891.854.714	111.891.884.714	111.891.854.714	116.577.988.400	116.577.988.400
Hasil Pajak Daerah	41.522.047.714	41.522.047.714	41.522.047.714	46.453.574.884	46.453.574.884
Hasil Retribusi Daerah	12.563.989.860	12.563.989.860	12.563.989.860	7.688.369.360	7.689.369.360
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	4.493.233.016	4.493.233.016
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.005.811.140	54.005.811.140	54.005.811.140	56.981.811.140	58.981.811.140
PENDAPATAN TRANSFER	1.166.740.586.315	1.174.740.586.315	1.174.740.586.315	1.184.180.181.644	1.184.180.181.644
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.107.149.410.000	1.107.454.586.315	1.107.484.586.315	1.108.150.733.000	1.109.160.733.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.591.176.315	67.276.000.000	67.276.000.000	75.029.448.644	75.029.448.644
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.516.857.917	16.516.857.917	16.873.223.917	16.413.223.917	15.413.223.917

Struktur APBD	Perdup 93 Tahun 2021 (APBD Murni)	Perdup 17 Tahun 2022	Perdup 35 Tahun 2022	Perdup 47 Tahun 2022 (APBD Purnama)	Perdup 48 Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Hibah	18.515.857.917	18.515.857.917	18.873.223.917	16.373.223.917	15.373.223.917
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan	0,00	0,00	0,00	40.000.000	40.000.000
BELANJA	1.323.949.298.948	1.331.949.298.948	1.332.305.864.948	1.335.440.101.348	1.335.440.101.348
BELANJA OPERASI	856.250.895.608	856.925.008.797	857.684.874.797	857.153.552.568	857.153.552.568
Belanja Pegawai	555.737.838.476	575.290.150.578	575.290.150.578	559.251.836.643	559.251.836.643
Belanja Barang dan Jasa	241.768.449.086	242.596.617.093	242.824.233.093	262.796.367.399	262.796.367.399
Belanja Hibah	37.770.555.126	33.575.298.126	34.106.438.126	38.379.298.526	38.379.298.526
Belanja Bantuan Sosial	5.474.050.000	5.474.050.000	5.474.050.000	5.727.050.000	5.727.050.000
BELANJA MODAL	196.062.373.498	203.537.080.310	203.134.580.310	200.167.415.482	200.167.415.482
Belanja Modal Tanah	6.687.790.000	6.687.790.000	6.687.790.000	5.072.550.000	5.072.550.000
Belanja Modal Peralatan Mesin	41.676.768.678	41.280.143.581	41.087.643.581	43.094.705.308	43.094.705.308
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.819.650.154	35.679.968.062	35.679.968.062	36.284.375.852	36.284.375.852
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.219.027.651	116.719.027.651	115.019.027.651	111.247.175.906	111.247.175.906
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.660.131.016	4.660.131.016	4.660.131.016	4.468.609.016	4.468.609.016
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.575.586.982	4.425.586.982	4.425.586.982	1.587.980.439	1.587.980.439
Belanja Tidak Terduga	4.575.586.982	4.425.586.982	4.425.586.982	1.587.980.439	1.587.980.439
BELANJA TRANSFER	167.060.642.857	167.080.842.857	167.060.842.857	166.531.142.857	166.531.142.857
Belanja Bagi Hasil	5.405.104.357	5.405.104.357	5.405.104.357	5.405.104.357	5.405.104.357
Belanja Bantuan Keuangan	161.655.538.500	161.655.538.500	161.655.538.500	161.126.008.500	161.126.008.500
Surplus/(Defisit)	-27.000.000.000	-27.000.000.000	-27.000.000.000	-20.288.707.385	-20.288.707.385

Sifat/Induk APBD	Perbup 93 Tahun 2021 (APBD Mula)	Perbup 17 Tahun 2022	Perbup 96 Tahun 2022	Perbup 113 Tahun 2022	Perbup 42 Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
PEMBAYAAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	21.768.707.385	21.768.707.385
Sil Pa tahun sebelumnya	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	21.768.707.385	21.768.707.385
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Pembayaran Nello	27.000.000.000	27.000.000.000	27.000.000.000	20.268.707.385	20.268.707.385

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

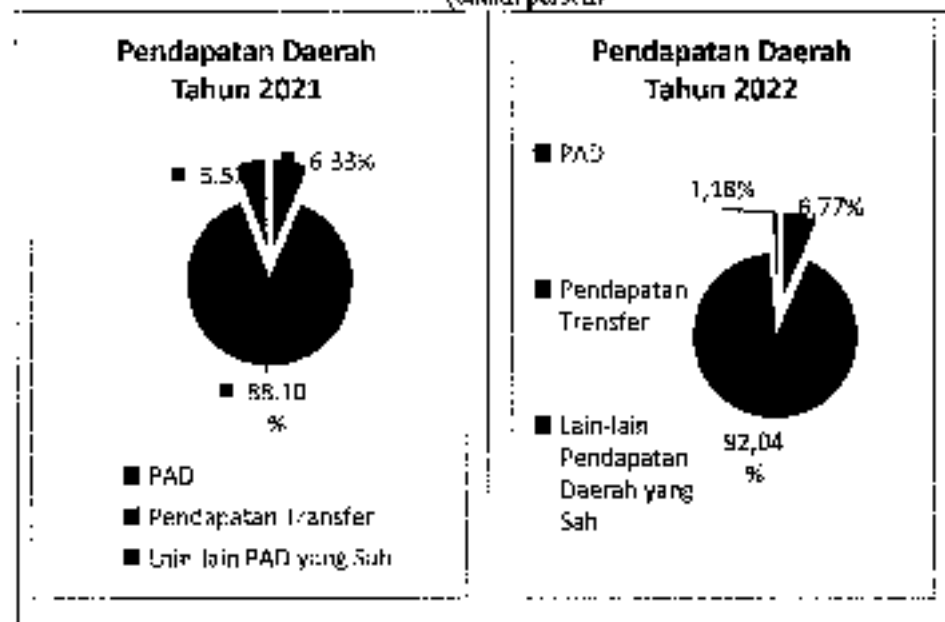
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah ditargetkan sejumlah Rp1.515.171.393.961.00 (realisasi sejumlah Rp1.225.539.476.814.64 atau 93,18%, mengalami penurunan sejumlah Rp35.253.069.491,32 atau 2,80% dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2021. Secara keseluruhan, kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 6,77%, mengalami kenaikan sebesar 0,44% apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 6,33%.
- b. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 92,05%, mengalami kenaikan sebesar 3,95% apabila dibandingkan dengan kontribusi pada tahun Anggaran 2021 sebesar 88,10%; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 1,18%, mengalami penurunan sebesar 4,39% apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 5,57%.

Gambar 3.1. Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan 2022
(Salinan persen)



Sumber : LRA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan 2022

Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi pendapatan daerah tahun 2022:

Label 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Diferensi (Dibawah)
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Daerah	1.315.171.193.961,00	1.225.539.476.814,64	93,18	-89.631.717.146,36
Pendapatan Asli Daerah	115.577.988.400,00	82.980.347.466,64	71,80	-32.597.650.943,36
Pajak Daerah	48.451.574.884,00	26.017.239.410,00	56,01	-20.434.345.444,00
Retribusi Daerah	7.497.969.900,00	3.121.517.673,00	40,74	-4.344.821.282,00
Hasil Pemecutan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.193.233.016,00	1.963.233.016,00	88,20	-590.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	56.961.811.110,00	49.888.127.122,64	87,57	-7.081.483.817,36
Pend. Transfer Pemerintah	1.184.189.181.614,00	1.128.838.623.588,00	95,26	-55.141.556.026,00
Pend. Transfer Pemerintah Pusat	1.109.190.733.000,00	1.055.379.711.312,00	95,15	-53.788.021.188,00
Pusat-Daerah	1.034.300.284.890,00	980.528.363.812,66	94,80	-53.780.021.152,66
Jasa Haji Haji	15.449.221.000,00	18.191.628.151,00	117,77	2.745.407.151,00
Jasa Asuransi Umum	686.668.871.000,00	682.756.182.074,00	99,45	-3.912.687.926,00
PAK Fisik	114.475.134.000,00	98.518.390.418,00	86,06	-15.954.841.582,00
PAK Non Fisik	717.709.058.000,00	181.051.158.966,00	83,16	-36.657.899.034,00
Pusat-Daerah Desa	74.850.449.000,00	74.850.449.000,00	100,00	0,00
Pend. Transfer Pemerintah Antar Daerah	75.029.448.644,00	72.667.913.776,00	96,85	-2.361.534.868,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	67.029.148.644,00	64.667.913.776,00	96,48	-2.361.534.868,00
Bantuan Keuangan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	0,00
Lain-lain Pend. Daerah yang Sah	15.413.223.917,00	14.514.513.770,00	94,17	-898.710.147,00
Pendapatan Hibah	15.373.773.917,00	14.474.513.770,00	94,15	-898.710.147,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat kita jabarkan komponen pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp115.577.988,400,00 terealisasi sejumlah Rp82.986.337.456,64 atau 71,80%, mengalami kenaikan Rp3.134.192.527,68 atau 3,92% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021, terdiri dari:

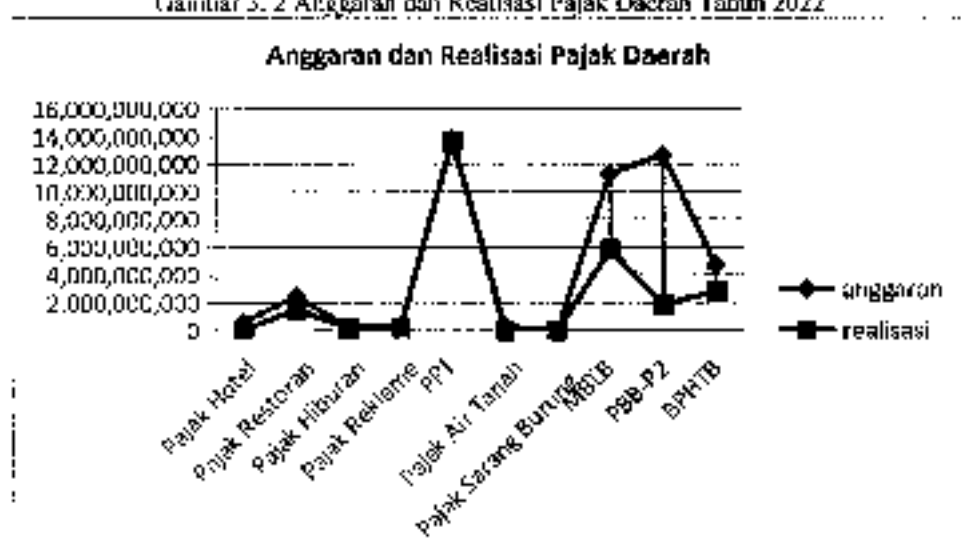
1) Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp46.453.574.884,00 terealisasi Rp26.017.229.440,00 atau 56,01%, mengalami kenaikan Rp4.607.967.746,00 atau 21,52% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021;

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022

NO	JENIS PAJAK DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH /KURANG :
		Rp	Rp		
1	Pajak Hotel	622.960.000,00	45.151.000,00	7,25	-577.809.000,00
2	Pajak Restoran	2.460.065.600,00	1.512.828.171,00	61,50	-947.238.429,00
3	Pajak Hiburan	260.000.000,00	156.400.000,00	60,16	-103.600.000,00
4	Pajak Reklame	334.900.000,00	181.047.300,00	54,08	-153.852.700,00
5	Pajak Penerangan Jalan	13.847.446.522,00	13.619.855.274,00	98,35	-227.591.248,00
6	Pajak Air Tanah	290.000.000,00	14.874.724,00	5,13	-275.125.276,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	550.000,00	5,50	-9.450.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.300.000.000,00	6.816.456.339,00	61,47	-4.483.541.661,00
9	PBB-P2	12.678.202.762,00	1.840.918.838,00	14,52	-10.837.283.924,00
10	BPHTB	4.650.000.000,00	2.828.144.794,00	60,84	-1.821.855.206,00
	JUNILAH	46.453.574.884,00	26.017.229.440,00	56,01	-20.436.345.444,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Gambar 3.2 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022



Berikut rincian realisasi pajak daerah tahun 2022 :

a) Pajak hotel terealisasi sebesar Rp45.151.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.310.000,00 atau 16,10% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp30.841.000,00.

- b) Pajak restoran terealisasi sebesar Rp1.512.829.171,00 mengalami kenaikan sebesar Rp204.344.054,00 atau 15,62% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.308.485.117,00,
- c) Pajak hiburan terealisasi sebesar Rp156.400.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.250.000,00 atau 2,79% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp152.150.000,00.
- d) Pajak reklame terealisasi sebesar Rp181.047.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.501.075,00 atau 6,78% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp169.546.225,00.
- e) Pajak penerangan jalan terealisasi sebesar Rp13.619.855.274,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.660.662.696,00 atau 13,89% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp11.959.192.578,00.
- f) Pajak air tanah terealisasi sebesar Rp14.874.724,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.922.741,00 atau 276,39% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.951.983,00.
- g) Pajak sarang burung walet terealisasi sebesar Rp550.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp550,000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00.
- h) Pajak mineral logam dan batuan terealisasi sebesar Rp5.816.458.339,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.062.171.594,00 atau 54,93% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.754.286.745,00.
- i) PBB-P2 terealisasi sebesar Rp1.840.918.838,00 mengalami kenaikan sebesar Rp118.978.627,00 atau 6,91% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.721.940.211,00.
- j) BPH-TPB terealisasi sebesar Rp2.829.144.794,00 mengalami kenaikan sebesar Rp520.276.959,00 atau 22,53% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.308.867.835,00.
- 2) Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp7.669.369.560,00 terealisasi Rp3.124.547.678,00 atau 40,74%. mengalami kenaikan sebesar Rp149.425.756,00 atau 5,02% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.975.121.922,00;

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH /KURANG
		Rp	Rp		
1	Retribusi Pelayanan Perusahaan/Kebersihan	80.000.000,00	114.378.900,00	142,97	34.378.900,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.900.000,00	20.114.500,00	25,62	-58.785.500,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.350.000.000,00	101.040.900,00	48,19	-648.959.100,00
4	Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	25.480.000,00	50,96	-24.520.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	15.000.000,00	2.550.450,00	17,29	-12.449.550,00
6	Retribusi Pemakaian	1.124.000.000,00	380.279.500,00	51,63	-543.720.500,00

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH /KURANG
		Rp	Rp		
	Kekayaan Daerah				
7	Retribusi Terminal	422.000.000,00	283.055.300,00	68,70	-138.944.700,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	55.000.000,00	21.112.000,00	38,15	-33.888.000,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.500.000.000,00	1.312.182.000,00	37,49	-2.187.818.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	130.000.000,00	74.291.000,00	57,15	-55.709.000,00
11	Retribusi Pelayanan Angkutan Gedung (PDG)	944.000.000,00	290.064.428,00	30,75	-653.935.572,00
12	Retribusi Perpariwisata	190.869.360,00	0,00	0,00	-190.869.360,00
	JUMLAH	7.669.369.360,00	3.124.547.678,00	40,74	-4.544.821.682,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Berikut rincian realisasi retribusi daerah tahun 2022 ;

- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terealisasi sebesar Rp14.178.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.477.500,00 atau 19,36% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp100.901.000,00.
- Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terealisasi sebesar Rp20.114.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.266.500,00 atau 156,30% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp7.848.000,00.
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor terealisasi sebesar Rp401.040.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp71.135.000,00 atau 15,07% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp472.175.000,00.
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran terealisasi sebesar Rp25.480.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp600.000,00 atau 2,74% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp24.800.000,00.
- Retribusi pelayanan trauma terealisasi sebesar Rp2.550.450,00 mengalami penurunan sebesar Rp82.900,00 atau 3,15% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.633.350,00.
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah terealisasi sebesar Rp580.279.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp146.948.500,00 atau 33,91% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp433.331.000,00.
- Retribusi terminal terealisasi sebesar Rp283.055.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp77.152.000,00 atau 21,12% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp360.207.300,00.
- Retribusi tempat khusus parkir terealisasi sebesar Rp21.112.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.171.000,00 atau 9,32% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp23.383.000,00.
- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga terealisasi sebesar Rp1.312.182.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp177.557.000,00 atau 15,65% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.134.625.000,00.

- j) Retribusi penjualan produksi usaha daerah terealisasi sebesar Rp74.291.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.058.500,00 atau 21,33% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp61.232.500,00
- k) Retribusi persetujuan bangunan gedung terealisasi sebesar Rp290.064.428,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.021.344,00 atau 18,08% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp351.085.772,00.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp4.493.233.016,00 terealisasi Rp3.963.233.016,00 atau 88,20%, mengalami kenaikan Rp244.816.597,00 atau 6,58% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.718.416.419,00;

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2022

NO	JENIS HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/kurang
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.963.233.016,00	3.959.770.729,00	99,90%	- 3.962.787,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	30.030.000,00	3.962.787,00	13,21%	- 26.037.213,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	500.000.000,00	0,00	95,21%	- 500.000.000,00
JUMLAH		4.493.233.016,00	3.963.233.016,00	88,20%	- 530.000.000,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

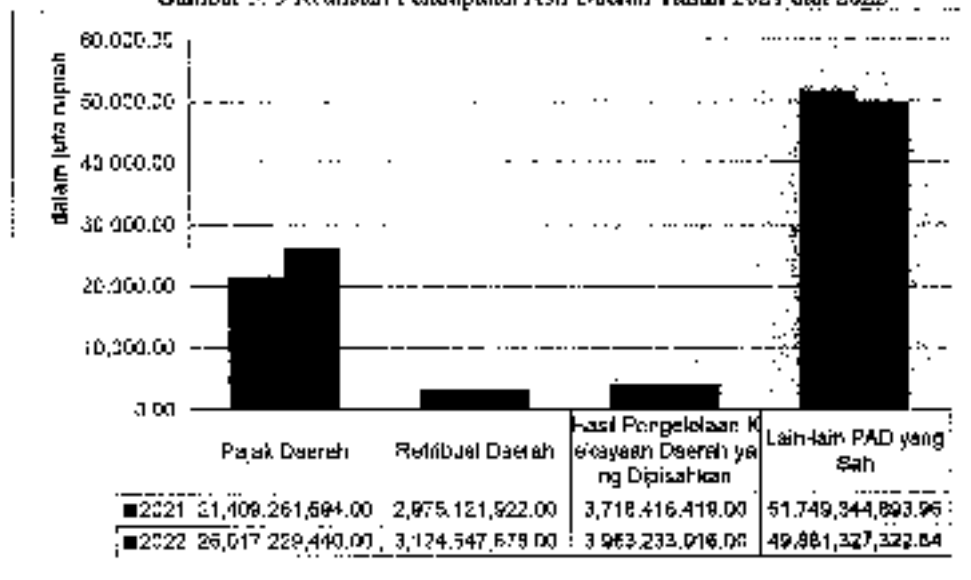
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp56.961.811.140,00 terealisasi Rp49.881.327.322,64 atau 87,57%, mengalami penurunan Rp1.868.017.571,32 atau 3,61% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp51.749.344.893,96.

Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2022

NO	JENIS LAIN-LAIN PAD YANG SAH	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH /KURANG
		Rp	Rp		
1	Hasil Penjualan DMD yang Tidak Dipisahkan	1.100.000.000,00	40.200.999,00	3,65	1.059.799.901,00
2	Hasil Kerja Sama Pemukiman DMD	0,00	476.052.048,00		476.052.048,00
3	Jasa (Jin)	3.750.000.000,00	2.433.386.140,00	64,89	1.316.613.860,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergilir	1.925.000.000,00	0,00	0,00	1.925.000.000,00
5	Pendapatan Bunga	4.666.004.140,00	0,00	0,00	4.666.004.140,00
6	Penerimaan atas Tunjangan Ganti Kerugian Kesugihan Daerah	2.000.000.000,00	2.040.648.280,64	94,69	-159.351.719,36
7	Pendapatan Pengembalian dari	136.000.000,00	136.427.630,00	100,31	-427.630,00
8	Pendapatan BLUD	42.734.807.000,00	42.954.613.125,00	103,70	-1.569.806.125,00
JUMLAH		56.961.811.140,00	49.881.327.322,64	87,57	7.080.483.817,36

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Gambar 3. 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2022



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan 2022

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan. Namun jika dilihat dari realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut maka penurunan realisasi terjadi pada retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan Rp1.184.180.181.644,00 terealisasi Rp1.128.038.625.588,00 atau 95,26%, mengalami penurunan Rp 56.139.271.045,00 atau 3,10% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.164.177.899.633,00 terdiri dari:
- 1) Dana Perimbangan ditargetkan Rp1.034.300.284.000,00 terealisasi Rp980.520.262.812,00 atau 94,80%, mengalami kenaikan sebesar Rp38.148.374.070,00 atau 4,05% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp942.371.888.742,00 yang di dalamnya terdapat:
 - Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sejumlah Rp9.579.329.000,00 terealisasi Rp13.387.540.452,00 atau 139,75%, mengalami penurunan sebesar Rp3.080.647.670,00 atau 18,71% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp16.468.188.122,00;
 - Dana Alokasi Umum ditargetkan sejumlah Rp686.668.871.000,00 terealisasi Rp682.756.183.074,00 atau 99,43%, mengalami penurunan sebesar Rp3.912.687.926,00 atau 0,57% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp686.668.871.000,00;
 - Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sejumlah Rp114.473.134.000,00 terealisasi Rp98.518.292.418,00 atau 86,06%, mengalami kenaikan sebesar Rp26.259.794.924,00 atau 36,34% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp72.258.497.494,00;
 - Dana Alokasi Khusus non Fisik ditargetkan sejumlah Rp217.709.058.000,00 terealisasi Rp181.051.158.966,00 atau 83,16%, mengalami kenaikan Rp17.619.210.371,00 atau 10,78% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp163.431.928.595,00.
 - 2) Transfer Pemerintah Pusat lainnya – Dana Desa ditargetkan sejumlah Rp74.850.449.000,00 terealisasi Rp74.850.449.000,00 atau 100%, mengalami penurunan sebesar Rp6.871.903.000,00 atau 8,41% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp81.722.352.000,00.
- c. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah ditargetkan Rp75.029.448.644,00 terealisasi Rp72.667.913.776,00 atau 96,85%, mengalami kenaikan sebesar Rp16.501.994.185,00 atau 29,38% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp56.165.919.591,00 terdiri dari:
- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak ditargetkan Rp67.029.448.644,00 terealisasi Rp61.667.913.776,00 atau 96,48% mengalami kenaikan sebesar Rp8.501.994.185,00 atau 15,14% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp56.165.919.591,00;
 - 2) Bantuan Keuangan ditargetkan Rp8.000.000.000,00 terealisasi Rp8.000.000.000,00 atau 100% mengalami kenaikan sebesar Rp8.000.000.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sejumlah Rp15.413.223.917,00 terealisasi Rp14.514.513.770,00 atau 94,17% mengalami penurunan sebesar Rp2.247.987.974,00 atau 13,41% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp16.762.501.744,00 terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah ditargetkan Rp15.373.223.917,00 terealisasi Rp14.174.513.770,00 atau 94,15% mengalami kenaikan sebesar Rp1.382.899.754,00 atau 10,56% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp13.091.614,016,00;
- 2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditargetkan Rp10.000.000,00 terealisasi Rp40.000.000,00 atau 100% mengalami penurunan sebesar Rp36.720.887.728,00 atau 99,89% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp36.760.887.728,00.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah diukur dengan beberapa rasio berikut:

1. Rasio Pajak

Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian (PDRB). Berikut penghitungan rasio pajak APBD tahun 2022 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio pajak} &= \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PDRB}} \\ &= \frac{\text{Rp26.017.229.440,00}}{\text{Rp17.900.761.790,00}} \\ &= 1,45\% \end{aligned}$$

Rasio pajak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 1,45%. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah. Terkait dengan perekonomian daerah, daerah yang memiliki rasio pajak yang rendah akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah pula. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dicerminkan oleh belum berkembangnya sektor-sektor produksi penyumbang pertumbuhan ekonomi di daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pajak daerah.

2. Tax Perkapita

Tax perkapita adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Berikut penghitungan tax perkapita Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 :

$$\begin{aligned} \text{Tax perkapita} &= \frac{\text{Penerimaan pajak}}{\text{jumlah penduduk}} \\ &= \frac{\text{Rp26.017.229.440,00}}{394.375 \text{ jiwa}} \\ &= \text{Rp66.990,00/jiwa} \end{aligned}$$

Tax perkapita menunjukkan bahwa setiap penduduk yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kontribusi sebesar Rp.66.990,00 dalam membentuk penerimaan daerah berupa Pajak Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa basis pajak dan potensi pajak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah.

3. Rasio PAD terhadap total pendapatan = $\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan}}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp62.962.487.456,64}}{\text{Rp1.225.539.476.814,64}} \\ &= 6,77\% \end{aligned}$$

Rasio PAD terhadap total pendapatan tahun 2022 senilai 6,77% menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat rendah.

$$4. \text{ Rasio transfer terhadap total pendapatan} = \frac{\text{transfer}}{\text{pendapatan}}$$

$$= \frac{\text{Rp1.124.038.675,583,00}}{\text{Rp1.225.334.476.814,64}}$$

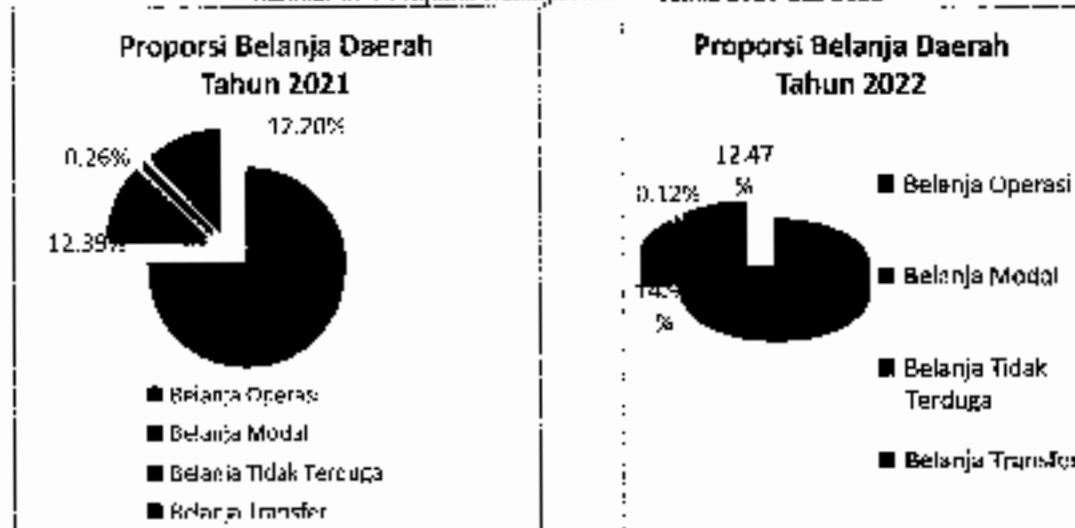
$$= 92,04\%$$

Rasio transfer terhadap total pendapatan tahun 2022 senilai 92,04% menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Dalam arti kata lain, tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat rendah.

3.1.2. Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.335.440.101.346,00 dengan realisasinya mencapai 92,15% atau sebesar Rp1.230.594.731.297,76. Proporsi terbesar anggaran belanja daerah adalah Belanja Operasi sebesar Rp967.153.552.568,00 atau 72,42%, disusul Belanja modal sebesar Rp200.167.415.482,00 atau 14,99%, lalu Belanja transfer sebesar Rp166.531.142.857,00 atau 12,47% sedangkan Belanja tak terduga sebesar Rp1.587.990.439,00 atau 0,12%.

Gambar 3. 4 Proporsi Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022



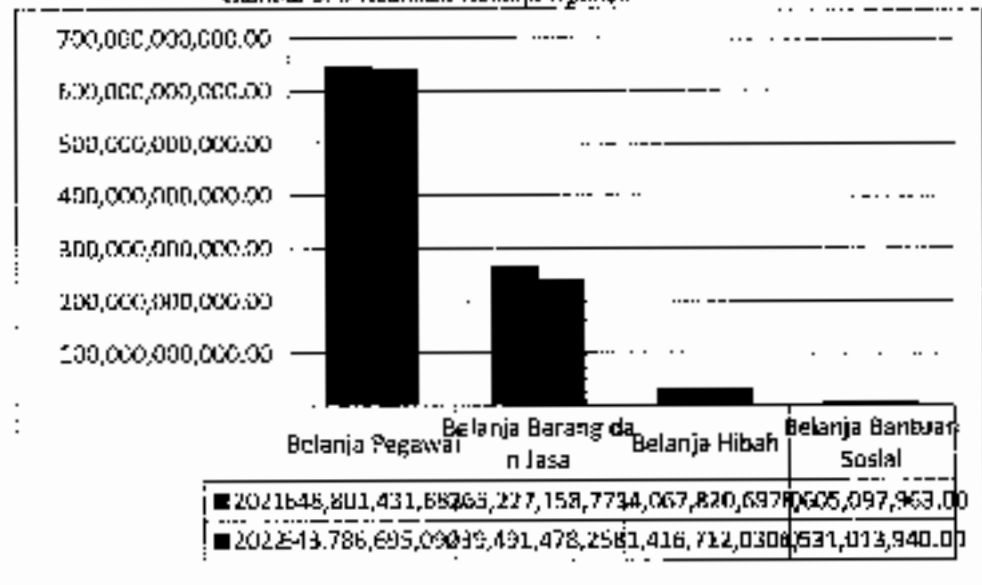
Sumber: APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan 2022

Anggaran belanja operasi pada tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp659.251.836.643,00 atau 68,16%, belanja barang dan jasa sebesar Rp262.795.367.399,00 atau 27,17%, belanja hibah 38.379.298.526,00 atau 3,97%, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp6.727.050.000,00 atau 0,70%. Perbandingan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2022 dan 2021 yaitu:



- a. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp643.786.695.090,40 atau 97,65% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp648.801.431.683,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.014.736.592,60 atau 0,77%;
- b. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp239.491.478.258,36 atau 93,13% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp265.227.158.771,92 mengalami penurunan sebesar Rp25.735.680.513,56 atau 9,70%;
- c. Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2022 sebesar Rp31.416.712.030,00 atau 81,86% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp34.067.820.697,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.651.108.667,00 atau 7,78%;
- d. Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.531.013.940,00 atau 97,09% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp8.605.097.963,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.074.084.023,00 atau 24,10%.

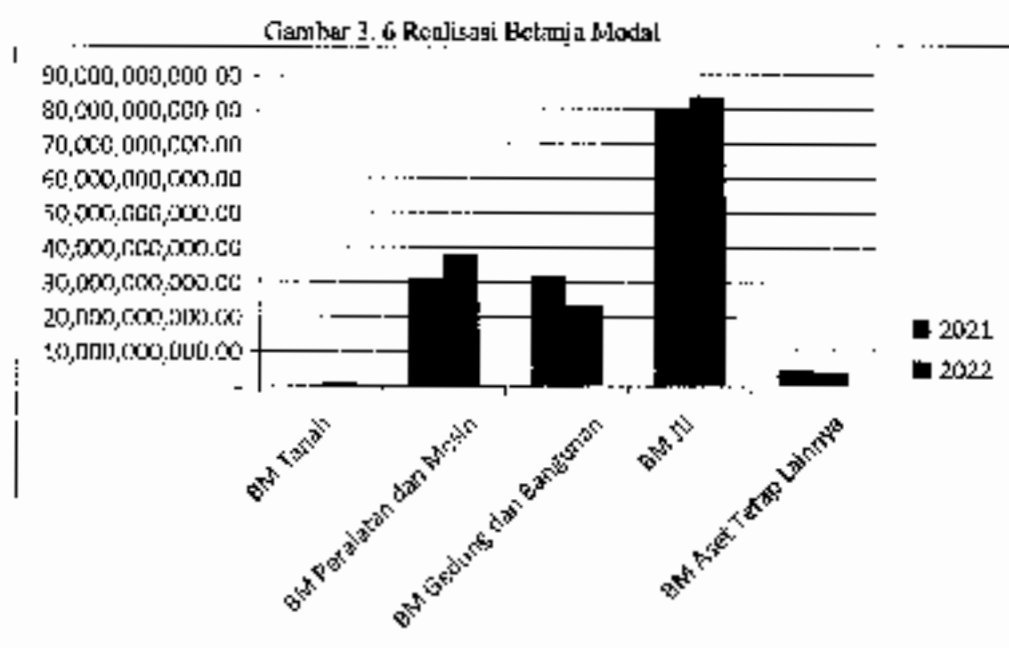
Gambar 3. 5 Realisasi Belanja Operasi



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dan 2021

Anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp5.072.550.000,00 atau 2,53%; belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp13.094.705.306,00 atau 21,53%; belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp36.284.375.852,00 atau 18,11%; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp111.247.175.308,00 atau 55,58%; dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 4.468.609.016,00 atau 2,23%. Secara keseluruhan, realisasi belanja modal tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.332.801.370,00 atau 2,33%; realisasi tahun 2022 sebesar Rp149.956.373.662,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp147.602.625.105,00. Perbandingan realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021 yaitu:

- Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.164.122.710,00 atau 32,95% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp215.885.219,00 mengalami kenaikan sebesar Rp948.237.491,00 atau 439,23%.
- Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp38.314.925.065,00 atau 88,91% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp31.510.467.807,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.804.457.258,00 atau 21,59%;
- Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp23.220.870.928,00 atau 64,00% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp31.719.900.607,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.499.029.679,00 atau 26,79%;
- Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2022 sebesar Rp83.965.835.510,00 atau 75,48% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp79.886.699.210,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.079.136.300,00 atau 5,11%;
- Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.290.619.419,00 atau 73,64% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.269.672.262,00 mengalami penurunan sebesar Rp979.052.843,00 atau 22,93%.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan 2022

Anggaran belanja tidak terduga untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.587.990.439,00 dan terealisasi sebesar 44,65% atau Rp708.965.000,00. Anggaran belanja transfer untuk tahun 2022 sebesar Rp166.531.142.857,00 dan terealisasi sebesar 95,30% atau Rp158.703.493.317,00. Belanja transfer terdiri dari belanja transfer/hagi hasil kabupaten/kota sebesar Rp5.405.104.357,00 dan terealisasi sebesar 35,71% atau

Rp1.930.308.868,00, belanja bantuan keuangan sebesar Rp161.126.038.500,00 dan terealisasi sebesar 97,30% atau Rp156.773.184.449,00).

Anggaran dan realisasi belanja setiap OPD untuk tahun anggaran 2022 dijelaskan pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja OPD
Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA UNIT ORGANISASI (OPD)	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
		Rp	Rp		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	485.156.888.944,00	469.322.209.039,00	96,62	-16.874.489.905,00
2	HSJRI dr Achmad Darwis	47.750.883.057,00	46.642.787.249,00	97,68	-1.108.105.808,00
3	Dinas Kesehatan	132.102.931.388,00	119.788.091.794,75	90,68	-12.334.839.593,24
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	138.482.581.825,00	101.942.653.804,00	73,64	-36.489.911.121,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.064.469.311,00	9.782.919.814,00	96,99	-301.539.497,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.639.824.453,00	6.600.703.892,00	99,41	-39.120.561,00
7	Dinas Sosial	5.884.393.895,00	5.711.275.040,00	97,06	-173.118.855,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.104.873.390,00	4.940.519.432,00	96,78	-164.353.958,00
9	Dinas Pangan	5.918.811.595,00	5.821.676.323,00	98,36	-97.138.272,00
10	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman	22.653.914.018,00	21.473.188.090,00	94,81	-1.174.725.928,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.554.834.781,00	4.384.517.160,00	96,48	-160.317.621,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.726.833.048,00	6.352.086.295,00	94,43	-374.546.753,00
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB & P2A	8.544.863.621,00	7.062.346.847,00	82,65	-1.482.603.774,00
14	Dinas Pertubungan	15.987.691.474,00	15.170.599.593,00	95,01	-796.991.881,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.264.200.737,00	7.965.138.177,00	96,27	-271.062.560,00
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	6.372.896.436,00	5.444.535.981,00	85,43	-928.362.455,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Sifat Pribadi	4.178.852.373,00	4.082.889.653,00	97,70	-95.962.720,00
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	20.412.588.975,00	11.872.342.433,00	58,18	-8.540.247.443,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	3.776.930.025,00	3.757.289.455,00	99,48	-19.640.570,00
20	Dinas Perikanan	7.910.863.217,00	7.327.662.031,00	92,63	-583.001.186,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	27.820.943.332,00	24.729.120.005,00	88,88	-3.091.823.327,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.520.033.082,00	10.955.494.670,00	95,10	-564.538.412,00
23	Sekretariat Daerah	42.384.599.356,00	40.174.434.898,00	94,79	-2.210.154.680,00
24	Sekretariat DPRD	39.741.943.515,00	38.207.061.202,00	96,14	-1.534.882.313,00
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	6.785.184.465,00	5.718.147.245,00	84,29	-1.067.037.220,00
26	Badan Keuangan	208.058.348.615,00	198.281.603.712,00	94,34	-11.778.954.903,00
27	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.528.290.547,00	7.784.204.298,00	91,27	-744.086.249,00
28	Inspektorat	10.989.402.879,00	9.745.049.257,00	89,49	-1.244.353.622,00
29	Kecamatan Gunung Qimih	1.352.213.115,00	1.381.559.654,00	99,23	10.853.451,00
30	Kecamatan Bukit Bansan	1.404.016.674,00	1.372.489.987,00	97,75	-31.526.707,00

NO	NAMA UNIT ORGANISASI (OPD)	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH KURANG
		Rp	Rp		
31	Kecamatan Sulki	1.839.978.765,00	1.627.361.833,00	88,22	-12.816.932,00
32	Kecamatan Guguk	1.577.565.652,00	1.544.071.874,00	97,88	-33.493.678,00
33	Kecamatan Mungka	1.956.420.827,00	1.926.062.294,00	98,45	-30.358.533,00
34	Kecamatan Akabikuru	1.778.960.363,00	1.776.278.903,00	99,85	-2.701.380,00
35	Kecamatan Payakumbuh	2.086.750.712,00	2.071.066.528,00	99,25	-15.684.184,00
36	Kecamatan Liah	1.576.040.280,00	1.568.222.285,00	99,38	-8.818.002,00
37	Kecamatan Lureh Sago Halaban	1.738.935.393,00	1.729.361.836,00	99,45	-9.571.757,00
38	Kecamatan Sibuluh Limo Nagai	1.669.237.952,00	1.639.277.845,00	98,80	-19.965.147,00
39	Kecamatan Harau	1.993.458.084,00	1.903.498.301,00	95,50	-9.967.783,00
40	Kecamatan Pengkalan Kota Baru	1.519.119.011,00	1.493.536.942,00	98,32	-25.582.169,00
41	Kecamatan Kapur IX	2.138.227.502,00	2.085.531.348,00	97,52	-22.696.154,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.466.931.701,00	5.961.244.605,00	92,18	-505.686.596,00
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.014.104.314,00	4.872.437.604,00	97,17	-141.666.410,00
JUMLAH		1.338.440.101.345,00	1.230.664.731.297,76	92,15	-107.845.370.048,24

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Pencapaian kinerja belanja daerah tahun anggaran 2022 diukur dengan beberapa rasio berikut :

1. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah

Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Berikut penghitungan rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah :

$$\text{Rasio belanja pegawai-total belanja} = \frac{\text{belanja pegawai}}{\text{total belanja}}$$

$$\text{Rasio belanja pegawai-total belanja} = \frac{\text{Rp}61.786.695.090,40}{\text{Rp}1.230.594.731.297,76}$$

$$\text{Rasio belanja pegawai-total belanja} = 52,32 \%$$

Hasil penghitungan rasio belanja pegawai terhadap total belanja mengindikasikan bahwa proporsi APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 didominasi oleh belanja pegawai.

2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal.

Berikut penghitungan rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja daerah :

$$\text{Rasio belanja modal-total belanja} = \frac{\text{belanja modal}}{\text{total belanja}}$$

$$\text{Rasio belanja modal-total belanja} = \frac{\text{Rp}149.955.373.412,00}{\text{Rp}1.230.594.731.297,76}$$

$$\text{Rasio belanja modal-total belanja} = 12,19 \%$$

Rasio belanja modal terhadap total belanja tahun 2022 hanya berjumlah 12,19% dari total belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum memberikan perhatian yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Rasio Belanja Daerah Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya. Sebaliknya, semakin kecil angka rasionya, semakin kecil dana yang disediakan peradu untuk menyejahterakan penduduknya. Namun demikian, rasio ini sebaiknya juga dirinci lagi menjadi per jenis belanja perkapita sehingga akan lebih memperlihatkan kontribusi dari setiap jenis belanja sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

$$\begin{aligned} \text{Rasio total belanja - jumlah penduduk} &= \frac{\text{total belanja}}{\text{jumlah penduduk}} \\ &= \frac{\text{Rp}1.230.594.731.297,76}{300.375 \text{ jiwa}} \\ &= \text{Rp}3.168.573,50/\text{jiwa} \end{aligned}$$

Rasio total belanja terhadap jumlah penduduk mencerminkan bahwa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan satu orang penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar Rp.3.168.573,50.

4. Rasio Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk

Rasio belanja modal perkapita menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk. Rasio belanja modal perkapita memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan.

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja modal - jumlah penduduk} &= \frac{\text{belanja modal}}{\text{jumlah penduduk}} \\ &= \frac{\text{Rp}149.956.373.662,00}{300.375 \text{ jiwa}} \\ &= \text{Rp}386.112,32/\text{jiwa} \end{aligned}$$

Dari hasil penghitungan rasio belanja modal di atas dapat kita lihat bahwa belanja modal untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 difokuskan pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu melalui penggunaan SiLPA sebesar 21.768.707.385 dan terealisasi sebesar 100,00%. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 berupa penyertaan modal daerah pada BUMD yang dianggarkan 1.500.000.000,00 dan juga terealisasi sebesar 100,00%.



Pencapaian kinerja pembiayaan diukur dengan rasio berikut :

1. Rasio surplus/defisit

$$\begin{aligned}\text{Rasio surplus/defisit} &= \text{pendapatan daerah} - \text{belanja daerah} \\ &= \text{Rp1.225.539.476.814,61} - \text{Rp1.230.594.731.297,76} \\ &= (\text{Rp} 5.055.254.483,12)\end{aligned}$$

Dari hasil penghitungan rasio surplus/defisit dapat kita lihat bahwa APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 mengalami defisit anggaran sebesar Rp5.055.254.483,12

2. Rasio Sil.PA

$$\begin{aligned}\text{Rasio Sil.PA} &= \frac{\text{Sil.PA}}{\text{total belanja}} \\ &= \frac{\text{Rp21.760.707.380,00}}{\text{Rp1.230.594.731.297,76}} \\ &= 1,77\%\end{aligned}$$

Dari hasil penghitungan rasio SILPA dapat kita lihat bahwa persentase Sil.PA terhadap belanja di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 adalah sebesar 1,77%.

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya, dari tiga sumber Pendapatan Daerah, yang dapat dikendalikan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota baik melalui kebijakan maupun intervensi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian realisasi penerimaan atas PAD merupakan cerminan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. penurunan aktifitas perekonomian masyarakat secara umum
2. masih terbatasnya kualitas dan jumlah sumber daya manusia aparatur pemungutan pajak daerah
3. sarana dan prasarana pendukung pelayanan wajib pajak masih terbatas
4. administrasi perpajakan daerah masih perlu dibenahi baik kelembagaan, sistem dan prosedur maupun aplikasi penyelenggaraan pajak daerah
5. belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sebagai langkah solusi dari kendala yang masih ditemui antara lain :

1. mendorong peningkatan pengetahuan aparatur melalui sosialisasi,
2. peningkatan pemahaman regulasi terkait,
3. study dan sharing informasi dengan instansi terkait horizontal dan vertikal baik melalui pertemuan langsung maupun melalui pertemuan secara virtual/zooming,
4. melakukan penyempurnaan terkait regulasi pajak dan retribusi daerah,
5. melakukan pembinaan dan pengendalian dengan instansi terkait vertikal terutama dalam objek pajak yang kewenangan pelaksanaan kegiatan usahanya berada pada instansi vertikal dan melakukan pengawasan,

6. melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

Berikut dijelaskan kegiatan-kegiatan yang pencapaian kinerja keuangannya kurang dari 80% dan kendala dalam pencapaian target keuangan tersebut :

1. Inspektoral

Tabel 3. 7 Kegiatan yang pencapaian kinerja keuangan kurang dari 80% pada Inspektoral

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kendala dalam pencapaian target
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.173.000,00	8.181.000,00	62,18	Kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan biaya sebesar anggaran yang direalisasikan
2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga.	15.873.700,00	7.877.600,00	49,32	Kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan biaya sebesar anggaran yang direalisasikan
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	2.000.000,00	0,00	00,00	kegiatan penyediaan bahan bacaan sudah terpenuhi pada bahan/aturan yang ada pada belanja tahun sebelumnya.
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237.200.000,00	33.249.728,00	14,02	Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan Inspektoral Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi Tunda Bayar Tahun 2022 karena adanya permasalahan keuangan daerah.
5	Perancangan Kerugian Negara/ Daerah	93.185.000,00	33.5882.700,00	37,25	Rapat TPKN tidak terlaksana.
6	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi	143.759.000,00	95.795.452,00	66,64	Kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan biaya sebesar anggaran yang direalisasikan

2. DPMDN

Tabel 3. 8 Kegiatan yang pencapaian kinerja keuangan kurang dari 80% pada DPMDN

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kendala dalam pencapaian target
1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	357.800.100,00	151.857.500,00	42,47	kegiatan yang direncanakan diadakan berupa Studi Tinu Anggota Bamus se Kecamatan Payakumbuh ke Bengkulu, namun tidak terlaksana karena diawal yang bersamaan banyak kegiatan yang dilakukan.

3. Bapelitbang

Tabel 3. 9 Kegiatan yang pencapaian kinerja keuangan kurang dari 80% pada Bapelitbang

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kendala dalam pencapaian target
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	505.440.100,00	230.478.352,00	46,79	siswa dana dari kegiatan IPOMIP yang merupakan Dana Hibah On Granting untuk tahun 2022 dilaksanakan sampai bulan April, karena batas akhir Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk Bapelitbang adalah 30 Juni 2022, maka seluruh dokumen permintaan Reimbursement atau penggantian Dana Hibah ADB/AJF ditesima NPMU paling lambat 30 April 2022.
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.478.000,00	9.185.932,00	72,47	tidak semua Tenaga Kontrak dibiayai BPJS dari kantor dan ada Tenaga Kontrak yang mengundurkan diri pada Tahun 2022, sehingga kelebihan dana pada Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN.
3	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi	123.205.000,00	94.112.418,00	76,39	Pembayaran tahap akhir Honorarium/Jasa Tenaga Ahli tidak dapat dilaksanakan karena keuangan daerah tahun anggaran 2022 tidak mencukupi.

4. Kesbang Pol

Tabel 3. 10 Kegiatan yang pencapaian kinerja keuangan kurang dari 80% pada Kesbangpol

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kendala dalam pencapaian target
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik E-lku Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	55.482.100,00,00	25.202.500,00,00	66,39	status politik daerah aman dan kondusif sehingga tidak diperlukan monitoring secara intensif.
2	Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pembudayaan Ormas, Evaluasi dan Madasi Sengketa Ormas, Pengawas Ormas dan Ormas Asing di Daerah	153.114.300,00,00	122.095.814,00,00	79,74	adanya perijinan dinas yang tidak terrealisasi karena banyaknya undangan berupa zoom meeting
3	Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota	460.357.100,00	355.920.560,00	77,31	adanya pengurangan anggota dari wakil ketua DPRD 2 orang dan Wakil Bupati 1 orang.
4	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.003.000,00	5.983.000,00	74,51	persediaan alat-alat listrik masih ada.

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kendala dalam pencapaian target
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.804.750,00	13.534.022,00	75,99	Jumlah tagihan lebih rendah dari yang diperkirakan.
6	Peneliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	16.840.000,00	7.320.000,00	43,47	tidak adanya kerusakan dalam operasional kantor.

BAR IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelujah atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) dalam Tahun Anggaran 2021 adalah Badan Keuangan (BK). Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca yang disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai entitas pelaporan, maka laporan keuangan yang disusun oleh Badan Keuangan selaku SKPKD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan SKPKD sebagai PPKD/BUSD. Laporan realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah, untuk penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

a. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

b. Basis kas juga digunakan dalam penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Demikian juga dengan Laporan Arus Kas, menggunakan basis kas.

c. Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

d. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- e. Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

a. Kas Dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahara umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Perspsi.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/diketola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab OPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

5) Kas Lainnya

Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

b. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan dicatat sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar

IP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah lunstun Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

d. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dihindarkan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya laubahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergilir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

f. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian dan biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya penulungan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya



konstruksi, termasuk biaya pengurusan EMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

h. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

j. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

k. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan,
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambahi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh OPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/hertahinya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan penandaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran + 1.

Merubah Pengelompokan Aset Tetap Peralatan dan Mesin setelah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik daerah dengan rincian sebagai berikut :

Pengelompokan dan Masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Semula :

Kode Rekening				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Berat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	6
1	3	2	3	Alat-alat Baru	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	7	12	Alat Pengelolaan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	6
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	6
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempal Kera	50

Kode Rekening				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempel Tiang	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	40
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Cardi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol Pasir	50
1	3	3	10	Rambu Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Saku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Perlengkapan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Setelah dilakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan kodifikasi Barang milik Daerah, pengelompokan menjadi :

Kode Rekening			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3		ASSET TETAP	
1	3	2	Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1 Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2 Alat-Alat Besi Apung	8
1	3	2	3 Alat-alat Rambu	7
1	3	2	4 Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	5
1	3	2	6 Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7 Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8 Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9 Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10 Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11 Alat Ekur	5
1	3	2	12 Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
1	3	2	14 Alat Kambor	5
1	3	2	15 Alat Rumah Tongga	5
1	3	2	16 Peralatan Komputer	4
1	3	2	17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18 Alat Soudio	5
1	3	2	19 Alat Komunikasi	5
1	3	2	20 Perhiasan Perhiasan	10
1	3	2	21 Alat Kedokteran	5
1	3	2	22 Alat Kesehatan	5
1	3	2	23 Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24 Alat Praga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28 Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31 Senjata Api	10
1	3	2	32 Peralengkapan Non Senjata Api	3
1	3	2	33 Alat Keamanan dan Pertahanan	5
1	3	2	35 Alat Eksplorasi	5
1	3	2	36 Alat Pengeloran	7
1	3	2	37 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	8
1	3	2	38 Alat Bantu Eksplorasi	7

Kode Rekening				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	39	Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	40	Kanbu-sambu lalu lintas darat	50
1	3	2	41	Kanbu-sambu lalu lintas udara	50
1	3	2	42	Peralatan Olahraga	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Memori	40
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Puari	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Kawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaliran Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	40
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahar/Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

4.4.5.1. Reklasifikasi Aset Gedung Dan Bangunan Ke Aset Peralatan Dan Mesin

Aset Tetap Gedung dan bangunan *Rambu-rambu* direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin, mulai Tahun buku 2020 dengan mereklass akun tersebut termasuk dengan mereklass penyusutannya secara keseluruhan.

4.4.5.2. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya Ke Aset Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Lainnya *Peralatan Olahraga* direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin, mulai Tahun buku 2020 dengan mereklass akun tersebut termasuk dengan mereklass penyusutannya secara keseluruhan.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah. Bahan Penyusutan pada Laporan Operasional akan dilakukan penyesuaian dan koreksi pada Laporan ekuitas.

Perubahan Pengelompokan Aset Tetap ini akan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan dengan ilustrasi sebagai berikut :

1. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota per 31 Desember 20xx adalah sebesar Rp..... mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp..... dari tahun 20xx-1 sebesar Rp.....

2. Beban Penyusutan

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Aset Tetap yang terkait beban penyusutan telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan dalam penjelasan pos ini disajikan perbandingan antara Beban Penyusutan Aset Tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dengan ilustrasi sebagai berikut:

Realisasi beban Penyusutan Aset Tetap tahun 20xx sebesar Rp..... dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp..... dari tahun 20xx-1 sebesar Rp.....

Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo awal ekuitas tahun berjalan yang berasal dari saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya ditambah dengan surplus atau dikurangi defisit dari Laporan Operasional serta adanya koreksi atau penyesuaian ekuitas sebagai dampak karena adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar.



Laporan Penahanan Ekuitas merupakan laporan yang akan berpengaruh dan yang menjadi penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.4.9.1 Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sesuai dengan paragraf 16 PSAP 08, suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (decision tree) sebagai berikut:

1. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (objective evidences); dan
2. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form).

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, antara lain :

Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam C.A.K.

Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukan.



4.4.9.2 Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterseediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada saat dikurangkan sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.

Apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.10. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

4.4.10.1. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahan dan upah langsung berhubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi



Asuransi, misalnya asuransi kebakaran; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

4.4.10.2. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyampaian dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

4.4.10.3. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dihayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atau peningkatan pemerintah, yang nilai aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut diterapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

4.4.11. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kesalahan tidak berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlukannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pemberulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengentalkan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan- LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Setiap Kelompok Aset lainnya memiliki karakteristik Pengukuran dan Pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut :

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah dari secara angsuran kepada pegawai/kopala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang DPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Perubeburan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

Untuk Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa :

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Pemendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer- BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya

kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati (misal konsesi). Dalam Perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. **Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate BTO)**

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah penanulaan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaun/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat dilakukan secara bagi hasil.

3. **Aset Tidak Berwujud (ATB)**

Buletin Teknis SAP Nomor 11 Tentang Aset Tak Berwujud (ATB) Menyebutkan bahwa aset tak berwujud (ATB) adalah aset Non Moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas :

a. **Goodwill**

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. **Hak Paten atau Hak Cipta**

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

- c. Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan /dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/ hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lainnya.
- d. Software
Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atau software berkenaan.
- e. Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- f. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa 20 yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- g. Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*Intangible Asset Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak berwujud yang bersangkutan.
Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika :
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dikuasai oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap Aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan dan ditapiskan,



berdasarkan ketentuan yang ada menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtugunkan maupun karena berakhirnya masa manfaat/ tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus ditutup. Dalam Hal Penghentian Aset Tak Berwujud merupakan akibat dari pindahtugunan dengan cara dijual atau diperjualkankan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tak Berwujud yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tak Berwujud terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan aset pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus secara hal metode penyusutan yang telah dibalut pada bab Aset Tetap. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Terhadap aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dilakukan amortisasi, dengan cara membagi nilai atau harga perolehan dengan masa manfaat aset tersebut

Untuk aset tak berwujud yang mempunyai masa manfaat tak terbatas umur ekonomisnya adalah selama masa kontrak atau masa pemeliharaan.

Perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Amortisasi Aset tak berwujud

Menetapkan nilai amortisasi aset lainnya berupa aset tak berwujud dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut. Untuk Aset Tak Berwujud ditetapkan masa manfaatnya 10 tahun mulai untuk pengadaan Tahun 2021.

Penyajian Dan Pengungkapan

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah.

Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan Keuangan sekurang



kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tak berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BCYT, dan BTO);
- d. Informasi lain yang penting.

Penyusutan Aset Rusak Berat

Menyajikan penyusutan Aset Lainnya berupa Aset Rusak Berat di neraca sebagai pengurang nilai aset rusak berat sehingga menyajikan kondisi riilnya.

4. Aset Lain-Lain

Aset Tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahalihan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan di reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumberdaya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan urus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

Pendapatan BLUD bersumber Dari:

- a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas /entitas pelaporan;
- c. Pendapatan hasil kerja sama;
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan

e. Pendapatan BLUD lainnya.

Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

Beban pada BLUD diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarannya kas. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/hertalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan realisasi pendapatan dan belanja tahun 2022 terlampir pada **Lampiran 1**.

5.1.1. Pendapatan LRA	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.225.539.476.814,64	1.260.792.546.305,96

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada TA 2022, anggaran Pendapatan sebesar Rp1.315.171.393.961,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.225.539.476.814,64 atau 93,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp1.260.792.546.305,96 realisasi pendapatan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp35.253.069.491,32 atau menurun sebesar 2,80%.

Sementara rincian anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2022 dan 2021 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	115.577.988.400,00	82.988.397.458,64	71,80	76.862.144.928,98
2	Pendapatan Transfer – LRA	1.184.180.181.644,00	1.128.038.525.588,00	95,26	1.164.177.898.833,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	15.413.225.917,00	14.514.513.770,00	94,17	16.762.501.744,00
Jumlah		1.315.171.393.961,00	1.225.539.476.814,64	93,18	1.260.792.546.305,96

Adapun rincian realisasi pendapatan per-OPD tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 2 Realisasi Pendapatan Tahun 2022 per OPD

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan	18.500.000.000,00	17.912.210.529,00
2	RSUD dr.Achmad Dawis	73.844.807.000,00	26.042.402.802,00

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.344.000.000,00	578.814.428,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	25.480.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	190.889.300,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman	260.000.000,00	114.378.500,00
7	Dinas Pertubungan	1.785.500.000,00	732.321.800,00
8	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	35.000.000,00	2.550.450,00
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.506.000.000,00	1.313.122.000,00
10	Dinas Perikanan	150.000.000,00	82.355.000,00
11	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	105.000.000,00	79.138.000,00
12	Badan Keuangan	1.265.237.217.601,00	1.178.803.059.511,64
13	Sekretariat Daerah	123.000.000,00	53.548.000,00
Jumlah		1.316.471.393.961,00	1.225.539.476.814,64

A. Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	82.986.337.456,64	79.852.144.928,96

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp82.986.337.456,64 atau 71,80% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp115.577.988.400,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar Rp79.852.144.928,96 realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.134.192.527,68 atau sebesar 3,92%.

Tabel 5. 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	46.463.574.884,00	26.017.229.440,00	56,01%	21.409.261.884,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	7.659.368.360,00	3.124.547.678,00	40,74%	2.975.121.822,00
3	Pendapatan Hasil Pengalihan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	4.493.233.016,00	3.863.233.818,00	86,20%	3.718.418.418,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah LRA	56.961.811.740,00	49.081.327.322,64	87,57%	51.749.344.893,96
Jumlah		115.577.988.400,00	82.986.337.456,64	71,80%	79.852.144.928,96

Adapun rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah per-OPD Tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 4 Realisasi Perulapatan Asli Daerah per-OPD Tahun 2022

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan	18.500.000.000,00	17.912.210.523,00
2	RSUD dr.Achmed Darwis	23.884.807.000,00	26.042.407.602,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.344.000.000,00	578.814.428,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	25.480.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	190.889.380,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	280.000.000,00	114.378.600,00
7	Dinas Perhubungan	1.785.500.000,00	732.321.800,00
8	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	35.000.000,00	2.550.450,00
9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	3.506.000.000,00	1.313.122.000,00
10	Dinas Perikanan	150.000.000,00	82.355.000,00
11	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	105.000.000,00	79.136.000,00
12	Badan Keuangan	65.643.812.040,00	58.048.920.153,84
13	Sekretariat Daerah	123.000.000,00	53.548.000,00
Jumlah		115.577.988.400,00	82.988.337.458,84

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2022:

1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 adalah sebesar Rp26.017.229.140,00 atau sebesar 56,01% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp46.453.574.884,00). Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp23.409.265.094,00 realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.607.967.746,00 atau sebesar 21,52%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel – LRA	822.960.000,00	45.161.000,00	7,25	30.841.000,00
2	Pajak Restoran LRA	2.460.065.600,00	1.512.828.171,00	61,50	1.508.465.117,00
3	Pajak Hiburan – LRA	260.000.000,00	156.400.000,00	60,15	152.150.000,00
4	Pajak Reklame LRA	334.500.000,00	191.047.300,00	54,06	169.546.225,00
5	Pajak Penerangan	13.847.445.522,00	13.678.855.274,00	98,98	11.858.192.578,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Jalan - LRA				
6	Pajak Air Tanah LRA	290.000.000,00	14.874.724,00	5,13	3.951.983,00
7	Pajak sarang burung walet-LRA	10.000.000,00	150.000,00	5,50	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	11.500.000.000,00	5.816.458.339,00	51,47	3.754.288.745,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	12.678.202.782,00	1.840.916.039,00	14,52	1.721.940.211,00
10	Bea Perolehan Hak Ales Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	4.650.000.000,00	2.929.144.794,00	60,84	2.308.867.836,00
	Jumlah	46.483.874.884,00	26.017.229.440,00	56,01	21.409.281.894,00

Berdasarkan tabel 5.5 di atas dapat kita lihat bahwa dari 10 (sepuluh) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat empat jenis pajak daerah yang realisasinya kurang dari 50% yaitu pajak hotel, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan PBB-P2. Berikut dijelaskan penyebab rendahnya realisasi pendapatan masing-masing pajak tersebut :

1. Pajak hotel

a. Over budgeting

Berdasarkan hasil penghitungan potensi pada 33 (tiga puluh tiga) hotel yang telah memiliki izin usaha dengan asumsi kamar hotel hanya terisi setiap akhir pekan (hari Sabtu dan Minggu), maka diperoleh jumlah potensi sebesar Rp. 488.280.000,00. Sehingga target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp622.960.000,00 jauh melebihi potensi yang ada dimana terdapat kelebihan penganggaran sebesar Rp134.680.000,00.

b. Lemahnya pengelolaan pajak daerah

Lemahnya pengelolaan pajak daerah dapat terlihat dari kurang optimalnya pemungutan pajak terhadap wajib pajak.

2. Pajak air tanah

a. Over Budgeting

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp290.000.000,00 masih berdasarkan target tahun-tahun sebelumnya dimana masih meumpang potensi dari objek pajak Ratang Tahik sebagai penyumbang terbesar pajak air tanah. Sedangkan sejak tahun 2020 objek pajak tersebut sudah tidak menjadi objek pajak air tanah melainkan menjadi objek pajak air permukaan yang pemungutannya merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi. Seharusnya target yang ditetapkan mengacu pada potensi pajak air tanah untuk tahun 2022 sebesar Rp77.918.414,00.

- b. Lemahnya pengelolaan pajak daerah
Lemahnya pengelolaan pajak daerah dapat terlihat dari kurang optimalnya pemungutan pajak terhadap wajib pajak.
3. Pajak sarang burung walet
- a. Lemahnya pengelolaan pajak daerah
Lemahnya pengelolaan pajak daerah dapat terlihat dari kurang optimalnya pemungutan pajak terhadap wajib pajak.
- b. Hasil panen sarang burung walet tidak sesuai harapan peternak
4. PBB-P2
- a. Over budgeting
Penetapan target PBB-P2 tahun 2022 terdiri dari ketetapan PBB-P2 tahun 2022 sebesar Rp3.222.385.528,00 dan piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp9.455.817.234,00. Berdasarkan trend piutang PBB-P2 yang tertunggai dalam 5 (lima) tahun terakhir, capaian tertunggai hanyalah sebesar
- b. Lemahnya pengelolaan pajak daerah
Lemahnya pengelolaan pajak daerah dapat terlihat dari kurang optimalnya pemungutan pajak terhadap wajib pajak dan database yang belum valid.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.124.547.678,00 atau sebesar 40,71% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.669.369.360,00. Jika dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp2.975.121.922,00 realisasi retribusi daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp149.425.756,00 atau sebesar 5,02%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahar/Kebersihan - LRA	80.000.000,00	114.378.500,00	142,87	100.901.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	78.500.000,00	20.514.500,00	25,62	7.848.000,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	1.050.000.000,00	401.040.000,00	36,19	472.175.000,00
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LRA	50.000.000,00	25.490.000,00	50,96	24.800.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.000.000,00	2.550.450,00	7,29	2.693.360,00
6	Retribusi Pemakalan Kakyasan Daerah - LRA	1.124.000.000,00	580.279.500,00	51,53	433.331.000,00
7	Retribusi Terminal-LRA	412.000.000,00	283.055.300,00	68,70	380.207.300,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	75.000.000,00	21.112.000,00	28,15	23.283.000,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	3.500.000.000,00	1.312.182.000,00	37,49	1.134.825.000,00
10	Retribusi Penjualan Produk	130.000.000,00	74.291.000,00	57,15	61.232.500,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Daerah-LRA				
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan LRA	944.000.000,00	290.004.428,00	30,73	354.085.772,00
12	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LRA	190.889.380,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	7.868.389.360,00	3.124.547.678,00	40,74	2.975.121.922,00

Berdasarkan tabel 5.6 di atas dapat kita lihat bahwa dari 12 (dua belas) jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat 7 (tujuh) jenis retribusi daerah yang realisasinya kurang dari 50% yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Berikut dijelaskan penyebab rendahnya realisasi pendapatan masing-masing retribusi tersebut :

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - a. Belum tersedianya fasilitas parkir kendaraan yang memadai di pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Belum optimalnya pengelolaan parkir
2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - a. Over budgeting (jumlah kendaraan wajib uji tidak sebanding dengan jumlah target yang ditetapkan).
3. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
4. Retribusi tempat khusus parkir
 - a. Over budgeting (jumlah kendaraan dinas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sebanding dengan jumlah target yang ditetapkan).
5. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - a. Over budgeting
 - b. Tarif masuk kebun haram masih sebesar tarif lama karena perda tarif baru belum ditetapkan pada tahun 2022.
6. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - a. Over budgeting
 - b. Regulasi terkait retribusi persetujuan bangunan gedung baru ditetapkan
7. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)
 Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/WHK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai retribusi daerah yang berasal dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan tanggal 17 Juni 2021 dan surat edaran menteri dalam negeri RI Nomor 011/S976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang percepatan penyusunan regulasi persyaratan dasar perizinan berusaha, penyelenggaraan layanan perselubungan bangunan gedung serta retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus melakukan Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai retribusi daerah yang berasal dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan

tenaga kerja asing perpanjangan dalam waktu 3 (bulan) sejak surat eduan dikeluarkan. Jika dalam waktu 3 (bulan) belum melakukan penyesuaian perda/perkada maka retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) akan dipungut oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Raperda Kabupaten Lima Puluh Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih dalam proses penutupan.

Adapun rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per-OPD tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 7 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per-OPD Tahun 2022

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.344.000.000,00	578.914.428,00
2	Dinas Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	25.480.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	190.000.000,00	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman	280.000.000,00	114.378.500,00
5	Dinas Perhubungan	1.755.500.000,00	732.321.800,00
6	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	35.000.000,00	2.550.450,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.508.000.000,00	1.312.182.000,00
8	Dinas Perikanan	150.000.000,00	82.355.000,00
9	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	105.000.000,00	79.135.000,00
10	Badan Keuangan	120.000.000,00	147.743.500,00
11	Sekretariat Daerah	123.000.000,00	53.546.000,00
	Jumlah	7.668.369.380,00	3.124.547.678,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.963.233.016,00 atau sebesar 88,20% dari anggaran sebesar Rp4.493.233.016,00 yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp3.718.416.419,00 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp244.816.597,00 atau sebesar 6,58%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 adalah Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD LRA. Adapun Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5. 8 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LRA

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.963.233.016,00	3.958.270.229,00	99,90	3.242.735.027,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	33.000.000,00	3.962.787,00	13,21	0,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan	500.000.000,00	0,00	0,00	475.681.382,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah BUMD (Bidang Air Anum)				
	Jumlah	4.483.233.016,00	3.953.233.016,00	88,20	3.718.416.419,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lemhaga Keuangan) yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebesar Rp3.959.270.229,00 atau sebesar 99,90% dari anggaran sebesar Rp3.963.233.016,00 merupakan penerimaan dividen dari PT Bank Nagari dan DPR yang telah diterima pada rekening Kas Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lemhaga Keuangan) tahun 2021 sebesar Rp3.242.735.027,00 realisasi bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lemhaga Keuangan) pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp716.535.202,00 atau sebesar 22,10%.

Pendapatan Dividen PT Bank Nagari tahun 2022 atas dividen tahun buku 2021 sebesar Rp3.929.909.628,00 telah diterima pada rekening Kas Daerah tanggal 28 April 2022.

Dividen DPR/LPN Tahun 2022 atas dividen tahun buku 2021 sebesar Rp29.360.601,00 telah diterima pada rekening Kas daerah dengan rincian sebagai berikut.

DPR Tumbuh Baruah	±2.290.000,00	diterima tanggal: 10/03/2022
DPR Ilirau	±5.000.601,00	diterima tanggal: 09/03/2022
DPR Suliki Guntung Mas	2.070.000,00	diterima tanggal: 08/04/2022
Jumlah Rp	29.360.601,00	

Bagian Laba yang Dibagikan - kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebesar Rp1.962.787,00. Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) adalah dividen yang diperoleh dari PT. Citra Balaing Jaya.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah sebesar Rp49.881.527.322,64 atau sebesar 87,57% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp56.961.811.140,00. Jika dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2021 sebesar Rp51.749.344.893,96 realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.868.017.571,32 atau sebesar 3,61%. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan – LRA	1.100.000.000,00	40.700.099,00	3,65%	825.949.056,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	476.052.048,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Din – LRA	3.760.000.000,00	2.433.386.140,00	64,68%	3.687.991.789,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergilir – LRA	1.925.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
5	Pendapatan Bunga – LRA	4.656.304.148,00	0,00	0,00%	0,00
6	Tunjutan Cipta Kerugian Daerah – LRA	3.000.000.000,00	2.840.640.280,64	94,68%	2.290.542.958,96
7	Pendapatan Denda Retribusi – LRA	0,00	0,00	0,00%	59.290.000,00
8	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda LRA	0,00	0,00	0,00%	53.000.000,00
9	Pendapatan Pengembalian-LRA dan	136.000.000,00	136.427.600,00	100,31%	80.531.221,00
10	Pendapatan BLUD-LRA	42.394.907.000,00	43.954.613.125,00	103,70%	44.727.049.859,00
	Jumlah	66.961.811.148,00	49.881.327.322,64	87,87%	51.749.344.893,96

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp10.200.099,00 merupakan penerimaan dari hasil penjualan gedung dan bangunan berupa bongkaran gedung dan bangunan dan hasil penjualan aset lainnya berupa hasil lelang kendaraan bermotor.

Hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebesar Rp476.052.048,00 merupakan kontribusi dari PDAM Kota Payakumbuh. Hal ini berdasarkan kerja sama Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintahan Kota Payakumbuh yang tertuang dalam Syarat Perjanjian Kerja Sama Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Di Desa Padang Ambacang Kecamatan Perwakilan Lubak - Situjuh Kabupaten 50 Kota Tanggal 10 Maret 1994.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk memanfaatkan penggunaan sumber mata air di Desa Padang Ambacang Kecamatan Perwakilan Lubak Situjuh yang mana sesuai dengan hasil keputusan yang dilakukan antar kedua daerah. Adapun poin-poin penting dalam perjanjian kerja sama ini adalah pada Pasal 1 disebutkan bahwa Kota Payakumbuh akan membungkus sarana penyediaan air bersih di Desa Padang Ambacang dengan ketentuan penguasaan sumber air masih di bawah Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu disebutkan pendistribusian air maksimal 70% dari debit air yang ada dan retribusi yang dipukul sesuai dengan Perda Tk. I Sumbar Nomor 2 Tahun 1991.

Pada Pasal 2 dan Pasal 3 dibunyikan bahwa ganti rugi tanah untuk Bangunan Penangkap (Braunt Capturing) akan menjadi tanggung jawab Kabupaten Lima Puluh Kota dan pembayaran ganti rugi bangunan dan tanaman untuk menghancurkan Jaringan Transmisi

dan Distribusi yang berada pada wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kotamadya Payakumbuh. Bagi hasil dengan Nagari/KAN yang tersebut dalam Pasal 4 akan diatur oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan KAN/Nagari/Desa Padang Ambacang Kecamatan Perwakilan Luhak Situjuh.

Pada Pasal 5 dan 6 dibunyikan bahwa Kotamadya Payakumbuh akan membayar kepada Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari harga jual tarif dasar yang berlaku setiap meter kubik (m³) air yang didistribusikan di luar tingkat kebocoran 10% (sepuluh persen) dan pembayaran kontribusi dari debit air yang didistribusikan tersebut dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya sesuai dengan angka yang tertera pada water meter induk.

Selain adanya perjanjian kerja sama antara Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kotamadya Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengatur pembayaran bagi hasil pemanfaatan sumber air Sungai Dareh sesuai dengan Surat Nomor 500/255/Perek-2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Pembayaran Bagi Hasil Sumber Air Sungai Dareh Untuk Kaum dan Nagari. Dijelaskan bahwa bagi hasil untuk Kaum, LAN dan Wali Nagari Banda Dalam sebesar 50% (lima puluh persen) diambil dari 10% (sepuluh persen) yang diterima oleh Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rincian 37.5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk Kaum M. Dt. Tumanggung, 7.5% (tujuh koma lima persen) untuk Pemerintahan Wali Nagari Situjuh Banda Dalam dan 5% (lima persen) untuk LAN Situjuh Bandar Dalam. Pindahkan penjelasan ke lain-lain PAD yang sah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LRA Tahun 2022 sebesar Rp2.840.648.280,64 merupakan penerimaan dari hasil pemeriksaan Inspektoral dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, dan Denda Keterlambatan Pekerjaan.

Pendapatan lain Tahun 2022 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp46.358.165,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 10 Pendapatan Lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

NO	NAMA SEKOLAH	PENDAPATAN LAIN (Rp)	KETERANGAN
	SD		
1	UPTD SDN 01 KOTO TANGAH BATU HAMPA	20.552,00	KELEBIHAN SETOR
2	UPTD SDN 01 SUNGAI BALANTIAK	100.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
3	UPTD SDN 02 SARIAK LAWEH	40.000,00	KELEBIHAN SETOR
4	UPYO SDN 02 SUAYAN	510.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
5	UPTD SDN 03 BATUHAMPAR	1.510.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
6	UPTD SDN 04 SUAYAN	35.310,00	KELEBIHAN SETOR
7	UPTD SDN 06 KOTO TANGAH BATU HAMPA	13.529,00	KELEBIHAN SETOR
8	UPTD SDN 11 MAEK	107.683,00	KELEBIHAN SETOR
9	UPTD SDN 33 KUBANG	4,00	KELEBIHAN SETOR
10	UPTD SDN 08 DUGUAK VIII KOTO	4.240.000,00	KELEBIHAN SETOR
11	UPTD SDN 10 TUJUAH KOTO TALAGO	72.120,00	KELEBIHAN SETOR

NO	NAMA SEKOLAH	PENDAPATAN LAIN (Rp)	KETERANGAN
12	UPTD SDN 01 PANDAM LADANG	10.278,00	KELEBIHAN SETOR
13	UPTD SDN 01 TAI ANG ANAU	30,00	KELEBIHAN SETOR
14	UPTD SDN 02 PANDAM GADANG	200.000,00	KELEBIHAN SETOR
15	UPTD SDN 03 PANDAM GADANG	1,00	KELEBIHAN SETOR
16	UPTD SDN 05 PANDAM GADANG	621,00	KELEBIHAN SETOR
17	UPTD SDN 07 PANDAM GADANG	38.654,00	KELEBIHAN SETOR
18	UPTD SDN 09 KOTO TINGGI	200,00	KELEBIHAN SETOR
19	UPTD SDN 02 KOTO TINGGI	672,00	KELEBIHAN SETOR
20	UPTD SDN 03 BATU BALANG	686.800,00	KELEBIHAN SETOR
21	UPTD SDN 03 GAI LIGIA	8.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
22	UPTD SDN 01 AMPALU	3.834.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
23	UPTD SDN 01 BALAI PANJANG	100.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
24	UPTD SDN 01 BUKIK SIKUMOA	60.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
25	UPTD SDN 01 LABUAH GUNUANG	386.000,00	KELEBIHAN SETOR
26	UPTD SDN 02 BUKIK SIKUMPA	380.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
27	UPTD SDN 02 HAJABAN	450.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
28	UPTD SDN 02 TANJUANG GADANG	65.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
29	UPTD SDN 03 BATU PAYUANG	3.183.500,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
30	UPTD SDN 04 LABUAH GUNUANG	300.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
31	UPTD SDN 01 TANJUANG HARO SIKABUKABU PIR PANJANG	800,00	KELEBIHAN SETOR
32	UPTD SDN 04 SUNGAI KAMUYANG	19.198,00	KELEBIHAN SETOR
33	UPTD SDN 02 SIMPANG KAPUAK	88.220,00	KELEBIHAN SETOR
34	UPTD SDN 01 KOTO ALAM	5.000,00	KELEBIHAN SETOR
35	UPTD SDN 01 MANGGILANG	22.500,00	KELEBIHAN SETOR
36	UPTD SDN 02 TANJUNG PALAH	25.000,00	KELEBIHAN SETOR
37	UPTD SDN 03 MANGGILANG	79.937,00	KELEBIHAN SETOR
38	UPTD SDN 01 KOTO TANCAH SIMALANGGANG	1.529,00	KELEBIHAN SETOR
39	UPTD SDN 02 SIMALANGGANG	20,00	KELEBIHAN SETOR
40	UPTD SDN 05 TACH BARUAH	32.500,00	KELEBIHAN SETOR
41	UPTD SDN 01 SITUJUAH CADANG	5.136.709,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
42	UPTD SDN 02 SITUJUAH BATUA	34.778,00	KELEBIHAN SETOR
43	UPTD SDN 07 SITUJUAH GALANG	252.734,00	KELEBIHAN SETOR

NO	NAMA SEKOLAH	PENDAPATAN LAIN (Rp)	KETERANGAN
44	UPTD STUN SZ ANDIANO	5.800,00	KELEBIHAN SETOR
	JUMLAH	22.175.451,00	
	SMP		
-	UPTD SMPN 2 KEC. PAYAKUMBUH	1.800.000,00	KELEBIHAN SETOR
2	UPTD SMPN 1 KEC. LUAK	642.835,00	KELEBIHAN SETOR
3	UPTD SMPN 1 KEC. SULIKI	2.124.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
4	UPTD SMPN 1 KEC. KAPUR IX	11.130.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
5	UPTD SMPN 2 KEC. KAPUR IX	25.000,00	KELEBIHAN SETOR
6	UPTD SMPN 3 KEC. KAPUR IX	16.378,00	KELEBIHAN SETOR
7	SMPN 1 KEC. SITUUAH LIMO NAGARI	3.300.000,00	PENGEMBALIAN KE REKENING
8	SMPN 2 KEC. LAREH SAGU HALABAN	5.148.000,00	PENGEMBALIAN TEMUAN
	JUMLAH	24.183.014,00	

Pendapatan Dari Pengembalian-LRA Tahun 2022 sebesar Rp136.427.630 merupakan penerimaan dari pengembalian gaji dan tunjangan.

B. Pendapatan Transfer	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.128.038.625.588,00	1.164.177.899.633,00

Realisasi pendapatan transfer tahun 2022 adalah sebesar Rp1.128.038.625.588,00 atau sebesar 95,26% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.184.180.181.644,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer tahun 2021 sebesar Rp1.164.177.899.633,00 realisasi pendapatan transfer pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp36.139.274.045,00,00 atau sebesar 3,10%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.054.500.284.000,00	999.520.282.812,00	94,80%	942.371.888.742,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	74.850.449.000,00	74.850.449.000,00	100,00%	165.840.091.300,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	75.029.449.644,00	72.667.913.778,00	88,85%	58.165.919.591,00
	Jumlah	1.184.180.181.644,00	1.128.038.625.588,00	95,26%	1.164.177.899.633,00

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2022 adalah sebesar Rp.980.520.262.812,00 atau sebesar 94,80% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.034.300.284.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2021 sebesar Rp942.371.888.742,00 realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp38.148.374.070,00 atau sebesar 4,05%. Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 12 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak – LRA	9.579.329.000,00	13.387.540.452,00	139,75%	16.468.188.122,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	6.889.892.000,00	4.807.087.902,00	61,08%	3.544.403.531,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	686.668.871.000,00	682.796.183.074,00	99,43%	686.668.871.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	114.473.134.000,00	98.510.292.418,00	86,06%	72.258.497.484,00
5	Dana Alokasi Khusus Non-Baik (DAK) – LRA	217.708.058.000,00	181.051.158.966,00	83,16%	163.431.928.696,00
Jumlah		1.034.300.284.000,00	980.520.262.812,00	94,80%	942.371.888.742,00

a) Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan bagi hasil pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp9.579.329.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp13.387.540.452,00 atau sebesar 139,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi bagi hasil pajak tahun 2021 sebesar Rp16.468.188.122,00 realisasi bagi hasil pajak pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.080.647.670,00 atau sebesar 18,71%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 13 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	3.875.794.000,00	7.546.882.292,00	194,72	9.258.446.438,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 LRA	5.376.682.000,00	5.529.520.140,00	102,73	6.464.666.679,00
3	Bagi Hasil dan Cukai Tembakau – LRA	326.853.000,00	317.127.720,00	97,02	747.176.105,00
Jumlah		9.579.329.000,00	13.387.540.452,00	139,75	16.468.188.122,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam tahun 2022 adalah sebesar Rp5.869.892.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp4.807.087.902,00 atau sebesar 81,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam tahun 2021 sebesar Rp3.544.403.511,00 realisasi bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.262.684.371,00 atau sebesar 35,62%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 14 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	0,00	0,00	0,00	323.301.000,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) LRA	0,00	0,00	0,00	854.284.763,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	0,00	0,00	0,00	1.674.500.190,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	0,00	0,00	0,00	682.317.615,00
5	Bagi Hasil SDA Pangeaahan Panas Bumi – LRA	625.605.400,00	651.873.608,00	104,17	0,00
6	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Landrent LRA	3.152.584.000,00	2.068.705.284,00	65,46	0,00
7	Bagi Hasil SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) – LRA	133.192.000,00	133.192.000,00	100,00	0,00
8	Bagi Hasil SDA Perikanan – LRA	1.958.311.000,00	1.858.311.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	6.869.892.000,00	4.807.087.902,00	81,88	3.844.403.511,00

c) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum ini merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah sebesar Rp686.668.871.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp682.756.183.074,00 atau sebesar 99,43%. Jika dibandingkan dengan realisasi dana alokasi umum tahun 2021 sebesar Rp686.668.871.000,00 realisasi dana alokasi umum pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.912.687.926,00 atau sebesar 0,57%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi umum adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 15 Rincian Dana Alokasi Umum

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum – LRA	686.668.871.000,00	682.756.183.074,00	99,43	686.668.871.000,00
	Jumlah	686.668.871.000,00	682.756.183.074,00	99,43	686.668.871.000,00

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahun Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum bulan Januari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp755.000.000,00.

d) **Dana Alokasi Khusus**

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus tahun 2022 adalah sebesar Rp114.473.134.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp98.518.292.418,00 atau sebesar 86,06%. Jika dibandingkan dengan realisasi dana alokasi khusus tahun 2021 sebesar Rp72.258.497.494,00 realisasi dana alokasi khusus pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp26.259.794.924,00 atau sebesar 36,34%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 16 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LRA	36.151.340.000,00	32.443.065.500,00	89,74	11.438.849.520,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi – LRA	6.201.859.000,00	6.221.982.000,00	100,32	8.643.277.338,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum – LRA	9.575.227.000,00	2.343.806.750,00	25,00	1.671.807.000,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi – LRA	6.269.073.000,00	6.289.078.000,00	100,00	8.681.885.000,00
5	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan – LRA	1.300.000.000,00	1.242.978.000,00	95,61	0,00
6	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	2.423.000.000,00	2.133.740.452,00	88,17	1.161.357.321,00
7	DAK Bidang Pertanian – LRA	10.189.000.000,00	8.782.449.878,00	86,18	2.297.409.000,00
8	DAK Bidang Pendidikan – LRA	22.189.178.000,00	21.899.503.010,00	97,69	16.215.581.600,00
9	DAK Bidang Sentra Industri Menengah – LRA	0,00	0,00	0,00	408.450.000,00
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB – LRA	20.537.451.000,00	17.481.887.830,00	85,12	17.779.070.708,00
	Jumlah	114.473.134.000,00	98.518.292.418,00	86,06	72.258.497.494,00

c) **Dana Alokasi Khusus Nonfisik**

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus nonfisik tahun 2022 adalah sebesar Rp217.709.058.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp181.051.158.966,00 atau sebesar 83,16%. Jika dibandingkan dengan realisasi dana alokasi khusus nonfisik tahun 2021 sebesar Rp163.431.928.595,00 realisasi dana alokasi khusus nonfisik pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp17.619.230.371,00 atau sebesar 10,78%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus nonfisik adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 17 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

No.	Urutan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	PAK Non Fisik BOS Reguler	56.858.620.000,00	51.782.741.816,00	90,91	0,00
2	DAK Non Fisik BOS Kinerja	2.465.000.000,00	2.465.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keseluruhan	2.856.800.000,00	2.856.800.000,00	100,00	2.146.100.000,00
4	Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (KOP PAUD)	5.112.000.000,00	4.882.400.000,00	95,47	4.400.600.000,00
5	Tunjangan Profesi Guru PNSD	129.749.180.000,00	112.872.770.897,00	86,96	138.131.223.000,00
6	DAK Tambahan Penghasilan Guru PNS-LRA	2.043.000.000,00	1.746.947.500,00	85,51	756.000.000,00
7	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	365.858.900,00
8	DAK Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	52.218.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Bantuan Operasional Kesehatan	4.084.005.000,00	3.304.148.400,00	80,71	12.209.128.121,00
10	DAK PK2UKM	404.200.000,00	381.231.004,00	94,32	
11	DAK Nonfisik - Fasilitas Pemukiman Modal	368.695.000,00	359.389.254,60	97,21	326.122.000,00
12	Akreditasi Puskesmas	10.803.818.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Jaminan Persalinan (Jampersal)	475.827.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.372.594.000,00	0,00	0,00	3.148.484.000,00
15	DAK Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.283.988.574,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
16	DAK Nonfisik - Dana Pelayanan Perindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	292.175.000,00
17	DAK Nonfisik - Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	452.300.000,00	452.300.000,00	100,00	273.250.000,00
Jumlah		217.709.058.000,00	181.051.158.968,00	83,16	183.431.828.568,00

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp74.850.449.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.850.449.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2021 sebesar Rp165.640.091.300,00 realisasi transfer pemerintah pusat lainnya pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp90.789.642.300,00 atau sebesar 54,81%. Rincian transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 18 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Penyesuaian LRA	74.850.449.000,00	74.850.449.000,00	100,00%	165.640.091.300,00
Jumlah		74.850.449.000,00	74.850.449.000,00	100,00%	165.640.091.300,00

Adapun rincian dana penyesuaian tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 19 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah -- LRA	0,00	0,00	100	30.442.552.000,00
2	Bantuan Operasional Sekolah-LRA	0,00	0,00	0,00%	53.475.187.300,00
3	Dana Desa yang Berasal dari APBN	74.850.449.000,00	74.850.449.000,00	100,00%	81.722.352.000,00
Jumlah		74.850.449.000,00	74.850.449.000,00	100,00%	165.640.091.300,00

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID. DID adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Namun Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk tahun 2022.

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA tahun 2022 merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA dan bantuan keuangan khusus dari Provinsi Sumatera Barat yang target anggarannya sebesar Rp75.029.448.644,00 dan realisasinya sebesar Rp72.667.913.776,00 atau 96,85%. Jika dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2021 sebesar Rp56.165.919.591,00 realisasi transfer pemerintah daerah lainnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp16.501.994.185,00 atau sebesar 29,38%. Adapun rincian transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 20 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	67.079.448.644,00	64.867.913.775,00	96,48	56.165.919.591,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dan Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	8.030.200.000,00	8.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		75.029.448.644,00	72.867.913.776,00	96,85	56.165.919.591,00

Adapun rincian dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5. 21 Rincian dan Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	16.589.482.061,00	15.859.593.898,00	94,39	15.815.140.851,00
2	Bagi hasil dan BBNKB	9.383.789.864,00	8.571.188.864,00	91,34	5.859.487.505,00
3	Bagi hasil dari PBBKt	24.557.771.727,00	21.547.942.621,00	87,74	18.002.112.799,00
4	Bagi hasil dari PAP	105.097.451,00	118.882.241,00	111,02	95.890.895,00
5	Bagi hasil dari pajak rokok	16.393.937.541,00	18.772.578.352,00	114,51	16.393.307.541,00
Jumlah		67.029.448.644,00	64.867.913.776,00	96,48	56.165.919.591,00

Berikut rincian penetapan penyuluran dana bagi hasil pajak Provinsi Tahun 2022:

Tabel 5. 22 Rincian Penetapan Penyuluran bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022

No.	Titulur	Jenis Pajak	Jumlah	SK Penetapan
1	Titulur I	BHP PKB	2.809.889.411,00	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov Sumbar Nomor:971.1/022/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyuluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Prov Sumbar bagian Kabikota se sumbar Titulur I Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022
		BHP BBNKB	1.204.850.991,00	
		BHP BBKB	3.728.389.846,00	
		BHP Air Permukaan	22.048.769,00	
		BH Pajak Rokok	4.804.714.293,00	
2	Titulur	BHP PKB	2.809.889.411,00	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov

No.	Triwulan	Jenis Pajak	Jumlah	SK Penetapan
	II	BHP BDNKB	1.204.850.991,00	Sumber Nomor:971.1/034/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Prov Sumbar bagian Kab/Kota se sumber Triwulan II Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022
		BHP BBKB	3.726.080.048,00	
		BHP Air Permukaan	22.045.769,00	
		BH Pajak Rokok	5.362.570.154,00	
3	Triwulan III	BHP PKB	4.214.804.116,00	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov Sumbar Nomor:971.1/043/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Prov Sumbar bagian Kab/Kota se sumber Triwulan III Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022
		BHP BBNKB	1.807.276.488,00	
		BHP BBKB	5.582.134.789,00	
		BHP Air Permukaan	33.070.154,00	
		BH Pajak Rokok	2.776.666.573,00	
4	Triwulan IV	BHP PKB	3.011.314.427,00	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov Sumbar Nomor:971.1/053/Pjk-Bapenda/2022 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Prov Sumbar bagian Kab/Kota se sumber Triwulan IV Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022
		BHP BBNKB	2.097.441.896,00	
		BHP BBKB	3.325.484.289,00	
		BHP Air Permukaan	30.501.444,00	
		BH Pajak Rokok	3.412.425.567,00	
Total			51.988.116.201,00	

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:971.1/006/Pjk-Bapenda/2023 tanggal 25 Januari 2023 Tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dapat diurai sebagai berikut.

Tabel 5. 23 Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Pajak	Penetapan	Total Salur	Kurang Salur	Plutang Bagi Hasil Pajak 2022
1	BHP PKB	16.213.304.128,00	16.658.593.866,00	3.167.479.763,00	3.521.219.986,00
2	BHP BBNKB	7.781.741.114,00	8.571.166.664,00	1.467.321.351,00	677.896.401,00
3	BHP BBKB	21.561.028.276,00	21.547.942.621,00	5.287.249.526,00	5.400.335.181,00
4	BHP Air Permukaan	123.260.990,00	116.682.241,00	15.803.854,00	22.190.803,00
5	BH Pajak Rokok	18.772.528.352,00	18.772.528.352,00	0,00	0,00
Jumlah		64.351.901.480,00	64.667.913.776,00	9.897.854.484,00	9.621.642.178,00

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	14.514.513.770,00	16.762.501.744,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah lainnya – LRA tahun 2022 mempunyai target anggaran Rp15.413.223.917,00 yang mana realisasinya adalah sebesar Rp14.514.513.770,00 atau 94,17%. Jika dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2021 sebesar Rp16.762.501.744,00 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.247.987.974,00 atau sebesar 13,41%. Adapun rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 24 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya LRA

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah – LRA	15.373.223.917,00	14.474.513.770,00	94,15	13.091.614.016,00
2	Pendapatan Lainnya LRA	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	3.670.887.728,00
	Jumlah	15.413.223.917,00	14.514.513.770,00	94,17	16.762.501.744,00

1. Pendapatan Hibah-LRA

Pendapatan Hibah – LRA Tahun 2022 mempunyai target anggaran Rp15.373.223.917,00 yang mana realisasinya adalah sebesar Rp14.474.513.770,00 atau 94,15%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan hibah tahun 2021 sebesar Rp13.091.614.016,00 realisasi pendapatan hibah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.382.899.754,00 atau sebesar 10,56%. Adapun rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 25 Pendapatan Hibah – LRA

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hibah Air Minum	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2	Hibah IPDMHP	12.974.513.770,00	11.591.614.016,00
	Jumlah	14.474.513.770,00	13.091.614.016,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022 terdapat Program Pengelolaan Hibah Negara atau hibah air minum yang bersumber dari penerimaan dalam negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum rumah tangga yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang terukur dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota salah satu Pemerintah Daerah yang menerima dana hibah tersebut.

Tujuan dana Hibah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi air minum perpipaan.

Pendapatan hibah air minum diterima tanggal 26 Desember 2022 pada rekening Kas Daerah 0101.00208-5 dengan bukti penerimaan (RPKBUNP-SPAN-BTN-BTANIDJA).

Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota untuk Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program (IPDMIP) (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu) nomor : PHD-025/IPDMIP/PK/2018 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana dana hibah tersebut diperoleh dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN Infrastruktur Fund (AIF) yang diperuntukkan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu. Dana Hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan Pengembangan irigasi Partisipatif terpadu yang didanai terlebih dahulu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.

Dana pengganti kegiatan berupa Hibah IPDMIP TA 2022 sebesar Rp12.974.513.770,00 telah diterima pada rekening Kas Daerah dengan rincian:

Tabel 5.26 Penerimaan dana hibah IPDMIP tahun 2022

Tanggal diterima pada rekening Kasda	Uraian	Keterangan	Jumlah (Rp)
31 Maret 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022	105.890.262,00
31 Maret 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022	6.504.930.284,00
31 Maret 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022	21.171.133,00
31 Maret 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022	1.701.230.319,00
30 Juni 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022 Bapelitbang (ADB)	141.729.978,00
30 Juni 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022 Bapelitbang (AIF)	28.352.798,00
29 Juni 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022 Dinas PU (ADB)	122.321.887,00
29 Juni 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022 Dinas PU (AIF)	24.470.243,00
18 Juli 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022 Disanhortbun (IFAD)uncuran 2021	1.528.492.723,00
31 November 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022 Disanhortbun (IFAD)uncuran 2021	1.392.620.627,00
25 Desember 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022 Disanhortbun (IFAD)	1.085.946.500,00
27 Desember 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022 Disanhortbun (IFAD)	648.716.400,00
25 Desember 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022	1.500.000.000,00
3 November 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022 Disanhortbun (IFAD)	1.113.786.846,00
8 November 2022	Hibah IPDMIP	Rembesan tahun 2022 Disanhortbun (IFAD)	155.035.502,00
		Jumlah	14.474.613.770,00

5.1.2. Belanja LRA

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

1.230.594.731.297,76

1.266.371.638.222,92

Realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp1.230.594.731.297,76 atau 92,15% dari anggaran belanja sebesar Rp1.335.440.101.346,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp1.266.371.638.222,92 terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp35.776.906.925,16 atau 2,82% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
-	Belanja Operasi	967.153.552.568,00	921.225.889.318,78	95,25	958.701.609.114,82
2	Belanja Modal	200.167.415.402,00	149.956.373.682,00	74,92	147.822.825.105,00
3	Belanja Tak Terduga	1.587.990.439,00	708.965.000,00	44,65	778.542.837,00
4	Belanja Transfer	166.531.142.857,00	158.703.493.317,00	95,3	181.270.961.166,00
	Jumlah	1.335.440.101.346,00	1.230.594.731.297,76	92,15	1.266.371.638.222,82

Adapun rincian realisasi belanja per-OPD Tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 28 Rincian Realisasi Uetanja Per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	485.198.898.944,00	468.322.209.039,00
2	Dinas Kesehatan	132.102.931.368,00	119.768.001.794,76
3	RSUD dr. Achmed Darwis	47.750.890.097,00	46.642.787.249,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	138.432.581.925,00	131.942.650.804,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	6.839.824.453,00	6.606.708.892,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	10.004.468.314,00	9.702.919.814,00
7	Dinas Sosial	5.834.393.895,00	5.711.275.040,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.104.979.390,00	4.940.519.482,00
9	Dinas Pangan	5.818.814.595,00	5.821.676.323,00
10	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman	22.653.914.016,00	21.479.188.090,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.564.634.781,00	4.391.517.160,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.728.633.048,00	6.352.085.295,00
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB & P3A	8.544.850.621,00	7.062.346.847,00
14	Dinas Pertubangan	15.987.691.474,00	15.170.599.599,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.264.200.737,00	7.993.338.177,00
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	6.372.888.435,00	5.444.535.981,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	4.178.852.373,00	4.082.890.653,00

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	20.412.589.976,00	12.872.142.539,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	3.776.830.025,00	3.757.289.455,00
20	Dinas Perikanan	7.910.663.217,00	7.127.662.031,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	27.820.943.332,00	24.729.170.005,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.520.033.082,00	10.955.494.670,00
23	Inspektorat	10.899.402.979,00	9.715.019.257,00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	6.185.184.485,00	5.748.447.245,00
25	Badan Keluaran	208.058.348.815,00	196.281.683.712,00
26	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.528.290.547,00	7.284.204.298,00
27	Sekretariat Daerah	42.384.589.356,00	40.174.434.694,00
28	Sekretariat DPRD	39.741.943.515,00	38.707.051.702,00
29	Kecamatan Gunung Orieh	1.382.213.115,00	1.381.559.664,00
30	Kecamatan Bukit Barisan	1.404.016.674,00	1.372.189.967,00
31	Kecamatan Sukki	1.639.978.785,00	1.627.161.883,00
32	Kecamatan Guguk	1.577.585.852,00	1.544.071.974,00
33	Kecamatan Mungka	1.956.420.927,00	1.976.067.794,00
34	Kecamatan Akabifuru	1.778.980.383,00	1.776.278.583,00
35	Kecamatan Payakumbuh	2.386.750.712,00	2.071.086.528,00
36	Kecamatan Luak	1.578.040.289,00	1.566.222.285,00
37	Kecamatan Lurah Sago Halaban	1.738.833.383,00	1.729.361.638,00
38	Kecamatan Sibujuh Lima Nagari	1.558.237.692,00	1.630.772.845,00
39	Kecamatan Harau	1.993.456.084,00	1.983.488.301,00
40	Kecamatan Pangkalan Kota Baru	1.518.119.011,00	1.493.536.842,00
41	Kecamatan Kapur IX	2.108.227.502,00	2.085.531.348,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.486.931.201,00	5.961.284.605,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.014.104.314,00	4.922.437.904,00
	Jumlah	1.335.440.101.346,00	1.230.894.731.297,76

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bahwa total anggaran pendapatan APBD sebesar Rp. 1.315.171.393.961,- (Satu triliun tiga ratus lima belas milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dan total anggaran belanja APBD sebesar Rp. 1.335.440.101.346,- (Satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh juta seratus satu juta tiga ratus empat puluh enam rupiah), namun pada tanggal 15 Desember 2022 kondisi Kas Daerah yang terdapat di RKUD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diasumsikan tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban belanja sesuai dengan total belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.

1.335.440.101.346,- (Satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh juta seratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 2022 telah dilakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan penerimaan daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan komunikasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang menunggak kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Melakukan evaluasi kepada OPD selaku pemungut pajak dan retribusi;
- c. Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait penyaharan TKDD dari RKUN ke RKUD;
- d. Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dana bagi hasil yang akan disalurkan oleh RKUD Prov. Sumatera Barat ke RKUD Kabupaten Lima Puluh Kota;
- e. Melakukan revisi terhadap SPD yang telah diterbitkan;
- f. Menyampaikan kemungkinan kondisi kas daerah sesuai dengan asumsi maksimal yang terdapat pada RKUD kepada Bupati.

Namun berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan daerah tidak tercapai sebagaimana mestinya. Sehingga Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan penggunaan kas daerah untuk melakukan pembayaran belanja kontraktual, belanja yang bersifat sosial kemasyarakatan dan TPP dengan memanfaatkan sisa dana di RKUD guna meminimalisir jumlah tunggakan pemerintah daerah terhadap kewajiban belanja terutama belanja yang bersifat kontraktual, belanja yang bersifat sosial kemasyarakatan dan TPP dimaksud.

Sampai 31 Desember 2022 belanja daerah yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.230.594.731.297,76. Terdapat selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah dengan penghematan sebesar Rp104.845.370.018,24. Disisi lain dari total penghematan belanja tersebut terdapat beberapa pekerjaan yang telah terlaksana dalam bentuk ikatan kerja/kontraktual dengan pihak ketiga sebesar Rp26.119.518.715,02 (dua puluh enam milyar seratus sembilan belas juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima belas koma nol dua rupiah) yang tersebar di beberapa OPD yang tidak dapat dibayarkan. Hal ini terjadi karena dana yang tersedia pada RKUD tidak cukup untuk membayar tagihan atas pekerjaan tersebut. Jumlah pekerjaan kontraktual tersebut telah dilakukan review oleh APIP dan hasil review APIP merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk mengangkat nilai pekerjaan kontraktual tersebut sebagai hutang daerah.

A. Belanja Operasi

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

921.225.899.318,76

956.701.509.114,92

Realisasi Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp921.225.899.318,76 atau 95,25% dari total anggaran Belanja Operasi sebesar Rp967.153.552.568,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2021 sebesar Rp956.701.509.114,92 terdapat kenaikan realisasi belanja operasi sebesar Rp35.475.609.796,16 atau 3,71% dari realisasi tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Urutan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	659.251.836.643,00	643.786.695.090,40	97,65	648.801.431.683,00
2	Belanja Barang dan Jasa	252.795.367.399,00	239.491.478.258,58	94,73	285.227.159.771,92
3	Belanja Hibah	38.379.298.528,00	31.418.712.030,00	81,88	34.087.820.897,00
4	Belanja Bantuan Sosial	6.727.050.000,00	6.531.913.540,00	97,09	8.805.097.883,00
	Jumlah	987.153.552.568,00	921.225.899.318,76	95,25	956.701.509.114,92

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja operasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp643.786.695.090,40 atau 97,65% dari total anggaran belanja pegawai sebesar Rp659.251.836.643,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp648.801.431.683,00 terdapat penurunan realisasi belanja pegawai sebesar Rp5.014.736.592,60 atau 0,77% dari realisasi tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2022

No.	Urutan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	420.803.834.978,00	418.815.778.381,00	99,57	418.976.568.838,00
1	Belanja Gaji Pokok PNS	391.637.027.500,00	300.784.817.857,00	88,72	311.514.898.582,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	13.486.138.236,00	13.465.131.200,00	100,00	4.381.552.400,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.589.078.580,00	28.289.412.488,00	98,81	29.574.290.181,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.399.003.572,00	1.380.687.106,00	98,69	446.668.138,00
5	Belanja Tunjangan Jatahan PNS	7.010.832.517,00	6.848.114.386,00	97,69	8.588.772.700,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.856.429.544,00	20.791.381.000,00	99,69	21.204.463.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPK	1.378.137.000,00	1.377.501.080,00	99,88	278.588.748,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.058.623.584,00	4.026.605.580,00	99,18	4.227.480.000,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPK	91.330.000,00	91.330.000,00	100,00	12.915.000,00
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.033.575.865,00	16.846.852.209,00	99,49	17.513.883.081,00
11	Belanja Tunjangan Beras PPK	1.045.740.976,00	1.033.505.820,00	99,78	389.277.674,00
12	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	561.580.155,00	658.095.929,00	98,85	585.348.106,00
13	Belanja Pembayaran Gaji PNS	2.981.892,00	2.958.819,00	99,14	1.774.847,00
14	Belanja Pembayaran Gaji PPK	154.578,00	161.657,00	98,23	71.087,00
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.194.797.085,00	19.949.382.004,00	98,78	19.676.225.589,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPK	584.919.666,00	681.878.759,00	99,48	186.963.282,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	623.921.624,00	619.395.153,00	99,12	650.379.689,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPK	28.894.800,00	28.654.501,00	99,88	10.220.997,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.864.488.868,00	1.851.086.181,00	99,28	1.903.601.565,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPK	88.080.845,00	88.050.645,00	99,99	27.932.243,00
B	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	89.834.538.276,00	88.360.850.208,00	97,88	83.788.872.704,00
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	48.782.645.933,00	48.848.887.808,00	98,10	45.472.498.807,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Temporal Bertugas PNS	3.803.734.333,00	3.798.672.567,00	97,81	3.257.765.480,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Koncial Kerja PNS	2.842.690.985,00	2.764.635.337,00	96,91	2.353.774.777,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.105.497.025,00	2.948.934.298,00	94,98	2.672.573.845,00
C	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pemeliharaan Objektiv Lainnya ASN	138.138.867.949,00	127.783.682.703,00	92,49	148.401.866.887,00
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	31.148.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas	123.803.280,00	10.450.482,00	15,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3	Pemungutan Pajak Relokasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	13.000.000,00	3.250.000,00	25,00	3.000.000,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	18.745.000,00	4.461.750,00	23,85	2.511.750,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	662.372.325,00	519.279.245,00	75,00	575.018.669,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Garang Bunung Wajel	500.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	565.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Hutan dan Perkuliaan	387.333.780,00	77.259.891,00	19,95	78.758.882,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	232.500.000,00	93.000.000,00	40,00	38.817.850,00
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pencampahan/Kebersihan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	3.960.000,00
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.925.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kendaraan Bermotor	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Air Pomadam Keabakaran	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Ulang				
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	56.260.000,00	8.480.000,00	15,05	6.889.056,00
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tamrinal	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produk Usaha Daerah	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	47.200.000,00	0,00	0,00	17.704.289,00
22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Meppekanjaken Tenaga Kerja Asing (IMTA)	9.543.468,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja TPG PNSD	129.749.100.000,00	122.353.961.375,00	94,30	135.329.175.081,00
24	Belanja Tarif Gaji PNSD	2.043.000.000,00	1.581.500.000,00	76,43	750.750.000,00
25	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	697.550.476,00	90.817.350,00	13,02	0,00
26	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	2.840.383.620,00	2.779.455.000,00	97,85	11.443.100.500,00
27	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	297.465.000,00	249.797.500,00	83,98	152.182.500,00
28	Belanja Honorarium Perangkat Urut Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPKJ)	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00
0	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.547.657.401,00	11.512.541.688,00	99,70	11.612.887.294,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	100,00	782.040.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.585.000,00	72.950.900,00	92,89	77.057.400,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	91.240.200,00	85.952.540,00	94,21	89.511.120,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	87.032.000,00	87.032.000,00	100,00	87.032.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	100,00	1.133.958.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.785.041,00	93.907.800,00	97,05	91.858.100,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.517.000,00	25.517.100,00	99,81	24.847.200,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	100,00	2.646.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00	100,00	661.500.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.900.500,00	359.196,00	6,09	325.074,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	72.000.000,00	68.150.948,00	94,71	68.333.328,00
12	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.000.000,00	1.808.758,00	53,63	1.808.758,00
13	Belanja Jaminan Kesehatan DPRD	5.000.000,00	4.828.304,00	96,53	4.828.304,00
14	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.639.920.000,00	1.639.920.000,00	100,00	1.639.920.000,00
15	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.224.000.000,00	4.224.000.000,00	100,00	4.224.000.000,00
16	Belanja Uang Jasa Pengauditan DPRD	15.000.000,00	4.725.000,00	31,50	0,00
E	Belanja Gaji dan Tunjangan KDHMKDH	181.389.194,00	167.252.780,00	92,23	0,00
1	Belanja Gaji Pokok KDHMKDH	59.140.112,00	54.600.000,00	89,80	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDHMKDH	8.650.040,00	7.208.000,00	84,00	6.385.150,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDHMKDH	104.668.200,00	96.280.000,00	93,90	96.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Seras KDHMKDH	9.780.040,00	6.372.980,00	72,60	7.242.000,00
5	Belanja Tunjangan Khusus KDHMKDH	631.802,00	324.050,00	54,58	624.180,00
6	Belanja Pembulatan Gaji	70.000,00	480,00	0,69	0,00
7	Belanja Iuran Jaminan	140.000,00	112.320,00	80,23	112.320,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Kecelakaan Kerja KDH/WKDH				
8	Belanja Lunas Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	420.000,00	336.960,00	80,23	336.960,00
F	Belanja Penerimaan Lainnya				
	Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.513.100,00	610.304.000,00	99,96	493.637.500,00
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.513.100,00	110.304.000,00	99,81	110.304.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	383.333.500,00
G	Belanja Pegawai BOS	12.170.226.000,00	11.515.110.000,00	94,62	10.145.433.706,00
1	Belanja Pegawai BOS	12.170.226.000,00	11.515.110.000,00	94,62	10.145.433.706,00
H	Belanja Pegawai BLUD	16.464.319.745,00	15.141.135.464,00	91,96	5.346.914.134,00
1	Belanja Pegawai BLUD	16.464.319.745,00	15.141.135.464,00	91,96	5.346.914.134,00
I	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	659.251.836.843,00	643.788.696.080,40	97,66	648.801.431.883,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp239.491.478.258,36 atau 91,13% dari total anggaran sebesar Rp262.795.367.399,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp265.227.158.771,92 terdapat penurunan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp25.735.680.513,56 atau 9,70% dari realisasi tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Jabel 5.31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Barang Pakai Habis	29.821.140.410,00	27.110.415.209,00	90,91	34.408.645.883,00
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	32.734.800,00	32.714.800,00	99,93	228.018.500,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	78.080.000,00	78.078.800,00	100,00	19.751.000,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.549.395.155,00	4.216.787.675,00	90,70	4.834.749.199,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	100.000.000,00	100.335.500,00	99,74	858.889.450,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	84.165.000,00	70.585.000,00	83,84	28.721.800,00
6	Belanja Bahan-Ist Tangung Pemadam Kebakaran	6.000.000,00	4.470.000,00	74,50	4.160.000,00
7	Belanja Bahan Ist Tabung Gas	30.800.000,00	28.199.000,00	91,48	27.772.500,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Ribit Ikan	43.000.000,00	39.000.000,00	90,70	47.020.850,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.536.265.880,00	2.310.038.195,00	91,08	3.893.962.207,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	28.320.885,00	28.316.987,00	99,99	28.816.125,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	13.756.000,00	12.091.000,00	87,99	600.000,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	335.250,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	15.420.000,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.872.000,00	8.870.000,00	99,97	3.010.000,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	3.341.809.887,00	3.207.752.530,00	95,99	3.487.134.684,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	800.000,00	800.000,00	100,00	1.050.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	4.007.176.723,00	3.553.482.088,00	88,79	4.242.909.439,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	159.858.500,00	145.465.000,00	90,93	247.920.392,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	800.000,00	700.000,00	87,50	1.200.000,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	7.575.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	644.660.920,00	621.457.905,00	96,40	520.842.800,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	374.262.200,00	346.445.001,00	92,57	920.471.080,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perengkapar Pendukung Galangra	102.400.000,00	89.855.000,00	87,75	142.363.640,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.020.779.800,00	888.428.880,00	87,03	854.154.183,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.098.054.400,00	1.860.788.879,00	89,30	1.838.639.400,00
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	16.081.000,00	16.000.000,00	99,50	214.221.096,00
28	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	240.000,00
29	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	852.000,00	852.000,00	100,00	2.653.785.000,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	34.118.200,00	34.018.200,00	99,71	28.215.000,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	217.000.000,00	193.033.000,00	88,95	200.011.810,00
32	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	160.000.000,00	149.684.000,00	93,79	44.804.650,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.361.575.000,00	3.500.162.375,00	82,08	3.893.569.210,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Jemputan Tamu	3.052.497.500,00	2.960.220.587,00	96,98	2.579.774.892,00
35	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	31.900.000,00	0,00	0,00	186.046.106,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	450.102.500,00	425.588.500,00	94,55	674.103.500,00
37	Belanja Pakaian Dinas K/PH dan WK/PH	196.900.000,00	197.130.820,00	99,58	327.305.320,00
38	Belanja Pakaian Dinas dan Airbul Pimpinan dan Anggota DPRD	313.740.000,00	311.284.000,00	99,22	213.385.000,00
39	Belanja Pakaian Dinas Harap (PDIH)	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	78.943.100,00
40	Belanja Pakaian Dinas Lapangan IPDLI	75.435.100,00	69.444.000,00	92,06	451.722.120,00
41	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
42	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	41.885.800,00	40.695.000,00	97,21	0,00
43	Belanja Pakaian Adat Daerah	616.740.000,00	614.243.650,00	99,63	325.769.500,00
44	Belanja Pakaian Batik Tradisional	239.500.000,00	228.900.000,00	96,31	
45	Belanja Pakaian Olahraga	550.155.000,00	545.178.980,00	98,10	145.655.800,00
46	Belanja Pakaian Pasakiraka	52.955.000,00	52.955.000,00	100,00	58.718.000,00
47	Belanja Pakaian Jas/Gaun	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
B	Belanja Barang Tak Habis Pakai	15.000.000,00	16.000.000,00	100,00	10.000.000,00
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
C	Belanja Jasa Kantor	70.411.987.391,00	63.710.194.645,00	90,48	78.739.049.378,00
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	27.700.000,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembebas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.077.410.000,00	4.802.900.000,00	94,58	3.438.410.000,00
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekreteriat Tim Pelaksana Kegiatan	2.994.800.000,00	2.467.037.916,00	82,38	2.475.377.000,00
4	Honorarium Pemuteri Keterangan Ahli Saksi Ahli, dan Beracara	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	29.780.000,00	29.780.000,00	100,00	8.000.000,00
6	Honorarium Rohaniwan	7.280.000,00	5.000.000,00	68,87	3.610.000,00
7	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	30.660.000,00	20.740.000,00	67,65	31.718.000,00
8	Honorarium Penyelenggara Ujian	64.000.000,00	63.800.000,00	99,78	78.150.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
9	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	110.900.000,00	110.900.000,00	100,00	326.000.000,00
10	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	574.860.000,00	564.500.000,00	98,23	677.300.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Penjdikan	6.229.829.200,00	4.548.297.500,00	73,01	4.236.720.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.704.512.825,00	2.340.576.116,00	73,04	4.687.672.460,00
13	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	77.010.000,00	72.609.050,00	94,28	147.515.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Kelembahan Umum dan Pelindungan Masyarakat	1.252.800.000,00	1.252.800.000,00	100,00	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.759.400.000,00	2.767.886.924,00	99,96	2.267.620.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.855.900.000,00	2.855.820.000,00	100,00	3.211.720.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	138.000.000,00	135.000.000,00	97,83	426.257.500,00
18	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	495.000.000,00	484.325.000,00	99,86	216.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.140.500.000,00	2.097.868.000,00	98,01	2.453.400.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	858.610.468,00	853.707.023,00	99,43	872.009.920,00
21	Belanja Jasa Tenaga Arap dan Perpustakaan	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	124.500.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	57.000.000,00	51.760.000,00	99,54	106.850.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.271.034.000,00	7.166.665.175,00	98,58	10.463.038.034,00
24	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.912.120.000,00	1.908.804.300,00	99,83	3.321.046.014,00
25	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.614.906.000,00	2.526.663.900,00	69,89	3.135.899.970,00
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.003.140.000,00	1.414.246.980,00	70,60	2.967.999.499,00
27	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.138.525.000,00	3.094.161.520,00	98,58	3.442.301.256,00
28	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.266.800.000,00	1.239.890.464,00	97,95	2.406.969.437,00
29	Belanja Jasa Tenaga Caraka	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	72.000.000,00
30	Belanja Jasa Tenaga Supir	817.500.000,00	802.924.920,00	98,20	952.027.920,00
31	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	124.400.000,00	121.859.600,00	97,97	115.325.000,00
32	Belanja Jasa Tenaga Jasa Perencanaan/Perencanaan	49.385.000,00	45.300.000,00	93,60	104.150.000,00
33	Belanja Jasa Tata Rias	32.800.000,00	32.500.000,00	99,09	31.600.000,00
34	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	252.000.000,00	234.900.000,00	93,21	271.000.000,00
35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.690.750.000,00	1.686.721.576,00	99,78	762.809.000,00
36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	25.000.000,00

No.	Urutan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
37	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesehatan dan Kebutuhan, serta Alat Rumah Tangga	46.879.500,00	23.592.800,00	48,90	25.551.700,00
38	Belanja Jasa Kalibrasi	21.000.000,00	19.487.298,00	92,80	94.759.182,00
39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	143.000.000,00	138.840.000,00	96,17	143.300.000,00
40	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendali Hama, dan Fungus	6.400.000,00	1.200.000,00	18,75	9.000.000,00
41	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	206.480.000,00	89.748.000,00	42,98	17.881.840,00
42	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Perolehan	1.267.500.000,00	1.276.565.000,00	99,35	1.003.498.600,00
43	Belanja Tagihan Telepon	149.926.588,00	121.579.381,00	81,09	125.209.384,00
44	Belanja Tagihan Air	414.455.000,00	284.479.730,00	68,64	281.557.098,00
45	Belanja Tagihan Listrik	8.262.262.810,00	8.082.453.784,00	97,82	7.729.243.483,00
46	Belanja Langganan Jurna/Surat Kabar/Majalah	303.847.000,00	337.963.000,00	92,89	683.776.600,00
47	Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	2.911.315.000,00	2.658.176.587,00	91,55	3.192.988.393,00
48	Belanja Paket/Pengiriman	16.466.000,00	4.861.050,00	29,43	4.688.100,00
49	Belanja Registrasi/Keanggotaan	71.750.000,00	27.600.000,00	38,33	62.175.000,00
50	Belanja Pembayaran Pajak HPP dan Perizinan	5.000.000,00	3.263.795,00	65,28	5.018.414,00
51	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
52	Belanja Lembur	4.884.936.000,00	4.454.816.150,00	91,19	4.439.311.500,00
53	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00	0,00	0,00	3.641.000,00
54	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	412.500.000,00
55	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	453.909.000,00	451.825.068,00	99,48	6.770.021.515,00
D	Belanja Jaminan Asuransi	12.684.232.198,00	12.305.553.907,00	97,01	13.208.057.486,00
1	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PHI	250.000.000,00	249.963.288,00	99,99	248.834.000,00
2	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	9.837.793.200,00	9.837.793.200,00	100,00	10.582.933.300,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.836.603.144,00	2.295.636.629,00	81,00	2.211.517.528,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	61.839.805,00	50.099.357,00	80,92	51.674.230,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	66.935.967,00	72.051.235,00	75,10	110.096.406,00
E	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.490.347.000,00	1.291.747.500,00	87,26	899.545.181,00
1	Belanja Sewa Electric Generating Set	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	577.700.000,00	489.400.000,00	84,54	141.840.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	23.200.000,00	22.000.000,00	94,83	0,00
4	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	7.630.000,00	7.600.000,00	100,00	6.750.000,00
5	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	4.640.000,00
6	Belanja Sewa Alat Pendingin	6.030.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	43.780.000,00
8	Belanja Sewa Perakutan Suling Audin	25.876.000,00	15.875.000,00	61,35	4.160.000,00
9	Belanja Sewa Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	60.000.000,00	0,00	0,00	49.682.000,00
10	Belanja Sewa Peralatan Umum	775.522.000,00	747.422.500,00	96,38	635.723.161,00
11	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
F	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	880.020.472,00	488.644.200,00	70,99	318.427.000,00
1	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	2.670.472,00	1.022.200,00	38,28	0,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempel Pertemuan	32.500.000,00	26.475.000,00	79,03	18.824.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00	7.700.000,00
4	Belanja Sewa Tamana	205.000.000,00	204.270.000,00	99,64	142.500.000,00
5	Belanja Sewa Hotel	238.500.000,00	200.427.000,00	84,04	103.603.000,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempel Tinggal Lainnya	153.750.000,00	9.750.000,00	6,34	45.600.000,00
G	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	76.100.000,00	75.500.000,00	99,21	48.900.000,00
1	Belanja Sewa Alat Musik	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00	32.900.000,00
2	Belanja Sewa Barang Bergerak Kesenian Lainnya	13.600.000,00	13.000.000,00	95,59	14.900.000,00
H	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.104.670.822,00	1.604.353.142,00	50,12	3.391.384.021,00
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	257.100.000,00	121.954.079,00	47,05	106.068.075,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Ar	1.332.912.622,00	1.160.495.280,00	87,06	874.761.305,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	625.357.200,00	156.650.370,00	18,91	966.856.991,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.994.800,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	75.000.000,00	40.159.100,00	53,65	31.110.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembang Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	403.885.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	195.000.000,00	45.112.314,00	23,13	107.863.600,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	104.001.000,00	28.782.000,00	27,67	29.829.250,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	582.305.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	310.000.000,00	253.000.000,00	81,65	88.100.000,00
1	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	475.000.000,00	218.828.640,00	46,28	228.000.000,00
1	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata	475.000.000,00	218.828.640,00	46,28	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	228.000.000,00
J	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.036.217.412,00	14.288.784.876,00	79,11	11.526.373.874,00
1	Belanja Kursus/Pelatihan	4.671.430.000,00	4.182.091.797,00	89,52	1.131.378.336,00
2	Belanja Sosialisasi	5.371.514.912,00	4.502.915.096,00	83,83	5.382.411.115,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	5.899.150.500,00	5.603.777.793,00	94,99	4.670.779.523,00
4	Belanja Diklat Keperinihian	93.122.000,00	0,00	0,00	461.805.000,00
K	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.093.810.290,00	6.300.496.459,00	88,82	8.204.139.343,00
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	12.000.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	40.000.000,00	39.855.000,00	99,64	148.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	183.450.000,00	71.708.400,00	39,09	45.831.875,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat Compacting Equipment	8.000.000,00	7.954.200,00	99,43	5.747.500,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	7.595.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Listrik-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	997.602.000,00	897.713.755,00	89,92	946.818.280,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Pentutupang	3.577.250.790,00	3.391.537.899,00	94,94	3.159.420.598,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.113.467.630,00	1.035.277.435,00	92,98	1.382.553.415,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	14.961.900,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Barmesin-Alat Bengkel Hmsein Lainnya	29.000.000,00	9.000.000,00	31,03	6.000.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	114.190.000,00	85.361.000,00	74,75	140.375.083,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	47.500.000,00	47.200.000,00	99,37	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	140.773.000,00	108.107.800,00	75,19	145.889.180,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	185.000.000,00	179.000.000,00	96,78	183.480.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	51.150.000,00	48.382.835,00	94,59	39.607.500,00
18	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	252.761.900,00	244.015.800,00	96,54	252.411.132,00
19	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.978.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya	79.212.000,00	63.098.235,00	79,64	94.397.200,00
21	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200.200.000,00	0,00	0,00	60.200.000,00
L	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.613.510.498,00	1.859.151.382,00	71,14	1.274.985.778,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.053.510.486,00	1.309.539.382,00	63,77	1.274.999.778,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Linggal-Rumah Negara Golongar I	175.000.000,00	165.162.000,00	94,38	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Bangunan Gedung Tempat Linggal Lainnya	386.000.000,00	384.450.000,00	99,58	0,00
M	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.270.000.000,00	2.239.970.000,00	98,68	4.375.067.315,00
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan Kagupatan	2.230.000.000,00	2.199.970.000,00	98,65	4.375.067.315,00
2	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
N	Belanja Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	32.000.000,00	25.000.000,00	78,13	29.400.000,00
1	Belanja Pemeliharaan Tanaman	32.000.000,00	25.000.000,00	78,13	29.400.000,00
Q	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.908.482.894,00	43.277.609.411,00	92,28	38.814.824.485,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.122.787.420,00	35.720.416.411,00	91,30	30.447.052.965,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.785.715.274,00	7.557.190.000,00	111,34	8.367.871.500,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
P	Belanja Uang yang Dihtarkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.844.529.500,00	5.689.133.000,00	97,34	2.781.192.600,00
1	Belanja Hibah yang Bersifat Perombaan	400.127.500,00	379.096.000,00	94,74	330.550.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Sulu Prestas	378.600.000,00	348.090.000,00	91,95	239.000.000,00
3	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	82.950.000,00	10.222.600,00	12,32	67.882.500,00
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.982.849.000,00	4.951.764.500,00	99,38	2.135.750.000,00
Q	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	168.525.000,00	162.570.000,00	96,47	291.850.000,00
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	136.900.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	168.525.000,00	162.570.000,00	96,47	154.950.000,00
R	Belanja Barang dan Jasa BOS	38.022.560.401,00	33.991.063.118,00	89,38	38.077.918.680,00
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	38.022.560.401,00	33.991.063.118,00	89,38	38.077.918.680,00
S	Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.878.353.395,00	24.659.565.069,36	85,41	30.428.254.787,82

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.878.353.395,00	24.859.565.069,36	91,76	30.428.254.787,92
	Jumlah	262.795.367.399,00	239.491.478.258,36	91,13	268.227.158.771,92

3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp31.416.712.030,00 atau 81,86% dari total anggaran Belanja Hibah sebesar Rp38.379.298.526,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah tahun 2021 sebesar Rp34.067.820.697,00 terdapat penurunan realisasi belanja hibah sebesar Rp2.651.108.667,00 atau 7,78% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.580.000.000,00	1.200.000.000,00	75,95	99.614.000,00
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.580.000.000,00	1.200.000.000,00	76,96	99.514.000,00
B	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.483.282.600,00	7.794.897.628,00	92,10	7.807.816.280,00
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.863.000.000,00	4.550.854.856,00	95,17	7.687.339.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.580.282.600,00	1.743.952.672,00	78,72	120.481.280,00
C	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.185.078.700,00	13.245.112.948,00	87,22	8.184.868.747,00
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.214.800.000,00	3.854.808.000,00	91,46	2.146.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah	10.971.278.700,00	9.390.312.948,00	85,59	6.039.068.747,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
D	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Komasyarakatan	12.251.126.000,00	8.339.109.704,00	68,07	17.096.702.558,00
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Komasyarakatan	39.030.500,00	1.500.000,00	10,26	120.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Komasyarakatan	12.212.126.000,00	8.335.109.704,00	68,25	16.976.702.558,00
E	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	898.831.325,00	837.681.850,00	93,20	898.831.141,00
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	898.831.325,00	837.681.850,00	93,20	898.831.141,00
	Jumlah	38.379.298.526,00	31.416.712.030,00	81,86	34.057.820.697,00

Rincian Belanja Hibah Per OPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.33 Rincian Belanja Hibah Per OPD Tahun 2022

No.	Nama OPD	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Komasyarakatan	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	4.896.400.000,00	6.022.420.000,00	289.827.800,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	7.072.701.598,00	0,00
3	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	808.483.870,00	0,00
4	Dinas Pangan	0,00	15.000.000,00	2.054.519.450,00	0,00	0,00
5	Dinas Kominfo	0,00	99.451.856,00	0,00	50.000.000,00	0,00
6	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	0,00	75.883.884,00	316.316.436,00	0,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.156.000.000,00	281.098.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Perikanan	0,00	0,00	1.708.973.080,00	0,00	0,00
9	Dinas Tanaman dan Hortikultura	0,00	13.397.000,00	2.420.718.534,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemukiman dan Kesehatan Hewan	0,00	1.216.555.872,00	0,00	0,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	1.200.000.000,00	416.000.000,00	730.000.000,00	0,00	0,00
12	Badan Kesatuan	0,00	0,00	0,00	837.681.850,00	0,00

No.	Nama OPD	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Kebarang-an Terdaftar	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
	Bergas dan Politik					
	Jumlah	1.200.000.000,00	7.794.807.528,00	13.245.112.948,00	8.339.109.704,00	837.681.850,00

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp837.681.850,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik

No.	Partai Politik	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	Tanggal SP2D
1	Partai Kebangkitan Bangsa	61.149.471,24	0,00	-
2	Partai Keadilan Sejahtera	112.986.112,88	112.986.113,00	26/07/2022
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	53.192.071,78	53.192.972,00	28/07/2022
4	Partai Gelombang Karya	99.069.851,32	99.059.851,00	12/07/2022
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	155.595.899,90	155.595.890,00	12/07/2022
6	Partai Demokrat	113.181.921,19	113.181.921,00	12/07/2022
7	Partai Amanat Nasional	90.310.567,10	90.310.567,00	12/07/2022
8	Partai Progresif Pembangunan	70.825.262,30	70.825.262,00	12/10/2022
9	Hanura	83.309.229,84	83.309.220,00	08/08/2022
10	Partai Nasdem	59.220.044,30	59.220.044,00	22/07/2022
	Jumlah	898.831.321,06	837.681.850,00	

4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp6.531.013.940,00 atau 97,09% dari total anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6.727.050.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2021 sebesar Rp8.605.097.963,00 terdapat penurunan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp2.074.084.023,00 atau 24,10% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	45.000.000,00	0,00	0,00	2.003.861.113,00
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
B	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	914.250.000,00	895.249.850,00	97,82	0,00
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	914.250.000,00	895.249.850,00	97,82	0,00
C	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
D	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.877.800.000,00	5.876.860.990,00	99,21	6.581.296.800,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.877.800.000,00	5.575.960.990,00	96,21	6.531.296.600,00
E	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	60.000.000,00	59.803.000,00	99,67	19.940.250,00
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	60.000.000,00	59.803.000,00	99,67	19.940.250,00
Jumlah		6.727.050.000,00	6.631.013.840,00	97,09	8.608.097.963,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial Per OPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 36 Rincian Belanja Bantuan Sosial Per OPD Tahun 2022

No.	Nama OPD	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
1	Dinas Sosial	735.807.250,00	595.960.990,00	59.803.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	0,00	4.980.000.000,00	0,00
3	Dinas Perikanan	150.942.700,00	0,00	0,00
Jumlah		886.750.000,00	6.575.960.990,00	59.803.000,00

Rincian realisasi belanja bantuan sosial pada tiga OPD di atas adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial

Tabel 5. 37 Rincian realisasi belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Belanja
25 April 2022	00218/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yetti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban kebakaran di Nagari Sungai Antuan tanggal 18 Maret 2022	270.000,00
25 April 2022	00219/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yetti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban banjir Galugua tanggal 04 Januari 2022	3.690.000,00
25 April 2022	00220/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yetti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban kebakaran di Nagari Durian Tinggi tanggal 08 Februari 2022	170.000,00
25 April 2022	00221/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yetti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban longsor di Nagari Tunga tanggal 07 Januari 2022	374.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja
25 April 2022	00222/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban kebakaran di Nagari Simalanggung tanggal 13 Februari 2022	170.000,00
25 April 2022	00223/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban kebakaran di Nagari Sibujuh Batu tanggal 21 Februari 2022	175.000,00
25 April 2022	00224/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban kebakaran di Nagari Teram tanggal 04 Maret 2022	268.000,00
25 April 2022	00225/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban gempa bumi di Kec. Gunwang Cmah dan Dukik Dansan tanggal 02 Maret 2022	4.300.000,00
25 April 2022	00226/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban gempa bumi di Kab. Pasaman tanggal 26 Februari 2022	1.760.000,00
25 April 2022	00227/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban Rumah ditimpa pohon di Kec. Payakumbuh tanggal 08 April 2022	560.000,00
25 April 2022	00228/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban kebakaran tanggal 22 Maret 2022	270.000,00
25 April 2022	00229/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban kebakaran tanggal 28 Maret 2022	270.000,00
25 April 2022	00230/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban kebakaran tanggal 29 Maret 2022	270.000,00
25 April 2022	00231/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban kebakaran tanggal 30 Maret 2022	270.000,00
25 April 2022	00232/4-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial barang untuk korban kebakaran tanggal 04 April 2022	540.000,00
29 Juli 2022	00271/7-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk korban banjir di Nag. Surayan Kec. Akaburu pada tanggal 05 Juli 2022	568.000,00
29 Juli 2022	00272/7-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk korban kebakaran di Nag. Talang Mbur Kec. Mungka pada tanggal 29 Juni 2022.	284.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja
29 Juli 2022	00273/7-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk korban rumah dilimpa pohon lumpang di Nag. K. Darau Simalanggang Kar. Payakumbuh pada tanggal 23 Juni 2022.	560.000,00
29 Juli 2022	00274/7-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk korban kebakaran di Nag. Koto Tinggi, Kec. Dituang Omeh pada tanggal 12 Juni 2022.	560.000,00
29 Juli 2022	00275/7-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk korban gempa di Nag. Tanjung Buliak Kec. Pangkalan Koto Baru pada tanggal 14 April 2022	275.000,00
29 Juli 2022	00276/7-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Penyalangan biaya belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk korban gempa di Nag. Durian Gadang Kec. Akabunu pada tanggal 10 Mei 2022	275.000,00
29 Juli 2022	00278/7-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk korban gempa di Nag. Koto Alam, Kec. Pangkalan Koto Baru pada tanggal 20 Mei 2022.	1.680.000,00
29 Juli 2022	00277/7-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk korban gempa di Nag. Sambilan, Kec. Harau pada tanggal 30 Mei 2022.	560.000,00
13 September 2022	00003/9-B02	Uang Muka Bantuan Sosial Yang Direncanakan Kepada Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	102.450.599,00
29 September 2022	00241/9-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran belanja bantuan Sosial Barang tanggal 07 Juli 2022	284.000,00
29 September 2022	00242/9-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran belanja bantuan Sosial Barang tanggal 17 Agustus 2022	864.000,00
29 September 2022	00243/9-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran belanja bantuan Sosial Barang tanggal 16 Agustus 2022	578.000,00
29 September 2022	00244/9-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran belanja bantuan Sosial Barang tanggal 25 Agustus 2022	578.000,00
29 September 2022	00245/9-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran belanja bantuan Sosial Barang tanggal 25 Agustus 2022	2.890.000,00
29 September 2022	00246/9-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran belanja bantuan Sosial Barang tanggal 26 Agustus 2022	578.000,00
29 September 2022	00257/9-B02	Bantuan Sosial Yang Direncanakan Kepada Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	238.351.399,00
1 Oktober 2022	00004/10-B02	Pengadaan Bantuan Pemukiman Bagi Lansia Terantar dan Lansia Tidak Potensial Kec. Lurah Sago Halaban (Paket IV)	46.428.408,00
24 Oktober 2022	00005/10-B02	Pengadaan Bantuan Pemukiman Bagi Lansia Terantar dan Lansia Tidak Potensial Kec. Mungka (Paket III)	28.450.878,00

Tanggal	No. BKU	Urutan	Belanja
27 Oktober 2022	00006/10-B02	Pengadaan Bantuan Pemakanan Bagi Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial Kec. Guguk (Paket II)	9.734.569,00
31 Oktober 2022	00198/10-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) Pembayaran belanja bantuan Sosial Barang tanggal di Nag. Andaeh, Kec. Luak pada tanggal 03 september 2022	588.000,00
31 Oktober 2022	00199/10-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran belanja bantuan Sosial Barang tanggal di Nag. Lubuk Alai, Kec. Kapur IX dan Nag. Ansaeh, Kec. Luak pada tanggal 08 september 2022	698.000,00
31 Oktober 2022	00200/10-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran belanja bantuan Sosial Barang tanggal di Nag. Gunung Malintang, Kec. Pangkalan kota baru pada tanggal 16 september 2022	574.000,00
31 Oktober 2022	00201/10-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran belanja bantuan Sosial Barang tanggal di Nag. Limbanang, Kec. Suliki pada tanggal 23 september 2022	297.000,00
09 November 2022	00005/11-B02	Pengadaan Bantuan Pemakanan Bagi Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial Kecamatan Payskumbuh (Paket I)	105.487.589,00
26 November 2022	00314/11-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya Belanja bantuan sosial tanggal 28 September 2022	298.000,00
29 November 2022	00315/11-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya Belanja bantuan sosial tanggal 21 Oktober 2022	584.000,00
29 November 2022	00316/11-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya Belanja bantuan sosial tanggal 24 Oktober 2022	584.000,00
29 November 2022	00317/11-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya Belanja bantuan sosial tanggal 28 Oktober 2022	297.000,00
29 November 2022	00318/11-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya Belanja bantuan sosial tanggal 07 November 2022	584.000,00
29 November 2022	00355/11-B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran biaya Belanja bantuan sosial tanggal 17 November 2022	900.000,00
16 Desember 2022	00092/12-B02	Pengadaan Bantuan Alat Bantu Cacak Bagi Penyandang Disabilitas	4.950.000,00
28 Desember 2022	00091/12-B02	Pengadaan Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat - Kelompok Usaha Bersama (KUBE -FMA)	58.865.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja
28 Desember 2022	00085/12- B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) ds - Pembayaran belanja bantuan sosial barang tanggal 25 November 2022	300.000,00
28 Desember 2022	00090/12- B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Pembayaran belanja bantuan sosial barang tanggal 13 Desember 2022	300.000,00
28 Desember 2022	00277/12- B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Belanja bantuan sosial tanggal 21 Desember 2022	300.000,00
29 Desember 2022	00278/12- B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Belanja bantuan sosial tanggal 27 Desember 2022	300.000,00
29 Desember 2022	00278/12- B02 (Tunai)	Bayar kepada Yeti Kurnia (Nayla Santan) - Belanja bantuan sosial tanggal 26 Desember 2022	300.000,00
29 Desember 2022	00290/12-B0 2	Pengadaan Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu, Pekerjaan Pengadaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP-FM) Paket I	178.275.000,00
29 Desember 2022	00291/12-B02	Pengadaan Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu, Pekerjaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP-FM)	123.000.000,00
31 Desember 2022	00401/12-B0 2	Pengadaan Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu, Pekerjaan Pengadaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP-FM) Paket II	141.611.000,00
31 Desember 2022	00402/12-B0 2	Pengadaan Bantuan Sosial Yang Direncanakan Kepada Individu Usaha Ekonomi Produktif (UEP-FM) Paket I	91.672.000,00
31 Desember 2022	00400/12- B02	Pengadaan Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Keluarga, Pengadaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Paket I	179.886.000,00
31 Desember 2022	00403/12- B02	Pengadaan Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Keluarga, Pekerjaan Pengadaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Paket II	44.878.000,00
		Jumlah	1.391.371.240,00

2. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman

Tabel 5. 38 Rincian realisasi belanja bantuan sosial pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja
1	2	3	4
14 Oktober 2022	0018U-B03	Pembayaran Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana sebanyak 4 (empat) unit kepada MOHAMMAD DENNY NURCAHYONO, S.H.M.Han (KODIM 0306/50 KOTA) sub keg. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	80.000.000,00
14 Oktober 2022	0818E-B03	Pembayaran Pembangunan rumah bagi korban bencana sebanyak 4 (empat) unit kepada MOHAMMAD DENNY NURCAHYONO, S.H.M.Han (KODIM 0306/50 KOTA) sub keg. Pembangunan rumah bagi korban bencana	120.000.000,00
09 Agustus 2022	0004H-R03	Tahap I (35 unit) Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) unit kepada Mochammad Denny Nurcahyono, SH.M.Han (Kodim 0306/50 Kota) sub keg. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.050.000.000,00
26 September 2022	00150-F03	Tahap II (35 unit) Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sebanyak 66 (Sembilan puluh enam) unit kepada Mochammad Denny Nurcahyono, SH.M.Han (Kodim 0306/50 Kota) sub keg. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.050.000.000,00
24 Oktober 2022	00200-B03	Pembayaran Tahap III (24 unit) Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) unit kepada Mochammad Denny Nurcahyono, SH.M.Han (Kodim 0306/50 Kota) sub keg. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	720.000.000,00
18 November 2022	00209-H03	Pembayaran Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sebanyak 66 (enam puluh enam) unit kepada Mochammad Denny Nurcahyono, SH.M.Han (Kodim 0306/50 Kota) sub keg. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.000.000.000,00
Total			4.980.000.000,00

3. Dinas Perikanan

Tabel 5. 39 Rincian realisasi belanja bantuan sosial pada Dinas Perikanan

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja
1	2	3	4
28 Desember 2022	00773-B02	Pembayaran 100% Pekerjaar Budidaya Ikan Skala Rumah Tangga (Budidaya Ikan Dalam Empenbudkamber) kepada CV. Sapsa Muli Karya	158.642.700,00
Total			158.642.700,00

A. Belanja Modal

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
149.956.373.662,00	147.622.625.105,00

Realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp149.956.373.662,00 atau 74,92% dari total anggaran Belanja Modal sebesar Rp200.167.415.482,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2021 sebesar Rp147.622.625.105,00 terdapat kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp2.333.748.557,00 atau 1,58% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	5.072.550.000,00	1.164.122.710,00	22,95	215.885.219,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.094.706.308,00	38.314.325.085,00	88,91	31.510.487.807,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.784.375.852,00	23.220.870.929,00	84,00	31.718.900.607,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan	11.247.175.308,00	83.965.835.510,00	75,48	79.966.686.210,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.458.603.016,00	3.290.619.449,00	73,64	4.289.872.262,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Jumlah		200.167.415.482,00	149.956.373.662,00	74,92	147.622.625.105,00

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah tahun 2022 sebesar Rp1.164.122.710,00 atau 22,95% dari total anggaran sebesar Rp5.072.550.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah tahun 2021 sebesar Rp215.885.219,00 terdapat peningkatan realisasi belanja modal tanah sebesar Rp948.237.491,00 atau 439,23% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.980.000.000,00	88.189.710,00	2,22	0,00
2	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Lompat Kerja	201.450.000,00	194.634.000,00	96,62	0,00
3	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	881.100.000,00	881.100.000,00	100,00	215.885.219,00
Jumlah		5.072.550.000,00	1.164.122.710,00	22,95	215.885.219,00

Realisasi Belanja Modal Tanah persil lainnya sebesar Rp881.100.000,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Pemukiman sebesar Rp881.100.000,00 berupa pengadaan tanah untuk RTH Perkotaan Sarilamak. Realisasi

belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sebesar Rp88.388.710,00 pada Dinas PUPR berupa pengadaan tanah untuk rumah dinas Bupati. Realisasi belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja sebesar Rp194.634.000,00 pada Dinas PUPR berupa pematangan lahan untuk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp38.314.925.065,00 atau 88,91% dari total anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.094.705.306,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 sebesar Rp31.510.467.807,00 terdapat kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp6.804.457.258,00 atau 21,59% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	427.500.000,00	427.500.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Danhu	64.560.000,00	49.025.000,00	74,40	2.020.920.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.987.800.000,00	4.195.138.360,00	89,83	2.758.394.550,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Bangkai Bermesin	0,00	0,00	0,00	30.624.227,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Bangkai Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	9.850.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	12.000.000,00	0,00	0,00	1.102.676.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	755.406.250,00	222.771.000,00	87,22	271.797.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	113.891.000,00	106.413.900,00	93,80	47.441.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.997.378.000,00	1.816.896.309,00	90,98	2.256.807.200,00
10	Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapel Pejabat	4.590.000,00	4.590.000,00	100,00	489.445.000,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	498.870.000,00	488.888.000,00	98,20	553.440.807,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	160.500.000,00	74.844.400,00	46,63	743.621.000,00
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	1.210.600.000,00	1.026.225.446,00	84,79	7.197.861.869,00
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	6.215.295.000,00	5.230.692.600,00	84,16	1.530.633.481,00
15	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.655.610.000,00	2.412.737.699,00	90,89	0,00

No.	Urutan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
16	Belanja Modal Pengadaan Alat Peralat/Praktek Sekolah	3.11.000.000,00	99.598.000,00	26,85	0,00
17	Belanja Modal Komputer Unit	11.220.500.000,00	10.630.455.415,00	94,74	3.105.377.787,00
18	Belanja Modal Peralatan Komputer	816.568.959,00	452.384.030,00	55,40	630.191.180,00
19	Belanja Modal Alat Pengajaran Non Mesin	45.000.000,00	0,00	0,00	171.658.000,00
20	Belanja Modal Sumbu*	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
21	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	1.950.300.000,00	1.945.828.637,00	99,78	386.953.000,00
22	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
23	Belanja Modal Alat Peraga	30.600.000,00	10.000.000,00	32,88	0,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BUS	6.931.632.583,00	6.411.214.655,00	92,93	4.851.944.396,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.219.945.514,00	2.673.571.584,00	83,03	3.378.031.331,00
	Jumlah	43.094.705.308,00	33.314.925.065,00	88,91	21.810.487.807,00

Dari belanja modal peralatan dan mesin tersebut terdapat belanja modal pada 4 (empat) sekolah swasta yang bersumber dari DAK sebesar Rp496.466.000,00 dengan rincian belanja sebagai berikut.

NO	NAMA SEKOLAH	URAIAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	SD ISLAM TERPADU BUSTABIL ULUM	SPC DROME BOOK XI MINI	15	7.650.000,00	114.750.000,00
		SPC MODEM SW 300	1	2.775.000,00	2.775.000,00
		VIEWSONIC PA503X	1	7.210.000,00	7.210.000,00
		TOTAL			124.735.000,00
2	SD ISLAM AL KUTTAB	ADVAN CHROMEBOOK	15	7.750.000,00	116.250.000,00
		ADVAN HARVARD	1	2.600.000,00	2.600.000,00
		VIEW SONIC PROJECTOR PA503S	1	6.791.000,00	6.791.000,00
		TOTAL			125.641.000,00
3	SD SWASTIA ALAM ISLAMI MUMTAZ	ACER CB 311-91F3000 CHROMEBOOK	15	7.670.000,00	113.550.000,00
		PROLINK DL 7303 SMART 4G LTE	1	2.170.000,00	2.170.000,00
		VIEW SONIC PA503X	1	7.120.000,00	7.120.000,00
		TOTAL			122.840.000,00
		TOTAL RIK KE SD SWASTA			372.216.000,00
4	SMP ISLAM MUHAMMADIYAH H ANDALEH	LIBERA-MERDEKA CHORENEBOOK C120	15	7.640.000,00	114.600.000,00
		ADVAN HARVARD GPE20 PROJE	1	2.500.000,00	2.500.000,00

	INFOCUS PROYEKTOR CLASSROOM IN115A	1	7.150.000,00	7.150.000,00
	TOTAL TIK KE SMP SWASTA			124.250.000,00
	TOTAL			498.488.000,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar Rp23.220.870.928,00 atau 64,00% dari total anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.284.375.852,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 sebesar Rp31.719.900.607,00 terdapat penurunan realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp8.499.029.679,00 atau 26,79% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Temporal Kerja	33.328.483.007,00	21.170.121.025,00	63,38	28.480.802.182,00
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Temporal Tenggak	209.160.000,00	105.961.025,00	51,39	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	1.932.512.500,00	1.324.325.215,00	68,53	2.300.668.705,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	817.190.345,00	685.473.063,00	81,43	938.429.720,00
	Jumlah	36.284.378.852,00	23.220.870.928,00	64,29	31.719.900.607,00

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp83.965.835.510,00 atau 75,48% dari total anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp111.247.175.308,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021 sebesar Rp79.886.699.210,00 terdapat kenaikan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp4.079.136.300,00 atau 5,11% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	87.993.532.200,00	67.706.679.743,00	76,95	32.222.386.156,00
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	1.919.538.740,00	1.446.774.047,00	75,37	1.816.829.885,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan A. Irigasi	10.246.096.968,00	8.839.135.500,00	86,27	30.069.990.977,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman sungai dan	100.000.000,00	99.663.243,00	99,68	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	penanggungjawab bencana alam				
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber air dan air tanah	578.258.400,00	429.093.177,00	74,20	847.401.295,00
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	44.859.820,00
7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	5.817.648.000,00	5.439.538.880,00	93,50	8.885.151.000,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	189.000.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
9	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	127.531.575,00
10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	4.420.000.000,00	0,00	0,00	298.824.000,00
11	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi BLUD	5.090.000,00	4.950.000,00	98,00	19.874.702,00
	Jumlah	111.247.175.908,00	83.865.835.810,00	75,48	79.885.699.210,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp3.290.619.449,00 atau 73,64% dari total anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.468.609.016,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2021 sebesar Rp4.269.672.262,00 terdapat penurunan realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp979.052.813,00 atau turun sebesar 22,92% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	5.000.000,00	0,00	0,00	83.834.775,00
2	Belanja Modal barang berwujud kebudayaan	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Peralat	49.273.000,00	0,00	0,00	82.250.000,00
4	Belanja Modal Ekstra Peranan	115.100.000,00	114.976.400,00	99,89	157.687.080,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	17.975.275,00
6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud (Software)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.299.231.016,00	3.176.841.049,00	73,87	3.911.715.152,00
	Jumlah	4.468.609.016,00	3.290.619.449,00	73,64	4.288.872.282,00

B. Belanja Tak Terduga

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

708.965.000,00

776.542.837,00

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp708.965.000,00 atau 44,65% dari total anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.587.990.439,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tak terduga tahun 2021 sebesar Rp776.542.837,00 terdapat penurunan realisasi belanja tak terduga sebesar Rp67.577.837,00 atau 8,70% dari realisasi tahun 2021.

Adapun rincian SP2D dan realisasi Belanja Tak Terduga 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 46 Rincian SP2D Belanja Tak Terduga Tahun 2022

No.	Uraian	SP2D		Jumlah SP2D (Rp)	Realisasi BTT (Rp)
		Nomor	Tanggal		
1	Tanggap darurat bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota	00131	09-Feb-22	354.534.000,00	171.300.000,00
2	Bantuan Bencana Longsor dan Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota	00573	27-Apr-22	22.000.000,00	22.000.000,00
3	Bantuan Pasca Bencana Gempa Bumi dan Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota	00931	23-Jun-22	23.500.000,00	23.500.000,00
4	Bantuan Pasca Bencana Gempa Bumi Angin Kencang, Bencana Longsor dan Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota	00978	29 Jun 22	24.000.000,00	24.000.000,00
5	Bantuan Bencana Angin Kencang dan Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota	01787	12-Sep-22	32.000.000,00	32.000.000,00
6	Bantuan Pasca Bencana Angin Kencang di Nagari Curuh Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	02280	12-Oct-22	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Bantuan Kebakaran di Nagari Mungka dan Bantuan Pasca Bencana Angin Kencang di Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka	02656	04-Nov 22	23.000.000,00	23.000.000,00
8	Bantuan Kebakaran dan Bantuan Pasca Bencana Angin Kencang di Kabupaten Lima Puluh Kota	02952	21-Nov 22	17.500.000,00	17.500.000,00
9	BTT Penanganan Banjir dan Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota	02895	17-Nov 22	217.700.000,00	196.440.000,00
10	BTT Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam dan Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota	03650	27-Dec-22	204.200.000,00	200.225.000,00
Jumlah				923.234.000,00	708.885.000,00

Dari seluruh penerbitan SP2D Belanja Tidak Terduga selama tahun 2022 sebesar Rp923.234.000,00 telah terealisasi sebesar Rp708.965.000,00 sehingga terdapat pengembalian belanja tak terduga (CP) sebesar Rp214.269.000,00 yang terdiri dari pengembalian TU dana tanggap darurat bencana alam banjir dan longsor nomor SP2D 00131/SP2D/TU/I/2022 dari BPBD sebesar Rp93.034.000,00, kekurangan sisa pengembalian TU dana tanggap darurat bencana alam banjir dan longsor nomor SP2D 00131/SP2D/TU/II/2022 dari BPBD sebesar Rp90.000.000,00, pengembalian belanja BTT bencana alam banjir dan longsor nomor SP2D 02895/SP2D/TU/IV/2022 dari BPBD sebesar Rp27.760.000,00, dan pengembalian belanja BTT

bencana alam banjir dan longsor nomor SP2D/03550/SP2D/TU/IV/2022 sebesar Rp3.975.000,00.

5.1.3. Belanja Transfer	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	158.703.493.317,00	161.270.961.166,00

Realisasi belanja transfer tahun 2022 sebesar Rp158.703.493.317,00 atau 95,30% dari anggaran belanja transfer sebesar Rp166.531.142.857,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja transfer tahun 2021 sebesar Rp161.270.961.166,00 terdapat penurunan realisasi belanja transfer sebesar Rp2.567.467.849,00 atau 1,59% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	5.405.104.357,00	1.930.308.868,00	35,71	1.447.678.247,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	161.126.038.500,00	156.773.184.449,00	97,30	159.823.282.919,00
	Jumlah	166.531.142.857,00	158.703.493.317,00	95,30	161.270.961.166,00

1. Belanja Bagi Hasil

Realisasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp993.409.766,00 atau 23,92% dari anggaran belanja sebesar Rp4.152.204.771,00 dan realisasi belanja bagi hasil retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp936.899.102,00 atau 74,78% dari anggaran belanja sebesar Rp1.252.899.586,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja bagi hasil pendapatan tahun 2021 sebesar Rp1.447.678.247,00 terdapat penurunan realisasi belanja bagi hasil pendapatan sebesar Rp194.778.661,00 atau 13,45% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah pada Pemerintahan Desa	4.152.204.771,00	993.409.766,00	23,92	1.013.374.773,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah pada Pemerintahan Desa	1.252.899.586,00	936.899.102,00	74,78	454.303.474,00
	Jumlah	5.405.104.357,00	1.930.308.868,00	35,71	1.447.678.247,00

2. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi belanja Bantuan Keuangan tahun 2022 sebesar Rp156.773.184.449,00 atau 97,30% dari anggaran belanja Bantuan Keuangan Rp161.126.038.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2021 sebesar Rp159.823.282.919,00 terdapat penurunan realisasi belanja bantuan keuangan sebesar Rp3.050.098.470,00 atau 1,91% dari realisasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 49 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	161.126.038.500,00	156.773.184.449,00	97,30	158.823.282.919,00
	Jumlah	161.126.038.500,00	156.773.184.449,00	97,30	158.823.282.919,00

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 sebesar Rp156.773.184.449,00 terdiri dari:

Tabel 5. 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Desa	151.544.508.500,00	148.472.184.449,00	97,97
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Desa	9.581.500.000,00	8.301.000.000,00	86,64
	Jumlah	161.126.038.500,00	156.773.184.449,00	97,30

Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing nagari dapat dilihat pada **Lampiran 23**. Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

5.1.4. Surplus/(Defisit)

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

(5.055.254.483,12)

(5.579.091.916,96)

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami Defisit sebesar Rp5.055.254.483,12.

5.1.5. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

21.768.707.385,70

28.847.799.302,66

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp21.768.707.385,70 atau 100% dari anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp21.768.707.385,70. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp28.847.799.302,66 terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp7.079.091.916,96 atau 24,54%.

5.1.6. Pengeluaran Pembiayaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 merupakan Penyerahan modal ke PDAM sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 sama dengan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00.

5.1.7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	15.213.452.902,58	21.768.707.385,70

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 sebesar Rp15.213.452.902,58. Dibandingkan Tahun 2021 terjadi Penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp6.555.254.483,12 atau 30,11%. Rincian SILPA dapat diuraikan sebagai berikut.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
-Kas di Kas Daerah rek. 0100.0107.00208.5	496.522.396,09	7.031.584.618,49
-Kas di Bendahara Pengeluaran	18.646.167,00	46.182.820,00
-Kas di Bendahara Penerimaan	23.850.000,00	
-Utang PFK tahun berjalan	-252.000,00	- 2.505.000,00
-Utang PFK tahun 2018	0,00	
-Utang PFK tahun 2018	-1.805.099,00	- 1.805.099,00
-Silpa di BLUD RSUD	8.461.813.585,50	7.852.394.780,50
-Silpa di BLUD Puskesmas	6.032.834.378,95	5.825.595.206,71
-Silpa Dana BOS	181.813.475,00	1.010.742.016,00
-Koreksi silpa Puskesmas 2020		6.518.043,00
- Pembulatan angka Dinas Perhubungan	-0,34	0,00
-Pembulatan angka Dinas Koperasi, UMKM	-0,62	0,00
Jumlah	15.213.452.902,58	21.768.707.385,70

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SikPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA atau SikPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pemfokusan.

Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	21.768.707.385,70	28.847.799.302,66

Nilai SAL awal sebesar Rp21.768.707.385,70 merupakan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2021. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit Tahun 2022.

Saldo Anggaran Lebih Awal tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
-Kas Daerah rek. 0100.0101.00208.5	7.031.584.618,49	15.145.768.088,53
-Kas di Bendahara Pengeluaran	46.182.820,00	100.093.586,00
-Utang PTK tahun 2018	- 1.805.099,00	- 1.805.099,00
-Utang PTK tahun berjalan	- 2.505.000,00	- 30.073.511,00
-Kas di BLUD RSUD	7.852.394.780,50	4.065.373.463,50
-Kas di BLUD Puskesmas	5.825.595.206,71	5.033.046.604,63
-Kas Dana BOS	1.010.742.016,00	4.522.566.649,00
-Lebih setor pajak	0,00	12.829.521,00
-Koreksi SIPA Puskesmas 2020	6.518.043,00	0,00
Jumlah	21.768.707.385,70	28.847.799.302,66

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	21.768.707.385,70	28.847.799.302,66

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2022 adalah seluruh SAL akhir Tahun 2021. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp21.768.707.385,70.

5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA/SILPA)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	15.213.452.902,58	21.768.707.385,70

Sil.PA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai Sil.PA pada akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp15.213.452.902,58.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan selisih antara SILPA LRA dan SILPA Neraca TA 2022. Pada tahun 2022 tidak ada koreksi kesalahan pembukuan.

5.2.5 Saldó Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	15.213.452.902,58	21.768.707.385,70

SAL akhir merupakan akumulasi SILPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang berkenaan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp15.213.452.902,58.

Saldó Anggaran lebih akhir sebagai berikut.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
-Kas di Kas Daerah rek. 0100.0101.00208.5	496.522.396,00	7.031.584.618,49
-Kas di Bendahara Pengeluaran	18.646.167,00	46.182.820,00
-Kas di Bendahara Penerimaan	23.850.000,00	0,00
-Utang PFK tahun berjalan	-252.000,00	- 2.505.000,00
-Utang PFK tahun 2018	-1.805.099,00	- 1.805.099,00
-Silpa di BLUD RSUD	8.461.843.585,50	7.852.394.780,50
-Silpa di BLUD Puskesmas	6.032.834.378,95	5.825.595.206,71
-Silpa Dura BOS	181.813.475,00	1.010.742.016,00
-Koreksi silpa Puskesmas 2020		6.518.043,00
- Pembulatan angka Dinas	-0,34	0,00

Perhubungan		
-Pembulatan angka Dinas Koperasi, UMKM	-0,62	0,00
Jumlah	15.213.452.902,58	21.768.707.385,70

5.3. Neraca

Dalam penjelasan akun-akun neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca per 31 Desember 2022, adalah Aset Lancar, Investasi jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut.

5.3.1. Aset Lancar	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	48.485.243.952,37	58.285.854.424,47

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp48.485.243.952,37 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5. 51 Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Kas	15.215.681.606,54	21.773.189.088,70
2	Piutang	25.041.748.547,18	25.873.831.345,75
3	Penyisihan Piutang	(5.489.072.389,87)	(4.337.354.838,52)
4	Persediaan	13.716.886.188,62	14.979.038.828,53
	Jumlah	48.485.243.952,37	58.285.854.424,47

5.3.3. Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	15.215.681.606,54	21.773.189.088,70

Nilai saldo Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 15.215.681.606,54 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya, Rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 52 Rincian Kas

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	493.522.396,08	7.031.584.618,49
2	Kas di Bendahara Penerimaan	21.850.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	18.646.167,00	16.182.820,00

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4	Kas di Bendahara BLUD RSUD	9.461.843.535,50	7.852.394.780,60
5	Kas di Bendahara BLUD Pukesmas	6.032.834.378,95	5.832.113.249,71
6	Kas di Bendahara BOS	181.813.475,00	1.010.742.016,00
7	Kas Lainnya	171.604,00	171.604,00
	Jumlah	15.215.681.606,54	21.773.189.098,70

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bank Nagari Cabang Payakumbuh pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, tercatat:

PENCATATAN KUASA BUD

PENERIMAAN

1	Saldo bulan November (bulan lalu)	Rp.	121.726.960.520,13
2	Dana Transfer	Rp.	32.236.142.014,00
3	Hiban Pemerintah	Rp.	3.234.652.600,00
4	DBH Provinsi	Rp.	11.877.144.622,00
5	Penerimaan PAD	Rp.	7.801.507.480,98
	Jumlah	Rp.	176.876.417.637,09

PENGELUARAN

1	SP2D	Rp.	228.125.752.502,00
	Jumlah	Rp.	228.125.752.502,00
	Saldo menurut Kuasa BUD	Rp.	498.622.396,09

PENCATATAN BANK

PENERIMAAN

1	Saldo bulan lalu	Rp.	125.450.530.808,13
2	Penerimaan bulan Desember 2022	Rp.	<u>55.546.758.290,96</u>
	Jumlah	Rp.	180.997.289.097,09

PENGELUARAN

	Pengeluaran bulan Desember 2022	Rp.	<u>180.600.768.701,00</u>
	Saldo menurut Bank	Rp.	498.622.396,09

SELISIH

0,00

Berita acara rekonsiliasi antara BUD dengan Bank Nagari Cabang Payakumbuh terlampir pada **Lampiran 3** Laporan Keuangan ini.

a. Kas di Kasda	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	496.522.396,09	7.031.584.618,49

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp496.522.396,09 terdiri dari rekening:

Kas:	Tahun 2022	Tahun 2021
------	------------	------------

- 0100.0101.00208.5 Kas Daerah	496.522.396,09	7.031.584.618,49
- 0100.0101.00202.9 Penerimaan	0,00	0,00
- 0100.0101.00219.2 Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Kas	496.522.396,09	7.031.584.618,49

b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	18.646.167,00	46.182.820,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.646.167,00 dan 31 Desember 2021 sebesar 46.182.820,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.53 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Nama OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan		
	UYHD	0,00	43.677.820,00
	Utang PFK	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00
7	Dinas Pariwisata		
	UYHD	18.646.167,00	0,00
	Utang PFK	0,00	2.505.000,00
	Jumlah	0,00	0,00
	Jumlah		
	UYHD	18.646.167,00	43.677.820,00
	Utang PFK OPD	0,00	2.505.000,00
	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	18.646.167,00	46.182.820,00

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari UYHD dan Utang PFK. Utang PFK berupa pajak yang belum disetor per 31 Desember 2022. UYHD tahun 2022 telah disetor ke rekening Kas Penerimaan Daerah Nomor 0100.0101.00202.9 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	OPD	Jumlah setoran (Rp)	Tanggal bukti setoran
1	UYHD Dinas Pariwisata, Perindaba dan Olahraga		
	- Penyetoran sisa UP	18.646.167,00	5 Januari 2023
	Jumlah	18.646.167,00	

Rekap penyetoran UYHD Tahun 2022 terdapat pada Lampiran 4 laporan keuangan ini.

c. Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2022	Tahun 2021
---------------------------------------	-------------------	-------------------

(Rp)	(Rp)
23.850.000,00	0,00

Terdapat saldo kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.850.000,00 berupa retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

d. Kas di BLUD	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	14.494.677.964,45	13.684.508.030,21

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri dari saldo kas pada:

- BLUD RSUD Dr. Achmad Durwis sebesar Rp8.461.843.585,50
- BLUD Puskesmas sebesar Rp6.032.834.378,95

Kas di BLUD RSUD dr. Achmad Durwis per 31 Desember 2022 dan 2021 tersebut dapat terinci sebagai berikut.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
Kas di Bank Bend. Penerima (Bank Nagari Cabang Dangung-dangung) Rek 0104.0101.00002-3	5.759.000.128,33	6.737.684.086,33
- Kas Tunai Bend. Penerima	5.300.577,00	215.000,00
Kas di Bank Bend. Pengeluaran (Bank Nagari Cabang Dangung-dangung) Rek 0104.0101.00001-0	2.697.542.880,17	1.114.495.694,17
- Kas Tunai Bend. Pengeluaran BLUD	0,00	0,00
Jumlah	8.461.843.585,50	7.852.394.780,50

Laporan Keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Durwis terlampir pada Lampiran 7

Kas di BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 dapat terinci sebagai berikut.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
Kas di Bank Bendahara BLUD	6.016.530.928,95	5.823.026.539,71

- Kas Unai Hendahara B.L.L.D	16.303.450,00	9.086.910,00
Jumlah	6.832.834.378,95	5.832.113.249,71

e. Kas Dana BOS	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	181.813.475,00	1.010.742.016,00

Saldo kas dana BOS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp181.813.475,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55 Rincian Kas Dana BOS

Uraian Saldo BOS	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo Dana HOS SD	198.757.529,00	722.759.318,00
Saldo Dana BOS SMP	42.055.947,00	287.982.698,00
Jumlah	181.813.475,00	1.010.742.016,00

Laporan Penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana HOS ada pada Lampiran 6.

Dalam TA 2022 selain BOS Reguler beberapa sekolah juga mendapatkan Dana BOS Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, maka pada Bab I Kelentuan Umum Pasal 1 (satu) disebutkan bahwa:

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi adalah Program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja adalah Program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dinilai berkinerja baik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

Sekolah yang mendapatkan dana BOS Kinerja pada tahun 2022 antara lain:

Tabel 5.56 Sekolah Penerimaan Dana BOS Kinerja Tahun 2022

No.	UPTD	Status	Afirmasi/Kinerja	Jumlah	Keterangan
1	UPTD SDN 02 PAUH SANGIK	NEGERI	KINERJA	80.000.000	
2	UPTD SDN 02 SUJAYAN	NEGERI	KINERJA	80.000.000	
3	UPTD SDN 04 SUJAYAN	NEGERI	KINERJA	80.000.000	
4	UPTD SD NEGERI 05 SAMPAK LAWEH	NEGERI	KINERJA	45.000.000	SEKOLAH PENGGGERAK
5	UPTD SD NEGERI 06 KOTO LANGAH BATU HAMPA	NEGERI	KINERJA	45.000.000	SEKOLAH PENGGGERAK
6	UPTD SDN 02 KUBANG	NEGERI	KINERJA	80.000.000	
7	JPTD SDN 03 GUGUAK VIII KOTO	NEGERI	KINERJA	80.000.000	

No.	UPTD	Status	Afirmasi/Kinerja	Jumlah	Keterangan
8	UPTD SD NEGERI 04 SUNGAI TALANG	NEGERI	KINERJA	45.000.000	SEKOLAH PENGGERAK
9	UPTD SDN 07 KUBANG	NEGERI	KINERJA	60.000.000	
10	UPTD SD NEGERI 08 GUGUAK VIII KOTO	NEGERI	KINERJA	80.000.000	
11	UPTD SD NEGERI 08 KOTO TINGGI	NEGERI	KINERJA	60.000.000	
12	UPTD SD NEGERI 01 PILUBANG	NEGERI	KINERJA	60.000.000	
13	UPTD SD NEGERI 01 SARILAMAK	NEGERI	KINERJA	60.000.000	
14	UPTD SD NEGERI 02 TARAKTANG	NEGERI	KINERJA	45.000.000	SEKOLAH PENGGERAK
15	UPTD SD NEGERI 03 BATU BALANG	NEGERI	KINERJA	80.000.000	
16	UPTD SD NEGERI 04 SARILAMAK	NEGERI	KINERJA	45.000.000	SEKOLAH PENGGERAK
17	UPTD SD NEGERI 08 SARILAMAK	NEGERI	KINERJA	45.000.000	SEKOLAH PENGGERAK
18	UPTD SD NEGERI 03 LUBUK ALAI	NEGERI	KINERJA	60.000.000	
19	UPTD SD NEGERI 02 SUNGAI BERINGIN	NEGERI	KINERJA	45.000.000	SEKOLAH PENGGERAK
20	UPTD SD NEGERI 01 TUNGKAR	NEGERI	KINERJA	80.000.000	
21	UPTD SD NEGERI 01 ANDIANG	NEGERI	KINERJA	80.000.000	
22	UPTD SD NEGERI 07 ANINANG	NEGERI	KINERJA	80.000.000	
23	UPTD SD NEGERI 02 JOPANG MANGANTI	NEGERI	KINERJA	80.000.000	
24	UPTD SD NEGERI 05 GUNJANG MALINTANG	NEGERI	KINERJA	45.000.000	SEKOLAH PENGGERAK
25	UPTD SD NEGERI 01 PIQBANG	NEGERI	KINERJA	90.000.000	
26	UPTD SD NEGERI 02 KOTO TANJAH SIMAI ANGBANG	NEGERI	KINERJA	80.000.000	
27	UPTD SMP NEGERI 1 KEC. PAYAKUMBUH	NEGERI	KINERJA	70.000.000	SEKOLAH PENGGERAK
28	UPTD SMP NEGERI 1 KEC. LUAK	NEGERI	KINERJA	70.000.000	SEKOLAH PENGGERAK
29	UPTD SMPN 2 KEC. HARAU	NEGERI	KINERJA	120.000.000	
30	UPTD SMPN 1 KEC. GUGUAK	NEGERI	KINERJA	120.000.000	
31	UPTD SMPN 1 SULKI	NEGERI	KINERJA	120.000.000	
32	UPTD SMPN 1 PANGKALAN KOTO BARU	NEGERI	KINERJA	120.000.000	
Jumlah				2.420.000.000	

Realisasi pendapatan dan belanja BOS yang dibuatkan pengesahan SP2B nya adalah realisasi pendapatan dan belanja BOS sekolah negeri. Sedangkan untuk realisasi pendapatan dan belanja BOS sekolah swasta tidak dibuatkan pengesahannya.

Realisasi belanja BOS sekolah negeri tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 57 Realisasi Dana BOS Sekolah Negeri Tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	12.170.228.000,00	11.816.110.000,00	94,62	665.118.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	38.022.680.401,00	31.186.077.728,00	86,57	4.837.482.673,00
3	Belanja Modal	15.482.640.626,00	8.876.943.468,00	78,92	2.254.890.131,00
	- Belanja Modal Peralatan & Mesin	11.183.409.510,00	5.804.171.775,00	52,70	5.289.238.335,00
	- Belanja Modal Aset tetap Lainnya	4.299.231.016,00	3.061.772.293,00	71,88	1.217.458.723,00
	Jumlah	69.423.620.000,00	61.678.131.194,00	86,98	7.747.488.806,00

Rincian belanja BOS sekolah negeri yang disahkan oleh BPD selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

a. Realisasi SPB Sekolah Dasar (SD) Negeri

Tabel 5. 58 Realisasi SPB Sekolah Dasar Negeri Tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	SPB Semester I (Rp)	SPB Semester II (Rp)	Realisasi SPB (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	8.186.326.000,00	2.150.694.000,00	6.035.732.000,00	8.186.426.000,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	26.771.927.383,00	5.339.073.121,00	16.918.565.496,00	22.257.638.617,00	3.514.288.766,00
3	Belanja Modal	8.272.488.617,00	1.876.300.665,00	4.689.497.738,00	6.565.798.403,00	1.706.688.214,00
	- Belanja Modal Peralatan Mesin	5.591.704.766,00	1.384.135.295,00	3.159.308.563,00	4.544.033.858,00	1.027.670.897,00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.680.783.851,00	482.165.370,00	1.519.589.175,00	2.001.764.545,00	678.917.317,00
	Jumlah	42.230.740.000,00	9.365.967.786,00	27.643.795.234,00	37.009.763.020,00	5.220.976.980,00

b. Realisasi SPB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

Tabel 5. 59 Realisasi SPB Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	SPB Semester I (Rp)	SPB Semester II (Rp)	Realisasi SPB (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.883.800.000,00	834.940.000,00	2.493.844.000,00	3.328.784.000,00	665.116.000,00
2	Belanja barang dan Jasa	10.250.633.018,00	1.485.297.969,00	7.462.141.440,00	8.927.439.109,00	1.323.193.909,00
3	Belanja Modal	2.958.346.982,00	617.884.663,00	1.792.280.502,00	2.410.145.065,00	648.201.917,00
	- Belanja Modal Peralatan Mesin	1.039.897.828,00	372.919.353,00	967.217.964,00	1.330.137.317,00	9.760.511,00
	- Belanja Modal Aset tetap Lainnya	1.618.449.154,00	244.965.200,00	835.042.548,00	1.080.007.748,00	638.441.406,00

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	SPB Semester I (Rp)	SPB Semester II (Rp)	Realisasi SPB (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah	17.192.880.000,00	2.818.122.232,00	11.748.245.942,00	14.886.386.174,00	2.526.511.826,00

Rincian belanja BOS sekolah swasta selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.60 Belanja BOS swasta

NO	NAMA SEKOLAH	Belanja Pegawai	Barang dan Jasa	Modal Perlatan dan Mesin	Modal Aset tetap lainnya	JUMLAH
SMP						
1	SMP IT AN NAHL	0,00	138.053.890,00	10.717.000,00	20.509.500,00	169.280.390,00
2	SMP IT NUHRI II MI	0,00	257.568.020,00	109.871.500,00	28.082.055,00	395.521.575,00
3	SMP INSAN CENDIKIA HARALI	0,00	430.240.310,00	152.475.300,00	0,00	582.715.610,00
4	SMPS CAHAYA ISLAM 2	0,00	120.384.220,00	52.389.160,00	0,00	172.773.380,00
5	SMP MUHAMMADIYAH ANDALEH	0,00	50.919.754,00	5.424.500,00	681.000,00	67.025.254,00
6	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ALAM ISLAMI MUMTAZ (SAIM)	0,00	41.390.900,00	37.200.700,00	0,00	108.591.600,00
7	SMP QURANAL ZAMRIYAH IRS	0,00	51.563.500,00	2.950.000,00	0,00	54.513.500,00
8	SMPS YPI BALAJI RUPIT	0,00	65.768.200,00	8.138.000,00	6.500.000,00	80.406.200,00
9	SMP PLUS IBRAHIM KHALIDUN	0,00	32.588.500,00	7.435.000,00	0,00	40.023.500,00
10	SMPS IT FAJAR HIDAYAH	0,00	15.645.000,00	0,00	0,00	15.645.000,00
	JUMLAH	0,00	1.211.214.307,00	390.139.950,00	85.752.555,00	1.687.106.812,00
SD						
1	SD ISLAM AL KUTTAB	0,00	114.453.000,00	41.300.000,00	0,00	155.753.000,00
2	SDS IT AN NAHL	0,00	535.220.847,00	47.800.000,00	18.898.500,00	601.919.347,00
3	SDS MUHAMMADIYAH FULL DAY	0,00	456.458.373,00	32.407.875,00	0,00	488.866.248,00
4	SD IT AR RAHMAN	0,00	142.730.321,00	18.325.731,00	0,00	161.056.052,00
5	SEKOLAH DASAR SWASTA ALAM ISLAMI MUMTAZ	0,00	137.425.518,00	11.800.000,00	13.080.000,00	162.305.518,00
6	SD IT AR ROYYAN	0,00	23.211.450,00	5.190.000,00	0,00	28.401.450,00
7	SD ISLAM TERPADU PASTANUL ULUM	0,00	232.121.700,00	3.640.300,00	3.980.000,00	239.742.000,00
8	SD IT FAJAR HIDAYAH	0,00	9.711.000,00	0,00	2.188.701,00	11.899.701,00
	JML	0,00	1.581.311.009,00	164.363.606,00	38.168.201,00	1.783.790.816,00

C. Kas Lainnya

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

171.604,00

171.604,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp171.604,00 merupakan sisa dana bantuan Kemendikbud pada kegiatan pembinaan pengelolaan SMP Berprestasi di SMPN 1 Payakumbuh pada TA 2019.

5.5.1.2. Piutang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	25.041.748.547,18	25.873.981.345,76

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Piutang Pajak	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	11.093.167.587,00	9.479.323.034,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 merupakan tagihan pajak daerah yang sampai dengan tanggal neraca belum dilunasi/disetorkan Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah/Bendahara Penerimaan, terinci atas:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Piutang Pajak Restoran	18.005.800,00	18.005.800,00
- Piutang Pajak Reklame	5.500.000,00	5.500.000,00
- Piutang PBB-P2	11.058.474.487,00	9.455.817.234,00
- Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.187.300,00	0,00
Jumlah	11.093.167.587,00	9.479.323.034,00

Piutang Pajak Restoran sebesar Rp18.005.800,00 merupakan piutang pajak restoran sejak Tahun 2008 sebesar Rp18.005.800,00 yang timbul sebagai akibat dari penetapan masa yang dikeluarkan setiap bulannya pada tahun tersebut.

Piutang Pajak Reklame sebesar Rp5.500.000,00 merupakan piutang pajak reklame sampai dengan tahun 2021.

Piutang PBB-P2 merupakan Piutang PBB sampai dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang PBB Tahun 2014	540.694.895,00	556.014.681,00
- Piutang PBB Tahun 2015	737.457.152,00	742.205.031,00
- Piutang PBB Tahun 2016	664.289.411,00	668.631.544,00
- Piutang PBB Tahun 2017	655.673.698,00	679.997.234,00
- Piutang PBB Tahun 2018	1.262.229.779,00	1.282.133.161,00
- Piutang PBB Tahun 2019	1.701.199.985,00	1.741.430.925,00
- Piutang PBB Tahun 2020	1.916.624.308,00	1.939.221.740,00

- Piutang PBB Tahun 2021	1.803.443.220,00	1.846.182.918,00
- Piutang PBB Tahun 2022	1.776.862.039,00	0,00
Jumlah	11.058.474.487,00	9.455.817.234,00

5.3.1.2.2	Piutang Retribusi	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		7.620.000,00	8.613.000,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 merupakan tagihan retribusi daerah yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi ke Rekening Kas Daerah/Bendahara Penerimaan sampai dengan akhir tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut.

- Retr. Pelayanan Persampahan	7.620.000,00	8.613.000,00
- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
Jumlah	7.620.000,00	8.613.000,00

Piutang Retribusi Tahun 2022 tersebut terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp7.620.000,00 atas pelayanan pengambilan sampah masyarakat yang belum dibayarkan oleh pemilik rumah, rumah makan, toko, dan kios. Piutang tersebut merupakan Piutang 2012 dan 2013 yang belum dibayar sampai dengan Tahun 2022. Piutang Retribusi Pelayutan Persampahan pada TA 2022 masih menjadi target Anggaran Dinas Pekerjaan umum, dan pada TA 2023 menjadi target Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman.

5.3.1.2.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		25.228.607,00	61.244.857,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 terdiri atas:

- Piutang dividen Tahun 2013 BPR Kampung Baru Muara Paiti Kecamatan Kapur IX sebesar Rp2.070.000,00 atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang harusnya disetor ke Kas Daerah di 2014. Namun sesuai dengan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Nomor S-572/KO.52/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Informasi Kondisi BPR disampaikan bahwa PT BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti ditetapkan Bank dengan status Dalam Pengawasan Khusus (DPK).
- Piutang dividen BPR Harau per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.772.821,00 atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dividen tahun buku 2022 berdasarkan Laporan Keuangan Audited BPR Harau Tahun 2022.
- Piutang dividen BPR Tual Baruah per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.385.786,00 atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dividen tahun buku 2022 berdasarkan Laporan Keuangan Audited BPR Tual Baruah Tahun 2022.

5.3.1.2.4	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		4.294.090.175,18	3.899.610.211,76

Piutang tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2022, yang terinci atas:

Tabel 5. 61 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Uraian Piutang	Tahun 2022	Tahun 2021
- Piutang Kendaraan Roda Dua-Kedap	76.500.000,00	76.500.000,00
- Bunga Denda Bergulir	72.002.810,00	72.002.810,00
- Denda Dana Bergulir	14.194.048,76	14.194.048,76
- Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD	3.950.385.852,00	3.625.167.033,00
- Piutang Non Kapitasi BLUD-Puskesmas	180.558.300,00	111.756.520,00
Piutang lainnya	448.164,42	0,00
Jumlah	4.294.090.175,18	3.899.610.211,76

Piutang Kendaraan Roda Dua-Kedap sebesar Rp76.500.000,00 merupakan pemberian fasilitas cicilan kendaraan roda dua kepada beberapa kepala desa yang ada di 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 62 Rincian Piutang Kendaraan Roda Dua Kepala Desa

No.	Nama	Nama Nagari	Kecamatan	Piutang (Rp)
I. Yang Belum Dilunasi				
1	Inwardi	Terentang Lubuak Limpato	Harau	1.500.000,00
2	Scfinar	Halpi	Harau	1.500.000,00
3	Zulnuzidi	Ampek Suku	Situjuh Limo Nagari	1.500.000,00
4	Syahrial	Koto Tengah Kubo Laino	Kapur IX	1.600.000,00
5	Nizam Ramli	Batu Hampar	Akabiluru	1.900.000,00
Jumlah I				7.500.000,00
II. Belum Pernah Dibayar				
1	Tahauddin	Ti. Haro Sikabu-kabu	Luak	3.000.000,00
2	Daemor	Talago	Harau	3.000.000,00
3	Zalnal S	Ginung Sanggul	Harau	3.000.000,00
4	Zenrabul Fuad	Galam Nagari	Situjuh Limo Nagari	3.000.000,00
5	Gyamsir M	Alang Lareh Halaban	Lareh Sago Halaban	3.000.000,00
6	Al Husni Fuad	Bata Panjang Aleh	Lareh Sago Halaban	3.000.000,00
7	Azhar Harun	Pangkalan Utara	Pangkalan	3.000.000,00
8	Nasrul Salim	III Kubo Tanjung Pauh	Pangkalan	3.000.000,00

No.	Nama	Nama Nagari	Kecamatan	Piutang (Rp)
9	Ahkar Dt. Patucak	Pantai Cemran	Pangkalan	3.000.000,00
10	Shafnu.	Sungai Pimping	Pangkalan	3.000.000,00
11	Rusya.	Bukit Talau	Pangkalan	3.000.000,00
12	Effendi	Tanjung Medan	Pangkalan	3.000.000,00
13	H. Dt. Rajo M Dalulang	Kebu Tuo	Kapur IX	3.000.000,00
14	Dailami Khatib	Il Koto Gelugur	Kapur IX	3.000.000,00
15	Arius M	Lubuk Kato	Kapur IX	3.000.000,00
16	Sari Yuari	Sialang Ams	Kapur IX	3.000.000,00
17	Khaidir	Tanjung Bungo Lab	Kapur IX	3.000.000,00
18	K Dt. Rajo Mangkolang	Kayu Gadeng Galugur	Kapur IX	3.000.000,00
19	Sy. M. Kayo	Bonah Hongkek	Kapur IX	3.000.000,00
20	Makmun/Iman Tedi	Lubuk Alai	Kapur IX	3.000.000,00
21	Zulhamid	Nesan	Bukit Barisan	3.000.000,00
22	Yahudus	Paruso Mahat	Bukit Barisan	3.000.000,00
23	Sunarni Waman	Piladang	Akabiluru	3.000.000,00
Jumlah II				69.000.000,00
Total (I+II)				76.500.000,00

Piutang Bunga dan Denda Dana Bergulir per 31 Desember 2022 terdapat pada:

Tabel 5. 63 Piutang Bunga dan Denda Dana Bergulir

OPD	Bunga Dana Bergulir (Rp)	Denda Dana Bergulir (Rp)
- Dinas Koperasi, LMKM dan Perindag	39.264.470,00	9.396.068,76
- Dinas Peternakan dan Kewan	18.210.300,00	0,00
- Dinas Tanaman Pangan dan Holtik	14.528.340,00	4.837.980,00
Jumlah	72.002.810,00	14.194.048,76

Rincian perhitungan bunga dan denda dari Investasi Non Permanen Lainnya ini sebagaimana terlihat pada **Lampiran 12** Laporan Keuangan ini.

- Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2022 sebesar Rp3.950.385.852,00 yang terdiri dari Piutang Klaim Pelayanan BPJS, Piutang Pelayanan Ambulance, Piutang Obat dan Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 64 Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD dr. Achmad Darwis

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	KLAIM PELAYANAN RITL & RJTL BPJS 2021	3.711.599.600,00
	Klaim RJTL September s.dn 2022	386.000
	Klaim RITL September 2022	194.955.300

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Klaim RJTL November 2022	750.770,000
	Klaim RITL November 2022	998.267,700
	Klaim RITL Desember 2022	894.902,600
	klaim RJTL Desember 2022	675.675,600
	Klaim RJTL September sdn thp II 2022	183,000
	Klaim RJTL Oktober sdn 2022	183,000
	Klaim RITL Oktober sdn 2022	208.595,500
2	Klaim Obat Kronis	180.039.226,00
	Klaim Obat November 2021	180.039.226,00
3	Klaim Jampersai	23.720.800,00
	Klaim HIT: Agustus 2022	1.844,900
	Klaim Oktober RJTL 2022	128,300
	Klaim Oktober RITL 2022	3.075,400
	Klaim RJTL November 2022	499,600
	Klaim RITL November 2022	19.789,000
	Klaim RITL Desember 2022	3.403,700
4	Klaim Covid-19	18.291.000,00
	Klaim Desember 2022	18.291.000,00
5	Klaim Ambulance	2.890.000,00
	Klaim Desember 2022	2.890.000,00
6	Rawatan Umum	8.385.800,00
	By Marela	520.000,00
	Ident	940.000,00
	Sahmar	2.479.000,00
	Enri:	1.446.500,00
7	Pendapatan Hasil Kerja Sama	3.499.826,00
	Institusional Fee RS Bangkhang	2.400.000,00
	Fee Jasa Smart Hearing 2022	1.099.826,00
	Jumlah	3.950.385.852,00

Piutang Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2022 yang telah dilunasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.117.870.952,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 65 Rincian Piutang Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD dr. Achmad Darwis Yang Telah Dilunasi oleh BPJS

No.	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Tanggal Pembayaran
	KLAIM PELAYANAN RITL & RJTL BPJS 2021	1.934.331.800,00	
	Klaim RJTL September sdn 2022	195.326.400,00	05/01/2023

No.	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Tanggal Pembayaran
	Klaim RJTL November 2022	1.739.003,500	02/01/2023
2	Klaim Obat Kronis	180.039.226,00	
	Klaim Obat November 2021	180.039.226,00	02/01/2023
3	PENDAPATAN HASIL KERJASAMA	3.499.826,00	
	Inklusional Fee RS Bangkinang	2.400.000,00	05/01/2023
	Fee Jasa Smart Hearing 2022	1.099.826,00	04/01/2023
	Jumlah	2.117.870.952,00	

- Piutang Non Kapitasi BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 sebesar Rp180.559.300,00 merupakan piutang jasa layanan puskesmas yang terdapat pada beberapa BLUD Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 66 Rincian Piutang Non Kapitasi BLUD Tahun 2022

NO	KETERANGAN	PIUTANG			TOTAL PIUTANG
		Oktober	November	Desember	
1	PUSKESMAS TANJUNG PATI	0,00	6.730.000,00	7.110.000,00	13.840.000,00
2	PUSKESMAS KOTO BARU SIMALANGGANG	725.000,00	9.715.000,00	7.275.000,00	17.715.000,00
3	PUSKESMAS RIMBO DATA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
4	PUSKESMAS MAEK	0,00	0,00	10.485.000,00	10.485.000,00
5	PUSKESMAS SITUJUH	0,00	2.482.000,00	6.929.000,00	9.307.000,00
6	PUSKESMAS PANGKALAN	0,00	0,00	10.271.000,00	10.271.000,00
7	PUSKESMAS PANGUNG-DANGUNG	0,00	0,00	2.825.000,00	2.825.000,00
8	PUSKESMAS TARAM	0,00	0,00	7.845.000,00	7.845.000,00
9	PUSKESMAS PAKAN RABAA	0,00	7.655.000,00	7.975.000,00	15.230.000,00
10	PUSKESMAS HALABAN	0,00	3.497.100,00	0,00	3.497.100,00
11	PUSKESMAS BARUAH GUNUANG	0,00	135.000,00	5.610.000,00	5.745.000,00
12	PUSKESMAS MUNGKA	0,00	805.000,00	5.865.000,00	6.670.000,00
13	PUSKESMAS BATUHAMPAR	0,00	3.240.000,00	5.450.000,00	8.690.000,00
14	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00
15	PUSKESMAS PADANG KANDIS	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
16	PUSKESMAS MUARO PAITI	0,00	0,00	27.001.000,00	27.001.000,00
17	PUSKESMAS SULIKI	0,00	1.480.000,00	990.000,00	2.410.000,00
18	PUSKESMAS BANJA LOWEH	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
19	PUSKESMAS KOTO TINOGI	0,00	700.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
20	PUSKESMAS PILADANG	0,00	3.422.100,00	4.597.100,00	8.019.200,00
21	PUSKESMAS MUNGO	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
22	PUSKESMAS SIALANG	0,00	0,00	9.802.000,00	9.802.000,00
	TOTAL	725.000,00	44.161.200,00	135.673.100,00	180.559.300,00

Tidak terdapat piutang TPTGR tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Piutang TPTGR merupakan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlaknya (SKTJM) oleh Majelis TPTGR.

5.3.1.2.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		0,00	0,00

Piutang tersebut merupakan saldo Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.2.6	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		9.621.642.178,00	12.425.190.243,00

Besaran Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Pajak Provinsi ditetapkan dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/06/Pjk-Bapenda/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

Rincian piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5. 67 Rincian piutang Bagi Hasil Pajak

No.	Jenis Pajak	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	PKB	3.521.219.993,00	2.813.738.533,00
2	BBNKE	677.886.401,00	2.258.746.301,00
3	PBBKB	5.400.335.181,00	6.174.183.871,00
4	PAP	22.180.803,00	9.017.105,00
5	Pajak Rokok	0,00	2.171.523.433,00
	Jumlah	9.621.642.178,00	12.425.190.243,00

5.5.1.3.	Penyisihan Piutang Pendapatan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		(5.489.072.389,97)	(4.337.354.838,52)

Jumlah tersebut merupakan penyisihan piutang per 31 Desember 2022, penyisihan piutang tersebut dapat dirinci atas:

1	Penyisihan Piutang Pajak	(5.247.804.560,70)	(4.982.868.587,49)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(7.620.000,00)	(8.613.000,00)

3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	(2.185.793,04)	(2.365.874,28)
4	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAJ Yang Sah	(183.351.584,52)	(181.381.425,53)
5	Penyisihan Piutang Transfer pemerintah pusat /dana perimbangan	(0,00)	(0,00)
6	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	(48.110.451,71)	(62.125.951,22)
Jumlah		(5.489.072.389,97)	(4.337.354.838,52)

Rincian perhitungan penyisihan piutang tersebut sebagaimana terlihat pada Lampiran 8 Laporan Keuangan ini.

5.5.1.4. Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	13.716.886.188,62	14.976.038.828,53

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Tabel 5. 68 Saldo Persediaan per 31 Desember 2022

No	Nama Barang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	ATK, Barang Cetak	920.293.876,50	1.219.593.330,00
2.	Obat-Obatan	8.045.758.411,72	7.658.300.378,50
3.	Bahan Kimia	51.517.856,45	15.548.938,00
4.	Alat Listrik	314.611.906,00	112.598.302,00
5.	Alat Kebersihan	100.271.780,00	83.863.489,00
6.	Alat Kesehatan	79.931.352,00	1.174.000,00
7.	Alat Labor	135.304.254,31	345.849.904,00
8.	Alat Kedokteran	1.098.124.375,44	1.600.736.158,04
9.	Bahan Gizi	0,00	0,00
9.	Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi	0,00	95.855.604,00
10.	Lain Lain	2.871.075.377,20	3.847.518.726,99
Jumlah		13.716.886.188,62	14.976.038.828,53

Rekapitulasi persediaan per OPD sebagaimana terlihat pada Lampiran 9 Laporan Keuangan Daerah ini.

Persediaan obat-obatan senilai Rp8.045.758.411,72 yang terdapat pada 4 (empat) OPD sebagaimana terlihat pada Lampiran 10 Laporan Keuangan ini.

Persediaan lain-lain tahun 2022 terdapat pada 11 (sebelas) OPD dengan rincian sebagai berikut.

1	DINAS KESEHATAN	476.491.859,72
	PMT	324.440.884,30
	BARANG LOGISTIK KANTOR	

	PERSEDIAAN DARI ST I	69.584.236,42
		82.358.939,00
2	RSUD dr. ACHMAD DARWIS	40.328.724,48
	Persediaan Oksigen	1.950.000,00
	Persediaan BBM Cueraeionta Kantor	8.250.000,00
	Persediaan Bahan Gizi Bahan Buku	9.123.898,48
	Persediaan Rumah Tangga	4.007.003,00
	Hibah Kementerian Untuk Transfusi Darah	17.387.835,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	171.528.500,00
	Kupon BEM Operasional Persampahan	71.500.000,00
	Karcis Retribusi Persampahan 3.000	9.008.000,00
	Karcis Retribusi Persampahan 7.500	9.022.500,00
	Karcis Retribusi Persampahan 15.000	12.800.000,00
	Karcis Retribusi Persampahan 30.000	12.000.000,00
	Karcis Retribusi Persampahan 50.000	48.300.000,00
	Karcis Retribusi Persampahan 75.000	7.800.000,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	188.880.000,00
	SKRD	4.350.000,00
	Smart Card	152.500.000,00
6	DINAS PERIKANAN	164.483.050,00
	HENIH IKAN	1.862.500,00
	PAKAN IKAN	162.620.550,00
8	DINAS TANPAHORTIBUN	23.881.800,00
	Bibit Tanaman Hortikultura	23.881.800,00
7	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	40.277.500,00
	BIBIT TERNAK	38.335.000,00
	PERALATAN DOKTER H PAKAI HABIS	1.730.000,00
	PAKAN TERNAK	2.212.500,00
8	DINAS PANGAN	1.322.138.807,00
9	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	668.155.136,00
10	SEKRETARIAT DAERAH	12.870.800,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN AN PENCATATAN SIPIL	4.400.000,00
	TOTAL PERSEDIAAN LAIN-LAIN	2.971.075.377,20

Persediaan Lain-lain senilai Rp2.971.075.377,20 yang terdapat pada 11 (sebelas) OPD sebagaimana terlihat pada Lampiran 11 Laporan Keuangan ini.

Berdasarkan hasil *stock opname* persediaan pada beberapa OPD terdapat persediaan yang telah kedaluwarsa pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

1. RSUD dr. Achmad Darwis

Berdasarkan hasil *stock opname* obat dan BMHP pada Instalasi Farmasi RSUD dr. Achmad Darwis maka dilaporkan obat dan BMHP yang kedaluwarsa selama Tahun 2022 adalah senilai Rp15.442.213,78 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Obat Kedaluwarsa RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2022

No	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA BAHAN	TOTAL
1	Amiodaron tablet	tablet	90	933,88	84.029,40
2	Amikasin inj	ampul	1	32.285,00	32.285,00
3	Atracur	pkls	2	129.000,00	258.000,00
4	ATS injeksi	ampul	18	130.999,00	2.357.982,00
5	Barium SO4	botol	1	693.000,00	693.000,00
6	Clozapin 25 mg	tablet	50	473,00	23.650,00
7	dopamed 250	tablet	146	1.014,00	147.054,00
8	Dopamin injeksi	ampul	5	3.387,00	16.935,00
9	Epanopin inj	ampul	23	1.599,99	36.689,77
10	Erytromisin tablet 500	tablet	356	785,00	279.460,00
11	ETT no 4	pkls	3	17.858,00	53.574,00
12	ETT no 5,5 curved	pkls	7	19.960,00	139.850,00
13	ETT Non Kinking no 6	pkls	3	19.570,00	58.710,00
14	ETT Non Kinking no 6,5	pkls	4	19.570,00	78.280,00
15	ETT Non Kinking no 7,5	pkls	1	137.000,00	411.000,00
16	Fasorbid injeksi	vial	14	23.474,00	328.636,00
17	Favipiravir Hibah DINKES PROP.	tablet	1203	0,00	0,00
18	Fte peali 500 scgkiga	pkls	4	44.745,00	178.980,00
19	Fluconazol infus	botol	3	18.358,00	55.074,00
20	Foli caeter no 10	pkls	22	53.762,50	1.182.775,00
21	Foli caeter no 14	pkls	5	16.600,00	82.500,00
22	Foli caeter no 8	pkls	6	53.762,50	322.575,00
23	Foli caeter inj way no 24	pkls	18	62.597,00	1.113.562,00
24	Gudel no 00	pkls	15	16.983,00	254.745,00
25	Gudel no 1	pkls	17	18.968,00	322.458,00
26	Gudel no 2	pkls	2	18.968,00	37.936,00
27	Gysoone 6 inc	pkls	7	28.800,00	202.300,00
28	Ketokonazol tablet	tablet	682	278,00	189.596,00
29	Levofloksasin 750 mg DINKES	tablet	204	0,00	0,00
30	Lithum tablet (Pitmania)	tablet	100	1.056,00	105.600,00
31	LMA 2	pkls	8	50.189,00	401.512,00
32	Lidocain injeksi	ampul	8	12.523,40	100.187,20
33	Mask Anestesi 2	pkls	4	32.857,00	131.428,00
34	Mask anestesi 5	pkls	15	32.857,00	492.855,00
35	Mask Anestesi no 1	pkls	5	32.857,00	164.285,00
36	Mask Anestesi no 4	pkls	15	32.857,00	492.855,00
37	Masker anestesi 3	pkls	8	32.857,00	262.856,00
38	Megotrin tablet	tablet	260	368,50	97.125,00
39	MgSO4 injeksi 40 %	botol	53	4.280,00	227.370,00
40	Nepitgrin	ampul	5	7.113,00	35.565,00
41	NGT 3,5	pkls	17	5.942,00	101.014,00
42	Novorapid Injeksi	vial	1	144.782,00	144.782,00
43	Nystatin tablet vagina	tablet	348	580,00	227.740,00
44	Ofloxacin 400 mg	tablet	43	567,00	24.381,00
45	Pamid suppos 250	supp	3	20.900,00	62.700,00

No	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
46	Poli cateter try way no 22	piece	13	73.260,00	952.390,00
47	Poli vac set no 12	piece	8	88.600,00	708.800,00
48	Poli vac set No 14	piece	5	95.194,00	475.970,00
49	Prednison tablet 5 mg	tablet	1027	77,00	79.079,00
50	Remdesivir Hibah DINKES PROP	ampu	1	0,00	0,00
51	Rifampisin 450 mg	tablet	359	962,98	345.713,41
52	Silk 3% Bulat	piece	5	44.444,00	222.220,00
53	Slang suction no 6	piece	17	6.600,00	112.200,00
54	Stesolid R 5 mg	Tube	5	26.135,00	130.680,00
55	Zinkum syrup	botol	6	3.654,00	21.924,00
JUMLAH					18.442.213,78

2. Dinas Kesehatan

Stock opname pada Dinas Kesehatan ditemukan obat-obatan yang telah kedaluwarsa selama tahun 2022 yang tersedar di instalasi farmasi dan beberapa (IPFD Puskesmas sebesar Rp185.356.423,00. Pada beberapa UPTD Puskesmas terdapat obat-obatan kedaluwarsa yang tidak diketahui berapa nilainya karena obat-obatan tersebut merupakan hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang hanya dicantumkan jumlah kuantitas dari obat-obatan tersebut. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5. 70 Rincian Nilai Obat Kedaluwarsa Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	NAMA	HARGA
1	Diazepam injeksi	Rp 218.840,00
2	Phenobarbita injeksi	Rp 40.085,00
3	Klorpromazin tablet	Rp 8.382.000,00
4	Klorpromazin injeksi	Rp 1.008.368,00
5	Mg So4 20%	Rp 2.489.200,00
6	Mg so4 40 %	Rp 6.547.000,00
7	Mg So4 20%	Rp 33.800,00
8	Reagen TB	Rp 4.180.000,00
9	Hakpendol 5 mg	Rp 250.000,00
10	Carbamazepin tab	Rp 4.520.000,00
11	Etenbutol	Rp 1.319.500,00
12	Haidul 5 mg balu	Rp 825.000,00
13	Vit A 200.000 IU	Rp 12.800.000,00
14	Hakpendol 5 mg	Rp 31.500,00
15	RPR Siphilis	Rp 320.000,00
16	Frainersidion Inj	Rp 2.977.590,00
17	Tetraaklin 500 mg	Rp 1.695.000,00
18	Megotim Inj	Rp 433.840,00
19	DHP Final	Rp 36.000,00
20	Semen Seng Fosfat	Rp 2.475.000,00
21	PZA tab	Rp 34.414,00
22	Reagen TB	Rp 1.512.500,00
23	Omeprazol kapsul	Rp 66.770,00
24	MgSO4 40%	Rp 188.150,00
25	Ciprofloxacin tab	Rp 660.000,00
26	Ca Clukoness Inj	Rp 726.715,00
27	Gentamisin Inj	Rp 151.800,00
28	Metaklopramid tablet	Rp 617.100,00
29	SAR	Rp 9.500.000,00
30	Hexagon Siphilis	Rp 14.280.000,00
31	Larutan Eosin	Rp 7.486.450,00
32	Larutan Turk	Rp 52.000,00
33	Larutan Na Stren	Rp 838.000,00
34	Larutan Ammonium Oksalat	Rp 1.190.000,00
35	Larutan Hgrem	Rp 420.000,00

NO	NAMA	HARGA
36	Larutan Giemsa	Rp 4.500.000,00
37	Larutan Asam Sulfosalisilat	Rp 512.500,00
38	Larutan Carbo Fuschin	Rp 2.352.000,00
39	Larutan Xygl	Rp 3.056.000,00
40	Larutan Bermedid	Rp 1.173.000,00
41	Larutan Oil Imersi	Rp 9.900.000,00
42	Larutan Irgal	Rp 418.000,00
43	Larutan Metilen Blue	Rp 3.332.000,00
44	Larutan Etanol Asam	Rp 2.794.000,00
45	Mineral mix	Rp 895.200,00
46	Phenobarbital Injeksi	Rp 43.500,00
47	Diazepam rectal 10 mg	Rp 115.158,00
48	Tabung Koper	Rp 300.000,00
49	Endotracheal tube 3.5	Rp 968.325,00
50	Combivent	Rp 1.251.250,00
51	Lamprene	Rp 1.294.000,00
52	Erythromycin 250 mg	Rp 57.600,00
53	Acetosal 80 mg	Rp 745.600,00
54	Aminophyllin tab	Rp 2.731.000,00
55	Furosemid injeksi	Rp 3.999,00
56	Tetracyclin 500 mg tab	Rp 925.100,00
57	Ginsengwan 125 mg tab	Rp 4.315.200,00
58	Endotracheal tube 4	Rp 868.326,00
59	Endotracheal tube 3	Rp 858.215,00
60	Aminophyllin injeksi	Rp 235.500,00
61	Digoksin tab	Rp 315.000,00
62	Combivent	Rp 5.184.000,00
63	Zinc Symp	Rp 218.948,00
64	Glucose test strips	Rp 350.900,00
65	Glibenclamide tab	Rp 7.424.000,00
66	Simvastatin 10 mg	Rp 2.859.888,00
67	Glibenclamide tab	Rp 3.857.855,00
68	Kloramphenikol TM	Rp 303.800,00
69	Oxytetra sm	Rp 135.200,00
70	Diazepam injeksi 5 mg	Rp 955.500,00
71	Diagnostik HIV 3/ Reagen HIV 3	Rp 79.728,00
72	Diagnostik HIV IV Reagen HIV 2	Rp 182.778,00
73	VTM	Rp 19.740.000,00
74	Kondorr	Rp 361.000,00
75	Aminophyllin injeksi	Rp 103.400,00
76	Domperidon suspensi	Rp 274.100,00
77	Kloramphenikol Suspensi	Rp 518.800,00
78	Vaksin MR	Rp 1.334.720,00
79	Vaksin Td	Rp 3.899.850,00
80	Vaksin HBs dewasa	Rp 208.208,00
81	Tabung sampel darah	Rp 838.668,00
	Jumlah	Rp 186.388.423,00

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
54.964.272.291,19	55.190.859.370,77

Investasi Jangka Panjang tahun 2022 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut.

**5.3.2.1 Investasi Non
Permanen Bersih**

**Tahun 2022
(Rp)
461.937.888,00**

**Tahun 2021
(Rp)
461.937.888,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2022. Investasi dimaksud berupa penyaluran Dana Bergulir kepada sekelompok masyarakat, unit usaha kecil dan menengah. Penerima berkewajiban mengembalikan dana tersebut ke instansi teknis pengelola, guna digulirkan kembali ke masyarakat atau kelompok lainnya yang memerlukan. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir tersebut masih merupakan Investasi Non Permanen-Dana Bergulir lama yang dikelola oleh tiga OPD dan belum dalam bentuk BLU.

Nilai Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir tersebut disajikan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 07 Akuntansi Dana bergulir, dimana nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang dicatat di nemca menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Telah dilakukan penyisihan terhadap Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang tidak tertagih berdasarkan jatuh temponya (*aging schedule*). Hal ini diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun nilai bersih Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh tiga OPD tersebut untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 71 Nilai Bersih Investasi Non Permanen Dana Bergulir

No.	OPD Pengelola	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		
a.	Investasi Non Permanen Lainnya	256.000.000,00	256.000.000,00
b.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-110.228.190,00	-110.228.190,00
c.	Investasi Non Permanen Bersih	145.771.810,00	145.771.810,00
2	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		
a.	Investasi Non Permanen Lainnya	388.196.328,00	388.196.328,00
b.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-133.525.250,00	-133.525.250,00
c.	Investasi Non Permanen Bersih	254.671.078,00	254.671.078,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
a.	Investasi Non Permanen Lainnya	116.000.000,00	116.000.000,00
b.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-54.505.000,00	-54.505.000,00
c.	Investasi Non Permanen Bersih	61.495.000,00	61.495.000,00
Jumlah Kabupaten Lima Puluh Kota			
a.	Investasi Non Permanen Lainnya	760.196.328,00	760.196.328,00
b.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-298.258.440,00	-298.258.440,00

No.	OPD Pengelola	2022 (Rp)	2021 (Rp)
c	Investasi Non Permanen Bersih	481.937.888,00	481.937.888,00

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, maka penyisihan investasi non permanen lainnya dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir di awal sejak jatuh tempo.

Saldo dana pada rekening penampung pengembalian pokok, bunga dan denda disimpan oleh Pengelola Investasi Non Permanen lainnya dari 3 OPD Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.912.967.690,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72 Rincian Saldo Dana Pada Rekening Pengembalian Pokok, Bunga dan Denda Tahun 2022

No.	OPD Pengelola	Nomor Rekening di Bank Negeri	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Koperasi,UMKJA dan Perindag	0100.0207.05310-1	238.224.328,00	236.962.657,00
2	Dinas Tanaman Pangan			
	- Eks Tanaman Pangan	0100.0207.18857-1	1.477.627.427,00	1.428.411.849,00
	- Eks Perkebunan untuk pengembalian pokok	0100.0207.03451-8	7.652.259,00	7.624.581,00
	- Eks Perkebunan untuk pengembalian bunga	0100.0207.03449-1	114.378.778,00	113.357.962,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
	- Pokok RRMC	0100.0207.01387-4	10.977.532,00	11.007.038,00
	- Pokok KSP	0100.0210.01672-6	63.388.461,00	62.975.874,00
	- Bunga KSP	0100.0210.01673-8	0	0
	Jumlah		1.813.148.085,00	1.860.339.741,00

Dana Bergulir pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersumber dari Dana APBN dan Dana APBD. Dana Bergulir yang bersumber dari dana APBN diperoleh Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp6.692.660.725,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

1. Pemberdayaan kelembagaan pangan di pedesaan Tahun 2001 dengan jumlah dana sebesar Rp1.350.000.000,00;
2. Rice Milling Unit (PMU) Tahun 2002 dengan jumlah dana sebesar Rp123.500.000,00;
3. Peningkatan mutu intensitas padi Tahun 2002 s.d. 2006 dengan jumlah dana sebesar Rp1.894.550.000,00;
4. Pengembangan Agribisnis Jagung Tahun 2002 s.d. 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp189.219.350,00;
5. Pengembangan Agribisnis Manggis Tahun 2002 s.d. 2006 dengan jumlah dana sebesar Rp1.136.762.500,00;
6. Pengembangan dan Perluasan Jemik Tahun 2006 s.d. 2007 dengan jumlah dana sebesar Rp639.512.925,00;
7. Pengembangan Sayur Organik dan Hortikultura Terintegrasi Ternak Tahun 2007 dengan jumlah dana sebesar Rp135.300.000,00;

8. Konservasi Lahan Tahun 2007 dengan jumlah dana sebesar Rp124.979.750,00;
9. Peminaan dan Keselamatan Masyarakat Tahun 2002 s.d. 2006 dengan jumlah dana sebesar Rp404.500.000,00;
10. P2TP (Kredit Mikro) Tahun 2001 dengan jumlah dana sebesar Rp15.000.000,00;
11. Penunjang SPL OCEF Tahun 2002 dengan jumlah dana sebesar Rp39.576.200,00; dan
12. Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun 2008 dengan jumlah dana sebesar Rp269.960.000,00

Seluruh dana awal tersebut dan gulirannya disatukan menjadi Dana *Revolving* yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mulai Tahun 2004 s.d. Tahun 2018. Mulai Tahun 2019 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tidak menggulirkan lagi dana *revolving* dan hanya menerima seloran pinjaman dari yang belum lunas dengan jumlah pengembalian sebesar ± Rp615.000.000,00 dari Januari 2019 s.d. Desember 2020 yang disetor langsung ke rekening Bendahara *Revolving*. Jumlah dana yang tersedia di rekening sampai keadaan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.479.627.753,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

Dana bergulir pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota digulirkan dari tahun 2002 s/d 2008 dengan debitur kelompok dan perorangan dengan jumlah total dana awal sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Seiring berjalannya waktu pembayaran debitur, mulai terjadi penunggakan pengembalian dana.

Dana bergulir yang direalisasikan pada tahun 2003, 2007, dan 2008 yaitu diperuntukkan untuk menunjang/penguatan modal usaha bagi peternak ayam huras dan ras dengan dana yang diterima sebanyak Rp5.000.000,00/orang dengan perguliran 1 (pertama) Tahun 2003 sebanyak Rp65.000.000,00. Pada Tahun 2007 digulirkan lagi sebanyak Rp30.000.000,00 dan tahun 2008 sebanyak Rp25.000.000,00. Jadi yang digulirkan kepada masyarakat/perorangan sebanyak Rp115.000.000,00 dengan modal awal Rp65.000.000,00 (tahun 2007 dan 2008 yang hasil perguliran). Selanjutnya setelah berjalannya kegiatan dana bergulir ini dengan berbagai kendala mengalami peminggakan.

Dari hasil monitoring dan evaluasi, penugilan kredit tidak dapat dilakukan karena:

1. Terjadinya wabah penyakit ayam, menyebabkan ayam banyak mati;
2. Pindahnya debitur ke tempat lain berdasarkan keterangan Wali Nagari; dan
3. Debitur menyatakan tidak sanggup lagi membayar dana bergulir dengan alasan masyarakat ekonomi lemah (Keterangan Wali Nagari).

Dana bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berasal dari guliran dana APBD Tahun 2003 sebanyak Rp106.000.000,00 untuk 3 (tiga) koperasi sebagai berikut.

Tabel 5. 73 Penerima Dana Bergilir Tahun 2003

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
1	KULI TAHAM	53.000.000,00
2	KUD SEMANGAT BARU	26.500.000,00
3	KOPIINKRA BERKAH	26.500.000,00
Jumlah		106.000.000,00

Tahun 2004 terdapat lagi guliran sebesar Rp150.000.000,00 untuk 3 (tiga) koperasi dan 5 (lima) pengusaha kecil sebagai berikut.

Tabel 5. 74 Penerima Dana Bergilir Tahun 2004

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
1	KSU DALAI TALANG	40.000.000,00
2	KSU RINA AL FALAH	40.000.000,00
3	KSU PKK KOTO TINGGI	40.000.000,00
4	PENGUSAHA KECIL PERINGIN PROJECT	6.000.000,00
5	PENGUSAHA KECIL PATOGA KERAMIK	6.000.000,00
6	PENGUSAHA KECIL BORDIR MUTIARA	6.000.000,00
7	PENGUSAHA KECIL 4 BERSAUDARA	6.000.000,00
8	PENGUSAHA KECIL KARYA BERKAH	6.000.000,00
Jumlah		150.000.000,00

Dari penerimaan angsuran pokok dana tersebut di atas Tahun 2003 dan 2004 digulirkan kembali Tahun 2006 sebesar Rp75.000.000,00 untuk 15 (lima belas) pengusaha kecil dengan rincian:

Tabel 5. 75 Penerima Dana Bergilir Tahun 2006

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
1	PENGUSAHA KECIL MUTIA	5.000.000,00
2	PENGUSAHA KECIL RINI ANI MAKMUR	5.000.000,00
3	PENGUSAHA KECIL STAR MOTOR SPORT	5.000.000,00
4	PENGUSAHA KECIL PUTRA BUNGSU	5.000.000,00
5	PENGUSAHA KECIL FAIZAH COLLECTION	5.000.000,00
6	PENGUSAHA KECIL IKHTIA	5.000.000,00
7	PENGUSAHA KECIL LADIES KONVAKSI	5.000.000,00
8	PENGUSAHA KECIL BUNGA TANJUNG	5.000.000,00
9	PENGUSAHA KECIL RFMANTA	5.000.000,00
10	PENGUSAHA KECIL GODEFA	5.000.000,00
11	PENGUSAHA KECIL CIPTA	5.000.000,00
12	PENGUSAHA KECIL EVI	5.000.000,00
13	PENGUSAHA KECIL KARYA BERSAMA	5.000.000,00
14	PENGUSAHA KECIL MITRA KARYA SEJATI	5.000.000,00
15	PENGUSAHA KECIL MILKMAN TAILOR	5.000.000,00
Jumlah		75.000.000,00

5.3.2.2	Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		54.502.334.403,19	54.728.921.482,77

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan per 31 Desember 2022. Investasi jangka Panjang sejumlah tersebut ditempatkan pada satu perusahaan daerah yang hak kepemilikannya berada pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada perusahaan lembaga keuangan dengan hak kepemilikan minoritas dan tidak memiliki kendali signifikan atas manajemen serta pada PT Balastrung Citrajaya Sumbang. Jumlah penyertaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada masing-masing Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 76 Rincian Investasi Permanen

No.	Jenis Penyertaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota	29.462.684.403,19	29.689.271.482,77
2	PT Bank Nagari	23.584.000.000,00	23.584.000.000,00
3	Bank Perkreditan Rakyat (BPRK)	455.650.000,00	455.650.000,00
4	PI Balastrung Citrajaya Sumbang	1.300.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	54.502.334.403,19	54.728.921.482,77

5.3.2.2.1	PDAM	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		29.462.684.403,19	29.689.271.482,77

Nilai penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 setelah diakumulasikan dengan kerugian sebesar Rp29.462.684.403,19 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

1. Rincian Perhitungan Kepemilikan Modal sebelum memperhitungkan laba/rugi PDAM

Tabel 5. 77 Rincian Kepemilikan Modal PDAM Sebelum Rugi/Laba

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Penyertaan Pemerintah Pusat	35.875.336.144,00	35.875.336.144,00
2	Penyertaan Pemerintah Daerah (Pemda)	53.206.604.950,00	51.706.604.950,00
3	Penyertaan Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan statusnya	1.975.884.400,00	1.975.884.400,00
4	Hibah	198.000.000,00	198.000.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal	71.255.525.494,00	69.755.525.494,00

2. Berdasarkan informasi Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, didapatkan informasi bahwa:

a. Akumulasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 2022	29.702.794.593,00
b. Rugi Tahun Berjalan 2022	2.095.617.229,00
Jumlah Akumulasi kerugian	31.798.411.822,00

Berdasarkan data nilai penyertaan modal Pemda dan nilai kerugian PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota serta persentase saham Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota, maka nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 berdasarkan metode ekuiras adalah sebagai berikut.

- Persentase modal neto (Penyertaan Modal Pemda per total Penyertaan modal PDAM x 100 %)	74,67%
- Modal Neto (Total Modal - Akumulasi Kerugian)	39.457.113.672,00
- Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota (% Modal Neto x Modal Neto)	29.462.684.403,19
Nilai Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota ke PDAM per 31 Desember 2022	29.462.684.403,19

Sehingga terdapat penurunan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada PDAM Tahun 2022 sebesar Rp226.586.999,58 (Rp29.462.684.403,19 - Rp29.689.271.482,77).

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk PDAM sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan bukti pengeluaran SP2D Nomor 00754/SP2124.S/H/2022 tanggal 3 Juni 2022.

Laporan Keuangan PDAM tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran 13 Laporan Keuangan Daerah ini.

5.3.2.2.2	PT Bank Nagari	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		23.584.000.000,00	23.584.000.000,00

Nilai Penyertaan modal pada Bank Nagari Sumatera Barat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.584.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 78 Nilai Penyertaan Modal Bank Nagari

No.	Penyertaan Modal PT Bank Nagari	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Modal ditempatkan dan disetor penuh (15.225 lembar saham seri A @ Rp1.000.000,00)	15.225.000.000,00	15.225.000.000,00
2	Tambahan modal disetor s.d 31 Desember 2017	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

No.	Penyertaan Modal PT Bank Nagari	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3	Tambah Modal dealer s.d 31 Desember 2019	8.359.000.000,00	8.359.000.000,00
	Jumlah	23.584.000.000,00	23.584.000.000,00

Penyertaan Modal pada Bank Nagari Sumatera Barat tersebut telah memberikan kontribusi dalam bentuk setoran laba/dividen tunai sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada Tahun 2022 berjumlah Rp3.929.909.628,00 yang merupakan penerimaan dividen tahun buku 2021 yang diterima pada Kas Daerah tanggal 28 April 2022.

5.3.2.2.3	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		455.650.000,00	455.650.000,00

Jumlah tersebut merupakan Investasi jangka Panjang yang ditempatkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada enam Bank Perkreditan Rakyat berupa Penyertaan dalam Modal Saham per 31 Desember 2022. Penyertaan modal tersebut disalurkan pada TA 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 925/BLK-2003 tanggal 30 Desember 2003. Rincian penyaluran dana dan besarnya persentase penyertaan adalah sebagai berikut.

	Jumlah Penyertaan Modal	Total Saham BPR	% Kepemi- likan
- BPR Suliki Gunung Mas	110.000.000,00	5.000.000.000,00	2,00
- BPR Ilirau	75.000.000,00	6.400.000.000,00	1,17
- BPR Padang Kuning	50.000.000,00	1.338.260.000,00	3,74
- BPR Lahub Gunung	50.000.000,00	1.764.310.000,00	2,83
- BPR Taeh Barab	80.650.000,00	5.005.780.000,00	1,61
- BPR Tambun Ijuk	100.000.000,00	1.950.000.000,00	5,13
Jumlah	455.650.000,00		

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPD dulunya ada pada 7 (tujuh) DPR dan sekarang pada 6 (enam) BPR, karena Penyertaan Modal pada BPR Kampung Baru dipindahkan ke Aset Lainnya. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada BPR Kampung Baru sebesar Rp100.000.000,00. Sesuai dengan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Nomor S-572/KO.52/2014 tanggal 18 November 2014 menginformasikan bahwa PT BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti ditetapkan Dalam status Pengawasan Khusus (DPK), dan pada Website

LPS.DPR LPN Kampung Baru Muaro Paici telah dinyatakan berstatus Dalam Liquidasi (DL) pada tanggal 2 Maret 2015, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/KDJK.03/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Peucabutan Izin Usaha BPR LPN Kampung Haru Muara Paici

Penyertaan Modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat tersebut telah memberikan kontribusi dalam bentuk setoran laba/dividen tunai sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada Tahun 2022, jumlah dividen yang diterima senilai Rp29.360.601,00.

Penerimaan Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, hanya diperoleh dari:

BPR Taeh Barah	12.290.000,00	diterima tanggal: 10/03/2022
BPR Ilirau	15.000.601,00	diterima tanggal: 09/03/2022
BPR Suliki Gunung Mas	2.070.000,00	diterima tanggal: 08/04/2022
Jumlah Rp	29.360.601,00	

Perkait dengan kecilnya dividen yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari BPR, hal ini disebabkan lunngan distribusi laba dalam rangka pemenuhan modal inti minimum BPR sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam Miliar) oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Berdasarkan RUPS PT BPR Lumbang Pith Nagari Taeh Baruah tanggal 9 Januari 2023 menentapkan dan menetapkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Rp80.650.000,00 atau 1,61%. Sementara kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada PT. BPR Ilirau per 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp75.000.000,00 atau 0,94%.

5.3.2.2.4	PT Dalairong Citrajaya Sumbar	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pembiayaan bersuana Pemhangunan Mess (PT. Balairung) Perwakilan Sumatera Barat di Jakarta. Realisasi pencairan dana APBD Tahun 2007 ke rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.000.000.000,00, sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3355/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.

Pada Tahun 2022 PT. Balairung telah memberikan kontribusi berupa dividen tahun buku 2021 sebesar Rp3.962.787,00 pada tanggal 8 Juli 2022.

5.3.3 Aset Tetap

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

1.675.294.442.817,27

1.641.412.961.467,82

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Aset Tetap Lainnya. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Saldo dan mutasi dari masing-masing golongan Aset Tetap per 31 Desember 2022 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.79 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
Tanah	116.523.701.510,00	1.557.864.290,00	324.110.730,00	117.757.455.090,00
Peralatan dan Mesin	487.330.185.101,91	45.799.700.615,00	8.261.361.336,00	524.868.387.681,00
Gedung dan Bangunan	846.414.997.413,18	22.098.786.161,00	2.042.585.207,00	876.770.198.266,18
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.683.038.008.966,87	110.339.319.717,00	851.971.470,00	1.793.165.352.202,87
Aset Tetap Lainnya	107.540.339.054,41	4.175.646.387,00	187.918.736,00	111.535.066.685,41
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.620.833.556,00	1.139.982.128,00	3.472.401.703,00	7.288.381.381,00
Jumlah Aset Tetap	3.251.094.864.303,35	194.911.109.298,10	15.120.352.132,00	3.430.884.841.469,45
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(390.428.683.316,34)	(41.249.408.971,23)	(408.698.965,64)	(432.086.798.251,01)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(334.865.761.702,48)	(17.649.591.227,08)	(82.915.751,77)	(352.597.366.681,33)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(883.033.640.977,11)	(85.399.731.375,43)	0,00	(968.433.372.255,54)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.135.089.839,80)	(1.149.879.674,70)	0,00	(2.472.869.464,00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.609.681.122.835,53)	(145.418.561.100,94)	(490.714.715,41)	(1.755.900.398.652,18)
Total Aset Tetap	1.641.412.961.467,82	340.529.670.399,84	15.611.066.847,41	1.675.294.442.817,27

5.3.3.1 Tanah

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

117.757.455.090,00

116.523.701.510,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022. Terdapat penambahan Nilai Aset Tetap Tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp 1.233.753.580,00, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Mutasi Penambahan

Belanja Modal Tahun 2022	Rp	1.164.122.710,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	82.160.000,00
- Hibah/Mutasi antar OPD	Rp	269.461.580,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00

- Koreksi Tambah	Rp	42.120.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	1.557.864.290,00
Mutasi Pengurangan		
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	Rp	88.388.710,00
- Reklasifikasi Keluar	Rp	0,00
- Penghapusan	Rp	9.516.000,00
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	226.206.000,00
- Koreksi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	324.110.710,00
Jumlah Bersih Mutasi	Rp	1.233.753.580,00

- Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.164.122.710,00 merupakan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp283.022.710,00 yaitu Pengadaan Tanah untuk Rumah Dinas dan Pematangan Lahan Untuk Kantor Dinas Pendidikan dan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat sebesar Rp881.100.000,00 yaitu Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Sarilamak.
- Terdapat Kapitalisasi terhadap Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp82.160.000,00 yang menjadi Aset Tetap Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat.
- Hibah/mutasi masuk antar OPD sebesar Rp269.461.580,00 merupakan penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebagai akibat dari mutasi pemakaian Aset Tanah dan Hibah dari Pusat/Provinsi/Pihak Lain pada 4 (Empat) OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 80 Rekap Hibah/Mutasi masuk Aset Tetap Tanah antar OPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.000.000,00	Mutasi Tambah dari pembelian Tanah SDN 06 Baruah Gunung seluas 225m2
		6.000.000,00	Mutasi Tambah dari pembelian Tanah SDN 03 Sei. Naniang Luas 128m2
		3.000.000,00	Mutasi Tambah dari pembelian Tanah SDN 03 Sei. Naniang Luas 220m2
2.	Dinas Pemadam Kebakaran	4.255.580,00	Hibah dari Nagari Banja Loweh berupa 1 persil tanah seluas 383,97 m2.
3.	Secretariat Daerah	194.631.300,00	Mutasi Dari Dinas PUPR berupa pematangan lahan di Ketinggian Harau
4.	Dinas Kominfo	31.572.000,00	Mutasi dari Dinas Kesehatan berupa Tanah Perak
Jumlah Mutasi Masuk		269.461.580,00	

- d. Terdapat koreksi tambah saldo awal Tanah tahun 2022 sebesar Rp42.120.000,00 pada 2 (dua) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 81 Rekap Koreksi Tambah Aset Tetap Tanah

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.760.000,00	Koreksi tambah akibat kurang catat penilaian Tanah SDN DS Tanjung Baik
2.	Dinas Perhubungan	30.360.000,00	Koreksi tambah akibat kurang catat Tanah Terminal Pangkajene
	Jumlah Koreksi Kurang	42.120.000,00	

- e. Penghapusan Aset Tanah pada tahun 2022 sebesar Rp9.156.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 033/340/KBUP-LK/XII-2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Harang Pengelola Harang Berupa Tanah Kecamatan Payakumbuh karena dihibahkan ke Kantor KIA Kecamatan Payakumbuh.
- f. Belanja Modal Tanah tidak Dikapitulisir sebesar Rp88.388.710,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- g. Hibah/Mutasi keluar Aset Tanah Sebesar Rp226.206.000,00 terdapat pada Dua OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 82 Rekap Hibah/ Mutasi Keluar Aset Tetap Tanah

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	31.572.000,00	Mutasi ke Komite Berupa persil Tanah
2.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	194.634.000,00	Mutasi Ke Selda Berupa Pematangan Lahan Kantor Dinas Pendidikan
	Jumlah Mutasi Keluar	226.206.000,00	

Selengkapnya tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 dan tersebar pada 43 OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 83 Rekap Aset Tetap Tanah yang Dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Kategori Status Kepemilikan Tanah	Jumlah Perajil
1.	Sertifikat atas nama Pemda kab. Lima Puluh Kota	307
2.	Sertifikat atas nama pemilik sebelumnya	32
3.	Pelepasan hak atas nama pemilik sebelumnya	12
4.	Peta bidang dan surat ukur An. Pemda Lima Puluh Kota	44
5.	Akta perdamaian	1
6.	Rama acara ganti rugi	14
7.	Surat pernyataan hibah	15
8.	Surat pernyataan hak pinjam pakai	9

No.	Kategori Status Kepemilikan Tanah	Jumlah Persil
9	Surat penyerahan tanah	40
10	Berita acara P3D	54
11	Surat keterangan jual beli	21
12	Surat keterangan wakaf	6
13	Sporadik tanah	1
14	Surat keterangan tanah	93
15	Belum ada dokumen pendukung	223
15	Tanah Jalan Kabupaten	238
Jumlah		1.110

5.3.3.2 Perubahan dan Mesin

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

524.368.387.681,04

487.330.188.401,94

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 dan 2021.

Mutasi Penambahan

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	Rp	38.314.925.065,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	238.656.751,00
- Hibah/Mutasi antar OPD	Rp	5.414.915.469,10
- Reklasifikasi Masuk	Rp	275.555.000,00
- Koreksi Tamah	Rp	1.600.000,00
Utang Kontraktual	Rp	1.053.908.310,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	45.299.560.615,10

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	Rp	1.316.549.419,00
- Reklasifikasi Keluar	Rp	3.324.957.748,00
- Penghapusan	Rp	61.000.000,00
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	1.405.260.000,00
- Koreksi kurang	Rp	0,00
- Aset Ekstrakomptable	Rp	2.153.594.169,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	8.261.361.336,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	37.038.199.279,10

Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp 37.038.199.279,10 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

- Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.314.925.065,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022.
- Kapitalisasi terhadap Belanja Barang/Jasa sebesar Rp238.656.751,00 yang dikapitalisir sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pada 14 (empat belas) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Jabel 5. 84 Rekap Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan dan Mesin
Organisasi Perangkat Daerah

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	850.000,00
2	Dinas Kesehatan	5.174.000,00
3	Dinas Peradam Kebakaran	1.400.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.850.000,00
5	Dinas Kominfo	19.614.321,00
6	OPMDN	1.750.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat	8.558.790,00
8	Dinas Perdagangan dan KUKM	18.014.780,00
9	Dinas Tanah/Hutan	6.800.000,00
10	Bapelitbang	1.304.000,00
11	Sekretariat Daerah	150.221.121,00
12	Sekretariat DPRD	7.500.000,00
13	Inspektorat	3.018.200,00
14	BPBD	15.000.000,00
JUMLAH		238.658.761,00

- c. Hibah/mutasi masuk antar OPD sebesar Rp5.414.915.469,10 merupakan penumbuhan nilai akun Peralatan dan Mesin sebagai akibat dari mutasi penukaran aset peralatan dan mesin dan hibah dari Pusat/Provinsi/Piduk Lain pada 10 (sepuluh) OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 85 Rekap Hibah/Mutasi Masuk antar OPD pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.300.000,00	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Proyektor untuk SMPN
		121.670.000,00	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Proyektor untuk SDN
		130.078.000,00	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa furniture SMPN 3 Bukit Barisan
		5.000.000,00	Mutasi masuk Dari Dana BOP berupa Alat Rumah Tangga SKB
		10.000.000,00	Mutasi masuk Dari Dana BOP berupa Komputer SKB 1 unit
		415.312.500,00	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Laptop untuk SMPN
		997.500.000,00	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Laptop untuk SDN
		10.800.000,00	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Wire Reactor untuk SMPN
		41.400.000,00	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Wire Reactor untuk SDN
		2.	RSUD A. Darwis
533.373.500,00	Hibah dari Dinas Kementerian Kesehatan berupa Alat Kedokteran		

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
3.	Satpol PP	113.000.000,00	Mutasi dari Sekda Kendaraan Dinas BA 52 C
4.	Dinas Lingkungan Hidup	12.000.000,00	Mutasi Dari Dinas PUPR berupa kendaraan Roda Dua merk Supra
5.	Dinas Kominfo	59.328.000,00	Hibah dari Sekda berupa Server Aplikasi Simbangda
6.	Dinas Sosial	40.000.000,00	Mutasi dari Dinas Kesehatan berupa Mobil Minibus Toyota Kijang Super
7.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	69.811.525,00	Hibah Dari Kementerian CO BPPSDMP/PPDMFP berupa alat Kantor dan Rumah Tangga
		97.956.404,10	Hibah Dan Kementerian CO BPPSDMP/PPDMIP berupa alat Studio dan komunikasi
		21.235.080,00	Hibah Dari Kementerian CO BPPSDMP/PPDMIP berupa Alat Laboratorium.
8.	Sekretariat Daerah	993.189.500,00	Mutasi dari setoran dan dinkes berupa Kendaraan Roda 4
		54.052.500,00	Mutasi dari Kominfo berupa personal computer
		500.000,00	Mutasi dari dinas Perikanan mesin pompa air 1 unit
9.	Kec. Sukit	6.682.000,00	Mutasi Dari Sekda Berupa Kendaraan Roda 2
10.	BPBD	124.300.000,00	Hibah dari Sekda berupa mobil Kendaraan dinas Kijang KF 80 Long
		348.989.500,00	Hibah dari BNPB berupa Mobil Tangki Air Orange.
		51.443.800,00	Hibah dari BNPB berupa Motor Trail 2 Buah
Jumlah Mutasi Masuk		5.414.915.469,10	

d. Reklasifikasi masuk ke dalam akun Aset Tetap Peruluan dan Mesin sebesar Rp275.555.000,00 pada 2 (dua) OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 86 Reklasifikasi Masuk ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	69.960.000,00	Reklasifikasi masuk dari aset lain lain berupa Toyota Kijang Tahun 2008
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	183.275.000,00	Reklasifikasi masuk Dari Akun Gedung dan Bangunan Berupa Pembangunan Labor TIK SMP (Meubier)
		22.320.000,00	Reklasifikasi masuk Dan Akun Gedung dan Bangunan Berupa Plang Nama Instansi.
Jumlah		275.555.000,00	

- e. Tambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Utang Kontraktual Tahun 2022 sebesar Rp1.053.908.330,00 terdapat pada 8 (delapan) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 87 Aset dari Utang Kontraktual Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	181.850.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Pengadaan TIK SMPN
		149.850.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Pengadaan TIK SDN
2	Dinas Keselatan	155.960.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Perangkat Digital
3	Dinas Perindera Kebakaran	70.000.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Bekak Bemer merk VIAR
4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.600.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa alat peraga pelatihan dan percontohan
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat	38.850.500,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Bekak Motor
		45.000.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Tong Sampah Plastik
6	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura	80.847.334,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Meja Resepsionis
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20.600.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa kontainer baki kapasitas 34 liter merk Washington
		86.303.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa 5 buah kerangka papan pengumuman untuk baliho
8	Dinas Perhubungan	56.447.406,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa rambu rambu lalu lintas udara
		143.003.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa rambu rambu lalu lintas laut
Jumlah		1.053.908.330,00	

- f. Koreksi tambah akibat kurang catat sebesar Rp1.600.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari aset BOP PAUD.
- g. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp1.316.549.119,00 merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Aset Tetap dan yang akan diserahkan kepada pihak lain, terdiri dari 9 (sembilan) OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 88 Rekap Belanja Mutlak Peralatan dan Mesin yang Tidak Dikapitalisir

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Diras Pendidikan dan kebudayaan	1.274.382.189,00
2.	Diras Kesehatan	24.333.120,00
3.	Diras Pariwisata	3.220.000,00
4.	Diras Tanaman Pangan	8.599.110,00
5.	Sekretariat Daerah	4.885.000,00
6.	Kec Mungka	300.000,00
7.	Kec Suliki	400.000,00
8.	Kec Luak	150.000,00
9.	Kec. Kapur IX	200.000,00
Jumlah Tidak Dikapitalisasi		1.316.549.419,00

- b. Reklasifikasi keluar sebesar Rp 3.324.957.748,00 dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut ke akun lain pada B (delapan) OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 89 Rekap Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Diras Pendidikan dan Kebudayaan	4.889.832,00	Reklasifikasi keluar ke Aset Tetap Lainnya berupa pengadaan Alat Laboratorium Fisika SMPN buku panduan (DAK)
		298.061.500,00	Reklasifikasi keluar ke Aset Tetap Lainnya berupa Alat Kesenian SDN dan SMPN
		56.590.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Aset JII berupa Jaringan Internet Listrik dan air (BOS)
		180.000.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Aset lainnya berupa Pustaka Digital SD (BOS)
		15.000.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Aset lainnya berupa Pustaka Digital SMP (BOS)
		124.735.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya berupa Pengadaan TIK SD Swasta dari dana DAK (SD Islam Bustanul ulum)
		124.841.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya Aset berupa Pengadaan TIK SD Swasta dari Dana DAK (SD Islam Al Kutab)
		127.840.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya Pengadaan TIK SD Swasta dari dana DAK (SD Swasta Alam Iqam Mumtaz)
		124.250.000,00	Reklasifikasi keluar ke akun aset lainnya berupa Pengadaan TIK SMP swasta dari dana DAK (SMP Muhammadiyah Andalah)

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
		36.796.200,00	Reklas keluar ke aset lain-lain berupa chrome book, proyektor, tablet, laptop pada sekolah-sekolah (aset hilang)
2.	Dinas Kesehatan	4.878.000,00	Reklasifikasi keluar ke akun JU berupa Jaringan WIFI Puskesmas Sulki
		630.000,00	Reklasifikasi keluar ke akun aset lainnya berupa instalasi setting dan Konfigurasi Mobile System Android
3.	Dinas Lingkungan Hidup Penunahan Rakyat dan Perumahan	55.000.000,00	Reklasifikasi keluar ke gedung dan bangunan berupa Alat Labor
4.	Dinas Perindustrian	20.600.000,00	Reklasifikasi keluar ke akun aset tetap lainnya berupa alat Pelatihan dan Perawatan
5.	Dinas Pertukangan	760.000,00	Reklasifikasi keluar ke akun JU berupa Paralon Air Ledeng
		17.280.000,00	Reklasifikasi keluar ke akun aset lainnya berupa Aplikasi
		1.945.828.637,00	Reklasifikasi keluar ke akun JU berupa Jaringan Listrik
6.	Badan Keuangan	23.160.000,00	Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa 3 buah kendaraan roda 2
7.	Kec Pangkalan Kulu Baru	24.592.000,00	Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Sepeda Motor Roda dua 4 unit
8.	Sekretariat Daerah	15.630.000,00	Reklas keluar ke Aset Tetap Lainnya berupa Berang Hancorak Seni
9.	Sekretariat DPRD	103.773.573,00	Reklas keluar ke aset lain-lain berupa notebook, laptop, dan kamera (aset hilang)
10.	Dinas Penkanar	14.000.000,00	Reklas keluar ke aset lain-lain berupa DO Meter (aset hilang)
11.	RSUD Achmad Dahwa	18.953.000,00	Reklas keluar ke aset lain-lain berupa laptop (aset hilang)
12.	Satpol PP	14.400.000,00	Reklas keluar ke aset lain-lain berupa laptop (aset hilang)
13.	Dinas Sosial	2.000.000,00	Reklas keluar ke aset lain-lain berupa hard disk (aset hilang)
	Jumlah	3.324.857.748,00	

- i. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp61.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 033/310/BUP-J.K./XII-2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga berupa 1 Unit Becak Motor.

- j. Mutasi keluar antar OPD adalah sebesar Rp1.405.260.000,00 merupakan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin sebagai akibat dari mutasi pemakaian Aset Peralatan dan Mesin antar OPD yang terdapat pada 5 (lima) OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 90 Rekap Hitung/Mutasi Keluar Antar OPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	12.000.000,00	Mutasi ke dinas DLHPP berupa Kendaraan Roda 2 Supra 1 Unit tahun 2007
2.	Dinas Kesehatan	550.000.000,00	Mutasi ke Setda berupa Mobil Ambulance Puskesmas Muaro Falli
		40.000.000,00	Mutasi keluar ke Dinas Sosial Mobil Kijang
3.	Dinas Kaminfo	64.012.500,00	Mutasi ke Setda berupa Komputer Unit
4.	Sekretariat Daerah	443.189.500,00	Mutasi ke Setda berupa Mobil Mitsubishi Pajero
5.	Sekretariat Daerah	124.000.000,00	Mutasi Kendaraan roda 4 ke BPBD
		113.000.000,00	Mutasi Kendaraan roda 4 ke Satpol PP
		5.892.000,00	Mutasi ke kec suliki Berupa Kendaraan roda 2
		50.326.000,00	Mutasi ke Kaminfo berupa Server
	Jumlah Mutasi Keluar	1.405.260.000,00	

- k. Aset Ekstrakomptahab sebesar Rp2.153.594.169,00 yang merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat nilainya ke Neraca Aset Tetap sesuai Kebijakan Akuntansi Nomor 99 Tahun 2021 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 pada 18 (delapan belas) OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 91 Rekap Aset Ekstrakomptahab Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1	DIN. PENDIDIKAN	643.756.168,00
	HQS	754.685.580,00
2	DINAS KESHAJAN	308.726.588,00
3	RSUD DR. AHMAD DARWIS	14.485.600,00
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	9.645.988,00
5	SATPOL PP	15.790.000,00
6	OP2KBPDA	9.791.400,00
7	DINASPERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.000.000,00
8	DINAS PERPUSTAKKAN DAN ARSIP	99.800.000,00
9	DINAS PARIWISATA	1.100.000,00
10	DINAS TANAMAN PANGAN HORBUN	6.600.000,00
11	DINAS PEDEHAKAN & KSHN HEWAN	15.452.000,00
12	DINAS PERDAGANGAN KUKM	16.014.760,00
13	INSPEKTORAT	13.968.000,00
14	DINAS PERIKANAN	7.500.000,00

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
15	LYNAS PER-HUBUNGAN	200.897.498,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	17.998.721,00
17	BAPELITBANG	1.304.000,00
18	KECAMATAN MUNGKA	15.000.000,00
	JUMLAH	2.153.594.169,00

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	876.770.198.369,18	846.413.997.415,18

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 dan 2021. Terdapat penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp30.356.200.954,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal Tahun 2022	Rp	23.220.870.928,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.805.560.553,00
- Hibah/Mutasi antar OPD	Rp	2.957.684.097,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	882.930.865,00
- Aset Utang Kontraktual	Rp	3.531.739.718,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	32.398.786.161,00

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	Rp	63.650.000,00
- Reklasifikasi Keluar	Rp	489.644.013,00
- Penghapusan	Rp	761.475.097,00
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	726.416.097,00
- Koreksi kurang	Rp	1.100.000,00
- Aset Ekstrakomptable	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	2.042.585.207,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	30.356.200.954,00

- Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.220.870.928,00 merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022.
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.805.560.553,00 yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pada 17 (tujuh belas) OPD berikut.

Tabel 5. 92 Rekap Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48.050.000,00

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
4.	Hapelkuang	19.348.500,00	Reklasifikasi Masuk dari KDP berupa perencanaan rekap kantor
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.310.400,00	Reklasifikasi Masuk dari KDP yang telah selesai pembangunannya
Jumlah		862.930.865,00	

- c. Terdapat Utang Kontraktual Tahun Anggaran 2022 yang diakui sebagai Aset Gedung Dan Bangunan yang terdapat pada 9 (sembilan) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.95 Rekap Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Utang Kontraktual

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.825.000,00	Tambahan Aset dan Utang Kontraktual berupa Pembangunan Ruang Pustaka
		1.161.286.570,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual Berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah.
		110.762.825,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa rekap gedung Dinas Pendidikan
		457.168.900,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa pengadaan pagar
		182.477.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa lanjutan pembangunan Poskors Jombang III Koto Bangun
2.	Dinas Kesehatan	3.704.302,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa retensi 5% renovasi Parkir
		99.765.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan
3.	Dinas Pekerjaan Umum	69.826.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Perencanaan Pembangunan mall pelayanan publik
		177.885.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa pembangunan posko banjir kweh
4.	Dinas Pemadam Kebakaran	827.250.300,00	Tambahan Aset dan Utang Kontraktual Berupa pembangunan tek RTH
		99.808.659,30	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual Berupa dokumen pengawasan Konstruksi Bangunan Flek RTH

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
		45.000.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Tanaman Hias dan Pelindung
		14.847.300,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Tanaman Hias dan Pelindung
6.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	106.686.128,00	Tambahan Aset dan Utang Kontraktual berupa Pagar Gedung PLUT
7.	Dinas Jernam Panyan	118.823.824,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa rehab gedung penggarahan keramik lantai
8.	Inspektorat	169.519.000,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa gedung tambahan ruangan fungsional
9.	Dinas Pemernakar dan Kesehatan Hewan	69.344.500,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa rehab gedung pakir kantor Dinas Peternakan
	Jumlah	3.531.739.718,00	

- f. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp63.650.000,00 merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan/atau diserahkan kepada pihak lain yaitu terdapat pada Sekretariat Daerah Rp38.650.000,00 dan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp25.000.000,00 yang pekerjaannya berupa pengecatan.
- g. Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp761.475.097,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 033/345/BU/P-F.K/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang terdapat pada Dinas Pekerjaan Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan dengan Rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 96 Rikap Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Dinas Kesehatan	13.184.000,00	Penghapusan Rumah Paramedis 2 Puskesmas Muaro Pait
		13.184.000,00	Penghapusan Rumah Paramedis 3 Puskesmas Muaro Pait
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	735.147.097,00	Penghapusan rumah dinas guru, Ruang kelas, rumah pengajar, rumah kepala sekolah, pada beberapa sekolah.
	Jumlah	761.475.097,00	

- b. Mutasi keluar dari Aset Gedung dan Bangunan merupakan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sebagai akibat dari mutasi pemakaian gedung dan bangunan antar OPD yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp726.116.097,00 dengan rincian mutasi ke Sekretariat Daerah sebesar Rp112.765.097,00 berupa pemeliharaan kantor Bupati Lama dan mutasi ke Dinas Kominfo sebesar Rp613.651.000,00 berupa bangunan gedung kantor tempat kerja.
- i. Reklasifikasi keluar pada Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp489.644.013,00 terdapat pada pada 4 (empat) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.97 Rekap Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	183.275.000,00	Reklasifikasi keluar ke Peralatan dan Mesin Berupa Pembangunan Labor 1TK SMP (Meubiler)
		22.320.000,00	Reklasifikasi keluar ke Peralatan dan Mesin Berupa PANG Nama Instansi.
2.	Dinas Kesehatan	84.656.013,00	Reklasifikasi keluar ke akun JIJ berupa Pembangunan TPS Puskesmas Koto Baru Simalangung.
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.785.000,00	Reklasifikasi ke Akun KDP berupa Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		86.826.000,00	Reklasifikasi ke akun KDP berupa Perencanaan Pembangunan Mall Pelayanan Publik
4.	Dinas Pemadam Kebakaran	29.802.000,00	Reklasifikasi keluar ke akun KDP berupa DFD Pembangunan Posko
	Jumlah	489.644.013,00	

- j. Koreksi kurang sebesar Rp1.400.000,00 pada Sekretariat Daerah atas belanja honorarium yang dicatat ganda sebagai penambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

1.793.165.352.262,82

1.683.658.003.965,82

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 dan 2021. Terdapat penambahan terhadap nilai Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan sebesar Rp 109.507.348.297,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Mutasi Penambahan

Belanja Modal Tahun 2022

Rp

83.965.835.510,00

- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.733.188.300,00
- Hibah/Mutasi antar OPD	Rp	272.878.243,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	5.166.079.665,00
- Aset Utang Kontraktual	Rp	18.201.337.999,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	110.339.319.717,00
Mutasi Pengurangan		
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	Rp	100.000.000,00
- Reklasifikasi Keluar	Rp	429.093.177,00
- Penghapusan	Rp	0,00
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	302.878.243,00
- Koreksi kurang	Rp	0,00
- Aset Ekstrakomptable	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	831.971.420,00
Jumlah Mutasi Bersih		109.507.348.297,00

1. Jumlah pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp83.965.835.510,00 merupakan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022.
2. Kapitalisasi Barang dan Jasa sebesar Rp2.733.188.300,00 terdapat pada 6 (enam) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 98 Rekap Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.367.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.611.838.600,00
3.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7.982.000,00
4.	Dinas Perhubungan	17.290.000,00
5.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	11.510.700,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	73.200.000,00
	Jumlah Kapitalisasi	2.733.188.300,00

3. Hibah/mutasi masuk antar OPD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp272.878.243,00 pada 2 (dua) OPD.

Tabel 5. 99 Rekap Hibah Mutasi Masuk Antar OPD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.083.000,00	Mutasi Tambah dari BPBD berupa Relasi Tanggul Harau

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
		49.800.243,00	Mulasi Tambah dan BPBD berupa Rehap Tanggul Bt Sanipen Ketinggian
		59.850.000,00	Mutasi dan BPBD berupa Rehap Batu Labi Mungo
2	BPBD	73.208.000,00	Pemasangan bronjong penahan tebing SDN 3 Mungo dari Dana BFT
	Jumlah Mutasi Masuk	272.079.243,00	

4. Reklasifikasi masuk sebesar Rp 5.166.079.665,00 ke dalam akun Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pemindahhukuan atas nilai aset tetap tersebut dari akun lain (yang masih berada dalam kelompok Aset Tetap), yaitu terdiri dari 4 (empat) OPD yaitu:

Tabel 5. 100 Rekap Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.590.000,00	Reklasifikasi masuk dari akun peralatan dan Mesin berupa Jaringan Internet, Listrik dan Air.
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.440.399.260,00	Reklasifikasi masuk dari KDP berupa Jembatan Sugak Telang Maua
		50.757.880,00	Reklasifikasi masuk dari KDP berupa Jembatan Sripeng Sugkan
		582.409.875,00	Reklasifikasi masuk dari KDP berupa Jalan
3.	Dinas Kesehatan	84.856.013,00	Reklasifikasi Masuk dari Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan TPS Puskesmas Kota Baru Simalanggang
		4.678.800,00	Reklasifikasi Masuk dari Peralatan Dan Mesin Berupa Jaringan WIFI
4.	Dinas Perhubungan	760.000,00	Reklasifikasi masuk dari Peralatan dan Mesin berupa Perakn Air Ledang
		1.945.028.837,00	Reklasifikasi masuk dari akun peralatan dan Mesin berupa Jaringan Listrik
	Jumlah	5.166.079.665,00	

5. Utang Kontraktual yang diakui sebagai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp18.201.337.999,00 terdapat pada 2 (dua) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 101 Rekap Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Utang Kontraktual

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.639.007.799,00	Aset dan Utang Kontraktual berupa jalan dan jembatan

		532.330.200,00	Aset dari Utang Kontraktual berupa bangunan air
2.	Dinas Perikanan	30.000.000,00	Aset dari dan Utang Kontraktual berupa Ikan Hias Kol dan pakan ikan koi
	Jumlah	10.201.337.999,00	

6. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp100.000.000,00 terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak dikapitalisasi berupa Jalan Penghubung Nagari Durian Tinggi ke Nagari Koto Laruo dimana pada Tahun 2021 Aset tersebut sudah tercatat.
7. Reklasifikasi keluar pada Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp429.093.177,00 pada Dinas Perikanan berupa rehab kolam/bak penijahan induk/calon induk/larva/standan BBI Air Putih.
8. Mutasi keluar antar OPD pada Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 302.878.243,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 102 Rikap Hihak Mutasi Keluar Antar OPD Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Perikanan	50.000.000,00	Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa ikan kol dan pellet ikan
2.	BPEOD	49.883.000,00	Mutasi ke Dinas PUPR berupa rehab tanggul harsu
		49.800.243,00	Mutasi ke Dinas PUPR berupa Rehab Tanggul BT Sanjipin Katrangan
		99.880.000,00	Mutasi ke Dinas PUPR berupa Rehab jalan Baku Labi Mungo
		73.065.000,00	Mutasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemasangan bronjong penahan tebing SDN 3 Mungo
	Jumlah	302.878.243,00	

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
111.535.066.685,41	107.547.339.054,41

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 dan 2021. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.987.727.631,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Mutasi Penambahan

Belanja Modal Tahun 2022	Rp	3.290.619.449,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	116.978.831,00

- Hibah/Mutasi antar OPD	Rp	70.000.000,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	335.200.332,00
- Koreksi Tambah	Rp	24.670.200,00
- Aset Dari Utang Kontraktual	Rp	378.177.575,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	4.175.646.387,00

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	Rp	97.918.756,00
- Reklasifikasi Keluar	Rp	90.000.000,00
- Penghapusan	Rp	0,00
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	0,00
- Koreksi kurang	Rp	0,00
- Aset Ekstrakomptable	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	187.918.756,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	3.987.727.631,00

1. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp3.290.619.449,00.
2. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 116.978.831,00 terdapat pada 3 (tiga) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 103 Rekap Hibah Mutasi Keluar Antar OPD Aset Tetap Lainnya

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.778.831,00
2.	Badan Perencanaan penelitian dan pengembangan	8.500.000,00
3.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	98.700.000,00
	Jumlah	116.978.831,00

3. Hibah/mutasi keluar antar OPD sebesar Rp30.000.000,00 ke dalam akun Aset Tetap Lainnya merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut terdapat pada Sekretariat Daerah adalah masuk dari Dinas Perikanan berupa Ikan Hias koi dan Pellet Ikan.
4. Reklasifikasi masuk ke Akun Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 335.200.332,00 terdapat pada 3 (tiga) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 104 Rekap Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Lainnya

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.888.832,00	Reklasifikasi masuk dari peralatan dan mesin berupa pengadaan alat laboratorium fisika SMPN buku panduan-DAK
		290.081.500,00	Reklasifikasi masuk dari peralatan dan mesin berupa Alat Kesenian SDN dan SMPN
2.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.500.000,00	Reklasifikasi masuk dari Peralatan mesin berupa alat Pelatihan dan Percontohan
3.	Sekretariat Daerah	13.630.000,00	Reklasifikasi masuk dari peralatan dan mesin berupa barang barang berserk Seri
	Jumlah	335.200.332,00	

5. Koreksi tambah saldo awal akun Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp24.670.200,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS) akibat dari kurang catat berupa buku dan pustaka digital.
6. Utang Kontraktual yang diakui sebagai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp378.177.575,00 terdapat pada 3 (tiga) OPD dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 5. 105 Rekap Aset Tetap Lainnya dari Utang Kontraktual

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.795.700,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa drumband SDN
		240.931.900,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa alat drumband SDN
		24.699.975,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa alat drumband SMPN 6 Lareh Sago Halaban
2	Dinas Peternakan dan Perikanan	40.450.000,00	Fasilitasi Aset dari Utang Kontraktual berupa Hewan Kambing
3	Badan Perencanaan penelitian dan Pengembangan	12.000.000,00	Tambahan Aset dan Utang Kontraktual berupa 1 bush produkul dan publikasi tentang stumling.
	Jumlah	378.177.575,00	

7. Reklasifikasi keluar sebesar Rp90.000.000,00 dari akun Aset Tetap Lainnya merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut pada Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya berupa Pustaka Digital SD (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Belanja Modal Tidak Dikapitalisir Aset Tetap Lainnya sebesar Rp97.918.756,00 terdapat pada 2 (dua) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 106 Rekap Belanja Modal Tidak Dikapitalisir Aset Tetap Lainnya

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	93.868.756,00
2	Sekretariat Daerah	4.050.000,00
	Jumlah	97.918.756,00

5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

7.288.381.381,00

9.620.853.956,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Mutasi Penambahan

- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	480.418.640,00
- Hibah/Mutasi antar OPD	Rp	0,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	199.393.000,00
- Aset dari Utang Kontraktual		460.120.488,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	1.139.932.128,00

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi Keluar	Rp	3.472.404.703,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	3.472.404.703,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	(2.332.472.575,00)

1. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp480.418.640,00 ke dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pemindahbukuan atas nilai aset tetap tersebut pada 3 (tiga) OPD) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 107 Rekap Kapitalisasi Barang Dan Jasa Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	263.240.000,00
2.	Dinas Pemuda dan Olahraga	216.823.640,00
3.	Dinas Pemadam Kebakaran	350.000,00
	Jumlah	480.418.640,00

2. Reklasifikasi masuk ke Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 199.393.000,00 terdapat pada 2 (dua) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 108 Rekap Reklasifikasi Masuk ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	134.591.000,00	Reklasifikasi masuk dari Gedung dan Bangunan berupa DFD Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan dan Mall Pelayanan Publik.
2.	Dinas Pemadam Kebakaran	29.802.000,00	Reklasifikasi masuk dari Gedung dan Bangunan berupa DED Pembangunan Posko
	Jumlah	199.393.000,00	

3. Utang Kontraktual yang diakui sebagai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp460.120.488,00 terdapat pada 2 (dua) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 109 Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Utang Kontraktual

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	400.790.000,00	Tambahan Aset dan Utang Kontraktual berupa Perencanaan Pembangunan Jalan
2	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	60.330.488,00	Tambahan Aset dari Utang Kontraktual berupa Revitalisasi Pasar Danggung Danggung
	Jumlah	460.120.488,00	

4. Reklasifikasi keluar merupakan pemindahbukuan atas nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah tuntas dilaksanakan sehingga menjadi Aset Tetap sebesar Rp3.472.404.703,00 terdapat pada 3 (tiga) OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 110 Rekap Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	35.050.000,00	Reklasifikasi keluar ke akun Gedung Bangunan berupa DED Poskerah Jereng III Koto Bangun
		283.128.788,00	Reklasifikasi keluar ke akun Gedung Bangunan berupa Relokasi Poskerah Jereng III Koto Bangun
2.	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	2.440.329.260,00	Reklasifikasi keluar ke JIJ berupa Jembatan Bugak Talang Masu.
		50.757.880,00	Reklasifikasi keluar ke JIJ berupa Jembatan Simpang Sugiran
		582.409.875,00	Reklasifikasi masuk dari KDP berupa Jalan
3.	Bapelitbang	19.148.500,00	Reklasifikasi keluar ke akun Gedung Bangunan berupa DCD Rehap gedung kantor
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.310.400,00	Reklasifikasi keluar KDP yang telah selesai pembangunannya
	Jumlah	3.472.404.703,00	

Daftar rekapitulasi Aset Tetap tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran 14 Laporan Keuangan Daerah ini.

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Tahun 2022

Tahun 2021

Aset Tetap

(Rp)

(Rp)

(1.755.590.398.652,18)

(1.609.681.122.835,53)

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	(432.086.788,251,01)	(390.428.680.316,14)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	(152.597.168.681,63)	(334.865.761.702,48)
3	Akumulasi Penyusutan JU	Rp	(968.433.372.255,54)	(883.033.640.977,11)
4	Akumulasi Penyusutan A11.	Rp	(2.472.869.464,00)	(1.353.039.839,80)
	Jumlah	Rp	(1.755.590.398.652,18)	(1.609.681.122.835,53)

Daftar rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 15** Laporan Keuangan Daerah ini.

5.3.4 Aset Lainnya

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

11.750.582.015,11

13.077.088.205,40

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022. Jumlah tersebut terdiri dari:

		2022	2021
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp 289.428.000,00	2.786.537.850,29
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 643.640.850,00	0,00
3	UYHD TA 2011	Rp 337.500.000,00	337.500.000,00
4	PM-PE Giongong Lino Sakato	Rp 29.318.493,00	29.318.493,00
5	PM-IPK Kampung Baru	Rp 100.000.000,00	100.000.000,00
6	Aset Tidak Berwujud	Rp 2.970.576.095,00	2.541.267.095,00
7	Aset Lain-lain	Rp 11.537.766.826,40	10.303.062.126,40
8	Akumulasi Penyusutan	Rp -4.157.648.249,29	-3.020.597.359,29
	Jumlah	11.750.582.015,11	13.077.088.205,40

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp289.428.000,00 yang sudah penetapan berupa tuntutan ganti rugi non bondahara tahun 2011.
2. Aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.970.576.095,00 terdiri atas *software* senilai Rp2.411.477.095,00, pustaka digital senilai Rp475.000.000,00 dan Aset Lain Lain (Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan) senilai Rp194.099.000,00.
3. UYHD sebesar Rp337.500.000,00 merupakan UYHD Dinas PU Tahun 2011 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1122/TU/2013/1543 K/PID.SUS/2013 tanggal 3 September 2013 dan Nomor 1097/TU/2013/1537/K/PID.SUS/ 2013 tanggal 26 September 2013.

4. Penyetoran Modal pada PD Gonjong Limo Sakato sebesar Rp29.318.491,00 merupakan reklasifikasi dari akun Penyetoran Modal Pemerintah Daerah.
5. Penyetoran Modal pada BPR Kampung Baru sebesar Rp100.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari akun Penyetoran Modal Pemerintah Daerah.
6. Aset lain-lain yang berasal dari Aset Tidak berwujud, mutasi aset rusak berat dan lain-lain, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Mutasi Penambahan

- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	15.000.000,00
- Uibah/Mutasi antar OPD	Rp	40.000.000,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	1.016.900.779,00
- Koreksi Tambah	Rp	115.000.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	1.216.900.779,00

Mutasi Pengurangan

- Reklasifikasi Keluar	Rp	69.960.000,00
- Penghapusan	Rp	647.155.200,00
- Mutasi Keluar		40.000.000,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	757.115.200,00

Jumlah Mutasi Bersih Rp 459.785.579,00

1. Kapitalisasi Barang Belanja Barang dan Jasa Aset Lainnya Rp15.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.016.900.779,00 adalah pemindahbukuan ke akun Aset Lainnya dari akun Aset Tetap pada 5 (lima) OPD sebagai berikut.
- 3.

Tabel 5.111 Rekap Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	600.000,00	Reklasifikasi masuk dari Peralatan dan Mesin berupa instalasi setting dan Konfigurasi Mobile System Antrian
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	160.000.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Pustaka Digital SD (BOS)
		15.000.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Pustaka Digital SMP (BOS)
		90.000.000,00	Reklasifikasi masuk dan Aset Tetap Lainnya berupa Pustaka Digital SD (BOS)
		124.735.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Pengasadaan TIK SD Swasta dari dana DAK (SD Islam Bustanul ulum)
		124.841.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Pengasadaan TIK SD Swasta dari Dana DAK (SD Islam Al Kuttab)

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah (Rp)	Keterangan
		122.840.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset Peralatan dan Mesin berupa Penggajian TIK SD Swasta dari dana DAK ISD Swasta Alam Islam Muntaz
		124.250.000,00	Reklasifikasi Masuk dan Aset Peralatan dan Mesin berupa Penggajian TIK SMP swasta dari dana DAK (SMP Muhammadiyah Andaluh)
		315.715.200,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset Peralatan dan Mesin berupa (chrome book, proyektor, tablet, laptop pada sekolah-sekolah (aset hilang)
3.	Badan Keuangan	23.110.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset Peralatan dan Mesin berupa 3 buah kendaraan Roda 2
4.	Dinas Perhubungan	17.280.000,00	Reklasifikasi masuk dari JIJ berupa aplikasi rfid
5.	Kec. Pangkalan Koto Baru	24.582.000,00	Reklasifikasi masuk dari akuisi Peralatan dan Mesin berupa kendaraan Roda 2 sebanyak 4 unit
6.	RSUD Achmad Dahlan	18.963.000,00	Reklas masuk dari peralatan dan mesin berupa laptop (aset hilang)
7.	Salipol PP	14.410.000,00	Reklas masuk dari peralatan dan mesin berupa laptop (aset hilang)
8.	Dinas Sosial	2.000.000,00	Reklas masuk dari peralatan dan mesin berupa hard disk (aset hilang)
9.	Dinas Perikanan	14.000.000,00	Reklas masuk dari peralatan dan mesin berupa DO Meter (aset hilang)
10.	Sekretariat DPRD	103.723.579,00	Reklas masuk dari peralatan dan mesin berupa notebook, laptop, dan kamera (aset hilang)
Jumlah Reklasifikasi Masuk		1.015.900.779,00	

- Mutasi Masuk ke Aset Lainnya dari Dinas Kesehatan sebesar Rp40.000.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa Mobil Ambulance Puskesmas Mack.
- Koreksi tambah Aset Lainnya karena kurang catat sebesar Rp145.000.000,00 yang terdapat Dinas Kesehatan berupa mobil Ambulance Daihatsu S-93.
- Reklasifikasi keluar pada Aset Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp69.960.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa Mobil Kijang Toyota.
- Penghapusan Aset Lainnya Sebesar Rp 617.153.200,00 yang terdapat pada Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Dinas Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 033/341/BUP-1.K/XII-2022 Tanggal 26 Desember 2022 tentang tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang Berupa Mobil dan Bekas Motor Sebesar Rp 156.169.750,00 dan sebesar Rp490.983,00,00 berupa

Gedung milik Kementerian Kesehatan yang terletak di Tabek Panjang Kec Payakumbuh sebanyak 7 (tujuh) Unit.

8. Mutasi Keluar dari Aset Lainnya sebesar Rp40.000.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa Mobil Ambulance Puskesmas Maek ke Sekretariat Daerah.
9. Kas atau Setara Kas Dana Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) sebesar Rp. 1.347.868.971,00.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Pada akhir tahun 2022, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Dimana Perlakuan akuntansi atas penyaluran pokok DBH/DAU melalui Fasilitas TDF adalah:

1. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer- Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
2. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF-TKD dan telah disalurkan ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di RKUD (Neraca) pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Retensi Pemeliharaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).

Tabel 5. 112 Dana Bagi Hasil Yang Ditunda Penyalurannya Dan Disimpan Di Rekening Lain Dalam Bentuk TDF (Treasury Deposite Facility) Pada Bank Indonesia Tahun 2022

NO	JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai Triwulan ke-4 TA 2022 => 511111 DBH PPh Pasal 21 (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	620.232.628,00	30 Dec 2022
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	44.895.895,00	30 Dec 2022

NO	JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
3	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	43.758.866,00	30 Dec 2022
4	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai Minggu ke-18 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	38.803.775,00	30 Dec 2022
5	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai Minggu ke-18 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	12.359.765,00	30 Dec 2022
6	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	129.271.867,00	30 Dec 2022
7	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai Minggu ke-18 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	1.072.230,00	30 Dec 2022
8	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai Minggu ke-18 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	343.267,00	30 Dec 2022
9	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	1.423.089,00	30 Dec 2022
10	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	3.591.008,00	30 Dec 2022
11	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai, Tahap ke-3 TA 2022 => 611215 DBH PBB Bagi Rata (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	472.805.806,00	30 Dec 2022
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612311 DBH SDA Mineral - Iuran Tetap (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	1.871.914,00	30 Dec 2022
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612312 DBH SDA Mineral - Royalti (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	143.421.654,00	30 Dec 2022
14	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612412 DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	5.876.461,00	30 Dec 2022
15	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612413 DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	61.792.186,00	30 Dec 2022
16	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612612 DBH SDA Kehutanan - PSDH (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	14.402.121,00	30 Dec 2022
17	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612611 DBH SDA Perikanan (Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	241.753.211,00	30 Dec 2022
18	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	40.396.290,00	30 Dec 2022
	Jumlah	1.847.888.974,00	

5.3.4.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	(4.015.194.721,79)	(2.926.929.831,79)

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 berupa Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat yang terdiri atas alat angkutan, alat pertanian, alat laboratorium, alat keamanan dan alat bengkel yang terlapat pada OPD sebagai berikut.

Tabel 5.113 Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per OPD

NO	NAMA OPD	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(121.136.200,00)
2	DINAS KESEHATAN	(640.034.532,00)
3	RUMAH SAKIT UMLIM dr. Achmad Darwis	(34.240.750,00)
4	DINAS PU DAN PR	(726.483.001,79)
	SATPOL PP	(14.400.000,00)
	DINAS SOSIAL	(1.000.000,00)
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(36.700.000,00)
6	DPPKO DAN PIA	(9.266.000,00)
7	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UKM	(17.300.000,00)
8	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(62.197.664,00)
9	DINAS PERIKANAN	(47.085.400,00)
10	DINAS TANPAHORTBUN	(644.536.189,00)
11	INSPEKTORAT	(24.000.000,00)
12	BADAN KEUANGAN	(36.800.000,00)
13	BKPSDM	(13.000.000,00)
14	SEKRETARIAT DAERAH	(1.205.817.406,00)
	SEKRETARIAT DPRD	(103.723.579,00)
15	KECAMATAN GIGIJAK	(4.900.000,00)
16	KECAMATAN AKABILURU	(2.500.000,00)
17	KECAMATAN LIAK	(9.250.000,00)
18	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	(1.000.000,00)
19	KECAMATAN SITULUAH LIMO NAGARI	(34.790.000,00)
20	KECAMATAN HARAU	(5.200.000,00)
21	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	(28.082.000,00)
22	KECAMATAN KAPUR IX	(2.800.000,00)
	JUMLAH	(4.015.194.721,79)

5.3.4.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	(142.453.527,50)	(93.667.527,90)

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 berupa akumulasi penyusutan perangkat lunak, aplikasi penerimaan pasien dan *website* Pemerintah Daerah dan Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan yang terdapat pada OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 114 Rekap Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per OPD

NO	NAMA OPD	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(62.000.000,00)
2	DINAS KESEHATAN	(1.857.527,50)
2	DINAS KEPERAWATAN DAN PENGAGATAN SIPIL	(2.000.000,00)
4	DINAS PERHUBUNGAN	(1.726.000,00)
5	SEKRETARIAT DAERAH	(74.870.000,00)
	JUMLAH	(142.453.527,50)

5.3.5 KEWAJIBAN

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

40.546.425.249,10

12.691.342.595,45

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban sebesar Rp40.546.425.249,10 dan Rp12.691.342.595,45 merupakan jumlah kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Jangka

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

40.546.425.249,10

12.691.342.595,45

Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka pendek, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

Tabel 5. 115 Kewajiban Jangka Pendek

Jenis Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	252.000,00	2.505.000,00
Pendapatan diterima dimuka	49.957.085,00	50.290.739,58
Utang Belanja	40.498.216.168,10	7.632.407.095,87
Utang Jangka Pendek lainnya	0,00	3.747.763.764,00
Utang Transfer ke Desa/Margi	0,00	1.259.375.976,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	40.648.425.249,10	12.691.342.695,46

5.3.5.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		252.000,00	2.505.000,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PEK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp252.000,00. Utang PEK tahun 2022 terdapat pada BLUD Pakesmas Dinas Kesehatan.

5.3.5.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		49.957.083,00	50.290.739,58

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp49.957.083,00 yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame.

Rincian Pendapatan Diterima dimuka atas Pajak Reklame Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Lampiran 25 Laporan Keuangan ini.

5.3.5.1.3	Utang Belanja	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		40.496.216.166,10	7.632.407.095,87

Utang Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.496.216.166,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116 Utang Belanja

Jenis Utang Belanja	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Utang BPJS Kesehatan	7.103.138.540,00	7.674.283.084,00
Utang Insentif Pajak Daerah	0,00	198.179,87
Utang Jasa Pelayanan BLUD-PNS	2.013.797.652,00	0,00
Utang Belanja Barang	46.000.000,00	0,00
Utang Belanja Jasa	1.155.895.288,00	57.945.832,00
Utang Belanja Pemeliharaan	739.773.462,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	108.981.200,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.225.881.845,10	0,00
Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	2.053.912.793,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Angkutan	106.660.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Pertanian	26.800.000,00	0,00

Jenis Utang Belanja	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Utang Belanja Modal Alat Studio Komunikasi, dan Pemasaran	85.303.000,00	0,00
Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	155.960.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Komputer	331.500.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Pengeboran	45.000.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Peraga	20.600.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Danganan Gedung	2.907.710.597,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	17.639.307.709,00	0,00
Utang Belanja Modal Bangunan Air	582.330.200,00	0,00
Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	325.727.575,00	0,00
Utang Belanja Modal Hewan	40.450.000,00	0,00
Utang Belanja Bumi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.802.907.095,00	0,00
Jumlah Utang Belanja	40.498.216.166,10	7.832.407.095,87

5.3.5.1.3.1 Utang Belanja BPJS Kesehatan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	7.103.136.540,00	7.574.263.084,00

Berdasarkan surat dari BPJS Nomor 165/II-10/0123 tanggal 30 Januari 2023 hal Tagihan Kekurangan Iuran Wajib Pemda 4% Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan hasil Berita Acara Rekon Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih terdapat kekurangan atas pembayaran iuran wajib Pemda 4% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117 Utang Belanja BPJS Kesehatan

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kekurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai 4%	2.145.916.848,00
2	Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru 4%	4.894.759.692,00
3	Kekurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru 4%	62.460.000,00
	Jumlah	7.103.136.540,00

Kekurangan atas pembayaran iuran wajib Pemda 4% terjadi karena tidak tersedianya dana pada APBD Tahun 2022.

5.3.5.1.3.2	Utang Insentif Pajak Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		0,00	198.179,87

Pembayaran insentif Pajak Bumi dan Bangunan untuk nagari dilakukan oleh Bendaharawan Badan Keuangan dengan mengajukan permintaan (permohonan pencairan insentif), berdasarkan permohonan tersebut dikeluarkan rekomendasi dari kepala Badan Keuangan untuk pembayaran insentif sebagai dasar bendahara untuk permintaan dana.

5.3.5.1.3.3	Utang Jasa Pelayanan BLUD PNS	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		2.813.797.652,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan utang belanja jasa pelayanan kesehatan PNS yang harus dibayar kepada tenaga medis dan pegawai PNS rumah sakit yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.4	Utang Belanja Barang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		45.000.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja barang yang harus dibayar kepada supplier atas pembelian bibit tanaman bias dan pelindung oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.5	Utang Belanja Jasa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		1.155.895.288,00	57.945.832,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja jasa yang harus dibayar kepada supplier dan atau pemberi jasa, berupa jasa tenaga ahli, jasa pengolahan sampah, jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan, tagihan pemakaian listrik, air, telepon, dan internet atas pemakaian bulan Desember Tahun 2022 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dilunasi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 118 Rincian utang belanja jasa

No	Jenis Utang Belanja Jasa	Jumlah	OPD
1	Utang Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.300.000,00	Bapolitbang
2	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12.900.000,00	DLHPP
3	Utang Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.000.000,00	Bapolitbang
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	3.428.322,00	Dinkes, Damkar, Disdukcapil, BK, Setwan, Kac. Shujah Lamo Nagari, Keabangpol
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	13.328.885,00	Disduk, Dinkes, Damkar, Disdukcapil, DisKOMINFO, DPMPPTSP.

No	Jenis Utang Belanja Jasa	Jumlah	OPD
			Disbudparina, Disnek Keawan, Inspektoral, Bapelkang. BK, Setda, Setwan, Kec. Luak, Kec. Harau, Kabangpoi
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tegihan Listrik	85.391.740,00	Diadik, DPUPR, Dankor, Disdukcapil, BK, Selda, Setwan, Kec. Atabiluru, Kec. Situjuh Lima Negeri, Kec. Harau, Kabangpoi.
8			
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan. Jimat/Surat Kabar/Majalah	400.000,00	Diskan, Kec. Harau
8	Utang Belanja Jasa Kantor- KawatTas nill/Internet/TV Berlangganan	21.355.592,00	Diadik, Inspektoral, BK, Selda, Setwan, Kabangpoi
9	Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	115.014.480,00	Disperdagkop UKM, Disnek Keawan.
10	Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	150.379.300,00	DPUPR, DLHPP
11	Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	500.814.000,00	DPUPR
12	Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	34.675.900,00	DPUPR
13	Utang Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	112.709.088,00	DLHPP, Disperdagkop UKM
14	Utang Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	60.600.000,00	DLHPP
	Jumlah	1.155.895.288,00	

5.3.5.1.3.6 Utang Belanja Pemeliharaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	739.773.482,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja pemeliharaan yang harus dibayar kepada supplier dan atau pemberi jasa, berupa jasa pemeliharaan rambu-rambu dan pemeliharaan bangunan gedung yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dilunasi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119 Rincian utang belanja pemeliharaan

No	Uraian	Jumlah	OPD
1	Utang Belanja Pemeliharaan Rambu Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Terat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Lainnya	159.447.496,00	Dislub
2	Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Terpat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	540.325.986,00	Disperdagkop UKM, Ditankortbun, Disnek Keawan, Inspektoral
	Jumlah	739.773.482,00	

5.3.5.1.3.7 Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	106.981.200,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan utang belanja barang dan jasa BOS pada SDN 01 Koto Tinggi Simalanggang yang harus dibayar kepada supplier dan atau pemberi jasa yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.8 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	2.225.881.845,10	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas sebesar Rp102.062.880,00 dan pada BLUD RSUD Achmad Darwis sebesar Rp2.123.818.965,10 yang harus dibayar kepada supplier dan atau pemberi jasa yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.9 Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	2.063.912.793,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja hibah yang harus dibayar kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 120 Rincian utang belanja hibah

No	Urutan	Jumlah	OPD
1	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibenruk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan	394.129.675,00	Disdik, Disbudparpora
2	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.285.999.805,00	Dispendagkop UKM, Distahortubun
3	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	373.784.313,00	Disbudparpora, Dispendagkop UKM, DPUPR, Disperinnaker
	Jumlah	2.063.912.793,00	

5.3.5.1.3.10 Utang Belanja Modal Alat Angkutan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	108.650.500,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal alat angkutan yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 121 Rincian utang belanja modal alat angkutan

No	Urutan	Jumlah
1	Utang Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	70.000.000,00
2	Utang Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	38.860.600,00
	Jumlah	108.860.600,00

5.3.5.1.3.11 Utang Belanja Modal Alat Pertanian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	26.000.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal alat-alat peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.12 Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	85.303.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.13 Utang Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	155.960.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal alat kesehatan umum lainnya pada Dinas Kesehatan yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.14 Utang Belanja Modal Komputer	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	331.500.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal personal computer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.15	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		45.000.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal peralatan bantu pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.16	Utang Belanja Modal Alat Peraga	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		20.600.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal peraga percantohan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.17	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		2.907.710.597,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal bangunan gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan berupa bangunan gedung kantor dan bangunan terbuka yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 122 Rincian utang belanja modal bangunan gedung

No	Uraian	Jumlah	OPD
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.280.510.597,00	Dipdik, Dinkas, DPUPR, Damkar
2	Utang Belanja Modal Bangunan Terbuka	627.200.000,00	DLHPP
	Jumlah	2.907.710.597,00	

5.3.5.1.3.18	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		17.639.007.799,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal jalan, irigasi dan jembatan pada Dinas PUPK berupa jalan kabupaten, jembatan pada jalan kabupaten yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 123 Rincian utang belanja modal jalan dan jembatan

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	17.288.878.108,00

No	Uraian	Jumlah
2	Utang Belanja Modal Sambatan pada Jalar Kabupaten	352.429.999,00
	Jumlah	17.839.007.799,00

5.3.5.1.3.19	Utang Belanja Modal Bangunan Air	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		562.330.200,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal bangunan air pada Dinas PUPR dan Dinas Perikanan berupa bangunan pembawa irigasi, bangunan pengaman pengembangan sumber air, dan bangunan pembuang air kotor yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124 Rincian utang belanja modal bangunan air

No	Uraian	Jumlah	OPD
1	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa irigasi	173.538.000,00	DPUPR
2	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	30.000.000,00	Diskan
3	Utang Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	358.782.200,00	DPUPR
	Jumlah	562.330.200,00	

5.3.5.1.3.20	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		325.727.575,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa alat musik yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.21	Utang Belanja Modal Hewan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		40.450.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja modal hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa ternak lainnya yang harus dibayar kepada supplier yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi.

5.3.5.1.3.22	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		2.802.997.695,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa pada PPKD yang harus dibayar kepada pemerintahan desa yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dilunasi. Rincian utang belanja bagi hasil terdapat pada **Lampiran 24**.

Dari utang belanja yang telah diuraikan di atas, diantaranya berupa utang kontraktual yang tidak dapat dibayarkan kepada rekanan atau pihak ketiga sebesar Rp26.119,518,715,02 pada 14 (empat belas) OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.125 Daftar utang kontraktual tahun 2022

No.	OPD	JUMLAH
		(Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,748,789,215.00
2	Dinas Kesehatan	342,141,302.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	18,148,080,899.00
4	Dinas Peradam Kebakaran	247,885,000.00
5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	81,082,800.00
6	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman	842,808,468.00
7	Dinas Perhubungan	199,447,498.00
8	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	486,121,241.00
9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	96,811,330.00
10	Dinas Perikanan	30,000,000.00
11	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,368,056,463.00
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	221,897,500.00
13	Inspektorat	188,519,000.00
14	Balai Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	48,900,000.00
Jumlah		26,119,518,715.00

Rincian utang kontraktual per OPD terdapat dalam **Lampiran 26**.

Adapun penyebab timbulnya utang kontraktual Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah :

1. Kesalahan Penganggaran
 - a. Penempatan SILPA BLUD dan SILPA DAK tahun 2021 tidak sesuai dengan peruntukan SILPA dimaksud.
SILPA BLUD tahun 2021 sebesar Rp7.852,394,780,50 dianggarkan ke belanja BLUD hanya sebesar Rp2.852,394,780,50 di tahun 2022. Sementara sisa SILPA BLUD sebesar Rp5.000.000.000,00 dianggarkan kepada belanja-belanja lain diluar belanja BLUD. SILPA DAK tahun 2021 yang seharusnya dianggarkan ke belanja-belanja sesuai ketentuan petunjuk teknis DAK justru dianggarkan kepada belanja-belanja selain DAK.
 - b. Penetapan target PAD melebihi potensi PAD.
Penetapan target untuk beberapa jenis pajak dan retribusi daerah melebihi potensinya sehingga target pendapatan asli daerah tidak bisa direalisasikan 100%. Rincian penetapan target PAD yang melebihi potensinya adalah sebagai berikut :
 - 1) Pajak Hotel

Penghitungan potensi penerimaan pajak hotel pernah dilakukan terhadap potensi hotel tahun 2019 dengan asumsi bahwa tingkat hunian hotel hanya sebesar 28,5% dimana diperkirakan kamar hotel hanya terisi setiap akhir pekan pada hari Sabtu dan Minggu. Jumlah penginapan yang ada saat itu adalah 32 buah diperoleh jumlah potensi sebesar Rp. 488.280.000 . Dengan asumsi yang sama dilakukan penghitungan potensi dengan jumlah penginapan sebanyak 75 buah tanpa memperhitungkan apakah penginapan tersebut sudah berizin atau belum, diperoleh angka potensi sebesar Rp 1.629.160.000,-. Meskipun persentase realisasi pada tahun 2022 hanya 6%, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya jumlah ini telah mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 jumlah realisasi sebesar Rp. 30.841.000,00.

- 2) Pajak Air Tanah
Target pajak air tanah tahun 2022 adalah sebesar Rp.290.000.000,00. Sementara berdasarkan data hasil penghitungan potensi pajak air tanah, potensi untuk tahun 2022 hanya Rp77.918.444,00.
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
Target PBB-P2 tahun 2022 adalah sebesar Rp.12.678.202.762,00. Sementara jumlah ketetapan PBB P2 tahun 2021 yang merupakan potensi PBB-P2 tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.443.576.091,00. Sehingga target yang ditetapkan tersebut melebihi potensi yang ada. Jumlah piutang PBB P2 sampai tahun 2021 adalah Rp. 9.455.817.234,00 sementara jumlah piutang PBB P2 yang tertagih setiap tahunnya rata-rata dibawah 200 juta.
 - 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Target retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp.1.050.000.000,00. Sementara potensinya hanya Rp400.000.000,00. penetapan target berada jauh di atas jumlah potensi yang ada.
 - 5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Target retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,00. Sementara potensi yang ada hanya sebesar Rp39.800.000,00.
 - 6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.124.000.000,00. Sementara potensi tahun 2022 hanya sebesar Rp527.000.000,00.
 - 7) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak ada realisasi dalam dua tahun terakhir, namun target yang ditetapkan justru mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari sebesar Rp. 43.200.000,00 di tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 190.869.360,00 di tahun 2022.
 - 8) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Target Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp.944.000.000,00. Sementara potensi tahun 2022 hanya Rp300.350.000,00,.
- c. Penetapan target pendapatan yang tidak/belum ada potensi atas pendapatan tersebut. Terdapat beberapa target pendapatan yang ditetapkan meskipun tidak ada potensi atas pendapatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
Target hasil pengelolaan dana bergulir ditetapkan berdasarkan besaran saldo kas dana bergulir yang terdapat pada tiga OPD yang direncanakan tidak akan

digulirkan lagi karena dianggap tidak memberikan hasil. Tidak adanya realisasi hasil pengelolaan dana bergulir disebabkan oleh belum diprosesnya regulasi yang mengatur mekanisme penyetoran dana bergulir dari rekening dana bergulir ke kas daerah

2) Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga ditargetkan akan diterima dari penempatan uang pemerintah daerah. Tidak adanya realisasi disebabkan oleh tidak adanya uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito. Sejak tahun 2020 realisasi dari item pendapatan ini adalah nol karena pemerintah daerah tidak lagi menempatkan dana dalam bentuk deposito.

3) Rendahnya Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 adalah sebesar Rp82.962.487.456,64 atau hanya 71,78% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp115.577.988.400,00. Rendahnya persentase realisasi pendapatan asli daerah (PAD) ini menyebabkan besarnya angka pelampauan pendapatan asli daerah (PAD). Rincian pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 126 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022

No.	Urutan	Anggaran	Realisasi	Pelampauan Penerimaan PAD Tahun 2022
1	Pajak Daerah	46.453.574.884,00	26.017.229.440,00	(20.436.345.444,00)
2	Kontribusi Daerah	7.659.360.360,00	3.124.547.676,00	(4.544.821.684,00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.493.233.016,30	4.439.265.064,00	(53.947.952,30)
4	Lain-lain PAD yang Sah	56.861.811.140,00	49.405.275.274,64	(7.596.535.865,36)
	Jumlah	115.577.988.400,00	82.962.487.456,64	(32.591.650.943,36)

Rendahnya capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah penetapan target pendapatan asli daerah yang melebihi potensi yang ada sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 tentang penganggaran.

3. Transfer keuangan ke daerah yang memperhitungkan SII-PA tahun sebelumnya

Penerimaan transfer keuangan ke daerah tahun 2022 tidak sesuai dengan jumlah alokasi transfer ke daerah tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat yang memperhitungkan SII-PA tahun sebelumnya untuk penyaluran transfer keuangan ke daerah pada tahun berjalan, sementara belanja yang akan dibiayai dari sumber dana transfer ke daerah tetap sebanyak alokasi.

Rincian pemotongan transfer keuangan ke daerah pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 127 Pemotongan Transfer Keuangan ke Daerah Tahun 2022

No.	Jenis Transfer Keuangan ke Daerah	Jumlah Pemotongan	Keterangan
1	Dana Alokasi Umum		

No	Jenis Transfer Keuangan ke Daerah	Jumlah Pemotongan	Keterangan
		755.000.000,00	Intersep untuk TNI Polri terkait dana penanganan Covid 19
		2.019.880.500,00	Pemotongan DAU atas sisa DAK non fisik tunjangan khusus guru berdasarkan KMK 35/2022
		237.300.000,00	Pemotongan DAU atas sisa DAK non fisik BOP PAUD
		100.000,00	Pemotongan DAU atas sisa DAK non fisik kesetaraan
		307.326,00	Pemotongan DAU atas sisa DAK non fisik BOK tambahan
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	24.660.314.670,00	SILPA DAK Non Fisik tahun 2021
	Jumlah	28.644.426.096,00	

SILPA DAK Non Fisik tahun 2021 sebesar Rp24.660.314.670,00 mengurangi penyaluran DAK Non Fisik tahun 2022. Sedangkan anggaran belanja DAK Non Fisik tetap sebesar alokasi DAK Non Fisik yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Sehingga untuk memenuhi belanja DAK Non Fisik tersebut harus diambil dari sumber pendapatan daerah yang lain.

4. Tidak Tertibnya Manajemen Kas

Kas yang tersedia pada Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 tidak sesuai dengan jumlah saldo kas yang seharusnya. Rincian kas yang seharusnya tidak dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.128 Kas yang seharusnya tidak dimanfaatkan

NO	uraian	per 31 Desember 2021	per 31 Desember 2022
A	Kas yang seharusnya tersedia :		
1	SILPA DAK Fisik	196.600.036,00	831.777.764,00
2	SILPA DAK Non Fisik	24.660.314.670,00	5.305.521.512,00
3	SILPA DBH CHT	90.343.198,00	6.664.938,00
4	BKK Provinsi	0,00	8.000.000.000,00
	Jumlah kas yang seharusnya tersedia	24.947.257.904,00	14.143.964.214,00
B	Kas yang tersedia di Kasda	7.031.584.618,49	496.522.396,09
	Kas yang seharusnya tidak dimanfaatkan (ketekoran kas daerah)	17.915.673.285,51	13.647.441.817,91
C			

Terjadinya ketekoran kas daerah disebabkan karena tidak tertibnya BUD/Kuasa BUD dalam melakukan pembayaran terhadap SPM yang diujukan OPD berdasarkan sumber dana dari masing-masing SP2D yang ditorbitkan.

5.3.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	0,00	3.747.763.784,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 tidak bersaldo.

5.3.6 Ekuitas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.749.948.115.826,84	1.755.275.420.873,01

Saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.749.948.115.826,84. Rincian ekuitas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3.7 Jumlah Kewajiban & Ekuitas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.790.494.541.075,94	1.767.966.763.468,46

Saldo akhir Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.790.494.541.075,94.

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Tahun 2022. Laporan Operasional menyajikan Pendapatan-LO dan Beban.

5.4.1 Pendapatan – LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.150.363.056.705,44	1.211.500.990.933,38

Pendapatan-LO Tahun 2022 adalah sebesar 1.150.363.056.705,44 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.211.500.990.933,38 terjadi kenaikan sebesar Rp1.913.253.029,83 atau 0,17% dengan rincian sebagai berikut.

Label 5.179 Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	84.957.538.215,22	82.624.520.080,38	2.333.018.134,84	2,82
2	Pendapatan Transfer-LO	1.044.232.945.868,42	1.002.618.753.751,00	-38.885.808.082,58	-3,57
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	21.172.572.831,80	46.963.717.102,00	-24.785.144.270,20	-53,83
	Jumlah	1.150.363.056.705,44	1.211.500.990.933,38	-61.137.934.227,94	-5,05

A.	Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		84.957.538.215,22	82.624.520.080,38

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hak pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp84.957.538.215,22 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp82.624.520.080,38 terjadi kenaikan sebesar Rp2.333.018.134,84 atau 2,82%. Kelompok Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 130 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	27.651.407.649,58	23.153.622.050,42	4.477.785.599,16	19,34
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	3.123.554.878,00	2.971.098.922,00	152.455.956,00	5,12
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	3.927.248.768,00	3.777.994.276,00	149.254.492,00	3,96
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	60.275.358.121,64	52.722.267.831,96	7.553.090.289,68	14,32
	Jumlah	84.957.538.215,22	82.624.520.080,38	2.333.018.134,84	2,82

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2022 sebesar Rp27.631.407.649,58 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp23.153.622.050,42 terjadi kenaikan sebesar Rp4.477.785.599,16 atau 0,29% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 131 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LO	45.151.000,00	30.841.000,00	14.310.000,00	46,40
2	Pajak Restoran-LO	1.512.829.171,00	1.308.485.117,00	204.344.054,00	15,62
3	Pajak Hiburan-LO	156.400.000,00	152.150.000,00	4.250.000,00	2,79
4	Pajak Reklame-LO	181.380.958,58	200.155.863,12	-18.774.904,54	-9,38
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	13.619.855.214,00	11.959.192.578,00	1.660.662.636,00	13,89
6	Pajak Air Tanah-LO	14.874.724,00	3.951.983,00	10.922.741,00	276,39
7	Pajak Sarang Burung walet-LO	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
8	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	5.827.845.839,00	3.754.286.745,00	2.073.358.894,00	55,23
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	3.443.576.091,00	3.438.060.929,00	7.895.162,00	0,23
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.829.144.794,00	2.308.867.835,00	520.276.959,00	22,53
Jumlah		27.631.407.848,58	23.153.622.050,42	4.477.785.698,16	19,34

Dari Pendapatan Pajak Daerah - LO di atas tersebut dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA sebagai mana tabel di bawah ini:

Tabel 5. 132 Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah - LO

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Replisasi LRA (Rp)	Realisasi-LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pajak Hotel	45.551.000,00	45.151.000,00	0,00
2	Pajak Restoran	1.512.829.171,00	1.512.829.171,00	0,00
3	Pajak Hiburan	156.400.000,00	156.400.000,00	0,00
4	Pajak Reklame-	181.360.956,58	181.360.956,58	-333.658,58
5	Pajak Penerangan Jalan-	13.519.855.274,00	13.519.855.274,00	0,00
6	Pajak Air Tanah	14.874.724,00	14.874.724,00	0,00
7	Pajak Sarang Burung Walet-	550.000,00	550.000,00	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-	5.816.458.339,00	5.827.845.839,00	-11.187.300,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan -	1.840.918.838,00	3.443.576.091,00	-1.602.657.253,00
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-	2.829.144.794,00	2.829.144.794,00	0,00
Jumlah		28.017.229.440,00	27.631.407.848,58	-1.614.178.208,88

2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada tahun 2022 sebesar Rp3.123.554.678,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.971.098.922,00 terjadi penurunan sebesar Rp152.455.756,00 atau 5,13% dengan rincian masing masing Hasil Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 133 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Retribusi Pelayanan Persampahan- LO	1.133.385.500,00	99.678.000,00	13.507.500,00	13,52
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	2.011.400,00	7.849.000,00	12.255.500,00	166,30

No.	Uraian	2022	2021	Konfirmasi/	%
		(Rp)	(Rp)	Perubahan	
	Umum - LO				
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	593.783.500,00	472.175.000,00	121.608.500,00	25,75
1	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	25.480.000,00	24.800.000,00	680.000,00	2,74
5	Retribusi pelayanan terahera ulang	2.550.450,00	2.533.350,00	-17.100,00	-3,15
6	Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah - LO	387.535.000,00	436.411.000,00	-48.875.000,00	-11,20
7	Retribusi Terminal - LO	283.055.300,00	380.207.300,00	-97.152.000,00	-21,42
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	21.112.000,00	23.263.000,00	-2.151.000,00	-9,32
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	1.312.182.000,00	1.134.628.000,00	177.554.000,00	13,55
10	Penjualan Produk Usaha Daerah-LO	74.291.000,00	55.157.500,00	19.133.500,00	34,70
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	290.064.428,00	354.005.772,00	-63.941.344,00	-18,08
	Jumlah	3.123.554.678,00	2.971.098.922,00	152.455.756,00	5,13

Dari Pendapatan Retribusi Daerah -LO di atas apabila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah -LRA Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.134 Perbandingan realisasi pendapatan Retribusi Daerah -LRA dengan realisasi pendapatan Retribusi Daerah -LO Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi-LRA	Realisasi-LO	Salah
		(Rp)	(Rp)	
1	Retribusi Pelayanan Fersampahan- LO	14.378.500,00	13.385.500,00	993.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	20.114.500,00	22.114.600,00	0,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	401.540.000,00	401.040.000,00	0,00
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	25.480.000,00	25.180.000,00	0,00
5	Retribusi pelayanan terahera ulang	2.550.450,00	2.550.450,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	580.279.500,00	580.279.500,00	0,00
7	Retribusi Terminal - LO	283.055.300,00	283.055.300,00	0,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	21.112.000,00	21.112.000,00	0,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	1.312.182.000,00	1.312.182.000,00	0,00
10	Penjualan Produk Usaha Daerah-LO	74.291.000,00	74.291.000,00	0,00
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	290.064.428,00	280.064.428,00	0,00
	Jumlah	3.124.547.678,00	3.123.554.678,00	993.000,00

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah LRA dengan Pendapatan Retribusi - LO dikarenakan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman terdapat penyertaan sebesar Rp993.000,00 yang merupakan selisih Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2022 sebesar Rp7.620.000,00 dengan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2021 yang belum dicatat sebesar Rp8.613.000,00.

Rekapitulasi pendapatan Retribusi Daerah-LO per OPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.135 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per OPD

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penunahan Rakyat	578.914.428,00	182.505.000,00	396.409.428,00	217,20
2	Dinas Pemadam Kebakaran	25.480.000,00	24.800.000,00	680.000,00	2,74
3	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman	113.385.500,00	99.878.000,00	13.507.500,00	13,52
4	Dinas Pemubangan	732.321.800,00	853.513.500,00	-121.191.500,00	-15,18
5	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	2.550.450,00	2.033.350,00	-517.100,00	-20,27
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	354.085.772,00	-354.085.772,00	-100,00
7	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.313.127.600,00	1.138.870.000,00	174.257.600,00	15,30
8	Dinas Perikanan	82.356.000,00	108.302.500,00	-25.946.500,00	-24,85
9	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	73.136.000,00	28.896.500,00	44.239.500,00	153,10
10	Badan Keuangan	142.743.500,00	162.103.500,00	-19.360.000,00	-11,94
11	Sekretariat Daerah	51.546.000,00	8.711.000,00	42.835.000,00	497,88
Jumlah		3.123.554.678,00	2.871.085.822,00	252.468.856,00	8,82

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp3.927.216.766,00 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3.777.591.276,00 terjadi kenaikan sebesar Rp149.625.490,00 atau 3,96% merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada beberapa Perusahaan Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp50.275.359.121,64 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp52.722.207.831,96 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.446.848.710,32 atau 4,64% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Perjualan Aset Daerah yang Tidak	40.200.090,00	825.949.056,00	(785.748.967,00)

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
	Lip-sahkan-LO			
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipesahkan-LO	476.052.048,00	0,00	476.052.048,00
3	Penerimaan Jasa Giro-LO	2.433.386.140,00	3.887.981.799,00	(1.254.595.649,00)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergilir-LO	0,00	(5.823.500,00)	5.823.500,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)-LO	2.843.848.280,64	2.290.542.950,98	550.105.321,68
6	Pendapatan Denda Retrusi-LO	0,00	59.290.000,00	(59.290.000,00)
7	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda LO	0,00	68.000.000,00	(68.000.000,00)
8	Pendapatan Dan Pengembalian-LO	138.427.630,00	90.531.221,00	45.896.408,00
9	Pendapatan BLUD-LO	44.348.644.924,00	45.705.738.307,00	(1.357.091.393,00)
	Jumlah	50.275.358.121,64	52.722.207.831,98	(2.446.848.710,32)

Tabel 5.137 Rincian Perbedaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA dengan Perbedaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi-LRA (Rp)	Realisasi-LO (Rp)	Selisih
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipesahkan-LO	40.200.089,00	40.200.089,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipesahkan-LO	476.052.048,00	476.052.048,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro-LO	2.433.386.140,00	2.433.386.140,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)-LO	2.843.848.280,64	2.843.848.280,64	0,00
4	Pendapatan Dan Pengembalian-LO	138.427.630,00	138.427.630,00	0,00
5	Pendapatan BLUD-LO	43.954.613.125,00	44.348.644.924,00	(394.031.799,00)
	Jumlah	48.881.327.322,64	50.275.358.121,64	(394.031.799,00)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan perbedaan antara Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dengan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA terdapat pada Pendapatan BLUD dimana terdapat penyesuaian piutang klaim jasa layanan tahun 2022 sebesar Rp394.031.799,00 pada BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD Achmad Darwis.

B.	Pendapatan Transfer – LO	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		1.044.232.945.658,42	1.082.918.753.751,00

Pendapatan Transfer-LO pada tahun 2022 sebesar Rp1.044.232.945.658,42 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.082.918.753.751,00 terjadi penurunan sebesar Rp38.685.808.092,58 atau 3,57% yang mana di dalamnya terdiri dari:

Tabel 5. 138 Rincian Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO	982.368.579.947,42	940.053.709.184,00	42.314.870.763,42
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	0,00	83.917.738.300,00	(83.917.738.300,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	81.364.365.711,00	58.947.305.267,00	2.917.060.444,00
	Jumlah	1.044.232.945.658,42	1.082.918.753.751,00	(38.685.808.092,58)

Rincian masing-masing jenis Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat -LO tahun 2022 sebesar Rp982.368.579.947,42 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp940.053.709.184,00 mengalami kenaikan sebesar Rp42.314.870.763,42 atau 4,50%.

Tabel 5. 139 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	%
1	Bagi Hasil Pajak-LO	14.736.840.081,42	14.600.851.184,00	136.088.817,42	1,34
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	5.216.005.108,00	3.083.582.931,00	2.132.444.477,00	68,58
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	602.756.183.074,00	688.668.671.000,00	(-3.912.887.928,00)	-0,57
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	88.518.792.418,00	72.258.487.494,00	26.259.794.924,00	36,34
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisk-LO	181.851.156.968,00	123.431.928.585,00	17.819.230.371,00	10,78
	Jumlah	982.368.579.947,42	940.053.709.184,00	42.314.870.763,42	4,50

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO

Tidak terdapat Transfer Pemerintah Pusat Lainnya/Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus-LO pada Tahun 2022 .

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi) – LO

Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2022 sebesar Rp61.864.365.711,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp58.947.305.267,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.917.060.444,00 atau sebesar 4,95% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 140 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor-LO	16.367.074.258,00	13.775.742.526,00	2.591.331.830,00	18,81
2	Bea Balik Nanti Kendaraan Bermotor-LO	6.892.316.754,00	7.177.043.683,00	(134.726.789,00)	(1,89)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	21.774.113.931,00	19.383.607.856,00	2.390.506.075,00	12,33
4	Pajak Air Permukaan	129.856.739,00	96.080.348,00	33.776.393,00	35,15
5	Pajak Rokok-LO	10.801.054.819,00	18.594.830.874,00	(1.963.826.055,00)	(10,58)
	Jumlah	61.864.365.711,00	58.947.305.267,00	2.917.060.444,00	4,95

C. Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

21.172.572.831,80

45.957.717.102,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO pada tahun 2022 sebesar Rp21.172.572.831,80 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp45.957.717.102,00 terjadi penurunan sebesar Rp24.785.144.270,20 atau 53,93% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 141 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ penurunan	%
1	Pendapatan Hibah-LO	16.245.605.866,80	42.266.629.374,00	(26.041.223.507,20)	(61,58)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	4.926.966.965,00	3.670.807.728,00	1.256.079.237,00	34,22
	Jumlah	21.172.572.831,80	45.957.717.102,00	(24.785.144.270,20)	(53,93)

Rincian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berupa Hibah-LO Tahun 2022 dan 2021 terlampir pada OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 142 Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Hibah LO per OPD

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.418.913.238,00
2	Dinas Kesehatan	417.785.547,70	549.212.980,00
3	RSUD dr.Achmad Dahwis	749.593.680,00	16.147.897.200,00

No.	Urutan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	4.103.399.600,00
5	Dinas Sosial	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	995.292.040,00
7	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	2.933.244.000,00
8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	112.500.000,00
9	PPKD	14.474.513.770,00	13.091.614.016,00
10	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	189.042.989,10	1.708.958.300,00
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	47.500.000,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	410.413.300,00	181.000.000,00
13	Dinas Pemadam Kebakaran	4.255.580,00	0,00
	Jumlah	16.245.605.868,80	42.285.829.374,00

Perbandingan Pendapatan Hibah-LRA dengan Pendapatan Hibah- LO tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 143 Perbandingan Pendapatan Hibah-LRA dengan Pendapatan Hibah LO

No.	OPD	Pendapatan Hibah-LRA (Rp)	Pendapatan Hibah-LO (Rp)	Penyesuaian (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	417.786.547,70	417.786.547,70
2	RSUD dr. Achmad Darwis	0,00	749.593.680,00	749.593.680,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	4.255.580,00	4.255.580,00
4	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	0,00	189.042.989,10	189.042.989,10
5	PPKD	14.474.513.770,00	14.474.513.770,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	410.413.300,00	410.413.300,00
	Jumlah	14.474.513.770,00	16.245.605.868,80	1.771.092.098,80

Pendapatan Hibah LO adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pihak lain yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pendapatan Hibah LO tahun 2022 diterima oleh OPD:

- a. Dinas Kesehatan : Pendapatan Hibah sebesar Rp417.786.547,70 terdiri atas hibah pengadaan makanan tambahan (PMT).
- b. RSUD dr. Achmad Darwis : Pendapatan Hibah sebesar Rp749.593.680,00 merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan

sebesar Rp533.373.500,00 dari Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp216.220.180,00.

- c. Dinas Permadani Kebakaran : Pendapatan Hibah sebesar Rp4.255.580,00 merupakan hibah tanah dari Nagari Banja Loweh.
- g. Dinas Tataanian Paugat, Hortikultura dan Perkebunan : Pendapatan Hibah sebesar Rp189.042.989,10,00 terdiri atas hibah dari Kementerian Pertanian.
- h. Badan Keuangan (PPKD) : Pendapatan Hibah sebesar Rp14.474.513.770,00,00 merupakan hibah dari IPDMJP.
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Pendapatan Hibah sebesar Rp410.413.300,00 merupakan hibah dari BNPB.

5.4.2 Beban - LO

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

1.153.333.220.004,59

1.189.606.735.472,76

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Jumlah Beban Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebesar Rp1.153.333.220.004,59 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.189.606.735.472,76 mengalami penurunan sebesar Rp36.273.515.468,17 atau sebanyak 3,05% yang merupakan Beban Operasi dan Beban Transfer.

Beban Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat dari uraian sebagai berikut.

Tabel 5. 144 Rincian Beban Operasi

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kontribusi/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	845.760.898.698,53	856.371.369.638,16	-11.090.482.940,63	-1,89
2	Beban Barang Jasa	235.540.490.029,67	259.627.897.898,84	-24.087.206.987,37	-9,28
3	Beban hibah	33.976.149.887,00	33.480.010.697,00	487.138.980,00	1,45
4	Beban Serbuan Sosial	6.531.013.940,00	8.805.037.863,00	-2.074.044.023,00	-24,10
5	Beban Penyusutan dan amortisasi	147.808.607.328,97	144.818.337.308,49	3.082.268.722,48	2,14
6	Beban penyisihan Piutang	1.151.717.551,44	1.237.055.311,98	-86.347.760,49	-6,90

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenalkan/ Penurunan	%
7	Beban Lain – lain	5.543.889.103,58	4.653.171.528,24	890.618.607,34	18,20
8	Beban Transfer	77.397.666.036,00	80.808.986.142,00	-3.401.319.106,00	-4,22
	Jumlah	1.153.333.220.004,59	1.189.608.735.472,78	-36.275.515.467,67	-3,05

Berdasarkan tabel di atas dapat dirinci Beban Operasi sebagai berikut.

A. Beban Pegawai – LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	645.280.886.698,53	656.371.369.639,16

Beban Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah sebesar Rp645.280.886.698,53. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp656.371.369.639,16 terjadi penurunan sebesar Rp11.090.482.940,63 atau sebesar 1,69% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 145 Rincian Beban Pegawai-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenalkan/ Penurunan	%
1	Beban gaji dan tunjangan – LO	410.344.851.837,00	428.550.031.922,00	(18.206.180.085,00)	(4,82)
2	Beban tambahan penghasilan PNS – LO	58.360.850.206,00	53.756.572.704,00	4.604.277.502,00	9,57
3	Beban Tarif/Retribusi Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objekif Lainnya ASN	134.961.850.884,53	148.514.131.759,16	(13.552.280.884,83)	(9,13)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.512.541.556,00	11.512.857.284,00	(315.736,00)	(0,00)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	167.292.780,00	167.580.820,00	(287.840,00)	(0,17)
6	Beban Pegawai BOS	11.515.110.000,00	10.145.433.706,00	1.369.676.294,00	13,50
7	Beban Pegawai BLUD	9.908.485.425,00	5.230.324.134,00	4.678.161.291,00	89,44
8	Beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	510.304.000,00	493.637.500,00	16.666.500,00	3,38
	Jumlah	645.280.886.698,53	656.371.369.639,16	(11.090.482.940,63)	(1,69)

Dari Beban Pegawai - LO di atas apabila diperbandingkan dengan Belanja Pegawai LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5. 146 Rincian Perubahan Belanja Pegawai - LRA dengan Beban Pegawai-LO

No.	Uraian	Jumlah Belanja Pegawai-LRA (Rp)	Jumlah Beban Pegawai-LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban gaji dan tunjangan ASN-LO	418.815.778.361,00	428.344.651.837,00	(471.126.544,00)
2	Beban tambahan penghasilan ASN LO	58.360.860.209,00	58.360.860.209,00	0,00
3	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektk lainnya ASN LO	135.010.130.394,40	134.961.650.894,53	-48.478.499,87
4	Beban gaji dan tunjangan OPHL-LO	11.512.641.556,00	11.512.511.556,00	0,00
5	Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH-LU	167.797.790,00	167.292.790,00	0,00
6	Beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	510.304.000,00	510.304.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD-LO	7.954.867.773,00	6.908.485.425,00	2.013.797.652,00
8	Beban Pegawai BOS-LO	11.515.110.000,00	11.515.110.000,00	0,00
	Jumlah	643.786.896.090,40	645.280.886.698,53	1.494.191.608,13

Terdapat beberapa OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Pegawai dengan jumlah sebesar Rp1.494.191.608,13 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 147 Penyesuaian beban pegawai -LO

No.	Nama OPD	Penyesuaian (Rp)	Keterangan
1	Bantuan Keuangan	(471.126.544,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp471.126.544,00 berupa tagihan kekurangan iuran wajib Penda 4% kepada BPJS.
2	Dinas Pendidikan	(40.050.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp40.050.000 pada beban honorarium pengadaan barang dan jasa
3	Dinas Kesehatan	(23.415.600,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp23.415.600,00) merupakan beban jasa pelayanan kesehatan
4	RSIB Dr. Achmad Dahwis	2.013.797.652,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp2.013.797.652,00 merupakan beban pegawai BLUD
5	Dinas Pamaran Ketukaran	(3.300.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp3.300.000,00) pada beban honorarium pengadaan barang dan jasa
6	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Perumahan	(6.300.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp6.300.000,00) pada beban honorarium pengadaan barang dan jasa
7	Dinas Perhubungan	(2.450.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp2.450.000,00) pada beban honorarium pengadaan barang dan jasa

R. Beban Barang Jasa-LO

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

235.540.490.929,07

259.627.697.886,94

Beban Barang Jasa-LO Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah sebesar Rp235.540.490.929,07 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp259.627.697.886,94 terjadi penurunan sebesar Rp24.087.206.957,37 atau 9,28% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 148 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Persediaan	55.915.783.397,61	66.193.848.815,92	-10.278.065.418,31	15,63
2	Beban Jasa	121.561.811.722,46	139.430.888.854,02	-17.769.076.131,56	12,74
3	Beban Pemeliharaan	12.051.398.781,00	12.962.659.307,00	-911.260.526,00	-7,03
4	Beban Perjalanan Dinas	45.911.497.028,00	41.040.304.910,00	4.871.192.118,00	11,87
	Jumlah	235.540.490.929,07	259.627.697.886,94	-24.087.206.957,87	-9,28

Beban Persediaan 2022 dan 2021 tersebut dapat dirinci per OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 149 Rincian Beban Persediaan per OPD

No.	OPD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.723.129.243,00	18.344.222.408,00
2	Dinas Kesehatan	7.628.961.882,45	7.857.744.274,82
3	RSUD dr.Achmad Darwis	9.897.687.377,16	9.275.748.781,10
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	582.557.100,00	7.211.830.015,00
5	Satuan Polisi Pamong Praje	204.508.525,00	793.235.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	145.955.964,00	692.080.900,00
7	Dinas Sosial	255.990.398,00	344.650.184,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	197.270.980,00	170.558.700,00
9	Dinas Pangan	554.898.375,00	1.379.525.190,00
10	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	907.653.627,00	748.119.980,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	501.832.838,00	476.562.455,00
12	Dinas Pelembagaan Masyarakat Desa	577.228.400,00	338.708.549,00
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB SP3A	761.706.114,00	1.952.650.781,00
14	Dinas Perhubungan	559.573.292,00	508.628.482,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	465.445.932,00	562.933.410,00
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	297.011.530,00	362.030.487,00
17	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	208.658.570,00	217.287.100,00
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.332.981.165,00	877.105.885,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71.963.500,00	133.943.300,00
20	Dinas Perikanan	395.247.000,00	454.876.178,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.135.125.100,00	588.299.486,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	498.444.580,00	582.749.985,00

No.	OPD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
23	Inspektorat	232.599.728,00	489.834.168,00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	334.894.958,00	541.497.191,00
25	PPKD	0,00	0,00
26	Badan Keuangan	1.353.825.975,00	1.440.709.300,00
27	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	253.233.027,00	261.838.330,00
28	Sekretariat Daerah	6.138.602.831,00	6.011.778.852,00
29	Sekretariat LPHU	2.849.092.000,00	2.310.435.140,00
30	Kecamatan Gunung Dimeh	81.854.700,00	51.372.800,00
31	Kecamatan Bukit Barisan	60.546.000,00	38.784.000,00
32	Kecamatan Suiki	74.419.700,00	30.809.600,00
33	Kecamatan Guguk	94.162.000,00	86.223.300,00
34	Kecamatan Mungka	282.087.620,00	63.214.300,00
35	Kecamatan Akabiluru	80.210.100,00	40.944.300,00
36	Kecamatan Payakumbuh	62.552.500,00	48.925.100,00
37	Kecamatan Luak	59.965.200,00	46.038.600,00
38	Kecamatan Lurah Sago Helaban	86.268.200,00	74.411.125,00
39	Kecamatan Sijujuh Lino Nagan	90.350.400,00	50.175.400,00
40	Kecamatan Harau	103.209.356,00	64.479.200,00
41	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	62.245.000,00	48.474.000,00
42	Kecamatan Kapur IX	91.181.360,00	48.900.180,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	211.893.600,00	129.148.300,00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	393.709.800,00	768.281.212,00
Jumlah		55.815.783.387,81	68.193.848.815,92

Terdapat 13 (tiga belas) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Persediaan dengan jumlah sebesar Rp32.069.699,30 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.150 Rincian Penyesuaian Beban Persediaan per OPD

No.	Nama OPD	Penyesuaian (Rp)	Keterangan
1	Diria Pendidikan dan Kebudayaan	37.795.831,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp37.795.831,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa.
2	Diras Kesehatan	(412.812.547,70)	Terdapat danyesuaian sebesar (Rp412.812.547,00) yang merupakan terdiri dari kapitalisasi barang jasa sebesar Rp5.174.000,00 dan penyesuaian pada persediaan awal neraca sebesar (Rp417.786.547,70)
3	RSLUD dr Achmad Darwis	(451.773.389,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp451.773.389,00) yang merupakan selisih utang persediaan barang

No.	Nama OPD	Penyesuaian (Rp)	Keterangan
			tahun lalu dengan tahun ini.
4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.850.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.850.000,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa.
5	Dinas Pambudayaan Masyarakat dan Desa	1.750.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.750.000,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa.
6	Dinas Pertambangan	2.400.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp2.400.000,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa.
7	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	452.474.864,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp452.474.864,00 yang merupakan selisih barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tahun lalu dengan tahun ini.
8	Dinas Perikanan	148.584.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp148.584.000,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa.
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	29.975.800,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp29.975.800,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa.
10	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	7.804.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp7.804.000,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa.
11	Sekretariat Daerah	150.221.121,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp150.221.121,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa.
12	Sekretariat DPRD	7.500.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp7.500.000,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa.
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.000.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp15.000.000,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa.
Jumlah		32.088.688,00	

Rincian Beban Persediaan per OPD Tahun 2022 tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran 18 Laporan Keuangan Daerah ini.

Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci per OPD sebagai berikut.

Tabel 5.151 Rincian Beban Jasa per OPD

No.	OPD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.735.042.391,00	14.018.716.527,00
2	Dinas Kesehatan	21.267.017.133,35	34.595.393.492,92
3	HSMD dr.Achmad Darwis	6.382.269.988,10	15.589.688.872,10
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.040.714.208,00	3.272.688.220,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.681.067.707,00	2.519.861.350,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	5.752.915.154,00	5.013.391.993,00
7	Dinas Sosial	558.377.261,00	1.263.496.951,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	970.018.747,00	1.038.237.068,00
9	Dinas Pangan	1.597.451.477,00	1.004.111.894,00

No.	OPD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
10	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	1.995.920.374,00	2.435.756.204,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	662.976.103,00	831.802.771,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.079.811.312,00	881.890.701,00
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB & P3A	2.998.483.509,00	4.258.747.627,00
14	Dinas Pertubuhan	8.247.051.753,00	8.986.319.727,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.505.738.428,00	3.956.888.637,00
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	1.289.032.862,00	1.694.478.779,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelebaran Satu Pintu	580.191.444,00	575.619.285,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.161.402.790,00	3.015.084.485,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	729.557.017,00	512.595.414,00
20	Dinas Perikanan	745.398.093,00	982.360.124,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.340.348.387,00	4.884.052.995,00
22	Dinas Perernakan dan Kesehatan Hewan	1.085.830.160,00	468.318.448,00
23	Inspektoral	1.060.603.100,00	385.822.750,00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.125.488.637,00	1.425.513.792,00
25	Badan Keuangan	5.103.482.085,00	5.004.136.088,00
26	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.812.448.421,00	2.470.570.714,00
27	Sekretariat Daerah	11.121.706.410,00	9.895.424.827,00
28	Sekretariat DPRD	3.280.812.885,00	3.738.277.909,00
29	Kecamatan Gunung Omei	62.708.565,00	47.357.741,00
30	Kecamatan Bukit Barisan	97.831.555,00	87.714.028,00
31	Kecamatan Sulu	91.519.536,00	87.251.827,00
32	Kecamatan Gupuk	98.450.897,00	119.823.800,00
33	Kecamatan Mungka	395.805.451,00	132.507.885,00
34	Kecamatan Akabitu	88.080.852,00	66.040.701,00
35	Kecamatan Payakumbuh	126.381.890,00	125.586.673,00
36	Kecamatan Lusk	150.544.721,00	150.508.385,00
37	Kecamatan Lareh Sago Halaban	209.416.317,00	158.139.585,00
38	Kecamatan Sibujuh Limu Nagari	87.085.518,00	75.119.518,00
39	Kecamatan Harau	119.195.814,00	122.568.891,00
40	Kecamatan Pangkalan Kota Baru	153.051.234,00	163.772.479,00
41	Kecamatan Kepur IX	309.046.398,00	223.733.641,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.151.874.927,00	923.902.408,00
43	Badan Penyelenggaraan Bermana Daerah	1.154.376.642,00	2.154.443.317,00
	Jumlah	121.661.811.722,46	139.430.886.854,02

Perbandingan Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa LRA tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 152 Perbandingan Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LRA per OPD

No.	OPD	Belanja Jasa (Rp)	Beban Jasa (Rp)	Penyesuaian (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.488.386.920,00	15.735.042.391,00	(246.655.471,00)
2	Dinas Kesehatan	21.265.154.869,00	21.267.017.133,36	(852.464,00)
3	RSUD dr. Achmad Darwis	8.271.400.476,00	6.362.200.888,10	1.909.199.487,90
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.043.313.891,00	3.040.714.208,00	2.599.683,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.661.067.707,00	1.661.067.707,00	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	5.750.299.538,00	5.752.916.154,00	(2.616.616,00)
7	Dinas Sosial	552.687.261,00	558.377.261,00	(5.710.000,00)

No.	OPD	Belanja Jasa (Rp)	Beban Jasa (Rp)	Penyesuaian (Rp)
8	Dinas Perencanaan dan Tenaga Kerja	870.018.747,00	870.018.747,00	0,00
9	Dinas Pangan	376.601.477,00	1.597.451.477,00	(1.220.850.000,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman	1.877.385.074,00	1.696.900.374,00	181.484.700,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	851.119.480,00	862.975.103,00	(11.855.623,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.047.311.312,00	2.373.811.312,00	(26.500.000,00)
13	Dinas Pemandirian, Penyaluran KB & PIA	2.809.351.009,00	2.968.403.509,00	(159.052.500,00)
14	Dinas Perhubungan	8.240.491.753,00	8.247.051.753,00	2.440.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.505.705.828,00	3.505.738.428,00	(32.600,00)
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.153.607.022,00	1.269.012.662,00	(115.405.640,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	560.180.734,00	560.181.444,00	(10.710,00)
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.289.762.235,00	4.404.402.790,00	(125.349.445,00)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	729.637.017,00	729.637.017,00	0,00
20	Dinas Perikanan	894.028.033,00	745.398.033,00	(148.630.000,00)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.217.319.587,00	6.340.348.397,00	(123.028.810,00)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	895.397.471,00	1.085.650.108,00	(190.252.636,00)
23	Inspektoral	999.563.456,00	1.060.603.100,00	(61.039.644,00)
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1.079.112.157,00	1.125.499.612,00	(46.387.455,00)
25	Badan Keuangan	5.102.834.053,00	5.103.482.085,00	(648.032,00)
26	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.612.448.421,00	2.612.448.421,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	10.971.087.589,00	11.121.705.410,00	(150.617.821,00)
28	Sekretariat DPRD	3.291.431.192,00	3.280.872.685,00	10.558.507,00
29	Kecamatan Ciumingur	62.208.586,00	62.208.586,00	0,00
30	Kecamatan Bukit Barisan	97.831.655,00	97.831.655,00	0,00
31	Kecamatan Suliki	92.019.538,00	94.519.636,00	(2.500.098,00)
32	Kecamatan Guguk	98.150.997,00	98.450.997,00	(300.000,00)
33	Kecamatan Mungka	348.106.451,00	385.606.451,00	(37.500.000,00)
34	Kecamatan	85.872.952,00	86.060.852,00	(187.900,00)

No.	OPD	Belanja Jasa (Rp)	Beban Jasa (Rp)	Penyesuaian (Rp)
	Akabikuru			
36	Kecamatan Payakumbuh	126.381.850,00	126.391.850,00	0,00
37	Kecamatan L. Rak	150.807.721,00	150.844.721,00	(37.000,00)
38	Kecamatan Lereh Sago Halaban	208.416.317,00	208.416.317,00	0,00
39	Kecamatan Situjuh Lm. Negeri	97.073.126,00	97.085.516,00	(18.390,00)
40	Kecamatan Harau	113.413.510,00	113.195.644,00	217.866,00
41	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	153.173.859,00	153.051.234,00	122.625,00
42	Kecamatan Kep. IX	303.045.399,00	303.045.399,00	0,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.136.206.500,00	1.151.874.927,00	(15.668.427,00)
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.154.378.642,00	1.154.378.642,00	0,00
	Jumlah	117.953.812.978,36	121.651.811.722,46	(3.707.998.744,10)

Terdapat 34 (tiga puluh empat) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Jasa yaitu:

Tabel 5. 153 Rincian Penyesuaian Beban Jasa per OPD

No.	Nama OPD	Penyesuaian (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	248.955.471,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp248.955.471,00 yang merupakan terdiri dari selisih utang air, listrik dan telepon tahun ini dengan tahun lalu sebesar Rp1.824.271,00. Beban Hadiah yang Bersifat Perkmnnaan sebesar Rp140.050.000,00 dan Utang Beban Barang dan Jasa POK sebesar Rp105.931.200,00.
2	Dinas Kesehatan	852.464,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp852.464,00 yang merupakan terdiri dari selisih Utang Jasa Kantor tahun ini dengan tahun lalu sebesar Rp240.464,00. Beban Utang yang Diberikan Pada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat. sebesar Rp612.000,00.
3	NSUD dr. Achmad Darwis	(1.903.130.497,90)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp1.903.130.497,90) yang merupakan terdiri dari selisih Utang Jasa Kantor tahun ini dengan tahun lalu.
4	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang	(7.569.683,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp7.569.683,00) yang merupakan terdiri dari selisih Utang Listrik tahun ini dengan tahun lalu.
5	Dinas Pemadam Kebakaran	2.598.683,00	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp2.598.683,00) yang merupakan terdiri dari selisih Utang Telepon, Air dan Listrik tahun ini dengan tahun lalu.
6	Dinas Sosial	5.710.300,00	Terdapat penyesuaian sebesar

No.	Nama OPD	Penyesuaian (Rp)	Keterangan
			Rp5.710.000,00 yang merupakan terdiri dari Beban Utang yang Diberikan Pada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebesar Rp5.500.000,00 dan Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp210.000,00.
7	Dinas Pangan	1.220.850.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.220.850.000,00 yang merupakan Beban Utang yang Diberikan Pada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.
8	Dinas Lingkungan Hidup, perumahan Rakyat dan Perumahan	(181.484.700,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp181.484.700,00) yang merupakan terdiri dari penyesuaian Beban Jasa Kantor sebesar (Rp145.750.000,00) dan penyesuaian pada Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar (Rp35.734.700,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.855.623,00	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp1.855.623,00) yang merupakan terdiri dari selisih Utang Telepon, Air dan Listrik tahun ini dengan tahun lalu.
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.500.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp28.500.000,00 yang merupakan Beban Hadiah yang Bersifat Pertumbuhan.
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPP dan Perlindungan Anak	179.132.500,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp179.132.500,00 yang merupakan Beban Utang yang Diberikan Pada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.
12	Dinas Perhubungan	(2.440.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp2.440.000,00) yang merupakan Penyesuaian Beban Jasa Kantor.
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.800,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp32.800,00 yang merupakan terdiri dari selisih Utang tagihan air tahun ini dengan tahun lalu.
14	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	116.605.640,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp116.605.640,00 yang merupakan terdiri dari penyesuaian Beban Bimbingan Teknis sebesar (Rp16.014.750,00), Beban Penghargaan Suku Prestasi sebesar Rp8.500.000,00 dan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp123.020.400,00.
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.710,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp10.710,00 yang merupakan terdiri dari selisih Utang tagihan air tahun ini dengan tahun lalu.
16	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	(125.349.445,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp125.349.445,00) yang merupakan terdiri dari penyesuaian Beban Jasa Kantor (Rp89.520.805,00),

No.	Nama OPD	Penyesuaian (Rp)	Keterangan
			Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar (Rp216.828.640,00), Beban Hadiah yang Bersifat Perimbangan sebesar Rp100.000.000,00 dan Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp91.000.000,00.
17	Disas Perikanan	51.370.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp51.370.000,00 yang merupakan terdiri dari penyesuaian Utang Surat Kabar tahun lalu sebesar Rp280.000,00 dan Beban Uang yang Diberikan Pada Pihak Ketiga Pihak Lain Masyarakat sebesar Rp51.110.000,00
18	Disas Pariwisata, Pangeran, Harkultura dan Perkebunan	3.123.028.800,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp3.123.028.800,00 yang merupakan terdiri dari penyesuaian Utang Listrik sebesar (Rp5.423.200,00), Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp109.950.000,00 dan Beban Transfer Keuangan TKDD sebesar Rp3.018.500.000,00.
19	Disas Peternakan dan Kesehatan Hewan	690.232.635,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp690.232.635,00 yang merupakan terdiri dari selisih tagihan air tahun ini dengan tahun lalu sebesar (Rp651.170,00), Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar (Rp21.527.695,00) dan Beban Uang yang Diberikan Pada Pihak Ketiga Pihak Lain Masyarakat sebesar Rp712.414.500,00
20	Inspektorat	1.239.692,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.239.692,00 yang merupakan terdiri dari utang tagihan air tahun ini sebesar Rp211.185,00, dan tagihan internet sebesar Rp. 1.028.507,00
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	48.386.435,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp48.386.435,00 yang merupakan terdiri dari penyesuaian Beban Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp34.300.000,00, Beban Jasa Lain sebesar Rp12.000.000,00 dan utang tagihan air tahun ini sebesar Rp66.435,00.
22	Badan Keuangan	548.032,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp548.032,00 yang merupakan Beban Jasa Kantor.
23	Sekretariat Daerah	150.607.821,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp150.607.821,00 yang merupakan terdiri dari penyesuaian Beban Jasa Kantor sebesar Rp57.107.821,00, Beban Jasa, Beban Hadiah yang Bersifat

No.	Nama OPD	Penyesuaian (Rp)	Keterangan
			Perimbangan sebesar Rp13.600.000,00 dan Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp90.000.000,00.
24	Sekretariat DPRD	(10.568.507,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp10.568.507,00) yang merupakan terdiri dari penyesuaian Beban Jasa Kantor sebesar Rp3.603.053,00, Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar (Rp35.181.560,00), dan Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp21.800.000,00.
25	Kecamatan Sulki	4.500.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp4.500.000,00 yang merupakan penyesuaian Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan.
26	Kecamatan Guguk	6.300.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp6.300.000,00 yang merupakan penyesuaian Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan.
27	Kecamatan Mungka	47.500.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp47.500.000,00 yang merupakan terdiri dari penyesuaian Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp15.000.000,00 dan Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp32.500.000,00.
28	Kecamatan Akabirun	388.300,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp388.000,00 yang merupakan penyesuaian utang Beban Tagihan Listrik tahun ini.
29	Kecamatan Luak	37.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp37.000,00 yang merupakan penyesuaian utang Beban Tagihan Air tahun ini.
30	Kecamatan Silujuah Limo Nagari	15.390,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp15.390,00 yang merupakan selisih utang Beban Tagihan Telepon dan Listrik tahun ini dengan tahun lalu.
31	Kecamatan Hantu	(217.866,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp217.866,00) yang merupakan selisih utang Beban Tagihan Air, Listrik dan Surat Kabar tahun ini dengan tahun lalu.
32	Kecamatan Pengkajeneh Kota Bani	(122.625,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp122.625,00) yang merupakan penyesuaian utang Beban Tagihan Air tahun lalu.
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.668.427,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp15.668.427,00 yang terdiri dari penyesuaian Beban Jasa Kantor sebesar Rp 482.427,00 dan Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar

No.	Nama OPD	Pertanggungjawaban (Rp)	Keterangan
			Rp15.188.000,00.
Jumlah		3.707.898.744,10	

Rincian Beban Jasa per OPD Tahun 2022 tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 19** Laporan Keuangan Daerah ini.

Beban Pemeliharaan tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci per OPD sebagai berikut.

Tabel 5.154 Rincian Beban Pemeliharaan per OPD

No.	OPD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.947.527.287,00	5.908.838.581,00
2	Dinas Kesehatan	613.022.117,00	443.585.410,00
3	RSUD dr.Achmad Darwis	656.373.718,00	526.968.134,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	208.261.793,00	275.720.852,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	188.846.303,00	81.400.004,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	247.439.356,00	309.934.631,00
7	Dinas Sosial	207.976.973,00	198.448.373,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	120.573.500,00	126.542.650,00
9	Dinas Pangan	38.282.400,00	75.110.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman	199.611.918,00	126.636.843,00
11	Dinas Koperasi dan Cetakan Sipi	129.008.980,00	75.885.550,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	137.450.117,00	69.906.124,00
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB & PA	289.898.816,00	354.110.381,00
14	Dinas Perhubungan	320.637.603,00	113.584.409,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.726.248,00	68.779.571,00
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	90.445.091,00	84.507.536,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	54.517.300,00	60.241.890,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	132.108.450,00	75.885.500,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.560.750,00	82.252.985,00
20	Dinas Perikanan	257.591.550,00	202.575.050,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	444.378.954,00	194.946.495,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	376.344.784,00	242.584.490,00
23	Inspektori	250.654.913,00	80.634.568,00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	265.858.853,00	271.417.158,00
25	Badan Keuangan	421.018.080,00	254.302.325,00
26	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	190.468.886,00	197.161.928,00
27	Sekretariat Daerah	1.096.747.606,00	898.256.378,00
28	Sekretariat DPRD	358.698.896,00	282.311.604,00
29	Kecamatan Gunung Omeh	95.836.800,00	108.669.000,00
30	Kecamatan Bukit Barisan	52.825.500,00	54.303.250,00
31	Kecamatan Sukki	74.032.700,00	69.738.949,00
32	Kecamatan Guguk	53.179.500,00	63.911.900,00
33	Kecamatan Mungka	62.489.250,00	71.476.290,00
34	Kecamatan Akahlumi	67.180.000,00	73.868.800,00
35	Kecamatan Payakumbuh	72.366.950,00	107.780.000,00
36	Kecamatan Lusi	66.998.750,00	82.010.000,00
37	Kecamatan Lurah Sago Halbar	68.353.800,00	67.426.098,00
38	Kecamatan Situjuh Lima Nagari	70.210.000,00	68.982.850,00
39	Kecamatan Harau	55.427.000,00	67.173.900,00
40	Kecamatan Pangkajene Koto Baru	47.183.250,00	53.506.150,00
41	Kecamatan Kapur IX	55.628.600,00	47.675.650,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	180.198.421,00	181.280.000,00

No.	OPD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85.216.941,00	135.568.185,00
	Jumlah	12.061.398.781,00	12.982.659.307,00

Perbandingan Belanja Pemeliharaan-I.RA dengan Beban Pemeliharaan-LO tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.155 Perbandingan Belanja Pemeliharaan-I.RA dengan Beban Pemeliharaan-LO per OPD

No.	OPD	Belanja Pemeliharaan (Rp)	Beban Pemeliharaan (Rp)	Penyesuaian (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.542.527.287,00	3.542.527.287,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	762.390.214,00	613.022.117,00	149.368.097,00
3	RSUD dr.Achmad Dahlan	728.845.718,00	559.373.718,00	67.470.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.486.231.793,00	286.261.793,00	2.199.970.000,00
5	Sabuk Polisi Parwong Praja	187.690.373,00	188.846.903,00	19.349.020,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	283.455.306,00	247.438.356,00	46.015.950,00
7	Dinas Sosial	207.876.873,00	207.876.873,00	0,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	131.683.500,00	120.673.600,00	11.120.000,00
9	Dinas Pangan	38.282.400,00	38.282.400,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman	240.579.068,00	189.611.918,00	49.968.790,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	129.008.980,00	129.008.980,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	131.450.117,00	131.450.117,00	0,00
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB & PSA	412.403.517,00	289.899.916,00	122.503.681,00
14	Dinas Perhubungan	130.183.607,00	320.837.603,00	(190.743.996,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.341.458,00	40.726.248,00	19.614.920,00
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	162.468.979,00	90.445.091,00	72.023.879,00
17	Dinas Perencanaan, Model dan Pelayanan Satu Pintu	54.917.300,00	54.917.300,00	0,00
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	132.108.450,00	132.108.450,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	29.560.750,00	29.560.750,00	0,00
20	Dinas Perikanan	257.591.550,00	257.591.550,00	0,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	269.815.396,00	444.378.954,00	(174.773.858,00)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	251.314.784,00	316.344.784,00	(64.450.000,00)
23	Inspektorat	126.403.841,00	259.854.913,00	(133.251.072,00)
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	509.387.143,00	286.868.353,00	223.518.290,00
25	Badan Kelembagaan	424.018.080,00	424.018.080,00	0,00
26	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	190.456.886,00	190.456.886,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	1.422.332.808,00	1.098.747.835,00	325.685.000,00
28	Sekretariat DPRD	348.698.895,00	358.898.895,00	0,00
29	Kecamatan Gunung Omah	95.838.002,00	96.838.800,00	0,00
30	Kecamatan Bukit Barisan	32.625.500,00	37.625.600,00	0,00
31	Kecamatan Bukit	74.032.700,00	74.032.700,00	0,00
32	Kecamatan Guguk	53.178.500,00	53.178.500,00	0,00
33	Kecamatan Mungka	82.489.250,00	82.489.250,00	0,00
34	Kecamatan Akabiluu	81.812.000,00	87.180.000,00	14.632.000,00

No.	OPD	Belanja Pemeliharaan (Rp)	Beban Pemeliharaan (Rp)	Penyesuaian (Rp)
35	Kecamatan Payekumbuh	72.368.950,00	72.368.950,00	0,00
36	Kecamatan Luak	86.998.750,00	86.998.750,00	0,00
37	Kecamatan Lurah Sajo Halaban	86.353.800,00	86.353.800,00	0,00
38	Kecamatan Sritujan Limo Nagari	70.210.000,00	70.210.000,00	0,00
39	Kecamatan Harau	55.427.000,00	55.427.000,00	0,00
40	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	57.183.250,00	57.183.250,00	0,00
41	Kecamatan Kaur IX	58.628.600,00	58.628.600,00	0,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	199.159.421,00	199.159.421,00	0,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85.218.941,00	85.218.941,00	0,00
Jumlah		14.809.309.442,00	12.051.398.781,00	2.757.910.661,00

Terdapat 17 (tujuh belas) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Pemeliharaan yaitu:

Tabel 5.156 Rincian Penyesuaian Beban Pemeliharaan per OPD

No.	OPD	Penyesuaian (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	(149.368.097,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp149.368.097,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung
2	RSUD dr.Achmad Dahlan	(67.470.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp67.470.000,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.199.970.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp2.199.970.000,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
4	Satuan Polisi Pamong Praja	(19.349.020,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp19.349.020,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung
5	Dinas Pemadam Kebakaran	(46.015.950,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp46.015.950,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(11.120.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp11.120.000,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung
7	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman	(49.958.750,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp49.958.750,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung
8	Dinas Pengendalian Pendudukan KB & P3A	(122.503.681,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp122.503.681,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung
9	Dinas Perhubungan	190.743.998,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp190.743.998,00 berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Perawatan dan Mesin
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	(19.614.920,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp19.614.920,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung sebesar (Rp8.999.920,00) dan kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Perawatan

No.	OPD	Penyesuaian (Rp)	Keterangan
			dan Mesin sebesar (Rp10.645.000,00).
11	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	(72.023.879,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp72.023.879,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung.
12	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	174.773.858,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp174.773.858,00 berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung sebesar Rp181.373.858,00 dan kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp6.600.000,00).
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	64.450.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp64.450.000,00 berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung.
14	Inspektorat	133.251.072,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp133.251.072,00 berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung.
15	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	(223.518.290,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp223.518.290,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung.
16	Sekretariat Daerah	(325.585.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar (Rp325.585.000,00) berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung sebesar (Rp316.638.000,00) dan kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya sebesar (Rp10.350.000,00), korasi belanja honorarium yang dikawatir ganda sebagai penambah nilai aset tetap gedung dan bangunan (1.400.000,00).
17	Kecamatan Akabulu	14.832.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp14.832.000,00 berupa kapitalisasi Belanja Pemeliharaan dan Bangunan dan Gedung.
Jumlah		2.728.646.661,00	

Rincian Beban Pemeliharaan per OPD tahun 2022 tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 20** Laporan Keuangan Daerah ini.

Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalarn Kota	9.342.079.035,00	10.232.398.027,00
2. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah/Biasa	36.569.417.993,00	30.807.906.883,00
Jumlah	45.911.497.028,00	41.040.304.910,00

Rincian Beban Perjalanan Dinas per OPD tahun 2022 tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 21** Laporan Keuangan Daerah ini.

C. Beban Hibah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	33.976.149.687,00	33.489.010.697,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah dalam tahun 2022 dan 2021. Beban Hibah sebesar Rp33.977.749.687,00 dan Rp33.489.010.697,00 tersebut, dalam bentuk uang dan barang. Hibah uang terletak di PPKD sedangkan hibah barang ada pada OPE, dengan rincian Beban Hibah per OPD sebagai berikut.

	Tahun 2022	Tahun 2021
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.549.006.145,00	8.895.189.912,00
2 Dinas Pekerjaan Umum & PK	7.209.031.598,00	14.197.386.950,00
3 Dinas Perindustrian dan Naker	679.926.670,00	782.990.809,00
4 Dinas Pangan	2.069.519.450,00	327.905.000,00
5 Dinas Komunikasi dan Informasi	149.454.856,00	0,00
6 Dinas Perdagangan Koperasi UKM	1.077.089.897,00	369.520.000,00
7 Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman dan Permukiman	0,00	99.614.000,00
8 Dinas Pemb. Masyarakat dan Desa/ Nagari	0,00	120.000.000,00
9 Dinas Parpora	1.532.909.330,00	1.530.000.000,00
10 Sekretariat Daerah	2.346.000.000,00	1.589.985.000,00
11 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	42.000.000,00
12 Dinas Perikanan	1.706.973.080,00	1.674.963.309,00
13 Dinas Tauanan Pangan & Hortikultura	1.603.001.139,00	2.839.943.326,00
14 Disnakeswan	1.215.555.672,00	120.481.250,00
15 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	837.681.850,00	898.831.141,00
Jumlah (Rp)	33.976.149.687,00	33.489.010.697,00

Rincian Beban Hibah per OPD Tahun 2022 tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 22** Laporan Keuangan Daerah ini.

Perbandingan Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 157 Perbandingan Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO tahun 2022

No.	OPD	BELANJA HIBAH	BEBAN HIBAH	SELISIH	URAIAN
1	Dinas Pendidikan	4.890.400.000,00	4.870.800.000,00	(1.600.000,00)	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Berafiliasi Suku-suku dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No.	OPD	BELANJA HIBAH	BEBAN HIBAH	SELISIH	URAIAN
		8.022.420.000,00	8.366.928.345,00	344.508.345,00	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
		303.277.800,00	303.277.800,00	0,00	Beban Hibah Dana BOS, Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Prasarana	7.072.701.598,00	7.209.031.598,00	136.330.000,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
3	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	809.463.870,00	878.926.670,00	70.462.800,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
4	Dinas Pangan	2.054.519.400,00	2.054.519.450,00	0,00	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No.	OPD	BELANJA HIBAH	BEBAN HIBAH	SELISIH	URAIAN
5	Dinas Komunikasi Dan Informatika	99.464.856,00	99.454.856,00	0,00	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
6	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Ukm	29.883.884,00	29.883.884,00	0,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Menilik Surat Keterangan Terdaftar
		318.316.438,00	1.047.206.013,00	728.889.577,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
7	Dinas Partisipasi Pemuda Dan Olah Raga	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	0,00	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No.	OPD	BELANJA HIBAH	BEBAN HIBAH	SELISIH	URAIAN
		0,00	49.620.330,00	49.620.330,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
		281.096.000,00	281.096.000,00	0,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
		0,00	47.191.000,00	47.191.000,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
8	Dinas Perikanan	1.706.973.000,00	1.706.973.000,00	0,00	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	13.397.000,00	13.397.000,00	0,00	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
		288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan

No.	OPD	BELANJA HIBAH	BEBAN HIBAH	SELISIH	URAIAN
					Terdaftar
		2.152.218.534,00	3.321.604.136,00	1.169.385.606,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
10	dinas Pemukiman Dan Kesehatan Hewani	1.215.555.672,00	1.215.555.672,00	0,00	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
11	Sekretariat Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
		415.000.000,00	415.000.000,00		Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
		730.000.000,00	730.000.000,00	0,00	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No.	OPD	BELANJA HIBAH	BEBAN HIBAH	SELISIH	URAIAN
12	Badan Kesabutan Bangsa Dan Politik	937.681.890,00	837.681.890,00	0,00	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
JUMLAH		21.431.362.030,00	33.878.149.887,00	- 2.544.787.857,00	

Terdapat 6 (enam) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Hibah yaitu:

Tabel 5. 158 Rincian Penyesuaian beban hibah -L.C)

No.	OPD	Penyesuaian (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	344.508.345,00	Terdapat penyesuaian beban hibah sebesar Rp344.508.345,00 berupa selisih Hutang hibah tahun ini dengan tahun lalu.
		(1.600.000,00)	Terdapat penyesuaian beban hibah Rp1.600.000,00 berupa koreksi beban hibah menjadi aset tetap berupa speaker dari belanja BOP PAUD Negeri.
2	Dinas Perkerjaan Umum Dan Penata Ruang	159.330.000,00	Terdapat penyesuaian beban hibah sebesar Rp159.330.000,00 berupa selisih Hutang hibah tahun ini dengan tahun lalu.
3	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	70.462.800,00	Terdapat penyesuaian beban hibah sebesar Rp70.462.800,00 berupa selisih Hutang hibah tahun ini dengan tahun lalu.
4	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Luar	726.889.577,00	Terdapat penyesuaian beban hibah sebesar Rp726.889.577,00 berupa selisih Hutang hibah tahun ini dengan tahun lalu.
5	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	96.811.330,00	Terdapat penyesuaian beban hibah sebesar Rp96.811.330,00 berupa selisih Hutang hibah tahun ini dengan tahun lalu.
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1.189.385.605,00	Terdapat penyesuaian beban hibah sebesar Rp1.189.385.605,00 berupa selisih Hutang hibah tahun ini dengan tahun lalu.
JUMLAH		2.544.787.857,00	

D. Beban Bantuan Sosial

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

6.531.013.940,00

8.605.097.963,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial dalam tahun 2022 dan 2021. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp8.605.097.963,00 dan Rp8.605.097.963,00 tersebut dalam bentuk uang dan barang. Beban Bantuan Sosial tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 159 Beban Bantuan Sosial per OPD

Nama OPD	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
Dinas Sosial	735.607.250,00	585.860.960,00	59.603.000,00
Dinas Perikanan	159.642.700,00		
Dinas Lingkungan	0	4.980.000.000,00	0

Nama OPD	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
Hidup, Perumahan dan Pemukiman			
Jumlah	895.249.950,00	5.575.880.890,00	89.803.000,00

E. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	147.908.607.028,97	144.816.337.306,49

Beban Penyusutan dan Amortisasi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah sebesar Rp147.908.607.028,97 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp144.816.337.306,49 terjadi kenaikan sebesar Rp3.092.269.722,48 atau 2,14% dengan rincian terdiri dari:

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.580.473.452,55	54.383.178.070,61
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.794.386.112,79	11.258.549.140,10
- Beban Penyusutan Jiwa	85.399.731.278,43	77.576.756.775,09
- Beban Penyusutan Aset	1.133.702.441,20	3.270.000,00
- Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	959.527.744,00	1.334.608.979,79
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	46.786.000,00	259.974.340,90
Jumlah (Rp)	147.908.607.028,97	144.816.337.306,49

Beban Penyusutan tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci per OPD sebagai berikut.

Tabel 5.160 Rincian Beban Penyusutan per OPD

No.	OPD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.675.579.416,45	16.083.139.623,61
2	Dinas Kesehatan	8.830.876.106,45	10.171.843.393,01
3	RSUD dr Achmad Dahlan	7.057.275.268,46	23.870.367.815,31
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	82.823.609.949,44	73.758.745.588,60
5	Satuan Polisi Pamong Praja	187.677.662,47	310.073.718,31
6	Dinas Pemadam Kebakaran	889.278.842,05	1.183.323.822,84
7	Dinas Sosial	141.784.803,44	311.018.007,78
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	507.957.035,50	785.283.808,10
9	Dinas Pangan	177.858.077,18	235.388.403,39
10	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman	2.848.842.168,87	2.317.776.315,06

No.	OPD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	358.118.932,30	375.219.415,35
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	71.540.987,71	258.826.725,41
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB & P3A	15.589.285,95	1.237.953.831,28
14	Dinas Perhubungan	1.038.583.125,45	3.219.067.233,02
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	566.238.710,16	1.328.875.787,73
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	758.851.283,00	178.266.442,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pulu	89.176.708,01	18.378.151,51
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	449.831.849,35	972.527.880,30
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	389.104.005,50	382.058.709,58
20	Dinas Perikanan	587.165.103,31	401.318.988,16
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.045.484.913,73	1.060.083.298,21
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	286.638.780,87	218.103.132,52
23	Inspekturat	336.930.849,00	205.546.981,00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	127.211.348,95	268.887.918,57
25	Badan Keuangan	733.559.538,57	871.882.880,36
26	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	93.805.386,08	96.792.415,10
27	Sekretariat Daerah	4.025.754.727,70	1.571.972.708,03
28	Sekretariat DPRD	763.040.718,38	1.545.419.998,83
29	Kecamatan Gunung Ombak	52.918.168,11	80.239.428,11
30	Kecamatan Bukit Barisan	50.230.755,98	80.786.056,94
31	Kecamatan Suliki	41.196.133,61	58.082.475,68
32	Kecamatan Guguan	89.311.332,06	95.652.881,41
33	Kecamatan Mungka	42.999.359,50	53.781.859,48
34	Kecamatan Akahulu	20.712.445,78	77.687.667,31
35	Kecamatan Payakumbuh	84.243.195,53	-10.275.178,97
36	Kecamatan Luak	85.453.673,28	92.847.373,27
37	Kecamatan Lurah Sago Halaban	56.693.557,34	85.467.901,88
38	Kecamatan Silujuh Liman Naran	57.004.404,63	47.837.404,63
39	Kecamatan Harau	52.245.376,57	41.733.141,43
40	Kecamatan Pangkalan Kota Baru	42.394.974,68	58.536.973,02
41	Kecamatan Kapur IX	55.106.721,35	73.387.970,35
42	Badan Keseluan Bangsa dan Politik	118.254.979,18	100.017.480,18
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.134.426.932,00	255.190.351,33
	Jumlah	147.908.607.028,97	144.818.337.308,49

F. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

1.151.717.551,44

1.237.068.311,93

Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah sebesar Rp1.151.717.551,44 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.237.065.311,93 terjadi penurunan sebesar Rp85.347.760,49 atau 6,89% dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Penyisihan Piutang Pajak	1.164.933.973,21	1.237.634.483,69
2. Penyisihan Piutang Retrihusi	(993.000,00)	(4.023.000,00)
3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	(180.081,26)	295.874,29
4. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sub	1.972.399,82	265.482,19
5. Penyisihan Piutang Pajak Pusat	(14.017.740,33)	(11.014.456,61)
6. Penyisihan Piutang DIIP Provinsi	0,00	13.906.928,37
Jumlah (Rp)	1.151.717.551,44	1.237.065.311,93

Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 dan 2021 dapat dirinci per OPD sebagai berikut.

Tabel 5. 161 Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD

No.	OPD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	544.014,00	(1.214.660,90)
2	RSUD dr. Adhniad Darwis	1.626.144,08	6.106.363,08
3	Dinas Lingkungan Hidup, Pemukiman Rakyat & Permukiman	(893.000,00)	(1.023.000,00)
4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	0,00
5	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	(5.071.950,00)
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	(2.556.000,00)
7	Badan Keuangan	1.150.740.592,44	1.240.822.828,74
8	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
	Jumlah	1.151.717.551,44	1.237.065.311,93

G. Beban Lain-Lain	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	5.546.688.133,58	4.683.171.526,24

Beban Lain-lain terdiri dari beban pemenuhan nilai investasi, Belanja Modal yang tidak dikapitalisir serta Aset Ekstracomtable.

Pada tahun 2022 Beban lain-lain tercatat sebesar Rp5.546.688.133,58 dengan rincian per OPD sebagai berikut.

Tabel 5.163 Rincian Belanja Lain-Lain per OPD

NO	OPD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.791.672.703,00	3.749.945.154,24
2	Dinas Kesehatan	333.058.688,00	367.778.151,00
3	RSUD dr.Achmad Dahlan	14.485.500,00	58.460.012,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	188.388.710,00	338.400.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15.750.000,00	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	8.848.965,00	6.030.000,00
7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.000.000,00	0,00
8	Dinas Pangan	0,00	19.749.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPF dan Perlindungan Anak	8.761.400,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	200.897.496,00	0,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	80.720.600,00
12	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	15.014.780,00	124.467.951,00
13	Dinas Perencanaan Model dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	2.000.000,00
14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4.320.000,00	17.160.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	99.900.000,00	0,00
16	Dinas Perikanan	7.500.000,00	12.420.000,00
17	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	16.199.110,00	8.292.200,00
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.452.000,00	9.588.500,00
19	Inspektorat	13.966.000,00	2.680.000,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1.304.000,00	6.221.700,00
21	Badan Keuangan	1.726.587.079,58	2.050.000,00
22	Sekretariat Daerah	65.663.721,00	108.705.250,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	7.908.000,00
24	Kecamatan Suiki	400.000,00	0,00
25	Kecamatan Mungka	15.300.000,00	0,00
26	Kecamatan Lisek	150.000,00	600.000,00
27	Kecamatan Harau	0,00	1.000.000,00
28	Kecamatan Kapur IX	200.000,00	1.800.000,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	900.000,00
		5.546.683.133,58	4.663.171.826,24

Rincian Beban Lain-lain tahun 2022 per rekening sebagai berikut.

Tabel 5. 163 Rincian Beban Lain-lain per Rekening

No.	Nama Rekening	Beban Lain-lain (Rp)
1	Beban Penurunan Nilai Investasi Non Permanen	1.728.587.079,58
2	Beban DM Tidak Dikapital	1.686.508.886,00
3	Beban Asst Ekstrakomptabel	2.153.594.169,00
Jumlah		8.646.688.133,58

H. Beban Transfer	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	77.397.666.036,00	80.806.985.142,00

Beban Transfer tahun 2022 adalah sebesar Rp77.397.666.036,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp80.806.985.142,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.409.319.106,00 atau 4,22% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 164 Rincian Beban Transfer

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban transfer bagi hasil pajak daerah pada Pemerintah Desa	3.474.930.567,00	2.706.054.723,00	768.875.844,00	28,41
2	Beban Transfer bantuan keuangan ke Desa	(3.897.730.449,00)	78.100.830.619,00	(4.178.196.470,00)	(5,39)
Jumlah		77.397.666.036,00	80.806.985.142,00	(3.409.319.106,00)	(4,22)

II. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	(2.970.163.299,15)	21.894.255.460,62

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2022 sebesar (Rp2.970.163.299,15). Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp21.894.255.460,62 terjadi penurunan sebesar Rp24.864.418.759,77 atau 113,56%.

I. Pos Luar Biasa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	708.965.000,00	776.542.837,00

Pos Luar Biasa sebesar Rp.708.965.000,00 terdiri dari Beban Tanggap Darurat Bencana Alam banjir, gempa, angin kencang, longsor dan penanggulangan kebakaran pada beberapa lokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun rincian Pos Luar Biasa dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.165 Rincian SP2D Belanja Tak Terduga Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi BTT (Rp)
1	Tanggap darurat bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota	171.300.000,00
2	Bantuan Bencana Longsor dan Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota	22.000.000,00
3	Bantuan Pasca Bencana Gempa Bumi dan Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota	23.500.000,00
4	Bantuan Pasca Bencana Gempa Bumi, Angin Kencang, Bencana Longsor dan Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota	24.000.000,00
5	Bantuan Bencana Angin Kencang dan Kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota	32.000.000,00
6	Bantuan Pasca Bencana Angin Kencang di Nagari Gunung Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	5.000.000,00
7	Bantuan Kebakaran di Nagari Mungka dan Bantuan Pasca Bencana Angin Kencang di Nagari Sungai Ambun Kecamatan Mungka	23.000.000,00
8	Bantuan Kebakaran dan Bantuan Pasca Bencana Angin Kencang di Kabupaten Lima Puluh Kota	17.500.000,00
9	BTL Peranganan Banjir dan Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota	190.440.000,00
10	STT Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam dan Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota	200.225.000,00
Jumlah		708.965.000,00

J. Surplus/Defisit LO

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

(3.679.128.299,15)

21.117.712.623,62

Surplus/Defisit LO adalah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dikurangi dengan Beban Luar Biasa. Beban Luar Biasa sebesar Rp708.965.000,00 sehingga Surplus/Defisit LO Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebesar Rp(3.679.128.299,15) Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp21.117.712.623,62 terjadi penurunan sebesar Rp24.796.840.922,77 atau 117,42%.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun bukan berdasarkan hasil SP2D melainkan berdasarkan basis belanja riil. Laporan arus kas adalah bagian dari Laporan Finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal Kas Daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir Kas Daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada OPD. Sisa Kas di Bendahara OPD baik Bendahara Pengeluaran maupun Penerimaan adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetor ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari Kas Daerah.

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 5. 166 Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	144.837.069.079,88	141.217.584.132,04
2	Aktivitas Investasi	(151.416.173.563,00)	(148.296.878.049,00)
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitoris	(2.253.000,00)	(27.568.614,00)
	Kenaikan/Penurunan Kas	(8.881.357.483,12)	(7.106.860.427,96)

Penjelasan mengenai aktivitas selama Tahun 2022 dapat diuraikan berikut ini:

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.225.475.426.715,64	1.259.966.597.249,96

Jumlah tersebut merupakan arus kas masuk dari aktivitas operasi selama TA 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut.

1. Penerimaan Pajak Daerah	26.017.229.440,00	21.409.261.694,00
2. Penerimaan Retribusi Daerah	3.100.697.678,00	2.975.121.922,00
3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.963.233.016,00	3.718.416.419,00
4. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Saja	49.841.127.223,64	50.923.395.837,96
5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	13.387.540.452,00	16.468.188.122,00
6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.807.087.902,00	3.544.403.531,00
7. Penerimaan Dana Alokasi Umum	682.756.183.074,00	686.668.871.000,00
8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus	98.518.292.418,00	72.258.497.494,00
9. Penerimaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik	181.051.158.966,00	163.431.928.595,00
10. Penerimaan Dana Penyesuaian	74.850.449.000,00	165.640.091.300,00
11. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.667.913.776,00	56.165.919.591,00
12. Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi	8.000.000.000,00	0,00
13. Penerimaan Hibah	54.471.513.770,00	13.091.614.016,00

14. Penerimaan Lainnya	40.000.000,00	3.670.887.728,00
Jumlah (Rp)	1.225.475.426.715,64	1.259.966.397.249,96

Arus Kas Keluar	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	1.080.638.357.635,76	1.118.749.013.117,92

Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar atas aktivitas operasi selama TA 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pembayaran Pegawai	643.786.695.090,40	648.801.431.683,00
2. Pembayaran Barang	239.491.478.258,36	265.227.158.771,92
3. Pembayaran Hibah	31.416.712.030,00	34.067.820.697,00
4. Pembayaran Bantuan Sosial	6.531.013.940,00	8.605.097.963,00
5. Pembayaran Tidak Terduga	708.965.000,00	776.542.837,00
6. Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	1.930.308.868,00	1.447.678.247,00
7. Belanja Bantuan Keuangan kpd Pemerintahan Desa	156.773.184.449,00	159.823.282.919,00
8. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah (Rp)	1.080.638.357.635,76	1.118.749.013.117,92

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	144.837.069.079,88	141.217.584.132,04

Jumlah tersebut merupakan selisih positif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2022 dan 2021. Arus kas bersih sejumlah tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

5.5.2. Arus kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	40.200.099,00	825.949.056,00

Arus masuk kas merupakan penerimaan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi berupa penjualan aset daerah. Pada TA 2022 dan 2021 realisasi arus kas masuk dari aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

1. Penjualan atas Gedung & Bangunan.	16.907.000,00	51.108.000,00
2. Penjualan atas Aset Lainnya	23.293.099,00	774.841.056,00
Jumlah (Rp)	40.200.099,00	825.949.056,00

Arus Kas Keluar	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	151.456.373.662,00	149.122.625.105,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar atas aktivitas investasi selama TA 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2. Perolehan Tanah	1.164.122.710,00	215.885.219,00
3. Perolehan Peralatan dan Mesin	38.314.925.065,00	31.510.467.807,00
4. Perolehan Gedung dan Bangunan	23.220.870.928,00	31.719.900.607,00
5. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.965.835.510,00	79.886.699.210,00
6. Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.290.619.449,00	4.269.672.262,00
7. Perolehan Aset Lainnya	0,00	20.000.000,00
8. Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Jumlah (Rp)	151.456.373.662,00	149.122.625.105,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	(151.416.173.563,00)	(148.296.676.049,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih negatif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi tahun 2022 dan 2021. Arus kas bersih tersebut bertujuan meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Arus kas masuk kas merupakan penerimaan kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berupa Pinjaman Dalam Negeri. Pada TA 2022 dan 2021 tidak ada realisasi arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan.

Arus Kas Keluar	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Arus kas keluar merupakan pengeluaran kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Pada TA 2022 dan 2021 tidak ada realisasi arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan.

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Pada TA 2022 dan 2021 tidak ada realisasi arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk	Tahun 2022	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
	85.247.264.540,00	87.026.820.098,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas masuk dari aktivitas transitoris selama TA 2022 dan 2021. Rincian penerimaan PPK tahun 2022 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2** Laporan Keuangan ini.

- Penerimaan Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK)	85.247.264.540,00	87.026.820.098,00
Jumlah (Rp)	85.247.264.540,00	87.026.820.098,00

Arus Kas Keluar	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	85.249.517.540,00	87.054.388.609,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar dari aktivitas transitoris selama TA 2022 dan 2021, yang terdiri atas:

- Pengeluaran Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK)	85.249.517.540,00	73.509.824.563,00
Jumlah (Rp)	85.249.517.540,00	73.509.824.563,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	(2.253.000)	(27.568.511,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih positif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris.

Dari perhitungan arus kas bersih masing-masing aktivitas TA 2022, terjadi penurunan kas bersih sebesar Rp6.557.507.483,12 sehingga Saldo Akhir Kas adalah sebesar Rp15.215.681.606,54 yang terdiri dari:

- Kas BUD berada di rekening bank	Rp	496.522.396,09
- Kas di BLUD RSUD	Rp	8.461.843.585,50
- Kas di BLUD Puskesmas	Rp	6.032.834.378,95
- Kas Dana BOS	Rp	181.813.175,00
- Kas di Bendahara pengeluaran	Rp	18.646.167,00
- Kas di Bendahara penerimaan	Rp	23.850.000,00
- Kas Lainnya	Rp	171.604,00
SALDO AKHIR KAS	Rp	15.215.681.606,54

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan Penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat diterangkan beberapa hal sebagai berikut.

5.6.1. Ekuitas Awal	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	1.755.275.420.873,01	1.742.150.940.965,49

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Awal tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp1.755.275.420.873,01 dan Rp1.742.150.940.965,49.

5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	(3.679.128.299,15)	21.117.712.623,62

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban pada Laporan Operasional Tahun 2022 dan 2021, sebagai berikut.

- Pendapatan-LO	1.150.363.056.705,44	1.211.500.990.933,38
- Beban	1.154.042.185.004,59	1.190.383.278.309,76
Surplus/(Defisit)-LO	(3.679.128.299,15)	21.117.712.623,62

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	(4.742.895.976,32)	5.731.334.721,28
2. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	3.094.719.229,30	(13.724.567.437,38)
	(1.648.176.747,02)	(7.993.232.716,10)

5.6.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	(4.742.895.976,32)	5.731.334.721,28

5.6.3.1.1 Koreksi Utang	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	5.160.000,00

Tidak terdapat Koreksi Utang pada Tahun 2022.

5.6.3.1.2 Koreksi Utang PFK	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	6.311.478,00

Tidak terdapat koreksi utang PFK pada tahun 2022.

5.6.3.1.3 Koreksi Tambah Aset Ekstrakomtabel	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	597.565.000,00

Tidak terdapat Koreksi tambah Aset Ekstrakomtabel pada Tahun 2022.

5.6.3.1.4 Koreksi Kas Bendahara Penerimaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	(13.260.000,00)

Tidak terdapat Koreksi Kas Bendahara Penerimaan pada tahun 2022.

5.6.3.1.5 Koreksi Kurang Aset Ekstrakomtabel	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	(55.136.900,00)

Tidak terdapat Koreksi Kurang Aset Ekstrakomtabel pada tahun 2022.

5.6.3.1.6 Koreksi Beban Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	1.782.723.126,00

Tidak terdapat koreksi beban penyusutan aset lainnya pada tahun 2022.

5.6.3.1.7 Koreksi Penyertaan Modal	Nilai	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		(0,00)	3.792.683.781,28

Koreksi kurang nilai penyertaan modal tahun 2022 sebesar Rp1.684.221.403,40 merupakan penyesuaian nilai penyelesaian modal pada BUMD PDAM akibat perhitungan laba rugi menggunakan metode ekuitas.

5.6.3.1.8 Koreksi Piutang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	0,00	115.288.236,00

Tidak terdapat Koreksi Piutang pada Tahun 2022.

5.6.3.1.9 Koreksi Pembulatan Angka	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	0,96	0,00

Koreksi pembulatan angka tahun 2022 sebesar Rp0,96 merupakan pembulatan angka pada Dinas Pertambangan dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan L.KM.

5.6.3.1.10 Koreksi Aset TPTGR	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	(4.742.895.977,28)	0,00

Koreksi atas aset TPTGR yang dalam proses penetapan sebesar Rp225.255.000,00 dan informasi indikasi kerugian daerah sebesar Rp4.517.640.977,28. Berdasarkan perubahan ketujuh kebijakan akuntansi tahun 2021 bahwa TGR diakui ketika SKP2K terbit atau telah ada penetapan.

5.6.3.2 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	3.094.719.229,30	(13.724.567.437,38)

5.6.3.2.1 Mutasi tambah Aset Tetap	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	3.989.127.682,00	781.696.288,00

Mutasi tambah asset tetap terdapat pada :

Tabel 5. 167 Rincian mutasi tambah asset tetap

No	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88.365.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.803.243,00
3.	Satuan Polisi Pamung Praja	113.000.000,00
4.	Dinas Sosial	40.000.000,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman	12.000.000,00
6.	Dinas Perhubungan	199.447.496,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informasi	704.549.000,00
8.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	59.330.488,00
9.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	188.670.858,00
10.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	88.344.500,00
11.	Inspektorat	169.519.000,00
12.	Sekretariat Daerah	1.428.641.097,00
13.	Kecamatan Suliki	9.892.000,00
14.	Piadan Penanggulangan Bencana Daerah	197.365.000,00
	Jumlah	3.989.127.682,00

5.6.3.2.2 Mutasi kurang Aset Tetap

Tahun 2022

Tahun 2021

(Rp)

(Rp)

(2.700.760.340,00)

(608.143.288,00)

Mutasi kurang asset tetap terdapat pada OPD :

Tabel 5. 168 Rincian mutasi kurang asset tetap

No	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	(1.387.988.097,00)
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(206.634.000,00)
3.	Dinas Komunikasi dan Infortasi	(54.052.500,00)
4.	Dinas Perikanan	(30.000.000,00)
5.	Sekretariat Daerah	(306.018.000,00)
6.	Sekretariat DPRD	(143.189.500,00)

7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(272.878.243,00)
	Jumlah	(2.700.760.340,00)

5.6.3.2.3	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		862.280.322,32	14.313.333,33

Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Mutasi kurang aset tetap terdapat pada OPD :

Tabel 5. 169 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Mutasi kurang aset tetap

No	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	783.490.757,75
2.	Kecamatan Akahilera	78.789.564,57
	Jumlah	862.280.322,32

5.6.3.2.4	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		0,00	14.313.333,33

Tidak terdapat koreksi/penyesuaian aset lainnya pada tahun 2022.

5.6.3.2.5	Mutasi Tambah Aset Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		2.257.786.126,98	2.786.537.850,29

Mutasi Tambah Aset Lainnya terdapat pada OPD :

Tabel 5. 170 Rincian mutasi Tambah Aset Lainnya

No	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Badan Penelitian dan Pengembangan	12.000.000,00
2.	Badan Keptangan	2.245.786.126,98
	Jumlah	2.257.786.126,98

5.6.3.2.6	Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		0,00	25.000.000,00

Tidak terdapat Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud pada tahun 2022.

5.6.3.2.7	Penghapusan Aset Tetap	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		(831.991.097,00)	(14.550.147.432,00)

Penghapusan Aset Tahun 2022 terdapat pada OPD berikut ini:

Tabel 5.171 Penghapusan Aset Tahun 2022

No	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(735.147.097,00)
2.	Dinas Kesehatan	(26.328.000,00)
3.	Dinas Pemadam Kebakaran	(61.000.000,00)
4.	Kecamatan Payakumbuh	(9.516.000,00)
Jumlah		(831.991.097,00)

5.6.3.2.8	Koreksi Aset Tahun Sebelumnya	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
		211.790.200,00	(265.294.106,00)

Koreksi Aset Tahun Sebelumnya terdapat pada OPD :

Tabel 5.172 Koreksi Aset Tahun Sebelumnya

No	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.430.200,00
2.	Dinas Kesehatan	145.000.000,00
3.	Dinas Perhubungan	30.360.000,00
Jumlah		211.790.200,00

5.6.3.2.9 Penghapusan Aset Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	(647.155.200,00)	(1.835.048.126,00)

Penghapusan Aset Lainnya tahun 2022 sebesar Rp**647.155.200,00** dilakukan pada Sekretariat Daerah.

5.6.3.2.10 Koreksi Saldo Dana BOS	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	(46.358.465,00)	0,00

Koreksi saldo Dana BOS tahun 2022 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp**46.358.465,00** merupakan pendapatan lain-lain BOS tahun 2022 akibat kelebihan setor dan temuan Inspektorat.

5.6.3.2.11 Koreksi Kas BLUD Puskesmas	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	0,00	6.518.043,00

Tidak terdapat Koreksi Kas BLUD Puskesmas pada tahun 2022.

5.6.4 Ekuitas Akhir	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	1.749.948.115.826,84	1.755.275.420.873,01

Jumlah tersebut merupakan jumlah Ekuitas Akhir tahun 2022 dan tahun 2021.

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Komitmen dan Kontijensi

Sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi beberapa kasus hukum perdata yang mempunyai potensi pengaruh terhadap keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa yang akan datang yaitu:

1. Nomer Perkara 15/Pdt.G/2022/PN Tjp tanggal pendaftaran 12 April 2022 dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat yang diwakili oleh: 1). Tn. Arizal; 2). Tn. Syamsir Alam, dan 3). Tu. Edleu Syarkawi melakukan gugatan kepada Tergugat yaitu:
 - I. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Sumatera Barat Cq Bupati Limapuluh Kota
 - II. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Sumatera Barat Cq Bupati Limapuluh Kota Cq Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Limapuluh Kota/ Pengguna Anggaran (PA)sekarang Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 - III. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Lima Puluh Kota cq. Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sekarang Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Cq. Kepala Bidang Bina Marga/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)kegiatan pembangunan jembatan Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
 - IV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan Perjanjian Kontrak Induk No. 01/KTK/PJBT.K/PU-LK/II-2009, dan Kontrak Anak I No. 01/KTK/PJBT.K/PU-LK/II-2009, tanggal 12 Februari 2009, antara Tergugat III dengan Penggugat, untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tach Baruah yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota namun dalam pengerjaannya ada Pemutusan Kontrak No.

01/BAPK/PLJBT.K/PPK/PL-LK/II-2010 yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Perusahaan Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Tergugat. Oleh karena itu para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akibat perbuatannya telah merugikan Penggugat dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrecht matigedaad over head*).

Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum.
- c. Menyatakan Perjanjian Kontrak Induk No. 01/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-2009, dan Kontrak Anak I No. 01/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-2009, tanggal 12 Februari 2009, antara Tergugat III dengan Penggugat, untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Taeh Baruah yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- d. Menyatakan Pemutusan Kontrak No. 01/BAPK/PLJBT.K/PPK/PL-LK/II-2010 yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Perusahaan Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akibat perbuatannya telah merugikan Penggugat dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrecht matigedaad over head*).
- f. Dst

Sidang Pertama telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dan dilanjutkan dengan mediasi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2022, tanggal 24 Agustus dikeluarkan putusan sela yang terdiri dari: 1). Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2; 2). Memerintahkan kedua belah Pihak untuk melanjutkan persidangan, dan, 3). menetapkan biaya perkara akan diputuskan dalam putusan akhir. Tanggal 2 November 2022 dilakukan persidangan dengan status putusan **Dikabulkan Sebagian** dengan amar kepuasan; 1). Menyatakan Perjanjian Kontrak Induk No. 01/KTK/PLJBT.K/PU-LK/II-2009 dan Kontrak Anak I No. 01a/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-2009, tanggal 12 Februari 2009, antara Tergugat III dengan Penggugat II,

untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tuh Baruah yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 2). Menyatakan Penutusan Kontrak No. 01/BAPK/P.IBT.K/PPK/PU-L.K/II-2010 yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Perusahaan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 3). Menyatakan Tergugat 1, 2, dan 3 secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akibat perbuatannya telah merugikan Para Penggugat; 4). Menghukum Tergugat 1, 2, dan 3 untuk membayar kepada Para Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.578.464.868,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah); 5). Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan sekehinya, dan 6). Menghukum Tergugat 1, 2, dan 3 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.135.650,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh Rupiah). Tanggal 9 November Pihak Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan sebelumnya. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 melalui keputusan No. 255/PDT/2022/PT PDG, diputuskan: 1). Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II; 2). Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 2 November 2022 Nomor 15/Pdt.G/2022/ PN Tjp, yang diundhikan banding tersebut, dan 3). Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Nomor Perkara 11/Pdt.G/2022/PN Tjp tanggal pendaftaran 22 Maret 2022 dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat yang diwakili oleh Tn. Edten Syarkawi melakukan gugatan kepada Tergugat yaitu:
 - I. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Sumatera Barat Cq Bupati Limapuluh Kota
 - II. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Sumatera Barat Cq Bupati Limapuluh Kota Cq Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Limapuluh Kota/ Pengguna Anggaran (PA)

- III. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Lima Puluh Kota cq. Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sekarang Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPK) Cq. Kepala Bidang Bina Marga/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pembangunan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- IV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan Perjanjian Kontrak Induk No. 01/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-2009, dan Kontrak Anak I No. 01/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-2009, tanggal 12 Februari 2009, antara Tergugat III dengan Penggugat, untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tach Baruah yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota namun dalam pengerjaannya ada Pemutusan Kontrak No. 01/BAPK/P.JBT.K/PPK/PU-LK/III-2010 yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Perusahaan Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Tergugat. Oleh karena itu para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akibat perbuatannya telah merugikan Penggugat dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*unrecht matigeduead over head*).

Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum.
- c. Menyatakan Perjanjian Kontrak Induk No. 01/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-2009, dan Kontrak Anak I No. 01/KTK/P.JBT.K/PU-LK/II-2009, tanggal 12 Februari 2009, antara Tergugat III dengan Penggugat, untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tach Baruah yang berlokasi di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

- d. Menyatakan Pemutusan Kontrak No. 01/BAPK/P.JBT,K/PPK/PU-LK/III-2010 yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Perusahaan Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
- e. Menyatakan Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akibat perbuatannya telah merugikan Penggugat dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*ourecht matigedaad over head*).
- f. *Dst*

Sidang Pertama telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 April 2022 dengan status putusan *dicabut* dan amar putusan yang terdiri dari: 1). Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Tjp; 2). Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Tjp *dicabut*; 3). Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Tjp tersebut, dan 4). Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diraksit hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

6.2. Gambaran Umum Daerah

1. Dasar Hukum

Secara administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Leruburan Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

2. Domisili

Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota berkedudukan di jalan Raya Negara Kilometer 10 Sarilamak Kecamatan Harau, sesuai dengan peraturan daerah Nomor 17 tahun 2022 tentang Pemindahan Ibu Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak.

3. Visi dan Misi

Visi dari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

"Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk misi yang akan dicapai oleh Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, adapun misi dari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan kebermanan.
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
- c. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seluruhnya.
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

4. Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025°28,71" Lintang Utara dan 0022°14,52" Lintang Selatan dan antara 100015°44,10" sampai dengan 100050°47,80" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; Selatan - Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung; Barat - Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman; Timur - Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sekitar 3.354,30 KM² atau sekitar 7,94 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan dan 79 Nagari dan 4.4 Jorong, dengan kecamatan tertuas adalah Kecamatan Kupter IX.

Berikut data kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota:

Tabel 6. 1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Luas (KM ²)	Jumlah Nagari
1	Puyakumbuh	99,47	7
2	Akabiluru	94,26	7
3	Luak	61,68	4
4	Lareh Sagu Ilalahan	394,85	8
5	Sinjua Limo Nagari	74,18	5
6	Harau	416,80	11
7	Ciguak	106,20	5
8	Mungka	83,76	5
9	Suliki	136,94	6
10	Bukik Bansan	294,20	5

11	Gunung Omeh	156,54	3
12	Kapur IX	723,36	7
13	Pangkalan Koto Baru	712,06	6
Jumlah		3354,30	79

Topografis daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antar datar, bergelombang, berbukit - bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 Mdpl dan 2.261 Mdpl. Di daerah ini terdapat tiga buah Gunung yaitu Gunung Sago (2.261 Mdpl), Gunung Bungsu (1.253 Mdpl) dan Gunung Sanggul (1.495 Mdpl). Pada Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat sekitar 13 buah sungai yaitu Batang Agam (28,58 km), Batang Neuan (5 km), Batang Lauipasi (50,37 km), Batang Saipuan (19,41 km), Batang Mahat (76,22 km), Batang Mungo (18,41 km), Batang Liki (6,17 km), Batang Namang (8,52 km), Batang Simamar (96,13 km), Batang Mangilang Malagiri (10,23 km), Batang Sarno (63,40 km) dan Batang Paifi (21,56 km)

5. Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebanyak 385.634 jiwa, dengan rincian 192.857 jiwa penduduk laki-laki dan 192.777 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,04 persen. Kalau dilihat jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 385.634 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per nagari adalah sebesar 4.881 jiwa. Kecamatan yang paling tinggi rata-ratanya adalah Kecamatan Guguk dengan jumlah 7.185 jiwa per nagari

Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama. Pada tahun 2021 jumlah Angkatan kerja tercatat sebesar 200.853 jiwa dengan rincian 50.600 adalah pekerja buruh/ pegawai/ karyawan, 8.423 jiwa adalah berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, 29.487 jiwa adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, 47.085 jiwa adalah berusaha sendiri, 27.770 jiwa adalah pekerja keluarga/ tidak dibayar, 10.757 jiwa adalah pekerja bebas di non pertanian, dan 26.731 jiwa adalah pekerja bebas di pertanian.

6. Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh Kepala Daerah hasil pemilihan langsung (Pilkada) tahun 2020 yaitu:

- Bupati : Safarudin Dt. Bandaro Rajo
- Wakil Bupati : Rizki Kurniawan N

Jahata Kepala Daerah merupakan hasil Pilkada tahun 2020 dimana Bupati dan Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Februari 2021 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-360 tanggal 24 Februari 2021.

Struktur Organisasi pemerintahan daerah yang dipimpin Bupati dan Wakil Bupati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

7. Pengungkapan Lainnya

Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKDUD. Pada tahun 2022 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahar Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh OPD, pendapatan tersebut terjadi pada:

- a. BLUD Puskesmas
- b. BLUD RSUD dr. Ahmad Darwis
- c. Bantuan Operasional Sekolah

BAB VII PENUTUP

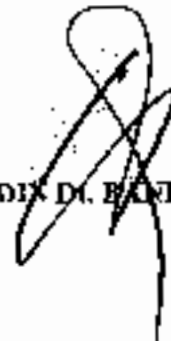
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan Tahun 2022 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan, dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan hibungan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang lebih baik.

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARI DDIK D. BARDARO RAJO

Lampiran

LRA
31 DESEMBER 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2012	%	Realisasi 2011
3	2	3	4	5	6
2.1.1.01.01.01	Beban Pembelian Saji PNS	2.081.892,00	2.081.816,00	99,14	
2.1.1.01.01.02	Beban Pembelian Saji PPPK	164.278,00	161.487,00	98,29	
2.1.1.01.01.03	Beban Jasa Jaminan Kesehatan ASN	20.778.745.732,00	22.531.258.762,00	108,46	
2.1.1.01.01.04	Beban Jasa Jaminan Kesehatan PNS	20.884.797.066,00	18.042.382.029,00	86,41	
2.1.1.01.01.05	Beban Jasa Jaminan Kesehatan PPPK	304.948.066,00	581.876.738,00	190,97	
2.1.1.01.01.06	Beban Jasa Jaminan Kesehatan Korp ASN	757.710.424,00	647.820.894,00	85,48	
2.1.1.01.01.07	Beban Jasa Jaminan Kesehatan Korp PNS	627.079.829,00	613.395.525,00	97,81	
2.1.1.01.01.08	Beban Jasa Jaminan Kesehatan Korp PPPK	26.630.595,00	24.425.369,00	91,76	
2.1.1.01.01.11	Beban Jasa Jaminan Kesehatan ASN	1.324.029.032,00	1.327.116.306,00	99,81	
2.1.1.01.01.11A	Beban Jasa Jaminan Kesehatan PNS	1.264.448.994,00	1.261.306.101,00	99,78	
2.1.1.01.01.11B	Beban Jasa Jaminan Kesehatan PPPK	59.580.038,00	65.810.205,00	110,28	
2.1.1.01.02	Beban Pembelian Penghasilan ASN	24.024.228.278,00	23.260.810.206,00	96,82	
2.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Belas Keadilan ASN	41.722.846.222,00	40.794.547.300,00	97,54	
2.1.1.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Belas Keadilan ASN	41.722.846.222,00	40.794.547.300,00	97,54	
2.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempul Berkas ASN	3.859.704.330,00	5.708.822.887,00	147,94	
2.1.1.02.02.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempul Berkas ASN	3.859.704.330,00	5.708.822.887,00	147,94	
2.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Keadilan Kerja ASN	2.827.971.984,00	2.714.825.237,00	95,99	
2.1.1.02.03.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Keadilan Kerja ASN	2.827.971.984,00	2.714.825.237,00	95,99	
2.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Pribadi ASN	2.852.894.326,00	2.094.833.217,00	73,41	
2.1.1.02.04.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Pribadi ASN	2.852.894.326,00	2.094.833.217,00	73,41	
2.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Pribadi PNS	3.185.437.824,00	2.946.084.299,00	92,48	
2.1.1.02.05.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Pribadi PNS	3.185.437.824,00	2.946.084.299,00	92,48	
2.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perilaku Kerja ASN				
2.1.1.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perilaku Kerja ASN	182.720.527.049,00	177.620.967.080,00	97,21	
2.1.1.03.01	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak Bumi	220.110.284,00	215.013.648,00	97,68	
2.1.1.03.01.00	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak Bumi	220.110.284,00	215.013.648,00	97,68	
2.1.1.03.02	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak Harta	720.000.280,00	664.482,00	0,09	
2.1.1.03.02.00	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak Harta	720.000.280,00	664.482,00	0,09	
2.1.1.03.03	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak Rendah	16.745.640,00	4.491.720,00	26,82	
2.1.1.03.03.00	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak Rendah	16.745.640,00	4.491.720,00	26,82	
2.1.1.03.04	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak Perumahan	622.025.000,00	574.262.000,00	92,31	
2.1.1.03.04.00	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak Perumahan	622.025.000,00	574.262.000,00	92,31	
2.1.1.03.05	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak dan Tanah	24.500.000,00	-	-	
2.1.1.03.06	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak dan Tanah	500.000,00	-	-	
2.1.1.03.07	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak dan Tanah	561.800.000,00	-	-	
2.1.1.03.08	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak dan Tanah	287.223.000,00	27.264.841,00	9,49	
2.1.1.03.09	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak dan Tanah	722.100.000,00	52.000.000,00	7,20	
2.1.1.03.10	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak dan Tanah	304.400.000,00	17.428.000,00	5,73	
2.1.1.03.11	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak dan Tanah	418.000.000,00	418.000.000,00	100,00	
2.1.1.03.12	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak dan Tanah	720.000.000,00	-	-	
2.1.1.03.13	Beban Insentif bagi ASN atas Penugasan Pajak dan Tanah	52.500.000,00	-	-	

Kode Pembayar	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2007	%	Korupsi 2007
1	2	3	4	5	6
2.1.01.01.01.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Prestasi dan Urusi-Perbaikan Asst. Perangkat Kabinet	2.000.000,00	-	-	-
2.1.01.02.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Realisasi Jasa Usaha-Program Terpadu (Baku)	1.750.000,00	-	-	-
2.1.01.03.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program Kegiatan Lain	68.200.000,00	6.148.000,00	9,00	-
2.1.01.04.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Biaya Usaha-Program Pajak	20.000.000,00	-	-	-
2.1.01.05.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program Pajak	3.768.000,00	-	-	-
2.1.01.06.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Prestasi dan Urusi-Perbaikan Asst. Kabinet	15.000.000,00	-	-	-
2.1.01.07.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	4.500.000,00	-	-	-
2.1.01.08.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	47.200.000,00	-	-	-
2.1.01.09.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	6.543.468,20	-	-	-
2.1.01.10.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	128.748.300.000,00	172.307.951.775,00	134,20	-
2.1.01.11.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	120.745.300.000,00	172.352.251.775,00	142,70	-
2.1.01.12.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	2.043.000.000,00	1.461.300.000,00	71,56	-
2.1.01.13.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	2.047.000.000,00	1.561.500.000,00	76,28	-
2.1.01.14.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	687.000.000,00	58.677.350,00	8,54	-
2.1.01.15.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	401.000.000,00	30.917.260,00	7,71	-
2.1.01.16.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	2.137.000.000,00	3.428.202.000,00	160,42	-
2.1.01.17.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	2.640.333.000,00	2.779.450.000,00	105,26	-
2.1.01.18.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	287.400.000,00	745.000.000,00	259,56	-
2.1.01.19.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	10.500.000,00	-	-	-
2.1.01.20.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	10.500.000,00	-	-	-
2.1.01.21.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	11.347.000.000,00	11.512.541.696,90	101,47	-
2.1.01.22.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	752.000.000,00	752.000.000,00	100,00	-
2.1.01.23.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	732.000.000,00	732.000.000,00	100,00	-
2.1.01.24.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	74.525.000,00	72.390.000,00	97,13	-
2.1.01.25.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	73.635.000,00	73.390.000,00	99,67	-
2.1.01.26.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	51.540.200,00	45.907.000,00	89,07	-
2.1.01.27.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	91.549.200,00	85.907.000,00	92,75	-
2.1.01.28.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	67.037.000,00	67.037.000,00	100,00	-
2.1.01.29.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	67.037.000,00	67.037.000,00	100,00	-
2.1.01.30.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	1.337.000.000,00	1.133.651.000,00	84,86	-
2.1.01.31.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	-
2.1.01.32.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	-
2.1.01.33.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	25.177.000,00	25.177.000,00	100,00	-
2.1.01.34.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	25.177.000,00	25.177.000,00	100,00	-
2.1.01.35.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	2.340.000.000,00	2.340.000.000,00	100,00	-
2.1.01.36.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	2.340.000.000,00	2.340.000.000,00	100,00	-
2.1.01.37.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	64.500.000,00	64.500.000,00	100,00	-
2.1.01.38.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	64.500.000,00	64.500.000,00	100,00	-
2.1.01.39.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Kualitas Jasa Usaha-Program-Program Usaha Daerah	5.980.000,00	5.980.000,00	100,00	-
2.1.01.40.00.00	Belanja insentif bagi ASN dan Peningkatan Rendahnya Perforansi Tindakan dan Membina	5.980.000,00	5.980.000,00	100,00	-

Kode Rekening	Uraian	Tambah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
2.1.02.01.01.01	Belanja Bahan Casing, Bodi Casing, Alat Angkut	75.329.866,30	75.218.067,30	99,88	
2.1.02.01.01.02	Belanja Bahan Casing-Sika Casing, Alat Kodingan	13.735.800,00	13.191.080,00	95,38	
2.1.02.01.01.03	Belanja Bahan Casing-Sika Casing Lainnya	4.562.300,00	4.562.000,00	99,99	
2.1.02.01.01.04	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Abdi Tuhon Kerja	3.541.800.000,00	3.227.732.320,00	91,13	
2.1.02.01.01.05	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Kerja dan Kerja	400.000,00	390.000,00	97,50	
2.1.02.01.01.06	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Bahan Kerja	1.932.176.722,00	3.553.462.022,00	183,78	
2.1.02.01.01.07	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Bahan Kerja	199.856.000,00	195.452.000,00	97,79	
2.1.02.01.01.08	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Administrasi Kantor	100.000,00	100.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.09	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Bahan Kerja	1.728.000,00	1.728.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	11.049.800,00	-	-	
2.1.02.01.01.11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	644.660.500,00	621.427.980,00	96,41	
2.1.02.01.01.12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	374.282.200,00	344.443.800,00	92,04	
2.1.02.01.01.13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	187.400.300,00	82.825.800,00	44,19	
2.1.02.01.01.14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	1.190.754.800,00	883.428.980,00	74,19	
2.1.02.01.01.15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	3.197.844.400,00	1.894.084,00	59,23	
2.1.02.01.01.16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	75.801.000,00	75.600.000,00	99,73	
2.1.02.01.01.17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	350.000,00	350.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	70.116.700,00	66.016.200,00	94,15	
2.1.02.01.01.19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	21.000.000,00	19.828.000,00	94,42	
2.1.02.01.01.20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	75.000.000,00	140.894.000,00	187,72	
2.1.02.01.01.21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	4.391.675.000,00	3.700.102.575,00	84,25	
2.1.02.01.01.22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	3.332.480.500,00	2.870.270.540,00	86,12	
2.1.02.01.01.23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	31.000.000,00	-	-	
2.1.02.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	450.107.980,00	425.563.500,00	94,55	
2.1.02.01.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	198.600.800,00	187.130.800,00	94,18	
2.1.02.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	313.744.800,00	311.794.800,00	99,38	
2.1.02.01.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	61.000.000,00	63.892.000,00	104,74	
2.1.02.01.01.28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	31.428.900,00	22.444.800,00	71,43	
2.1.02.01.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	41.861.800,00	44.185.000,00	105,53	
2.1.02.01.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	118.500.000,00	114.243.850,00	96,40	
2.1.02.01.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	220.501.800,00	228.900.000,00	103,81	
2.1.02.01.01.32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	568.133.800,00	545.178.050,00	95,94	
2.1.02.01.01.33	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	52.855.000,00	52.395.000,00	99,13	
2.1.02.01.01.34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	15.800.800,00	15.000.000,00	95,00	
2.1.02.01.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	15.800.800,00	15.000.000,00	95,00	
2.1.02.01.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	104.827.436.210,00	94.181.340.100,00	90,71	
2.1.02.01.01.37	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	10.411.867.300,00	60.740.246.540,00	582,71	
2.1.02.01.01.38	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	10.800.000,00	10.300.000,00	95,37	
2.1.02.01.01.39	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	5.077.410.000,00	4.802.400.000,00	94,56	
2.1.02.01.01.40	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	3.694.800.800,00	3.462.312.110,00	93,70	
2.1.02.01.01.41	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja-Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	1.400.800,00	-	-	

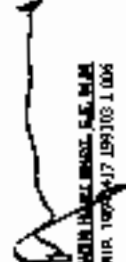
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Persentase 2022
1	2	3	4	5	6
2.1.02.12.01.00	Honorarium Pengabdian atau Penasehat	22.700.000,00	22.700.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.01	Honorarium Kehormatan	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71	
2.1.02.12.01.02	Honorarium Tim Pengajaran Jarak Jauh, Majalah, Pengabdian Masyarakat, dan Kegiatan Lainnya	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.03	Honorarium Pengabdian Masyarakat	24.000.000,00	13.900.000,00	57,92	
2.1.02.12.01.04	Honorarium Pengabdian Masyarakat Pendidikan dan Pelatihan	110.800.000,00	110.300.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.05	Honorarium Tim Magang/Penelitian	574.800.000,00	544.300.000,00	94,69	
2.1.02.12.01.06	Bantuan Jasa Tenaga Pendidikan	1.738.578.200,00	1.648.287.500,00	95,01	
2.1.02.12.01.07	Bantuan Jasa Tenaga Kesehatan	2.294.512.825,00	2.240.576.178,00	97,66	
2.1.02.12.01.08	Bantuan Jasa Tenaga Laboratorium	774.000.000,00	72.640.000,00	9,39	
2.1.02.12.01.09	Bantuan Jasa Tenaga/Kelembagaan, Ketenagakerjaan, dan Perlindungan Masyarakat	1.227.900.000,00	1.252.840.000,00	102,00	
2.1.02.12.01.10	Bantuan Jasa Tenaga Praktek Mahasiswa dan Penyusunan	2.789.430.000,00	2.767.885.554,00	99,25	
2.1.02.12.01.11	Bantuan Jasa Tenaga Pengabdian Masyarakat	7.027.800.000,00	7.026.804.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.12	Bantuan Jasa Tenaga Pengabdian Sosial	134.000.000,00	134.000.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.13	Bantuan Jasa Tenaga Sertifikasi	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.14	Bantuan Jasa Tenaga Pelaksanaan	2.140.500.000,00	2.087.700.000,00	97,53	
2.1.02.12.01.15	Bantuan Jasa Tenaga Teknik Perencanaan	487.618.400,00	487.618.400,00	100,00	
2.1.02.12.01.16	Bantuan Jasa Tenaga Asesmen	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.17	Bantuan Jasa Tenaga Kelembagaan	52.000.000,00	51.780.000,00	99,58	
2.1.02.12.01.18	Bantuan Jasa Tenaga Administrasi	7.271.384.000,00	7.199.696.175,00	98,99	
2.1.02.12.01.19	Bantuan Jasa Tenaga Kegiatan Kelembagaan	15.210.000,00	1.903.804.300,00	125,16	
2.1.02.12.01.20	Bantuan Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.574.300.000,00	3.526.653.900,00	98,69	
2.1.02.12.01.21	Bantuan Jasa Tenaga Ahli	2.083.940.000,00	1.444.240.900,00	69,33	
2.1.02.12.01.22	Bantuan Jasa Tenaga Kelembagaan	3.128.820.000,00	2.884.147.500,00	92,18	
2.1.02.12.01.23	Bantuan Jasa Tenaga Kelembagaan	1.567.800.000,00	1.724.801.400,00	110,00	
2.1.02.12.01.24	Bantuan Jasa Tenaga Desain	7.900.000,00	7.900.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.25	Bantuan Jasa Tenaga Desain	817.581.000,00	809.354.000,00	99,00	
2.1.02.12.01.26	Bantuan Jasa Tenaga Desain Kelembagaan dan Fasilitas	134.480.000,00	131.880.000,00	98,17	
2.1.02.12.01.27	Bantuan Jasa Ahli Perencanaan/Pengabdian	48.389.000,00	45.388.000,00	93,80	
2.1.02.12.01.28	Bantuan Jasa Toko Buku	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.29	Bantuan Jasa Tenaga Informasi dan Komunikasi	207.800.000,00	204.889.000,00	98,59	
2.1.02.12.01.30	Bantuan Jasa Penyelenggaraan Asesmen	1.810.754.000,00	1.806.701.500,00	99,79	
2.1.02.12.01.31	Bantuan Jasa Kelembagaan Asesmen	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.32	Bantuan Jasa Praktek Mahasiswa, Ahli Kelembagaan dan Kelembagaan, serta Ahli Lainnya	460.000.000,00	25.200.000,00	5,48	
2.1.02.12.01.33	Bantuan Jasa Kelembagaan	21.000.000,00	11.487.200,00	54,70	
2.1.02.12.01.34	Bantuan Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	14.000.000,00	13.840.000,00	98,86	
2.1.02.12.01.35	Bantuan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.36	Bantuan Jasa Penyelenggaraan Lainnya	251.490.000,00	51.740.000,00	20,58	
2.1.02.12.01.37	Bantuan Jasa Kelembagaan, Ahli dan Lainnya	1.367.600.000,00	1.296.960.000,00	94,85	
2.1.02.12.01.38	Bantuan Kegiatan Lainnya	145.025.500,00	171.874.300,00	118,51	
2.1.02.12.01.39	Bantuan Kegiatan Kelembagaan	914.453.000,00	284.470.000,00	31,11	
2.1.02.12.01.40	Bantuan Kegiatan Kelembagaan	4.707.769.818,00	6.080.454.700,00	129,16	
2.1.02.12.01.41	Bantuan Kegiatan Kelembagaan Kelembagaan	305.047.000,00	305.047.000,00	100,00	
2.1.02.12.01.42	Bantuan Kegiatan Kelembagaan Kelembagaan TV	2.811.315.000,00	2.858.176.500,00	101,67	
2.1.02.12.01.43	Bantuan Kelembagaan Kelembagaan	15.465.000,00	4.301.000,00	27,81	
2.1.02.12.01.44	Bantuan Kelembagaan Kelembagaan	7.170.000,00	27.000.000,00	376,58	
2.1.02.12.01.45	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Lainnya dan Lainnya	5.800.000,00	3.383.000,00	58,33	
2.1.02.12.01.46	Bantuan Kelembagaan	1.384.804.000,00	4.451.876.100,00	321,61	
2.1.02.12.01.47	Bantuan Kelembagaan Kelembagaan	400.000.000,00			

Demi Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Periode 2021
..	2	3	4	5	6

SARILAMPA, 31 Desember 2022

DEPALA TUJUAN KEBERHASILAN
KABUPATEN LIMA PULUH NAGRA


JAINI LAMALIMAS, S.E., M.M.
NIP. 19870417 199302 1 006


PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KEUANGAN
 Jalan 1 April 1948 Semarang No. 0752, 740025 Kode Pos 50211

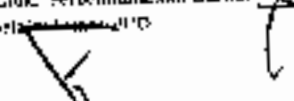
BERITA ACARA
REKONSILIASI PENCATATAN TRANSAKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN BANK AGAMA CABANG PASARUMBAH
PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2022

Ditunjuk dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Agama Cabang Pasarumbah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan rekonsiliasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan Kantor Nagari Cabang Pasarumbah selaku Pemegang Kas Umum Daerah, sebagai berikut:

1. Pencatatan Kasus BUD			
A. Penerimaan			
1. Saldo Bulan Lalu	Rp.	141.720.560.520,14	
2. Dana Transfer	Rp.	3.230.142.014,00	
3. Hibah Pemerintah	Rp.	3.284.662.400,00	
4. DGN Penerima	Rp.	11.877.141.622,00	
5. Asetman. PAD	Rp.	7.201.307.480,48	
	Rp.	<u>176.376.417.537,09</u>	
B. Pengeluaran			
1. SP2D	Rp.	145.079.895.141,00	
2. Deposita	Rp.	<u>174.079.895.141,00</u>	
	Rp.	145.079.895.141,00	
C. Saldo Mutasi Kasus BUD (a-b)		Rp.	106.327.486,09
2. Pencatatan Bank			
a. Penerimaan			
1. Saldo bulan lalu	Rp.	125.450.891.800,00	
2. Penerimaan	Rp.	<u>35.546.738.400,96</u>	
	Rp.	160.997.630.200,96	
b. Pengeluaran		Rp.	160.500.758.101,00
c. Saldo Mutasi Bank (a-b)		Rp.	496.872.099,96
3. Saldo (G-P)		Rp.	-
Pencatatan Saldo		Rp.	-
		Rp.	-
Jumlah (1-3)		Rp.	<u>106.327.486,09</u>

Demikianlah Berita Acara Rekonsiliasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kantor Nagari Cabang Pasarumbah
 www.pasarumbahkab.go.id

M. FARID YATUTI S.Sos
 NIP. 194104082007011001

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Wakil Perambulungan Daerah
 Pasarumbah


M. FARID YATUTI S.Sos
 NIP. 194104082007011001

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
REKAP UYHD
TA 2022

NO.	NAMA OPD	TANGGAL SETOR	RINCIAN	UYHD
1	DINAS PARIWISATA DAN OLAH RAGA	02 Januari 2023	Setoran pengembalian UYHD	18,646,167.00
JUMLAH				18,646,167.00

REKAPITULASI PENYAPATAN DAN REALISASI BUN 2022

NO	NAMA REKORASI	ALUO AWAL	NOO REKORASI	NOO KEMBALA 2022	PERMUDAAN LAIN	TOTAL PERMUDAAN	SELISIH	RTPA	KARR	TUNAI	TOTAL BINA
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9 (7+8)	10	11	12
1	UPD SDN 01 BANTULAMPAR	1.91.821	61.499.824			61.499.824	81.387.710	1.303.311	1.205.071		1.205.071
2	UPD SDN 01 BUKAS PATANG	7.220.330	55.800.000			55.800.000	75.001.400	20.201	20.610		20.610
3	UPD SDN 01 NIGO TANGGALAH BANTU	5.929.870	31.000.000		10.282	31.010.282	87.784.200	226.252	226.752		226.752
4	UPD SDN 01 SAUK PANGK	3.06.675	17.673.331			17.673.331	49.100.775	479.860	539.021		539.021
5	UPD SDN 01 SAKRA LAWEK	217.055	61.733.915			61.733.915	81.123.260	20.390	20.600		20.600
6	UPD SDN 01 SIKAY	1.375.025	66.703.735			66.703.735	265.367.545	12.507	12.506		12.506
7	UPD SDN 01 SILVIA BALANTAR	1.781.094	10.424.260		1.000	10.425.260	11.465.315	107.702	200.702		100.000
8	UPD SDN 01 PATILAMPAN	19.705.020	207.995.201			207.995.201	227.775.000	20.000	20.000		20.000
9	UPD SDN 01 DELONG PATANG	975.260	107.161.000			107.161.000	127.770.000	49.200	49.200		49.200
10	UPD SDN 01 BOTO LAMPAL BANTU	3.022.667	246.251.000			246.251.000	276.717.000	276.000	276.000	0,0	276.000
11	UPD SDN 01 NICA BANGK	1.6.157	25.853.000	8.000.000		33.853.000	170.327.843	780.800	560.000		560.000
12	UPD SDN 01 BUKAS LAWEK	22.210	112.611.000		40.000	112.651.000	117.611.000	72.980	72.980		72.980
13	UPD SDN 01 SIKAY	36.877	111.971.687	90.000.000	740.000	192.742.687	251.792.000	28.400	28.400		28.400
14	UPD SDN 01 SAKRA LAWEK	199.647	22.900.354		1.710.000	24.610.354	34.481.000	49.000	49.000		49.000
15	UPD SDN 01 KODO TANGAL BANTU	2.227.755	33.353.940			33.353.940	61.785.000	261.000	261.000		261.000
16	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	29.774	64.367.652			64.367.652	94.545.000	64.700	64.700		64.700
17	UPD SDN 01 BLADAN	1.229.435	20.231.575			20.231.575	40.211.600	1.224.400	1.224.400		1.224.400
18	UPD SDN 01 SAKRA TANGAL BANTU	1.06.250	36.300.000			36.300.000	40.363.000	346.300	246.300		246.000
19	UPD SDN 01 SAKRA LAWEK	166.969	41.040.000			41.040.000	42.065.000	1.025.000	1.025.000		1.025.000
20	UPD SDN 01 SIKAY	1.447.015	100.380.000	80.000.000	20.000	180.380.000	181.810.740	37.775	37.400		37.400
21	UPD SDN 01 KODO TANGAL BANTU	7.754.132	145.755.000			145.755.000	150.000.000	169.700	169.700	0,000	169.700
22	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	1.840.000	105.450.000	10.000.000		115.450.000	120.074.000	465.000	465.000		465.000
23	UPD SDN 01 BLADAN	83.800	21.293.000			21.293.000	29.907.500	32.400	32.400		32.400
24	UPD SDN 01 KODO TANGAL BANTU	181.800	23.407.700	10.000.000	10.000	33.407.700	66.408.000	120.000	120.000		120.000
25	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	2.320.000	12.750.000			12.750.000	46.000.000	170.000	170.000	10,000	180.000
26	UPD SDN 01 SAKRA LAWEK	120.700	30.727.754			30.727.754	39.400.000	39.100	39.100		39.100
27	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	124.700	21.242.554			21.242.554	23.358.000	28.000	28.000		28.000
28	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	1.017.000	90.446.000			90.446.000	99.000.000	132.000	132.000		132.000
29	UPD SDN 01 KODI BANTU	377.410	112.532.160			112.532.160	112.532.160	177.600	177.600		177.600
30	UPD SDN 01 NICA	1.742.400	96.320.712			96.320.712	131.125.000	150.100	150.100		150.100
31	UPD SDN 01 SILVIA MANANG	50.200	16.100.000			16.100.000	26.150.000	52.000	52.000	10,000	62.000
32	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	1.750.150	92.667.000			92.667.000	94.347.000	383.700	383.700		383.700
33	UPD SDN 01 SAKRA LAWEK	17.900	30.344.400			30.344.400	39.000.000	42.000	42.000		42.000
34	UPD SDN 01 SAKRA LAWEK	289.975	27.463.589			27.463.589	87.915.000	237.200	237.200		237.200
35	UPD SDN 01 SAKRA LAWEK	11.719.010	39.790.410			39.790.410	100.870.000	207.000	207.000		207.000
36	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	561.549	78.408.000			78.408.000	71.350.000	20.000	20.000		20.000
37	UPD SDN 01 NICA LAWEK	7.759.368	44.254.552			44.254.552	52.610.000	70.000	70.000		70.000
38	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	49.232	40.400.500			40.400.500	40.400.500	40.200	40.200		40.200
39	UPD SDN 01 KODI BANTU	28.652	23.547.500			23.547.500	25.820.000	66.300	66.300	10,000	76.300
40	UPD SDN 01 NICA	270.000	22.000.000			22.000.000	22.700.000	181.000	181.000		181.000
41	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	61.000	81.013.000			81.013.000	81.013.000	51.000	51.000		51.000
42	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	50.850	64.001.000			64.001.000	60.600.000	56.400	56.400		56.400
43	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	1.183.404	51.302.000			51.302.000	55.796.000	76.100	76.100		76.100
44	UPD SDN 01 KODO TANGAL	105.843	30.818.000			30.818.000	31.073.000	203.100	202.100		202.100
45	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	906.400	71.153.541			71.153.541	71.610.000	148.000	148.000		148.000
46	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	28.000	30.301.400			30.301.400	32.001.400	50.000	50.000		50.000
47	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	1.367.500	46.657.000			46.657.000	48.010.000	39.000	39.000		39.000
48	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	233.500	97.500.000			97.500.000	97.500.000	100.000	100.000		100.000
49	UPD SDN 01 NICA	494.500	66.250.000			66.250.000	66.250.000	26.000	26.000	10,000	36.000
50	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	1.124.982	72.750.000			72.750.000	72.750.000	40.000	40.000		40.000
51	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	403.100	62.870.000			62.870.000	62.870.000	28.000	28.000		28.000
52	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	37.429.000	23.271.000			23.271.000	132.000.000	204.100	204.100		204.100
53	UPD SDN 01 NICA	4.555.000	65.965.000			65.965.000	96.600.000	217.000	217.000		217.000
54	UPD SDN 01 NICA	1.731.000	34.394.000			34.394.000	31.115.000	140.000	140.000	10,000	150.000
55	UPD SDN 01 NICA	206.400	51.524.000			51.524.000	52.000.000	43.000	43.000		43.000
56	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	101.100	20.200.000			20.200.000	20.200.000	45.100	45.100		45.100
57	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	2.050.000	20.000.000		10,000	20.010.000	24.000.000	210.000	210.000		210.000
58	UPD SDN 01 BARAK LAWEK	1.825.700	20.400.000			20.400.000	22.000.000	171.000	171.000		171.000

123	UPRD BUN 01 PIRIANG	1.814.700	121.702.000	80.000.000	-	27.202.000	80.000.000	5.271.811	8.271.811	7.377.914
124	UPRD BUN 01 SARILANG	9.263.750	351.677.450	20.000.000	-	17.507.150	20.000.000	800.200	800.200	800.200
125	UPRD BUN 01 SARILANG	290.000	153.070.500	-	-	153.070.500	153.070.500	114.900	114.900	473.200
126	UPRD BUN 01 TARAN	3.269.378	17.084.900	-	-	17.084.900	17.084.900	130.770	130.770	130.770
127	UPRD BUN 01 TARAN	4.708.282	17.219.230	-	-	17.219.230	17.219.230	1.350.517	1.350.517	1.000.000
128	UPRD BUN 01 SARILANG	1.040.000	110.210.800	-	-	110.210.800	110.210.800	170.500	170.500	168.300
129	UPRD BUN 01 SARILANG	357.137	30.740.070	-	-	30.740.070	30.740.070	50.000	50.000	50.000
130	UPRD BUN 01 SARILANG	1.515.780	23.074.000	-	-	23.074.000	23.074.000	110.380	110.380	110.380
131	UPRD BUN 01 SARILANG	1.170.000	30.730.000	-	472	30.730.000	30.730.000	500.100	500.100	500.100
132	UPRD BUN 01 SARILANG	1.283.037	69.037.880	-	-	69.037.880	69.037.880	25.880	25.880	25.880
133	UPRD BUN 01 SARILANG	113.431	303.410.290	-	-	303.410.290	303.410.290	25.800	25.800	25.800
134	UPRD BUN 01 SARILANG	1.334.192	11.516.100	-	-	11.516.100	11,516,100	600.000	600.000	494.000
135	UPRD BUN 01 SARILANG	2.997.000	151.500.000	-	-	151,500,000	151,500,000	40.000	40.000	40.000
136	UPRD BUN 01 SARILANG	3.471.342	137.000.000	40.000.000	-	137,000,000	137,000,000	10.000	10.000	1.000.000
137	UPRD BUN 01 SARILANG	3.190.000	200.710.000	10.000.000	495.000	200,710,000	200,710,000	200.000	200.000	4.000.000
138	UPRD BUN 01 SARILANG	104.000	89.900.000	-	-	89,900,000	89,900,000	10.000	10.000	10.000
139	UPRD BUN 01 SARILANG	1.101.000	120.100.000	-	-	120,100,000	120,100,000	400.000	400.000	400.000
140	UPRD BUN 01 SARILANG	1.152.800	101.700.000	-	-	101,700,000	101,700,000	300.000	300.000	300.000
141	UPRD BUN 01 SARILANG	200.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	50.000	50.000	50.000
142	UPRD BUN 01 SARILANG	2.300.000	50.000.000	-	-	50,000,000	50,000,000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
143	UPRD BUN 01 SARILANG	2.300.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
144	UPRD BUN 01 SARILANG	2.300.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
145	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
146	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
147	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
148	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
149	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
150	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
151	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
152	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
153	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
154	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
155	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
156	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
157	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
158	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
159	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
160	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
161	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
162	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
163	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
164	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
165	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
166	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
167	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
168	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
169	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
170	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
171	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
172	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
173	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
174	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
175	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
176	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
177	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
178	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
179	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
180	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
181	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
182	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
183	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
184	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
185	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000
186	UPRD BUN 01 SARILANG	1.000.000	100.000.000	-	-	100,000,000	100,000,000	200.000	200.000	200.000

REKAPITULASI PENDAPATAN DAN PENGALIAN BUM 2022

NO	NAMA SEKOLAH	WALIKU AWAL	RENTAN	RENTAN	PONCOPATAN LAH	TOTAL PENDAPATAN	DEBARJA	SUKA	BAK	TUNAI	TOTAL BSH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	UPPT SMP 1 KEC. WYAKILMBUH	8.761.051	697.473.035	706.234.086	-	1.056.418.082	1.056.418.082	255.261	230.081	-	230.081
2	UPPT SMP 2 KEC. WYAKILMBUH	7.013.967	372.466.890	379.480.857	1.400.000	378.216.857	38.210.888	761.226	591.226	-	301.328
3	UPPT SMP 3 KEC. WYAKILMBUH	1.743.760	316.479.454	318.223.214	-	318.223.214	318.223.214	31.301	74.831	-	31.301
4	UPPT SMP 4 KEC. WYAKILMBUH	8.946.040	136.554.040	145.490.080	-	145.490.080	145.490.080	173.908	373.807	-	373.807
5	UPPT SMP 5 KEC. WYAKILMBUH	3.010.000	150.339.900	153.349.900	70.000.000	223.349.900	223.349.900	677.135	579.306	-	677.135
6	UPPT SMP 6 KEC. WYAKILMBUH	9.360.320	231.639.720	241.000.040	-	241.000.040	241.000.040	368.400	384.500	0	368.400
7	UPPT SMP 7 KEC. WYAKILMBUH	3.241.580	1.154.118.000	1.157.359.580	-	1.157.359.580	1,157,359,580	228.027	243.587	154.441	228.027
8	UPPT SMP 8 KEC. WYAKILMBUH	6.786.116	312.124.453	318.910.569	130.000.000	448.910.569	448.910.569	174.816	156.884	-	174.816
9	UPPT SMP 9 KEC. WYAKILMBUH	579.520	574.719.556	575.299.076	-	575.299.076	575.299.076	23.055	116.025	-	23.055
10	UPPT SMP 10 KEC. WYAKILMBUH	1.403.593	76.779.371	78.182.964	-	78.182.964	78.182.964	875.027	377.267	1.000	875.027
11	UPPT SMP 11 KEC. WYAKILMBUH	485.264	77.541.472	78.026.736	-	78.026.736	78,026,736	130.112	136.772	-	130.112
12	UPPT SMP 12 KEC. GLOUGS	3.135.169	517.268.974	520.404.143	1.000.000.000	1,520,404,143	700,324,333	985.012	380.512	-	985.012
13	UPPT SMP 13 KEC. GLOUGS	2.777.799	149.530.291	152.308.090	-	152.308.090	152,308,090	1.122.821	1.122.821	-	1,122,821
14	UPPT SMP 14 KEC. GLOUGS	2.404.758	122.512.288	124.917.046	-	124.917.046	124,917,046	252.830	228.230	-	252.830
15	UPPT SMP 15 KEC. GLOUGS	2.746.811	67.266.411	70.013.222	-	70,013,222	70,013,222	30.071	67.500	-	30.071
16	UPPT SMP 16 KEC. GLOUGS	27.488	128.122.428	128.150.000	220.000.000	348,150,000	348,150,000	141.500	141.500	-	141,500
17	UPPT SMP 17 KEC. PUKIK	1.225.807	139.227.217	140.453.024	-	140,453,024	140,453,024	943.057	650.051	-	943.057
18	UPPT SMP 18 KEC. PUKIK	3.232.223	360.249.177	363.481.400	-	363,481,400	363,481,400	1.018.889	1.018.889	-	1,018,889
19	UPPT SMP 19 KEC. PUKIK	459.093	266.719.774	267.178.867	-	267,178,867	267,178,867	275.007	275.007	-	275,007
20	UPPT SMP 20 KEC. PUKIK	3.275.245	540.264.175	543.539.420	-	543,539,420	543,539,420	118.550	118.550	-	118,550
21	UPPT SMP 21 KEC. PUKIK	19.315.765	739.743.908	759,059,673	25.000	759,084,673	759,084,673	89.301	75.801	-	89,301
22	UPPT SMP 22 KEC. PUKIK	1.225.807	129.005.472	130.231.279	-	130,231,279	130,231,279	118.568	118.568	352.000	130,231,279
23	UPPT SMP 23 KEC. PUKIK	1.734.480	45.915.600	47.650.080	-	47,650,080	47,650,080	100.108	100.108	-	100,108
24	UPPT SMP 24 KEC. PUKIK	1.225.807	298.423.000	299.648.807	-	299,648,807	299,648,807	572.508	292.000	-	572,508
25	UPPT SMP 25 KEC. PUKIK	25.000	269.880.000	269.905.000	-	269,905,000	269,905,000	30.600	30.600	-	30,600
26	UPPT SMP 26 KEC. PASUKALAN KOTO BARU	5.191.975	495.080.169	500.272.144	70.000.000	570,272,144	668,498,477	215.275	215,806	-	215,806
27	UPPT SMP 27 KEC. PASUKALAN KOTO BARU	1.273.009	239.307.000	240.580.009	-	240,580,009	240,580,009	67.800	67,800	-	67,800
28	UPPT SMP 28 KEC. PASUKALAN KOTO BARU	35.129.364	565.717.635	599,847,000	-	599,847,000	599,847,000	19,200,000	130,000	8.120.000	15,540.000
29	UPPT SMP 29 KEC. PASUKALAN KOTO BARU	319.051	214.043.977	214,363,028	-	214,363,028	214,363,028	1.095.222	1.095.222	-	1,095,222
30	UPPT SMP 30 KEC. PASUKALAN KOTO BARU	1.392.476	113.343.170	114,735,646	-	114,735,646	114,735,646	113.221	113,221	-	113,221
31	UPPT SMP 31 KEC. PUKIK BARISAY	6.351.853	121.782.147	128.134.000	-	128,134,000	128,134,000	177.500	177,500	-	177,500
32	UPPT SMP 32 KEC. PUKIK BARISAY	1.225.807	298.423.000	299.648.807	-	299,648,807	299,648,807	649.000	445.000	-	649,000
33	UPPT SMP 33 KEC. PUKIK BARISAY	55.000	62.000.000	62,550,000	-	62,550,000	62,550,000	5.000	43.000	3.000	51,500
34	UPPT SMP 34 KEC. MURUKA	1.315.850	296.721.810	298.037.660	-	298,037,660	298,037,660	20.500	20,500	-	20,500
35	UPPT SMP 35 KEC. MURUKA	2.118.852	291.101.015	293.220.000	-	293,220,000	293,220,000	46.414	45,414	-	46,414
36	UPPT SMP 36 KEC. MURUKA	1.250.350	59.010.232	60.260.582	-	60,260,582	60,260,582	116.571	116,571	-	116,571
37	UPPT SMP 37 KEC. AKABILLAH	2.051.746	141.583.874	143.635.620	-	143,635,620	143,635,620	70.350	70,350	-	70,350
38	UPPT SMP 38 KEC. AKABILLAH	0.940.217	175.441.703	176,381,920	-	176,381,920	176,381,920	2,500,500	2,601,000	-	2,500,500
39	UPPT SMP 39 KEC. AKABILLAH	10.496.768	82.824.224	93,321,000	-	93,321,000	93,321,000	67.000	67,000	-	67,000
40	UPPT SMP 40 KEC. RTTALIAH TING BAGAM	1.664.779	400.230.225	401.905.000	3.000.000	404,905,000	404,905,000	8.750.000	3.980.225	180.775	4,190,000
41	UPPT SMP 41 KEC. RTTALIAH TING BAGAM	3.105.515	177.331.131	180,436,646	-	180,436,646	179,538,000	20.380	581.850	-	681,380
42	UPPT SMP 42 KEC. LARSI BAGO HALAJAR	1.001.450	891.158.600	892.160.050	-	892,160,050	892,160,050	173.204	173,204	-	173,204
43	UPPT SMP 43 KEC. LARSI BAGO HALAJAR	2.127.522	467.152.580	469,280.102	3.140.000	472,420,102	484,318,200	780.780	780,780	-	780,780
44	UPPT SMP 44 KEC. LARSI BAGO HALAJAR	1.557.300	250.008.000	251.565.300	-	251,565,300	251,565,300	14.000	139.000	-	153,000
45	UPPT SMP 45 KEC. LARSI BAGO HALAJAR	5.121.300	178.377.700	183.499.000	-	183,499,000	183,499,000	348.200	348,200	-	348,200
46	UPPT SMP 46 KEC. LARSI BAGO HALAJAR	1.478.229	77.121.741	78.600.000	-	78,600,000	79,488,500	1.633.500	1.633,500	-	1,633,500
47	UPPT SMP 47 KEC. PUKIK BARISAY	241.280	61.130.741	61,372,021	-	61,372,021	61,372,021	54.744	54,744	-	54,744
	Jumlah	287.982.698	18.770.358.408	19.058.341.106	24.180.000	19,082,521,106	21,672,521,106	32.000.847	21.633.081	50.399.266	42.032.347

Kota....., 10 Januari 2023
 Kepala Dinas Pendapatan dan Kerjasama
 Kota Lima Puluh Kota
 (Tanda Tangan dan Stempel Kepala Dinas)

Lampiran Keuangan Pokok BLUD Puskesmas

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PUSKEGMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA				
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA				
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dimisalkan				
1.1.03					
1.1.04	Lain-lain PAD yang Bayah	18.420.000.000,00	17.912.210.623,00	98,62	18.413.890.790
	JUMLAH PAD	18.500.000.000,00	17.912.210.623,00	98,62	18.413.890.790,00
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.01	Belanja Pegawai	8.412.547.145,00	7.246.447.631,40	86,14	7.884.922.000,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.802.514.085,00	3.874.229.817,36	101,92	12.321.840.111,82
2.1.05	Belanja Hibah				
2.1.09	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	12.215.061.230,00	11.120.677.448,76	90,99	20.206.762.111,82
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.01	Belanja Modal Tanah				
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.990.040.514,00	2.205.672.762,00	73,77	2.878.712.764,00
2.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Bangunan	381.215.345,00	360.441.103,00	94,62	670.317.338,00
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	19.874.702,00
2.2.06	Belanja Modal Aset Intangible lainnya				17.975.275,00
2.2.08	Belanja Modal Aset Intangible lainnya				20.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal	8.371.255.859,00	7.971.063.865,00	95,22	3.614.860.076,00
	JUMLAH BELANJA	20.586.317.089,00	19.091.741.313,76	92,74	23.821.622.187,82
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(2.886.317.089,00)	200.489.129,24	(6,88)	792.548.603,98

Kepala Puskesmas Kesehatan
 Drs. NOFIARMAN
 NIP. 196510411999001002

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PUSKESMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.01	Pajak Daerah LRA				
1.1.02	Retribusi Daerah LRA				
1.1.03	Has. Pengalihan Kewajiban Daerah yang Dipisahkan				
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah	18.600.000.000,00	17.912.210.523,00	96,82	18.413.890.790,00
	JUMLAH PAD	18.600.000.000,00	17.912.210.523,00	96,82	18.413.890.790,00
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.01	Belanja Pegawai	6.412.311.145,00	7.246.427.891,40	98,14	6.644.622.500,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.352.551.895,00	7.974.223.817,36	149,92	12.371.840.111,92
2.1.03	Belanja Hibah				
2.1.04	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	11.764.863.040,00	15.220.651.708,76	82,78	14.016.462.611,92
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.01	Belanja Modal anar				
2.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	2.808.849.014,00	2.205.672.782,00	81,72	2.876.712.761,00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.312.215.345,00	580.411.106,00	41,82	676.017.308,00
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jaringan	3.015.000,00	1.950.000,00	59,00	19.674.702,00
2.2.05	Belanja Modal Ases Tetap Lainnya				17.875.275,00
2.2.06	Belanja Modal Ases Lainnya				20.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal	3.235.063.859,00	2.591.063.885,00	80,09	3.614.880.076,00
	JUMLAH BELANJA	21.499.999.999,00	17.711.741.393,76	82,38	17.621.342.687,92
	SURPLUS/ (DEFISI)	(2.900.999.999,00)	200.469.129,24	(6,68)	792.548.602,08



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 BAHAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA				
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA				
1.1.03	Hasil Pengenaan Pajak Daerah yang Dipisahkan				
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah	18.500.000.000,00	17.912.210.523,00	96,82	18.413.890.790,00
	JUMLAH PAD	18.500.000.000,00	17.912.210.523,00	96,82	18.413.890.790,00
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.01	Salaria Pegawai	8.412.341.145,00	7.248.447.821,10	86,14	1.684.622.000,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.852.894.995,00	7.674.229.817,36	77,89	12.321.040.111,92
2.1.03	Belanja Hibat				
2.1.04	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	18.265.236.140,00	15.120.677.598,76	82,79	14.006.462.111,92
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.01	Belanja Modal Tanah				
2.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Merenovasi	2.656.348.514,00	2.206.572.782,00	81,76	2.876.712.761,00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	331.216.545,00	380.441.103,00	115,16	878.317.338,00
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jembatan	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	19.871.702,00
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				17.675.275,00
2.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				20.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal	3.235.063.859,00	2.591.063.885,00	80,06	3.814.660.076,00
	JUMLAH BELANJA	21.499.899.899,00	17.711.741.393,76	82,38	17.821.342.187,92
	SURPLUS/DEFISIT	(2.999.899.899,00)	200.469.129,24	(6,88)	702.548.602,08



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PUSKESMAS
LAPORAN OPERASIONAL
BULAN TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode Akun	Uraian	2022	2021	Revisi/Amalgamasi	Saldo Awal
	KERATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN				
71	PENDAPATAN AG. DAERAH	47.931.012.528,00	34.140.810.000,00		
7101	DBH (RUMAH LINGG)				
7102	Retribusi Perumahan Kota				
7103	Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan				
7104	Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan	47.931.012.528,00	34.140.810.000,00		
	Jumlah PADI	47.931.012.528,00	34.140.810.000,00		
72	PERHITUNGAN PENGHASIL				
7201	Penghasilan Pajak Perorangan Final				
7202	Akumulasi Penghasilan				
7203	Akumulasi Penghasilan				
7204	Penghasilan Pajak Perorangan				
7205	Penghasilan Pajak Perorangan				
7206	Penghasilan Pajak Perorangan				
7207	Penghasilan Pajak Perorangan				
7208	Penghasilan Pajak Perorangan				
7209	Penghasilan Pajak Perorangan				
7210	Penghasilan Pajak Perorangan				
7211	Penghasilan Pajak Perorangan				
7212	Penghasilan Pajak Perorangan				
7213	Penghasilan Pajak Perorangan				
7214	Penghasilan Pajak Perorangan				
7215	Penghasilan Pajak Perorangan				
7216	Penghasilan Pajak Perorangan				
7217	Penghasilan Pajak Perorangan				
7218	Penghasilan Pajak Perorangan				
7219	Penghasilan Pajak Perorangan				
7220	Penghasilan Pajak Perorangan				
	Jumlah Penghasilan				
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BUKAN				
7301	Perolehan Plus-minus				
7302	Keuntungan/kerugian penjualan aset dan kewajiban keuangan lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah				
	Jumlah Pendapatan	47.931.012.528,00	34.140.810.000,00		
4	BEBAN	10.704.788.286,47	10.704.788.286,47		
41	BEBAN OPERAS	10.704.788.286,47	10.704.788.286,47		
4101	Beban Pegawai	6.485.441.511,40	6.485.441.511,40		
4102	Beban Barang dan Jasa	4.219.346.775,07	4.219.346.775,07		
	Beban Perawatan	2.905.592.122,18	2.905.592.122,18		
	Beban Jasa	3.900.287.514,38	3.900.287.514,38		
	Beban Pemeliharaan	600.000.000,00	600.000.000,00		
	Beban Perjalanan Dinas	288.000.000,00	288.000.000,00		
4103	Beban Hibah				
4104	Beban Bantuan Sosial				
4105	Beban Penghasilan Pajak				
4106	Beban Penghasilan Pajak				
4107	Beban Penghasilan Pajak				
4108	Beban Penghasilan Pajak				
4109	Beban Penghasilan Pajak				
4110	Beban Penghasilan Pajak				
4111	Beban Penghasilan Pajak				
4112	Beban Penghasilan Pajak				
4113	Beban Penghasilan Pajak				
4114	Beban Penghasilan Pajak				
4115	Beban Penghasilan Pajak				
4116	Beban Penghasilan Pajak				
4117	Beban Penghasilan Pajak				
4118	Beban Penghasilan Pajak				
4119	Beban Penghasilan Pajak				
4120	Beban Penghasilan Pajak				
4121	Beban Penghasilan Pajak				
4122	Beban Penghasilan Pajak				
4123	Beban Penghasilan Pajak				
4124	Beban Penghasilan Pajak				
4125	Beban Penghasilan Pajak				
4126	Beban Penghasilan Pajak				
4127	Beban Penghasilan Pajak				
4128	Beban Penghasilan Pajak				
4129	Beban Penghasilan Pajak				
4130	Beban Penghasilan Pajak				
4131	Beban Penghasilan Pajak				
4132	Beban Penghasilan Pajak				
4133	Beban Penghasilan Pajak				
4134	Beban Penghasilan Pajak				
4135	Beban Penghasilan Pajak				
4136	Beban Penghasilan Pajak				
4137	Beban Penghasilan Pajak				
4138	Beban Penghasilan Pajak				
4139	Beban Penghasilan Pajak				
4140	Beban Penghasilan Pajak				
4141	Beban Penghasilan Pajak				
4142	Beban Penghasilan Pajak				
4143	Beban Penghasilan Pajak				
4144	Beban Penghasilan Pajak				
4145	Beban Penghasilan Pajak				
4146	Beban Penghasilan Pajak				
4147	Beban Penghasilan Pajak				
4148	Beban Penghasilan Pajak				
4149	Beban Penghasilan Pajak				
4150	Beban Penghasilan Pajak				
4151	Beban Penghasilan Pajak				
4152	Beban Penghasilan Pajak				
4153	Beban Penghasilan Pajak				
4154	Beban Penghasilan Pajak				
4155	Beban Penghasilan Pajak				
4156	Beban Penghasilan Pajak				
4157	Beban Penghasilan Pajak				
4158	Beban Penghasilan Pajak				
4159	Beban Penghasilan Pajak				
4160	Beban Penghasilan Pajak				
4161	Beban Penghasilan Pajak				
4162	Beban Penghasilan Pajak				
4163	Beban Penghasilan Pajak				
4164	Beban Penghasilan Pajak				
4165	Beban Penghasilan Pajak				
4166	Beban Penghasilan Pajak				
4167	Beban Penghasilan Pajak				
4168	Beban Penghasilan Pajak				
4169	Beban Penghasilan Pajak				
4170	Beban Penghasilan Pajak				
4171	Beban Penghasilan Pajak				
4172	Beban Penghasilan Pajak				
4173	Beban Penghasilan Pajak				
4174	Beban Penghasilan Pajak				
4175	Beban Penghasilan Pajak				
4176	Beban Penghasilan Pajak				
4177	Beban Penghasilan Pajak				
4178	Beban Penghasilan Pajak				
4179	Beban Penghasilan Pajak				
4180	Beban Penghasilan Pajak				
4181	Beban Penghasilan Pajak				
4182	Beban Penghasilan Pajak				
4183	Beban Penghasilan Pajak				
4184	Beban Penghasilan Pajak				
4185	Beban Penghasilan Pajak				
4186	Beban Penghasilan Pajak				
4187	Beban Penghasilan Pajak				
4188	Beban Penghasilan Pajak				
4189	Beban Penghasilan Pajak				
4190	Beban Penghasilan Pajak				
4191	Beban Penghasilan Pajak				
4192	Beban Penghasilan Pajak				
4193	Beban Penghasilan Pajak				
4194	Beban Penghasilan Pajak				
4195	Beban Penghasilan Pajak				
4196	Beban Penghasilan Pajak				
4197	Beban Penghasilan Pajak				
4198	Beban Penghasilan Pajak				
4199	Beban Penghasilan Pajak				
	Jumlah BEBAN	10.704.788.286,47	10.704.788.286,47		
	SELISIR (PADA KELOMPOK)	37.226.224.241,53	23.436.021.713,53		



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NOMOR	Uraian	2022	2021
1	Ekuitas Awal	14.988.824.938,88	13.433.884.212,46
2	Surplus/defisit - LO	-293.695.473,89	1.536.127.600,83
3	R/K PPKD	0,00	0,00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	3.704.302,00	15.516.126,00
	Koreksi Akt. Penyisihan Pertama kali		
	Koreksi Hutang PPK		21.711.345,00
	Koreksi Piutang Tahun Lalu		21.900,00
	Barang yang akan diseralikan ke Masyarakat		
	Mutasi Tambah Aset Tetap	3.704.302,00	
	Mutasi Kurang Aset Tetap	0,00	0,00
	Mutasi Kurang Aset Tetap		
	Mutasi Kurang Aset Tetap		
	Mutasi Kurang Aset Lainnya		
	Penghapusan	0,00	0,00
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB tahun Sebelumnya		
	Koreksi kas BLUD pnskesmas		-8.218.485,00
	Koreksi kurang aset Ekstna Kempenabel		
	Koreksi Ekuitas Tahun Lalu		
	Koreksi aset	0,00	-54,00
5	Ekuitas Akhir	14.695.533.767,09	14.988.824.938,88
		14.698.633.767,09	14.886.524.938,88

Payakumbuh, Januari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN



Drs. DR. ABEL NORMAN
NIP. 1963031002

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NOMOR	Uraian	2022	2021
1	Ekuitas Awal	14.985.524.938,98	13.433.381.212,45
2	Surplus/defisit - LO	-293.695.473,89	1.636.127.600,63
3	R/K PPKD	0,00	0,00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	3.704.302,00	15.516.126,00
	Koreksi Akm. Penyutan Perbaikan kali		
	Koreksi Hutang PPK		21.711.345,00
	Koreksi Hutang Tahun Lalu		21.300,00
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat		
	Mutasi Tambah Aset Tetap	3.704.302,00	
	Mutasi Kurang Aset Tetap	0,00	0,00
	Mutasi Kurang Aset Tetap		
	Mutasi Kurang Aset Tetap		
	Mutasi Kurang Aset Lainnya		
	Penghapusan	0,00	0,00
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya		
	Koreksi kas BLUD puskospita		-8.218.485,00
	Koreksi kurang gem Ekstra Kumutabel		
	Koreksi Ekuitas Tahun Lalu		
	Koreksi aset	0,00	-54,00
5	Ekuitas Akhir	14.895.533.767,09	14.986.624.938,98
		14.695.533.767,09	14.986.524.938,98

Pawakumbuh, Januari 2023
DINAS KESEHATAN



DINAS KESEHATAN
NIP. 196003 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NOMOR	Uraian	2022	2021
1	Ekuitas Awal	14.985.524.938,98	13.433.831.212,46
2	Surplus/defisit - LO	-293.696.473,89	1.536.127.600,53
3	R/K PPKD	0,00	0,00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	3.704.302,00	15.518.126,00
	Koreksi Akm. Peny. Lta. Pertama kali		21.711.345,00
	Koreksi Hutang PPK		21.300,00
	Koreksi Piutang Tahun Lalu		21.300,00
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat		
	Mutasi Tambah Aset Tetap	3.704.302,00	
	Mutasi Kurang Aset Tetap	0,00	0,00
	Mutasi Kurang Aset Tetap		
	Mutasi Kurang Aset Tetap		
	Mutasi Kurang Aset Tetap		
	Mutasi Kurang Aset Lainnya		
	Penghapusan	0,00	0,00
	Koreksi Akm. Peny. AT GA Tahun Sebelumnya		
	Koreksi kas BLUD puskesmas		-8.216.465,00
	Koreksi kurang aset Ekstra Kompartabel		
	Koreksi Ekuitas Tahun Lalu		
	Koreksi esel	0,00	-54,00
5	Ekuitas Akhir	14.695.533.767,09	14.985.524.938,98
		14.695.533.767,09	14.985.524.938,98

Payakumbuh, Juli 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 BAHAN LAYANAN TAHUN DIARRAH - PUSKESMAS
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN TRDPT
 PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	KW	2022	2021
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	5.837.239.127,71	5.033.517.059,63
2.	Pergerakan SAL, sebagai tambahan Penghasilan Tahun Berjalan	5.2.2	-	-
3.	Saldo Yaitu ()		5.837.239.127,71	5.033.517.059,63
4.	Sisa Laba/Kerugian (Penghasilan Anggaran) (S/L/P/S/K/S/L)	5.2.3	293.293.651,21	752.546.602,08
5.	Sisa Laba ()		6.032.834.378,92	5.826.063.661,71
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	-	6.047.585,00
7.	Lain-lain		-	-
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	6.032.834.378,92	5.832.113.246,71

Diambil dari laporan keuangan yang telah diperiksa, yang merupakan tanggung jawab pembuat laporan.



PERMINTAAN KABUPATEN LIMA PULUH BOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LPRO1
PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	Ref.	2021	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	5.827.236.727,71	5.833.517.029,63
2	Keuntungan s.d. sebagai, penambahan, pembiayaan Tabung Bersih	5.2.2		
3	Saldo Total (1 + 2)		5.827.236.727,71	5.833.517.029,63
4	Saldo Lebih/Surang Pembiayaan Anggaran (SIL PA-SIKPA)	5.2.3	195.594.661,24	792.548.602,05
5	Saldo Total (3 + 4)		6.022.831.388,95	6.626.065.631,71
6	Keuntungan Kesehatan Ambulans Tabung Sekelompok	5.2.4		6.041.536,00
7	Penjualan			
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	6.832.834.378,95	5.832.112.348,71

6. Saldo akhir yang akan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan anggaran tahun berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
 BADAN LAYANAN LUMUH DARAH - PUSKERTMAS
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	Ref.	2022	2021
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	5.897.279.721,72	5.303.317.021,63
2.	Perubahan SAL sebagai Realisasi Pembinaan Tahun Berjalan	5.2.2		
3.	Saldo Anggaran Lebih Akhir		5.897.279.721,71	5.303.317.021,63
4.	Saldo Anggaran Lebih Awal Anggaran (SIPAS/STPA)	5.2.3	91.954.651,24	72.748.602,09
5.	Saldo Anggaran Lebih Akhir		6.032.834.378,95	5.826.065.661,71
6.	Koreksi Kesalahan Pembinaan Tahun Sebelumnya	5.2.4		6.647.382,40
7.	Saldo Awal			
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.4	6.032.834.378,95	5.832.713.044,11

Garis-garis dengan tanda panah menunjukkan adanya perubahan dari tahun sebelumnya



Laporan Keuangan Pokok RSUD dr. ACHMAD DARWIS

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOYA
RSUD dr. Achmad Dahwis
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021 dan 2022

Detail Rincian

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAK DAERAH	23,864,807,000.00	28,042,402,802.00	109.08	36,213,159,878.00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23,864,807,000.00	28,042,402,802.00	109.08	36,213,159,878.00
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	23,864,807,000.00	28,042,402,802.00	109.33	36,213,159,878.00
2	BELANJA DAERAH	47,760,893,097.00	48,842,727,248.00	57.59	53,231,326,660.00
2.1.	BELANJA OPERASI	46,743,823,037.00	44,874,431,021.00	93.50	44,983,758,778.00
2.1.C1.	Belanja Pegawai	27,282,118,357.00	29,700,741,220.00	93.22	27,412,050,531.00
2.1.C2.	Belanja Barang Jajanan	19,261,704,200.00	18,074,389,311.00	93.44	23,491,088,347.00
2.1.C5.	Belanja Listrik	100,000,000.00	-	-	-
2.2.	BELANJA MODAL	2,007,070,000.00	1,788,858,218.00	89.12	8,427,647,782.00
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan mesin	1,210,653,330.00	1,433,694,758.00	85.20	6,574,405,400.00
2.2.73.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285,975,000.00	295,097,550.00	93.67	280,112,382.00
2.2.04.	Belanja Modal Jalan, jembatan dan tanggul	-	-	-	-
2.2.05.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	SURPLUS (DIFFISIT)	(23,866,086,097.00)	(48,670,384,647.00)	85.32	(27,018,167,431.00)



Selamat, 14 Agustus 2023
 dr. Mj. Rahmatullah, MARS
 NIP. 19620909200212 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KATA
RSJD dr. AHMAD DARWIS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PENDAPATAN LABA-RAB	23.884.807.000,00	26.042.492.802,00	109,03	26.213.158.079,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.884.807.000,00	26.042.492.802,00	109,03	26.213.158.079,00
1.1.04.	Padapatan PAD yang Sifat	23.884.807.000,00	26.042.492.802,00	109,03	26.213.158.079,00
1.1.04.10	Penerimaan BLJD	21.954.827.000,00	25.047.401.119,00	114,05	25.318.189.078,00
1.1.04.10.01	Penerimaan BLJD	21.954.827.000,00	25.047.401.119,00	114,05	25.318.189.078,00
1.1.04.10.01.00	Penerimaan BLJD	21.954.827.000,00	25.047.401.119,00	114,05	25.318.189.078,00
2.	BELANJA DAERAH	17.790.899.057,05	46.642.707.288,00	262,88	58.831.388.180,00
2.1.	BELANJA OPERASI	15.743.829.057,05	44.874.141.021,00	285,10	44.903.789.778,00
2.1.01.	Belanja Pegawai	27.282.148.867,00	28.788.741.928,00	105,51	28.412.086.591,00
2.1.01.01	Belanja Gaji, Tunjangan ASN	12.982.361.796,00	12.798.490.928,00	98,51	12.242.267.479,00
2.1.01.01.00	Belanja Gaji, Tunjangan ASN	12.982.361.796,00	12.798.490.928,00	98,51	12.242.267.479,00
2.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pegawai PNS	8.008.416.763,00	8.005.525.988,00	99,97	8.004.868.637,00
2.1.01.01.02.00	Belanja Gaji Pegawai PPPK	2.222.954.600,00	2.222.954.600,00	100,00	190.690.400,00
2.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Kesehatan ASN	2.751.000,00	642.540.000,00	233,29	822.766.557,00
2.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Kesehatan PNS	1.622.000,00	226.067.148,00	14,00	606.506.211,00
2.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Kesehatan PPPK	1.489.000,00	18.483.382,00	124,13	1.620.398,00
2.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Kesehatan ASN	135.120.000,00	134.490.000,00	99,54	127.960.000,00
2.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan Kesehatan PNS	125.120.000,00	134.490.000,00	107,41	127.260.000,00
2.1.01.01.08.00	Belanja Tunjangan Kesehatan ASN	665.885.000,00	679.414.000,00	102,03	647.074.000,00
2.1.01.01.09.00	Belanja Tunjangan Kesehatan PNS	665.885.000,00	679.414.000,00	102,03	647.074.000,00
2.1.01.01.10.00	Belanja Tunjangan Kesehatan PPPK	5.400.000,00	1.444.000,00	26,74	
2.1.01.01.11.00	Belanja Tunjangan Kesehatan Jumlah ASN	254.756.000,00	253.594.000,00	99,55	220.890.000,00
2.1.01.01.12.00	Belanja Tunjangan Kesehatan Jumlah PNS	242.756.000,00	239.540.000,00	98,68	217.890.000,00
2.1.01.01.13.00	Belanja Tunjangan Kesehatan Jumlah PPPK	4.244.000,00	14.040.000,00	330,80	2.668.000,00
2.1.01.02.00	Belanja Pegawai Bonus ASN	385.125.428,00	430.458.528,00	111,88	385.223.500,00
2.1.01.02.01.00	Belanja Pegawai Bonus PNS	6.682.200,00	619.397.420,00	92,86	575.814.200,00
2.1.01.02.02.00	Belanja Pegawai Bonus PPPK	17.843.228,00	17.839.130,00	99,99	14.411.590,00
2.1.01.03.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	4.728.011,00	4.529.618,00	95,79	3.570.075,00
2.1.01.03.01.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan PNS	4.728.011,00	4.529.618,00	95,79	3.570.075,00
2.1.01.03.02.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	0,00	162.142,00		161.410,00
2.1.01.03.03.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	0,00	126.070,00		140.708,00
2.1.01.03.04.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	0,00	6.068,00		2.108,00
2.1.01.03.05.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	0,00	3.221.708,00		7.301.198,00
2.1.01.03.06.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	0,00	3.221.708,00		7.301.198,00
2.1.01.03.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	21.825.828,00	25.984.411,00	119,08	18.071.812,00
2.1.01.03.08.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	2.248.900,00	20.297.658,00	90,33	18.275.725,00
2.1.01.03.09.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	454.418,00	467.418,00	102,86	374.120,00
2.1.01.03.10.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	14.057.285,00	62.007.944,00	441,92	60.814.300,00
2.1.01.03.11.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	82.585.581,00	87.741.444,00	105,64	87.370.000,00
2.1.01.03.12.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kesehatan ASN	1.372.392,00	1.277.300,00	92,36	1.145.900,00
2.1.01.04.00	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.257.454.844,00	8.367.122,00	0,10	8.257.454.844,00
2.1.01.05.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	2.393.578.824,00	2.029.983.402,00	84,81	2.418.418.828,00
2.1.01.05.01.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja PNS	2.393.578.824,00	2.029.983.402,00	84,81	2.418.418.828,00
2.1.01.05.02.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	191.280.220,00		153.176.817,00
2.1.01.05.03.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	191.280.220,00		153.176.817,00
2.1.01.05.04.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	2.940.804.280,00		2.174.243.845,00
2.1.01.05.05.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	2.548.054.280,00		2.572.973.845,00
2.1.01.06.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	32.753.670,00	81.442.000,00	248,45	229.296.000,00
2.1.01.06.01.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.02.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.03.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.04.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.05.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.06.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.07.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.08.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.09.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.10.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.11.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.12.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.13.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.14.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.15.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.16.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.17.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.18.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.19.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.20.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.21.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.22.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.23.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.24.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.25.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.26.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.27.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.28.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.29.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.01.06.30.00	Tambahan Penghasilan berkaitan dengan Belanja Kerja ASN	0,00	0,00		0,00
2.1.02.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.01.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.02.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.03.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.04.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.05.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.06.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.07.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.08.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.09.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.10.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.11.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.12.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.13.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.14.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.15.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.16.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.17.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.18.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.19.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.20.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.21.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.22.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.23.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.24.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.25.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.26.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.27.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.28.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.29.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.01.30.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.01.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.02.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.03.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.04.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.05.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.06.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.07.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.08.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.09.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.10.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.11.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.12.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.13.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.14.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.15.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.16.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.17.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.18.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.19.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.20.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.21.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.22.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.23.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.24.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.25.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.26.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.27.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
2.1.02.02.28.00	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00

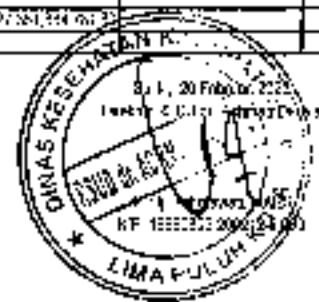
JUMLAH KEBI		64.826.364.856,62	63.710.419.704,29
1	KEWAJIBAN	4.137.616.817,10	4.581.176.084,00
1.1	KEWAJIBAN LANGKA PERIODE	4.137.616.817,10	4.581.176.084,00
2.101	Utang Perseorangan Pihak Ketiga		
2.1.15	Utang Perseorangan Pihak Ketiga		
2.1.15.1	Utang Bank	2.013.787.652,00	
	Utang Bank Syariah	2.013.787.652,00	
	Utang Bank Syariah - ELLE PAB	2.013.787.652,00	
2.1.15.1.1	Utang Bank Syariah dan Jasa	2.133.818.863,10	
2.1.15.1.1.1	Utang Bank Syariah		
2.1.15.1.1.1.1	Utang Bank Syariah - KPR		
2.1.15.1.1.1.1.1	Utang Bank Syariah - KPR - Tagihan		
2.1.15.1.1.1.1.1.1	Utang Bank Syariah - KPR - Tagihan		
2.1.15.1.1.1.1.1.1.1	Utang Bank Syariah - KPR - Utang Perseorangan Pihak Ketiga		
2.1.15.1.1.1.1.1.1.1.1	Utang Bank Syariah - KPR - Utang Perseorangan Pihak Ketiga		
2.1.15.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Utang Bank Syariah dan Jasa	2.133.818.863,10	
2.1.15.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Utang Bank Syariah dan Jasa	2.133.818.863,10	
2.1.15.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Utang Bank Syariah dan Jasa		3.581.176.084,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.137.616.817,10	4.581.176.084,00
2	SIKUTAS		
2.1	SIKUTAS		
2.1.1	SIKUTAS		
2.1.1.1	SIKUTAS		
2.1.1.1.1	SIKUTAS		
2.1.1.1.1.1	SIKUTAS	51.467.868.233,42	51.129.243.620,29
	JUMLAH SIKUTAS	51.467.868.233,42	51.129.243.620,29
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN SIKUTAS	96.284.685.050,52	94.839.659.704,29



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 RSUD dr. ACHMAD DARWIS
 LAPORAN OPERASIONAL
 UATLK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021


Kode Akun	Uraian	2022	2021	Perubahan Baik/Rugi	%
	KEDAIAN OPERASIONAL				
	PENGAPATAN				
7.1	PENGAPATAN ABJ DAERAH	26.357.641,121.00	27.884.317.400,00		
7.1.1	Pajak Daerah				
7.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan				
7.1.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perseorangan dan Rumah Tangga				
7.1.1.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perseorangan dan Rumah Tangga	26.357.641,121.00	27.884.317,400.00		
	JUMLAH PAD	26.357.641,121.00	27.884.317,400.00		
	PEMBAYARAN TRANSFER				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LD				
7.2.01.1	Dana Perimbangan				
7.2.01.1.1	Dana Insentif Daerah				
7.2.01.1.2	Dana Daerah				
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LD				
7.2.02.1	Pendapatan Transfer				
7.2.02.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
7.2.02.1.1.1.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pertambahan Nilai				
7.2.02.1.1.1.0002	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pertambahan Nilai Eksternal-LD				
7.2.02.1.1.1.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perseorangan dan Rumah Tangga-LD				
7.2.02.1.1.1.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LD				
7.2.02.1.1.1.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Hotel				
	JUMLAH TRANSFER				
7.3	LAJAK PENGAPATAN DASRAH YANG BAH-LD	749.583.000,00	18.547.987.283,00		
7.3.01	Pajak Pertambahan Nilai	749.583.000,00	18.547.987.283,00		
7.3.02	Pajak Pertambahan Nilai dengan Retensi (Pajak Pertambahan Nilai dengan Retensi)				
	JUMLAH PENGAPATAN YANG BAH	749.583.000,00	18.547.987.283,00		
	JUMLAH PENGAPATAN	32.117.224.121,00	46.432.304.683,00		
	BIAYA	52.983.613.808,10	71.034.248.610,00		
8.1	BIAYA OPERASIONAL	52.983.613.808,10	71.034.248.610,00		
8.1.1	Biaya Pegawai	28.113.828.872,00	24.413.600.531,00		
8.1.1.1	Biaya Pegawai Tetap	17.251.704.300,00	22.887.272.327,00		
	Biaya Pegawai Tidak Tetap	10.862.124.572,00	1.526.328.204,00		
	Biaya Pegawai Honorarium	6.252.299.934,10	15.255.099.872,10		
	Biaya Pegawai Sertifikasi	333.273.773,00	354.888.154,00		
	Biaya Pegawai Lain-lain	102.607.325,00	154.867.142,00		
8.1.1.2	Biaya Pegawai Sertifikasi				
8.1.1.3	Biaya Pegawai Sertifikasi				

Kategori	Beban Penghasilan Pokok	Nilai	Nilai
F.2	SEBANYAK JUMLAH AMORTISASI	716.757.964	232.287.115
F.3	SEBANYAK TRANSFER		
F.4	SEBANYAK TERCIPTA		
	Saldo Awal	14.434.000	14.434.000
	JUMLAH BEBAN	731.191.964	246.721.115
	SURPLUS (KURANG)	14.242.036	14.242.036



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 RESMI dr. ACHMAD DARWIS
 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan PER 31 DESEMBER 2021

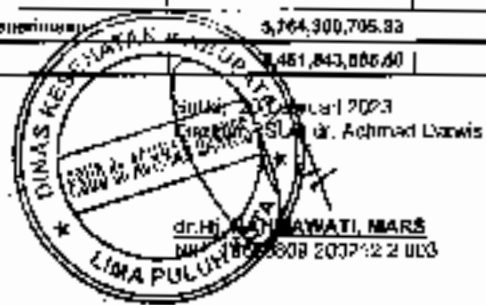
NO.	JRAIAN	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.852.394.780,50	4.085.373.453,50
2	Perubahan SAL	1.348.148.797,00	(1.358.685.238,50)
3	Sub total (1 + 2)	6.304.247.983,50	6.424.042.701,50
4	Esis - oleh Kurang - Pembayaran Anggaran (SEPAKSILO)	2.157.585.832,00	7.471.362.079,00
5	Sub total (3 + 4)	8.461.842.584,50	7.852.394.780,50
6	Koreksi Kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya		
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6)	8.461.842.584,50	7.852.394.780,50


 Galtih, 20 Februari 2023
 Resmi dr. Achmad Darwis
 dr. dr. RUSLIYATI, MARS
 03630092002122003
 LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RSJD dr.ACHMAD DARWIS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

No.	Uraian	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasional		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan APBD	21,206,835,452.00	20,805,188,726.00
4	Pendapatan Jasa, Royalti dan Masyarakat	29,342,402,602.00	29,519,195,079.00
5	Pendapatan Jasa Layanan dan Hasil accounts payable	-	-
6	Pendapatan Realisasi sama	-	-
7	Pendapatan Hibah	-	-
8	Pendapatan Usaha lainnya	-	-
9	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 8)	47,252,236,054.00	87,148,547,877.00
10	Arus Keluar Kas		
11	Pembayaran Pegawai	26,799,741,228.00	21,412,030,631.00
12	Pembayaran Jasa	17,511,587,806.00	22,519,056,513.00
13	Pembayaran Pemeliharaan	33,908,750.00	106,779,709.00
14	Pembayaran Langganan, Bayar dan Jasa	512,196,393.00	523,246,100.00
15	Pembayaran Angkutan Dinas	16,647,072.00	4,576,622.00
16	Pembayaran Bunga	-	-
17	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s/d 16)	44,874,134,654.00	44,803,796,778.00
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional (9 - 17)	2,378,101,400.00	12,214,886,699.00
19	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
20	Arus masuk Kas		
21	Penerimaan Kas Teroran	-	-
22	Penerimaan atas perolehan dan Yasan	-	-
23	Penerimaan atas jual beli dan pengalihan	-	-
24	Penerimaan atas jalan, jembatan dan jembatan	-	-
25	Penerimaan atas barang lainnya	-	-
26	Penerimaan Aset Lainnya	-	-
27	Penerimaan Pengembalian Kekayaan Daerah yang Dipertahankan	-	-
28	Penerimaan Pengembalian Investasi Non Pemilikan	-	-
29	Jumlah Arus Masuk Kas (21 s/d 28)	-	-
30	Arus Keluar Kas		
31	Pembelian barang	-	-
32	Pembelian Peralatan dan Mesin	1,483,604,256.00	6,187,455,403.00
33	Pembelian Gedung dan Peralatan	284,057,090.00	287,112,982.00
34	Pembelian Jalan, Jembatan dan Jembatan	-	-
35	Pembelian Aset Tetap Lainnya	-	-
36	Pembelian Aset Lainnya	-	-
37	Pengeluaran dari Pembayaran Modal	-	-
38	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas	-	-
39	Jumlah Arus Keluar Kas (31 s/d 38)	1,767,661,346.00	6,474,568,385.00
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29 - 39)	(1,767,661,346.00)	(6,474,568,385.00)
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
42	Arus Masuk Kas		
43	Penerimaan Pinjaman	-	-
44	Penerimaan melalui Pinjaman dengan agas bar	-	-
45	Jumlah Arus Masuk Kas (43 s/d 44)	-	-
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembayaran Pinjaman Pinjaman	-	-
48	Pembayaran pinjaman kepada Pihak Lain	-	-
49	Pembayaran ke Kas Negara	-	-
50	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 49)	-	-
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 - 50)	-	-
52	Arus Kas dan Aktivitas Transfere		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Peninjauan Pihak Ketiga (PK)	-	-
55	Jumlah Arus Masuk Kas (54)	-	-
56	Arus Keluar Kas		
57	Pengeluaran Peninjauan Pihak Ketiga (PK)	-	-
58	Jumlah Arus Keluar Kas (57)	-	-
59	Arus Kas Bersih dan Aktivitas Transfere (55 - 58)	-	-

08	Kenalkas Pemerintah Kas BLUD (18+49+51+52)	608,448,808.00	3,787,821,317.00
3:	Saldo Awal Kas & RI UID dan Bendahara Pengeluaran	7,882,394,780.50	4,886,373,443.00
E:	Saldo Akhir Kas di BLUD dan Bendahara Pengeluaran	2,687,542,880.17	1,114,495,894.17
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pemerintah	3,764,300,705.33	6,737,898,088.33
	SALDO AKHIR	7,451,843,585.50	7,862,394,780.50



RSUD dr. ACHMAD DARWIS
DAFTAR PIUTANG SEMESTER
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2022

NO	BULAN	PENGAJUAN		KET
		KLAIM		
1	KLAIM PELAYANAN RITL & RITL BPJS 2022			
	Klaim RITL September ssn 2022		366.000	
	Klaim RITL September 2022		194.965.300	
	Klaim RITL November 2022		750.770.800	
	Klaim RITL November 2022		988.257.700	
	Klaim RITL Desember 2022		894.602.600	
	Klaim RITL Desember 2022		675.675.800	
	Klaim RITL September ssn. tgl II 2022		183.000	
	Klaim RITL Oktober ssn 2022		163.000	
	Klaim RITL Oktober ssn 2022		206.595.900	
	JUMLAH	3.711.599.500		
2	Klaim Obat Kronis			
	Klaim Obat November 2022		180.039.226	
	JUMLAH	180.039.226		
3	Klaim Jampersal			
	Klaim RITL Agustus 2022		1.944.000	
	Klaim Oktober RITL 2022		128.300	
	Klaim Oktober RITL 2022		3.075.400	
	Klaim RITL November 2022		493.500	
	Klaim RITL Desember 2022		19.769.200	
	JUMLAH	28.720.800		
4	Klaim Covid-19			
	Klaim Desember 2022		18.291.000	
	JUMLAH	18.291.000		
5	Klaim Ambulance			
	Klaim Desember 2022		2.850.000	
	JUMLAH	2.850.000		
6	RAWATAN UMUM			
	By Mureta		520.000	
	Cdenj		340.000	
	Sahtha		2.479.000	
	Gmri		1.446.500	
	JUMLAH	5.385.500		
7	PENDAPATAN HASIL KERASAMA			
	Institusional Fee RS Pengunjung		2.400.000	
	Fee Jasa Smart Raring 2022		1.099.826	
	JUMLAH	3.499.826		
	TOTAL JUMLAH	3.950.385.852		

Dibuatku' oleh :

Direksi

dr. H. RAHMAWATI, MARS

NIP. 17660809 200212 2 003

Sidik, 13 Januari 2023

Bendahara Penerima

ETSIANA

NIP. 17820724 200701 2301

RSUD dr. ACHMAD DARWIS
DAFTAR PIUTANG YANG SUDAH DIBAYAR
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2022


NO	BULAN	PENGALUAN KLAIM	YANG SUDAH DIBAYAR	TANGGAL PEMBAYARAN	KET
1	KLAIM PELAYANAN RITL & RITL BPJS 2022				
	Klaim RITL September ssh 2022	366.000			
	Klaim RITL September 2022	194.968,800	194.968,400	05 Januari 2023	2903 ADM BANK
	Klaim RITL November 2022	750.770,800			
	Klaim RITL November 2022	968.257,700	1.739.008,500	02 Januari 2023	25000 ADM BANK
	Klaim RITL Desember 2022	894.602,600			
	Klaim RITL Desember 2022	675.675,600	1.570.278,200	30 Januari 2023	25000 ADM BANK
	Klaim RITL September ssh ths II 2022	188,000			
	Klaim RITL Oktober ssh 2022	188,000	236.938,600	5 Februari 2023	2900 ADM BANK
	Klaim RITL Oktober ssh 2022	206.595,500			
	JUMLAH	3.711.599,500	3.711.568,700		56,800
2	Klaim Obat Kronis				
	Klaim Obat November 2022	180.039,226	180.039,226	02 Januari 2023	
	JUMLAH	180.039,226	180.039,226		
3	Klaim Jampesrat				
	Klaim RITL Agustus 2022	1.844,500			
	Klaim Oktober RITL 2022	126,300			
	Klaim Oktober RITL 2022	3.075,400			
	Klaim RITL November 2022	499,500			
	Klaim RITL November 2022	19.769,000			
	Klaim RITL Desember 2022	3.403,700			
	JUMLAH	28.728,800			
4	Klaim Covid-19				
	Klaim Desember 2022	18.291,000			
	JUMLAH	18.291,000			
5	Klaim Ambulans				
	Klaim Desember 2022	2.850,000	2.850.000,00	30 Januari 2023	
	JUMLAH	2.850,000	2.850,000		
6	RAWATAN UMUM				
	By Marma	520,000			
	Iliden	940,000			
	Sahlinar	1.479,000			
	Bmrl	1.446,500			
	JUMLAH	5.385,500			
7	PENDAPATAN HASIL KERJASAMA				
	Inhibitoral Fee RS Bangkrang	2.400,000	1.400,000	05 Januari 2023	
	Fee Jasa Smart Hearing 2022	1.098,826	1.099,826	04 Januari 2023	
	JUMLAH	3.498,826	3.499,826		
	TOTAL JUMLAH	3.990.395,052	3.897.957,752		55,800

Suliki, Februari 2023

Diketahui Oleh:
 DIRECTUR

BENDAHARA PENERIMAAN

dr. HIRAHMAWATI, MARS
 NIP. 19660809 200212 1 003


 ETRIANA
 NIP.19620724 200701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS
JLN TAN MALAKA BULUK KADATATEN LIMA PULUH KOTA TELP 0072-97718

DAFTAR OBAT/ BMHP EXP DATE TAHUN 2022

No	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	BARGA SATUAN	TOTAL
1	Amiodaron tablet	tablet	90	934	84.029
2	Amikasin inj	ampul	1	32.285	32.285
3	Atraucon	picis	2	129.000	258.000
4	ATS injeksi	ampul	18	130.999	2.357.982
5	Barium SO4	botol	1	693.000	693.000
6	Clozapin 25 mg	tablet	50	473	23.650
7	dopamed 250	tablet	145	1.014	147.030
8	Dopamin injeksi	ampul	5	3.397	16.985
9	Epineprin inj	ampul	23	1.590	36.570
10	Erytromisin tablet 500	tablet	356	785	279.460
11	ETT no 4	picis	3	17.858	53.574
12	ETT no 5,5 curved	picis	7	19.950	139.650
13	ETT Non kinking no 6	picis	3	19.570	58.710
14	ETT Non Kinking no 6.5	picis	4	19.570	78.280
15	ETT Non Kinking no 7.5	picis	3	137.000	411.000
16	Rasorbid injeksi	vial	14	23.474	328.636
17					
18	Klc peali 5/0 segitiga	picis	4	44.745	178.980
19	Fluconazol infus	botol	3	18.358	55.074
20	Foli cateter no 10	picis	22	53.763	1.182.775
21	Foli cateter no 14	picis	5	16.500	82.500
22	Foli cateter no 8	picis	6	53.763	322.575
23	Foli cateter tri way no 24	picis	16	69.597	1.113.552
24	Gudel no 00	picis	25	16.983	254.745
25	Gudel no 1	picis	17	18.968	322.456
26	Gudel no 2	picis	2	18.968	37.936
27	Gypsum 6 inci	picis	7	28.900	202.300
28	Ketokonazol tablet	tablet	682	278	189.596
29					
30	Litium tablet (Frimania)	tablet	100	1.056	105.600
31	LMA 2	picis	6	130.199	781.194
32	Lodomer injeksi	ampul	8	12.523	100.187
33	Mask Anestesi 2	picis	4	32.857	131.428
34	Mask anestesi 5	picis	15	32.857	492.855
35	Mask Anestesi no 1	picis	5	32.857	164.285
36	Mask Anestesi no 4	picis	15	32.857	492.855
37	Masker anestesi 3	picis	8	32.857	262.856
38	Megotrin tablet	tablet	250	389	97.125
39	MgSO4 injeksi 40 %	botol	53	4.290	227.370
40	Neostigmin	ampul	5	7.113	35.565
41	NCT 3.5	picis	17	5.942	101.014
42	Novorapid injeksi	vial	1	144.762	144.762
43	Nystatin tablet vagina	tablet	386	590	227.740
44	Ofloxacin 400 mg	tablet	43	567	24.381
45	Paral suppos 250	supp	3	20.900	62.700

46	Poli cateter try way no 22	picis	13	73.260	952.380
47	Polivac set no 12	picis	8	88.600	708.800
48	Polivac set No 14	picis	5	95.194	475.970
49	Prednison tablet 5 mg	tablet	1027	77	79.079
50					
51	Rifampisin 450 mg	tablet	359	963	345.713
52	Silk 3/0 Bulat	picis	5	44.444	222.220
53	Stang Suction no 6	picis	17	6.600	112.200
54	Stesolid R 5 mg	Tube	3	26.136	130.680
55	Zinkum syrup	botol	6	3.654	21.924
	Total				15.442.214

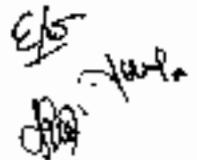
Kepala Instalasi Farmasi



Malzul Putra, M.Farm, Apt
Nip. 19810510 200604 1 010

Sufiki, 31 Desember 2022
penghitung stok

Efilla Ihsani, S.Farm, Apt
Fitria Rahmi, S.Farm, Apt
Lusiana Putri, S.Farm, Apt



Mengetahui
Direktur RSUD dr. Achmad Darwis



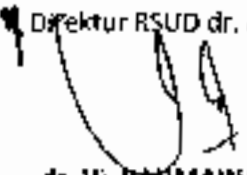
dr. H. Rahmawati, MARS
NIP. 195608092002122003

PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RSUD dr. ACHMAD DARWIS
REKAPITULASI UTANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	UTANG
1	Utang Jasa Layanan.	Rp. 3,122,673,526.10
2	Utang Pemeriksaan Penunjang Radiologi bulan Desember tahap II ke RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh	Rp. 3,125,000.00
3	Utang Pemeriksaan Penunjang Labor bulan Desember tahap II ke RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh	Rp. 2,407,000.00
4	Utang Pemeriksaan Penunjang EEG bulan Desember tahap II ke RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh	Rp. 225,000.00
5	Utang Pemeriksaan Penunjang PA bulan Desember tahap II ke RSUD Padang Panjang	Rp. 6,450,000.00
6	Utang Pemeriksaan Penunjang Radiologi bulan Desember tahap II ke RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh	Rp. 2,525,000.00
7	Utang Pembelian Obat	Rp. 257,245,647.00
8	Utang Pembelian BHP	Rp. 187,450,353.00
9	Utang Gas Medis	Rp. 12,960,000.00
10	Utang Rumah Tangga RS	Rp. 590,728.00
11	Utang Insentif Covid-19	Rp. 541,964,363.00
		Rp. 4,137,616,617.10

Suleki, 31 Januari 2023

Direktur RSUD dr. Achmad Darwis


dr. Hj. RAHMAWATI, MARS

NIP. 19660809 200212 2 003

**RINCIAN TOTAL HUTANG
JASA LAYANAN JANUARI S/D DESEMBER 2022**

NO	HUTANG JASA LAYANAN 2022	
1	Hutang Jasa Layanan Susulan September 2022, November s/d Desember 2022, Covid-19 2022, Jampersal 2022	2.664.312.811,10
2	Hutang Jasa Layanan NON ASN	458.360.715,00
	TOTAL	3.122.673.526,10

Mengetahui
Kabag. Tata Usaha



drg. Dina Julia
NIP.19700705 199909 2009

Suliki, 10 Januari 2023
Bendahara Penertama



Fitriana
NIP.19820724 200701 2 001

PERIODE: 11 DESEMBER 2021

NO	NAMA	JEMPUTAN	MASUK (Rp)	GELUR (Rp)	SISA (Rp)
	REKAPITULASI 11 DESEMBER 2021	Perwakilan UMSK	Rp 18.412.432,00	Rp 22.245.716,00	Rp 15.764.696,00
		Manfaat 10.000	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 890.000,00
		Manfaat 3000	Rp 40.000,00		Rp 405.000,00
		Perwakilan 3000	Rp 27.000,00		Rp 27.000,00
					Rp -
		Perwakilan target labor	Rp 205.450.126,42	Rp 169.037.942,15	Rp 1.79.944.154,27
		Perwakilan target labor	Rp 7.014.200,00	Rp 3.077.000,00	Rp 5.757.200,00
		Perwakilan target gis 3000	Rp 47.182.000,00	Rp 38.447.065,41	Rp 7.795.494,59
		Perwakilan target gis 3000	Rp 77.642.585,47	Rp 71.254.107,29	Rp 1.288.388,18
		Perwakilan target 2000 di gudang barang	Rp 1.778.808.079,52	Rp 1.114.949.185,77	Rp 663.858.893,75
		Perwakilan target 2000 di gudang barang	Rp 46.432.158,00	Rp 10.097.580,60	Rp 37.334.777,40
		Perwakilan target 2000 di gudang	Rp 5.119.170,78		Rp 5.119.170,78
		Perwakilan target 2000 di gudang	Rp 50.806.517,02	Rp 10.777.000,00	Rp 40.137.117,02
		Perwakilan 2000 di gudang barang	Rp 1.021.171.760,76	Rp 675.284.464,01	Rp 355.887.296,75
		Perwakilan 2000 di gudang barang	Rp 446.375.867,51	Rp 41.047.714,32	Rp 305.328.153,19
		Perwakilan 2000 di gudang barang (Dana 2000-20)	Rp 2.400.000,00	Rp 781.000,00	Rp 1.619.000,00
		Perwakilan 2000 di gudang barang (Dana 2000-19)	Rp 82.005.000,00	Rp 1.570.000,00	Rp 80.435.000,00
		Perwakilan 2000 di gudang barang (Dana 2000-18)	Rp 40.928.385,00	Rp 622.000,00	Rp 40.306.385,00
		Perwakilan 2000 di gudang barang	Rp 178.074.552,00	Rp 7.640.800,00	Rp 170.433.752,00
		Perwakilan 2000 di gudang barang	Rp 63.512.400,00	Rp 34.385.175,00	Rp 29.127.225,00
		Perwakilan 2000 di gudang barang	Rp 408.000,00	Rp 2.221.125,00	Rp 3.508.375,00
		Perwakilan 2000 di gudang barang	Rp 38.455.000,00	Rp 26.925.000,00	Rp 11.530.000,00
					Rp -
		Perwakilan 2000 di gudang barang	Rp 35.547.000,00	Rp 33.549.270,00	Rp 2.000.000,00
					Rp -
		Perwakilan 2000 di gudang barang (Dana 2000-18)	Rp 40.450.000,00	Rp 38.700.000,00	Rp 1.750.000,00
					Rp -
		Perwakilan 2000 di gudang barang	Rp 75.100.000,00	Rp 74.040.000,00	Rp 1.060.000,00
		Perwakilan 2000 di gudang barang (Dana 2000-18)	Rp 1.100.000,00	Rp -	Rp 1.100.000,00
		Perwakilan 2000 di gudang barang	Rp 1.250.000,00	Rp -	Rp 1.250.000,00
					Rp -
		Perwakilan 2000 di gudang barang (Dana 2000-18)	Rp 13.304.455,00	Rp 6.000.000,00	Rp 7.304.455,00
			Rp 4.384.014.188,76	Rp 2.520.377.045,74	Rp 2.227.644.330,02


 December 2022
 Kepala Dinas
 LIMA PULUH KOTA

RSUD dr. ACHMAD DARWIS
DAFTAR PILTANG SEMESTER
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2023

NO	BULAN	PENGALUAN	KEY
		KLAIM	
1	KLAIM PELAYANAN RITL & RITL BPJS 2022		
	Klaim RITL September s/dh 2022	366.000	
	Klaim RITL September 2022	194.965.300	
	Klaim RITL November 2022	750.770.830	
	Klaim RITL November 2022	988.257.700	
	Klaim RITL Desember 2022	894.602.600	
	Klaim RITL Desember 2022	675.675.630	
	Klaim RITL September s/dh thp. 2022	183.000	
	Klaim RITL Oktober s/dh 2022	183.000	
	Klaim RITL Oktober s/dh 2022	206.505.500	
		JUMLAH	3.711.589.500
2	Klaim Obat Kronis		
	Klaim Obat November 2022	180.039.226	
	JUMLAH	180.039.226	
3	Klaim Jampersel		
	Klaim RITL Agustus 2022	1.844.900	
	Klaim Oktober RITL 2022	128.300	
	Klaim Oktober RITL 2022	3.075.400	
	Klaim RITL November 2022	491.500	
	Klaim RITL November 2022	15.769.000	
	Klaim RITL Desember 2022	3.403.700	
	JUMLAH	28.720.800	
4	Klaim Covid-19		
	Klaim Desember 2022	18.251.000	
	JUMLAH	18.251.000	
5	Klaim Ambulance		
	Klaim Desember 2022	2.850.000	
	JUMLAH	2.850.000	
6	RAWATAN UMUM		
	By Meta	520.000	
	Idem	940.000	
	Sah'rar	2.475.000	
	Fru	1.446.500	
	JUMLAH	5.385.500	
7	PENDAPATAN HASIL KERJASAMA		
	Institusional Fee RS Bangkhang	7.000.000	
	Fee Jasa Smart Hearing 2022	1.099.825	
	JUMLAH	8.099.825	
	TOTAL JUMLAH	3.950.385.822	

Direktori Cef
 Direktur

Jl. H. SALLEHAWAT, MARA
 NIP. 19560609 200212 2 003

S. Jik, 31 Januari 2023
 Bendahara Perantara

FITRIANA
 NIP. 19820724 200701 2001

PERHITUNGAN PEMBAYARAN MUTANG TAHUN 2022

1. PENYISIHAN MUTANG PAJAK

No.	SPBU	Perhitungan Mutang		
1	solan Kotagede	1. Pajak Restoran		
		Penyisihan: Mutang Pajak Restoran		
		2021	= 100% x Rp. 1.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
		JUMLAH		Rp. 10.000.000,00
		2. Mutang PDU P2		
		Penyisihan Mutang PBB P2		
		2017	= 100% x Rp. 540.004.805,00	= Rp. 540.004.805,00
		2018	= 100% x Rp. 737.457.152,00	= Rp. 737.457.152,00
		2019	= 100% x Rp. 664.289.413,00	= Rp. 664.289.413,00
		2017	= 100% x Rp. 656.671.048,00	= Rp. 656.671.048,00
		2018	= 50% x Rp. 1.760.240.079,00	= Rp. 880.120.039,50
		2019	= 50% x Rp. 1.701.179.985,00	= Rp. 850.589.992,50
		2020	= 50% x Rp. 1.906.624.706,00	= Rp. 953.312.353,00
		2021	= 10% x Rp. 1.803.140.310,00	= Rp. 180.314.031,00
		2022	= 0,5% x Rp. 1.776.262.039,00	= Rp. 888.131,00
JUMLAH		Rp. 6.237.970.824,30		
3. Mutang Pajak Hotel dan				
2018	= 50% x Rp. 4.070.000,00	= Rp. 2.035.000,00		
2019	= 10% x Rp. 450.000,00	= Rp. 45.000,00		
2021	= 0,1% x Rp. 400.000,00	= Rp. 400,00		
JUMLAH		Rp. 2.080.400,00		
4. Mutang Pajak Mineral Bukal Logam dan Batubara				
	= 0,7% x Rp. 400.000,00	= Rp. 280.000,00		
JUMLAH PENYISIHAN MUTANG PAJAK		Rp. 18.247.871.244,30		

2. PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI

No.	SPBU	Perhitungan Mutang	
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Piutang Retribusi	
		1.1.2022	Rp. 7.620.000,00
		2022	= 100% x Rp. 7.620.000,00
		JUMLAH	Rp. 7.620.000,00

3. PENYISIHAN MUTANG HASIL PENGELAIAN KEKAYAAN DALAM YANG DIPERBUKAKAN

No.	SPBU	Perhitungan Mutang	
1	Sektor Pertambangan	a. K 2022	Rp. 2.070.000,00
		2022	= 100% x Rp. 2.070.000,00
2	Sektor Pertambangan	b. K 2022	Rp. 21.750.000,00
		2022	= 5% x Rp. 23.550.000,00
JUMLAH PENYISIHAN MUTANG HASIL PENGELAIAN KEKAYAAN DALAM YANG DIPERBUKAKAN			Rp. 2.285.750,00

4. PENYISIHAN PRIBADI LAIN LAIN PAD YANG SAH

No.	SPBU	Perhitungan Mutang	
1	Dinas Kesehatan	a. K 2022	Rp. 180.571.000,00
		2022	= 0,5% x Rp. 361.142.000,00
2	KASUB Dinas	a. K 2022	Rp. 3.970.000,00
		2022	= 0,5% x Rp. 3.970.000,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	a. K 2022	Rp. 48.620.000,00
		2022	= 0,5% x Rp. 48.620.000,00
4	Dinas Perumahan	b. K 2022	Rp. 18.140.000,00
		2022	= 0,5% x Rp. 18.140.000,00
5	Dinas Perumahan, Pertanahan dan Pekerjaan Umum	b. K 2022	Rp. 23.266.300,00
		2022	= 0,5% x Rp. 23.266.300,00
6	Sekeloa Perumahan	a. K 2022	Rp. 76.500.000,00
		2022	= 100% x Rp. 76.500.000,00
7	PPKN	a. K 2022	Rp. 440.100,00
		2022	= 0,5% x Rp. 440.100,00
JUMLAH PENYISIHAN MUTANG LAIN LAIN PAD YANG SAH			Rp. 128.353.825,00

5. PENYISIHAN MUTANG BAGI HASIL PAJAK

No.	SPBU	Perhitungan Mutang	
1	PPKN	a. K 2022	Rp. 9.622.147.178,00
		2022	= 0,5% x Rp. 9.622.147.178,00
JUMLAH PENYISIHAN MUTANG BAGI HASIL PAJAK			Rp. 48.108.210,00

**REKAPITULASI PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA UPA	ATA & DETAKAN	OBAT-OBATAN	BAHAN NYA	ALAT LISTRIK	ALAT KESEHATAN	BAHAN MEDIS HEB P&A	BAH. G. G. G.	BAH. KEMAHIRAN	LABORUM	JMLAH
1	OBAT-OBAT DAN PERSEDIAAN	3.251.000,00									1.681.250,00
2	OBAT-OBAT	582.257.711,30	23.890.000,00	12.791.275,45	75.078.710,00	4.573.665,00	79.533.252,00		94.282.543,00	275.461.451,72	8.071.901.244,85
3	BUMIL-SAKTUMUM dan Akhrud Bawa	12.746.086,00	3.251.000,00		1.288.975,00	7.208.410,00		122.000,00	3.000.000,00	40.222.716,48	2.255.941.399,47
4	OBAT-OBAT	1.180.000,00									27.560.000,00
5	OBAT-OBAT										
6	OBAT-OBAT	5.739.500,00			1.254.421,00						7.173.781,00
7	OBAT-OBAT	3.758.500,00									4.588.500,00
8	OBAT-OBAT	440.000,00			156.000,00	1.700,00					718.000,00
9	OBAT-OBAT	485.500,00								1.321.334.507,00	1.321.334.507,00
10	OBAT-OBAT	670.000,00								171.328.500,00	171.328.500,00
11	OBAT-OBAT	402.332.426,00			25.000,00					4.400.000,00	402.357.426,00
12	OBAT-OBAT	1.302.000,00									1.370.000,00
13	OBAT-OBAT	254.400,00									254.400,00
14	OBAT-OBAT	1.774.000,00			261.372.000,00					16.410.000,00	432.746.000,00
15	OBAT-OBAT	4.471.000,00									4.471.000,00
16	OBAT-OBAT	2.218.000,00								58.175.118,00	58.175.118,00
17	OBAT-OBAT	798.700,00									876.700,00
18	OBAT-OBAT	1.310.000,00									1.278.000,00
19	OBAT-OBAT	156.000,00									156.000,00
20	OBAT-OBAT	2.367.000,00	3.542.380,00			1.175.400,00				384.455.060,00	391.965.130,00
21	OBAT-OBAT	1.457.000,00								27.821.500,00	29.278.500,00
22	OBAT-OBAT	2.310.000,00	17.200,00			503.200,00				40.127.500,00	53.540.500,00
23	OBAT-OBAT	12.555.437,50			12.100.000,00						13.853.917,50
24	OBAT-OBAT	5.277.000,00			1.000.000,00						6.277.000,00
25	OBAT-OBAT	12.205.000,00			1.855.500,00						14.060.500,00
26	OBAT-OBAT										
27	OBAT-OBAT	2.028.000,00									2.028.000,00
28	OBAT-OBAT	1.578.500,00	1.711.500,00		3.647.000,00	85.703.450,00				12.570.000,00	17.712.000,00
29	OBAT-OBAT	12.061.000,00									12.061.000,00
30	OBAT-OBAT										
31	OBAT-OBAT	1.482.000,00									1.477.500,00
32	OBAT-OBAT										
33	OBAT-OBAT	620.000,00									600.000,00
34	OBAT-OBAT	135.500,00									133.000,00
35	OBAT-OBAT										
36	OBAT-OBAT										
37	OBAT-OBAT	345.000,00									345.000,00
38	OBAT-OBAT										
39	OBAT-OBAT										
40	OBAT-OBAT	411.500,00				79.000,00					490.500,00
41	OBAT-OBAT	415.000,00									415.000,00
42	OBAT-OBAT	321.000,00									321.000,00
43	OBAT-OBAT	2.219.000,00			450.000,00	160.000,00					2.829.000,00
44	OBAT-OBAT	4.324.000,00			527.000,00	91.000,00					4.942.000,00
	Jumlah	930.281.878,50	8.043.798.411,72	52.517.889,45	574.611.808,00	100.271.280,00	79.029.152,00	121.301.354,51	6.098.124.573,44	2.071.076.277,30	13.716.896.189,42

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAMPIRAN BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
PER 31 DESEMBER 2022

NO	NAMA OPD	INSTANSI	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL (Rp)
1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM				558,155,136.00
		Pembangunan/ Rehab Pasar			
		Lanjutan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Lubuk Alai	1	84,885,000.00	84,885,000.00
		Pembangunan / Revitalisasi Pasar Galugua	1	99,608,748.00	99,608,748.00
		Pembangunan / Revitalisasi Pasar Serilamek	1	179,246,675.00	179,246,675.00
		Lanjutan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Serilamek	1	119,800,513.00	119,800,513.00
		Pliben barang ke Kelompok Maju Bersama	1	74,614,203.00	74,614,203.00
TOTAL NILAI BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT					558,155,136.00

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 PERSEDIAAN OBAT-OBATAN
 PER 31 DESEMBER 2022

NO	NAMA OPD	INSTANSI	JUMLAH (Rp)
1	DINAS KESEHATAN		6,929,019,200.98
		Persediaan Obat-Obatan di Instalasi Farmasi Kabupaten	5,482,773,231.62
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Situjuh	69,566,865.92
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Gunung Maitineg	28,125,327.60
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Muara Paiti	75,162,438.15
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Panglalan	104,389,476.66
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Danja Laweh	45,068,256.96
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Pilehng	66,769,347.71
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Tanjung Padi	125,234,259.56
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Mungka	60,716,803.10
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Sultu	44,266,525.07
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Munga	100,856,002.98
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Danguang-Danguang	100,812,910.07
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Pakan Rabaa	91,899,896.08
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Soling	56,550,353.73
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Larom	48,485,743.41
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Kota Tinggi	67,027,017.42
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Kotu Baru Simatunggang	63,069,533.83
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Monk	58,931,430.40
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Ramba data	44,393,480.75
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Padang Kandi	54,431,649.45
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Halaban	55,981,715.96
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Baruah Gurwang	80,977,812.81
		Persediaan Obat-Obatan di Puskesmas Batu Hampar	53,788,021.66
2	RUMAH SAKIT UMUM dr. ACHMAD DARWIS		1,051,445,330.74
		Persediaan Obat-Obatan di RSUD dr Achmad Darwis	1,051,445,330.74
3	DINAS PERIKANAN		3,582,380.00
		Pragal	59,300
		Enraflox 12	565,600
		So. Multi	119,700
		LM-4 Perikanan	678,300
		Stress off	92,400
		Gratap	115,000
		Gratap	456,400
		C San Aquatic	47,880
		Oxivil Agusik	501,600
		Quarantine Mad	376,200
		Amoxcell	570,000
4	SEKRETARIS DAERAH		1,711,500.00
		Obat-obatan	1,711,500.00
TOTAL PERSEDIAAN OBAT-OBATAN			8,045,758,411.72

* Rincian Persediaan Obat-Obatan Ada Pada Laporan Rincian OPD

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RINCIAN PERSEDIAAN LAIN LAIN
PER 31 DESEMBER 2022

NO	NAMA UPO	INSTANSI	VOLUME	HARGA SATUAN	LAJUR LAIN (Rp)
1	DINAS KESEHATAN				476.881.859,72
	PMT				324.440.884,30
	PUSKESMAS PIRADANAS				
	PMT Tahun 2022				4.532.306,00
	PMT table		33,35	50,750,00	1.693,300,00
	PMT bu. 4x1		56,96	32,750,00	1.210.440,00
	PMT bu. 4x1		25,20	56,700,00	1.418.840,00
	PUSKESMAS SATU HANTRA				
	PMT Tahun 2022				6.301.824,00
	PMT Bu. 1x1		100,00	50,750,00	5.110.560,00
	PMT bu. 1x1		77,92	55,700,00	4.319,760,00
	PUSKESMAS BARUH BUNJING				
	PMT Tahun 2022				11.203.582,36
	PMT table		77,30	39,520,00	4.580.705,00
	PMT bu. 1x1		30,46	70,560,00	2.151.517,36
	PMT table		15,60	30,700,00	4.784.500,00
	PMT bu. 1x1		25,20	36,700,00	1.474.860,00
	PUSKESMAS BANJA LINGGII				
	PMT Tahun 2022				8.977.560,80
	PMT table		07,20	50,500,00	3.630.400,00
	PMT bu. 4x1		16,80	70,560,00	1.185.760,80
	PMT bu. 1x1		47,00	56,700,00	2.353.400,00
	PUSKESMAS KOTO BARU				
	PMT Tahun 2022				17.894.180,00
	PMT table		70,30	30,250,00	2.116.840,00
	PMT Bu. 1x1		40,80	50,750,00	1.970.200,00
	PMT bu. 1x1 4x1		13,76	82,750,00	1.139.140,00
	PMT bu. 1x1 4x1		117,60	56,750,00	6.387.200,00
	PUSKESMAS SALANG				
	PMT Tahun 2022				27.961.880,00
	PMT table		179,28	50,750,00	18.103.480,00
	PMT bu. 4x1		198,24	28,750,00	11.250.100,00
	PUSKESMAS LARANG				
	PMT Tahun 2022				22.635.506,16
	PMT Bu. 1x1		77,28	59,520,00	4.589.705,60
	PMT bu. 1x1		21,73	70,560,00	1.534.484,56
	PMT bu. 1x1		163,00	30,750,00	4.974.300,00
	PMT bu. 1x1		100,50	56,700,00	5.715.980,00
	PUSKESMAS KOTO TINJAU				
	PMT Tahun 2022				16.104.866,00
	PMT table		16,50	30,250,00	505.370,00
	PMT bu. 1x1		17,36	32,750,00	568.820,00
	PMT table		188,00	50,750,00	9.526.000,00
	PMT bu. 4x1		97,48	56,700,00	5.524.846,00
	PUSKESMAS MIRUKU PAJATI				
	PMT Tahun 2022				20.016.781,20
	PMT Bu. 1x1		3,30	59,520,00	196.392,00
	PMT bu. 1x1		87,96	70,560,00	6.169.556,16
	PMT Bu. 1x1		108,00	50,750,00	5.486.000,00
	PMT bu. 1x1		97,44	56,700,00	5.514.840,00
	PUSKESMAS PAKSI				
	PMT Tahun 2022				11.583.490,80
	PMT table		134,40	56,750,00	7.610.800,00
	PMT bu. 4x1		24,00	56,700,00	1.367.900,00
	PUSKESMAS PANGKALAN				
	PMT Tahun 2022				21.109.200,00
	PMT Bu. 1x1		154,40	50,750,00	7.839.000,00
	PMT bu. 1x1		70,00	56,700,00	3.959.400,00
	PUSKESMAS PANGKALAN				
	PMT Tahun 2022				4.300.173,00
	PMT table		40,00	54,430,00	2.177.320,00

	PMT Ibu Hamil	47,20	56,700.00	2,690,400.00
	PUSKESMAS SIKUMI			
	PMT Tahun 2022			8,778,400.00
	PMT Balita	117.50	50,750.00	5,988,250.00
	PMT Ibu Hamil	47.20	56,700.00	3,810,340.00
	PUSKESMAS MUNGKA			
	PMT Tahun 2022			24,872,400.00
	PMT Balita	302.00	50,750.00	15,316,250.00
	PMT Ibu Hamil	168.00	56,700.00	9,545,600.00
	PUSKESMAS SITUJUH			
	PMT Tahun 2022			7,278,952.00
	PMT Balita	94.32	50,750.00	4,807,040.00
	PMT Ibu Hamil	45.96	56,700.00	2,571,312.00
	PUSKESMAS TANJUNGPATI			
	PMT Tahun 2022			23,914,765.12
	PMT Balita	3.04	50,750.00	796,600.00
	PMT Ibu Hamil	6.72	56,700.00	4,84,204.32
	PMT Balita	309.00	50,750.00	16,737,200.00
	PMT Ibu Hamil	438.00	56,700.00	22,847,360.00
	PUSKESMAS PAKAN RANAU			
	PMT Tahun 2022			16,469,310.00
	PMT Balita	201.60	50,750.00	10,231,400.00
	PMT Ibu Hamil	117.60	56,700.00	6,667,920.00
	PUSKESMAS DAMUNG-DAMUNG			
	PMT Tahun 2022			5,791,880.00
	PMT Balita	07.20	50,750.00	3,410,100.00
	PMT Ibu Hamil	41.00	56,700.00	2,301,480.00
	PUSKESMAS CUNING MANTAU			
	PMT Tahun 2022			1,740,872.00
	PMT Balita	3.36	50,750.00	170,520.00
	PMT Ibu Hamil	21.50	56,700.00	1,619,352.00
	PUSKESMAS HALARAN			
	PMT Tahun 2022			13,634,963.20
	PMT Balita	73.24	50,750.00	4,390,738.40
	PMT Ibu Hamil NEP	100.80	70,581.00	7,124,264.80
	PMT Balita	94.00	50,750.00	4,265,000.00
	PMT Ibu Hamil K.S	50.40	56,700.00	2,857,480.00
	PUSKESMAS MUNGKI			
	PMT Tahun 2022			16,469,310.00
	PMT Balita	201.60	50,750.00	10,231,400.00
	PMT Ibu Hamil	117.60	56,700.00	6,667,920.00
	PUSKESMAS PADANG RANDE			
	PMT Tahun 2022			7,848,647.80
	PMT Balita	42.80	50,750.00	2,547,456.00
	PMT Ibu Hamil	27.00	70,581.00	1,962,151.80
	PMT Balita	75.80	50,750.00	3,795,100.00
	PMT Ibu Hamil	45.20	56,700.00	2,463,640.00
	DINAS KESEHATAN			
	PMT Balita	12.44	50,750.00	621,680.00
	PMT Ibu Hamil	132.72	56,700.00	7,525,218.00
	BARANG LOGISTIK KAHFOR			
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Situjuh			69,484,736.40
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Muara Pauh			1,325,000.00
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Tanjung Batu			3,627,000.00
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Mungka			182,240.00
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Sijuh			1,376,000.00
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Mungka			5,740,000.00
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Bangun Bangun			8,142,000.00
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Pakan Ratan			4,087,997.23
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Teran			4,757,221.37
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Kota Tinggi			684,500.00
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas KASAU MANGGANE			1,350,120.00
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Padang Rande			676,600.00
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Halaran			7,843,680.00
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Olu Haraipar			5,594,990.00
	Persediaan Alat Logistik dan Kebersihan di Puskesmas Olu Haraipar			25,100,000.00

BERSERIKAN DARI BWT				87.396.838,00
Inklusi: Jumlah keseluruhan				87.396.838,00
2	INDUJI, ACHMAD DARWIS			40.138.734,00
	Perbaikan Dikron			1.500,000.00
	Perbaikan DTM Opanomoni Kantor			8.250,000.00
	Perbaikan Bahan Cuci/Bahan Baku			5.120,000.00
	Perbaikan Rumah Tangga			4.000,000.00
	Hibah Kementan Unit Translokasi Tanah			17.267,934.00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RALYAT DAN PEMUNAHAN			178.528.500,00
	Suplai BHM Organasional Persempuloh	715	100,000.00	71,500,000.00
	Kardus Nyalan Pa Sampahan 2.500	3000	3,000.00	9,000,000.00
	GRK Beribul Persempuloh 7.500	1203	7,500.00	9,022,500.00
	Kapuk Beribul Persempuloh 15.000	360	25,000.00	17,925,000.00
	Kardus Beribul Persempuloh 50.000	400	20,000.00	12,000,000.00
	Kardus Beribul Persempuloh 20.000	260	50,000.00	48,300,000.00
	Kardus Beribul Persempuloh 75.000	104	75,000.00	7,800,000.00
4	DINAS PERUMAHAN			176.828.000,00
	S-RO	8700	50,000.00	4,350,000.00
	Sinar Cond	6,100.00	25,000.00	152,500,000.00
	Fence Kurang	1.00	65,700.00	
	Fence Buluk	1.00	45,500.00	
5	DINAS PERTANIAN			170.483.000,00
	BANJIR IKAN			1,662,500,00
	* Benih Ikan Nile			1,662,500.00
	* Jersi 2-5 cm	10500	100.00	1,050,000.00
	* Jersi 3-5 cm	500	125.00	62,500.00
	* Jersi 1cm-3cm			
	* Ikanan 1-3 cm	4000	150.00	600,000.00
	BAHAN IKAN			162,828,500.00
	Pelet Terapung 1 mm	400	13,600.00	5,440,000.00
	Pelet Terapung 2 mm	1600	14,100.00	22,560,000.00
	Pelet Terapung 3 mm	2900	15,000.00	43,500,000.00
	Pelet Terapung 4 mm	2473	24,850.00	61,461,050.00
	Pelet Terapung 5 mm	450	11,100.00	4,995,000.00
	Pelet Terapung 6 mm	300	11,100.00	3,330,000.00
	Pelet Terapung 7 mm	510	22,900.00	11,679,000.00
	Pelet Terapung 8 mm	1000	15,000.00	15,000,000.00
	Pelet Terapung 9 mm	250	15,000.00	3,750,000.00
6	DINAS TANPAH-AQRTIRIR			23,861,500,00
	Bilik Tanaman Hortikultura			28,061,000.00
	Pisang Ambon	5	10,000.00	50,000.00
	Selada	35	1,900.00	67,350.00
	Jenis rupa	0	5,000.00	0.00
	Jenis kepokok gumpang cemer	26	7,000.00	182,000.00
	Jenis Ratu 25	900	10,000.00	9,000,000.00
	Manggulutan	310	10,000.00	3,100,000.00
	Agloamasi	10	20,000.00	200,000.00
	Ampunan	22	15,000.00	3,300,000.00
	Sepuluh perth, kayu, marah	80	15,000.00	1,200,000.00
	Jenis diam	28	10,000.00	2,800,000.00
	Melawat	14	15,000.00	2,100,000.00
	Geonam	4	35,000.00	140,000.00
	Erceana	6	15,000.00	90,000.00
	tanjung	30	25,000.00	1,500,000.00
	Kardus	50	8,000.00	400,000.00
	Kardus kecil	25	5,000.00	1,250,000.00
	Redepte kurus	0	40,000.00	
	Seruk lapu	3	30,000.00	150,000.00
	Seruk leg	11	40,000.00	440,000.00
	Serukhis marsh	5	20,000.00	100,000.00
	Sekring	10	20,000.00	200,000.00
	Melawat	1	7,000.00	7,000.00
	Bambu Ponda : kate	8	30,000.00	240,000.00
	Bambu Ponda : kate	10	10,000.00	100,000.00
	Bambu air	5	9,000.00	45,000.00
	Pakan hotel	2	85,000.00	170,000.00
	Bumud a Bork	3	20,000.00	60,000.00
	Serukhis Tribaku	1	20,000.00	20,000.00
	shindandun red /red	27	10,000.00	270,000.00
	memata jati	1	50,000.00	50,000.00
	pasak marsh	1	50,000.00	50,000.00
	memata perth	1	50,000.00	50,000.00

		Cuma 4 liter	1	50,000.00	50,000.00
		rambut uban	1	50,000.00	50,000.00
		lucuk-dama	3	20,000.00	60,000.00
		silva	1	20,000.00	20,000.00
		lilipais	70	8,000.00	560,000.00
		sil-renc	25	5,000.00	125,000.00
		dolar	30	15,000.00	450,000.00
		seam-bawa	3	15,000.00	45,000.00
		lisa-kapitang	25	15,000.00	375,000.00
		landan-baki	16	15,000.00	240,000.00
		sepatu	30	10,000.00	300,000.00
		lansman-pangung-tubedi-d'3-campar-marah	4	15,000.00	60,000.00
		lansman-kampar'v'v'v'	10	5,000.00	50,000.00
		Angguk-Pakho-Colemak	5	150,000.00	750,000.00
		Angguk-Pakho-padum-kapertakom	5	75,000.00	375,000.00
		Angguk-Pakho-padum-silber-w'ng'ng'	5	75,000.00	375,000.00
		Angguk-Pakho-loba'p'	2	40,000.00	80,000.00
		Angguk-Malids-marah'p'	2	40,000.00	80,000.00
		Angguk-Gendrob'um-Berharam'um-w'v'v'v'	3	50,000.00	150,000.00
		Angguk-Vanda-sum'v'v'v'	3	75,000.00	225,000.00
		Angguk-Amar'v'v'v'v'v'v'	3	50,000.00	150,000.00
		Angguk-Paw'v'v'v'v'v'v'	5	75,000.00	375,000.00
		Angguk-C'v'v'v'v'v'v'v'v'	5	40,000.00	200,000.00
7	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				40,277,500.00
		PAJIT TERNAK			56,335,000.00
		Proses-Serani-Silaw-Suji	3000	10,000.00	30,000,000.00
		Proses-Serani-Silaw-Korbu	997	7,000.00	6,979,000.00
		PERALATAN GEMUK PAKAI HARI			1,730,000.00
		lisa-G'v'v'v'	91	5,000.00	455,000.00
		Pastak-S'v'v'v'	17	75,000.00	1,275,000.00
		PALAN TERNAK			2,212,500.00
		Putent'v'v'v'v'v'v'	750	2,950.00	2,212,500.00
8	DINAS RANDA				1,422,196,507.00
		Pembelian-Borak			1,422,096,507.00
		Alat-Kantor-dan-Rumit-Tangga			100,000.00
9	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM				558,155,138.00
		-Barang yang Akan Dijualkan kepada Masyarakat/ Bekerja Pagar			558,155,138.00
10	SEKRETARAT DAERAH				12,671,600.00
		Kal-Rantai-dan-Rumit-Tangga			1,320,600.00
		Metana-dan-P'v'v'v'			4,050,000.00
11	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCATATAN SIVIL				4,402,800.00
		Baran-Bahan-dan-Bekas			4,402,800.00
		Jumlah Perkiraan Tahunan			2,571,075,377.00

Rekap Dana Bergulir

**REKAPITULASI DANA BERGULIR APBD II (HASIL GULIRAN)
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2005 - 2004
POSTSI : BULAN DESEMBER 2021**

NO	NAMA KOPERASI/UKM	ALAMAT	TANGGAL			JUMLAH PERJAMAH (Rp)	ANGGARAN POKOK (Rp)	TUNGGAKAN POKOK (Rp)	PERSENTASE PENYERTAAN BERDANAKAN UMUM				SISA TUNGGAKAN DOKUMEN KEPELAN PENYERTAAN
			REALISASI	JT. TEMPO	LAMA TATAP TEMPO				1 B/D 3 TAHUN	2 B/D 5 TAHUN	3 B/D 10 TAHUN	10 TAHUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Pelaksanaan Kegiatan Dana Bergulir (KDB) 2004													
1	KDB Koperasi	Parang	Des. 2004	Des. 2006	12 bulan	50.000.000	20.000.000	24.100.000					25.900.000
2	KDB Koperasi BMT	Tubek Pabrik	Des. 2003	Des. 2005	12 bulan	20.000.000	20.000.000						
3	Koperasi Sekeah	Parang	Des. 2003	Des. 2005	12 bulan	20.000.000	2.000.000	19.100.000					20.000.000
Jumlah I						100.000.000	42.000.000	43.200.000					43.470.000
II. Pelaksanaan Kegiatan Dana Bergulir (KDB) 2004													
1	PK. Tegal Kelang	Batu Tegal	Des. 2004	Des. 2007	14 Tahun	40.000.000	15.000.000	25.000.000					25.000.000
2	KSP Hita Alitah	Tawang Maja	Des. 2005	Des. 2007	14 Tahun	40.000.000	25.000.000	15.000.000					15.000.000
3	KDB PK Kaca Tegal	Medan	Des. 2004	Des. 2007		40.000.000	40.000.000						
4	PK. Bermanah Proje	Lebak	Des. 2004	Des. 2007		6.000.000	5.000.000						
5	PK. Wangi Kemantik	Batu Tegal	Des. 2004	Des. 2007		6.000.000	5.000.000						
6	PK. Bardi. Mullana	Lampung	Des. 2005	Des. 2007		6.000.000	5.000.000						
7	PK. Kencana Suciara	Kulon-Kulon	Des. 2004	Des. 2007	14 Tahun	6.000.000	1.000.000	5.000.000					4.000.000
8	PK. Kaya Sekeah	Tuban Gunung	Des. 2005	Des. 2007	14 Tahun	6.000.000	3.500.000	2.500.000					3.500.000
Jumlah II						100.000.000	105.960.000	44.000.000					44.000.000
III. Pelaksanaan Kegiatan Dana Bergulir (KDB) 2006													
1	PK. M. A. L. I. V.	Tegal Barat	Des. 2006	Des. 2009		5.000.000	5.000.000	0					
2	PK. Ramadani Mardani	Kedondong	Des. 2006	Des. 2009		5.000.000	5.000.000	0					
3	PK. Star Murni Bopet	Bikubatu	Des. 2006	Des. 2009		5.000.000	5.000.000	0					
4	PK. Para Rempas	Sihing	Des. 2006	Des. 2009		5.000.000	5.000.000	0					
5	PK. Rawa Collection	Sihing	Des. 2006	Des. 2009	12 Tahun	5.000.000	1.000.000	4.000.000					1.000.000
6	PK. L. K. S. I. B.	Bulaksumbu	Des. 2006	Des. 2009	12 Tahun	5.000.000	1.000.000	4.000.000					1.000.000
7	PK. Adhira Komunitas	P. K. S. S. K.	Des. 2006	Des. 2009	12 Tahun	5.000.000	3.000.000	2.000.000					2.000.000
8	PK. Durga Bangun	Saping Ngawi	Des. 2006	Des. 2009		5.000.000	5.000.000	0					
9	PK. Bermanah	Lampung Ilir	Des. 2006	Des. 2009		5.000.000	5.000.000	0					
10	PK. Gu Lita	Tegal Barat	Des. 2006	Des. 2009		5.000.000	5.000.000	0					
11	PK. C. I. P. K.	PK. Para Sora	Des. 2006	Des. 2009		5.000.000	5.000.000	0					
12	PK. B. I. T.	Parang	Des. 2006	Des. 2009	12 Tahun	5.000.000	500.000	4.500.000					4.500.000
13	PK. K. S. B. B. B.	Petah Bermanah	Des. 2006	Des. 2009		5.000.000	5.000.000	0					
14	PK. Mitra Karya Sekeah	Tj. Lulung	Des. 2006	Des. 2009	12 Tahun	5.000.000	1.500.000	3.500.000					3.500.000
15	PK. M. K. S. T. L. I. C.	Ll. Gunung	Des. 2006	Des. 2009	12 Tahun	5.000.000	200.000	4.800.000					4.800.000
Jumlah III						75.000.000	68.400.000	22.700.000					22.700.000
Jumlah I + II + III						275.000.000	253.960.000	110.200.000					110.200.000
										Dana pd rekening Bergulir		236.063.687	
										Sisa DGB pd rekening Bergulir s.d Desember 2021		236.063.687	

No. : 200/2000/1000/1000/1000

Catatan:

1. PK. Ramadani : Kelikhas sebesar pokok sebesar Rp. 100.000.



**REKAPITULASI DATA BERKULIR APBD II (HASIL GULIRAN)
DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI DAN UKM KABUPATEN LIMA PULUH Kota Tahun 2003 - 2004
Periode : Bulan Desember 2003**

NO	NAMA KOPERASI/UKM	ALAMAT	TANGGAL			JUMLAH PELANGGAN (Rp.)	DUNIA (Rp)	ANGGARAN BUNGA (Rp)	TUNGGUJAWAR BURSA (Rp)	PERSENTASE PENYUMBANGAN PERDAGANGAN/UMK				SISA KARTAS PERDAGANG
			MKTABARI	JKT. TEMPO	LAMA JAKTUM TEMPO					1 s/d 3	4 s/d 6	7 s/d 10	10 TAHUN	
										28%	50%	75%	100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
J. Pambendahayon Regional Bali (Agar) 2003														
1	KUBI Tunggul	Tyran	Des. 2002	Des. 2003	12 bulan	71.000.000	15.000.000	8.074.320	11.925.680					11.925.680
2	KUBI Karmasari Tyran	Talich Yangg	Des. 2002	Des. 2003	12 bulan	20.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					7.000.000
3	KUBI Karmasari Tyran	Tyran	Des. 2002	Des. 2003	12 bulan	20.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000					7.000.000
Jumlah J						111.000.000	29.000.000	22.074.320	25.925.680					25.925.680
K. Pambendahayon Regional Bali (Agar) (KUB) 2004														
1	KUB Karmasari Tyran	Des. 2003	Des. 2004	12 bulan	10.000.000	12.000.000	4.665.000	7.335.000						7.335.000
2	KUB Karmasari Tyran	Des. 2003	Des. 2004	12 bulan	40.000.000	14.000.000	8.385.000	5.615.000						5.615.000
3	KUB Karmasari Tyran	Des. 2003	Des. 2004	12 bulan	40.000.000	12.000.000	11.000.000	1.000.000						1.000.000
4	PK Karmasari Tyran	Des. 2003	Des. 2004	12 bulan	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
5	PK Karmasari Tyran	Des. 2003	Des. 2004	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
6	PK Karmasari Tyran	Des. 2003	Des. 2004	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
7	PK Karmasari Tyran	Des. 2003	Des. 2004	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
8	PK Karmasari Tyran	Des. 2003	Des. 2004	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
Jumlah K						150.000.000	40.000.000	20.785.000	14.385.000					14.385.000
L. Kabupaten 2006														
1	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
2	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
3	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
4	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
5	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
6	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
7	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
8	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
9	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
10	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
11	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
12	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
13	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
14	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
15	PK Karmasari Tyran	Des. 2006	Des. 2007	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000						1.000.000
Jumlah L						15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000					15.000.000
Jumlah I + J + K						221.000.000	64.000.000	37.859.320	26.310.680					26.310.680

13. - (Materi) Dinas Perdagangan

- Catatan:
1. PK Coda: Retribusi sebesar Rp. 10.000,-
 2. PK Karmasari: Retribusi sebesar Rp. 10.000,-
 3. PK Karmasari: Retribusi sebesar Rp. 10.000,-



**RESKAPITULASI DANA BERGULIR APBD D (HASIL GULIRAN)
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2003 - 2004
POSTSI : BULAN DESEMBER 2021**

NO	NAMA KOPERASI/PELUK	ALAMAT	TARIF			JUMLAH PISANJAN (Rp)	ANGSURAN BUNDA (Rp)	TUNGGALAN BUNDA (Rp)	PERSENTASE PEMBAYARAN BERDASARKAN UMUR				SISA KEBELAKANG PEMBAYARAN	
			EKAL (Bulan)	JW. TENGO	LAMA LANTAU TENGO				1 B/D 3	2 B/D 3	3 B/D 3	4 B/D 3		
									YADUS	TAYUN	TAYUN	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
JURILAH I														
1	PT. Pambayunana Regional Unit Maget (RUD) 2003	Tarun	Des. 2003	Des. 2003	15 tahun	20.000.000	-	2.851.479					17.148.521	
2	RSU Sempati Noto Sajuhira Bekah	Tarik P. Smp	Des. 2003	Des. 2003	15 tahun	26.300.000	-	2.799.571,78					23.500.428,22	
JURILAH I						106.000.000		5.651.051					100.348.949	
JURILAH II														
1	RSU Sempati Noto	Tarik P. Smp	Des. 2004	Des. 2004	14 tahun	40.000.000	-	2.282.242					37.717.758	
2	RSU Sempati Noto	Tarik P. Smp	Des. 2004	Des. 2004	14 tahun	40.000.000	-	663.564					39.336.436	
3	RSU Sempati Noto	Tarik P. Smp	Des. 2004	Des. 2004	14 tahun	20.000.000	612.740	-					19.387.260	
4	PK Bina Usaha	Yonjung Per.	Des. 2004	Des. 2004	14 tahun	6.000.000	71.874	-					5.928.126	
5	PK Bina Usaha	Bala. Tjening	Des. 2004	Des. 2004	14 tahun	6.000.000	32.149	-					5.967.851	
6	PK Bina Usaha	Luhawang	Des. 2004	Des. 2004	14 tahun	6.000.000	21.185	-					5.978.815	
7	PK Bina Usaha	Sukoharjo	Des. 2004	Des. 2004	14 tahun	6.000.000	36.611	-					5.963.389	
8	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2004	Des. 2004	14 tahun	6.000.000	67.744	-					5.932.256	
JURILAH II						160.000.000	740.247	3.177.548					156.082.205	
JURILAH III														
1	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	17.941	-					4.982.059	
2	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
3	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
4	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
5	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
6	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
7	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
8	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
9	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
10	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
11	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
12	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
13	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
14	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
15	PK Bina Usaha	Teluk P. Smp	Des. 2005	Des. 2005	14 tahun	5.000.000	10.000	-					4.990.000	
JURILAH III						75.000.000	75.000	232.780					74.292.220	
JURILAH I + II + III						341.000.000	824.247	6.056.658,78					334.119.103	

Hal. 2 dari 2 halaman



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2008 - 2009
POSTEL : DESEMBER 2021

NO	NAMA KOPERASI/PRK	ALAMAT	UMUR	TANGGAL		JUMLAH	KURSI				JUMLAH	TURUNAN				KOT	
				BERDIRI	JT. TRNPO		POBOK	BUNGA	DEBKA	JMLAH		POBOK	BUNGA	DEBKA	JMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Persewaan Rumah, Koperasi																	
1	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	50.000.000	25.000.000	1.000.000	0	0	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0
2	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	20.000.000	10.000.000	500.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
3	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	10.000.000	5.000.000	250.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
Jumlah I						100.000.000	50.000.000	1.750.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	0	0	0
II. Usaha Persewaan, Koperasi																	
1	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	10.000.000	5.000.000	250.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
2	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
3	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
4	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
5	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
6	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Jumlah II						30.000.000	15.000.000	625.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0
Jumlah I + II						130.000.000	65.000.000	2.375.000	0	0	94.000.000	94.000.000	0	0	0	0	0

REKAPITULASI DATA BERKURIR APED II (JULIAN 2006) DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2006
POSTEL : DESEMBER 2021

NO	NAMA KOPERASI/PRK	ALAMAT	UMUR	TANGGAL		JUMLAH	KURSI				JUMLAH	TURUNAN				KOT	
				BERDIRI	JT. TRNPO		POBOK	BUNGA	DEBKA	JMLAH		POBOK	BUNGA	DEBKA	JMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
III. Persewaan Rumah, Koperasi																	
1	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	10.000.000	5.000.000	250.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
2	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
3	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
4	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
5	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
6	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
7	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
8	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
9	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
10	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
11	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
12	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
13	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
14	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
15	UMK Mekar (KOP) 2002	Tanah	UMK	Des. 2004	Des. 2005	5.000.000	2.500.000	125.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Jumlah III						75.000.000	37.500.000	1.875.000	0	0	37.500.000	37.500.000	0	0	0	0	
Jumlah I + II + III						205.000.000	102.500.000	4.250.000	0	0	131.500.000	131.500.000	0	0	0	0	



NO REKONING : 01000207053101
 MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
 NPWP : 003620743204000
 PERIODE : 01/01/2021 s.d 31/12/2021

REKONING KORAN

Hal 1 dari 2

No	Tgl. Transaksi	No. Anslp	Kode TX	Keterangan	Mutasi Debit	Mutasi Kredit	Saldo	Dr K	User/1	Cat Lnk
SALDO AWAL							231.686,141.00	K		
1	20/01/2021	DORT0000909	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		234,186,141.00	K	032x	0100
2	20/01/2021	ADM70000496	199	BIAYA ADM 1 2021	5,000.00		239,186,141.00	K	032x	0100
3	20/01/2021	BNGT0000859	299	BNG TAB 1 2021		249,070.00	234,937,171.00	K	032x	0100
4	20/01/2021	FJKT0000377	199	PJK TAB 1 2021	49,314.00		231,887,887.00	K	032x	0100
5	20/02/2021	DORT0000962	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		234,685,387.00	K	032x	0100
6	20/02/2021	ADM70000436	199	BIAYA ADM 2 2021	5,000.00		234,882,387.00	K	032x	0100
7	20/02/2021	BNGT0000764	299	BNG TAB 2 2021		249,288.00	235,129,885.00	K	032x	0100
8	20/02/2021	FJKT0000323	199	PJK TAB 2 2021	49,867.00		235,979,892.00	K	032x	0100
9	20/03/2021	DORT0000893	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		235,977,326.00	K	032x	0100
10	20/03/2021	ADM70000472	199	BIAYA ADM 3 2021	5,000.00		235,972,326.00	K	032x	0100
11	20/03/2021	BNGT0000756	299	BNG TAB 3 2021		220,344.00	235,297,670.00	K	032x	0100
12	20/03/2021	FJKT0000320	199	PJK TAB 3 2021	45,065.00		235,252,605.00	K	032x	0100
13	20/04/2021	DORT0000883	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		235,250,102.00	K	032x	0100
14	20/04/2021	ADM70000467	199	BIAYA ADM 4 2021	5,000.00		235,245,102.00	K	032x	0100
15	20/04/2021	BNGT0000763	299	BNG TAB 4 2021		249,670.00	235,494,772.00	K	032x	0100
16	20/04/2021	FJKT0000321	199	PJK TAB 4 2021	43,834.00		235,444,838.00	K	032x	0100
17	20/05/2021	DORT0000869	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		235,442,338.00	K	032x	0100
18	20/05/2021	ADM70000426	199	BIAYA ADM 5 2021	5,000.00		235,437,338.00	K	032x	0100
19	20/05/2021	BNGT0000919	299	BNG TAB 5 2021		241,819.00	235,679,157.00	K	032x	0100
20	20/05/2021	FJKT0000436	199	PJK TAB 5 2021	41,863.00		235,680,794.00	K	032x	0100
21	20/06/2021	DORT0000874	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		235,628,294.00	K	032x	0100
22	20/06/2021	ADM70000420	199	BIAYA ADM 6 2021	5,000.00		235,623,294.00	K	032x	0100
23	20/06/2021	BNGT0000906	299	BNG TAB 6 2021		250,062.00	235,673,356.00	K	032x	0100
24	20/06/2021	FJKT0000340	199	PJK TAB 6 2021	56,012.00		235,823,344.00	K	032x	0100
25	20/07/2021	DORT0000864	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		235,820,844.00	K	032x	0100
26	20/07/2021	ADM70000457	199	BIAYA ADM 7 2021	5,000.00		235,815,844.00	K	032x	0100
27	20/07/2021	BNGT0000822	299	BNG TAB 7 2021		212,208.00	236,058,052.00	K	032x	0100

NO. REKENING : 01000207053101
 MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
 NPWP : 003620713201000
 PERIODE : 01/01/2021 s.d 31/12/2021

REKENING KORAN

Hal 2 dari 2

No.	Tgl Transaksi	No. Arsip	Kode FK	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo	D/K	Usend	Geo	
	SALDO AWAL							234,636,541.00	K		
28	20/07/2021	PJKF0000377	199	PJK TAB 7 2021	48,441.00		236,009,617.00	K	032x	0100	
29	20/08/2021	DORT0000847	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		236,007,117.00	K	032x	0100	
30	20/08/2021	ADMT0000494	199	BIAYA ADM 8 2021	5,000.00		236,002,117.00	K	032x	0100	
31	20/08/2021	BNGT0000416	299	BNG TAB 8 2021		290,435.00	236,292,577.00	K	032x	0100	
32	20/08/2021	PJKF0000389	199	PJK TAB 8 2021	51,093.00		236,202,484.00	K	032x	0100	
33	20/09/2021	DORT0000839	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		235,198,984.00	K	032x	0100	
34	20/09/2021	ADMT0000443	199	BIAYA ADM 9 2021	5,000.00		236,194,984.00	K	032x	0100	
35	20/09/2021	BNGT0000773	299	BNG TAB 9 2021		251,861.00	236,445,065.00	K	032x	0100	
36	20/09/2021	PJKF0000348	199	PJK TAB 9 2021	50,136.00		236,395,529.00	K	032x	0100	
37	20/10/2021	DORT0000834	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		236,393,029.00	K	032x	0100	
38	20/10/2021	ADMT0000419	199	BIAYA ADM 10 2021	5,000.00		236,388,029.00	K	032x	0100	
39	20/10/2021	BNGT0000726	299	BNG TAB 10 2021		442,789.00	236,830,819.00	K	032x	0100	
40	20/10/2021	PJKF0000318	199	PJK TAB 10 2021	48,556.00		236,502,753.00	K	032x	0100	
41	20/11/2021	DORT0000823	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		236,575,753.00	K	032x	0100	
42	20/11/2021	ADMT0000439	199	BIAYA ADM 11 2021	5,000.00		236,571,753.00	K	032x	0100	
43	20/11/2021	BNGT0000721	299	BNG TAB 11 2021		251,284.00	236,825,837.00	K	032x	0100	
44	20/11/2021	PJKF0000327	199	PJK TAB 11 2021	50,216.00		236,775,621.00	K	032x	0100	
45	20/12/2021	DORT0000816	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		236,773,121.00	K	032x	0100	
46	20/12/2021	ADMT0000431	199	BIAYA ADM 12 2021	5,000.00		236,768,121.00	K	032x	0100	
47	20/12/2021	BNGT0000767	299	BNG TAB 12 2021		243,178.00	237,011,291.00	K	032x	0100	
48	20/12/2021	PJKF0000332	199	PJK TAB 12 2021	49,834.00		236,962,857.00	K	032x	0100	
						SALDO AWAL	234,636,541.00	K			
						MUTASI DB	679,124.00				
						MUTASI KR	2,345,840.00				
						SALDO AKHIR	236,962,657.00	K			

PAYAKUMBUH

Tgl: 12 Januari 2022 10:59:38

**DAFTAR KELOMPOK TANI YANG MENCIPTAKAN REVOLVING DINAS TANAMAN HORTIKULTURA DAN PERKERUAN
KOMODITI TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKERUAN KONKRETI 31 DESEMBER 2022**

NO	NAMA	KEL	PLANOY	REALISASI (Rp)	DITARIK KE BEKRAF (Rp)	DIBERK KELP (Rp)	PEMBAHAYUAN				LINGKARAN				PERSENTASE PEMBIYARAN			TOTAL (Rp)
							POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	DAFTAR (Rp)	JUAL (Rp)	POKOK (Rp)	BUNGA (Rp)	DAFTAR (Rp)	JUAL (Rp)	PURUS (Rp)	BUNGA (Rp)	DAFTAR (Rp)	
	Dinas Extension Pangan Hortikultura Kabupaten Kemarah																	
	Komoda Kemarah Pangan Hortikultura Kabupaten Kemarah	2020	215.375.000	196.000.000	21.555.000	6.797.500	116.047.200	13.248.000	2.070.000	131.706.000	69.675.000	7.410.000	7.807.000	41.591.500	66.170.100	7.118.200	4.207.600	21.555.000
	2 Komoda Kemarah	2020	100.000.000	150.000.000			100.000.000	90.000.000	67.407.000	83.200.000	7.410.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.410.000		100.000.000
	Jumlah		315.375.000	346.000.000	21.555.000	6.797.500	216.047.200	23.248.000	2.070.000	214.906.000	77.085.000	7.410.000	7.807.000	51.591.500	76.170.100	7.118.200	4.207.600	31.555.000

Rekening Dana Kelompok
di rekening KIRTA AP
Pencapaian target
Pengembangan Group
Pangkasian Biaya
Jumlah NP Dana Berputar Terjadi
Pencapaian persentase penerbitan NP
Hiliris NP Dana Berputar 2022

Halaman 1 dari 10

DIKEMHARTAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RUSTRIAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RUSTRIAN

[Signature]
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RUSTRIAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RUSTRIAN

**DAFTAR KELOMPOK TANAH YANG MENUNGGAK POKOK REVOLVING DINAS TANAMAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN HORTIKULTURA BERDASARKAN NAI NPP DAN/ATAU BERGILIRAN/UNDI 61/21 DESEMBER 2022**

NO	NAMA KELOMPOK TANAH	LOKASI		NAMA KETUA	REALISASI	JANGKA WAKTU (th)	LOKA TEMPAT	PLANNED	DITARIK KE (Rp)	DITARIK KEMP (Rp)	PENGEMBALAN POKOK (Rp)	MUNGKINAN POKOK (Rp)	Pembayaran (Rp)			
		NAGARI	KEMANTAN										1 tahun 5%	1 dan 2 tahun 10%	3 dan 4 tahun 6%	5 tahun 6%
Jumlah Perhitungan NPP dan bergiliran tak lerten h													153.626.750			
Rekening Dana Bergilir													23.656.000			
di Rekening Kelompok													8.237.500			
Pembayaran Pokok													162.997.250			
Jumlah BPP Dana Bergilir Perhitungan																
New NPP Dana Bergilir and 2022													930.848.750			

Surabaya, 27 Desember 2022

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN HORTIKULTURA



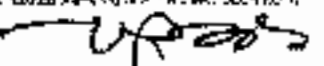
KELOMPOK POKOK TANAH
P. 10/2022/2022/01/01

DAFTAR KELOMPOK TANI YANG MENUNGGAK BUNGA REVOLUSI DINAS TANAMAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN
KEMODIT TANGAN PANJAN DAN HORTIKULTURA BERDASARKAN MI 41 MP DANA BEROLIG KONDISI 31 DESEMBER 2022

NO	NAMA KELOMPOK TANI	LOKASI		NAMA KETUA	REALISASI	JANGKA WAKTU (bln)	LAMA TENGO	PLAFOND	DI LARK KE REK. REV (Rp)	DI REK KOLP (Rp)	PENGEMBALAN BUNGA		Persentase Pemaduan Berdasarkan Umur					
		NAGARA	KEMANTAN								BUNGA (Rp)	BUNGA (Rp)	1 tahun	1 s.d 2 tahun	3 s.d 5 tahun	6 tahun		
1	Saly	Audich	Luk	Khyam	Des 2003	8 bulan	17 dan 6 bln	8.775.000		18.000	218.925							
2	Sukur Jaya	Audich	Luk	Y...	Des 2003	8 bulan	17 dan 6 bln	18.985.000	8.890.000		158.000							
3	Tanjung Sakti	Audich	Luk		Des 2003	8 bulan	17 dan 6 bln	20.405.000	8.162.500		180.000							
4	Seder	Audich	Luk		Des 2003	8 bulan	17 dan 6 bln	8.915.000	6.782.000		115.000							
5	Luk Sajo	Mungka	Luk		Jan 2004	6 bulan	17 dan 6 bln	10.725.000	1.950.000		272.250							
6	S. Lira	S. Lira	Bluk	Mukhlid	Jan 2004	6 bulan	17 dan 6 bln	2.500.000		12.500	74.625							
7	S. ngai Bar ngai	S. ngai Bar ngai	Bluk	Makel	Jan 2004	6 bulan	17 dan 6 bln	2.500.000			75.000							
8	S. ngai	S. ngai	Bluk	Tamara Henry	Des 2003	8 bulan	17 dan 6 bln	2.500.000	2.000.000									
9	S. ngai	Mungka	Luk	Yusuf	Nov 2003	8 bulan	17 dan 6 bln	15.200.000	825.000		482.800							
10	P. ngai Indah	Mungka	Luk	Andi Hal	Des 2003	6 bulan	17 dan 6 bln	15.200.000	2.800.000		482.800							
11	Tanjung Sakti	Mungka	Mungka	I. Yandi S. Kurniawan	Jan 2004	6 bulan	17 dan 6 bln	15.200.000	132.000			465.500					368.540	
Jumlah I								117.828.000	28.486.000	6.287.500	2.048.250	465.640						
12	Bunga Tanjung	Audich	Luk	Nyama	Des 2003	36 bulan	15 tahun	16.250.000			2.815.450							
13	Zakaria	S. ngai Bar ngai	Luk	S. ngai	Jan 2004	36 bulan	14 dan 1 bln	16.250.000			2.815.450							
14	Bukit Indah	Audich	S. ngai Bar ngai	Andi	Des 2003	36 bulan	15 tahun	16.250.000			2.815.450							
15	P. ngai Pata	S. ngai Bar ngai	S. ngai Bar ngai	Rahmatul H.	Des 2003	36 bulan	15 tahun	16.250.000			2.815.450							
16	Agri Mandiri	P. ngai	Mungka	H. Erranza Sahri	Jan 2004	36 bulan	12 dan 11 bln	25.000.000			290.000	3.400.000					3.400.000	
Jumlah II								88.000.000			11.500.450	3.400.000					3.400.000	
17	Ingan Baru	P. ngai	P. ngai	E. ngai	Feb 2004	0 tahun	9 dan 10 bln	12.500.000		10.000		3.240.800					3.240.800	
Jumlah III								19.600.000		10.000		3.240.800					3.240.800	
KSP Perkebunan 2002:																		
1	Hoppy Baru	S. ngai Bar ngai	Bluk	Nyama	Des 2003	24 bulan	16 bln	10.000.000			1200.000							
2	Dinar Harapan	S. ngai Bar ngai	Bluk	Pranata	Des 2003	24 bulan	16 bln	10.000.000			1200.000							
3	Seder	S. ngai Bar ngai	Mungka	Andi	Des 2003	24 bulan	16 bln	10.000.000			1200.000							
4	Arbabana P. ngai	S. ngai Bar ngai	Mungka	H. Erranza Sahri	Des 2003	24 bulan	16 bln	15.000.000			1200.000	900.000					900.000	
5	Bunga Utama	S. ngai Bar ngai	Mungka	Pasena	Des 2003	24 bulan	16 bln	15.000.000			740.000	480.000					480.000	
6	S. ngai	S. ngai Bar ngai	Mungka	M. ngai	Des 2003	24 bulan	16 bln	15.000.000			200.000							
Jumlah IV								70.000.000			7.440.000	1.680.000					1.680.000	
7	Eranda Baru	S. ngai Bar ngai	Bluk	S. ngai	Des 2003	24 bulan	16 bln	15.000.000			800.000	900.000					900.000	
8	Tanjung Matar	S. ngai Bar ngai	Bluk	S. ngai	Des 2003	24 bulan	16 bln	15.000.000			800.000	1.200.000					1.200.000	
9	S. ngai	S. ngai Bar ngai	Bluk	S. ngai	Des 2003	24 bulan	16 bln	15.000.000			800.000	1.200.000					1.200.000	
10	S. ngai	S. ngai Bar ngai	Bluk	S. ngai	Des 2003	24 bulan	16 bln	15.000.000			800.000	1.200.000					1.200.000	
11	S. ngai	S. ngai Bar ngai	Bluk	S. ngai	Des 2003	24 bulan	16 bln	15.000.000			800.000	1.200.000					1.200.000	
Jumlah V								80.000.000			4.000.000	6.480.000					6.480.000	
Jumlah Tersebar Rangan dan Haru I + II								215.372.000	23.286.000	8.287.500	18.848.800	7.118.340						7.118.340
Jumlah Perkebunan IV + V								167.000.000			8.192.000	7.410.000						7.410.000
TOTAL								365.374.000	23.286.000	8.287.500	25.040.800	14.528.340						14.528.340

Jumlah Perkebunan KSP Rangan dan Haru tidak terdistribusi 14.528.340

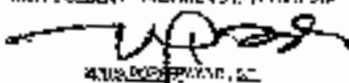
Jumlah KSP-Bunga Dana Berolig Terdistribusi

Selamat, 31 Desember 2022
 Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 Kabupaten Pangkep

 WIKI...
 NIP. 197401011981001

DAFTAR KELUANGK TANI YANG MENUNGGUK BENDA REKOLANG DNAS TANAMAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNYAN
KOMODITI TANAMAN PAKSIAN DAN HORTIKULTURA BERDASARKAN NILAI INP DAN BERTURUT KUNJUS: 31 31 DESEMBER 2022

NO	NAMA KEP. DNPOK. IAN	LOKASI		NAMA KETUA	REKOLABSI	JANGKA MANTUP Telo	LANA TEMPO	PLAFOND	BIBITANIK KFRREK.REV (Rp)	DI REK KELP (Rp)	PENDEMBULAN DENDA (Rp)	TUNGGAKAN DENDA (Rp)	Pembayaran Persebaran Berdasarkan Urut																
		NAGARA	KERAWATAN										< 1 bulan 06%	1 s.d 2 bulan 10%	3 s.d 5 tahun 50%	> 5 tahun 100%													
1	Raya	Andah	Lauk	Yeni	Des 2022	6 bulan	12 hr 5 dn	8.775.000		18.000																			
2	Suhar Jaya	Andah	Lauk	Yeni	Des 2022	6 bulan	12 hr 5 dn	18.900.000	3.000.000																				
3	Tanjung Sakti	Andah	Lauk	Yeni	Des 2022	6 bulan	12 hr 5 dn	14.422.500	3.750.000																				
4	Sagar	Andah	Lauk	Sobaharta	Des 2022	6 bulan	12 hr 5 dn	8.812.500	4.750.000																				
5	Luar Nagu	Mungo	Lauk	Harah Naim	Jan 2024	6 bulan	12 hr 5 dn	10.725.000	1.500.000																				
6	Bukri	Sulki	Ewad	M. Khomir	Jan 2024	6 bulan	12 hr 5 dn	2.500.000		12.500																			
7	Sungai Perangan	Sarik Lurah	Akub k	M. Kholi	Jan 2024	6 bulan	12 hr 5 dn	2.500.000																					
8	Sagardi	Sukbaru	EL. Lina N	Indah Henny	Des 2022	6 bulan	12 hr 5 dn	7.500.000		2500.000																			
9	Sriwadi	Mungo	Lauk	Yeni	Nov 2022	6 bulan	12 hr 5 dn	16.900.000		625.000							154.500												
10	Jaya Indah	Mungo	Lauk	Indah N	Des 2022	6 bulan	12 hr 5 dn	18.700.000		2.000.000							224.000												
11	Tanjung Sakti	Mungo	Naraka	Yeni S. Kumang	Jan 2024	6 bulan	12 hr 5 dn	13.750.000		130.000							537.800												
Jumlah																													
12	Duga Terjang	Andah	Lauk	Nama	Des 2022	36 bulan	10 tahun	16.750.000	22.855.000	6.287.500																			
13	Selaku	Sel Kamayang	Lauk	Selaku	Jan 2024	36 bulan	14 th 11 dn	16.750.000																					
14	Bukhan Jaya	Tj. Kamang	L. S. Sabar	Ami	Des 2022	36 bulan	10 tahun	16.250.000																					
15	Pesutan Pula	S. L. Pula	S. L. Pula	Nama dan B	Des 2022	36 bulan	10 tahun	16.250.000																					
16	Jaya Mandiri	Mungo	Naraka	J. Emma S. M	Jan 2024	36 bulan	14 dn 1 th	20.000.000										240.000											
Jumlah																													
17	Ingl. Mera	Mungo	Naraka	Yeni	Feb 2024	6 tahun	9 th 10 dn	13.000.000		10.000								1.240.000											
Jumlah																													
Jumlah Perkebunan 2022																													
18	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
19	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
20	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
21	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
22	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
23	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
24	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
25	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
26	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
27	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
28	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
29	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
30	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
31	Harah Dani	Harah Dani	Harah Dani	Yeni	Des 2022	24 bulan	16 dn	10.000.000																					
Jumlah																													
Jumlah Perkebunan 2022																													
TOTAL																													

Jumlah Perkebunan 2022
Jumlah Inp - Denda Dana Bergulir Tanah

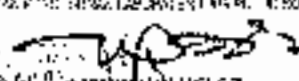
Satman, 31 Desember 2022
KORPORASI PERKEBUNYAN DAN PERKAWASAN
KAWASAN PERKEBUNYAN DAN PERKAWASAN

KORPORASI PERKEBUNYAN DAN PERKAWASAN
Jl. Raya Perkebunan No. 100
T. 10000

**DAFTAR KELOMPOK TANI YANG MENYUNGGUK REVOLVING DIBAS TANAMAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNJAN
KAWADITI TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNJAN KONDISI sd 31 DESEMBER 2022**

NO	KISTASI	REALISASI	PLAFOND	REKONSILIASI (Rp)	DI LARANG NEKREK (Rp)	Jumlah (Rp)	KONTR (Rp)	PENGEMBALAN		JUMLAH (Rp)	JUMBUKAN			JUMLAH (Rp)	SALDO BERSEKUTUAN UMUR			
								BUSRA (Rp)	DENDA (Rp)		POKOK (Rp)	PAKSA (Rp)	DENDA (Rp)		SIKUT (Rp)	JUMLAH (Rp)		
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																	
1	Kawadit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2022	218.829.000	102.491.500	29.525.000	8.267.000	118.947.500	11.245.500	22.10.328	131.796.078	86.570.250	7.118.340	4.037.800	21.521.540	64.578.290	1.118.940	4.637.290	51.521.570
2	Kawadit Perkebunan	2022	186.100.000	77.710.000			88.053.000	6.090.000		94.143.000	59.910.000	7.470.000		7.280.000	21.620.000	1.410.000		21.990.000
	Jumlah		404.929.000	180.201.500	29.525.000	8.267.000	207.000.500	17.335.500	22.10.328	225.939.078	146.480.250	14.588.340	4.037.800	28.801.540	86.208.290	2.528.940	4.637.290	103.351.570

Investasi Dana Bergas 21.267.000
 Di Sekeliling Kol. (Rp) 4.267.000
 Pengeluaran Pakok 202.247.250
 Penerimaan Busro 21.521.570
 Pengeluaran Denda 2.710.328
 Jumlah Saldo Bersekutuan 103.351.570
 Perubahan persentase per 31 Desember 2022
 (Rp) 103.351.570

Lampiran 31 Desember 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 Kabupaten Bantul

 Kepala Dinas

NO. REKENING : 01000207186571
 MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
 IPWP : 000000000000000
 PERIODE : 01/01/2022 s.d 31/01/2023

REKENING KORAN

							Hal 1 dari 2	
Tgl. Transaksi	No. Ansim	Kode TK	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId	Cab Lok
SALDO AWAL						1,428,411,849.00	K	
01/01/2022	1550000042	201	RMV VENUS		20,270,000.00	1,448,681,849.00	K	1680 0103
21/01/2022	ADM10001385	199	BIAYA ADM 1 2022	5,000.00		1,443,681,849.00	K	032x 0100
21/01/2022	BNGT0002788	299	BNG TAB 1 2022		2,444,289.00	1,451,121,148.00	K	032x 0100
20/01/2022	PJKT0001191	199	PJK TAB 1 2022	485,859.00		1,450,632,289.00	K	032x 0100
24/01/2022	2021000016	201	HAK IMAN RAMLI		500,000.00	1,451,132,289.00	K	202x 0100
20/02/2022	ADM10001215	199	BIAYA ADM 2 2022	7,500.00		1,451,124,789.00	K	032x 0100
20/02/2022	BNGT0002791	299	BNG TAB 2 2022		2,464,528.00	1,453,589,317.00	K	032x 0100
25/02/2022	PJKT0001021	199	PJK TAB 2 2022	492,505.00		1,453,096,812.00	K	032x 0100
20/03/2022	ADM10001145	199	BIAYA ADM 3 2022	7,500.00		1,453,089,312.00	K	032x 0100
22/03/2022	BNGT0002840	299	BNG TAB 3 2022		2,228,524.00	1,455,317,836.00	K	032x 0100
20/03/2022	PJKT0000948	199	PJK TAB 3 2022	445,704.00		1,454,871,732.00	K	032x 0100
20/04/2022	ADM10001201	199	BIAYA ADM 4 2022	7,500.00		1,454,864,232.00	K	032x 0100
20/04/2022	BNGT0002847	299	BNG TAB 4 2022		7,470,191.00	1,457,334,423.00	K	032x 0100
20/04/2022	PJKT0001023	199	PJK TAB 4 2022	751,008.00		1,456,583,415.00	K	032x 0100
20/05/2022	ADM10001209	199	BIAYA ADM 5 2022	7,500.00		1,456,575,915.00	K	032x 0100
20/05/2022	BNGT0002791	299	BNG TAB 5 2022		2,353,700.00	1,458,929,615.00	K	032x 0100
20/05/2022	PJKT0001123	199	PJK TAB 5 2022	478,740.00		1,458,450,875.00	K	032x 0100
20/05/2022	2021000051	201	SF TORAN TUNA		1,300,300.00	1,459,751,175.00	K	2651 0103
08/08/2022	2021000055	201	K. ARJUNA		500,000.00	1,459,251,175.00	K	2851 0103
20/08/2022	ADM10001177	199	BIAYA ADM 6 2022	7,500.00		1,459,243,675.00	K	032x 0100
20/08/2022	BNGT0002829	299	BNG TAB 6 2022		2,473,260.00	1,461,716,935.00	K	032x 0100
20/08/2022	PJKT0000988	199	PJK TAB 6 2022	490,080.00		1,461,226,855.00	K	032x 0100
20/07/2022	ADM10001267	199	BIAYA ADM 7 2022	7,500.00		1,461,219,355.00	K	032x 0100
20/07/2022	BNGT0002831	299	BNG TAB 7 2022		7,402,050.00	1,468,621,405.00	K	032x 0100
20/07/2022	PJKT0001073	199	PJK TAB 7 2022	490,411.00		1,468,130,994.00	K	032x 0100
20/08/2022	ADM10001290	199	BIAYA ADM 8 2022	7,500.00		1,468,123,494.00	K	032x 0100
20/08/2022	BNGT0002477	299	BNG TAB 8 2022		2,485,340.00	1,470,608,834.00	K	032x 0100

NO. REKENING : 01000207186671
 MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
 IPWP : 000000000000000
 PERIODE : 01/01/2022 s.d 31/01/2023

REKENING KORAN

Hal 2 dari 2

Tgl. Transaksi	No. Asap	Kode TX	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Di K	Usaha	Cab. Lok
SALDO AWAL						1,421,411,848.00	K	
28	20/08/2022	PJKT0001007	159 PJK TAB 8 2022	497,568.00		1,455,817,852.00	K	032x 0100
29	24/08/2022	2851000142	201 KEM TAN ARJUNA		233,032.00	1,489,017,009.00	K	2851 0100
30	24/08/2022	ADM10001185	159 BIAYA ADM 9 2022	7,500.00		1,486,910,383.00	K	032x 0100
31	20/09/2022	BNGT0002520	299 HNG TAB 9 2022		2,499,839.00	1,488,500,222.00	K	032x 0100
32	20/09/2022	PJKT0001015	159 PJK TAB 9 2022	477,967.00		1,488,002,256.00	K	032x 0100
33	22/09/2022	2851000147	201 KEM MAK O		3,273,080.00	1,471,275,256.00	K	2851 0100
34	25/10/2022	ADM10001136	159 BIAYA ADM 10 2022	7,500.00		1,471,267,756.00	K	032x 0100
35	25/10/2022	BNGT0002565	299 HNG TAB 10 2022		2,418,222.00	1,473,685,977.00	K	032x 0100
36	25/10/2022	PJKT0000926	159 PJK TAB 10 2022	493,644.00		1,473,202,333.00	K	032x 0100
37	23/11/2022	ADM10001157	159 BIAYA ADM 11 2022	7,500.00		1,473,194,833.00	K	032x 0100
38	20/11/2022	BNGT0002440	299 HNG TAB 11 2022		2,531,267.00	1,476,698,080.00	K	032x 0100
39	20/11/2022	PJKT0001017	159 PJK TAB 11 2022	500,249.00		1,476,195,831.00	K	032x 0100
40	20/12/2022	ADM10001192	159 BIAYA ADM 12 2022	7,500.00		1,476,188,331.00	K	032x 0100
41	20/12/2022	BNGT0002409	299 HNG TAB 12 2022		2,423,879.00	1,477,612,210.00	K	032x 0100
42	23/12/2022	PJKT0001011	159 PJK TAB 12 2022	494,774.00		1,477,127,436.00	K	032x 0100
43	22/12/2022	2862000049	201 HALIMAH RAMLI		500,000.00	1,477,627,436.00	K	2862 0100
44	23/01/2023	ADM10001209	159 BIAYA ADM 1 2023	7,500.00		1,477,519,936.00	K	032x 0100
45	20/01/2023	BNGT0002463	299 HNG TAB 1 2023		2,509,702.00	1,480,129,700.00	K	032x 0100
46	20/01/2023	PJKT0001057	159 PJK TAB 1 2023	501,811.00		1,479,627,753.00	K	032x 0100
SALDO AWAL						1,421,411,848.00	K	
MUTASI DB						6,436,958.00		
MUTASI KR						57,652,872.00		
SALDO AKHIR						1,479,627,753.00	K	

PAYAKUMBUH

Tg - 01 Februari 2023 14:30:39

D. REKENING : 0100207034491
 ATA LANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
 FWP : 000000005202000
 LRIODE : 01/01/2022 s.d 31/01/2023

REKENING KOKAN

						Hal 1 dari 3	
Tgl Transaksi	No. Arsip	Kode TX	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId Cab Lok
SALDO AWAL						113,357,962.00	K
20/01/2022	BORT0000751	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		113,355,462.00	K a32x 0100
20/01/2022	ADMT0000242	199	BIAYA ADM 1 2022	1,000.00		113,354,462.00	K a32x 0100
20/01/2022	BNGT0000490	299	BNG TAB 1 2022		120,797.00	113,475,259.00	K a32x 0100
20/01/2022	PJKT0000215	199	PJK TAB 1 2022	24,069.00		113,446,760.00	K a32x 0100
20/02/2022	DORH0000744	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		113,444,260.00	K a32x 0100
20/02/2022	ADMT0000293	199	BIAYA ADM 2 2022	7,500.00		113,436,760.00	K a32x 0100
20/02/2022	BNGT0000451	299	BNG TAB 2 2022		120,390.00	113,557,150.00	K a32x 0100
20/02/2022	PJKT0000189	199	PJK TAB 2 2022	24,376.00		113,533,012.00	K a32x 0100
20/03/2022	DORT0000735	199	BIAYA ADM DORMAN	7,500.00		113,530,512.00	K a32x 0100
20/03/2022	ADM10000773	199	BIAYA ADM 3 2022	7,500.00		113,523,012.00	K a32x 0100
20/03/2022	BNGT0000433	299	BNG TAB 3 2022		108,851.00	113,631,863.00	K a32x 0100
20/03/2022	PJKT0000176	199	PJK TAB 3 2022	21,766.00		113,610,077.00	K a32x 0100
20/04/2022	DORH0000738	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		113,607,577.00	K a32x 0100
20/04/2022	ADMT0000288	199	BIAYA ADM 4 2022	7,500.00		113,600,077.00	K a32x 0100
20/04/2022	BNGT0000504	299	BNG TAB 4 2022		120,557.00	113,720,634.00	K a32x 0100
20/04/2022	PJKT0000155	199	PJK TAB 4 2022	21,111.00		113,699,523.00	K a32x 0100
20/05/2022	DORT0000721	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		113,697,023.00	K a32x 0100
20/05/2022	ADM10000306	199	BIAYA ADM 5 2022	7,500.00		113,689,523.00	K a32x 0100
20/05/2022	BNGT0000454	299	BNG TAB 5 2022		116,780.00	113,806,283.00	K a32x 0100
20/05/2022	PJKT0000221	199	PJK TAB 5 2022	23,367.00		113,779,831.00	K a32x 0100
20/06/2022	DORH0000742	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		113,777,331.00	K a32x 0100
20/06/2022	ADMT0000289	199	BIAYA ADM 6 2022	7,500.00		113,769,831.00	K a32x 0100
20/06/2022	BNGT0000452	299	BNG TAB 6 2022		120,745.00	113,890,574.00	K a32x 0100
20/06/2022	PJKT0000188	199	PJK TAB 6 2022	24,140.00		113,866,434.00	K a32x 0100
20/07/2022	DORT0000731	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		113,864,034.00	K a32x 0100
20/07/2022	ADMT0000289	199	BIAYA ADM 7 2022	7,500.00		113,856,534.00	K a32x 0100
20/07/2022	BNGT0000502	299	BNG TAB 7 2022		118,940.00	113,975,474.00	K a32x 0100

O. REKENING : 01000207034491
 ATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
 PWP : 00000000202000
 PERIODE : 01/01/2022 s.d 31/01/2023

REKENING KORAN

Tgl. Transaksi	No. Ansp	Kode TX	Keterangan	Mutas. Debet	Mutas. Kredit	Hal 2 dari 3		
						Saldo	D/K	Lab/Lrk
SALDO AWAL						113.357.982,00	K	
8 20/07/2022	PJKT0000704	159	PJK TAB 7 2022	22.388,00		113.950.078,00	K	032x 0100
9 20/08/2022	DORT0000552	199	BIAYA ADM DORMAN	2.500,00		113.947.578,00	K	032x 0100
0 20/08/2022	ADM70000797	199	BIAYA ADM 8 2022	7.500,00		113.940.078,00	K	032x 0100
1 20/08/2022	BNGT0000445	299	BNG TAB 8 2022		120.929,00	114.061.007,00	K	032x 0100
2 20/08/2022	PJKT0000713	159	PJK TAB 8 2022	24.165,00		114.036.842,00	K	032x 0100
3 20/09/2022	DORT0000682	199	BIAYA ADM DORMAN	2.500,00		114.034.342,00	K	032x 0100
4 20/09/2022	ADM70000282	199	BIAYA ADM 9 2022	7.500,00		114.026.842,00	K	032x 0100
5 20/09/2022	BNGT0000453	299	BNG TAB 9 2022		121.072,00	114.147.914,00	K	032x 0100
6 20/09/2022	PJKT0000785	159	PJK TAB 9 2022	24.204,00		114.123.710,00	K	032x 0100
7 20/10/2022	DORT0000675	199	BIAYA ADM DORMAN	2.500,00		114.121.210,00	K	032x 0100
8 20/10/2022	ADM70000290	199	BIAYA ADM 10 2022	7.500,00		114.113.710,00	K	032x 0100
9 20/10/2022	BNGT0000435	299	BNG TAB 10 2022		117.210,00	114.230.920,00	K	032x 0100
0 20/10/2022	PJKT0000734	159	PJK TAB 10 2022	23.142,00		114.207.778,00	K	032x 0100
1 20/11/2022	DORT0000669	199	BIAYA ADM DORMAN	2.500,00		114.205.278,00	K	032x 0100
2 20/11/2022	ADM70000263	199	BIAYA ADM 11 2022	7.500,00		114.197.778,00	K	032x 0100
3 20/11/2022	BNGT0000410	299	BNG TAB 11 2022		121.207,00	114.318.985,00	K	032x 0100
4 20/11/2022	PJKT0000793	159	PJK TAB 11 2022	24.241,00		114.294.744,00	K	032x 0100
5 20/12/2022	DORT0000681	199	BIAYA ADM DORMAN	2.500,00		114.292.244,00	K	032x 0100
6 20/12/2022	ADM70000277	199	BIAYA ADM 12 2022	7.500,00		114.284.744,00	K	032x 0100
7 20/12/2022	BNGT0000430	299	BNG TAB 12 2022		117.379,00	114.402.123,00	K	032x 0100
8 20/12/2022	PJKT0000788	159	PJK TAB 12 2022	23.175,00		114.378.948,00	K	032x 0100
9 20/01/2023	DORT0000640	199	BIAYA ADM DORMAN	2.500,00		114.376.448,00	K	032x 0100
0 20/01/2023	ADM70000279	199	BIAYA ADM 1 2023	7.500,00		114.368.948,00	K	032x 0100
1 20/01/2023	BNGT0000484	299	BNG TAB 1 2023		121.382,00	114.490.330,00	K	032x 0100
2 20/01/2023	PJKT0000786	159	PJK TAB 1 2023	24.276,00		114.466.054,00	K	032x 0100

SALDO AWAL	113,357,962.00	K
MUTASI DB	436,225.00	
MUTASI KH	1,543,647.00	
SALDO AKHIR	115,485,384.00	K

PAYAKUMBLIH

Tgl. 01 Februari 2023 14:31:50

()

NO. REKENING : 01000207034518
 MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
 PWP : 090000000202000
 PERIODE : 01/01/2022 s.d 31/01/2023

REKENING KORAN

Tgl. Transaks.	No. Anap	Kode TX	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo			
						D/K	Usaid	Ceb Lak	
SALDO AWAL						7,824,351.00	K		
23/01/2022	DORT0000752	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		7,671,851.00	K	032x	0100
25/01/2022	ADMT0000322	199	BIAYA ADM 1 2022	5,000.00		7,618,851.00	K	032x	0100
20/01/2022	BNGT0000401	299	BNG TAB 1 2022		4,200.00	7,321,657.00	K	032x	0100
20/01/2022	PJKT0000213	199	PJK TAB 1 2022	857.00		7,620,730.00	K	032x	0100
20/02/2022	DORT0000745	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		7,919,230.00	K	032x	0100
20/02/2022	ADMT0000251	199	BIAYA ADM 2 2022	7,000.00		7,910,730.00	K	032x	0100
20/02/2022	BNGT0000434	299	BNG TAB 2 2022		4,836.00	7,615,895.00	K	032x	0100
20/02/2022	PJKT0000190	199	PJK TAB 2 2022	957.00		7,614,938.00	K	032x	0100
20/03/2022	DORT0000737	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		7,612,098.00	K	032x	0100
20/03/2022	ADMT0000274	199	BIAYA ADM 3 2022	7,900.00		7,604,598.00	K	032x	0100
20/03/2022	BNGT0000404	299	BNG TAB 3 2022		4,358.00	7,608,957.00	K	032x	0100
20/03/2022	PJKT0000175	199	PJK TAB 3 2022	870.00		7,606,084.00	K	032x	0100
20/04/2022	DORT0000729	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		7,605,584.00	K	032x	0100
20/04/2022	ADMT0000289	199	BIAYA ADM 4 2022	7,500.00		7,598,084.00	K	032x	0100
20/04/2022	BNGT0000462	299	BNG TAB 4 2022		4,836.00	7,602,920.00	K	032x	0100
20/04/2022	PJKT0000195	199	PJK TAB 4 2022	867.00		7,601,983.00	K	032x	0100
20/05/2022	DORT0000722	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		7,599,483.00	K	032x	0100
20/05/2022	ADMT0000307	199	BIAYA ADM 5 2022	7,900.00		7,591,983.00	K	032x	0100
20/05/2022	BNGT0000416	299	BNG TAB 5 2022		4,579.00	7,606,642.00	K	032x	0100
20/05/2022	PJKT0000225	199	PJK TAB 5 2022	935.00		7,595,707.00	K	032x	0100
20/06/2022	DORT0000713	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		7,593,207.00	K	032x	0100
20/06/2022	ADMT0000340	199	BIAYA ADM 6 2022	7,500.00		7,595,707.00	K	032x	0100
20/06/2022	BNGT0000464	299	BNG TAB 6 2022		4,324.00	7,590,381.00	K	032x	0100
20/06/2022	PJKT0000197	199	PJK TAB 6 2022	936.00		7,589,445.00	K	032x	0100
20/07/2022	DORT0000707	199	BIAYA ADM DORMAN	2,500.00		7,587,945.00	K	032x	0100
20/07/2022	ADMT0000359	199	BIAYA ADM 7 2022	7,500.00		7,578,445.00	K	032x	0100
20/07/2022	BNGT0000463	299	BNG TAB 7 2022		4,650.00	7,584,297.00	K	032x	0100

O. REKENING : 01000207034518
 BIAYA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
 PWP : 00000000202000
 ERIGDE : 01/01/2022 s.d 31/01/2023

REKENING KORAN

							Hal 2 dari 3			
Tgl	Transaksi	No. Aneka	Kode FX	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo	D/K	UserID	Cab Lok
SALDO AWAL							7,674,381.00	K		
4	20/07/2022	PJK10000205	199	PJK TAB 7 2022	860.00		7,589,287.00	K	032x	0100
9	20/08/2022	DORT0000093	199	BIAYA ADM NORMAN	2,500.00		7,580,767.00	K	032x	0100
0	20/08/2022	ADMT0000269	199	BIAYA ADM 8 2022	7,500.00		7,573,267.00	K	032x	0100
1	20/08/2022	HNGT0000442	299	HNG TAB 8 2022		4,805.00	7,578,082.00	K	032x	0100
2	20/08/2022	PJKT0000714	199	PJK TAB 8 2022	561.00		7,577,101.00	K	032x	0100
3	20/08/2022	DORT0000583	199	BIAYA ADM NORMAN	2,500.00		7,574,601.00	K	032x	0100
4	20/08/2022	ADMT0000285	199	BIAYA ADM 9 2022	7,500.00		7,567,101.00	K	032x	0100
5	20/08/2022	BNGT0000454	299	BNG TAB 9 2022		4,805.00	7,571,906.00	K	032x	0100
5	20/08/2022	PJKT0000189	199	PJK TAB 9 2022	861.00		7,570,975.00	K	032x	0100
7	20/09/2022	DORT0000670	199	BIAYA ADM NORMAN	2,500.00		7,568,475.00	K	032x	0100
8	20/10/2022	ADMT0000751	199	BIAYA ADM 10 2022	7,500.00		7,560,975.00	K	032x	0100
9	20/10/2022	BNGT0000436	299	BNG TAB 10 2022		4,850.00	7,565,825.00	K	032x	0100
0	20/10/2022	PJKT0000175	199	PJK TAB 10 2022	930.00		7,564,895.00	K	032x	0100
1	20/11/2022	DORT0000569	199	BIAYA ADM NORMAN	7,500.00		7,557,395.00	K	032x	0100
2	20/11/2022	ADMT0000265	199	BIAYA ADM 11 2022	7,500.00		7,550,895.00	K	032x	0100
3	20/11/2022	BNGT0000418	299	BNG TAB 11 2022		4,825.00	7,555,700.00	K	032x	0100
4	20/11/2022	PJKT0000184	199	PJK TAB 11 2022	861.00		7,558,539.00	K	032x	0100
5	20/12/2022	DORT0000661	199	BIAYA ADM IKHRMAN	2,500.00		7,556,039.00	K	032x	0100
6	20/12/2022	ADMT0000278	199	BIAYA ADM 12 2022	7,500.00		7,548,539.00	K	032x	0100
7	20/12/2022	BNGT0000431	299	BNG TAB 12 2022		4,850.00	7,553,389.00	K	032x	0100
8	20/12/2022	PJKT0000185	199	PJK TAB 12 2022	860.00		7,552,259.00	K	032x	0100
9	20/01/2023	DORT0000650	199	BIAYA ADM NORMAN	2,500.00		7,549,759.00	K	032x	0100
0	20/01/2023	ADMT0000279	199	BIAYA ADM 1 2023	7,500.00		7,542,259.00	K	032x	0100
1	20/01/2023	BNGT0000459	299	BNG TAB 1 2023		4,804.00	7,547,063.00	K	032x	0100
2	20/01/2023	PJKT0000194	199	PJK TAB 1 2023	560.00		7,546,103.00	K	032x	0100

SALDO AWAL	7.524.381,00	K
MUTASI DB	129.806,00	
MUTASI KR	81.548,00	
SALDO AKHIR	7.546.103,00	K

FAYAKUMBUH

Tgl: 09 Februari 2025 14:31:21

A handwritten signature is present, accompanied by a circular stamp that is partially obscured and difficult to read. The signature appears to be written in ink on a light-colored background.

**Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021

Dan

Laporan Auditor Independen

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

Hatsman

NERACA

1

LAPORAN LABA RUGI

2

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

3

LAPORAN ARUS KAS

4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5 - 22



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jln. Negeri Payakumbuh - Pekanbaru Km. 10 Teluk Tera (0773) 779655 Sarilamak



**SURAT PERNYATAAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : ZULBADRI, SE.MM
Alamat Kantor : Jl. Negeri Payakumbuh - Pekanbaru Km. 10 Sarilamak
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
2. Nama : MEDIA PURNAMA, SE
Alamat Kantor : Jl. Negeri Payakumbuh - Pekanbaru Km. 10 Sarilamak
Jabatan : DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak mengabaikan informasi atau fakta material.
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sarilamak, 20 Februari 2023

DIREKTUR UTAMA
PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota

DIREKTUR ADM. DAN KEUANGAN
PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota

ZULBADRI, SE.MM
NIK 19850405 199203 1 001

MEDIA PURNAMA, SE
NIK 19841222 200101 7 004





PT. ADI DELTA
Jl. Raya Muarabatu No. 39A RT 003/001 Pulogadung, Pulogadung, Jakarta Timur 13260

NTU KAP : 597/KM.1/2022

Jl. Raya Muarabatu No. 39A RT 003/001 Pulogadung, Pulogadung, Jakarta Timur 13260
Telp : 021-22485396, email : kapsadidandeki@gmail.com, info@adi-delta.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
No.0002/2.1378/AU.2/11/1895-21/BU2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PDAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota ("Perusahaan"), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berlaku di Indonesia.

Dasar Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggungjawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan Kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, Kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
"ADI DAN BEKI"

NIK KAP : 697/KM.1/2022

Jl. Kayu Mas Raya No. 496 RT 05/008, Pulogadung, Pulogadung, Jakarta Timur 13260
Telp : (021) 29485106, email : kap.adiandeki@gmail.com, - info@adi-deki.com

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola bahwa Kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai Independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap Independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, Kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, Kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diantisipasi secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
"ADI DAN BEKI"



Adi Nugroho, M.Ak., CA., CPA.,
NRAP AP. 1988



00021

Jakarta, 17 Maret 2023

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA**

Per 31 Desember 2022

ASET	Cat	2022	2021
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	B.1, C1	5.702.517,176	5.198.973.745
Piutang Adi	B.5, C2	4.141.129,710	3.901.843,950
Penyisihan Piutang Air	B.5, C2	(2.528.843,036)	(2.322.581,946)
Piutang Non Air	B.5, C3	-	56.862,275
Piutang Lain-Lain	B.5, C4	-	11.346,530
Persediaan	B.6 C5	728.610,842	618.699,290
Pembayaran Dimuka	B.7 C6	93.087,050	-
Jumlah Aset Lancar		9.137.300,892	7.429.193,855
ASEY TIDAK LANCAR			
Aset Tetap			
Harga Perolehan	B.8 C7	75.793.233,087	73.745.018,245
Akumulasi Penyusutan		(45.130.968,384)	(41.703.332,493)
Nilai Buku Aset Tetap		30.662.264,703	32.041.685,752
Aset Tidak Lancar Lainnya			
Pembayaran Dimuka Pembelian Laka Peroda	C.8	4.250,000	4.250,000
Jumlah Aset		39.787.795,595	40.475.149,657
KEWAJIBAN dan EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	C.9	31.475,000	28.613,000
Utang Non Usaha	C.10	270.529,622	311.998,621
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	C.11	-	80.313,135
Utang Pajak	C.12	24.677,302	-
Jumlah Kewajiban (jangka Pendek)		330.681,924	422.418,756
EKUITAS			
Penyertaan Modal Pemda	A.2, C.13	53.205.604,950	51.706.604,950
Penyertaan Modal Pemras Yang Belum Ditetapkan	A.2, C.14	15.875.036,144	15.875.036,144
Penyertaan Pemda Yang Belum Ditetapkan	A.2, C.15	1.975.889,400	1.975.889,400
Hibah	A.2, C.16	198.000,000	198.000,000
Laba (Rugi) Ditahan	A.2, C.17	(79.702.794,544)	(26.907.858,924)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(2.095.617,229)	(2.794.935,669)
Jumlah Ekuitas		39.457.113,672	40.052.730,901
Jumlah Kewajiban dan EKUITAS		39.787.795,595	40.475.149,656

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN LABA RUGI**

Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	Cat	2022	2021
PENDAPATAN			
Pendapatan Air	R.13, C10	6.805.695.460	6.202.553.835
Pendapatan Non Air	B.13, C19	652.537.014	517.387.124
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>7.458.232.474</u>	<u>6.799.942.959</u>
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Operasional	B.11, C20	5.875.673.303	5.525.596.169
Beban Penyusutan		4.433.675.809	4.270.909.371
Jumlah Beban		<u>9.809.349.112</u>	<u>9.796.505.540</u>
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	B.13, C21	271.470.894	200.005.428
Beban Non Operasional		(15.970.005)	(78.370.519)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		<u>255.500.889</u>	<u>121.634.909</u>
LABA / RUGI OPERASIONAL		(2.095.617.229)	(2.794.935.672)
Taksiran Pajak Badan Tahunan		-	-
LABA / RUGI BERSIH		<u>(2.095.617.229)</u>	<u>(2.794.935.672)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Penyertaan Modal Pemda	Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan	Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan	Ribuan	Laba (Rugi) Ditahan	Jumlah
1.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020	45.774.477.693	1.971.884.400	15.875.036.144	198.000.000	(16.907.858.924)	36.915.539.313
	Penyesuaian Pemda	5.932.127.257					5.932.127.257
	Penyesuaian Pemda yang Belum Dicapai Laba Rugi Tahun Berjalan 2021					(2.794.935.669)	(2.794.935.669)
2.	Saldo Akhir per 31 Desember 2021	51.706.604.950	1.973.884.400	15.875.036.144	198.000.000	(29.702.794.593)	40.052.730.901
	Penyertaan Pemda	1.500.000.000					1.500.000.000
	Penyertaan Pemda yang Belum Ditetapkan Laba Rugi Tahun Berjalan 2022					(2.095.617.229)	(2.095.617.229)
3.	Saldo per 31 Desember 2022	53.206.604.950	1.973.884.400	15.875.036.144	198.000.000	(31.798.411.822)	38.457.113.672

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir per 31 Desember 2022 dan 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	(2.095.617.279)	(2.794.925.672)
Dirambah (Dikurangi) Transaksi Non Kas		
Rehan Penyusutan Aset Tetap	4.631.675.691	4.270.904.369
Debit Pengicikan Piutang Air	206.261.944	297.501.520
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja (Kenaikan) / (Penurunan) Aset Lancar	2.544.320.602	1.773.475.218
Piutang Usaha	(178.421.475)	(416.818.395)
Piutang Lain-lain	11.396.530	28.715.400
Persediaan	(109.511.552)	(115.974.852)
Pembayaran Utanga	(93.987.050)	-
Jumlah (Kenaikan) / (Penurunan) Aset Lancar	(370.825.547)	(503.498.246)
Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jk. Pendek		
Utang Usaha	6.862.006	28.613.140
Utang Non Usaha	(47.363.994)	130.504.525
Pegadaian Diterima Dimasa	-	(32.417.913)
Utang Pajak	29.677.302	-
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jk. Pendek	(11.424.697)	126.779.630
Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jk. Panjang		
Utang Jangka Panjang	(80.312.115)	(307.521.550)
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jk. Panjang	(80.312.115)	(307.521.550)
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	2.089.758.223	1.089.235.052
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi		
(Kenaikan) / (Penurunan) Aset Tetap	(2.038.214.792)	(6.387.775.550)
(Kenaikan) / (Penurunan) Aset Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(2.038.214.792)	(6.387.775.550)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan / (Penurunan) Modal Perdana	1.500.000.000	5.932.127.257
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	1.500.000.000	5.932.127.257
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	1.549.543.431	633.506.739
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	5.151.973.745	4.525.387.006
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	6.702.517.176	5.158.973.745

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Laporan Keuangan secara keseluruhan.

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

A. ILMUM

1. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 16 tanggal 18 September 1992.

PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kelanjutan dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 59/KPTS/1990 tanggal 3 Februari 1990.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 16 Tahun 1992 tersebut, maksud dan tujuan dari pendirian PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat adalah bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.

2. Penyertaan Modal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 16 tahun 1992, modal PDAM terdiri dari: saham kekayaan daerah yang dipisahkan, sumbu aset dan kewajiban, penyertaan modal Pemerintah Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat, modal tidak terpecah dalam lembar saham dan keseluruhannya merupakan milik Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota.

3. Susunan Pengurus

Susunan pengurus PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota nomor 312 tahun 2019, tanggal 13 Desember 2019, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota masa jabatan 2020 sampai dengan diketapkannya Direktur Definitif. Susunan Pengurus PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Zulhadri, SE, MM
Direktur Administrasi dan Keuangan	: Media Purnama, SE
Kabag Teknik	: Hansli, S.Md.

Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota tentang penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 29 TAHUN 2019, tanggal 24 Januari 2019 dengan Masa jabatan sampai dengan diketapkannya Dewan Pengawas definitif terpilih, ditetapkan sebagai berikut:

Pelaksana Tugas Dewan Pengawas	: Lindawati
--------------------------------	-------------

Jumlah Karyawan per 31 Desember 2022 berjumlah 44 orang terdiri dari Direktur 3 orang, karyawan tetap 31 orang dan karyawan Kontrak 10 orang.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Pernyataan Kepatuhan

Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku secara retrospektif sejak tahun 2010. Terkait dengan hal tersebut, Perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif/ulan, melakukan reklasifikasi saldo dalam laporan keuangan periode komparasi untuk tujuan penjabaran daya banding, informasi dan periode.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2022 dengan angka komparatif 2021 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah mematuhi semua persyaratan.

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

R. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

2 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan prinsip harga perolehan (historical cost) dan akrual. Kecuali untuk investasi pada efek dinyatakan sebesar nilai wajar. Angka - angka dalam laporan keuangan disajikan dalam angka rupiah perub.

SAK ETAP yang telah dipergunakan adalah :

- a. Bab 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- b. Bab 4 tentang Neraca
- c. Bab 5 tentang Laporan Laba Rugi
- d. Bab 6 tentang Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Bab 7 tentang Laporan Arus Kas
- f. Bab 8 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
- g. Bab 9 tentang Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan
- h. Bab 15 tentang Aset Tetap
- i. Bab 17 tentang Sewa
- j. Bab 20 tentang Pendapatan
- k. Bab 21 tentang Biaya Pinjaman
- l. Bab 23 tentang Imbalan Kerja
- m. Bab 24 tentang Pajak Penghasilan
- n. Bab 25 tentang Mata Uang Pelaporan
- o. Bab 26 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing
- p. Bab 27 tentang Peristiwa setelah Akhir Periode Laporan
- q. Bab 28 tentang Pengungkapan Pihak Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

3 Auditor Pendahulu (Sebelumnya)

Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Adh Nugroho dengan nomor Laporan: 00040/2.1201/AU.2/11/1543-1/1/IV/2022 yang menyatakan opiniya Wajar Tanpa Pengecualian, pada tanggal 07 April 2022.

4 Kas dan Setara Kas

Setara Kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya"

yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

5 Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prestasi usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai.

Piutang disajikan dengan piutang yang dapat direalisasikan. Berdasarkan pengalaman dan data historis, perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang usaha tak tertagih yang berasal dari penjualan air berdasarkan SAK ETAP sebagai berikut :

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

<u>Masa Panjang</u>	<u>Persentase penyisihan</u>
0 - 3 bulan	0%
3 - 6 bulan	25%
6 - 12 bulan	50%
1 - 2 tahun	75%
Diluar 2 tahun	100%

6 Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Perisalan biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP)/ First In First Out (FIFO)

Nilai realisasi bersih ditentukan sebagai harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Persediaan entitas dikelompokkan kedalam dua jenis:

1. Persediaan bahan instalasi
2. Persediaan bahan operasi

Persediaan Bahan Instalasi meliputi perpipaan, water meter dan accessories lainnya. Persediaan Bahan Instalasi ini dikelompokkan sebagai bagian dari aset lancar. Metode pencatatan untuk persediaan Bahan Instalasi menggunakan Perpetual Inventory Method yaitu pencatatan administrasi persediaan atas mutasi penerimaan dan pengeluaran, sehingga saldo nilai persediaan dapat diketahui setiap saat dari administrasi yang diselenggarakan.

Persediaan Bahan Operasi meliputi bahan kimia, pelumas, bahan bakar, alat tulis kantor (ATK) dan bahan operasi lainnya. Metode pencatatan untuk persediaan Bahan Operasi menggunakan Physical Inventory Method.

Persediaan bahan operasi ini merupakan persediaan yang apabila telah digunakan akan dianggap habis terpakai, sehingga layak dikelompokkan kedalam aset lancar.

7 Biaya dibayar dimuka

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai masa manfaat biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus ("straight line method").

8 Aset Tetap

Berdasarkan SAK PTAP Bab 15 "Aset Tetap", aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai aset, jika ada. Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk pajak pembelian yang tidak boleh dikurangkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang ditugaskan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan yang berlaku. Peningkatan nilai aset karena penilaian kembali dikurangkan pada "Surplus Revaluasi Aset Tetap" di akun Ekuitas.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk mengganti, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kompensasi akruals ekonomis di masa depan berkaitan dengan aset tersebut akan mengali ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

B. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi, maka nilai buku terakhir akan dicatat sebagai nilai buku aset tersebut (karena depresiasi atas aset tetap tersebut dihentikan) dan dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya.

Apabila aset tetap tersebut sudah tidak digunakan lagi, maka aset ini harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, perhitungan penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*), sesuai dengan metode penyusutan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 10 tahun 1994 serta peraturan perpajakan lainnya (SE Dirjen Pajak nomor: SE-07/PJ.42/2002, tanggal 8 Mei 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 138/KMK.03 tanggal 18 April 2002) sebagai berikut:

a) Kelompok harta berwujud bukan bangunan

- Kelompok 1, tarif penyusutannya 50% dari nilai buku
Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 tahun.
- Kelompok 2, tarif penyusutannya 25% dari nilai buku
Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 tahun dan tidak lebih dari 8 tahun.
- Kelompok 3, tarif penyusutannya 12,5% dari nilai buku
Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 tahun dan tidak lebih dari 16 tahun.
- Kelompok 4, tarif penyusutannya 10% dari nilai buku
Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 16 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun.

b) Kelompok harta berwujud bangunan

- Permanen dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutannya 5% dari nilai perolehan.
- Tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutannya 10% dari nilai perolehan.

Pengeluaran untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

9. Aset sewa pembiayaan

Untuk transaksi sewa pembiayaan yang memenuhi kriteria sewa pembiayaan modal (*capital lease*), aset dan kewajiban yang bersangkutan disajikan di laporan posisi keuangan (neto) dengan nilai sekarang (*present value*) dari nilai pelaksanaan sewa pembiayaan tersebut yang jumlahnya ditentukan pada saat mulai berlakunya sewa pembiayaan yang bersangkutan. Utang sewa pembiayaan akan berkurang sesuai dengan jumlah pembayaran angsuran pokoknya, sedangkan komponen bunga yang terkandung dalam angsuran sewa pembiayaan dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

R. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

10 Penurunan nilai aset

SAK ETAP Bab 22 tentang "Penurunan Nilai Aset" mengharuskan manajemen Perusahaan melakukan penelitian untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset pada akhir tahun. Bila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Perusahaan menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable value*) atas nilai aset dan mengakui rugi penurunan nilai aset tersebut dalam laporan laba rugi.

11 Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

12 Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SAK ETAP Bab 26 mensyaratkan entitas untuk memberikan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangannya dan memberi perhatian pada kemungkinan posisi keuangan dan laba atau rugi entitas telah terpengaruh oleh adanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta transaksi dan saldo dengan pihak-pihak tersebut.

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- a Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - i Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow subsidiaries);
 - ii Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - iii Memiliki pengendalian bersama atas entitas
- b Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- c Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture;
- d Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- e Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (a) atau (d);
- f Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (d) atau (e); atau
- g Pihak tersebut adalah program imbalan kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Dalam tahun 2022 entitas tidak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pada tahun 2022 entitas memberikan kompensasi kepada personel manajemen kunci entitas (dewan pengawas dan direksi) adalah sebagai berikut :

Direksi:	Rp 467.667.400,00
Dewan Pengawas:	Rp 38.705.550,00

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEHANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

B. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutkan

13 Pengakuan Pendapatan dan beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai ditelurkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tungguk, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*impairment interest rate*).

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai:

a. Penjualan Air

Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:

- 1) Risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
- 2) Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial signifikan kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun *control* efektif atas barang yang terjual;
- 3) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- 4) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan; dan
- 5) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi berhubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

b. Penjualan jasa diakui dengan metode penyelesaian dalam periode akuntansi, ketika semua kondisi berikut terpenuhi:

- 1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- 2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan;
- 3) Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- 4) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi berhubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual)

14 Imbalan Kerja, BPJS, Dapenna Pensi

a. Imbalan Kerja

Imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "imbalan kerja", pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut entitas diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompetensi karyawan pada saat penyelesaian hitungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah program imbalan pensi. Imbalan Kerja tersebut adalah sebuah bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen.

Imbalan kerja terdiri dari

- 1) Imbalan kerja jangka pendek
- 2) Imbalan jasa kerja
- 3) Imbalan kerja jangka panjang lainnya
- 4) Pemangku pemerintahan kerja

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Imbalan kerja terdiri dari iuran pensiun dan imbalan pensiun. Iuran pensiun adalah imbalan kerja dimana entitas membayar secara tetap kepada lembaga pengelola dana imbalan kerja dan tidak memiliki kewajiban bukuan atau konstruktif untuk membayarkan iuran berikutnya atau melakukan pembayaran langsung ke pekerja jika dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait jasa mereka periode kini dan periode lalu. Imbalan pensiun adalah imbalan kerja, dimana kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja dan mantan pekerja dan risiko akturta (dimana imbalan lebih besar daripada yang diperkirakan) dan risiko investasi secara substansial berada pada entitas.

Dalam hal ini, entitas sudah melaksanakan program imbalan kerja bagi para karyawannya, antara lain: Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, untuk tunjangan pensiun diberikan kepada karyawan dengan masa kerja mencapai 56 tahun.

Program imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 23, bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- 1) Jika dana imbalan kerja ini dikelola sendiri oleh perusahaan (imbalan pasti) maka setiap memperhitungkan beban imbalan kerja akan dicatat sebagai berikut: beban imbalan kerja di **debit** dan kewajiban imbalan kerja di **kredit**. Kemudian pada saat membayarkan dana pensiun, dana kematian, dan dana sakit, maka kewajiban imbalan kerja di **debit** dan kas dan setara kas di **kredit**.
- 2) Jika dana imbalan kerja ini dikelola oleh institusi diluar perusahaan (**Iuran Pasti**), yaitu perusahaan asuransi, bank atau Dapenna Pamsi, maka setiap memperhitungkan imbalan kerja akan dicatat sebagai berikut: beban imbalan kerja di **debit** dan kas dan setara kas di **kredit**. Kemudian pada saat membayarkan dana pensiun, dana kematian, dan dana sakit, maka perusahaan sudah tidak perlu mencatat transaksi atas pembayaran tersebut karena yang melakukan transaksi pembayaran adalah bukan dari perusahaan.

b. Dapenna Pamsi

Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan Dapenna Pamsi, setiap tahun perusahaan membebankan iuran dana pensiun ke Dapenna Pamsi, sesuai dengan hasil perhitungan aktuaria yang ditunjuk oleh Dapenna Pamsi, dengan jurnal: (**debit**) Beban Dana Pensiun dan (**kredit**) Utang Dapenna Pamsi. Pada waktu menyotir iuran dana pensiun dengan jurnal: (**debit**) Utang Dapenna Pamsi dan (**kredit**) Kas dan Setara Kas.

15 Pajak penghasilan

Taksiran pajak penghasilan perusahaan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 24 "Pajak Penghasilan", Perusahaan mencatat kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar (*tax payable concept*). Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang tertutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Perusahaan tidak mengukur adanya pajak tanggungan (*deferred tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antar laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban selubung dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh diaurangkan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final tertutang dengan jumlah yang dibebankan pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau pajak yang masih harus dibayar.

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

B. IKHTISAR KEPERJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Kebijakan pajak penghasilan Perusahaan diketukau pajak penghasilan final pasal 15 sebagai kewajiban pajak atas laba peyayaan dalam negeri.

Pajak penghasilan tidak final

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, utang pajak penghasilan dibitung oleh wajib pajak sendiri (self assessment system). Pajak penghasilan yang dihebankan pada laporan laba rugi ditortukau bercusarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

16 Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang sebelum pasti, Perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi ditungkapkan pada tanggal pelaporan jika ada, terapan dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

C. INFORMASI YANG MENDUKONG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

	2022	2021
E Kas dan Setara Kas	6.702.517,176	5.158.973,745
Jumlah tersebut merupakan saldo kas/ bank PDAM per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :		
Kas	10.000.000	10.000.000
Bank	3.692.517,176	4.148.973,742
Deposito	3.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah	<u>6.702.517,176</u>	<u>5.158.973,742</u>
Kas		
Kas Kecil	10.000.000	10.000.000
Jumlah	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
Bank		
Bank Nagari Payakumbuh - 0100.0101.08502-5	226.275,417	41.822,104
Bank Nagari Payakumbuh - 0103.0101000019	1.139.494,506	539.819,654
Bank Nagari Syariah 7200.0106.00004-5	1.520.127,014	600.019,472
BRJ 00000256-R1-000215-30-5	123.941,789	111.921,337
BRJ - 025601001449305	149.743,391	271.178,295
PPR Daerah 0000-211,000423	5.732,284	5.660,746
Bank Muallamar 4210016674	158.748,530	2.553.479,410
Bank Mandiri 111-00-137000-5	41.047,713	41.477,059
Bank Negara Indonesia 1137820657	251.925,942	1.312,120
Bank Syariah Indonesia.7171702024	71.680,590	2.294,555
Jumlah	<u>3.692.517,176</u>	<u>4.148.973,742</u>
Deposito		
Deposito BSI	500.000.000	
Bank Nagari (Deposito)	2.500.000.000	1.000.000.000
Jumlah	<u>3.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		
2 Piutang Air	4.141.129.710	3.905.843.960		
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang air per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :				
Piutang Air	4.141.129.710	3.905.843.960		
Akumulasi Penyisihan Piutang Air	<u>(2.528.843.886)</u>	<u>(2.322.581.946)</u>		
Jumlah	<u>1.612.285.824</u>	<u>1.583.262.014</u>		
A. Piutang Air				
Rincian Piutang Air Menurut Unit Kerja :				
Tanjung pati	1.681.716.590	1.633.886.080		
Danglung-danglung	79.088.580	79.068.580		
Mungka	29.220.635	29.220.635		
Padang Jajang	119.351.205	121.653.965		
Pangkalan	326.771.595	258.044.025		
Manglang	180.047.965	169.379.445		
Situjuh	43.370.090	83.460.110		
Sei kamuyang	140.045.820	140.045.820		
Bata Hampar	81.443.135	74.041.855		
Pauh Sangik	118.089.815	94.792.955		
Mbara Pali	471.603.995	485.229.570		
Sialang	283.765.430	98.772.425		
Simalauggang	58.275.155	58.812.295		
Suliki	360.815.070	372.766.225		
Guntung	214.186.165	191.365.380		
Koto Tinggi	53.356.465	21.589.585		
Jumlah	<u>4.141.129.710</u>	<u>3.905.843.960</u>		
B. Penyisihan Piutang				
0-3 Bln	1.089.323.855	0%	-	-
4-6 Bln	359.897.090	30%	(107.729.177)	(106.623.785)
7-12 Bln	343.934.780	50%	(171.967.390)	(206.711.683)
1-2 Tahun	414.508.460	75%	(310.879.045)	(377.613.724)
>2 Tahun	1.938.267.525	100%	(1.938.267.524)	(1.631.632.755)
Jumlah	<u>4.141.129.710</u>		<u>(2.528.843.886)</u>	<u>(2.322.581.946)</u>
		<u>2022</u>		<u>2021</u>
3 Piutang Non Air		-		56.862.275
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang non air per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :				
Piutang Non Air				
Sambungan B.a.u		56.862.275		56.862.275
Akumulasi Penyisihan Piutang Air		<u>(56.862.275)</u>		<u>-</u>
Jumlah Seluruhnya		<u>4.197.091.985</u>		<u>3.962.706.235</u>

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

Rincian Piutang Non Air Menurut Unit Kerja :

Tanjung Pati	18.141.220	10.141.220
Dangcong - Dangcong	3.394.800	3.394.800
Mungka	1.074.000	1.074.000
Padang Jumpang	3.138.250	3.138.250
Pangkalan	445.600	445.600
Mangilang	353.000	353.000
Sitajuh	275.000	275.000
Sel Kamuyang	1.640.685	1.640.685
Batu Hampar	263.720	263.720
Pauh Sangik	10.444.160	10.444.160
Muaro Jati	8.475.630	8.475.630
Simalinggah	1.665.370	1.665.370
Sulit	4.564.300	4.564.300
Guntuang	2.986.540	2.986.540
Jumlah	56.862.275	56.862.275

Revisi Piutang

> 2 Tahun	56.862.275	100%	(56.862.275)	-
Jumlah	56.862.275		(56.862.275)	-

	2022	2021
4 Piutang Lain Lain	-	11.396.530
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Karyawan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.		
- Piutang Karyawan	-	11.396.530
Jumlah	-	11.396.530

	2022	2021
5 PERSEDIAAN	726.610.842	618.699.290
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :		
- Bahan Kimia	81.590.550	44.788.150
Bahan Instalasi	647.020.292	573.911.141
Jumlah	726.610.842	618.699.291

	2022	2021
6 Biaya Dibayar Dimuka	93.887.050	-
Jumlah tersebut merupakan biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :		

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG PDS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

	2022		2021	
	30.646.244.703		33.041.705.802	
7. Aset Tetap				
jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang dikuasai PDAM per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:				
31 Desember 2022				
Harga Perolehan	Saldo	Mutasi		Saldo
	Per 31 Des 2021	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2022
Tanah	50.592.920	-		50.592.920
Bangunan dan Gedung	219.811.810	29.000.000		248.811.810
Instalasi Sumber	2.293.979.573	3.151.000		2.297.129.573
Instalasi Pengolahan	12.070.651.665	84.874.000		12.155.525.665
Instalasi Transmisi & Distribusi	57.143.607.902	1.858.393.992		59.002.001.894
Kendaraan	698.321.000	-		698.321.000
Peralatan dan Perlengkapan	56.222.000	5.315.000		61.537.000
Inventaris / Perabot Kantor	411.831.425	57.481.881		469.313.295
Jumlah	73.745.018.294	2.098.214.792	-	75.783.233.086
Akumulasi Penyusutan	Saldo	Mutasi		Saldo
	Per 31 Des 2021	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2022
Tanah	-	-		-
Bangunan dan Gedung	69.295.146	11.137.407		80.432.553
Instalasi Sumber	2.138.450.742	4.578.425		2.143.029.167
Instalasi Pengolahan	8.889.023.853	503.976.897		9.393.000.750
Instalasi Transmisi & Distribusi	28.765.152.701	3.809.482.809		32.574.635.509
Kendaraan	502.768.917	12.350.314		515.119.231
Peralatan dan Perlengkapan	24.441.063	39.586.250		64.027.313
Inventaris / Perabot Kantor	314.190.071	47.563.788		361.753.859
Jumlah	40.703.312.492	4.433.675.890	-	45.136.988.381
Nilai Buku	33.041.705.802			30.646.244.704
31 Desember 2021				
Harga Perolehan	Saldo	Mutasi		Saldo
	Per 31 Des 2020	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2021
Tanah	50.592.920	-		50.592.920
Bangunan dan Gedung	176.354.810	43.457.000		219.811.810
Instalasi Sumber	2.293.979.573	-		2.293.979.573
Instalasi Pengolahan	12.065.051.665	5.600.000		12.070.651.665
Instalasi Transmisi & Distribusi	56.910.561.352	6.224.046.550		57.143.607.902
Kendaraan	698.321.000	36.600.000		698.321.000
Peralatan dan Perlengkapan	45.562.000	10.660.000		56.222.000
Inventaris / Perabot Kantor	344.419.425	67.412.881		411.831.425
Jumlah	67.357.242.744	6.387.775.550	-	73.745.018.294

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

Akumulasi Penyusutan	Saldo		Mutasi	Saldo
	Per 31 Des 2020	Tambah		
Tanah				
Bangunan dan Gedung	50.417.393	9.877.553		60.295.146
Instalasi Sumber	2.126.391.468	12.059.275		2.138.450.742
Instalasi Pengalihan	8.387.168.805	501.855.047		8.889.023.853
Instalasi Transmisi & Distribusi	25.123.597.562	3.641.555.139		28.765.152.701
Kendaraan	462.432.667	40.336.250		502.768.917
Peralatan dan Perlengkapan Inventaris / Perabot Kantor	13.304.604	11.126.458		24.431.063
Jumlah	36.432.403.124	4.270.909.368		40.703.312.492
Nilai Buku	30.924.839.620			33.041.705.802
			2022	2021
8 Aset Tidak Lancar Lainnya			4.250.000	4.250.000
Jumlah tersebut merupakan pembayaran Dimuka Pemisgihan Laba Pemda per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021				
			2022	2021
9 Utang Usaha			35.475.000	20.613.000
Jumlah tersebut merupakan utang kepada supplier per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021				
			2022	2021
10 Utang Non Usaha			270.529.622	313.493.621
Jumlah tersebut merupakan utang non usaha per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :				
Honor BP (1996 S.d. 1998)			1.826.050	1.826.050
Upah Retribusi Air Permukaan Tanah (RAPT)			43.801.977	43.801.977
Upah Retribusi Air Limbah (RAL)			111.965.595	111.965.595
Pesangan Direksi - 2005			11.918.400	11.918.400
PPh Pasal 21 Direksi				16.014.799
Air Cuci Sima'anggang			98.967.600	127.966.800
Honor Panitia Pengadaan Des 2022			2.050.000	-
Jumlah			270.529.622	313.493.621
			2022	2021
11 Biaya Yang Masih Harus Dibayar			-	80.312.135
Jumlah tersebut merupakan biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021				
			2022	2021
12 Utang Pajak			24.677.302	-
Jumlah tersebut merupakan utang PPh 21 per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021				

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

C. INFORMASI YANG Mendukung POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

	2022	2021
13 Penyertaan Pemda	53.206.604.950	51.706.604.950
Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal pemerintah daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021		
Saldo Awal	5.368.618.093	5.368.618.093
Penyertaan dalam bentuk fisik tahun 2008 s/d tahun 2017	21.170.337.680	21.170.337.680
Penyertaan tahun 2017	1.000.000.000	1.000.000.000
Penyertaan tahun 2018	2.994.000.000	2.994.000.000
Penyertaan dalam bentuk fisik tahun 2018 (PU)	1.767.150.000	1.767.150.000
Penyertaan tahun 2019	9.000.000.000	9.000.000.000
Penyertaan dalam bentuk fisik tahun 2019 (PU)	2.124.372.000	2.124.372.000
Penyertaan tahun 2020	2.350.000.000	2.350.000.000
Penyertaan dalam bentuk fisik tahun 2020 (PU)	4.432.127.257	4.432.127.257
Penyertaan tahun 2021	1.500.000.000	1.500.000.000
Penyertaan tahun 2022	1.506.604.950	-
Jumlah	53.206.604.950	51.706.604.950
14 Penyertaan Pemus yang Belum Diterapkan	15.875.036.144	15.875.036.144
Jumlah tersebut merupakan tambahan aset dan kewajiban PDAM yang belum tercatat dalam Peraturan daerah per 31 Desember 2022 dan 31		
Proyek P3AB (BA No.10/PA/P3AB//58/VI/1996)-APBN	123.045.120	123.045.120
Proyek PPAB, BA Tgl. 09/06/1998) - APBN	2.813.100	2.813.100
Proyek Prasarana Dasar Perumahan Perkotaan Tgl. 29/11/1998-APBN	214.497.294	214.497.294
Proyek Tahun 1999 - APBN	7.459.250	7.459.250
Sumbangan Rumah (160 Unit) / Proyek PAR Pedesaan Sumbar - APBN	48.593.600	48.593.600
Proyek PPAB Perkotaan TA 2000 (BA No. 01/HUK-2000, Tgl. 24/10/2000)-	2.114.764.436	2.114.764.436
Triuk Tasek Air BA 9601 C) (1 Unit), Proyek Penanggulangan Dampak	180.000.000	180.000.000
Pengurangan Subsidi Energi Air Bersih - APBN		
Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perkotaan Kab. Lima Puluh	1.026.263.360	1.026.263.360
Prasarana & Sarana Pedesaan Prov. Sumbar 2005 - APBD Tk. 1	410.729.000	410.729.000
Koreksi kekurangan Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	1.734.856.946	1.734.856.946
Pembangunan SPAM - Sukki - 2009	3.434.698.300	3.434.698.300
Optimalisasi Intake dan Pipa - Mulari dalg - 2009	1.042.202.537	1.042.202.537
Pembangunan SPAM - Tanjung Pait - 2009	5.535.073.200	5.535.073.200
Jumlah	15.875.036.144	15.875.036.144
15 Penyertaan Pemda Yang Belum Diterapkan	1.975.884.400	1.975.884.400
Jumlah tersebut merupakan tambahan aset dan kewajiban PDAM yang belum tercatat dalam Peraturan daerah per 31 Desember 2022 dan 31		
Tahun 2008	1.259.884.400	1.259.884.400
Tahun 2013	716.000.000	716.000.000
Jumlah	1.975.884.400	1.975.884.400

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

Tahun 2008

Penyertaan Pemda yang berasal dari APBD Propinsi :

Pemasangan Pipa 2008 - Paoh Sangit

599.884.400

599.884.400

Pemasangan Pipa 2008 - Paoh Sangit

560.000.000

560.000.000

Jumlah

1.259.884.400

1.259.884.400

Tahun 2013

Penyertaan Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD Propinsi

Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sarilamak - 2013

300.000.000

300.000.000

Pengadaan Pemasangan Pipa - Sarilamak 2013

416.000.000

416.000.000

Jumlah

716.000.000

716.000.000

Jumlah Seluruhnya

1.975.884.400

1.975.884.400

2022

2021

16 Hibah

198.000.000

198.000.000

Jumlah tersebut merupakan hibah yang diperoleh PDAM per 31

2022

2021

17 Laba (Rugi) Ditahan

(31.798.411.822)

(29.702.794.593)

Jumlah tersebut merupakan akumulasi laba (rugi) ditahan sampai dengan

31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari :

Laba (Rugi) Ditahan

(29.702.794.593)

(26.907.858.924)

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

(2.095.617.229)

(2.794.935.670)

Jumlah

(31.798.411.822)

(29.702.794.593)

2022

2021

18 Pendapatan Air

6.805.695.460

6.202.555.835

Jumlah tersebut merupakan pendapatan penjualan per 31 Desember 2022

Rincian lebih lanjut atas rekening penjualan air

Harga Air

5.810.112.125

5.187.742.900

Jasa Administrasi

335.240.000

323.328.880

Dana Meter

505.760.500

487.232.000

RAPT

113.542.835

102.092.595

Tanki Air

41.040.000

102.160.000

Jumlah

6.805.695.460

6.202.555.835

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

A. Rincian per Kelompok Pelanggan :

Rumah Tangga		-
Rumah Tangga A	534.013.800	543.677.050
Rumah Tangga B	2.960.481.425	2.750.245.650
Rumah Tangga C	121.253.650	120.069.300
Sosial	661.260.400	502.692.930
K. Hium	23.668.000	22.605.000
Niaga Kecil	718.929.300	632.031.900
Niaga Besar	200.537.100	152.231.100
Insansi Pemerintah	52.2960.450	462.190.000
Jumlah	5.810.112.125	5.187.742.900
Jasa Administrasi	325.240.000	323.328.000
Dana Meter	505.760.500	487.232.000
RAPT	113.542.835	102.092.935
Tanah Air	41.040.000	102.160.000
Jumlah	995.583.335	1.014.812.935
Jumlah Seluruhnya	6.805.695.460	6.202.555.835

B. Rincian per Unit Kerja

Tanjung Pati	3.351.549.100	2.869.146.850
Mungka	37.982.625	32.038.950
Panukuh	210.105.000	187.176.225
Manggilar	64.517.300	58.671.800
Situjek	140.391.225	143.091.275
Batu Hampar	160.932.525	152.643.500
Pauh Sangik	189.790.600	184.730.625
Mjara Putih	574.792.675	513.518.450
Sialang	369.961.950	338.340.700
Simalangpung	586.358.400	180.221.700
Sulki	348.172.875	354.202.825
Guntuang	140.548.000	146.376.350
Koto Tinggi	72.009.050	26.683.650
Jumlah	5.810.112.125	5.187.742.900
Jasa Administrasi	325.240.000	323.328.000
Dana Meter	505.760.500	487.232.000
RAPT	113.542.835	102.092.935
Tanah Air	41.040.000	102.160.000
Jumlah	995.583.335	1.014.812.935
Jumlah Seluruhnya	6.805.695.460	6.202.555.835

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

	2022	2021
19 Pendapatan Non Air	652.537.014	597.397.124
Jumlah tersebut merupakan penjualan non air PDAM 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :		
Sumbangan Baru	502.106.283	498.773.179
Denda	103.641.000	116.571.000
Pengembalian Kembali/Halik Nama	32.035.000	10.036.595
Aksesories	14.754.731	2.006.050
Jumlah	652.537.014	597.397.124
20 Beban Operasional	9.809.349.792	9.796.505.540
Jumlah tersebut merupakan beban operasional PDAM 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :		
Beban Pegawai	3.391.399.404	3.245.356.505
Beban Energi	11.566.722	13.186.653
Beban Pemakaian Bahan Kimia	79.254.156	111.288.900
Beban Kompensasi Air Beku	11.718.742	43.573.025
Beban Penyisihan Piutang	263.124.215	297.501.520
Beban Pemeliharaan	550.417.087	837.522.867
Beban Operasi Lainnya	186.204.600	251.320.000
Beban Administrasi & Umum lainnya	847.986.977	717.846.249
Jumlah	5.375.673.903	5.525.596.160
Beban Penyusutan Aset Tetap	4.433.675.889	4.270.909.371
Jumlah Seluruhnya	9.809.349.792	9.796.505.540
Rincian Beban Pegawai		
Gaji Karyawan Sambilan	563.940.443	667.190.781
Gaji Karyawan Tetap	1.523.019.158	1.274.339.044
Gaji Karyawan Administrasi dan Umum :	-	1.306.819.200
Gaji dan Honor Pegawai	573.230.375	-
Dana Retiremen/Liut dan Tunjangan Operasional	519.740.768	-
Lembur	2.219.000	-
Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	45.493.000	-
Penhinaan Pegawai dan Paksaan Dinas	55.900.000	-
Pendidikan dan Latihan	77.966.660	-
Rupa-Rupa Beban Pegawai	17.550.000	-
Ransang dan Sumbangan	12.250.000	-
Jumlah	3.391.399.404	3.245.356.585
Rincian Energi		
Beban Listrik Pengalihan	11.566.722	13.186.653
Jumlah	11.566.722	13.186.653

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG PUS-PUS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

Rincian Pemakaian Bahan Keras		
Pemakaian Bahan Keras	79.254.156	114.283.300
Jumlah	<u>79.254.156</u>	<u>114.283.300</u>
Rincian Kompensasi Air Baku		
Kompensasi Air Baku	45.719.742	45.573.895
Jumlah	<u>45.719.742</u>	<u>45.573.895</u>
Rincian Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Tambak	18.615.100	3.722.500
Beban Pemeliharaan Besi-besi	18.744.000	25.817.000
Beban Pemeliharaan Pipa Deras	152.189.607	520.458.800
Beban Pemeliharaan Pipa Trans & Dist	266.146.230	-
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.423.000	-
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	73.242.470	-
Beban Pemeliharaan Gedung Kantor	14.056.600	208.000.000
Jumlah	<u>550.417.007</u>	<u>837.522.300</u>
Rincian Beban Penyisihan Piutang		
Beban Penyisihan Piutang	263.124.215	297.501.520
Jumlah	<u>263.124.215</u>	<u>297.501.520</u>
Rincian Beban Operasi Lainnya		
Beban Operasional Unit Produksi	183.679.600	244.776.000
Rupa-rupa Beban Pengolahan Air	1.350.000	1.040.000
Beban Operasional Transmisi & Distribusi	1.175.000	5.504.000
Jumlah	<u>186.204.600</u>	<u>251.320.000</u>
Rincian Beban Administrasi & Umum		
Beban Kantor	86.496.352	79.687.437
Beban ATK	52.025.350	50.140.250
Beban Penelitian dan Pengembangan	43.857.000	43.301.000
Beban operasional lainnya	665.610.275	544.717.562
Jumlah	<u>847.988.977</u>	<u>717.846.249</u>
Rincian Beban Penyusutan		
Beban Penyusutan Instalasi Sumber	9.578.425	13.459.277
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan	503.976.897	500.455.017
Beban Penyusutan Instalasi Transmisi dan Distribusi	3.809.482.811	3.641.555.110
Beban Penyusutan Lainnya	110.637.757	115.433.967
Jumlah	<u>4.433.675.890</u>	<u>4.270.909.371</u>

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

C. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN-Lanjutan

	2022	2021
21 Pendapatan (Beban) Non Operasional	255.500.000	201.626.909
Jumlah tersebut merupakan beban non operasional PDAM 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :		
Pendapatan Non Operasional		
Pendapatan Bunga Deposito	165.753.104	127.013.970
Pendapatan Jasa Gira	23.757.712	27.894.898
Pendapatan Lainnya	61.960.078	175.076.560
Jumlah	251.470.894	230.005.428
Beban Non Operasional		
Beban Administrasi Bank	(11.170.005)	(12.498.039)
Kepa-Huga Beban lain-lain	(4.800.000)	(65.079.606)
Jumlah	(15.970.005)	(78.378.519)
Jumlah seluruhnya	255.500.000	201.626.909
22 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca		
Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.		
23 Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan		
Manajemen PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab atas laporan keuangan yang penyusunannya diumumkan pada tanggal ... Januari 2023		

-0000-

DAFTAR REKAPITULASI ASSET TETAP
PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JIB	ASET TETAP LAINNYA	KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN	JUMLAH ASSET TETAP
1	Dinas Perikanan dan Kelautan	27.851.007.846,00	779.287.047,00	442.767.534.054,80	1.355.540.644,00	102.792.206.422,40	720.002.590,00	827.324.595.690,40
2	Dinas Kesehatan	2.381.825.706,00	86.763.514,00	76.786.762.083,00	264.403.413,00	22.320.300,00	-	888.231.042.705,71
3	INSURANCE AND TRAVEL	2.148.856.000,00	85.032.890.894,00	78.779.170.183,22	2.026.201.161,00	-	-	148.847.085.231,22
4	Dinas Pekerjaan Umum	45.480.523.000,00	14.464.080.298,00	6.349.401.000,00	1.771.578.790.643,98	1.971.456.775,00	5.328.372.754,00	1.809.014.145.460,98
5	Satuan Polisi dan Pemang Praja	52.036.000,00	1.584.847.103,00	467.417.229,00	11.700.000,00	-	-	2.495.313.025,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	6.240.580,00	41.667.732.395,00	1.124.752.869,00	178.400.000,00	1.076.000,00	10.150.000,00	1.491.511.641,00
7	Dinas Sosial	252.474.000,00	2.232.059.780,00	1.360.428.327,00	22.000.000,00	16.981.000,00	-	3.884.453.276,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	5.236.575.515,00	6.901.847.798,88	190.511.120,92	48.880.000,00	17.100.500,00	14.595.553.844,00
9	Dinas Perang	-	2.084.221.274,00	388.885.269,00	-	4.000.000,00	-	2.997.116.543,00
10	Dinas Pengantar Film Perumahan Rakyat dan Pemanglisan	1.138.740.000,00	11.166.070.751,00	7.017.332.802,00	21.750.618.657,00	-	-	40.260.554.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	40.829.152,00	1.307.586.731,00	18.997.500,00	66.058.000,00	-	5.311.954.752,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	110.376.000,00	2.075.809.796,00	20.890.000,00	-	-	-	2.296.075.796,00
13	Dinas Pengendalian Pend. dan K/P dan Peningkatan Anak	34.000.000,00	8.640.020.916,00	3.919.515.419,00	155.765.545,00	91.200.000,00	-	17.890.701.640,00
14	Dinas Perhubungan	1.141.914.000,00	17.227.947.145,00	3.712.810.000,00	154.000.000,00	-	-	35.811.345.845,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.572.000,00	4.664.428.714,00	1.062.615.000,00	-	287.432.000,00	-	6.096.067.714,00
16	Dinas Perdagangan Koperasi Jasa Kecil dan Menengah	240.034.000,00	4.604.725.681,00	19.290.487.278,00	98.185.400,00	7.681.850,00	59.140.000,00	21.662.300.601,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1.797.249.815,00	1.729.299.699,00	35.197.251,00	49.000.000,00	-	3.698.212.711,00
18	Dinas Perencanaan Perumahan dan Drah Raga	1.271.790.000,00	5.175.495.988,00	17.243.587.300,00	2.837.599.013,00	100.299.000,00	890.251.000,00	27.883.800.570,00
19	Dinas Perencanaan Kearsifan	1.644.441.694,00	2.702.974.315,00	9.902.448.445,00	199.172.246,00	683.371.370,00	-	14.832.468.059,00
20	Dinas Perikanan	1.141.873.150,00	8.225.928.988,00	12.691.769.591,00	5.014.210.290,00	1.189.801.775,00	-	29.313.595.775,00
21	Dinas Koperasi Pangan, Hortikultura dan Perikanan	1.141.873.150,00	16.497.533.592,10	17.959.413.388,00	810.871.078,00	95.581.867,00	-	37.541.425.495,10
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.964.440.000,00	5.769.249.285,00	6.182.673.070,00	39.000.000,00	285.015.000,00	-	18.600.387.355,00
23	Inspektori	-	1.189.507.278,00	2.314.335.723,00	-	-	-	3.503.843.001,00
24	Badan Perencanaan Perumahan dan Pangan Bangor	-	3.801.905.912,00	3.433.003.795,00	-	37.874.065,00	-	7.252.292.673,00
25	Badan Keunggulan	-	9.427.955.090,00	1.014.281.210,00	-	362.134.246,00	-	10.804.356.477,00
26	FPKD	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	2.513.648.210,00	-	1.011.350,00	26.708.500,00	-	2.541.357.060,00
28	Sekretariat Daerah	22.005.068.500,00	35.575.394.817,00	20.249.303.575,48	11.689.111.885,27	808.201.406,00	10.072.000,00	104.142.723.147,75
29	Sekretariat DPRD	1.034.983.719,00	13.444.711.234,00	24.725.942.448,00	226.725.278,00	194.372.375,00	-	38.627.325.055,00
30	Kecamatan Sunung Omeh	8.400.000,00	8.400.000,00	928.131.500,00	-	-	-	1.587.201.118,00
31	Kecamatan Bukit Badran	30.000.000,00	788.480.523,00	623.554.550,00	3.000.000,00	-	-	1.431.044.103,00
32	Kecamatan Bulik	73.804.000,00	698.158.382,00	557.402.500,00	-	6.500.000,00	-	1.768.864.882,00
33	Kecamatan Guguk	80.000.000,00	704.018.258,00	1.489.675.300,00	-	-	-	2.252.783.558,00
34	Kecamatan Mungka	28.000.000,00	682.796.747,00	975.665.300,00	-	5.000.000,00	-	1.687.463.047,00
35	Kecamatan Nyaluru	26.250.000,00	758.048.672,00	618.223.006,00	3.150.000,00	2.000.000,00	-	1.407.677.672,00
36	Kecamatan Payakumbuh	125.804.000,00	590.030.325,00	865.494.800,00	-	6.480.000,00	-	1.588.809.115,00
37	Kecamatan Luak	102.000.000,00	784.231.671,00	1.333.157.000,00	-	28.500.000,00	-	2.250.038.671,00
38	Kecamatan Lurah Sago Halaban	101.961.500,00	811.057.747,00	764.583.700,00	-	-	-	1.677.592.947,00
39	Kecamatan Sibuluh Limanagar	240.000.000,00	578.943.344,00	1.182.072.000,00	-	-	-	1.997.915.344,00
40	Kecamatan Hujan	54.480.000,00	605.629.061,00	1.143.393.537,00	10.000.000,00	-	-	1.873.502.538,00
41	Kecamatan Pengkajeneh Baru	41.712.000,00	603.674.522,00	1.221.369.500,00	2.784.000,00	-	-	1.876.531.022,00
42	Kecamatan Kepurik	413.081.000,00	611.073.300,00	1.554.014.000,00	1.050.000,00	-	15.491.000,00	2.600.708.800,00
43	Badan Kesetuan Bangsa dan Politik	75.800.000,00	1.482.721.200,00	219.037.909,00	-	900.000,00	-	1.779.859.109,00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	6.912.992.260,00	-	241.570.650,00	-	-	7.154.562.910,00
	JUMLAH	117.757.456.000,00	621.988.347.641,00	676.770.398.149,28	1.729.493.322.262,42	11.923.086.884,41	7.281.381.881,00	3.431.984.843.469,45

**DAFTAR AKUMULASI AMORTISASI ASET (DAM) BERHAK DAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022**

NO	NAMA OPD	AKUMULASI PENYUSUTAN		TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN
		1.9.06 / 1.9.06		
		AMORTISASI ASET TIDAK BERHAK	PENYUSUTAN ASET LAINNYA	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	161.000.000,00	(121.135.200,00)	139.864.800,00
2	Dinas Kesehatan	(1.257.227,50)	(810.024,32,00)	(1.067.251,82)
3	HSUD Ur. Asean dan Dinkas	0,00	(34.240.750,00)	(34.240.750,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	(726.485.001,79)	(726.485.001,79)
5	Sekolah Polisi dan Pamong Praja	0,00	(14.480.000,00)	(14.480.000,00)
6	Dinas Pemukiman Kependudukan	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	0,00	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pangan	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan - Rakyat dan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.000.000,00)	0,00	(2.000.000,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	(35.700.000,00)	(35.700.000,00)
13	Dinas Pengendalian Perilaku dan KBPF dan Perlindungan Anak	0,00	(9.258.000,00)	(9.258.000,00)
14	Dinas Perhubungan	(1.775.000,00)	0,00	(1.775.000,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perencanaan Ekonomi Lokal dan Menengah	0,00	(17.300.000,00)	(17.300.000,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	0,00	(52.197.064,00)	(52.197.064,00)
19	Dinas Perhubungan Kearsifan	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perikanan	0,00	(47.095.400,00)	(47.095.400,00)
21	Dinas Tanaman Pangan, Holtik. dan Perikanan	0,00	(644.536.189,00)	(644.536.189,00)
22	Dinas Perumahan dan Kesehatan Lingkungan	0,00	0,00	0,00
23	Inspektori	0,00	(24.000.000,00)	(24.000.000,00)
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
25	Badan Keuangan	0,00	(36.900.000,00)	(36.900.000,00)
26	PKPD	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kerja Sama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	(11.000.000,00)	(11.000.000,00)
28	Sekretariat Daerah	(74.870.000,00)	(1.426.897.406,00)	(1.501.767.406,00)
29	Sekretariat DPRD	0,00	(109.723.579,00)	(109.723.579,00)
30	Kecamatan Buntang Cereh	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bukit Barisan	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Bukit	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Guguk	0,00	(4.900.000,00)	(4.900.000,00)
34	Kecamatan Mangga	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Makhilim	0,00	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
36	Kecamatan Payakumbuh	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Pauh	0,00	(9.250.000,00)	(9.250.000,00)
38	Kecamatan Pauh Tiga Pauh	0,00	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
39	Kecamatan Pauh Tiga Nagari	0,00	(34.790.000,00)	(34.790.000,00)
40	Kecamatan Pauh	0,00	(5.200.000,00)	(5.200.000,00)
41	Kecamatan Pangkajene, Kota Baru	0,00	(28.082.000,00)	(28.082.000,00)
42	Kecamatan Papat IX	0,00	(7.200.000,00)	(7.200.000,00)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
44	Badan Pengantar dan Bantuan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	142.453.527,50	(4.013.194.721,79)	(4.155.648.249,29)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RINCIAN HUTANG PFK BLUD
TA 2022

NO	Uraian	OPD	Total
1	PPN	-	-
2	PPH Ps 21	DINAS KESEHATAN	252.000,00
3	PPH Ps 22	-	-
4	PPH Ps 23	-	-
5	PPH FINAL	-	-
Jumlah			252.000,00

UNDANG-UNDANG JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2017
FEMDA KAB. LIMA PULUH NINE

NO	NAMA UPD	Biaya/Unit	Bidang (Volume/ Unit)	Musyawir	Suara (Miliar/ Majelis)	Teknologi	DRS Kesehatan	DSH Fajik Dewasa	Usang Dalam/Node	Usang Dalam/Node	Usang Dalam/Node	Total Biaya/ Puncak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.744.980,00	-	444.741,00	-	3.607.374,00	-	-	3.424.280.870,32	200.506.342,00	200.000.000,00	3.824.864.212,32
2	Dinas Kesehatan	-	3.394.114,00	100.033,00	-	-	-	-	340.241.216,30	-	200.000.000,00	440.241.216,30
3	RSUD Dr. Abdul Chalid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum	5.424.711,00	-	-	-	-	-	-	18.340.028.550,32	100.310.000,00	200.000.000,00	20.664.748,62
5	Satuan Pelaksana Peningkatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.188.664,00	100.014,00	400.051,00	-	-	-	-	340.000.000,00	-	-	1.028.725,00
7	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	100.000,00	-	2.100.000,00
9	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Lingkungan Hidup, Perikanan dan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sipil	4.491.000,00	300.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.991.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Dinas Perhubungan	-										

**RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN PER OPD
TAHUN 2022**

NO	OPD	PERSEDIAAN AWAL	BELANJA PERSEDIAAN	PERSEDIAAN AKHIR	BEBAN SIFARUSNYA	PENYESUAIAN	BEBAN PERSEDIAAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.467.710,00	36.740.148.172,00	1.671.878,00	36.760.925.074,00	17.705.831,00	16.725.129.243,00
2	Dinas Kesehatan	1.593.823.098,40	7.626.277.371,00	8.072.751.194,75	7.214.349.334,75	1.612.612,541,70	7.525.951.892,45
3	RSUD Dr. Alimah Daulah	2.733.915.794,00	8.973.736.545,00	2.209.041.382,37	9.443.914.006,63	1.511.771.969,00	9.997.587.377,63
4	Dinas Pekerjaan Umum	23.593.303,00	576.617.800,00	17.652.303,00	582.557.100,00	0,00	582.557.100,00
5	Sekolah Polisi dan Pemongkraya	1.475.700,00	203.025.425,00	0,00	204.501.125,00	0,00	204.501.125,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran	394.000,00	432.925.745,00	7.973.781,00	443.952.964,00	0,00	443.952.964,00
7	Dinas Sosial	2.291.100,00	236.204.758,00	2.558.500,00	233.690.386,00	0,00	233.690.386,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.848.900,00	106.089.600,00	713.500,00	109.127.000,00	1.850.000,00	107.277.000,00
9	Dinas Pangan	1.731.527.232,00	146.073.552,00	1.322.622.457,00	554.898.377,00	0,00	554.898.377,00
10	Dinas Unggulan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman	187.553.230,00	935.093.157,00	172.458.200,00	967.653.527,00	0,00	967.653.527,00
11	Dinas Kepencudakan dan Pencetakan Sipil	545.251.650,00	959.388.902,00	406.837.724,00	501.802.828,00	0,00	501.802.828,00
12	Dinas Perencanaan Masyarakat dan Desa	1.064.700,00	577.083.700,00	1.502.000,00	578.978.400,00	1.700.000,00	577.278.400,00
13	Dinas Pengendalian Perdatuk dan KPP dan Perumahan Anak	210.857.251,00	545.053.120,00	256.400,00	761.706.114,00	0,00	761.706.114,00
14	Dinas Perhubungan	258.050.400,00	724.313.792,00	420.255.900,00	561.975.292,00	3.400.000,00	558.575.292,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.620.455,00	419.207.057,00	4.471.000,00	425.443.952,00	0,00	425.443.952,00
16	Dinas Pemagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.052.107.000,00	298.153.430,00	560.774.086,00	789.486.344,00	492.674.861,00	797.011.530,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.575.600,00	256.777.570,00	656.700,00	258.638.570,00	0,00	258.638.570,00
18	Dinas Rerata Perjudi dan Olah Raga	3.250.200,00	1.330.918.350,00	1.278.000,00	1.332.991.250,00	0,00	1.332.991.250,00
19	Dinas Perpustakaan Kearsufi	0,00	71.220.100,00	256.600,00	71.976.700,00	0,00	71.976.700,00
20	Dinas Perikanan	136.613.467,00	579.319.928,00	171.606.790,00	544.926.686,00	149.684.000,00	395.242.686,00
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkelamban	44.466.600,00	1.173.954.200,00	33.298.900,00	1.185.125.100,00	0,00	1.185.125.100,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	67.255.750,00	430.660.310,00	61.500.300,00	436.420.360,00	29.975.800,00	406.444.560,00
23	Inspektariat	14.848.600,00	231.402.565,00	13.651.437,00	232.599.728,00	0,00	232.599.728,00
24	Badan Pengendalian Penelitian dan Pengembangan	5.289.050,00	343.375.308,00	6.677.000,00	341.978.968,00	7.804.000,00	334.174.968,00
25	Badan Keuangan	6.881.000,00	1.367.706.075,00	20.761.100,00	1.353.825.975,00	0,00	1.353.825.975,00
26	PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.911.400,00	253.393.027,00	3.008.400,00	253.233.027,00	0,00	253.233.027,00
28	Sekretariat Daerah	137.190.080,00	5.289.185.872,00	117.853.000,00	5.288.825.962,00	150.221.121,00	5.138.604.841,00
29	Sekretariat DPRD	17.477.800,00	4.657.566.000,00	28.061.800,00	2.555.582.000,00	7.500.000,00	2.548.082.000,00
30	Kecamatan Gunung Orong	0,00	81.851.700,00	0,00	81.851.700,00	0,00	81.851.700,00
31	Kecamatan Bukit Barisan	2.347.000,00	59.781.500,00	1.577.500,00	60.546.000,00	0,00	60.546.000,00
32	Kecamatan Sialit	2.015.000,00	72.404.700,00	0,00	74.419.700,00	0,00	74.419.700,00
33	Kecamatan Guguk	55.000,00	84.707.000,00	600.000,00	84.162.000,00	0,00	84.162.000,00
34	Kecamatan Mungka	313.500,00	262.895.420,00	115.300,00	262.097.620,00	0,00	262.097.620,00

25	Kecamatan Akshaya	0,00	80.240.100,00	0,00	80.240.100,00	0,00	80.240.100,00
26	Kecamatan Payakumbuh	181.430,00	62.421.100,00	0,00	62.552.530,00	0,00	62.552.530,00
27	Kecamatan Luak	0,00	59.809.000,00	343.800,00	59.965.200,00	0,00	59.965.200,00
28	Kecamatan Lurah Sago -alaban	1.287.000,00	84.381.200,00	0,00	86.268.200,00	0,00	86.268.200,00
29	Kecamatan Sijunjung Limo Nagari	0,00	70.850.400,00	0,00	70.850.400,00	0,00	70.850.400,00
40	Kecamatan Harau	456.700,00	103.205.756,00	271.300,00	103.205.756,00	0,00	103.205.756,00
41	Kecamatan Pangkajene Lute Batu	108.000,00	62.572.000,00	425.000,00	62.245.000,00	0,00	62.245.000,00
42	Kecamatan Kapur Uk	188.000,00	91.271.750,00	361.400,00	91.101.350,00	0,00	91.101.350,00
43	Saluran Kasut dan Bangsa dan Pukul	1.622.000,00	213.821.500,00	3.520.000,00	211.853.500,00	0,00	211.853.500,00
44	Bedaan Pengadulangan Bangsa dan Pukul	9.870.000,00	403.783.500,00	4.952.800,00	409.703.800,00	15.000.000,00	193.705.800,00
JUMLAH		14.976.038.828,53	54.688.700.457,00	53.716.886.188,62	55.947.859.096,81	32.069.699,30	55.915.789.397,61

RANCANGAN RENCANA PEKERJAAN
TAHUN 2022

1/10/2021

NO	CFO	DITAGK BUDGET (Miliar Rp)		BELANJA JAGA LRA	PERTESIMAN	BICARA JAGA
		2021	2022			
1	Bina Perencanaan dan Pelaksanaan	7.222.438,00	2.852.554,30	15.989.066,90	908.964,00	25.079.062,90
2	Bina Kesehatan	53.007.850,00	440.420,300,00	21.702.050,000,00	362.000,00	27.867.070,300,00
3	REKREASI dan Hiburan	3.581.378.000,00	4.337.516,517,00	8.371.900,000,00	13.968,110,00	14.972.308,884,00
4	Bina Perekonomian Umum	303.287.734,00	22.353.755,530,00	2.040.312,821,00	13.586.000,00	3.040.714,308,00
5	Program Pahlawan Bangsa	0,00	0,00	4.061.307,707,00	0,00	4.061.307,707,00
6	Bina Persebaran Fasilitas	0,00	343.321,513,00	5.390.330,530,00	2.070,018,00	5.735.916,351,00
7	Bina Sosial	0,00	0,00	382.007,304,00	5.710,000,00	387.717,304,00
8	Bina Perindustrian dan Perdagangan	0,00	51.292,500,00	870.018,747,00	0,00	871.311,247,00
9	Bina Transportasi	0,00	0,00	376.901,177,00	1.221,850,800,00	1.601.752,977,00
10	Bina Lingkungan Hidup dan Konservasi Alam, Perikanan	6.600.000,00	543.808,453,00	1.877.585,074,00	213.404,700,00	3.025.000,227,00
11	Bina Peningkatan dan Penyelenggaraan	4.390.110,00	8.101.544,00	461.114,800,00	1.495,420,00	5.957.170,200,00
12	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.241.221,912,00	18.300,000,00	2.259.521,912,00
13	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	1.298.211,899,00	1.751,622,000,00	3.049.833,899,00
14	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	24.070,891,254,00	24.200,000,00	48.270,891,254,00
15	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	4.501,254,000,00	4,000,00	4.505,254,000,00
16	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	1.154,000,000,00	1.100,000,00	2.254,000,000,00
17	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	563,180,324,00	30,700,00	593,880,324,00
18	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	4.282,751,233,00	1125,340,400,00	5.408,091,633,00
19	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	738,137,007,00	0,00	738,137,007,00
20	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	64,038,003,00	51,270,000,00	115,308,003,00
21	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	2.432,200,00	1.200,000,000,00	5.217,202,247,00	1.211,000,000,00	6.429,202,247,00
22	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	1.200,200,00	220,000,000,00	255,217,403,00	883,232,803,00	1.483,432,206,00
23	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	500,568,408,00	1.200,000,00	1.700,568,408,00
24	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.110,210,240,00	44,000,000,00	2.154,210,240,00
25	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	1.000,000,000,00	0,00	1.000,000,000,00
26	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	0,00	2.010,000,000,00
28	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	10.970,000,000,00	150,000,000,00	11.120,000,000,00
29	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	1.258,500,00	3.268,500,000,00
30	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	67,306,300,00	0,00	67,306,300,00
32	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	97.811,200,00	0,00	97,811,200,00
33	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	90.010,530,00	4.500,000,00	94,510,530,00
34	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	91.120,000,00	6.300,000,00	97,420,000,00
35	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	343,205,450,00	47,910,000,00	391,115,450,00
36	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	434.72,552,00	460,000,00	895,225,552,00
37	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	0,00	2.010,000,000,00
38	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	10.970,000,000,00	150,000,000,00	11.120,000,000,00
39	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	1.258,500,00	3.268,500,000,00
40	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	67,306,300,00	0,00	67,306,300,00
41	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	97.811,200,00	0,00	97,811,200,00
42	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	90.010,530,00	4.500,000,00	94,510,530,00
43	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	91.120,000,00	6.300,000,00	97,420,000,00
44	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	343,205,450,00	47,910,000,00	391,115,450,00
45	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	434.72,552,00	460,000,00	895,225,552,00
46	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	0,00	2.010,000,000,00
47	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	10.970,000,000,00	150,000,000,00	11.120,000,000,00
48	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	1.258,500,00	3.268,500,000,00
49	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	67,306,300,00	0,00	67,306,300,00
50	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	97.811,200,00	0,00	97,811,200,00
51	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	90.010,530,00	4.500,000,00	94,510,530,00
52	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	91.120,000,00	6.300,000,00	97,420,000,00
53	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	343,205,450,00	47,910,000,00	391,115,450,00
54	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	434.72,552,00	460,000,00	895,225,552,00
55	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	0,00	2.010,000,000,00
56	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	10.970,000,000,00	150,000,000,00	11.120,000,000,00
57	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	1.258,500,00	3.268,500,000,00
58	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	67,306,300,00	0,00	67,306,300,00
59	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	97.811,200,00	0,00	97,811,200,00
60	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	90.010,530,00	4.500,000,00	94,510,530,00
61	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	91.120,000,00	6.300,000,00	97,420,000,00
62	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	343,205,450,00	47,910,000,00	391,115,450,00
63	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	434.72,552,00	460,000,00	895,225,552,00
64	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	0,00	2.010,000,000,00
65	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	10.970,000,000,00	150,000,000,00	11.120,000,000,00
66	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	1.258,500,00	3.268,500,000,00
67	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	67,306,300,00	0,00	67,306,300,00
68	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	97.811,200,00	0,00	97,811,200,00
69	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	90.010,530,00	4.500,000,00	94,510,530,00
70	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	91.120,000,00	6.300,000,00	97,420,000,00
71	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	343,205,450,00	47,910,000,00	391,115,450,00
72	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	434.72,552,00	460,000,00	895,225,552,00
73	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	0,00	2.010,000,000,00
74	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	10.970,000,000,00	150,000,000,00	11.120,000,000,00
75	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	1.258,500,00	3.268,500,000,00
76	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	67,306,300,00	0,00	67,306,300,00
77	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	97.811,200,00	0,00	97,811,200,00
78	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	90.010,530,00	4.500,000,00	94,510,530,00
79	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	91.120,000,00	6.300,000,00	97,420,000,00
80	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	343,205,450,00	47,910,000,00	391,115,450,00
81	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	434.72,552,00	460,000,00	895,225,552,00
82	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	0,00	2.010,000,000,00
83	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	10.970,000,000,00	150,000,000,00	11.120,000,000,00
84	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	1.258,500,00	3.268,500,000,00
85	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	67,306,300,00	0,00	67,306,300,00
86	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	97.811,200,00	0,00	97,811,200,00
87	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	90.010,530,00	4.500,000,00	94,510,530,00
88	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	91.120,000,00	6.300,000,00	97,420,000,00
89	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	343,205,450,00	47,910,000,00	391,115,450,00
90	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	434.72,552,00	460,000,00	895,225,552,00
91	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	0,00	2.010,000,000,00
92	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	10.970,000,000,00	150,000,000,00	11.120,000,000,00
93	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	1.258,500,00	3.268,500,000,00
94	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	67,306,300,00	0,00	67,306,300,00
95	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	97.811,200,00	0,00	97,811,200,00
96	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	90.010,530,00	4.500,000,00	94,510,530,00
97	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	91.120,000,00	6.300,000,00	97,420,000,00
98	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	343,205,450,00	47,910,000,00	391,115,450,00
99	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	434.72,552,00	460,000,00	895,225,552,00
100	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	0,00	2.010,000,000,00
101	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	10.970,000,000,00	150,000,000,00	11.120,000,000,00
102	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	1.258,500,00	3.268,500,000,00
103	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	67,306,300,00	0,00	67,306,300,00
104	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	97.811,200,00	0,00	97,811,200,00
105	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	90.010,530,00	4.500,000,00	94,510,530,00
106	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	91.120,000,00	6.300,000,00	97,420,000,00
107	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	343,205,450,00	47,910,000,00	391,115,450,00
108	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	434.72,552,00	460,000,00	895,225,552,00
109	Bina Peningkatan Penyelenggaraan (P2) dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	2.010,000,000,00	0,00	2.010,000,000,00</

**RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN PER OPD
TAHUN 2022**

NO	OPD	BIAYA PEMELIHARAAN	PENYESUAIAN	SEBESAR BEBAN PEMELIHARAAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,542,527,287.00	0.00	3,542,527,287.00
2	Dinas Kesehatan	762,700,714.00	(1,093,669,097.00)	613,032,117.00
3	RSMA Dharmaji Baru	726,843,718.00	(67,471,006.00)	659,373,718.00
4	Dinas Pekerjaan Umum	2,790,251,793.00	(2,199,970,000.00)	286,261,793.00
5	Satuan Polisi dan Pamong Praja	187,990,323.00	(19,349,020.00)	168,641,303.00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	293,456,306.00	(16,025,950.00)	247,430,356.00
7	Dinas Sosial	207,976,973.00	0.00	207,976,973.00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	151,695,500.00	(11,120,300.00)	120,575,200.00
9	Dinas Pangan	38,282,400.00	0.00	38,282,400.00
10	Dinas Unggulan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman	249,570,666.00	(40,968,750.00)	199,601,916.00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	129,008,580.00	0.00	129,008,580.00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	131,450,117.00	0.00	131,450,117.00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPP dan Perlindungan Anak	412,403,507.00	(122,508,581.00)	289,894,926.00
14	Dinas Perhubungan	130,193,607.00	130,745,896.00	320,939,503.00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	61,041,168.00	(19,611,922.00)	40,429,246.00
16	Dinas Pengawasan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	162,468,970.00	(72,621,670.00)	89,847,300.00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54,917,300.00	0.00	54,917,300.00
18	Dinas Pariwisata, Pelestarian Cagar Budaya	117,108,450.00	0.00	117,108,450.00
19	Dinas Perairan, Akutasi Kelautan	29,560,750.00	0.00	29,560,750.00
20	Dinas Perikanan	257,581,550.00	0.00	257,581,550.00
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	269,605,096.00	174,773,258.00	444,378,354.00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	251,804,294.00	64,450,000.00	316,254,294.00
23	Inspektoral	126,408,843.00	133,251,072.00	259,659,915.00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	508,587,143.00	(223,518,290.00)	285,068,853.00
25	Badan Keuangan	474,018,680.00	0.00	474,018,680.00
26	FPKD	0.00	0.00	0.00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	190,450,800.00	0.00	190,450,800.00
28	Sekretariat Daerah	1,477,332,606.00	(132,585,000.00)	1,006,747,606.00
29	Sekretariat DPRD	353,638,895.00	0.00	353,638,895.00
30	Kecamatan Gunung Duteh	30,830,800.00	0.00	30,830,800.00
31	Kecamatan Bukit Serlian	32,625,500.00	0.00	32,625,500.00
32	Kecamatan Sank	74,032,700.00	0.00	74,032,700.00
33	Kecamatan Gugak	53,179,500.00	0.00	53,179,500.00
34	Kecamatan Mungki	67,469,250.00	0.00	67,469,250.00
35	Kecamatan Abalaban	81,812,000.00	(14,632,000.00)	67,180,000.00
36	Kecamatan Sayakaluh	72,366,950.00	0.00	72,366,950.00
37	Kecamatan Luak	66,998,750.00	0.00	66,998,750.00
38	Kecamatan Lurah Sago-Jaliler	66,353,800.00	0.00	66,353,800.00
39	Kecamatan Sibinjau Timor Nagari	70,210,000.00	0.00	70,210,000.00
40	Kecamatan Harau	55,427,000.00	0.00	55,427,000.00
41	Kecamatan Pangkajene Lato Batu	57,183,250.00	0.00	57,183,250.00
42	Kecamatan Kepuruk	56,628,600.00	0.00	56,628,600.00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	199,159,421.00	0.00	199,159,421.00
44	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	85,216,941.00	0.00	85,216,941.00
	JUMLAH	14,829,309,442.00	(2,737,910,661.00)	12,091,398,781.00

RINDAN BEBAN PERALAMAN DINAS PELAYANAN
TAHUN 2022

Halaman 22

NO	DPO	BEBAN PERALAMAN DINAS DALAM DAERAH/ DAERAH KOTA	BEBAN PERALAMAN LUAR DAERAH/ DINAS LUAR NEGERI	REKAMAN PERALAMAN LUAR NEGERI	TOTAL
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.441.750.435,00	779.845.352,00		2.221.595.787,00
2	Dinas Kesehatan	908.177.000,00	789.581.346,00		1.697.758.346,00
3	Instansi Deakman Daerah	41.075.000,00	120.382.072,00		161.457.072,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	236.432.000,00	1.017.248.111,00		1.253.680.111,00
5	Satuan Polisi dan Pamong Praja	31.915.000,00	175.110.000,00		207.025.000,00
6	Dinas Perumahan Kependudukan	86.005.000,00	28.677.500,00		114.682.500,00
7	Dinas Sosial	120.520.000,00	207.487.893,00		328.007.893,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	137.125.000,00	352.190.000,00		489.315.000,00
9	Dinas Pangan	31.500.000,00	187.190.000,00		218.690.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup, Perencanaan Teknik dan Pemukiman	144.715.000,00	49.764.767,00		194.479.767,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84.275.000,00	177.023.000,00		261.298.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	259.150.000,00	711.760.112,00		970.910.112,00
13	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Pertambangan Daerah	50.070.000,00	243.775.105,00		293.845.105,00
14	Dinas Perhubungan	107.110.000,00	275.158.880,00		382.268.880,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	97.705.000,00	300.966.000,00		398.671.000,00
16	Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	106.975.000,00	421.858.012,00		528.833.012,00
17	Dinas Perencanaan, Statistik dan Kebijakan Terhadap Suku Bangsa	4.450.000,00	357.715.743,00		362.165.743,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	113.305.000,00	937.242.000,00		1.050.547.000,00
19	Dinas Perencanaan Kearsifan	14.405.000,00	82.205.289,00		96.610.289,00
20	Dinas Pemadam	205.020.000,00	288.619.042,00		493.639.042,00
21	Dinas Tataairan Pangan, Hortikultura dan Perikanan	427.945.000,00	1.087.852.585,00		1.515.797.585,00
22	Dinas Pemerintahan dan Kesehatan Hewan	361.585.000,00	150.418.000,00		512.003.000,00
23	Inspektorat	1.898.562.000,00	388.747.663,00		2.287.309.663,00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	11.010.000,00	654.933.681,00		665.943.681,00
25	Badan Keuangan	525.080.000,00	1.553.581.158,00		2.078.661.158,00
26	PNPD				
27	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41.000.000,00	1.137.711.358,00		1.178.711.358,00
28	Sekretariat Daerah	235.110.000,00	4.400.324.093,00		4.635.434.093,00
29	Sekretariat DPRD	64.004.000,00	17.373.795.744,00		17.437.799.744,00
30	Kecamatan Gunung Dempo	66.585.000,00	10.350.000,00		76.935.000,00
31	Kecamatan Sukir Hutan	84.275.000,00			84.275.000,00
32	Kecamatan Sukir	92.250.000,00	11.077.700,00		103.327.700,00
33	Kecamatan Gugur	71.035.000,00	10.310.550,00		81.345.550,00
34	Kecamatan Mungga	110.205.000,00	13.190.000,00		123.395.000,00
35	Kecamatan Akabikuru	45.365.000,00	24.990.000,00		70.355.000,00
36	Kecamatan Pongkor	138.545.000,00	16.150.550,00		154.695.550,00
37	Kecamatan Suk	45.210.000,00	7.900.500,00		53.110.500,00
38	Kecamatan Tanah Sago Lingsib	38.325.000,00	17.250.350,00		55.575.350,00
39	Kecamatan Sumpang Limi Negeri	48.845.000,00	17.426.000,00		66.271.000,00
40	Kecamatan Harau	50.210.000,00	17.064.000,00		67.274.000,00
41	Kecamatan Pengkalan Kota Baru	51.830.000,00	14.610.550,00		66.440.550,00
42	Kecamatan Sapat IX	84.110.000,00	35.093.750,00		119.203.750,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200.535.000,00	256.252.018,00		456.787.018,00
44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.710.000,00	250.484.872,00		285.194.872,00
	Jumlah	8.542.078.035,00	26.548.417.893,00	-,00	35.090.495.928,00

**RINCIAN BEBAN HIBAH PER OPD
TAHUN 2022**

No.	OPD	PEMBAYARAN HIBAH	REKONSTRUKSI HIBAH	SEUSM	URAIAN
1	DINAS PERKAWINAN	4.070.000.000,00	4.380.400.000,00	11.000.000,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
		6.564.425.245,00	6.072.470.000,00	342.300.245,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Kelengkapan Terselenggara
		109.277.900,00	900.000,00	0,00	Beban Hibah Dana BOS, Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Bersifat Sosial Kemasyarakatan
2	DINAS PEREKONOMIAN, KOPERASI DAN PENYERTAAN	7.205.041.598,00	7.072.700.598,00	126.340,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Bersifat Sosial Kemasyarakatan
3	DINAS PERENCANAAN DAN KEBERSIHAN KOTA	4.750.000,00	4.000.000,00	750.000,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Bersifat Sosial Kemasyarakatan
4	DINAS PERHUBUNGAN	2.054.719.450,00	2.054.719.450,00	0,00	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Kelengkapan Terselenggara
		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	59.484.000,00	59.471.000,00	13,00	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan
6	DINAS PERENCANAAN, KOPERASI DAN PENYERTAAN	29.884.894,00	29.885.894,00	0,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Kelengkapan Terselenggara
		1.040.000.000,00	110.000.000,00	770.000.000,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan
7	DINAS PERKAWINAN, PERKAWINAN DAN KEPERAWATAN	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Kelengkapan Terselenggara
		47.100.000,00	0,00	47.100.000,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan
8	DINAS PERKAWINAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Kelengkapan Terselenggara
9	DINAS PERTANAHAN, KAWASAN BUDIDAYA DAN PERUMAHAN	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
		260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Kelengkapan Terselenggara
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Kelengkapan Terselenggara
10	DINAS PERTANAHAN DAN KAWASAN BUDIDAYA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
11	SEKRETARIAT KOTA	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
		700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Kelengkapan Terselenggara
12	BADAN KESEHATAN MASYARAKAT	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Beban Hibah Barang Keuangan kepada Dinas Publik
JUMLAH		33.976.149.000,00	33.442.460.000,00	2.544.782.657,00	


REALISASI PENYALURAN DANA DESA 2022

NO	NAMA NAGARI	ANGGARAN	REALISASI						JUMLAH REALISASI	SISA	%	
			TAHAP 1		TAHAP 2		TAHAP 3					TOTAL BLT
			TGL	JUMLAH	TGL	JUMLAH	TGL	JUMLAH				
	GUNUANG OMEH	2.876.091.000		688.758.400		688.758.400		343.378.200	1.159.200.000	2.876.091.000	-	100%
1	Pandam Galang	1.069.891.000	01-Mar	255.156.400	04-Jul	255.156.400	03-Oct	127.578.200	432.800.000	1.069.891.000	-	100%
2	Talang Anau	749.618.000	01-Mar	178.887.200	04-Jul	178.887.200	18-Nov	89.443.600	302.400.000	749.618.000	-	100%
3	Koto Tinggi	1.056.582.000	01-Mar	252.712.800	15-Aug	252.712.800	14-Nov	128.356.400	424.800.000	1.056.582.000	-	100%
	BULIKI	4.933.591.000		1.118.078.400		1.118.078.400		559.038.200	2.138.400.000	4.933.591.000	-	100%
4	Limbangan	816.757.000	21-Feb	195.852.800	24-Aug	195.852.800	18-Nov	97.891.400	327.600.000	816.757.000	-	100%
5	Sungai Rmasang	955.328.000	09-Mar	228.051.200	01-Aug	228.051.200	15-Dec	114.025.600	365.200.000	955.328.000	-	100%
6	Sutkl	751.865.000	11-Mar	129.426.000	08-Aug	129.426.000	24-Oct	64.713.000	428.408.000	751.865.000	-	100%
7	Kunei	752.263.000	21-Feb	177.065.200	13-Jun	177.065.200	24-Oct	88.532.800	309.630.000	752.263.000	-	100%
8	Tanjung Burgo	667.334.000	09-Feb	164.053.800	17-May	164.053.800	26-Sep	82.026.800	277.200.000	667.334.000	-	100%
8	Andiang	669.944.000	08-Mar	223.817.600	25-Jul	223.817.600	06-Dec	111.908.800	418.400.000	669.944.000	-	100%
	BUKIK BARIAN	4.861.720.000		1.151.248.000		1.151.248.000		575.824.000	1.983.600.000	4.861.720.000	-	100%
10	Beruah Gubung	1.174.788.000	01-Mar	281.275.200		281.275.200	15-Dec	140.637.600	471.800.000	1.174.788.000	-	100%
11	Sungai Nalang	879.950.000	01-Mar	187.803.000	25-Apr	187.803.000	20-Oct	98.950.000	386.200.000	879.950.000	-	100%
12	Koto Tengah	928.441.000	28-Mar	198.093.400	24-Aug	188.056.400	15-Dec	98.048.200	331.200.000	928.441.000	-	100%
13	Banja Loweh	979.895.000	21-Mar	210.634.000	18-Jul	210.834.000	18-Nov	105.417.000	352.800.000	979.895.000	-	100%
14	Maek	1.100.658.000	11-Mar	283.142.400	24-Aug	283.142.400	12-Dec	131.671.200	442.800.000	1.100.658.000	-	100%
	GUGUAK	4.569.279.000		1.139.719.400		1.014.111.800		381.448.000	2.094.000.000	4.569.279.000	-	100%
15	Sungai Talang	930.727.000	28-Mar	221.090.800	22-Aug	221.090.800	25-Nov	110.545.400	379.000.000	930.727.000	-	100%
16	Guguaik VII Koto	1.049.239.000	21-Feb	378.823.400	24-Aug	261.215.600			421.200.000	1.049.239.000	-	100%
17	Kubang	932.297.000	01-Mar	149.718.800	18-Aug	149.718.800	05-Dec	74.859.400	568.000.000	932.297.000	-	100%
18	Vlt Koto Talago	912.456.000	11-Mar	213.782.400	01-Aug	213.782.400	05-Dec	106.891.200	378.000.000	912.456.000	-	100%
19	Simpang Sugiran	744.560.000	01-Mar	178.304.000	30-May	178.304.000	24-Oct	89.152.000	296.800.000	744.560.000	-	100%
	MUNGKA	4.885.385.000		1.112.385.200		1.112.385.200		556.197.600	2.084.400.000	4.885.385.000	-	100%
20	Jopang Manggami	749.551.000	11-Mar	141.420.400	18-Jul	141.420.400	06-Dec	70.710.200	306.000.000	749.551.000	-	100%
21	Mungka	845.905.000	21-Feb	228.722.000	18-Jul	225.722.000	26-Nov	112.881.000	381.800.000	845.905.000	-	100%
22	Talang Maur	1.222.313.000	06-Mar	278.885.200	01-Aug	278.885.200	25-Nov	139.342.600	525.800.000	1.222.313.000	-	100%
23	Simpang Kapuek	986.163.000	21-Feb	238.621.200	07-Jun	238.621.200	20-Oct	119.310.600	399.800.000	986.163.000	-	100%
24	Sungai Amban	951.466.000	01-Mar	227.948.400	19-Jul	227.948.400	18-Nov	113.973.200	381.800.000	951.466.000	-	100%
	AKABILURU	5.796.421.000		1.307.888.400		1.307.888.400		653.844.200	2.527.200.000	5.796.421.000	-	100%
25	Koto Tengah Batu Hampa	995.128.000	21-Feb	238.211.200	25-Apr	238.211.200	24-Oct	119.105.600	399.600.000	995.128.000	-	100%

NO	NAMA NAGARI	ANGGARAN	REALISASI						TOTAL BLT	JUMLAH REALISASI	BISA	%
			TAHAP 1		TAHAP 2		TAHAP 3					
			TGL	JUMLAH	TGL	JUMLAH	TGL	JUMLAH				
26	Batu Hampar	762.854.000	11-Mar	187.901.600	04-Jul	187.901.600	12-Sep	99.950.800	313.200.000	762.854.000	-	100%
27	Sarak Laweh	1.013.691.000	21-Feb	242.756.400	25-Apr	242.756.400	05-Dec	121.378.200	406.800.000	1.013.691.000	-	100%
28	Sungai Balantek	845.642.000	11-Apr	154.576.800	08-Aug	154.576.800	05-Dec	77.288.400	259.200.000	845.642.000	-	100%
29	Suayan	881.332.000	21-Mar	234.132.800	24-Aug	234.132.800	07-Nov	117.066.400	386.000.000	881.332.000	-	100%
30	Pauh Sangik	657.288.000	21-Feb	158.346.400	11-Apr	158.346.400	14-Nov	78.173.200	286.400.000	657.288.000	-	100%
31	Durian Gadang	720.408.000	21-Feb	93.783.200	06-Apr	93.783.200	29-Aug	46.881.600	486.000.000	720.408.000	-	100%
	PAYAKUMBUH	6.351.741.000		1.508.778.400		1.508.778.400		753.388.200	2.584.000.000	6.351.741.000	-	100%
22	Koto Tengah Simalanggang	793.155.000	21-Feb	184.782.000	11-Apr	184.782.000	18-Aug	92.391.000	331.200.000	793.155.000	-	100%
33	Simalanggang	901.732.000	21-Mar	215.252.800	04-Jul	215.252.800	03-Oct	107.628.400	363.600.000	901.732.000	-	100%
34	Koto Baru Simalanggang	927.470.000	01-Mar	219.788.000	25-Apr	219.788.000	28-Sep	108.894.000	378.000.000	927.470.000	-	100%
35	Pisibang	858.982.000	08-Mar	199.592.800	08-Aug	199.592.800	03-Oct	98.796.400	360.000.000	858.982.000	-	100%
36	Sungai Beringit	754.088.000	21-Feb	180.679.200	05-Apr	180.679.200	14-Nov	90.339.600	302.400.000	754.088.000	-	100%
37	Tauh Baruah	1.232.915.000	01-Mar	295.886.000	11-Apr	295.886.000	24-Jun	147.943.000	493.200.000	1.232.915.000	-	100%
39	Tauh Bukit	683.389.000	08-Mar	210.795.600	25-Apr	210.795.600	29-Aug	105.387.800	356.400.000	683.389.000	-	100%
	LUAK	4.013.472.000		957.388.800		957.388.800		478.694.400	1.620.000.000	4.013.472.000	-	100%
38	Tj. Haro Sikau-kabu	1.213.819.000	01-Mar	288.727.600	25-Apr	288.727.600	28-Sep	143.363.800	486.800.000	1.213.819.000	-	100%
40	Sungai Kamuyang	649.538.000	11-Mar	227.175.200	04-Jul	227.175.200	07-Nov	113.587.600	381.600.000	649.538.000	-	100%
41	Andaleh	868.387.000	21-Feb	208.074.800	24-Jun	208.074.800	10-Oct	104.037.400	349.200.000	868.387.000	-	100%
42	Mungo	980.928.000	21-Feb	235.411.200	18-Apr	235.411.200	29-Aug	117.705.600	392.400.000	980.928.000	-	100%
	LAREH BAGU HALABAN	7.941.803.000		1.889.381.200		1.889.381.200		944.680.800	3.218.400.000	7.941.803.000	-	100%
43	Bukik Sikumpa	711.703.000	01-Mar	188.481.200	25-Apr	188.481.200	18-Aug	84.740.600	288.000.000	711.703.000	-	100%
44	Balai Panjang	975.153.000	21-Mar	233.101.200	17-May	233.101.200	14-Nov	116.550.600	392.400.000	975.153.000	-	100%
45	Batu Payuang	892.364.000	01-Mar	212.945.600	04-Jul	212.945.600	14-Nov	106.472.800	350.000.000	892.364.000	-	100%
46	Lebuah Gunung	926.831.000	21-Mar	222.412.400	30-May	222.412.400	10-Oct	111.206.200	370.800.000	926.831.000	-	100%
47	Tanjung Gadang	1.174.874.000	21-Mar	281.309.600	24-Aug	281.309.600	12-Dec	140.654.800	471.800.000	1.174.874.000	-	100%
48	Sitanang	1.246.784.000	05-Apr	288.153.600	24-Aug	288.153.600	12-Dec	148.078.800	500.400.000	1.246.784.000	-	100%
49	Halaban	1.009.585.000	28-Mar	231.034.000	08-Aug	231.034.000	25-Nov	115.517.000	432.000.000	1.009.585.000	-	100%
50	Ampalu	1.005.509.000	21-Mar	240.823.800	11-Jul	240.823.800	10-Oct	120.461.800	403.200.000	1.005.509.000	-	100%
	SITUJUAH LIMO NAGARI	4.440.115.000		1.119.897.600		1.119.897.600		404.491.600	1.500.800.000	4.440.115.000	-	100%
51	Situjuh Banda Dalam	918.850.000	21-Mar	206.900.000	22-Aug	206.900.000	07-Nov	103.450.000	399.500.000	918.850.000	-	100%
52	Situjuh Gadang	942.913.000	09-Feb	213.005.200	24-Aug	213.005.200	07-Nov	106.502.600	410.400.000	942.913.000	-	100%
53	Situjuh Barua	948.858.000	09-Feb	310.114.800	19-Aug	206.743.200			432.000.000	948.858.000	-	100%
54	Tungkar	866.941.000	01-Mar	206.898.400	24-Aug	206.898.400	06-Dec	103.348.200	349.200.000	866.941.000	-	100%
55	Situjuh Ladang Laweh	766.563.000	05-Apr	182.381.200	24-Aug	182.381.200	14-Nov	91.190.600	309.800.000	766.563.000	-	100%

NO	NAMA NEGARI	ANGGARAN	REALISASI						JUMLAH REALISASI	SISA	%	
			TAHAP 1		TAHAP 2		TAHAP 3					TOTAL BLT
			TGL	JUMLAH	TGL	JUMLAH	TGL	JUMLAH				
	MARAU	10.411.722.000		2.785.925.400		2.485.645.800		938.547.800	4.197.500.000	10.411.722.000	-	100%
56	Koto Tuc	948.409.000	01-Mar	228.723.800	24-Jun	228.723.800	05-Dec	113.251.800	381.800.000	948.409.000	-	100%
57	Lubuk Ballingkok	827.240.000	21-Feb	198.418.000	11-Apr	198.418.000	24-Jun	99.208.000	331.200.000	827.240.000	-	100%
58	Gurun	768.041.000	21-Mar	180.816.400	18-Aug	180.816.400	24-Oct	90.408.200	308.000.000	768.041.000	-	100%
59	Batu Salang	959.659.000	08-Mar	229.783.600	04-Jul	229.783.600	14-Nov	114.891.800	385.200.000	959.659.000	-	100%
60	Sarilamak	1.568.219.000	03-Feb	590.771.400	01-Aug	373.847.600			633.600.000	1.568.219.000	-	100%
61	Bukit Limbau	736.194.000	01-Mar	176.397.600	18-Jul	176.397.800	25-Nov	88.198.800	295.200.000	736.194.000	-	100%
62	Selok Bto-Bto	774.247.000	21-Feb	180.096.800	04-Jul	180.996.800	25-Nov	90.048.400	324.000.000	774.247.000	-	100%
63	Taram	970.564.000	21-Feb	349.059.400	07-Jun	232.706.600			388.800.000	970.564.000	-	100%
64	Tawantang	988.858.000	08-Mar	236.343.200	23-May	236.343.200	26-Sep	116.171.800	368.000.000	988.858.000	-	100%
65	Marau	1.158.047.000	08-Mar	276.858.800	18-Aug	276.858.800	05-Dec	138.329.400	464.400.000	1.158.047.000	-	100%
68	Piubang	728.244.000	01-Mar	173.857.800	13-Jun	173.857.600	07-Nov	86.928.800	291.600.000	728.244.000	-	100%
	PANGKALAN	6.201.508.000		1.393.403.200		1.393.403.200		696.701.600	2.718.000.000	6.201.508.000	-	100%
67	Pangkalan	1.302.070.000	21-Mar	312.028.000	11-Jul	312.028.000	14-Nov	156.014.000	522.000.000	1.302.070.000	-	100%
68	Manggang	953.010.000	21-Mar	153.884.000	24-Aug	153.884.000	15-Dec	76.842.000	558.800.000	953.010.000	-	100%
69	Koto Alam	954.250.000	21-Mar	227.820.000	24-Aug	227.820.000	15-Dec	113.810.000	385.200.000	954.250.000	-	100%
70	Tanjung Balik	867.891.000	28-Mar	195.656.400	18-Aug	195.858.400	24-Oct	97.878.200	378.000.000	867.891.000	-	100%
71	Tanjung Pauh	898.362.000	28-Mar	214.540.800	13-Jun	214.540.800	24-Oct	107.270.400	360.000.000	898.362.000	-	100%
72	Gunung Makhtang	1.227.935.000	11-Mar	289.574.000	18-Aug	289.574.000	05-Dec	144.787.000	504.000.000	1.227.935.000	-	100%
	KAPUR IX	7.587.598.000		1.851.414.800		1.800.969.200		760.024.000	3.095.200.000	7.587.598.000	-	100%
73	Muaro Peit	1.258.278.000	21-Feb	451.388.800	18-Aug	300.911.200			504.000.000	1.258.278.000	-	100%
74	Koto Bangun	983.443.000	01-Mar	229.857.200	18-Apr	229.857.200	07-Nov	114.928.600	365.800.000	983.443.000	-	100%
75	Durian Tinggi	892.123.000	21-Feb	212.849.200	18-Jul	212.849.200	25-Nov	106.424.600	360.000.000	892.123.000	-	100%
76	Sialang	1.420.433.000	21-Feb	340.853.200	25-Apr	340.853.200	05-Dec	170.328.600	588.800.000	1.420.433.000	-	100%
77	Galugua	1.181.835.000	11-Apr	284.574.000	18-Aug	284.574.000	18-Nov	132.287.000	500.400.000	1.181.835.000	-	100%
78	Lubuk Afak	920.018.000	11-Mar	219.887.200	23-May	219.887.200	05-Dec	109.843.600	370.800.000	920.018.000	-	100%
79	Koto Lamo	978.468.000	08-Mar	232.427.200	24-Jun	232.427.200	14-Nov	116.213.600	392.400.000	978.468.000	-	100%
	JUMLAH	74.860.449.000		18.122.261.200		17.439.539.600		8.037.058.200	31.251.800.000	74.860.449.000	-	100%

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH Kota


WINI HARI ENDI SEAMIN
NIP. 19630417 198303 1 006

REALISASI KENDALI ALOKASIDANA TA 2022

NO	NAMA DAERAH	PROG AMBANGAN	REALISASI																		JMLAH TOTAL	SMA ANGGARAN	KET
			TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III			TAHAP IV			BPKS %	TGL	ADD	BPKS %	TGL	ADD			
			BPM	TGL	ADD	BPKS %	TGL	ADD	BPKS %	TGL	ADD	BPKS %	TGL	ADD									
1	BUNDAUNG CIMEH	2.746.837.300			844.402.320	2.993.275			864.331.425	3.189.683			864.318.000	2.103.445			844.184.869	3.264.175	2.746.837.300	100%			
	Pondok Gedang	863.570.000	11	20-Feb	227.253.000	999.875	26	27-May	227.253.000	1.285.945	00095	3-Feb	227.213.600	1.101.820	00100	3-Oct	227.085.840	1.228.850	863.570.000	100%			
2	Talang Ajem	878.118.700	12	2-Mar	187.598.060	721.126	61	6-Jul	187.558.060	282.273	00117	19-Sep	187.848.070	634.676	00100	14-Nov	187.833.225	714.820	878.118.700	100%			
3	Kota Tinggi	1.703.460.800	20	9-Mar	279.001.210	1.241.305	67	21-Jun	279.470.275	1.509.275	30120	27-Sep	279.445.900	1.470.700	00105	2-Dec	279.440.900	1.470.750	1.703.460.800	100%			
4	BULUKI	4.378.598.700			1.128.480.880	4.269.370			1.428.226.680	3.829.425			1.388.266.300	6.571.000			1.128.220.421	6.544.875	4.378.598.700	100%			
1	Lingsing	777.408.000	13	2-Mar	188.190.000	542.260	28	20-Apr	198.816.000	542.260	00068	18-Aug	198.810.000	542.260	00100	14-Nov	198.810.000	542.260	777.408.000	100%			
5	Sungai Rambang	834.880.700	13	2-Apr	200.064.676	1.160.000	29	4-Jul	198.828.713	1.238.200	01000	24-Aug	198.861.300	1.113.875	00522	21-Oct	198.878.425	1.134.750	834.880.700	100%			
4	Syal	861.181.800	20	9-Mar	225.772.690	1.017.750	28	10-Apr	221.272.690	1.017.750	00064	8-Aug	221.272.690	1.117.100	00100	14-Nov	221.823.100	857.280	861.181.800	100%			
7	Kural	873.271.200	8	14-Feb	186.888.173	734.825	53	27-May	198.220.172	847.525	00068	8-Aug	198.220.172	854.825	00100	9-Nov	198.814.175	804.125	873.271.200	100%			
3	Tanjung Sungi	881.854.500	8	14-Feb	171.803.575	804.750	42	21-Apr	171.803.575	803.500	00064	8-Aug	171.803.575	803.000	00128	1-Nov	171.803.575	803.000	881.854.500	100%			
2	Aekiang	724.883.600	17	4-Mar	180.188.815	979.800	66	16-Jun	180.188.815	874.800	00120	21-Aug	180.188.815	875.800			180.188.815	875.800	724.883.600	100%			
10	BUNOK BARDAH	4.288.713.200			1.216.437.340	3.068.660			1.211.424.875	4.027.370			1.211.791.200	3.277.675	00153	19-Nov	1.211.791.275	3.262.280	4.288.713.200	100%			
	Berang Sarabop	1.012.840.700	20	8-Mar	282.584.425	1.156.750	67	21-Jan	282.582.000	1.188.125	00068	18-Aug	282.582.100	1.188.000	00120	21-Oct	282.582.800	1.162.375	1.012.840.700	100%			
11	Bangkal Hulung	895.488.000	9	14-Feb	198.962.862	1.111.300	42	21-Apr	199.001.600	1.081.250	00068	19-Aug	199.025.750	1.111.600	00100	21-Nov	199.035.700	1.111.900	895.488.000	100%			
12	Kota Tagati	857.238.1000	13	2-Apr	213.137.000	1.130.290	26	14-Apr	213.177.000	1.139.290	00068	8-Aug	213.217.000	1.081.250	00100	14-Nov	213.225.600	881.750	857.238.100	100%			
13	Berak Lendah	864.974.900	20	8-Mar	223.188.250	1.215.000	47	21-Jan	225.428.725	1.215.000	00068	8-Aug	222.677.225	1.028.500	00128	21-Oct	223.824.750	1.041.875	864.974.900	100%			
14	Nenek	1.208.620.000	20	9-Mar	300.272.800	1.459.500	21	27-Jan	300.301.250	1.422.250	00100	20-Sep	300.333.750	1.361.850	00100	17-Nov	300.366.750	1.301.550	1.208.620.000	100%			
15	GUGUK	4.489.622.200			1.110.127.000	4.083.888			1.111.228.850	4.089.280			1.108.798.800	4.270.200	00138	1-Nov	1.108.486.200	4.267.800	4.489.622.200	100%			
13	Sungai Taling	784.702.700	29	31-Mar	198.808.800	388.175	56	20-Apr	198.808.800	388.875	00068	3-Jul	198.808.800	388.875	00121	14-Dec	198.808.800	388.875	784.702.700	100%			
16	Guguk VII Kot	1.076.682.800	8	14-Feb	297.868.200	982.800	26	27-Apr	297.998.200	972.800	00065	8-Jul	297.998.200	982.800	00104	29-Nov	297.998.200	982.800	1.076.682.800	100%			
17	Zuhri	868.084.200	3	8-Mar	221.324.200	904.500	46	26-Apr	221.334.000	804.800	00064	3-Jul	221.334.000	804.800	00100	21-Oct	221.334.000	804.800	868.084.200	100%			
18	Vihoto Talajo	880.348.600	22	15-Mar	248.887.800	1.228.600	56	14-Apr	248.887.800	1.160.000	00064	5-Jul	248.887.800	1.131.800			248.887.800	1.142.800	880.348.600	100%			
19	SATPAM Supra	716.788.800	11	22-Feb	178.270.850	989.120	66	16-Jun	178.128.000	783.871	00068	8-Jul	177.801.500	682.875			177.403.900	388.875	716.788.800	100%			
20	MUNBEA	4.076.831.000			1.014.780.400	4.267.800			1.014.417.000	4.186.421			1.014.286.000	4.084.128	00100	26-Dec	1.014.180.775	4.294.880	4.076.831.000	100%			
20	Sungai Mangar	821.050.700	17	4-Mar	194.887.175	586.800	66	27-Apr	194.887.175	586.600	00068	3-Jul	194.887.175	584.000	00104	28-Nov	194.887.175	581.750	821.050.700	100%			
21	Paraga	882.630.700	21	11-Mar	232.227.800	989.378	58	19-Apr	232.227.800	1.173.325	00065	8-Jul	232.214.300	1.089.800	00100	28-Dec	232.014.300	1.084.800	882.630.700	100%			
22	Tanjung Luar	781.628.800	25	9-Mar	201.661.100	493.000	46	24-Apr	188.078.725	631.000	00065	8-Jul	188.078.470	730.250	00146	9-Nov	188.078.470	328.875	781.628.800	100%			
23	Sungai Kaseh	863.989.800	11	22-Feb	238.871.300	1.174.000	61	16-May	239.471.300	1.273.800	00064	1-Jul	238.872.300	1.222.200	00149	8-Nov	238.872.300	1.123.250	863.989.800	100%			
24	Sungai Anter	797.236.800	13	2-Mar	196.433.125	678.100	51	10-May	188.433.125	870.000	00064	5-Jul	188.328.300	880.800			188.228.500	880.800	797.236.800	100%			
25	MAKASSARA	1.440.631.400			1.233.828.275	6.188.280			1.233.828.275	6.281.880			1.233.988.000	6.084.580	00145	8-Nov	1.234.011.480	6.282.820	1.440.631.400	100%			
25	Kota Tanah B. Harau	871.122.800	11	22-Feb	241.881.370	884.750	26	19-Apr	241.881.370	888.750	00068	10-Aug	241.881.370	888.750	00098	14-Nov	241.881.370	884.750	871.122.800	100%			
26	Batu Harau	781.741.200	25	9-Mar	194.312.176	1.123.120	60	13-Jun	194.328.928	1.108.771	00064	18-Aug	194.328.928	1.028.375	00258	14-Nov	194.300.825	1.028.375	781.741.200	100%			
27	Sungai Lendah	817.884.100	11	22-Feb	211.250.150	1.208.878	68	19-Apr	211.250.150	1.202.878	00068	8-Aug	211.482.150	1.329.000	00148	8-Nov	211.482.150	1.329.120	817.884.100	100%			
28	Sungai Belanak	889.866.800	34	17-Apr	184.088.636	837.970	61	10-May	184.088.636	831.575	00068	19-Aug	184.167.778	778.291	00174	8-Dec	184.228.828	701.600	889.866.800	100%			
30	Sungai	777.854.200	28	21-Mar	133.780.800	750.760	72	29-Jun	133.780.800	748.760	01672	28-Jul	133.728.999	747.760	00149	7-Nov	133.728.999	747.760	777.854.200	100%			
30	Padah Bangli	847.888.300	8	14-Feb	146.184.828	872.250	45	27-Mar	146.184.828	872.250	00064	8-Aug	146.184.828	872.250	00138	1-Nov	146.184.828	872.250	847.888.300	100%			
31	Dufine Galang	853.525.200	8	14-Feb	187.311.825	804.128			187.312.828	1.017.128	00064	11-Jul	187.170.475	848.875	00157	21-Nov	187.170.475	848.875	853.525.200	100%			

NO	NAMA KAWAN	TAJU ANGGARAN	REALISASI																JMLAH TOTAL	RASA ANGGARAN	KGT
			TAHAP I				TAHAP E				TAHAP B				TAHAP IV						
			SPM	TGL	ADD	BPJS 1% Jan-Mar	SPM	TGL	ADD	BPJS 1% Apr-Jun	SPM	TGL	ADD	BPJS 1% Jul-Sep	SPM	TGL	ADD	BPJS 1% Okt-Des			
KAPURUV	4.912.242.900		1.722.858.075	8.085.298			1.721.854.525	8.085.000			1.721.880.875	8.084.875			1.721.255.578	8.086.431	6.811.262.904	-	100%		
73 Makro Pad	249.103.100	11	27-Feb	347.360.775	930.740	84	27-Apr	247.288.775	851.250	00004	5-Jul	247.375.000	883.950	145	9-Nov	247.310.025	883.205	885.183.950	-	100%	
74 Koto Bangun	869.099.500	13	2-Mar	226.846.289	908.375	35	14-Apr	238.245.250	888.375	00000	12-Jul	234.845.000	888.375	160	14-Nov	234.846.200	888.375	858.688.570	-	100%	
75 Durian Ring	852.346.400	20	9-Mar	214.303.100	483.652	55	27-Mar	214.351.280	474.750	00004	11-Jul	214.341.050	449.820	160	14-Nov	214.482.380	380.375	880.246.430	-	100%	
76 Sidiwang	1.109.487.900	14	22-Apr	295.308.900	673.000	65	27-Mar	279.260.000	878.975	00004	6-Jul	276.388.800	379.000	145	2-Apr	276.043.400	620.500	1.306.467.800	-	100%	
77 Satepa	880.478.100	57	30-May	246.807.375	812.250	89	2-Aug	249.807.275	812.250	00130	3-Nov	246.807.275	812.250	174	3-Dec	246.807.275	812.250	890.478.100	-	100%	
78 Lelaok Air	1.054.449.000	20	9-Mar	262.487.825	1.060.525	48	25-Mar	262.487.825	1.060.525	00004	7-Jul	262.487.825	1.060.525	142	7-Jul	262.487.825	1.060.525	1.094.149.000	-	100%	
79 Koto Lano	661.041.000	53	2-Mar	230.878.200	788.000	53	27-Mar	230.878.200	788.000	0100	24-Jul	230.878.200	788.000	53	1-Nov	230.878.200	788.000	661.041.000	-	100%	
	70.088.788.900			17.437.263.300	78.896.000			17.437.263.300	78.896.000			17.437.263.300	78.896.000			17.437.263.300	78.896.000	70.088.788.900	-	100%	

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMAU PULUH KOTA

WY HARLEMA SE HW
N.P. 19324111952031006

REALISASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS NAGARI YANG BERSIFAT KHUSUS (BKX) 2022

NO	NAMA NAGARI	KEGIATAN	Anggaran	JUMLAH	Bank	SPN	Tanggal	SP2D	Tanggal	Total	
1	Balai Panjang	Pembangunan Balai Adat Tanah Jorong Tanah Nagari Balai Panjang Kecamatan Lurah Saga Halaban	50.000.000	50.000.000	Nagari	00182	12/12/22	03465/SP2D/LS/IV/2022	16/12/22	50.000.000	100%
2	Bukik Sikumpa	Pembukaan Jalan Batu Man Belan-jah Bukik Nagari Bukik Sikumpa Kec Lurah Saga Halaban	80.000.000	250.000.000	Nagari	00158	21/11/2022	02025/SP2D/LS/IV/2022	22/11/2022	80.000.000	100%
3	Bukik Sikumpa	Jalan Perumahan Kota Kadik-Gandang Jorong Ragen Nagari Bukik Sikumpa Kec Lurah Saga Halaban	100.000.000		Nagari	00158	21/11/2022	02025/SP2D/LS/IV/2022	22/11/2022	100.000.000	100%
4	Bukik Sikumpa	Sarana Prasarana Sanggar Sumerak Anjuang Man Tinggi Bukik Sikumpa Nagari Bukik Sikumpa Kec Lurah Saga Halaban	50.000.000		Nagari	00158	21/11/2022	02025/SP2D/LS/IV/2022	22/11/2022	50.000.000	100%
5	Halaban	Pembangunan Shelter pengijiling dan pengadaan Mobil Objek Wisata Aie Beba Watampari/Aie beba Pansara Nagari Halaban Kec Lurah Saga Halaban	100.000.000		100.000.000	Nagari	00141	07/11/2022	02661/SP2D/LS/IV/2022	7/11/2022	100.000.000
6	Sharang	Penerangan Lampu Jalan Nagari Sarang Kecamatan Lurah Saga Halaban	25.000.000	25.000.000	Nagari						0%
7	Tanjung Gadang	Jalan Siuang - Tajarak Jorong BUKAN Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lurah Saga Halaban	100.000.000	100.000.000	Nagari	00133	24/10/2022	02553/SP2D/LS/IV/2022	24/10/2022	100.000.000	100%
10	Baruah Gunung	Lapangan Voly Padang Tengah Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan	20.000.000	470.000.000	Nagari	00116	19/9/2022	01893/SP2D/LS/III/2022	20/9/2022	20.000.000	100%
11	Baruah Gunung	Rabat Beton Di Lereng Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan	50.000.000		Nagari	00118	19/9/2022	01893/SP2D/LS/III/2022	20/9/2022	50.000.000	100%
12	Baruah Gunung	Rabat Beton Di Pangang Loweh - Pual Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan	100.000.000		Nagari	00116	19/9/2022	01893/SP2D/LS/III/2022	20/9/2022	100.000.000	100%
13	Baruah Gunung	Rehabilitasi dan Perbaikan Jalan Baruah Gunung (K. Padang Lowe Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan	200.000.000		Nagari	00116	19/9/2022	01893/SP2D/LS/III/2022	20/9/2022	200.000.000	100%
14	Baruah Gunung	Rehab Drainase Di Lingkar Jorong manuj Bukik Godang (porondan) Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan	50.000.000		Nagari	00116	19/9/2022	01893/SP2D/LS/III/2022	20/9/2022	50.000.000	100%
15	Baruah Gunung	Rehab Jalan Kubu Baru Batu Hampa Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan	50.000.000		Nagari	00116	19/9/2022	01893/SP2D/LS/III/2022	20/9/2022	50.000.000	100%
16	Baruah Gunung	Rehabilitasi dan Perbaikan Jalan Boda Rair Bus Kubang Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan	100.000.000	100.000.000							0%
17	Baruah Gunung	Pembangunan Jalan Banda Rak - Padang Tengah	100.000.000	100.000.000							0%
18	Koto Tengah	Peningkatan Jalan Tislang Tinggi ke baru di Ngunjung Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan	75.000.000	75.000.000	Nagari	00119	26/9/2022	02060/SP2D/LS/III/2022	27/9/2022	75.000.000	100%
19	Sungai Maniang	Rehab Jalan Tiban Duo Bukit Apk Nagari Sungai Maniang Kecamatan Bukik Barisan	75.000.000	380.000.000	Nagari	00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/III/2022	15/9/2022	75.000.000	100%
20	Sungai Maniang	Jalan Ater Nagari Sungai Maniang Kecamatan Bukik Barisan	300.000.000		Nagari	00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/III/2022	15/9/2022	300.000.000	100%
21	Sungai Maniang	Rehab Babai Adat Nagari Sungai Maniang Kecamatan Bukik Barisan	100.000.000		Nagari	00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/III/2022	15/9/2022	100.000.000	100%
22	Sungai Maniang	Rehab Jalan Jorong Perentang Air Nagari Sungai Maniang Kecamatan Bukik Barisan	75.000.000		Nagari	00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/III/2022	15/9/2022	75.000.000	100%

NO	NAMA NAGARI	KEGIATAN	Anggaran	JUMLAH	Bank	SPPH	Tanggal	SP2D	Tanggal	Total	
23	Batu Belang	Jalan LAPEN Ibu Nagan Rabi Belang Kecamatan Harau	100.000.000	300.000.000	Negeri						0%
24	Batu Belang	Jalan LAPEN PMPH Padang Ambelang Nagari Batu Belang Kecamatan Harau	100.000.000		Negeri						0%
25	Batu Belang	Lanjutan LAPEN Jalan Tiga Lurah Nagari Batu Belang Kecamatan Harau	100.000.000		Negeri	00121	29/9/2022	02107/SP2D/LS/IV/2022	4/10/2022	100.000.000	100%
26	Harau	Pembuatan Jalan Wisata Jalan NK Simpang Batu Karang Nagari Harau Kecamatan Harau	75.000.000	550.000.000	Negeri	00125	7/10/2022	02203/SP2D/LS/IV/2022	10/10/2022	75.000.000	100%
27	Harau	Pembukaan Jalan Wisata Jalan Ngebau Seribu Nagari Harau Kecamatan Harau	75.000.000		Negeri	00125	7/10/2022	02203/SP2D/LS/IV/2022	10/10/2022	75.000.000	100%
28	Harau	Pemeliharaan Jalan Wisata Aja Malanca Jorong Landai Nagari Harau Kecamatan Harau	175.000.000		Negeri	00125	7/10/2022	02203/SP2D/LS/IV/2022	10/10/2022	175.000.000	100%
29	Harau	Pemeliharaan/Pembangunan Senda Olahraga (Lapangan Badminton) Nagari Harau Kecamatan Harau	75.000.000		Negeri	00133	24/10/2022	02553/SP2D/LS/IV/2022	25/10/2022	75.000.000	100%
30	Harau	Pengadaan Soudsystem Nagari Harau Kecamatan Harau	75.000.000		Negeri	00125	7/10/2022	02203/SP2D/LS/IV/2022	10/10/2022	75.000.000	100%
31	Harau	Pengerasan Jalan Buncu - Padang Rukam Nagari Harau Kecamatan Harau	75.000.000		Negeri	00125	7/10/2022	02203/SP2D/LS/IV/2022	10/10/2022	75.000.000	100%
32	Durian Gadang	Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Durian Gadang Kecamatan Akadufu	250.000.000		250.000.000	Negeri	00101	24/8/2022	01635/SP2D/LS/DI/2022	26/8/2022	250.000.000
33	Durian Tinggi	Pengadaan Bantuan Mobil Sampah Bemer Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	50.000.000	600.000.000	Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/DI/2022	5/9/2022	50.000.000	100%
34	Durian Tinggi	Rabat Beton Jalan Kampung Daka Jorong Cinta Maju Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	130.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/DI/2022	5/9/2022	130.000.000	100%
35	Durian Tinggi	Rabat Beton Jalan Puskasi Jalan Lingkar Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	150.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/DI/2022	5/9/2022	150.000.000	100%
36	Durian Tinggi	Rabat Beton Jalan SON 03 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	120.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/DI/2022	5/9/2022	120.000.000	100%
37	Durian Tinggi	Rabat Beton Jalan Lingkar Nagari Simpang Lima Jorong Cinta Maju Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	120.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/DI/2022	5/9/2022	120.000.000	100%
38	Durian Tinggi	Pengadaan 2 Unit Kendaraan Roda 2 Nagari Durian Tinggi	70.000.000	70.000.000							0%
39	Koto Bangun	BROK untuk Alat Musik Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX	75.000.000	300.000.000	Negeri	00101	24/8/2022	01636/SP2D/LS/III/2022	26/8/2022	75.000.000	100%
40	Koto Bangun	Lanjutan LAPEN Jalan Albernadi Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX	75.000.000		Negeri	00101	24/8/2022	01636/SP2D/LS/III/2022	26/8/2022	75.000.000	100%
41	Koto Bangun	Lanjutan Pembangunan Tempat Wisata Pabamun Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX	75.000.000		Negeri	00101	24/8/2022	01636/SP2D/LS/III/2022	26/8/2022	75.000.000	100%
42	Koto Bangun	Lanjutan Pembangunan Kantor Balai Adat (Gedung Sirta Guna) / KAN Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX	75.000.000		Negeri	00101	24/8/2022	01636/SP2D/LS/III/2022	26/8/2022	75.000.000	100%
43	Koto Lamo	Pembukaan atau Rabat Beton Jalan Lingkar Pado Bondau Jorong Tanjuang Bungo Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX	75.000.000	300.000.000	Negeri	00114	14/9/2022	01866/SP2D/LS/III/2022	15/9/2022	75.000.000	100%
44	Koto Lamo	Rabat Beton Jalan Lingkar Jorong Koto Tange Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX	75.000.000	Negeri	00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/III/2022	15/9/2022	75.000.000	100%	

NO	NAMA NEGARA	KEGIATAN	Anggaran	JUMLAH	Bank	SPM	Tanggal	SP2D	Tanggal	Total		
45	Koto Lamo	Pembuatan atau Rabet Beton Jalan Jorong Koto Tua Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX	75.000.000	895.000.000	Negeri	00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/120/2022	15/9/2022	75.000.000	100%	
46	Koto Lamo	Pembuatan atau Rabet Beton Jalan Lingkung di Jorong Yasa Tengah Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX	75.000.000		Negeri	00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/131/2022	15/9/2022	75.000.000	100%	
47	Lubuk Alai	Drainase Jorong Rumbal Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX	75.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/116/2022	5/9/2022	75.000.000	100%	
48	Lubuk Alai	Pembaikan Jalan Rumah Negeri ke Mudak Tabek Jorong Koto Tinggi Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX	100.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/117/2022	5/9/2022	100.000.000	100%	
49	Lubuk Alai	Bronjong Sikuambun Lubuk Alai Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX	75.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/118/2022	5/9/2022	75.000.000	100%	
50	Lubuk Alai	Bronjong Sungai Boyang Lubuk Alai Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX	75.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/119/2022	5/9/2022	75.000.000	100%	
51	Lubuk Alai	Drainase Jorong Sei Dua Ansu Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX	75.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/121/2022	5/9/2022	75.000.000	100%	
52	Lubuk Alai	Gedung Serba Guna Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX	75.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/122/2022	5/9/2022	75.000.000	100%	
53	Lubuk Alai	Pembangunan Lapangan Pagar Lapangan Bola Jorong Rumbal Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX	80.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/123/2022	5/9/2022	80.000.000	100%	
54	Lubuk Alai	Pembukaan Jalan ke Tempat Wisata Air Terjun Tujuh Bidadari (Lampulan) Jorong Nini Baru Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX	100.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/124/2022	5/9/2022	100.000.000	100%	
55	Lubuk Alai	Rabet atau Buntu Jalan Jorong Sei Dua Baru Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX	75.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/125/2022	5/9/2022	75.000.000	100%	
56	Lubuk Alai	Rabet Beton Jalan Alai Baru Kapan Lubuk Alai Jorong Nini Baru Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX	90.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/126/2022	5/9/2022	90.000.000	100%	
57	Lubuk Alai	Rabet Jalan Sewah Jorong Koto Tinggi Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX	75.000.000		Negeri	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/127/2022	5/9/2022	75.000.000	100%	
58	Muaro Pauh	Wisata Air Angek Muaro Pauh Nagari Muaro Pauh Kecamatan Kapur IX	75.000.000		575.000.000	Negeri	00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/101/2022	15/9/2022	75.000.000	100%
59	Muaro Pauh	Drainase Jalan atau Pampang di Jorong Air Duri Nagari Muaro Pauh Kecamatan Kapur IX	75.000.000			Negeri	00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/102/2022	15/9/2022	75.000.000	100%
60	Muaro Pauh	Jalan Gagak Jorong SP1 Nagari Muaro Pauh Kecamatan Kapur IX	75.000.000	Negeri		00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/103/2022	15/9/2022	75.000.000	100%	
61	Muaro Pauh	Pembuatan atau Rabet Beton Jalan Barabek Jorong SP1 Nagari Muaro Pauh Kecamatan Kapur IX	75.000.000	Negeri		00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/104/2022	15/9/2022	75.000.000	100%	
62	Muaro Pauh	Pembuatan atau Rabet Beton Jalan Lingkur Kadang Dasar Nagari Muaro Pauh Kecamatan Kapur IX	75.000.000	Negeri		00114	14/9/2022	01865/SP2D/LS/105/2022	15/9/2022	75.000.000	100%	
63	Muaro Pauh	Pengadaan Mobil Jenseah Nagari Muaro Pauh Kecamatan Kapur IX	200.000.000	Negeri		00121	23/9/2022	02107/SP2D/LS/106/2022	4/10/2022	200.000.000	100%	
64	Sialang	Pembangunan/Rahubitas/Peningkatan Drainase Rumah Candi Sialang Atas Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX	150.000.000	150.000.000		Negeri	00116	9/11/2022	02793/SP2D/LS/107/2022	11/11/2022	150.000.000	100%
65	Guguk VIII Koto	Jalan Dermo Tabang-Tabang Khas Jorong Kurang Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk	75.000.000	75.000.000	Negeri	00119	26/9/2022	02060/SP2D/LS/108/2022	27/9/2022	75.000.000	100%	

NO	NAMA NAGARI	KEGIATAN	Anggaran	JUMLAH	Bank	SPN	Tanggal	SP2D	Tanggal	Total	
65	Kubang	Lanjutan Pembangunan Hal Batu Tangkai Nagari Kubang KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) Jorong Kubang Nagari Kubang Kecamatan Guguk	500.000.000	500.000.000	Nagari	00101	24/8/2022	01636/SP2D/LS/IV/2022	26/8/2022	500.000.000	100%
67	Kubang	Lanjutan Rehabilitasi Kantor Wali Nagari Kubang	100.000.000	100.000.000							0%
66	VII Koto Talago	Kantor Wali Jorong Siringai Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk	100.000.000	480.800.000	Nagari	00137	31/10/2022	02629/SP2D/LS/IV/2022	1/11/2022	100.000.000	100%
69	VII Koto Talago	Memulainya Kantor Jorong Padang Jopang VII Koto Talago Kecamatan Guguk	50.000.000		Nagari	00137	31/10/2022	02629/SP2D/LS/IV/2022	1/11/2022	50.000.000	100%
70	VII Koto Talago	Pembangunan/Rehab Balai Adat Jorong Tanjung Jati Kenegerian VII Koto Talago Kecamatan Guguk	80.000.000		Nagari	00137	31/10/2022	02629/SP2D/LS/IV/2022	1/11/2022	80.000.000	100%
71	VII Koto Talago	Pengadaan Mejaor Sarana Olahraga Jorong Tanjung Jati Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk	150.000.000		Nagari	00137	31/10/2022	02629/SP2D/LS/IV/2022	1/11/2022	150.000.000	100%
72	VII Koto Talago	Rabat Beton Jalan Lingkung Kampung Melayu Masjid Raya Padang Jopang (BKK Nagari VII Koto Talago) Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk	100.000.000		Nagari	00137	31/10/2022	02629/SP2D/LS/IV/2022	1/11/2022	100.000.000	100%
73	VII Koto Talago	Pembangunan Gedung Serba Guna HTI Tabek Gedung Jorong Padang Jopang Kenegerian VII Koto Talago Kecamatan Guguk (Lanjutan)	100.000.000	100.000.000							0%
74	Jopang Mangeni	Rabat Beton Jalan Piliang Tabek Jorong Jopang Mangeni Nagari Jopang Mangeni Kecamatan Mungka	90.000.000	90.000.000	Nagari	00128	29/9/2022	02107/SP2D/LS/IV/2022	4/10/2022	90.000.000	100%
75	Mungka	Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor Untuk Kantor Wali Nagari Mungka Kecamatan Mungka	35.000.000	35.000.000	Nagari	00133	24/10/2022	02583/SP2D/LS/IV/2022	25/10/2022	35.000.000	100%
76	Simpang Kapuk	Pengadaan Alat/Menghimpun musik tradisional Nagari Simpang Kapuk Kecamatan Mungka	40.000.000	140.000.000	Nagari	00165	28/11/2022	03164/SP2D/LS/IV/2022	1/12/2022	40.000.000	100%
77	Simpang Kapuk	Rabat Beton Jalan Lika Panjang Nagari Simpang Kapuk Kecamatan Mungka	100.000.000		Nagari	00168	28/11/2022	03164/SP2D/LS/IV/2022	1/12/2022	100.000.000	100%
78	Simpang Kapuk	Pengadaan Kendaraan Operasional Nagari Simpang Kapuk Kecamatan Mungka	25.000.000	25.000.000							0%
79	Sungai Anuan	BKK untuk Pembangunan Sarana Olahraga Nagari Sungai Anuan (Tambahan) Kecamatan Mungka	200.000.000	942.000.000	Nagari	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/IV/2022	5/9/2022	200.000.000	100%
80	Sungai Anuan	Pembangunan Sarana Olahraga (BKK Nagari Sungai Anuan) Sungai Anuan Kecamatan Mungka	192.000.000		Nagari	00166	28/11/2022	03161/SP2D/LS/IV/2022	1/12/2022	192.000.000	100%
81	Sungai Anuan	Rehab Lapangan Bola Uram Jorong Lubuk Sibato Nagari Sungai Anuan Kecamatan Mungka	150.000.000		Nagari	00108	2/9/2022	01723/SP2D/LS/IV/2022	5/9/2022	150.000.000	100%
81,6	Talang Mau	Pembangunan Gerbang Balai Nagari Nagari Talang Mau Kecamatan Mungka	120.000.000	280.000.000	Nagari	00158	21/11/2022	03023/SP2D/LS/IV/2022	22/11/2022	120.000.000	100%
82,2	Talang Mau	Pengadaan Alat-Alat Keselamatan Nagari Talang Mau Kecamatan Mungka	30.000.000		Nagari	00158	21/11/2022	03023/SP2D/LS/IV/2022	22/11/2022	30.000.000	100%
82,8	Talang Mau	Rehab Kantor Jorong Kumpang Tengah Jorong Kumpang Tengah Nagari Talang Mau Kecamatan Mungka	50.000.000		Nagari	00158	21/11/2022	03023/SP2D/LS/IV/2022	22/11/2022	50.000.000	100%
83,7	Talang Mau	Pembangunan Jalan Solok Duren Jorong Talang Mau Nagari Talang Mau Kecamatan Mungka	100.000.000	100.000.000							0%

NO	NAMA NEGARA	KEGIATAN	Anggaran	JUMLAH	Bank	SPN	Tanggal	SP2D	Tanggal	Total	
85	Kota Tangah Simalanggang	Rehab dan Pengadaan Bangunan Galeri Nagari Kota Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh	50.000.000	150.000.000	Negeri	00101	24/8/2022	01636/SP2D/LS/TJ/2022	26/8/2022	50.000.000	100%
86	Kota Tangah Simalanggang	Pengadaan Pakan Sanggar Seri BHK Nagari Nagari Kota Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh	100.000.000		Negeri	00101	24/8/2022	01636/SP2D/LS/TJ/2022	26/8/2022	100.000.000	100%
87	Taeh Baruah	Pembangunan Kantor Wali Nagari Taeh Baruah Jorong Dalam Kota Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	250.000.000	250.000.000	Negeri	00133	24/10/2022	02553/SP2D/LS/TV/2022	25/10/2022	250.000.000	100%
88	Taeh Baruah	Rebel Beton Jalan Lingkar Jorong Kota Kodek Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	100.000.000	100.000.000							0%
89	Taeh Baruah	Perbaikan Jalan Surau Jirek Jorong Kota Kodek Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	52.500.000	52.500.000							0%
90	Taeh Baruah	Betonisasi Jalan Sempang Jrek Jorong Kota Kodek Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh	50.000.000	50.000.000							0%
91	Taeh Bukik	Lapangan Voly Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh	60.000.000	60.000.000	Negeri	00137	31/10/2021	02629/SP2D/LS/TV/2022	1/11/2022	60.000.000	100%
92	Mungo	Dam Jalan Masuk ke SD 02 Mungo Nagari Mungo Kecamatan Luak	30.000.000	170.000.000	Negeri	00119	26/9/2022	02060/SP2D/LS/TV/2022	27/9/2022	30.000.000	100%
93	Mungo	Pembangunan Tribun Lapangan Bola Nagari Mungo Kecamatan Luak	70.000.000		Negeri	00119	26/9/2022	02060/SP2D/LS/TV/2022	27/9/2022	70.000.000	100%
94	Mungo	Pengaspalan Jalan Pidang Pkuran Tinggi Nagari Mungo Kecamatan Luak	70.000.000		Negeri	00119	26/9/2022	02060/SP2D/LS/TV/2022	27/9/2022	70.000.000	100%
95	Sungai Kahnyang	Rehab Ruangan Sekolah TK Dana Ukm Rogah Nagari Sungai Kumuyang Kecamatan Luak	25.000.000	25.000.000	Negeri	00183	12/12/22	03406/SP2D/LS/TV/2022	16/12/22	25.000.000	100%
96	Tungkar	Pembangunan Lapangan Bola Kaki Tungka Nagari Tunjuka Kecamatan Situjuh Umo Nagari	100.000.000	289.000.000	Negeri	00147	09/11/2021	02746/SP2D/LS/TV/2022	11/11/2022	100.000.000	100%
97	Tungkar	Pembukaan Jalan Tanah Lembang Bekang Tarung-Lantik Jorong Sawah Lawa Situjuh Tungka Kecamatan Situjuh Umo Nagari	89.000.000		Negeri	00147	08/11/2022	02746/SP2D/LS/TV/2023	11/11/2022	89.000.000	100%
98	Tungkar	Pemasangan Ampeng Ikan Larangan Pemasaran Sel Lasek Nagari Tungka Kecamatan Situjuh Umo Nagari	30.000.000		Negeri	00147	09/11/2022	02746/SP2D/LS/TV/2024	11/11/2022	30.000.000	100%
99	Tungkar	Rabat Beton Jalan Kota Mader-Balik Angak Jorong Sel Lasek Nagari Tungka Kecamatan Situjuh Umo Nagari	70.000.000		Negeri	00147	09/11/2022	02746/SP2D/LS/TV/2025	11/11/2022	70.000.000	100%
100	Pandan Gading	Pembangunan Jaringan Air Bersih Pemukiman Nagari Pandan Gading Kecamatan Gungah Omeh	100.000.000	100.000.000							0%
101	Kota Tinggi	Rehabilitasi dan Perbaikan Jalan Sungai Sirih Budik Rounding Nagari Kota Tinggi Kecamatan Gungah Omeh	100.000.000	100.000.000							0%
102	Situjuh Banda Dalam	Pengadaan Sound System/ Pengerasan Suara Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Umo Nagari	20.000.000	20.000.000							0%
103	Situjuh Batua	Jalan Lingkar Lubuk Kodek Menuju Danau Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Umo Nagari	100.000.000	100.000.000							0%

NO	NAMA MARGA	KEGIATAN	Anggaran	JUMLAH	Bank	BPM	Tanggal	SP2D	Tanggal	Total		
104	Batu Payung	Pembukaan Jalan Kota Tuo Ngulu Sireh/Brong Lurah Alah Panjang Nagari Batu Payung Kecamatan Lurah Sajo Halaban	50.000.000	50.000.000							0%	
105	Sarilimas	Pembuatan Tapal Batas Nagari Sarilimas Kecamatan MIBALI	100.000.000	100.000.000							0%	
106	Solak Bolo	Normalisasi Solak Bolo	100.000.000	100.000.000							0%	
			Pengambilan Kelebihan Dana Bantuan Keuangan Yang Berifat Khusus (BK K) Nagari Sungai Ambun Kecamatan Muegka								325.000.000	
JUMLAH										8.301.000.000		

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WINHARI ENDE, SE. MM
NIP. 19630417 199303 1 006

REALISASI BELANJA BKK PEMILIHAN WALI NAGARI (PILWANAG) 2022

NO	NAMA NAGARI	ANGGARAN	SPM	TGL	SP2D	TGL	Revisi	AB1
	GUNUNG OMBEL	169.618.000						169.618.000
1	Padaan Padang	58.386.000	00028	31/03/2022	00366/SP2D/L/31/03/2022	31/03/2022		58.386.500
2	Talang Auro	77.369.000	00028	31/03/2022	00366/SP2D/L/31/03/2022	31/03/2022		77.369.500
3	Kudu Tinggi	77.862.500	00028	31/03/2022	00366/SP2D/L/31/03/2022	31/03/2022		77.862.900
	SULIKI	257.979.500						257.979.500
4	Lisabanang	52.971.000	00028	24/03/2022	00346/SP2D/L/24/03/2022	25/03/2022		52.941.000
5	Sungai Kawang	45.759.000	00028	19/03/2022	00344/SP2D/L/19/03/2022	24/03/2022		45.759.000
6	Sude	48.733.000	00028	24/03/2022	00346/SP2D/L/24/03/2022	25/03/2022		48.733.000
7	Kiri	52.338.000	00028	23/03/2022	00344/SP2D/L/23/03/2022	24/03/2022		52.338.000
8	Tanjung Denge	34.772.000	00028	24/03/2022	00346/SP2D/L/24/03/2022	25/03/2022		34.772.000
9	Andang	15.116.500	00028	21/03/2022	00341/SP2D/L/21/03/2022	21/03/2022		15.146.500
	BUKIT BAHINAN	281.815.000						281.815.000
10	Banua Gunung	17.571.500	00028	21/03/2022	00346/SP2D/L/21/03/2022	25/03/2022		17.571.500
11	Sungai Nariang	45.184.500	00028	29/03/2022	00344/SP2D/L/29/03/2022	29/03/2022		45.184.500
12	Koro Ungah	46.477.500	00028	11/04/2022	00366/SP2D/L/11/04/2022	11/04/2022		46.477.500
13	Bangi Laweh	45.791.000	00028	29/03/2022	00344/SP2D/L/29/03/2022	29/03/2022		45.791.000
14	Maak	66.387.500	00028	24/03/2022	00346/SP2D/L/24/03/2022	25/03/2022		66.387.500
	GUGULAK	97.493.500						97.493.500
15	Kadang	61.898.000	00028	31/03/2022	00366/SP2D/L/31/03/2022	31/03/2022		61.898.000
16	Sungai Sungai	35.595.500	00028	24/03/2022	00344/SP2D/L/24/03/2022	25/03/2022		35.595.500
	SIMPANGA	276.797.500						276.797.500
17	Depang Mawang	38.151.500	00028	31/03/2022	00366/SP2D/L/31/03/2022	31/03/2022		38.151.500
18	Mungla	69.677.500	00028	24/03/2022	00346/SP2D/L/24/03/2022	25/03/2022		69.677.500
19	Ujung Man	56.117.000	00028	24/03/2022	00346/SP2D/L/24/03/2022	25/03/2022		56.117.000
20	Simpang Kumpang	34.652.000	00028	25/03/2022	00346/SP2D/L/25/03/2022	29/03/2022		34.652.000
21	Sunga Auro	54.175.500	00028	29/03/2022	00346/SP2D/L/29/03/2022	29/03/2022		54.175.500
	AKABULI RI	333.261.000						333.261.500
22	Kam Hanyah B. Hampa	75.455.000	00028	29/03/2022	00346/SP2D/L/29/03/2022	29/03/2022		75.455.000
23	Batu Hampa	47.175.500	00028	15/03/2022	00366/SP2D/L/15/03/2022	31/03/2022		47.175.500
24	Santik Laseh	57.166.500	00028	11/03/2022	00346/SP2D/L/11/03/2022	31/03/2022		57.166.500
25	Sungai Holonot	33.111.000	00028	11/04/2022	00366/SP2D/L/11/04/2022	11/04/2022		33.111.000
26	Suayan	55.809.500	00028	21/03/2022	00366/SP2D/L/21/03/2022	31/03/2022		55.809.500
27	Batu Sangak	12.195.500	00028	11/03/2022	00346/SP2D/L/11/03/2022	31/03/2022		12.195.500
28	Desan Gelang	52.299.000	00028	11/04/2022	00366/SP2D/L/11/04/2022	31/03/2022		52.299.000
	PAYAKUMBI II	372.881.500						372.881.500
29	Koro Tangah Sings	47.419.500	00028	24/03/2022	00346/SP2D/L/24/03/2022	29/03/2022		47.419.500
30	Simpanggang	53.322.500	00030	30/03/2022	00381/SP2D/L/30/03/2022	11/04/2022		53.322.500
31	Koro Batu Simpanggang	51.118.500	00028	29/03/2022	00346/SP2D/L/29/03/2022	29/03/2022		51.118.500
32	Gabung	47.485.500	00028	31/03/2022	00366/SP2D/L/31/03/2022	31/03/2022		47.485.500
33	Simpang Hanyah	33.646.000	00030	30/03/2022	00381/SP2D/L/30/03/2022	11/04/2022		33.646.000
34	Teach Batah	71.618.000	00028	11/04/2022	00366/SP2D/L/11/04/2022	11/04/2022		71.618.000
35	Teach Bulek	46.263.500	00028	25/03/2022	00346/SP2D/L/25/03/2022	29/03/2022		46.263.500
	CIKAK	210.869.000						210.869.000
36	U. Auro Sikek Auro	56.638.500	00028	24/03/2022	00346/SP2D/L/24/03/2022	25/03/2022		56.638.500
37	Sungai Kanyasa	73.452.000	00028	21/03/2022	00366/SP2D/L/21/03/2022	31/03/2022		73.452.000
38	Auro	80.778.500	00028	21/03/2022	00366/SP2D/L/21/03/2022	31/03/2022		80.778.500
	LAPEH SAGO HALARAN	442.279.000						442.279.000
39	Bukit Sikama	43.842.500	00030	11/04/2022	00381/SP2D/L/11/04/2022	11/04/2022		43.842.500
40	Batu Pangang	51.925.000	00028	19/03/2022	00346/SP2D/L/19/03/2022	29/03/2022		51.925.000
41	Batu Payang	50.668.000	00030	11/04/2022	00381/SP2D/L/11/04/2022	11/04/2022		50.668.000
42	Tahuah Gurahang	51.335.500	00028	15/04/2022	00381/SP2D/L/15/04/2022	11/04/2022		51.335.500
43	Tanjung Gelang	53.706.500	00030	10/04/2022	00381/SP2D/L/10/04/2022	11/04/2022		53.706.500
44	Sikama	49.850.500	00030	10/04/2022	00381/SP2D/L/10/04/2022	11/04/2022		49.850.500
45	Halibar	59.119.000	00030	10/04/2022	00381/SP2D/L/10/04/2022	11/04/2022		59.119.000
46	Aspat	52.837.000	00030	10/04/2022	00381/SP2D/L/10/04/2022	11/04/2022		52.837.000
	SIMPANG LIMO NAGARI	147.983.000						147.983.000

NO	NAMA NAGARA	ANGGARAN	SPN	TGL	SP2D	TGL	Realisasi	KCT
50	Sijunjung Banda Dalam	54.274.500	00025	24/03/2022	00316/SP2D/LS/2022	25/03/2022	53.274.500	
51	Sijunjung Gedang	59.599.500	00025	29/03/2022	00315/SP2D/LS/2022	29/03/2022	59.599.500	
52	Sijunjung Gunung Laweh	35.309.000	00025	24/03/2022	00345/SP2D/LS/2022	25/03/2022	35.309.000	
	HAKAI	566.834.500					566.834.500	500
53	Kedu Jati	53.174.500	00026	29/03/2022	00312/SP2D/LS/2022	29/03/2022	53.174.500	
54	Lubuk Bahagik	41.959.000	00025	24/03/2022	00346/SP2D/LS/2022	25/03/2022	41.959.000	
55	Kulon	37.927.500	00025	25/03/2022	00346/SP2D/LS/2022	25/03/2022	37.927.500	
56	Dau Dalam	56.988.000	00025	24/03/2022	00346/SP2D/LS/2022	25/03/2022	56.988.000	
57	Sribelek	109.642.500	00025	24/03/2022	00346/SP2D/LS/2022	25/03/2022	109.642.500	
58	Dukuh Lambuka	34.833.000	00025	24/03/2022	00346/SP2D/LS/2022	25/03/2022	34.833.000	500
59	Satek Bin-bin	40.531.000	00026	25/03/2022	00345/SP2D/LS/2022	29/03/2022	40.531.000	
60	Laweh	77.747.500	00025	24/03/2022	00346/SP2D/LS/2022	25/03/2022	77.747.500	
61	Perawang	38.466.000	00029	11/03/2022	00346/SP2D/LS/2022	31/03/2022	38.466.000	
62	Haras	46.411.500	00025	24/03/2022	00315/SP2D/LS/2022	25/03/2022	46.411.500	
63	Piluhang	34.556.500	00025	24/03/2022	00346/SP2D/LS/2022	25/03/2022	34.556.500	
	PANGKALAN	213.220.000					213.220.000	500
64	Manselele	46.124.500	00026	25/03/2022	00354/SP2D/LS/2022	29/03/2022	46.124.500	
65	Koto Alam	43.865.000	00028	31/03/2022	00365/SP2D/LS/2022	31/03/2022	43.865.000	
66	Lampung Balik	38.098.500	00026	29/03/2022	00354/SP2D/LS/2022	29/03/2022	38.098.500	500
67	Lampung Pasa	37.865.000	00026	29/03/2022	00354/SP2D/LS/2022	29/03/2022	37.865.000	
68	Gunung Malintang	65.263.500	00026	29/03/2022	00354/SP2D/LS/2022	29/03/2022	65.263.500	
	KAPURBAHAYU	237.058.500					237.058.500	
69	Koto Bannan	47.443.500	00025	24/03/2022	00316/SP2D/LS/2022	25/03/2022	47.443.500	
70	Bajang Dindang	44.432.000	00028	24/03/2022	00346/SP2D/LS/2022	25/03/2022	44.432.000	
71	Sialaya	56.967.000	00025	24/03/2022	00345/SP2D/LS/2022	25/03/2022	56.967.000	
72	Lubuk Aca	46.750.500	00025	29/03/2022	00315/SP2D/LS/2022	29/03/2022	46.750.500	
73	Koto Laweh	41.465.500	00025	24/03/2022	00346/SP2D/LS/2022	25/03/2022	41.465.500	
	Puncuh	3.648.089.500					3.648.089.500	1.500

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDI HARI ENDI, S.E.MM
NP. 10/2017/1963051006

**ALOKASI DANA KURANG SALUR BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KEPADA
PEMERINTAHAN NAGARI TRIWULAN I, II, III dan IV TAHUN 2022**

NO	NAMA NAGARI	JUMLAH BAGIAN HASIL		JUMLAH DBH
		Triwulan I, II & III 2022	Triwulan IV 2022	
1	2	3	4	5 (3+4)
	GUNUANG OMEH			
1	Pandam Gadang	21.951.929	8.783.735	30.735.664
2	Tanjung Anau	21.849.695	8.469.190	30.318.884
3	Kotu Tinggi	21.693.647	9.481.821	31.175.468
	SULIKI			
4	Lirisianang	22.244.495	10.683.975	32.928.470
5	Sungai Rimbang	22.588.431	9.720.110	32.308.542
6	Suliki	22.023.473	8.899.708	30.923.181
7	Kurai	21.745.167	8.408.033	30.153.199
8	Tanjung Sungai	21.903.328	8.353.024	30.256.352
9	Andiang	22.375.352	9.376.875	31.752.178
	BUKIK BARISAN			
10	Rantau Sarung	23.274.148	9.925.068	33.197.217
11	Sungai Maniang	21.892.391	9.087.655	30.980.046
12	Koto Tangah	21.567.435	8.457.358	30.024.793
13	Saraju Laweh	21.819.209	8.574.599	30.393.809
14	Marak	21.862.771	8.646.333	30.508.504
	GUGUAK			
15	Sungai Palang	22.477.628	9.171.263	31.648.891
16	Guguk VIII Koto	21.897.391	9.838.421	31.730.812
17	Kubang	22.408.381	8.529.729	30.938.610
18	VIII Koto Talago	22.850.072	9.662.001	32.512.073
19	Simpang Sugihan	22.151.854	8.777.587	30.929.842
	MUNGKA			
20	Jopang Manggati	22.427.890	8.732.494	31.160.384
21	Mungka	23.311.569	10.100.325	33.411.894
22	Tanjung Maui	22.345.453	9.206.440	31.551.893
23	Simpang Kapuak	22.724.413	9.095.639	31.820.052
24	Sungai Amarian	22.700.615	10.249.699	32.950.309
	AKABLUKTI			
25	Kutu Tangah Batu Hampa	22.242.136	9.493.905	31.736.041
26	Satu Hampi	22.223.579	8.552.963	30.776.542
27	Sariak Laweh	22.459.383	8.608.026	31.067.409
28	Sungai Balantiak	21.793.454	8.658.214	30.453.668
29	Suayan	21.546.219	8.735.009	30.281.228
30	Pauh Sangik	21.607.957	8.834.949	30.442.906
31	Dunan Gadang	22.217.057	8.591.501	30.808.558

	PAYAKUMBUH			
32	Koto Tangah Simalanggang	22.186.585	8.557.459	30.744.045
33	Simalanggang	22.491.488	10.979.526	33.471.014
34	Koto Baru Simalanggang	23.786.288	9.610.529	33.397.117
35	Piodang	22.370.218	8.710.279	31.100.497
36	Sungai Deringin	21.967.048	9.387.374	31.354.422
37	Taeh Baruah	22.676.601	9.254.192	31.900.793
38	Taeh Bukik	22.340.107	9.113.795	31.453.902
	LUAK			
39	It. Haro Sikabu-kabu	22.290.196	8.971.443	31.261.629
40	Sungai Kamuyang	22.038.625	9.482.867	31.521.497
41	Andalet	22.158.943	9.905.353	32.104.296
42	Mungo	22.988.654	9.063.992	32.052.605
	LAREH SAGO HALABAN			
43	Bukik Sikumpa	22.224.596	8.797.328	31.021.924
44	Balai Panjang	22.449.519	8.703.514	31.153.033
45	Batu Payung	22.457.955	10.180.564	32.638.499
46	Labuah Gunung	22.229.393	9.878.963	32.108.517
47	Tanjung Gadang	41.513.916	25.290.245	66.804.161
48	Situmpang	21.925.123	8.662.396	30.587.519
49	Halaban	21.833.790	12.837.540	38.671.330
50	Ampalu	22.113.997	8.836.182	30.950.178
	SITUJUAH LIMO NAGARI			
51	Situjuh Banda Dalam	22.611.653	10.713.626	33.325.279
52	Situjuh Gadang	22.724.303	9.421.296	32.135.598
53	Situjuh Ratu	22.373.787	9.100.947	31.474.733
54	Tungkar	22.115.427	9.272.189	31.387.611
55	Situjuh Ladang Leweli	21.918.682	8.883.362	30.802.043
	HARAU			
56	Koto Luo	25.161.623	15.166.274	40.327.897
57	Lubuk Batangkok	22.247.060	8.821.594	30.868.654
58	Gurui	21.693.674	8.551.523	30.245.297
59	Ratu Bolang	26.502.493	11.157.572	37.660.066
60	Sarimbas	29.603.720	23.412.290	53.015.910
61	Bukik Sembuku	22.135.399	9.228.708	31.364.107
62	Solak Bio-Bio	22.090.825	8.385.211	30.476.036
63	Taram	23.740.091	9.163.856	32.903.947
64	Tarantang	48.728.289	17.478.205	66.156.494
65	Harau	42.002.046	16.176.938	58.178.984
66	Pilubang	22.515.427	9.979.413	32.494.840
	PANGKALAN			
67	Pangkalan	61.956.778	33.317.251	95.274.029
68	Mangilara	45.488.472	39.556.012	85.045.384
69	Koto Alam	53.601.627	34.318.274	87.919.900
70	Tanjung Balik	21.778.025	8.520.706	30.298.731

71	Panjiwang Pajit	29.091.337	8.371.905	37.463.307
72	Gunung Malilang	22.811.073	9.928.340	32.739.423
	KAPUR IX			
73	Muaru Pahi	22.205.085	9.099.519	31.304.603
74	Kota Bangor	22.407.829	9.517.499	31.925.328
75	Durian Tinggi	21.685.287	8.954.472	30.639.709
76	Salang	22.420.908	8.713.173	31.134.082
77	Galuguu	21.985.113	8.537.088	30.522.507
78	Lubuak Alit	22.375.723	9.307.143	31.682.866
79	Kota Lano	21.938.662	8.727.413	30.666.075
	JUMLAH	1.943.747.309	859.250.386	2.802.997.695

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



WINHARI ENDI, SE, MM
NIP. 19690417 199303 1 006

REKAP DATA KETETAPAN PAJAK REKLAMAF
BULAN JANUARI s/d DESEMBER Tahun 2022

NO.	No. SPPD	TARUHAN KOPD	WASA/BERLAKU	REKAM/ALAMAT	JENIS MELAYE	LUKSI/AN	JML MELAYE	ALAMAT/LOKASI REKLAMAF	JUMLAH PAJAK (Rp.)	PIDANG DITERIMA ORANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	15/01/2022	12 Januari 2022 s/d 12 Januari 2022		Project Adf Jl. Raya Jember No. 32 Rp. 32 Jember	Shop Sign (Gedung Sinar) Perpanjang	3 m x 2 m x 2 Sd	1 Unit	Seddi Wyo/Ubud Bangg. Kecamatan Jember	100.000	25.000
02	15/01/2022	12 Januari 2022 s/d 12 Januari 2022		KAD: Asherbang Lengkap (No. 1) Bing Parang	T. Panel	3 m x 3 m x 2 Sd	30 Unit	Tembok di Kantor Kecamatan Pahl Sura	450.000	
03	15/01/2022	10 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022		PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jember No. 32 Rp. 32 Jember Jember 461, Bukittan	Shop Sign 200 (Gedung Sinar) Perpanjang	3 m x 2 m x 2 Sd	1 Unit	Lake Laga Jl. Raya Jember No. 32 Rp. 32 Kec. Jember	300.000	25.000
04	05/01/2022	10 Desember 2021 s/d 14 Oktober 2022		PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jember No. 32 Rp. 32 Jember Jember 461, Bukittan	Shop Sign/Menu (Gedung Sinar) Perpanjang	4,25 m x 1,7 m x 2 Sd	1 Unit	Sekeloa 2 Sunda Sariamas Suganah Parang	1.000.000	
05	07/01/2022	10 Desember 2021 s/d 14 Oktober 2022		PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jember No. 32 Rp. 32 Jember Jember 461, Bukittan	Shop Sign/Menu (Gedung Sinar) Perpanjang	4,25 m x 1,7 m x 2 Sd	1 Unit	Sekeloa 2 Sunda Sariamas Suganah Parang	1.000.000	25.000
06	05/01/2022	Januari 2022 s/d Desember 2022		KAD: Asherbang Kec. Suganah	Panel	4 m x 1,5 m x 2 Sd	1 Unit	Perumahan Kec. Suganah	500.000	
07	15/01/2022	10 Desember 2021 s/d 15 Maret 2022		PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jember No. 32 Rp. 32 Jember Jember 461, Bukittan	Shop Sign (Gedung Sinar) Perpanjang	3 m x 2 m x 2 Sd	30 Unit	Tembok di Kantor Kecamatan Pahl Sura	4.250.000	
08	15/01/2022	10 Desember 2021 s/d 14 Oktober 2022		PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jember No. 32 Rp. 32 Jember Jember 461, Bukittan	Shop Sign (Gedung Sinar) Perpanjang	4 m x 1,5 m x 2 Sd	1 Unit	Sekeloa 2 Suganah Parang	2.000.000	
09	15/01/2022	09 Maret 2022 s/d 26 April 2022		PT. Citra Media Nusantara Jl. Raya Jember No. 32 Rp. 32 Jember Jember 461, Bukittan	Shop Sign (Gedung Sinar) Perpanjang	3 m x 2 m x 2 Sd	1 Unit	Tembok di Kantor Kecamatan Pahl Sura	1.000.000	
10	18/04/2022	February 2022 s/d February 2022		KAD: Asherbang Lengkap (No. 1) Bing Parang	Shop Sign (Gedung Sinar) Perpanjang	3 m x 2 m x 2 Sd	3 Unit	Dangdang dangdang Kec. Suganah	2.500.000	
11	18/04/2022	12 April 2022 s/d 12 April 2022		Project Adf Jl. Raya Jember No. 32 Rp. 32 Jember	Shop Sign (Gedung Sinar) Perpanjang	3 m x 2 m x 2 Sd	1 Unit	Tembok di Kantor Kecamatan Pahl Sura	250.000	25.000
12	18/04/2022	12 April 2022 s/d 12 April 2022		Project Adf Jl. Raya Jember No. 32 Rp. 32 Jember	Shop Sign (Gedung Sinar) Perpanjang	3 m x 2 m x 2 Sd	1 Unit	Gedung di Kantor Kecamatan Pahl Sura	250.000	25.000
13	18/04/2022	12 April 2022 s/d 12 April 2022		Project Adf Jl. Raya Jember No. 32 Rp. 32 Jember	Shop Sign (Gedung Sinar) Perpanjang	3 m x 2 m x 2 Sd	1 Unit	Tembok di Kantor Kecamatan Pahl Sura	300.000	25.000


14	18/04/2022	17 April 2022 s/d 17 April 2022	Projek Adu Jln. Raya Jamb. Km 10.50 Sg. Jamb.	Shraping (Gading Sg. Jamb.) Pangajungan	1 m x 2 m x 2.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	750.000	67.777
15	18/04/2022	17 April 2022 s/d 17 April 2022	Projek Adu Jln. Raya Jamb. Km 10.50 Sg. Jamb.	Shraping (Gading Sg. Jamb.) Pangajungan	1 m x 2 m x 2.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	750.000	67.777
16	18/04/2022	17 April 2022 s/d 17 April 2022	Projek Adu Jln. Raya Jamb. Km 10.50 Sg. Jamb.	Shraping (Gading Sg. Jamb.) Pangajungan	1 m x 2 m x 2.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	750.000	67.777
17	18/04/2022	17 April 2022 s/d 17 April 2022	Projek Adu Jln. Raya Jamb. Km 10.50 Sg. Jamb.	Shraping (Gading Sg. Jamb.) Pangajungan	1 m x 2 m x 2.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	750.000	67.777
18	18/04/2022	17 April 2022 s/d 17 April 2022	Projek Adu Jln. Raya Jamb. Km 10.50 Sg. Jamb.	Shraping (Gading Sg. Jamb.) Pangajungan	1 m x 2 m x 2.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	750.000	67.777
19	18/04/2022	17 April 2022 s/d 17 April 2022	Projek Adu Jln. Raya Jamb. Km 10.50 Sg. Jamb.	Shraping (Gading Sg. Jamb.) Pangajungan	1 m x 2 m x 2.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	750.000	67.777
20	18/04/2022	17 April 2022 s/d 17 April 2022	Projek Adu Jln. Raya Jamb. Km 10.50 Sg. Jamb.	Shraping (Gading Sg. Jamb.) Pangajungan	1 m x 2 m x 2.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	750.000	67.777
21	25/05/2022	Apr 2022 s/d Apr 2022	Kul. G	Bilikul. Sg. Jamb.	1 m x 1.5 m x 2.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	670.000	200.070
22	05/04/2022	Apr 2022 s/d Apr 2022	Kul. G	Bilikul. Sg. Jamb.	1 m x 1.5 m x 2.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	670.000	200.070
22.1	11/05/2022	11/05/2022 s/d 30/04/2022	PT. Dina Media Nusantara Jl. Raya Jamb. Km 10.50 (Jamb.) Jamb. Kec. Bukittinggi	Kamera (Survei Lurah)	1 m x 1.5 m x 2.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	3.150.000	-
22.2	25/05/2022	9 Mei 2022 s/d 09 Mei 2022 (3 Bujur)	PT. Dina Media Nusantara Jl. Raya Jamb. Km 10.50 (Jamb.) Jamb. Kec. Bukittinggi	Blikul. Sg. Jamb. (Mkn Sg. Jamb.)	4 m x 6 m x 1.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	2.250.000	-
22.3	25/05/2022	9 Mei 2022 s/d 09 Mei 2022 (3 Bujur)	PT. Dina Media Nusantara Jl. Raya Jamb. Km 10.50 (Jamb.) Jamb. Kec. Bukittinggi	Blikul. Sg. Jamb. (Mkn Sg. Jamb.)	4 m x 6 m x 1.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	2.250.000	-
23	17/05/2022	Apr 2022 s/d Apr 2022	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	Bilikul. Sg. Jamb.	1 m x 1.5 m x 2.50	1 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	670.000	1.007.000
24	17/05/2022	19 Mei 2022 s/d 18 Mei 2022	PT. Dina Media Nusantara Jl. Raya Jamb. Km 10.50 (Jamb.) Jamb. Kec. Bukittinggi	Kamera (Survei Lurah)	1 m x 1.5 m x 2.50	100 Unit	Kejur. Mkn Kec. Jamb.	3.150.000	-

25	27/06/2022	April 2022 s.d 30 April 2022	PT. Dharma Media Nusantara Jl. Raya Jember Air Ma. 3. Sp. 1 Medan Jember 661, Bukittinggi	Bg Pita (Merk Samudra)	2 m x 2 m x 1,50	1 Unit	PT. Naga Mungking Kecamatan Pangkajene Kepulauan	250.000	212.500
26	27/06/2022	Maret 2022 s.d 31 Maret 2022	PT. Dharma Media Nusantara Jl. Raya Jember Air Ma. 3. Sp. 1 Medan Jember 661, Bukittinggi	Video Lense (Merk Samudra)	4 m x 6 m x 1,50	2 Unit	Mag. Koro Raya S. Jember Kec. Jember Tengah	2.250.000	1.325.000
27	07/06/2022	1 April 2022 s.d 31 Maret 2023	CV. Eka Media Media Jl. Soekarno Hatta No. 79 Kecamatan Tanjung	Billboard (Merk Samudra) Pangajene	4 m x 6 m x 1,50	1 Unit	Power System Kecamatan Merauke	1.250.000	767.500
28	07/06/2022	April 2022 s.d 31 Maret 2023	CV. Eka Media Media Jl. Soekarno Hatta No. 79 Kecamatan Tanjung	Billboard (Merk Samudra) Pangajene	4 m x 6 m x 1,50	1 Unit	Power System Kecamatan Merauke	2.250.000	922.500
29	07/06/2022	April 2022 s.d 31 Maret 2023	CV. Eka Media Media Jl. Soekarno Hatta No. 79 Kecamatan Tanjung	Billboard (Merk Samudra) Pangajene	4 m x 6 m x 1,50	1 Unit	4 Sp. 45 Kecamatan Pangajene Kecamatan Merauke	2.250.000	922.500
30	07/06/2022	1 April 2022 s.d 31 Maret 2023	CV. Eka Media Media Jl. Soekarno Hatta No. 79 Kecamatan Tanjung	Billboard (Merk Samudra) Pangajene	4 m x 6 m x 1,50	1 Unit	4 Sp. 45 Kecamatan Pangajene Kecamatan Merauke	1.250.000	767.500
31	28/06/2022	1 Juli 2022 s.d 31 Juni 2022	PT. A. Jember dengan Mitra Jl. Raya Jember No. 50 Pangajene	Billboard (Merk Samudra) Pangajene	1 m x 6 m x 1,50	20 Unit	Power System Kecamatan Merauke	500.000	
32	28/06/2022	1 April 2022 s.d 31 April 2022	PT. A. Jember dengan Mitra Jl. Raya Jember No. 50 Pangajene	Billboard (Merk Samudra) Pangajene	1 m x 6 m x 1,50	20 Unit	Power System Kecamatan Merauke	1.350.000	
33	31/05/2022	01 Juli 2022 s.d 31 Juni 2022	CV. Eka Media Media Jl. Soekarno Hatta No. 79 Kecamatan Tanjung	Billboard (Merk Samudra) Pangajene	2 m x 2 m x 1,50	20 Unit	Power System Kecamatan Merauke	2.835.000	
34	07/06/2022	30 April 2022 s.d 15 Juli 2022	PT. Dharma Media Nusantara Jl. Raya Jember Air Ma. 3. Sp. 1 Medan Jember 661, Bukittinggi	Billboard (Merk Samudra) Pangajene	3 m x 3 m x 1,50	10 Unit	PT. Dharma Kecamatan Pangajene	10.000.000	5.800.000
35	01/08/2022	Agust 2022 s.d Agustus 2022	PT. Dharma Media Nusantara Jl. Raya Jember Air Ma. 3. Sp. 1 Medan Jember 661, Bukittinggi	Spand. K. Jember (Merk Samudra)	1 m x 3 m x 2,50 1 m x 4 m x 2,50 1 m x 5 m x 2,50 50 cm x 1,95 cm x 1,50	26 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit	Terehori (Kecamatan) Pangajene Kecamatan Pangajene	25.200.000	
36	01/08/2022	01 Juli 2022 s.d 31 Desember 2022	ENDE Advertising Jember 661, Bukittinggi	Spand. K. Jember (Merk Samudra)	1,5 m x 1 m x 1,50 x 215 cm 45 cm x 32 cm x 1,50	25 Unit 25 Unit	Terehori (Kecamatan) Pangajene Kecamatan Pangajene	2.200.000	
37	01/08/2022	01 Agustus 2022 s.d 31 Juli 2022	CV. Adh Media Kreatif Jl. Pahlawan M. No. 100 Pangajene Pangajene	Spand. K. Jember (Merk Samudra)	1 m x 1 m x 2,50	1 Unit	Power System Kecamatan Pangajene	900.000	175.000
38	30/06/2022	14 April 2022 s.d 14 Juli 2022	CV. Timor Jl. Dharma Jember No. 1	Spand. K. Jember (Merk Samudra)	1 m x 2 m x 2,50	1 Unit	Power System Kecamatan Pangajene	600.000	

39	17/04/2022	1 Agustus 2022 s/d 31 Juli 2023	PT. Jember Denda Media Jl. Surodarmo, Jember, 66139 Ponorogo Ponorogo	Printed Kertas HVS, normal	4 m x 6 m x 1,500	12 Unit	Persepsi Kampanye Anti Narkoba	2.250.000	2.250.000
40	15/04/2022	1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022	Prada Adu Jl. Raya Jember s/d Km 10 Jember	Shop sign Kanvas, cetok	3 m x 2 m x 2,500	1 Unit	Tela Adu Kampanye Anti Narkoba	250.000	250.000
41	15/04/2022	12 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022	Prada Adu Jl. Raya Jember s/d Km 10 Jember	Shop sign Kanvas, cetok	2 m x 2 m x 2,500	1 Unit	Tela Adu Anti Narkoba Kampanye Anti Narkoba	250.000	250.000
42	15/04/2022	12 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022	Prada Adu Jl. Raya Jember s/d Km 10 Jember	Shop sign Kanvas, cetok	2 m x 2 m x 2,500	1 Unit	Tela Adu Anti Narkoba Kampanye Anti Narkoba	250.000	250.000
43	10/04/2022	10 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022	Prada Adu Jl. Raya Jember s/d Km 10 Jember	Shop sign Kanvas, cetok	2 m x 2 m x 2,500	1 Unit	Tela Adu Anti Narkoba Kampanye Anti Narkoba	250.000	250.000
44	15/04/2022	10 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022	Prada Adu Jl. Raya Jember s/d Km 10 Jember	Shop sign Kanvas, cetok	2 m x 2 m x 2,500	1 Unit	Tela Adu Anti Narkoba Kampanye Anti Narkoba	250.000	250.000
45	15/04/2022	10 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022	Prada Adu Jl. Raya Jember s/d Km 10 Jember	Shop sign Kanvas, cetok	2 m x 2 m x 2,500	1 Unit	Tela Adu Anti Narkoba Kampanye Anti Narkoba	250.000	250.000
46	15/04/2022	10 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022	Prada Adu Jl. Raya Jember s/d Km 10 Jember	Shop sign Kanvas, cetok	2 m x 2 m x 2,500	1 Unit	Tela Adu Anti Narkoba Kampanye Anti Narkoba	250.000	250.000
47	15/04/2022	04 Mei 2022 s/d 30 April 2023	PT. Media Jl. Pahlawan 1, Blok Baw Gedung Pondok	Shop sign Kanvas, cetok	2 m x 2 m x 2,500	1 Unit	Tela Adu Anti Narkoba Kampanye Anti Narkoba	1.200.000	1.200.000
48	15/04/2022	1 Agustus 2022 s/d 31 September 2022	PT. Ck 2 Media Indonesia Jl. Raya Jember s/d Km 10, s/d Km 1, Wadon Jember, Adu, Ponorogo	Vertical Banner Kanvas, cetok, Primer (Printed, Kanvas)	1,0 m x 3 m x 1,500 1,0 m x 3 m x 1,500	100 Unit 300 Unit	Tela Adu di Kabupaten Lima Puluh Kota	5.700.000	-
49	15/04/2022	15 September 2022 s/d 15 Desember 2022	CV. Ray Advertising dan Produksi Jl. Widyadarmasari s/d Km 10,16 Pondok	Poster (Kanvas, cetok)	1,2 m x 4 m x 1,500	1 Unit	Kampanye Anti Narkoba	250.000	250.000
50	15/04/2022	1 Mei 2022 s/d 30 April 2023	CV. GEM BUD BANGI Jl. Raya Merdeka No. 88 B - 002 HIRUCCI Kaw. Gedung Pondok	Poster (Kanvas, cetok, Garam Merah)	2 m x 3,5 m x 1,500	4 Unit	Tela Adu Anti Narkoba Kampanye Anti Narkoba	2.300.000	2.300.000
51	15/04/2022	15 Agustus 2022 s/d 14 September 2022	PT. Anindo Bangun Mitra Jl. Smp I baru HIRUCCI Pondok	Poster (Kanvas, cetok, Garam Merah)	2 m x 6 m x 1,500	2 Unit	Tela Adu di Kabupaten Lima Puluh Kota	700.000	-
52	15/04/2022	20 Agustus 2022 s/d 17 September 2022	PT. Anindo Bangun Mitra	Poster (Kanvas, cetok, Garam Merah)	2 m x 6 m x 1,500	2 Unit	Tela Adu di Kabupaten Lima Puluh Kota	1.000.000	-

No	Tgl. Pengadaan	Tgl. Pengadaan	Spes. S.H	Perusahaan	Spesifikasi	Jumlah	Uraian	Estimasi Harga	Estimasi Harga
87	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	SPK Al. Menger Sec. BUKH	Spesifikasi Perusahaan	1 m x 1 m x 1.5 m	1 Unit	Papan Pembatas Kecamatan Sukoh	150.000	
88	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	SPK Al. Menger Sec. Pukulumbuh	Spesifikasi Perusahaan	5 m x 1 m x 1.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Pukulumbuh	225.000	
89	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	SPK Al. Menger Sec. Mungke	Spesifikasi Perusahaan	1 m x 1 m x 1.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Mungke	150.000	
90	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	SPK Al. Menger Sec. Lurah Sagar Puluha	Spesifikasi Perusahaan	1 m x 1 m x 2.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Sagar Puluha	375.000	
91	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	SPK Al. Menger Sec. Sungsang	Spesifikasi Perusahaan	1 m x 1 m x 2.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Sungsang	375.000	
92	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	SPK Tanah Benih Sec. Pukulumbuh	Spesifikasi Perusahaan	2 m x 2 m x 1.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Pukulumbuh	300.000	
93	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	SPK Tambak Jack Kec. Pukulumbuh	Spesifikasi Perusahaan	1 m x 0.75 m x 2.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Pukulumbuh	112.500	
94	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	Batas-batas dan Sec. Pukulumbuh	Spesifikasi Perusahaan	1.5 m x 1 m x 2.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Pukulumbuh	375.000	
95	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	Batas-batas dan Sec. Lurah Sagar Puluha	Spesifikasi Perusahaan	1.5 m x 1 m x 2.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Sagar Puluha	375.000	
96	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	SPK Sungsang Kec. Hantu	Spesifikasi Perusahaan	1 m x 1 m x 1.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Hantu	150.000	
97	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	Batas-batas dan Kecamatan Sungsang	Spesifikasi Perusahaan	1 m x 2 m x 1.5 m 1.5 m x 2.5 m x 1.5 m	1 Unit 1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Sungsang	2.350.000	
98	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	Spesifikasi Kec. Hantu	Spesifikasi Perusahaan	1 m x 2.5 m x 2.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Hantu	1.500.000	
99	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	Spesifikasi	Spesifikasi Perusahaan	0.5 m x 1 m x 2.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Sungsang	150.000	
100	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	CV. Bangun Kec. Sungsang	Spesifikasi Perusahaan	1 m x 1 m x 2.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Sungsang	150.000	
101	07/11/2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	CV. Hiper Jln. Sungsang No. 17 Pangkal	Spesifikasi Perusahaan	1 m x 2 m x 1.5 m 1 m x 4 m x 1.5 m 0.8 m x 4 m x 1.5 m 1 m x 5 m x 1.5 m	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Sungsang	1.055.000	624.250
102	07/11/2022	01 November 2022 s/d 31 Desember 2022	Spesifikasi Kec. Sungsang	Spesifikasi Perusahaan	1 m x 2 m x 2.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Sungsang	1.000.000	1.025.000
103	07/11/2022	25 November 2022 s/d 31 Desember 2022	Batas-batas dan Kecamatan Sungsang	Spesifikasi Perusahaan	1.5 m x 1.5 m x 2.5 m	1 Unit	Spesifikasi Kecamatan Sungsang	750.000	675.000

		Lampiran Nomor 014/PM/2022/10/41/Unit Masyarakat Tani dan Peternak Kabupaten Karangasemi		Detail Spesifikasi		Merk dan Jenis/Kelebihan/Spesifikasi		Merk dan Jenis/Kelebihan/Spesifikasi	
105	14/12/2022	Desember 2022 s.d Desember 2022	Proyek Auto Jl. Raya Jember Air Ngada Karangasemi	Shimadzu (Vial) (Botol Plastik) Kapasitas 100ml	10 ml x 4 ml x 250 ml 10 ml x 3 ml x 250 ml	3 Unit 1 Unit	Toko Lantai Loka Sampah Karangasemi	2.000.000	
106	14/12/2022	26 October 2022 s.d 27 October 2022	KAV Perumahan Lingkungan: Perumahan Pasiaji	Billboard 2x3 m (Kerangka Baja) Kapasitas 100kg	10 m x 2 m x 250 ml	1 Unit	Toko Lantai Loka Sampah Karangasemi	6.500.000	3.210.000
106	14/12/2022	01 November 2022 s.d 03 Oktober 2022	PT. Dharma Karya Nusantara Jl. Raya Jember Air Ngada Km. 10,5 Karangasemi, Kabupaten Karangasemi	Shimadzu (Vial) (Botol Plastik)	10 ml x 2 ml x 250 ml	25 Unit	Toko Lantai Loka Sampah Karangasemi	450.000	3.250.000
107	14/12/2022	01 November 2022 s.d 03 Oktober 2022	PT. Dharma Karya Nusantara Jl. Raya Jember Air Ngada Km. 10,5 Karangasemi, Kabupaten Karangasemi	Shimadzu (Vial) (Botol Plastik)	10 ml x 2 ml x 250 ml 10 ml x 1 ml x 250 ml	10 Unit 10 Unit	Toko Lantai Loka Sampah Karangasemi	4.800.000	3.250.000
108	14/12/2022	13 November 2022 s.d 14 November 2022	Unit Perumahan Jl. Raya Mangrove Karangasemi Karangasemi	Shimadzu (Vial) (Botol Plastik)	10 ml x 2 ml x 250 ml	2 Unit	Toko Lantai Loka Sampah Karangasemi	450.000	412.500
109	14/12/2022	13 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023	PT. Widyadharma Jl. Mangrove Karangasemi Karangasemi	Shimadzu (Vial) (Botol Plastik)	10 ml x 2 ml x 250 ml	1 Unit	Toko Lantai Loka Sampah Karangasemi	300.000	
110	14/12/2022	14 November 2022 s.d 11 November 2022	PT. Alameda Karya Nusantara Jl. Raya Karangasemi Km. 10,5 Karangasemi	Shimadzu (Vial) (Botol Plastik)	10 ml x 2 ml x 250 ml	5 Unit	Toko Lantai Loka Sampah Karangasemi	2.000.000	339.333
111	14/12/2022	14 November 2022 s.d 11 November 2022	PT. Alameda Karya Nusantara Jl. Raya Karangasemi Km. 10,5 Karangasemi	Shimadzu (Vial) (Botol Plastik)	10 ml x 2 ml x 250 ml	1 Unit	Toko Lantai Loka Sampah Karangasemi	2.200.000	2.200.000
117	14/12/2022	05 Desember 2022 s.d 05 Desember 2022	Proyek Auto Jl. Raya Jember Air Ngada Karangasemi	Shimadzu (Vial) (Botol Plastik)	10 ml x 2 ml x 250 ml	1 Unit	Toko Lantai Loka Sampah Karangasemi	900.000	400.000
Jumlah								280.747.300	48.957.469

Surabaya, Januari 2023
Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Jember

YAN HARIYANTO, MM
NIP. 1963011719830011006

Utang Kontraktual TA. 2022

UTANG KONTRAKTUAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENAYATAN RUANG T.A 2022

NO	KODE REALISASI	RINCIAN REKENING		JUMLAH		REALISASI	SSA PASU	UTANG	KETERANGAN
A	B	C		D	E	F	G	H	
				ANGGARAN		ANGGARAN	KONTRAKTUAL DI		
1	1.05.10.2.01.02	Bekasmasialater	Rekomod. Ls. Bnng (DA) Kspt...	Rp. 4.420.000.000	Rp. 4.420.000.000	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
2	1.05.10.2.01.03	Bekasmasialater	Rekomod. Ls. Bnng (DA) Kspt 2	Rp. 9.000.000.000	Rp. 1.500.000.000	Rp. 7.400.000.000	Rp. 6.000.000.000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
3	1.05.10.2.01.04	Bekasmasialater	Rekomod. Ls. Bnng (DA) Kspt 3	Rp. 9.000.000.000	Rp. 1.000.000.000	Rp. 4.000.000.000	Rp. 4.000.000.000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
4	1.05.10.2.01.08	Bekasmasialater	Sekeloa - Kota Tangah (E. 53)	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.314.400.000	Rp. 885.619.100	Rp. 445.000.000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
5	1.05.10.2.01.09	Bekasmasialater	Pembangunan Jalan Aspal Beton Aspal - Gedung (Fadeng) (Kas. Bk. p...)	Rp. 300.000.000	Rp. 504.700.000	Rp. 195.740.000	Rp. 105.700.000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
6	1.05.10.2.01.08	Bekasmasialater	Pembangunan Jalan Aspal Beton Aspal - Kampung (Kas. Bk. p...)	Rp. 50.000.000	Rp. 20.915.000	Rp. 11.700.000	Rp. 62.850.000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
7	1.05.10.2.01.08	Bekasmasialater	Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 70.000.000	Rp. 50.915.000	Rp. 18.000.000	Rp. 118.000.000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
8	1.05.10.2.01.08	Bekasmasialater	Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 100.000.000	Rp. -	Rp. 100.000.000	Rp. 90.000.000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
9	1.05.10.2.01.08	Bekasmasialater	Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 100.000.000	Rp. -	Rp. 100.000.000	Rp. 90.000.000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
10	1.05.10.2.01.08	Bekasmasialater	Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 100.000.000	Rp. -	Rp. 100,000,000	Rp. 85,000,000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
11	1.05.10.2.01.08	Bekasmasialater	Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 65,000,000	Rp. -	Rp. 65,000,000	Rp. 64,725,000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
12	1.05.10.2.01.05	Bekasmasialater	Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 150,000,000	Rp. -	Rp. 150,000,000	Rp. 145,000,000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
13	1.05.10.2.01.05	Bekasmasialater	Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 100,000,000	Rp. -	Rp. 100,000,000	Rp. 99,714,000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
14	1.05.10.2.01.05	Bekasmasialater	Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 150,000,000	Rp. -	Rp. 150,000,000	Rp. 149,640,000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
15	1.05.10.2.01.08	Bekasmasialater	Pembangunan Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 50,000,000	Rp. -	Rp. 50,000,000	Rp. 50,000,000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
16	1.05.10.2.01.08	Bekasmasialater	Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 100,000,000	Rp. -	Rp. 100,000,000	Rp. 100,000,000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
17	1.05.10.2.01.10	Pembangunan Berkeadilan	Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 150,000,000	Rp. 55,943,800	Rp. 125,056,200	Rp. 125,000,000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)
18	1.05.10.2.01.10	Pembangunan Berkeadilan	Jalan Kain (Kas. Bk. p...)	Rp. 100,000,000	Rp. 25,596,800	Rp. 74,403,200	Rp. 80,000,000	Utang Modal (Kas. Bk. p...)	(5.2.04.01.01.0003)

19	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan Kabupaten Segmen R 121 Lerong Talaweh Negeri Mungo	Rp	120.000.000	Rp	38.965.000	Hp	91.035.000	Rp	90.815.000	Belanja Modal Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)
20	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rabot Helel Bahu Jalan Kabupaten Segmen R 121 Lerong Pinarur Tingsi Negeri Mungo	Rp	50.000.000	Hp	-	Rp	50.000.000	Rp	49.847.000	Belanja Modal Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)
21	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan Maimun P. Kanyapa	Hp	150.000.000	Hp	-	Rp	150.000.000	Rp	149.695.000	Belanja Modal Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)
22	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan Simp. Amanah Tabok Parang	Hp	200.000.000	Rp	-	Rp	200.000.000	Hp	199.700.000	Belanja Modal Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)
23	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Sel. Lurah BT. Kanomang	Rp	65.000.000	Rp	-	Rp	65.000.000	Hp	64.510.000	Belanja Modal Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)
24	1.03.10.2.01.12	Pemeliharaan Berkala Jalan	S. Pasar Baru Lubuk Naga	Hp	100.000.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Hp	99.900.000	Belanja Modal Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)
25	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Saser 1	Rp	4.700.000.000	Rp	5.864.117.496	Rp	625.882.504	Rp	576.958.504	Belanja Modal Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)
26	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 3	Rp	7.500.000.000	Rp	498.791.000	Rp	2.301.237.000	Rp	1.699.044.000	Belanja Modal Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)
27	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jembatan Simp. Sugiran (Tuak Amah)	Hp	850.000.000	Rp	588.594.807	Rp	261.405.193	Hp	91.459.193	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)
28	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Jarak Cerek Lorong Koto Marapak Negeri Pindam Gedang Kecamatan Gunung Gajah	Rp	200.000.000	Rp	59.844.500	Rp	140.155.500	Rp	139.870.500	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)
29	1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Relasi Jembatan Lubuk Naga	Rp	125.000.000	Hp	-	Rp	125.000.000	Rp	123.200.000	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)
30	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Drainase Jalan Kelurahan Rias Perung Bukit - Rongh Negeri Sungai Kemuning	Rp	144.000.000	Rp	41.123.400	Rp	102.876.600	Hp	100.644.600	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kota (5.2.04.01.01.0003)
31	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Drainase Bukit Ayik - Simp. Sugira Kac. Sugrak	Rp	94.000.000	Rp	26.153.500	Rp	67.846.500	Rp	65.691.500	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kota (5.2.04.01.01.0003)
32	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Drainase Jalan Pacang Bawak (Shu) Jalan Banda Dalem	Rp	194.000.000	Rp	46.119.900	Hp	107.880.100	Rp	107.613.100	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kota (5.2.04.01.01.0003)
33	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Drainase Jalan Pasar Ujung Negeri Muaro Pah	Rp	65.000.000	Hp	-	Rp	65.000.000	Rp	64.843.000	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kota (5.2.04.01.01.0003)
34	1.03.08.2.01.01	Perencanaan, Pembangunan	Perencanaan Kantor Dinas Pendidikan	Hp	100.000.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	99.782.000	Belanja Modal Gedung (5.2.03.01.01.0001)
35	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan	Perencanaan Kantor Mall Pelayanan Publik	Rp	70.000.000	Rp	-	Rp	70.000.000	Hp	69.826.000	Belanja Modal Gedung (5.2.03.01.01.0001)
36	1.03.02.2.02.08	Pertinggalan Jaringan Triptal Pamukaan	Triptal Kuto-Kadlak Negeri Kanyang Kuo Luak	Rp	87.000.000	Rp	-	Hp	87.000.000	Rp	85.765.000	Belanja Modal Bangunan Pembawa Triptal (5.2.04.02.01.0003)

32	1.03.02.2.02.06	Penyusunan Anggaran (Rendemen)	Anggaran Pembangunan Sampang 5 tahun, Rangka Mekanisme BAKG	Rp	87.000.000	Rp	-	Rp	87.000.000	Rp	87.000.000	Jalanja Model Anggaran Perencanaan (15.1.02.02.03.0003)
33	1.03.02.2.02.07	Penyusunan Anggaran (Rendemen) Sampang Pengembangan Jaringan Jalan dan Perencanaan Teknik Pengangkutan Jalan dan Revitalisasi	Penyusunan Pembangunan Jalan Lokal	Rp	75.000.000	Rp	-	Rp	75.000.000	Rp	74.000.000	Beasiswa KKN dan Perencanaan Pengembangan Desa - Kabupaten Sampang (15.1.02.02.03.0003)
34	1.03.02.2.02.08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan	Penyusunan Anggaran Jalan Lokal Sektor I	Rp	100.000.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	99.775.000	Beasiswa KKN dan Perencanaan Pengembangan Desa - Kabupaten Sampang (15.1.02.02.03.0003)
40	1.03.02.2.02.09	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan	Penyusunan Anggaran Sektor 2	Rp	77.000.000	Rp	-	Rp	77.000.000	Rp	76.430.000	Beasiswa KKN dan Perencanaan Pengembangan Desa - Kabupaten Sampang (15.1.02.02.03.0003)
41	1.03.02.2.02.10	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan	Penyusunan Anggaran Sektor 1	Rp	100.000.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	99.430.000	Beasiswa KKN dan Perencanaan Pengembangan Desa - Kabupaten Sampang (15.1.02.02.03.0003)
42	1.03.02.2.02.11	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan	Penyusunan Anggaran dan Mekanisme Anggaran Rencana Desa Sampang	Rp	50.000.000	Rp	-	Rp	50.000.000	Rp	49.850.000	Beasiswa KKN dan Perencanaan Pengembangan Desa - Kabupaten Sampang (15.1.02.02.03.0003)
43	1.03.02.2.02.15	Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran	Kontribusi (15.1.02.02.03.0003) Rencana Desa Sampang	Rp	50.000.000	Rp	14.560.000	Rp	35.440.000	Rp	34.875.000	Beasiswa KKN dan Perencanaan Pelaksanaan Anggaran - Kabupaten Sampang (15.1.02.02.03.0003)
44	1.03.02.2.02.16	Penyusunan SWM Jaringan Perumahan Kawasan Perkotaan	Penyusunan Anggaran Air Bersih Sampang Gunung Karang Liris S.1.1.1	Rp	7.000.000	Rp	-	Rp	7.000.000	Rp	6.900.000	Saluran Air Bersih kepada Rumah dan Warga Kelurahan, Kecamatan Bontol Kabupaten Sampang (15.1.03.05.03.0003)
45	1.03.02.2.02.17	Penyusunan SWM Jaringan Perumahan Kawasan Perkotaan	Saluran Air Bersih Jaringan Perumahan Perkotaan	Rp	2.500.000	Rp	-	Rp	2.500.000	Rp	2.425.000	Saluran Air Bersih kepada Rumah dan Warga Kelurahan, Kecamatan Bontol Kabupaten Sampang (15.1.03.05.03.0003)
46	1.03.02.2.02.18	Penyusunan SWM Jaringan Perumahan Kawasan Perkotaan	Reklamasi SWM Kelurahan Puteh Kute	Rp	350.000.000	Rp	300.200.000	Rp	49.800.000	Rp	175.540.000	Beasiswa KKN dan Perencanaan Pengembangan Desa - Kabupaten Sampang (15.1.02.02.03.0003)
47	1.03.02.2.02.19	Penyusunan / Pelaksanaan Sistem Pengaliran Air Limbah Perumahan Kawasan Perkotaan	Saluran Pembuangan Limbah ke Kolong Jalan Lokal Perkotaan	Rp	7.500.000	Rp	-	Rp	7.500.000	Rp	7.325.000	Saluran Pembuangan kepada Rumah dan Warga Kelurahan, Kecamatan Bontol Kabupaten Sampang (15.1.03.05.03.0003)

48	1.01.06.1.01.12	Peningkatan / Perluasan Ruang Pengeduk dan Limbah Organik Skala Permukiman	Peningkatan RTD Limbah Organik dengan Sewah	Rp	1.500.000	Rp	-	Rp	1.500.000	Rp	1.490.000	Buku dan Lembar Kerja dengan format dan Lembar Kerja. Surabaya: Institut Sosial Kemasyarakatan (1.1.05.05.03.0012)
49	1.03.05.1.01.12	Peningkatan / Perluasan Sistem Pengaliran Air Limbah Terpusat di area perumahan	WC Umum, 12000 Liter, dengan Sewah, Ruang Saling Koordinasi Capur X	Rp	24.000.000	Rp	-	Rp	24.000.000	Rp	24.000.000	Buku dan Lembar Kerja dengan format dan Lembar Kerja. Surabaya: Institut Sosial Kemasyarakatan (1.1.05.05.03.0012)
50	1.01.05.1.01.12	Peningkatan / Perluasan Sistem Pengaliran Air Limbah Terpusat Skala Perumahan	Peningkatan Tempat Sewah Skala RT/ RW/ Kelurahan	Rp	90.000.000	Rp	-	Rp	90.000.000	Rp	89.850.000	Buku dan Lembar Kerja dengan format dan Lembar Kerja. Surabaya: Institut Sosial Kemasyarakatan (1.1.05.05.03.0012)
51	1.08.10.1.01.03	Peningkatan Sistem, Ketersediaan dan Kualitas Pengaliran Air Limbah Terpusat Perumahan Tersebut yang terdapat di area perumahan	Peningkatan / Perluasan Air Limbah Terpusat (Agenda)	Rp	107.000.000	Rp	-	Rp	100.000.000	Rp	99.850.000	Buku dan Lembar Kerja dengan format dan Lembar Kerja. Surabaya: Institut Sosial Kemasyarakatan (1.1.05.05.03.0012)
				Rp	16.421.445.100	Rp	-	Rp	21.022.050.000	Rp	19.149.000.000	



UTANG KONTRAKTUAL DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE PENGENING	BENCAN REKENING	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA PIAGU ANGGARAN	UTANG KONTRAKTUAL DIBERAKA	KETERANGAN
A	B	C	D	E	F	G	H
1	01.10.5.2.01.02.0001	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gedung Jember KEMKES dan UPT Kesehatan Jember Kesehatan Layanan Primair Pelayanan Gedung Jember UPT dan UPT Kesehatan Degeran Kesehatan	Rp 5.591.961.000	Rp 5.590.011.201	Rp 1.074.270.807	Rp 45.800.000	Pembayaran 100% Saluran Pengobatan Pasien PT dari rumah kesehatan
2	01.10.5.2.01.02.0002	Gedung Jember KEMKES dan UPT Kesehatan Jember Kesehatan Layanan Primair Pelayanan Gedung Jember UPT dan UPT Kesehatan Degeran Kesehatan	Rp 290.790.494	Rp 290.790.494	Rp 183.515.501	Rp 107.275.000	Pembayaran 100% Pelayanan Lajuwan Rumah Kesehatan Jember Nagari Kabupaten
3	01.10.5.2.01.02.0003	Gedung Jember KEMKES dan UPT Kesehatan Jember Kesehatan Layanan Primair Pelayanan Gedung Jember UPT dan UPT Kesehatan Degeran Kesehatan	Rp 248.800.000	Rp 248.800.000	Rp 1.450.000	Rp 3.000.000	Pembayaran 100% Saluran Pengobatan Pasien dari rumah kesehatan Lajuwan
				Rp 6.079.551.694	Rp 4.198.661.711	Rp 341.175.000	



UTANG KONTRAKTUAL DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN T.A 2022

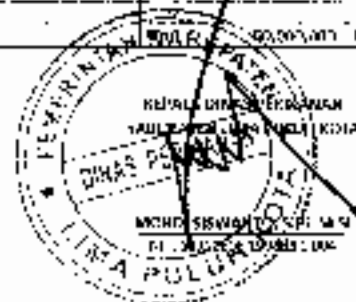
NOI	KODE REKENING	BUNCIAN REKENING	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN	UTANG KONTRAKTUAL M NPIAEN	KETERANGAN	
A	B	C	D	F	F	G	H	
1	5.27.02.2.01.0	Belanja Modal Alat-Alat Aneka	Belanja Pengadaan Cantolan	Rp 45.000.000	0	Rp45.000.000	Rp 45.000.000	Pengadaan Mula Pemeliharaan, Perbaikan, Pelan Papan/Beker/Anaman Skala Kecil (5.27.02.01.01.0000)
2	5.27.01.02.00.00	Jelajah Jasa Konsultansi Aneka, Jasa Perencanaan Tengara Gedung Rangka Gedung Paksi	Jelajah Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur dan Desain Arsitektural	Rp5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp 4.031.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Gedung Lainnya (5.27.01.02.00.00)
3	5.27.01.2.00.00	Belanja Perbaikan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor	Belanja Renda Gedung Paksi	Rp64.450.000	0	Rp64.450.000	Rp64.450.000	Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Gedung Lainnya (5.27.01.02.00.00)
4	5.27.02.2.00.00	Belanja Modal Ternak Lainnya	Belanja Ternak Kambing, sebanyak 5 ekor untuk OP II Rehabilitasi dan Aneka Ternak	Rp94.200.000	0	Rp94.200.000	Rp94.200.000	Pengadaan Sapi/Sabit Ternak dan Ternak Kambing Ternak yang jumlahnya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota/di lain (5.27.02.02.00.00)
5	5.27.01.2.02.00	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya, Belanja Papan Angkutan, Perahu, Board	Belanja Belanja Kandang Paksi	Rp6.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Pembangunan Renda Renda dan Perbaikan Pasaran Paksi dan Lainnya (5.27.01.02.02.00)
					Rp0	Rp 248.384.250	Rp 221.697.500	

KPPAAL DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



TUNDA BAYAR DINAS PERIKANAN T.A 2022

NO	KOD REKENING	RINCIAN RENCING	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	NISAPASU ANGGARAN	TUNDA BAYAR DI NEGERA	KETERANGAN
A	B	C	D	E	F	G	H
	2.25.02.2.01.01	Biaya Honorarium dan Biaya Lain-lain Untuk Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat dan Masyarakat Lokal (Kategori 2.25.02.2.01.01)	Rp. 50.000.000	Rp.	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Belanja Eksternal Pengabdian Masyarakat Penganggaran Sum. of 61 (1.2.6) 70.05.0079
			Rp. 50.000.000	Rp.	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	



UTANG KONTRAKTUAL DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM T.A 2022

NO	KODE REKENING	BINCAN REKENING	JUMLAH ANGGARAN	REVISI	RISIKO PANGSABAY	UTANG KONTRAKTUAL DI NFRACA	KETERANGAN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	01.1.01.01.1.01.01.01.001	Pemeliharaan/teknis/instalasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Usaha Pemeliharaan Bangunan Gedung-Pemeliharaan Gedung, Tempat Kerja, Bangunan Gedung Lainnya	Rp 100.000.000	Rp 48.755.000	Rp 100.000.000	Rp 59.720.178	Usaha Pemeliharaan Bangunan Gedung
4	01.1.01.01.1.01.01.01.001	Pemeliharaan/teknis/instalasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Usaha Pemeliharaan Bangunan Gedung-Semua Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp 125.000.000	Rp 48.225.304	Rp 100.000.000	Rp 59.225.304	Usaha Pemeliharaan Bangunan Gedung
7	01.1.01.01.1.01.01.01.001	Fasilitas Jasa Mikro-Media, Jasa Kelembagaan Pengembangan Produk dan Pengembangan Pemukiman, NPM, Kade Cukai dan Teknologi	Usaha Fasilitas Pengembangan	Rp 40.000.000	Rp	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Usaha Fasilitas Pengembangan Produk dan Pengembangan Pemukiman, NPM, Kade Cukai dan Teknologi
7	01.1.01.01.1.01.01.01.001	Fasilitas Jasa Mikro-Media, Jasa Kelembagaan Pengembangan Produk dan Pengembangan Pemukiman, NPM, Kade Cukai dan Teknologi	Usaha Fasilitas Pengembangan	Rp 100.000.000	Rp 48.225.304	Rp 100.000.000	Rp 59.225.304	Usaha Fasilitas Pengembangan Produk dan Pengembangan Pemukiman, NPM, Kade Cukai dan Teknologi
5	01.1.01.01.1.01.01.01.001	Pengadaan barang/jasa bus Pengangkutan	Usaha Jasa Pengadaan/Pemeliharaan/Perbaikan/Perbaikan Teknik Kendaraan	Rp 100.000.000	Rp 48.225.304	Rp 100.000.000	Rp 59.225.304	Usaha Jasa Pengadaan/Pemeliharaan/Perbaikan/Perbaikan Teknik Kendaraan
6	01.1.01.01.1.01.01.01.001	Pengadaan barang/jasa bus Pengangkutan	Usaha Jasa Pengadaan/Pemeliharaan/Perbaikan/Perbaikan Teknik Kendaraan	Rp 100.000.000	Rp 48.225.304	Rp 100.000.000	Rp 59.225.304	Usaha Jasa Pengadaan/Pemeliharaan/Perbaikan/Perbaikan Teknik Kendaraan
7	01.1.01.01.1.01.01.01.001	Pengadaan barang/jasa bus Pengangkutan	Usaha Jasa Pengadaan/Pemeliharaan/Perbaikan/Perbaikan Teknik Kendaraan	Rp 100.000.000	Rp 48.225.304	Rp 100.000.000	Rp 59.225.304	Usaha Jasa Pengadaan/Pemeliharaan/Perbaikan/Perbaikan Teknik Kendaraan
8	01.1.01.01.1.01.01.01.001	Pengadaan barang/jasa bus Pengangkutan	Usaha Jasa Pengadaan/Pemeliharaan/Perbaikan/Perbaikan Teknik Kendaraan	Rp 100.000.000	Rp 48.225.304	Rp 100.000.000	Rp 59.225.304	Usaha Jasa Pengadaan/Pemeliharaan/Perbaikan/Perbaikan Teknik Kendaraan
				Rp 419.192.240	Rp 546.285.150	Rp 488.132.240		



UTANG KONTRAKTUAL BAPETMBANG T.A 2022

NO	KODE REKENING	RINGKAS REKENING		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN	UTANG KONTRAKTUAL DI NERACA	KETERANGAN
A	B	C		D	E	F	G	H
1	5.01.03.2003.04	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp 30.000.000	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	20.000.000	Pelaksanaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Strategi Sektoral Kabupaten (SSK) (5.1.02.02.01.0029)
2	5.01.03.2003.05	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Geospasial	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp 13.500.000	Rp 5.000.000	Rp 8.500.000	5.000.000	Pelaksanaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perikanan (RKP) (5.1.02.02.01.0029)
3	5.05.22.2003.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp 54.000.000	Rp 37.000.000	Rp 17.000.000	37.000.000	Pelaksanaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Pelaksanaan Riset/ Penelitian dan Pengembangan Dokumen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Lingsar Puluh Kabupaten 2022 (5.1.02.02.01.0029)
4	5.01.03.2003.06	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Retainer, Honorarium, dan Konsultansi	Rp 20.000.000	Rp 5.000.000	Rp 15.000.000	15.000.000	Pelaksanaan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Retainer/ Honorarium/ Konsultansi Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (5.1.02.02.01.0029)
				Rp 117.500.000	Rp 71.200.000	Rp 46.300.000	Rp 46.300.000	



UTANG KONTRAKTUAL DINAS PEMADAM KBAKARAN T.A 2022

NO	KODE REKENING	RINCIAN REKENING	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN	UTANG KONTRAKTUAL DI NERACA	KETERANGAN
A	B	C	D	E	F	G	H
1	1.05.04.2.04.1.35.04.2.04.03.5 2.02.07.01.00.06	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Rukwan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Peralatan	Pembelian Barang Modal Rp 73.300.000	Rp -	Rp 73.000.000	Rp 70.000.000	Selanjutnya Modal Alat Angkut dan Busuk Dermolux (5.2.02.02.01.0003)
2	1.05.1.05.0.00.0.03.03.04.2.01.06.5 2.03.01.01.0001	Sub Keg. Pengadaan sarana dan Peralatan Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Pembangunan Prawn Bukit Isman Rp 208.000.000	Rp 29.802.000	Rp 178.198.000	Rp 177.695.000	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (5.2.03.01.01.0001)
				Rp 29.802.000	Rp 251.198.000	Rp 247.695.000	



LITANG KONTRAKTUAL DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODIF REKENING	RINCIAN REKENING		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN	UTANG KONTRAKTUAL DI NERACA	KETERANGAN
A	B	C		D	E	F	G	H
1	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalin, Lintas Darat Rambu Parkir dan Rambu Portable Lainnya	Rp 56.700.000	Rp -	Rp 56.700.000	Rp 50.447.496	Belanja Pemeliharaan Rambu Rambu Lalin Lintas Darat Rambu Parkir dan Rambu Portable Lainnya
2	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Rp 143.500.000	Rp -	Rp 143.500.000	Rp 143.000.000	Belanja Pemeliharaan Perengkapan Jalan
					Rp -	Rp 200.200.000	Rp 199.447.496	



 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESHAWAR KOTA
M. DARMAWIJAYA, SH
 N. P. 19530501 2000031. 006

